



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**TAHUN 2017**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah .....	3
<b>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)</b> .....	24
A. Visi Dan Misi .....	24
B. Tujuan dan Sasaran.....	25
C. Strategi dan Arah Kebijakan.....	28
D. Prioritas Pembangunan Daerah.....	35
E. Tema Prioritas Pembangunan Daerah.....	38
<b>BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	48
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	48
B. Pengelolaan Belanja/Keluaran Daerah.....	55
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b> .....	62
A. Urusan Wajib .....	62
▪ Urusan Pendidikan .....	62
▪ Urusan Kesehatan.....	95
▪ Urusan Lingkungan Hidup .....	158
▪ Urusan Pekerjaan Umum .....	182
▪ Urusan Penataan Ruang .....	196
▪ Urusan Perencanaan Pembangunan .....	198
▪ Urusan Perumahan .....	212
▪ Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	217
▪ Urusan Penanaman Modal .....	229
▪ Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	236
▪ Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	248
▪ Urusan Ketenagakerjaan.....	253
▪ Urusan Ketahanan Pangan .....	260
▪ Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	272
▪ Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	280
▪ Urusan Perhubungan .....	282
▪ Urusan Komunikasi dan Informatika.....	291
▪ Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	301
▪ Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian .....	322
▪ Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	431
▪ Urusan Sosial .....	442
▪ Urusan Kebudayaan.....	467
▪ Urusan Kearsipan.....	473
▪ Urusan Perpustakaan.....	482

B.	Urusan Pilihan .....	495
▪	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	495
▪	Urusan Pertanian.....	504
▪	Urusan Kehutanan.....	516
▪	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	532
▪	Urusan Pariwisata .....	545
▪	Urusan Industri .....	555
▪	Urusan Perdagangan .....	564
▪	Urusan Ketransmigrasian .....	570
<b>BAB V</b>	<b>PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>572</b>
A.	Dana Dekonsentrasi .....	572
B.	Tugas Pembantuan .....	593
<b>BAB VI</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....</b>	<b>599</b>
A.	Kerjasama Antar Daerah.....	599
B.	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri.....	599
C.	Koordinasi dengan Instansi Vertikal .....	623
D.	Pembinaan Batas Wilayah.....	623
E.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	629
F.	Pengelolaan Kawasan Khusus .....	635
G.	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum .....	636
H.	Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.....	639
F.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah.....	639
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>641</b>
 <b>LAMPIRAN Tabel Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun 2017</b>		

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Akhir Tahun Anggaran 2017 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun sebagai salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menggambarkan arah kebijakan umum pemerintah daerah sepanjang tahun 2017, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Selain itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini juga menggambarkan kinerja tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*.

Kami menyadari bahwa, selain mendatangkan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2017 masih terdapat hal-hal yang membutuhkan upaya peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu, catatan strategis dan rekomendasi dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan masukan penting bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Kami berharap semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman serta bahan evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada waktu mendatang.

Sekian dan terima kasih.

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pangkalpinang,                      Maret 2018

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**ERZALDI ROESMAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang dibentuk di era reformasi di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Pada awal terbentuknya, di provinsi ini terdapat 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten, Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, maka wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Sebagai provinsi yang belum lama berdiri, tentu saja provinsi ini masih dalam masa melakukan pembenahan dan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan "*Bumi Serumpun Sebalai*" ini, mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
  24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 26 Seri E);
  25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 26 Seri E).
  26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A).

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.



#### **a. Batas Wilayah**

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

#### **b. Luas Wilayah**

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,69 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.126,36 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,69 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km<sup>2</sup>
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 118,80 km<sup>2</sup>

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

#### **c. Topografis**

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

#### **d. Geologi**

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*) dan bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

#### **e. Hidrologi**

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

#### **f. Klimatologi**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 186,10 mm. pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 26,90C sampai dengan 27,80C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

#### **g. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

**Tabel I.1.**  
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan  
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					2016
	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	21.662	23.042	13.262	15.719	15.719	22.771
Tegalan	138.246	112.777	109.820	113.105	113.105	117.376
Ladang	45.984	48.960	44.085	30.348	30.348	28.147
Perkebunan	331.662	332.179	334.698	441.152	441.152	367.848
Hutan Rakyat	72.517	85.738	71.323	47.753	47.753	42.637
Pengembalaan	8.037	6.086	4.235	1.815	1.815	2.263
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	122.309	121.407	126.272	76.588	76.588	67.415
Lain-Lain (pekarangan)	435.971	387.443	388.068	397.806	397.806	538.195
Permukiman	476.857	526.303	550.651	517.741	517.741	455.762
<b>JUMLAH</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.642.414</b>

*Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan oleh permukiman sebesar 517.741 Ha kemudian kedua digunakan sebagai perkebunan sebesar 441.152 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 1.815 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

#### **(1) Kawasan hutan produksi**

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan rincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;

- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

## **(2) Kawasan peruntukan pertanian**

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
  - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
  - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
  - a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
  - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;

- a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
- a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
- a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.
  
- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
  - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
  - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
  - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
  - b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
  - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
  - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
  - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.
  
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
  - c.1 Perkebunan Besar meliputi :
    - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
    - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
    - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
    - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
    - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
    - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
  - c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
    - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
    - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
    - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
    - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
    - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
    - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.
  
- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
  - d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
  - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
  - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
  - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
  - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
  - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
  - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

### **(3) Kawasan peruntukan perikanan**

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap, pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan



kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

#### **(4) Kawasan pertambangan**

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

#### **(5) Kawasan industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung, membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;

- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung;
- dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

**(6) Kawasan peruntukan pariwisata**

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
  - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
  - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
  - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
  - a.4 Taman wisata laut;
  - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
  - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
  - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
  - b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
  - b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
  - b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
  - b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

**(7) Kawasan peruntukan permukiman**

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih

59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

**(8) Kawasan peruntukan lainnya**

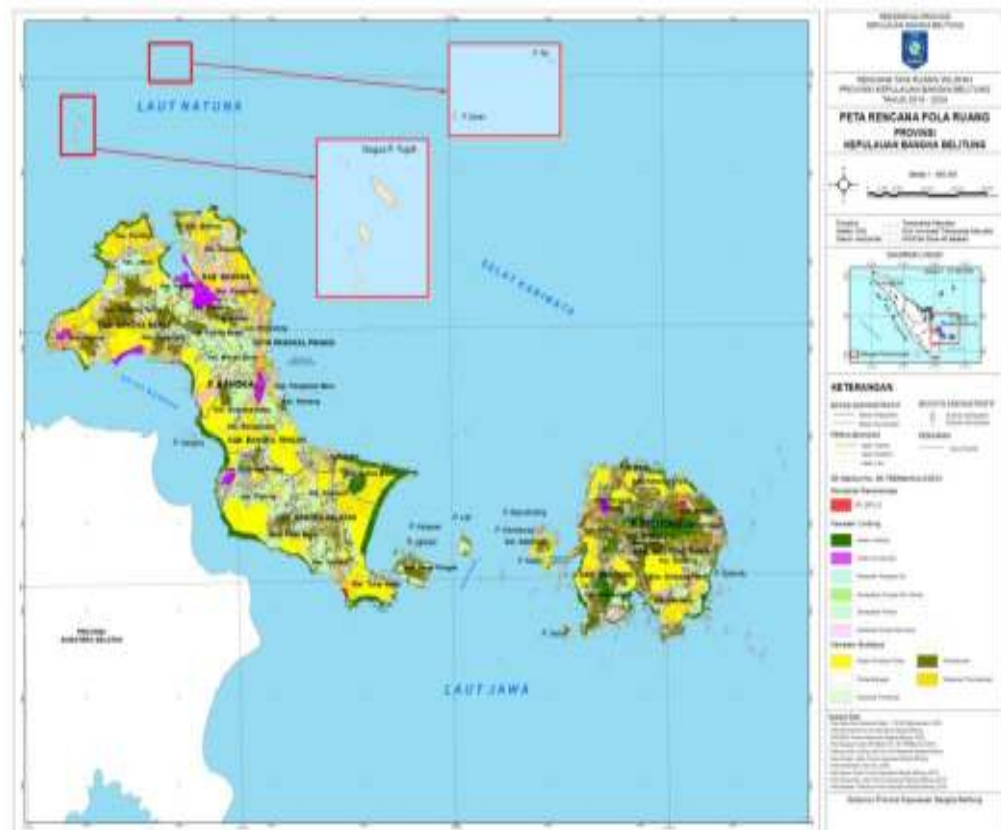
Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- a. Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b. Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- c. Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- d. Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

Kesemua peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar I.1 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar I.2.

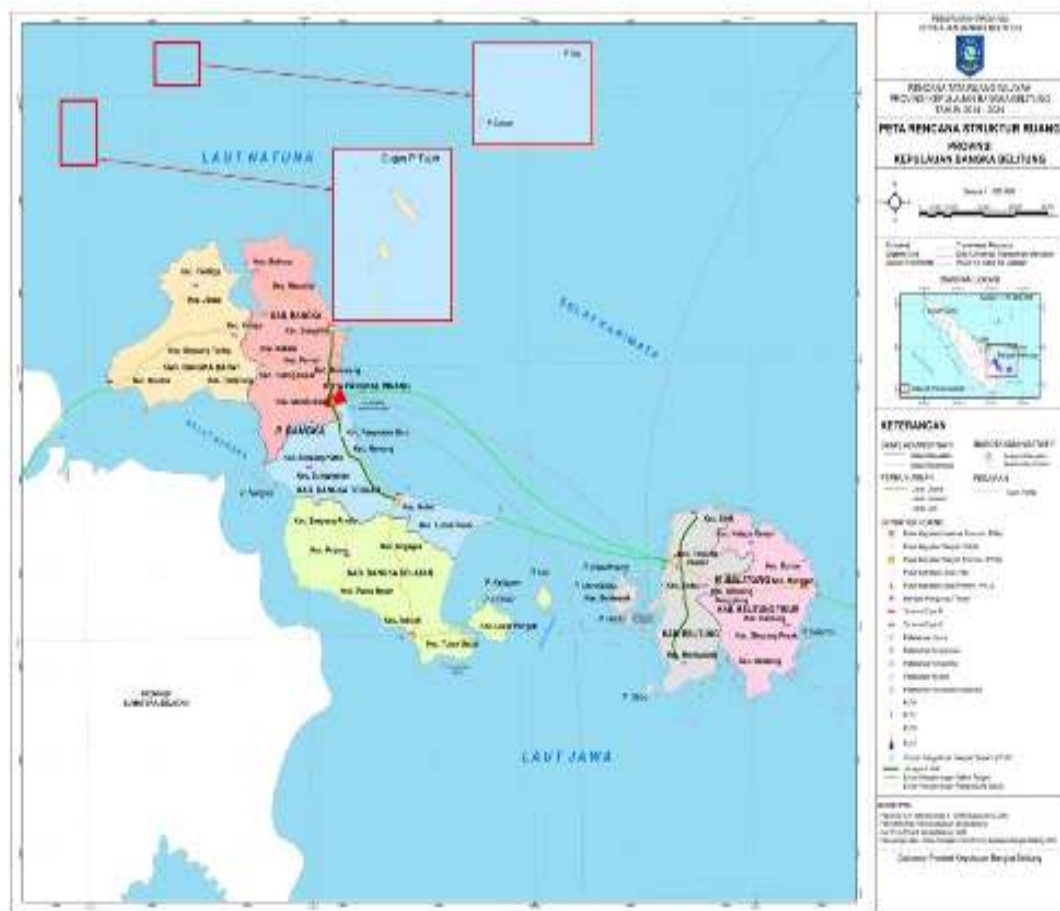
**Gambar I.1**

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

### Gambar 1.2



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

## h. Demografis

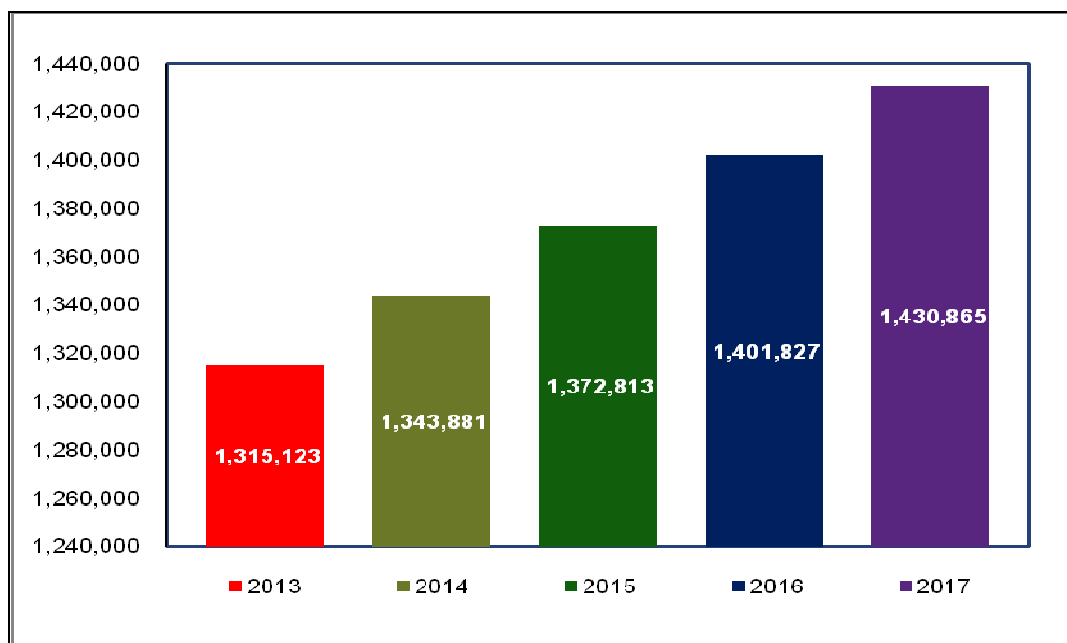
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

**Tabel I.2**  
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	298.013	304.485	311.085	317.735	324.305
Belitung	167.602	171.271	175.048	178.721	182.418
Bangka Barat	188.271	192.395	196.598	200.684	204.778
Bangka Tengah	173.346	177.218	180.903	184.720	188.603
Bangka Selatan	185.514	189.492	193.583	197.670	201.782
Belitung Timur	114.469	117.026	119.394	121.971	124.587
Pangkalpinang	187.908	191.994	196.202	200.326	204.392
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>1.315.123</b>	<b>1.343.881</b>	<b>1.372.813</b>	<b>1.401.827</b>	<b>1.430.865</b>

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

**Grafik I.1**  
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Pada tahun 2012 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.298.186 jiwa dan meningkat menjadi 1.401.827 pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas),



namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

## 2. Kondisi Ekonomi

### a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

#### 1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambután, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel I.3.

**Tabel I.3**  
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
<b>I. LAHAN PERTANIAN</b>	
I.1. Lahan Sawah	22.771
a. Irigasi	4.602
b. Tadah hujan	16.397
c. Pasang surut	270
d. Lebak	1.502
I.2. Lahan Bukan Sawah	1.163.881
a. Tegal	117.376
b. Ladang	28.147
c. Perkebunan	367.848
d. Hutan rakyat	42.637
e. Pengembalaan	2.263
f. Sementara tidak diusahakan	67.415
g. Lain-lain	538.195
Jumlah	1.186.652

*Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2017*

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 6% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

## 2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

**Tabel I.4**  
Luas Hutan Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	466.090	432.884	432.882,82	432.883,52	432.883,52
Hutan Lindung	156.730	189.965	189.972,25	189.983,52	185.531,34
Hutan Konservasi	34.690	35.473	35.472,19	35.453,89	35.453,89
Hutan Produksi Konversi	N/A	692	692,59	692,59	692,59
<b>Jumlah</b>	<b>657.510</b>	<b>659.014</b>	<b>659.019,85</b>	<b>659.013,52</b>	<b>654.561,34</b>

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2016

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

## 3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel I.5.

**Tabel I.5**  
Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	202.565,20	199.241,40	203.284,40	139.542,9	188.672,6
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	8.113,60	2.939,10	4.198,62	4.308,29	4.572,82

*Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016*

#### **a) Perikanan Budidaya**

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 tercatat sebesar 4.572,82 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.308,29 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2016 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

#### **b) Perikanan Tangkap**

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km<sup>2</sup> atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 188.672,6 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 sebesar 49.129,7 Ton dimana jumlah produksinya 139.542,9 ton. Hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

### **4. Potensi Pertambangan**

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel I.9 berikut.

**Tabel I.6**  
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton
3	Kaolin	205.487,50 ton
4	Granit	55.508,29 m3
5	Diabas	89.551,12 m3

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

## 5. Potensi Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis juga mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar I.4 berikut.

**Gambar I.3**  
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014



Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

**Tabel I.7**

Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	191.200	221.747	236.370	369.743	465.554
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	1.495	1.864	2.035	3.020	4.690
3.	Jumlah	192.695	223.611	238.405	372.763	470.244

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 192.695 orang meningkat di tahun 2012 menjadi 223.611 orang dan pada tahun 2015 sebesar 470.244 orang.

#### **b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan menyusun rencana pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Selain pemerintah, pelaku pertumbuhan ekonomi adalah rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk menggali dan mengembangkan

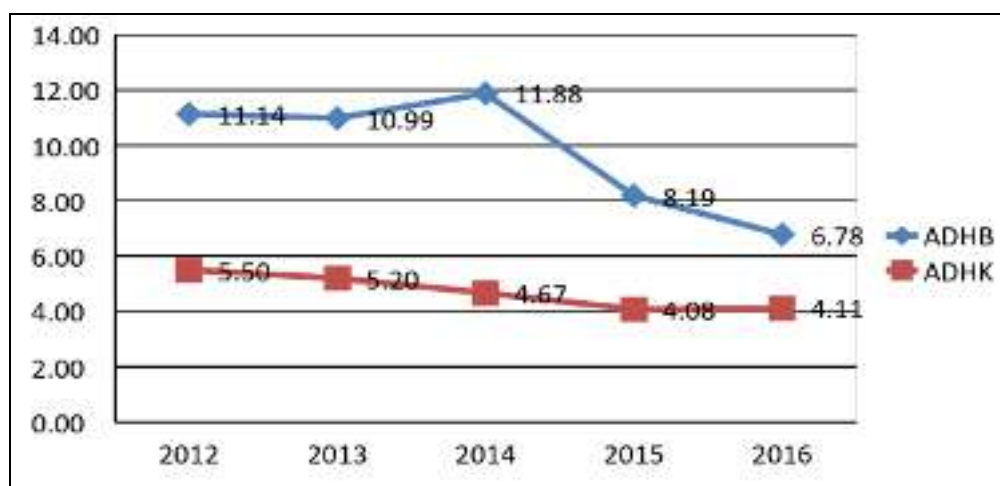
potensi-potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja keras yang terarah, sehingga pencapaiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

**Tabel I.8**  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010=100)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (miliar rupiah), 2012-2016

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	45.400,2	50.388,4	56.373,6	60.992,1	65.125,3
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

**Grafik I.2**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2016  
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan di dalam negeri. Pada periode tahun 2015-2016 lebih dari setengah 17 lapangan usaha ekonomi penyumbang PDRB telah mengalami pertumbuhan, dan laju pertumbuhannya relatif memberikan andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditahun 2016 sehingga tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

### 1.) Struktur Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga

konstan (ADHK) berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Perkembangan sektor-sektor pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel II.13 dan Tabel II.14. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; serta sektor industri pengolahan merupakan 4 (empat) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori pertambangan dan penggalian.

**Tabel I.9**  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013 –2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.269.6	10.836.6	12.060.4	1.3126.3	13.145.6
Pertambangan dan Penggalian	7.097.6	7.622.7	7.735.4	7.743.3	8.179.2
Industri Pengolahan	12.088.2	12.877.3	12.888.4	13.088.5	14.276.5
Pengadaan Listrik, gas	27.3	42.7	51.1	66.6	79.4
Pengadaan Air	381.24	10.4	12.1	13.2	15.0
Konstruksi	41.39.7	472.4	5.264.2	5.753.9	6.381.4
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	.6671.7	7.613.5	8.634.3	9.641.9	10.890.9
Transportasi dan Pergudangan	1.864.6	2.125.6	2.461.8	2.642.1	2.900.1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.152.1	1.321.4	1.459.8	1.610.4	1.735.6
Informasi dan Komunikasi	770.2	849.3	941.7	1.034.0	1.135.3
Jasa Keuangan	902.4	998.5	1.095.3	1.198.1	1.280.6
Real Estate	1.602.9	1.823.4	1.964.7	2.106.2	2.284.2
Jasa Perusahaan	134.4	154.0	169.6	176.4	196.8
Administrasi Pemerintahan	2.618.0	3.025.6	3.471.6	3.781.6	4.116.3
Jasa Pendidikan	1.172.2	1.362.8	1.639.7	1.860.0	1.961.7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552.7	625.8	710.7	760.1	846.1
Jasa Lainnya	315.9	371.7	426.6	493.1	548.5
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>50.388.4</b>	<b>56.373.6</b>	<b>60.987.3</b>	<b>65.095.5</b>	<b>69.973.2</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

**Tabel I.10**  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557.7	8.254.3	8.743.5	9.116.9	9.083.8
Pertambangan dan Penggalian	6.230.2	6.354.1	6.458.1	6.491.1	6.633.0
Industri Pengolahan	10.143.3	10.270.4	10.400.6	10.688.4	11.363.1
Pengadaan Listrik, gas	31.5	35.6	38.9	43.7	45.9
Pengadaan Air	7.3	7.7	8.1	8.6	9.4
Konstruksi	3.414.7	3.552.4	3.760.1	4.021.6	4.252.1
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	5.846.6	6.139.5	6.402.1	6.727.7	7.259.8
Transportasi dan Pergudangan	1.484.8	1.570.8	1.662.3	1.752.3	1.892.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931.0	1.000.6	1.034.8	1.086.5	1.136.5
Informasi dan Komunikasi	740.2	790.9	849.0	926.9	1.002.8
Jasa Keuangan	728.3	766.6	807.9	860.0	881.3
Real Estate	1.312.6	1.403.9	1.442.0	1.494.8	1.572.5
Jasa Perusahaan	108.1	115.7	120.3	120.4	127.5
Administrasi Pemerintahan	2.014.4	2.149.8	2.337.1	2.478.7	2.604.2
Jasa Pendidikan	903.7	964.9	1.059.1	1.139.3	1.183.3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475.3	500.6	533.8	559.6	605.4
Jasa Lainnya	261.0	281.7	304.6	334.4	354.9
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>42.190.9</b>	<b>44.159.4</b>	<b>45.962.3</b>	<b>47.850.8</b>	<b>50.007.8</b>

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

## 2.) PDRB Perkapita

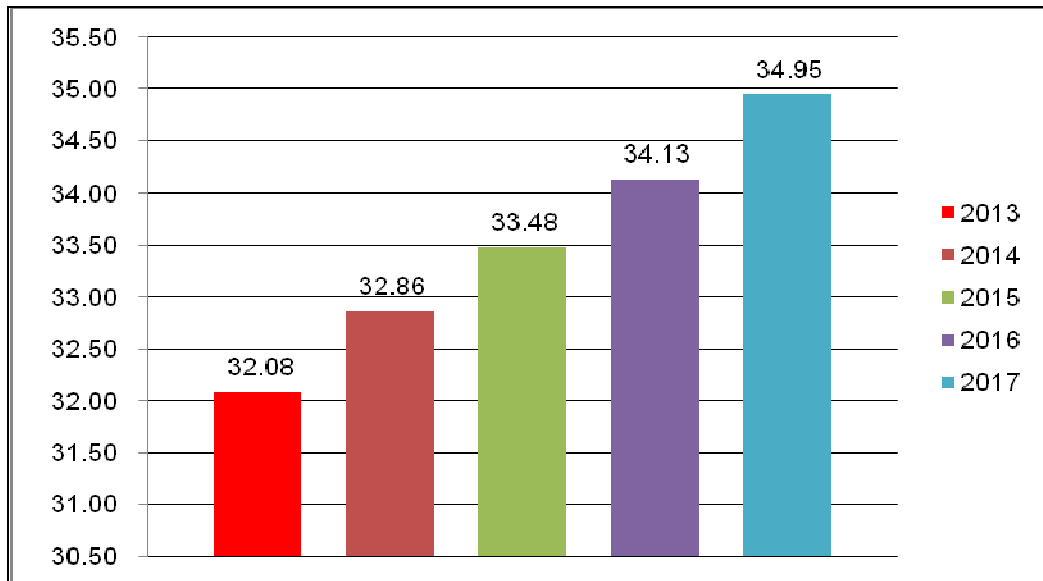
PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 32.081.301,21 kemudian naik mencapai Rp. 34.949.314,51 rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 2.868.013,30. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang

terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Grafik I.3.

**Grafik I.3**  
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)  
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

### A. VISI DAN MISI

#### 1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***. Setidaknya ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. ***Teknologi*** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

#### 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

##### 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Pembangunan ekonomi*** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. ***Berbasis potensi daerah*** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.



**2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;**

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

**4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

**Kesehatan Masyarakat** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

**5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

**6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

**B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang** dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
  - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
    - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
    - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
    - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
    - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
    - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
  - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
    - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
    - Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

**Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;**

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)

- Ketersediaan Air Baku (M3)
- Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
- b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
  - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
  - Persentase kawasan permukiman yang tertata
  - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
- c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
  - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
  - Persentase armada pengangkutan
  - Persentase jalan kondisi mantap

**Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal**, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

**Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat**, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat.

**Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
    - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
    - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
    - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
  - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Indeks Profesionalitas ASN
    - Nilai rata-rata delapan area perubahan
  - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)

- Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
      - Skor aspek kebebasan sipil
      - Skor aspek hak-hak politik
      - Skor aspek lembaga demokrasi

**Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
    - Indeks Air
    - Indeks Udara
    - Indeks Tutupan Lahan
    - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

### **C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refosmasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

#### **C.1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanani;
  - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
  - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
  - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
  - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan perternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
    - a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
    - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
    - c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
    - d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

**C.2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
  - b. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
  - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
  - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
  - e. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
  - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
  - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
  - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
  - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
  - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

**C.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
  - b. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
  - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
  - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
  - e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
  - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
  - g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
2. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
  - b. Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
  - c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
  - d. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
  - e. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
  - f. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
  - g. Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
  - h. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
3. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
  - a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
  - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

**C.4. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
- b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral.



- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral.
- d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral.
- e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
- c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
- d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
- e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
- f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
- b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
- b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan

2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. peningkatan mutu layanan pendidikan.
  - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
  - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
- b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
- d. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
  - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
    - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
    - b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
    - c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
    - d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
    - e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
    - f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
  - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
  - b. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur.

**Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan Pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan tutupan lahan
  - b. Pengembangan Perhutanan Sosial

4. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  - b. Pengembangan kawasan TPA Regional

#### **D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

##### **1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

##### **2. PEMBANGUNAN BAHARI**

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

##### **3. PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city.

#### **4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN**

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

#### **5. PENINGKATAN PENDAPATAAN PEMERINTAH**

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

#### **6. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

#### **7. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN**

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

#### **8. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan



Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

#### **9. PEMBANGUNAN KESEHATAN**

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

#### **10. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK**

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi ( smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

#### **11. PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI**

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

#### **12. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN**

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

#### **13. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

#### **E. TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Tahun 2018, Tema Prioritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Prioritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.
5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

**Tabel**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**  
**RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Visi**

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
<b>Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah</b>				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Pertumbuhan PDRB	1 Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
			2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
			3 Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
			4 Meningkatnya produksi sektor pertambangan	4 Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
			5 Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5 Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
			6 Terwujudnya kemandirian energi	6 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2	Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1 Pengeluaran pemerintah perkapita	1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan belanja pemerintah daerah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
		2 Pendapatan perkapita masyarakat	1 Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran
			2 Menurunnya angka kemiskinan	2 Persentase Angka Kemiskinan
			3 Menurunnya angka Inflasi	3 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4 Persentase laju pertumbuhan Penduduk
<b>Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas</b>				
3	Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	1 Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	1 Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;	1 Terbangunnya daerah irigasi (ha)
				2 Ketersediaan air baku (m3)
			2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
				2 Persentase kawasan permukiman yang tertata
				3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
			3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
				2 Persentase armada pengangkutan
				3 Persentase jalan kondisi mantap

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
<b>Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal</b>				
4	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah gabungan, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	1 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
<b>Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat</b>				
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
<b>Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi</b>				
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan
				2 Tingkat kematangan Maturitas SPIP
				3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi
				4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			2 Birokrasi yang efektif dan efisien	1 Indeks Profesionalitas ASN
			3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
			berkualitas	Melayani (WBBM)
				2 Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat
7	Meningkatkan pembangunan demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1 Skor aspek kebebasan sipil
				1 Skor aspek hak-hak politik
				1 Skor aspek lembaga demokrasi
<b>Misi VI . Ppengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup</b>				
8	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai
				2 Indeks kualitas udara
				3 Indeks tutupan
				4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)



**Tabel**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis**

**Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah							
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah pertanian berkelanjutan
						2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
						3	Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan
		2	PEMBANGUNAN BAHARI	2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	4	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
						5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
						6	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan
		3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	3	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			pariwisata
			8 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
			9 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
	<b>4 PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN</b>	4 Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	10 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
		5 Meningkatnya pembangunan berbasis industri	11 Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
		6 Terwujudnya kemandirian energi	12 Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
2 Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	<b>5 PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH</b>	7 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	13 Meningkatkan pendapatan asli daerah
	<b>6 PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT</b>	8 Menurunnya angka Pengangguran	14 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
		9 Menurunnya angka kemiskinan	15 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
		10 Menurunnya angka Inflasi	16 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
		11 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	17 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
<b>Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas</b>			
3 Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	7 <b>PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR</b>	12 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
			19 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
		13 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
			21 Meningkatkan penataan kawasan permukiman
			22 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
		14 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
			24 Meningkatkan dan mengembangkan

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
						konektivitas perhubungan darat	
						25	Meningkatkan aksesibilitas
<b>Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal</b>							
4	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	8	<b>PEMBANGUNAN PENDIDIKAN</b>	15	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	26	Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
						27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
<b>Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat</b>							
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	<b>PEMBANGUNAN KESEHATAN</b>	16	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	28	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
<b>Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi</b>							
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	10	<b>PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK</b>	17	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
						30	Peningkatan tata kelola pengawasan
						31	Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
						32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
						33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
				18	Birokrasi yang efektif dan efisien	34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi
						35	Meningkatkan tata kelola manajemen

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN	STRATEGI
1		2		3	4
					SDM aparatur pemerintah daerah
			19	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
					37 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	11 <b>PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI</b>	20	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	38 Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
					39 Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
					40 Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
<b>Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup</b>					
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	12 <b>PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN</b>	21	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
					42 Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
9.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	13 <b>PENEGNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	22	Peningkatan Kualitas Lingkungan	43 Meningkatkan kualitas air
					44 Meningkatkan kualitas Udara
					45 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
					46 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan aturan tersebut, setiap daerah mempunyai hak untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Dana Perimbangan;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sedangkan didalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak Daerah Provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang masih perlu diintensifkan pemungutannya meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c) Pajak Air Permukaan (PAP);
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000), potensi pajak daerah provinsi yang mengalami perubahan juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

- a) Adanya penambahan objek pajak baru yang dikelola Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Rokok;
- b) Dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Dinas;
- c) Adanya pengalihan pengelolaan terhadap Pajak Air Bawah Tanah, maka Pemerintah Provinsi hanya mengelola Pajak Air Permukaan saja;
- d) Penyerahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian juga dengan retribusi daerah, mengingat potensinya yang sangat besar sehingga memungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi. Oleh karena itu instansi pemungut diharapkan dapat merumuskan dan mengajukan Peraturan Daerah tentang Retribusi berdasarkan potensi dan aturan yang berlaku. Strategi yang dilakukan secara tepat dan dengan kebijakan yang efektif akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya selaku warga negara yang baik.

Dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dari setiap UPTD/Samsat pada kab/kota serta Seksi terkait pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya peningkatan PAD;
- b) Mengupayakan sumber-sumber objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial lainnya melalui pendataan;
- c) Mengusulkan dan menetapkan payung hukum sebagai dasar pemungutan atas sumber-sumber PAD;
- d) Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai dasar pemungutan atas sumber-sumber pendapatan yang telah menjadi obyek PAD;
- e) Mengintensifkan penagihan kepada wajib pajak yang telah terdata sebagai wajib pajak daerah;
- f) Merencanakan kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah kedepan.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan pada tahun 2016, meliputi:

- a) Meningkatkan kinerja petugas pendataan dan penagih pajak daerah untuk lebih intensif melakukan pendataan dan penagihan;
- b) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk membahas permasalahan yang ada serta solusinya dengan seluruh UPTD terhadap upaya pencapaian target pajak daerah;
- c) Melakukan evaluasi dengan instansi terkait terhadap penerimaan retribusi daerah per triwulan, per semester dan per tahun;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap usaha intensif penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh UPTD BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- f) Melaksanakan rapat koordinasi mengenai PBB, BPHTB dan PPh;
- g) Sosialisasi Perda Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



Pada tahun 2017 upaya-upaya yang dilakukan BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah, antara lain:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah dan
- b) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

## **2. Target dan Realisasi Pendapatan/Penerimaan Daerah**

Berdasarkan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 setelah perubahan APBD, target penerimaan pendapatan daerah tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.386.297.015.485,16 dengan realisasi sebesar Rp 2.250.687.808.908,58 atau 94,23 %. Adapun rincian penerimaan pendapatan daerah tersebut, sebagai berikut:

### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017, berdasarkan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 telah direncanakan dengan target sebesar Rp 737.192.092.935,16 dan sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisasi sebesar Rp 710.039.712.453,58 atau sebesar 96,32 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari penerimaan PAD Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Pajak Rokok secara keseluruhan ditargetkan Rp 578.237.062.209,57 dengan realisasi sebesar Rp 629.136.457.212,39 atau 108,80 %.

Secara keseluruhan penerimaan dari sektor Pajak Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2017, dan semua pajak daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan, kecuali Pajak Kendaraan Bermotor yang hanya tercapai 97,46 % atau sebesar Rp 197.962.271.163,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp 203.126.491.000,00 .

- 2) Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2017, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 19.409.736.914,87 dengan realisasi sebesar Rp 5.434.540.818,00 atau 28,00%.

- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta. Pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 8.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.306.417.427,05 atau 62,43 %.

- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada Tahun Anggaran 2017 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp 131.045.2936.810,72 dengan realisasi sebesar Rp 70.162.296.996,14 atau 53,54 %.

**b. Dana Perimbangan**

Sumber Penerimaan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

- 1) Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak
- 2) Dana Alokasi Umum;
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan penerimaannya sebesar Rp 1.619.104.922.550,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.539.415.628.355,00 atau 95,08 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci penerimaan dari Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 175.528.126.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 120.836.218.678,00 atau 68,72 %.
- 2) Dana Alokasi Umum  
Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 987.556.919.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 80.297.314.000,00 atau 99,26%.
- 3) Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 455.719.877.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 43.282.095.677,00 atau 96,17 %.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- 1) Dana Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- 4) Sumbangan Pihak Ketiga
- 5) Pendapatan Lainnya

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 dari Sumbangan Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp 1.232.468.100,00 atau 4,11 %. Adapun secara rinci penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagai berikut:

- 1) Dana Hibah, pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasinya.
- 2) Dana Darurat, pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasinya.
- 3) Dana Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasinya
- 4) Sumbangan Pihak Ketiga , pada tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp 1.232.468.100,00 atau 4,11 %
- 5) Pendapatan Lainnya pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasinya

Daftar target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci sebagaimana terdapat dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.1</b>	<b>Bagian Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>737.192.092.935,16</b>	<b>710.039.712.453,58</b>	<b>(27.152.380.481,58)</b>	<b>-3,68</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Pajak daerah</b>	<b>578.237.062.209,57</b>	<b>629.136.457.212,39</b>	<b>50.899.395.002,82</b>	<b>8,80</b>
1.1.1.01.12	Pajak Kendaraan Bermotor	203.126.491.000,00	197.962.271.163,00	(5.164.219.837,00)	-2,54
1.1.1.03.12	Bea balik nama Kendaraan Bermotor	129.552.628.500,00	169.320.289.651,00	39.767.661.151,00	30,70
1.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	172.380.267.391,57	182.118.099.275,00	9.737.831.883,43	5,65
1.1.1.01.15	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	5.900.000.000,00	7.541.444.254,39	1.641.444.254,39	27,82
1.1.1.01.16	Pajak rokok	67.277.675.318,00	72.194.352.869,00	4.916.677.551,00	7,31
<b>1.1.2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>19.409.736.914,87</b>	<b>5.434.540.818,00</b>	<b>(13.975.196.096,87)</b>	<b>-72,00</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>Retribusi jasa umum</b>	<b>12.842.048.972,00</b>	<b>1.708.723.498,00</b>	<b>(11.133.325.474,00)</b>	<b>-86,69</b>
1.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.460.807.662,00	489.738.498,00	(971.069.164,00)	-66,47
1.1.2.01.04	Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta	7.961.531.900,00	284.000.000,00	(7.677.531.900,00)	-96,43
1.1.1.01.05	Retribusi pelayanan Pendidikan	3.419.709.410,00	934.985.000,00	(2.484.724.410,00)	-72,66
<b>1.1.2.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.627.687.942,87</b>	<b>2.688.809.288,00</b>	<b>(938.878.654,87)</b>	<b>-25,88</b>
1.1.2.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.737.687.942,87	2332.403.288,00	(405.284.654,87)	-14,80
1.1.2.03	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	80.000.000,00	99.360.000,00	19.360.000,00	24,20
1.1.2.05	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	60.000.000,00	93.227.500,00	33.227.500,00	55,38
1.1.2.08	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	750.000.000,00	163.818.500,00	(586.181.500,00)	-78,16
<b>1.1.2.03</b>	<b>Retribusi perizinan tertentu</b>	<b>2.940.000.000,00</b>	<b>1.037.008.032,00</b>	<b>(1.902.991.968,00)</b>	<b>-64,73</b>
1.1.2.03.01	Retribusi izin trayek	75.000.000,00	86.355.000,00	11.355.000,00	15,14
1.1.2.03.02	Retribusi izin usaha perikanan	115.000.000,00	149.743.032,00	34.743.032,00	30,21
1.1.2.03.04	Retribusi Perpanjangan IMTA	2.750.000.000,00	800.910.000,00	(1.949.090.000,00)	-70,88
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</b>	<b>8.500.000.000,00</b>	<b>5.306.417.427,05</b>	<b>(3.193.582.572,95)</b>	<b>-37,57</b>
<b>1.1.3.03</b>	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Swasta</b>	<b>8.500.000.000,00</b>	<b>5.306.417.427,05</b>	<b>(3.193.582.572,95)</b>	<b>-37,57</b>
1.1.3.03.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Swasta	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	(3.193.582.572,95)	-37,57

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.1.4</b>	<b>Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</b>	<b>131.045.293.810,72</b>	<b>70.162.296.996,14</b>	<b>(60.882.996.814,58)</b>	<b>-46,46</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>5.748.495.280,00</b>	<b>220.486.950,00</b>	<b>(5.528.008.330,00)</b>	<b>-96,16</b>
1.1.4.01.19	Penjualan Aset Daerah	5.748.495.280,00	220.486.950,00	(5.528.008.330,00)	-96,16
<b>1.1.4.02</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>20.087.756.227,00</b>	<b>6.237.648.837,26</b>	<b>(13.850.107.389,74)</b>	<b>-68,95</b>
1.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	20.087.756.227,00	6.237.648.837,26	(13.850.107.389,74)	-68,95
<b>1.1.4.03</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>42.458.149.093,00</b>	<b>6.827.671.605,00</b>	<b>(35.630.477.488,00)</b>	<b>-16,08</b>
1.1.4.03.01	Rekening Deposito PADA Bank BRI	42.458.149.093,00	6.827.671.605,00	(35.630.477.488,00)	-16,08
<b>1.1.4.04</b>	<b>Tuntutan Gfanti Rugi</b>	<b>316.800.061,00</b>	<b>132.011.211,80</b>	<b>(184.788.849,20)</b>	<b>-58,33</b>
1.1.4.06.01	Kerugian Uang Daerah	316.800.061,00	132.011.211,80	(184.788.849,20)	-58,33
<b>1.1.4.06</b>	<b>Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>2.994.734.797,00</b>	<b>70.426.876,00</b>	<b>(2.924.307.921,00)</b>	<b>-97,65</b>
1.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	2.994.734.797,00	70.426.876,00	(2.924.307.921,00)	-97,65
<b>1.1.4.07</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>9.424.444.275,00</b>	<b>7.865.868.006,00</b>	<b>(1.558.576.269,00)</b>	<b>-16,54</b>
1.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	9.034.136.025,00	7.302.529.006	(1.731.606.619,00)	-19,17
1.1.4.07.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	390.308.250,00	563.338.600,00	173.030.350,00	44,33
<b>1.1.4.10</b>	<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>41.625.575.996,32</b>	<b>36.645.737.693,25</b>	<b>(4.979.838.303,07)</b>	<b>-11,96</b>
1.1.4.10.07	Pendapatan Dari Pengembalian Bendahara Pengeluaran	41.625.575.996,32	36.645.737.693,25	(4.979.838.303,07)	-11,96
<b>1.1.4.15</b>	<b>Lain-Lain Penerimaan</b>	<b>3.598.392.563,67</b>	<b>1.871.518.713,00</b>	<b>(1.725.873.850,67)</b>	<b>-47,96</b>
1.1.4.15.02	Setoran PT. Taspen	3.598.392.563,67	53.438.806,00	(3.544.953.757,67)	-98,51
1.1.4.15.03	Setoran PT. Jasa Raharja	-	918.000.000,00	918.000.000,00	
1.1.4.15.04	Setoran KUPEM		141.610.172,00	141.610.172,00	
1.1.4.15.05	Setoran Lainnya		759.469.735,00	759.469.735,00	
<b>1.1.4.16</b>	<b>pendapatan BLUD</b>	<b>4.790.945.517,73</b>	<b>10.289.927.103,83</b>	<b>5.498.981.586,10</b>	<b>114,78</b>
1.1.4.16.01	pendapatan BLUD	4.790.945.517,73	10.289.927.103,83	5.498.981.586,10	114,78
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.619104.922.550,00</b>	<b>1.539.415.628.355,00</b>	<b>(79.689.294.195,00)</b>	<b>-4,92</b>

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	(54.991.907.322,00)	-31,28
1.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	55.808.099.000,00	39.043.006.764,00	(16.765.092.236,00)	-30,04
1.2.1.01.01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	17.523.677.000,00	8.736.464.332,00	(8.787.212.668,00)	-50,14
1.2.1.01.03	Bagi Hasil dari pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasala 21	38.284.422.000,00	30.306.542.432,00	(7.977.879.568,00)	-20,84
1.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA	120.020.027.000,00	81.793.211.914,00	(38.226.815.086,00)	-31,85
1.2.1.02.01	Bagi Hasil Iuran Hak Penguasaan Hutan		23.885.400,00	23.885.400,00	
1.2.1.02.02	Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	635.933.000,00	60.261.595,00	(575.671.405,00)	-90,52
1.2.1.02.03	Bagi Hasil Reboisasi		217.236.150,00	217.236.150,00	
1.2.1.02.04	Bagi Hasil Iuran tetap ( Land rent)	52.798.033.000,00	38.650.531.262,00	(14.266.465.375,00)	-26,80
1.2.1.02.05	Bagi hasil Dari Iuran Eksplorasi Dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	62.809.597.000,00	40.543.131.625,00	(22.266.465.375,00)	-35,45
1.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	3.776.464.000,00	2.298.165.882,00	(1.478.298.118,00)	-39,15
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	(7.259.605.550,00)	-0,74
1.2.2.01	Dana Alokasi Umum	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	(7.259.605.550,00)	-0,74
	Dana Alokasi Umum (DAU)	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	(7.259.605.550,00)	-0,74
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	455.719.877.000,00	438.282.095.677,00	(17.437.781.323,00)	-3,83
1.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	455.719.877.000,00	438.282.095.677,00	(17.437.781.323,00)	-3,83
1.2.3.02	Dana Bos		2.174.182.066,00	2.174.182.066,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.000.000.000,00	1.323.468.100,00	(28.767.531.900,00)	-95,89
1.3.5	Sumbangan Pihak ketiga	30.000.000.000,00	1.323.468.100,00	(28.767.531.900,00)	-95,89
1.3.5.01	Sumbangan Pihak ketiga	30.000.000.000,00	1.323.468.100,00	(28.767.531.900,00)	-95,89
1.3.5.01.01	Sumbangan Pihak ketiga	30.000.000.000,00	1.323.468.100,00	(28.767.531.900,00)	-95,89
JUMLAH TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH					

Sumber:DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### d. Permasalahan dan Solusi Dalam Pendapatan Daerah

Permasalahan yang ada serta solusi dalam peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pada Tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Inventarisasi Permasalahan Pendapatan Daerah dan Solusi**

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada tahun 2017 memaksimalkan Samsat keliling atau Samsat <i>Corner</i> yang telah diadakan untuk menjangkau wilayah yang jauh dari Samsat dan wilayah strategis yang mudah dijangkau masyarakat.</li><li>• Pada tahun 2017 akan dilaksanakan sosialisasi melalui iklan di media lokal untuk mengajak masyarakat Bangka Belitung untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.</li><li>• Membangun pos pembantu pelayanan Samsat pada gerai Bank Sumselbabel yang ada di kecamatan-kecamatan.</li></ul>
2	Petugas di UPT kesulitan mendata alat berat di lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah dilakukan Sosialisasi PKB dan BBNKB atas Alat Berat/Besar dengan mengundang para pemilik alat berat, asosiasi alat berat dan instansi terkait lainnya.</li><li>• Telah dilaksanakan MoU dengan pihak Kejaksaaan untuk menagih pajak alat berat yang telah lewat masa pajaknya.</li></ul>
3	Masih banyaknya kendaraan asal luar daerah yang belum melakukan mutasi BBNKB.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diadakan pengurangan BBNKB asal luar daerah dan pembebasan sanksi administrasi bagi kendaraan asal luar daerah.</li><li>• Pada tahun 2017 akan dilaksanakan razia PKB dan BBNKB roda dua dan roda empat bekerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya.</li><li>• Pada tahun 2017 akan dilaksanakan sosialisasi melalui iklan di media lokal untuk mengajak pemilik kendaraan asal luar daerah untuk memutasikan kendaraannya.</li></ul>

## B. PENGELOLAAN BELANJA/KEUANGAN DAERAH

### 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Selama Tahun 2017 telah banyak kinerja yang dicapai dan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

- Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) relatif stabil, aman dan terkendali;
- Proses demokratisasi dalam kehidupan sosial politik di daerah telah semakin mapan, berakhlak dan berkarakteristik;
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkembang semakin besar dengan meningkatnya intensitas pelaksanaan demokrasi serta upaya perbaikan pengakuan hukum dan kepastian hukum;
- Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan berkesinambungan; dan
- Infrastruktur semakin meningkat dan berkualitas.

Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam visi pembangunan dalam RPJP Daerah Tahun 2005–2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 prioritas bidang pembangunan untuk periode 2012–2017 adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi dan sumber daya alam;
- b. Lingkungan hidup;
- c. Prasarana dan sarana;
- d. Sumber daya manusia dan kependudukan;
- e. Pemerintahan serta
- f. Sosial, budaya dan politik.

## **2. Target dan Realisasi Belanja**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 2.598.989.042.215,22 dengan realisasi sebesar Rp 2.342.020.202.645,46 atau 90,11%. Adapun rincian belanja daerah dapat uraian sebagai berikut:

### **a) Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.419.103.316.979,96 dan dari jumlah tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp1.330.060.229.641,26 atau 93,73% dengan sisa anggaran sebesar Rp 89.043.087.338,70 atau 6,69 % yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **(1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 667.619.827.029,36 dengan realisasi sebesar Rp 620.837.342.868,21 atau 92,99 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 46.782.484.161,15 atau 7,01 %.

#### **(2) Belanja Bunga**

Belanja Bunga dalam APBD Tahun 2017 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

#### **(3) Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi dalam APBD Tahun 2017 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

#### **(4) Belanja Hibah**

Belanja Hibah dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 262.214.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 254.263.301.000,00 atau 96,97 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.951.599.000,00 atau 3,03 %.

#### **(5) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 943.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 700.000.000,00 atau 74,23 % dengan sisa anggaran sebesar Rp243.000.000,00 atau 25,77 %.

#### **(6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 362.199.953.426,60 dengan realisasi sebesar Rp 351.012.561.851,05 atau 96,91 % dengan sisa anggaran sebesar Rp11.187.391.575,55 atau 3,09 %.

#### **(7) Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 116.755.422.524,00 dengan realisasi sebesar Rp 102.528.477.024,00 atau 87,81 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 14.226.945.500,00 atau 12,19 %.



**(8) Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 9.370.214.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 718.546.898,00 atau 7,67 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 8.651.667.102,00 atau 92,33 %.

**Tabel III.3**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALI SASI FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	
				KEUANGAN (Rp)	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
1	Belanja Pegawai	667.619.827.029,36	100	620.837.342.868,21	92,99	(46.782.484.161,70)	7,01
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	0	-	0
4	Belanja Hibah	262.214.900.000,00	100	254.263.301.000,00	96,97	(7.951.599.000,00)	3,03
5	Belanja Bantuan Sosial	943.000.000,00	100	700.000.000,00	74,23	(243.000.000,00)	25,77
6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	362.199.953.426,60	100	351.012.561.851,05	96,91	(11.187.391.575,55)	3,09
7	Belanja Bantuan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	116.755.422.524,00	100	102.528.477.024,00	86,72	(14.226.945.500,00)	12,19
8	Belanja Tidak Terduga	9.370.214.000,00	100	718.546.898,00	7,67	(8.651.667.102,00)	92,33
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>		<b>1.419.103.316.979,96</b>	<b>100</b>	<b>1.330.972.195.002,46</b>	<b>93,73</b>	<b>(89.043.087.338,70)</b>	<b>6,27</b>

Sumber BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**b) Belanja Langsung**

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.179.885.725.235,26 dengan realisasi sebesar Rp 1.011.959.973.004,21 atau 85,77 % dengan uraian sebagai berikut :

**(1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 152.558.482.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 142.422.453.280,00 atau 93,96 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 10.136.029.420,00 atau 6,64 % .

**(2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 613.769.474.270,00 dengan realisasi sebesar Rp 503.667.550.443,24 atau 82,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp 110.101.923.826,76 atau 17,94 %.

**(3) Belanja Modal**

Belanja Modal dalam APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 413.557.768.265,26 dengan realisasi sebesar Rp 365.869.969.280,97 atau 88,47% dengan sisa anggaran sebesar Rp 47.687.798.984,29 atau 11,53 %.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Belanja Langsung**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	<b>Belanja Langsung</b>					
2.1	Belanja Pegawai (belanja honor pegawai)	152.692.026.730,06	14.422.453.280,00	93,36	(10.136.029.420,00)	6,64
2.2	Belanja Barang dan Jasa	613.769.474.270,00	503.667.550.443,24	82,06	(110.101.923.826,76)	17,94
2.3	Belanja Modal	413.557.768.265,26	365.869.969.280,97	88,47	(47.687.798.984,29)	11,53
	<b>Jumlah Belanja langsung</b>	1.179.885.725.235,26	1.011.959.973.004,21	85,77	(167.925.752.231,05)	14,23

Sumber BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**c) Surplus/Defisit**

Dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 defisit dianggarkan sebesar Rp 212.692.026.730,06 dengan realisasi defisit sebesar Rp 91.332.393.736,89 atau 42,94 %.

**d) Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 212.692.026.730,06 dengan realisasi sebesar Rp 217.692.026.730,06 atau 102,35 %, dengan uraian sebagai berikut:

**(1) Pembiayaan Penerimaan**

Pada APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu dianggarkan sebesar Rp 217.692.026.730,06, dengan realisasi sebesar Rp 217.692.026.730,06 atau 100%.

**(2) Pembiayaan Pengeluaran**

Pembiayaan Pengeluaran dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan tidak ada realisasi.

**(3) SiLPA Tahun Berkenaan**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA) Tahun Berkenaan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 126.359.632.993,17 dimana SiLPA tersebut sama dengan Kas di Kas Daerah ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.

Jumlah SiLPA tersebut di atas dapat berubah mengingat angka-angka yang disajikan merupakan angka-angka sementara yang belum diperiksa BPK-RI (*unaudited*).

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah, Pengeluaran dan SiLPA**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan Daerah</b>				
1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	217.692.026.730,06	217.692.026.730,06	-	100
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah 1</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan Daerah</b>				
2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemda)	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	
2.3	Pembayaran Pokok Utang				
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	<b>Jumlah 2</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(5.000.000.000,00)</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>212.692.026.730,06</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	<b>-</b>	<b>126.359.632.993,17</b>	<b>126.359.632.993,17</b>	

Sumber BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Tabel 3.6**  
**Rekapitulasi Target dan Realisasi APBD**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) :</b>				
1.1.1	Pajak Daerah	578.237.062.209,57	629.136.457.212,39	50.899.395.002,82	8,80
1.1.2	Retribusi Daerah	19.409.736.914,87	5.434.540.818,00	(13.975.196.096,87)	-72,00
1.1.3	Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	(3.193.582.572,95)	-37,57
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	131.045.293.810,72	70.162.296.996,14	(60.882.996.814,58)	-46,46
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.</b>	<b>7373.192.092.935,16</b>	<b>710.039.712.453,58</b>	<b>(27.152.380.481,58)</b>	<b>-3,68</b>
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan :</b>				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	(54.991.907.332,00)	-31,28
1.2.2	Dana Alokasi Umum ( DAU )	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	(7.259.605.550,00)	-0,74
1.2.3	Dana Alokasi Khusus ( DAK )	455.719.877.000,00	438.282.095.677,00	(19.611.963.389,00)	-3,83
	<b>Jumlah Dana Perimbangan 2</b>	<b>1.619.104.922.550,00</b>	<b>1.539.415.628.355,00</b>	<b>(81.863.476.261,00)</b>	<b>-4,92</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :</b>				
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	(28.767.531.900,00)	-95,89
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>1.232.468.100,00</b>	<b>(28.767.531.900,00)</b>	<b>-95,89</b>
	<b>Total Pendapatan / Penerimaan Daerah (1+2+3)</b>	<b>2.386.297.015.485,16</b>	<b>2.250.687.808.908,58</b>	<b>(135.609.206.576,58)</b>	<b>-5,68</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai	667.619.827.029,36	620.83.342.868,21	(46.782.484.161,15)	-7,01
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	262.214.900.000,00	254.263.301.000,00	(7.951.599.000,00)	-3,03
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	943.000.000,00	700.000.000,00	(243.000.000,00)	-25,77
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi/Kab/Kota/Desa	362.199.953.426,60	351.012.561.851,05	(11.187.391.575,55)	-3,09
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Desa	116.755.422.524,00	102.528.477.024,00	(14.226.945.500,00)	-12,19
2.1.8	Belanja tak terduga	9.370.214.000,00	718.546.898,00	(8.651.667.102,00)	-92,33
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung 1</b>	<b>1.419.103.316.979,96</b>	<b>1.330.060.229.641,26</b>	<b>(89.043.087.338,70)</b>	<b>-6,27</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
2.2.1	Belanja Pegawai	152.558.482.700,00	142.422.453.280,00	(10.136.029.420,00)	-6,64
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	613.769.474.270,00	503.667.550.443,24	(110.101.923.826,76)	-17,94
2.2.3	Belanja Modal	413.557.768.265,26	365.869.969.280,97	(47.687.798.984,29)	-11,53
	<b>Jumlah Belanja Langsung 2</b>	<b>1.179.885.725.235,26</b>	<b>1.011.959.973.004,21</b>	<b>(167.925.752.231,05)</b>	<b>-14,23</b>

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Total Belanja Daerah (1 + 2)</b>	<b>2.598.989.042.215,22</b>	<b>2.342.020.202.645,47</b>	<b>(256.968.839.569,75)</b>	<b>-9,89</b>
	<b>Surplus / (Defisit) (Belanja - Pendapatan)</b>	<b>(212.692.026.730,06)</b>	<b>(91.332.393.736,89)</b>	<b>121.359.632.993,17</b>	<b>-57,06</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>Penerimaan Daerah</b>				
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran			-	-
3.1.1	(SILPA) Tahun Lalu	217.692.026.730,06	217.692.026.730,06		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah 1</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	-	-
3.2	<b>Pengeluaran pembiayaan Daerah</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemda)	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah 2</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	-	<b>(5.000.000.000,00)</b>	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>212.692.026.730,06</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>2,30</b>
3.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-	<b>126.359.632.993,17</b>	<b>126.359.632.993,17</b>	-

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. URUSAN PENDIDIKAN

#### 1.1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1.1.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 726.283.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 421.106.221,00 atau 57,98%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya lomba peserta didik dan pendidikan PAUD Tk. Provinsi diikuti sebanyak 49 orang dan tersosialisasikannya Parenting Education sebanyak 63 orang.



- 1.1.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.421.169.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.880.372.100,00 atau 77,66%. Keluaran Kegiatan adalah terlaksananya lomba siswa SD/MI tingkat Provinsi yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diikuti oleh 63 orang peserta, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) diikuti sebanyak 133 orang, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) diikuti sebanyak 77 orang dan Pengadaan Buku bacaan perpustakaan untuk SD. Akan tetapi Pengadaan Buku bacaan perpustakaan untuk SD ini tidak terlaksana.



- 1.1.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp3.425.206.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 2.950.347.500,00 atau 86,14%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti oleh 91 orang peserta, 6 Pengawas, dan 6 Panitia terdiri dari Lomba Matematika, IPA, IPS, terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh 182 orang peserta, Juri 25 orang, dan Panitia 22 orang, terdiri dari 8 Bidang Lomba (Festival Kreativitas Seni Tari, Festival Musik Tradisional, Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia, Story Telling, Cipta dan Baca Pusi, Gitar Solo, Menyanyi Solo, dan Debat Bahasa Indonesia), terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan diikuti oleh 175 orang peserta, 100 (Wasit/Juri/Teknikal Delegate) dan Panitia 40 orang, terlaksananya Kemah Tekpram Penggalang tingkat Sekolah Menengah Pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan diikuti oleh 256 orang peserta, 19 orang (Narasumber/Fasilitator) dan Panitia 20 orang dan Pengadaan Buku bacaan perpustakaan untuk SMP se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 210 SMP Negeri dan Swasta dan masing masing sekolah mendapat 10 buku (2 judul).





Gambar 1.6  
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)



Gambar 1.7  
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)



Gambar 1.8  
Olimpiade Sains Nasional (OSN)



Gambar 1.9  
Kemah Tekpram Penggalang Tk. SMP



- 1.1.4. Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.728.343.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.548.920.200,00 atau 89,62%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya lomba siswa Pendidikan Khusus tingkat Provinsi, dengan 3 jenis lomba sebagai berikut : terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) diikuti sebanyak 126 orang (pedamping & peserta), 9 mata lomba ; terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) diikuti sebanyak 126 orang (pedamping & peserta), 9 mata lomba, Terlaksananya pelatihan/workshop pendidikan khusus sebanyak 40 peserta dan Pengadaan buku bacaan perpustakaan. Akan tetapi Pengadaan Buku bacaan perpustakaan ini tidak terlaksana.





- 1.1.5. **Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.242.740,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.054.609.222,00 atau 84,86%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus SLBN Pangkalpinang.
- 1.1.6. **Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 560.187.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 497.563.464,00 atau 88,82%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya pengelolaan fungsi pelayanan pendidikan khusus di SLB Negeri Sungailiat.
- 1.1.7. **Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 451.699.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 446.343.000,00 atau 98,81%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Muntok.
- 1.1.8. **Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 296.980.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 281.886.500,00 atau 94,92%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Koba.
- 1.1.9. **Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 471.670.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 454.617.500,00 atau 96,38%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Toboali.
- 1.1.10. **Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 477.470.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 392.941.500,00 atau 82,30%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Tanjung Pandan.

- 1.1.11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 435.530.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 423.087.250,00 atau 97,14%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Manggar.

➤ **Permasalahan dan solusi**

• **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dasar
2. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) satuan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) dan pemenuhan semua komponen akreditasi.
3. Belum semua satuan pendidikan dasar memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan
4. Tenaga Kependidikan dan Pendidik banyak yang belum memenuhi persyaratan kompetensi, kualifikasi dan belum bersertifikasi.
5. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
6. Belum meratanya distribusi guru disetiap satuan pendidikan baik di perkotaan dan di pedesaan

• **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:

1. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar kepada masyarakat/orang tua/wali murid.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana di satuan PAUD sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pemenuhan komponen akreditasi serta Pembangunan lembaga PAUD yang baru, baik Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak(TPA), maupun lembaga satuan Paud Sejenis lainnya terutama pada daerah terpencil, Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Penunjang Lainnya (RPL), Rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan ringan dan lain-lain
3. Beasiswa bagi guru untuk memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan .
4. Melakukan Koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta sinkronisasi koordinasi sehingga dapat membuat perencanaan program yang lebih baik lagi.
5. Memfasilitasi pemerataan guru



## 1.2 Program Pendidikan Non Formal

- 1.2.1. Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 309.944.400,00 realisasi anggaran sebesar Rp 259.013.400,00 atau 83,57%. Keluaran kegiatan terlaksananya Lomba Peserta Didik Kesetaraan paket A,B,C sebanyak 70 peserta didik.



- 1.2.2 Kegiatan Perluasan Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan Mutu dan Penuntasan Buta Aksara** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.291.397.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.109.839.900,00 atau 85,94%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS berprestasi diikuti oleh 15 orang peserta, Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Lokarya Akreditasi Lembaga PNF diikuti 150 orang peserta.





### ➤ **Permasalahan dan solusi**

#### • **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk semua dan seumur hidup.
2. Belum semua lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan persyaratan administratif untuk akreditasi.
3. Belum semua program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersenergi.

#### • **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :

1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk semua dan seumur hidup dan wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) 9 tahun melalui pendidikan kesetaraan paket A setara SD dan Paket B setara SLTP.
2. Dukungan sarana dan prasarana pada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
3. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **1.3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

- 1.3.1. **Kegiatan Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750.338.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 492.478.723. atau 65,63%,- Keluaran kegiatan adalah tersedianya Data Pokok Pendidikan dan tersedianya Profil Pendidikan.



Gambar 1.19  
Rangkuman Data Pokok Pendidikan  
Tahun 2017/2018



Gambar 1.20  
Profil Pendidikan Tahun 2017

#### 1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1.4.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Pendidikan** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 235.626.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 187.707.250,00 atau 79,66%,-. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya Renstra 2017 - 2022, Renja 2018 dan Renja Perubahan 2017.



Gambar 1.21  
Rencana Strategis Dinas Pendidikan  
Prov.Kep.Bangka Belitung 2017-2022

- 1.4.2 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.150.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 46.550.000,00 atau 87,58%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ, laporan akhir tahun dan Laporan Penyerapan Anggaran.





Gambar 1.22  
Laporan Kinerja Dinas Pendidikan  
Pendidikan Prov.Kep.Bangka  
Belitung

#### ➤ **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**  
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :
  1. Belum semua program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersenergi.
- **Solusi**  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:
  1. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **1.5 Program Pendidikan Menengah Tinggi**

- 1.5.1. Kegiatan Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.490.814.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 7.276.112.468,00 atau 76,66%,- Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA diikuti sebanyak 123 orang, terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA diikuti sebanyak 112 orang, terlaksananya Lomba Parade Cinta Tanah Air (PCTA) diikuti sebanyak 125 orang, terlaksananya Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris diikuti sebanyak 54 orang dan juri sebanyak 12 orang , terlaksananya Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar diikuti 101 orang, terlaksananya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa SMA (OSIS) diikuti sebanyak 63 orang, terlaksananya Kemah Penguatan Pendidikan Karakter (KEPAK) SMA diikuti 83 peserta, terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) diikuti sebanyak 185 orang, terlaksananya Lomba Pendidik/Tenaga Kependidikan (Olimpiade Guru Nasional) diikuti sebanyak 176 orang dari 11 Mata Pelajaran, terlaksananya Kurikulum K.13 Tahap I diikuti 94 peserta, 7 narasumber, 8 instruktur, terlaksananya Kurikulum K.13 Tahap II diikuti 168 orang, terlaksananya Pembuatan Naskah Soal Ujian Sekolah SD Sederajat dan Paket A antara lain Tim Pengetik 5 orang, Tenaga Ahli Penulis Soal 41 orang, Tim Keamanan 2 orang dan Pengadaan Buku bacaan perpustakaan SMA. Akan tetapi Pengadaan Buku bacaan perpustakaan untuk SMA ini tidak terlaksana.



Gambar 1.23  
Latihan Dasar Kepemimpinan (OSIS)



Gambar 1.24  
Kemah Penguatan Pendidikan Karakter (KEPAK) SMA



Gambar 1.25  
Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar



Gambar 1.26  
Olimpiade Guru Nasional



Gambar 1.27  
FLS2N



Gambar 1.28  
O2SN



Gambar 1.29  
Debat Bahasa



Gambar 1.30  
OSN





- 1.5.2. Kegiatan Peningkatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.281.906.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 8.284.974.711,00 atau 73,44%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi diikuti 45 peserta dan Diklat Pembekalan Guru Berprestasi diikuti 15 peserta, terlaksananya Diklat Pengembangan Model dan Pembelajaran diikuti 79 peserta, terlaksananya Pembekalan Tugas Keprofesian Kepala Sekolah dan Pengawas SMK dalam pelaksanaan supervisi kelas diikuti 65 peserta, terlaksananya Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah dengan sub kegiatan seleksi calon kepala sekolah diikuti 75 peserta, diklat in service diikuti 53 peserta, On the job learning 1,2,3 diikuti 158 peserta, terlaksananya Pelatihan Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Ujian Nasional SMK diikuti 73 peserta, terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 666 peserta dan Training Camp (TC) Lomba Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) Sekolah Menengah Kejuruan diikuti 15 peserta dari 6 bidang lomba, terlaksananya Gebyar SMK diikuti sebanyak 90 peserta, terlaksananya Workshop Pendidikan Karakter dan Kewirausahaan siswa SMK diikuti 139 orang, terlaksananya TOT Implementasi Kurikulum SMK diikuti 117 orang, terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi diikuti 290 orang dari 19 bidang lomba, terlaksananya Pendidikan dan Latihan Master Teacher Dalam Peningkatan Kompetensi Guru SMK diikuti 102 orang, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi diikuti 572 orang dari 5 bidang lomba dan Training Camp (TC) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) diikuti 15 orang.





Gambar 1.34  
Guru Berprestasi



Gambar 1.35  
Kurikulum K13



Gambar 1.36  
Master Teacher



Gambar 1.37  
TOT Kurikulum



Gambar 1.38  
WorkShop Pendidikan Karakter dan Kewirausahaan siswa SMK



Gambar 1.39  
O2SN SMK



Gambar 1.40  
LKS



Gambar 1.41  
FLS2N SMK



**1.5.3. Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.179.455.000,00- dengan realisasi anggaran Rp. 7.920.626.437,00- atau 77,81 %. Adapun Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Tahap I dan II Pemberian Beasiswa Mahasiswa kurang Mampu Secara Ekonomi dengan Perguruan Tinggi sebanyak 21 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tersalurkan beasiswa mahasiswa kurang mampu secara ekonomi untuk biaya pendidikan lanjutan semester I, II, III, IV, V, VI, VII Tahun Anggaran 2017 untuk 766 mahasiswa, terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Secara Ekonomi dengan Perguruan Tinggi sebanyak 21 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlaksananya program beasiswa mahasiswa kurang mampu secara ekonomi yang melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi luar daerah pada Program Sarjana/Diploma IV yaitu sebanyak 5 orang mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, 4 orang mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, 45 orang mahasiswa di Perguruan Tinggi STIE TAZKI, 3 orang mahasiswa di UNSRI, Pemberian Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi akademik pada perguruan tinggi didalam daerah maupun luar daerah sebanyak 100 orang. Terlaksananya kegiatan Hafiz Qur'an jenjang SD –S1 sebanyak 56 orang dan terlaksananya Evaluasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa kurang Mampu Secara Ekonomi dengan Perguruan Tinggi sebanyak 21 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.







- 1.5.4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.603.900.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.072.630.213,00 atau 66,88%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.537.357.025,00 atau 51,25%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.300.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.031.059.012,00 atau 79,31%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 925.129.378,00 atau 92,51%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 720.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 327.747.260,00 atau 45,52%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.5.9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.240.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.486.421.283,00 atau 66,36%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.320.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 761.848.753,00 atau 57,72%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 600.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 576.300.000,00 atau 96,05%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 518.550.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 447.515.000,00 atau 86,30%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 487.461.500,00 atau 97,49%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.200.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.215.218.423,00 atau 55,24%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.600.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 661.004.926,00 atau 41,31%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 543.989.383,00 atau 60,44%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 728.092.540,00 atau 72,81%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 264.000.000,00 Realisasi anggaran

sebesar Rp 179.256.764,00 atau 67,90%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.5.19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Muntok**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.300.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 758.975.760,00 atau 58,38%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.20. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.050.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 989.157.210,00 atau 94,21%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.21. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.200.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.076.896.900,00 atau 89,74%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.22. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Rimba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 199.349.760,00 atau 99,67%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.23. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 615.050.000,00 atau 87,86%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.24. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.430.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.307.806.184,00 atau 91,45%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.25. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 663.546.473,00 atau 94,79%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.26. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 170.257.500,00 atau 68,10%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.27. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 512.386.708,00 atau 98,54%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.5.28. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Air Gegas**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 740.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 739.500.000,00 atau 99,93%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.29. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 823.530.000,00 atau 91,50%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.30. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.400.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 498.457.230,00 atau 35,60%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.31. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Katis**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 804.862.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 730.666.907,00 atau 90,78%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.32. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.750.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.106.886.661,00 atau 63,25%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.33. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungai Selan**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 276.506.500,00 atau 92,17%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.34. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.240.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.081.701.700,00 atau 87,23%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.35. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 722.794.610,00 atau 80,31%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.36. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 920.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 704.656.869,00 atau 76,59%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.37. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Renggiang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar

Rp 293.415.920,00 atau 83,83%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.5.38. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.312.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.067.468.391,00 atau 81,35%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.39. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.202.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.010.536.200,00 atau 84,04%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.40. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.202.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.010.536.200,00 atau 84,04%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.41. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.312.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.251.504.906,00 atau 95,37%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.42. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 910.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 812.315.844,00 atau 89,19%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.43. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 374.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 347.725.000,00 atau 92,88%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.44. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 851.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 629.525.150,00 atau 73,94%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.45. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendo Barat,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 844.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 680.274.500,00 atau 80,58%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.46. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendo Barat,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 216.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 179.799.600,00 atau 83,24%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.



- 1.5.47. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 669.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 584.262.200,00 atau 87,26%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.48. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.330.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 834.262.200,00 atau 62,72%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.49. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.404.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 785.103.820,00 atau 55,92%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.50. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 90.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 90.000.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.51. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 387.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 358.157.790,00 atau 92,55%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.52. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.440.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 922.800.500,00 atau 64,08%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.53. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.078.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 976.830.350,00 atau 90,60%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.54. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.156.448.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.009.234.000,00 atau 87,27%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.55. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 925.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 644.956.000,00 atau 69,71%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.56. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parittiga**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 430.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar

Rp 405.234.400,00 atau 94,20%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.5.57. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 880.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 489,899,250,00 atau 55,66%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.58. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 561,600,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 438,051,500,00 atau 78,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.59. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,058,200,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 731,552,878,00 atau 69,13%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.60. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubuk Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 565,200,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 238,604,900,00 atau 42,22%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.61. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 720,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 459,132,350,00 atau 63,77%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.62. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 498,600,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 459,184,600,00 atau 92,09%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.63. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungai Selan**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 522,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 276,505,392,00 atau 52,97%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.64. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungai Selan**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 907,200,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 649,989,696,00 atau 71,65%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.65. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 759,600,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 754,965,908,00 atau 99,39%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.5 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar



Rp 329,400,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 322,140,000,00 atau 97,80%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.5.66. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 279,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 231,942,000,00 atau 83,13%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.67. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,124,100,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1,067,123,250,00 atau 94,93%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.68. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50,400,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 18,700,000,00 atau 37,10%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.69. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 622,800,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 560,709,610,00 atau 90,03%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.70. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,281,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 943,258,300,00 atau 73,63%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.71. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 867,600,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 837,200,000,00 atau 96,50%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.72. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 820,800,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 629,497,867,00 atau 76,69%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.73. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 903,600,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 509,157,000,00 atau 56,35%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.74. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,218,600,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 635,083,424,00 atau 52,12%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.5.75. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,177,200,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 721,782,040,00 atau 61,31%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.76. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 352,800,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 241,522,250,00 atau 68,46%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.77. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 910,400,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 636,584,900,00 atau 69,92%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.78. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 696,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 502,057,539,00 atau 72,13%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.79. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,035,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1,005,846,129,00 atau 97,18%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.80. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Pesak**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 646,160,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 545,114,386,00 atau 84,36%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.81. Kegiatan Pengelolaan Dak Fisik SMK**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10,236,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 5,089,561,871,00 atau 49,72%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.5.82. Kegiatan Pengelolaan Dak Fisik SMA**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13,468,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 10,761,840,574,00 atau 79,91%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

➤ **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Belum semua Sekolah Menengah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
2. Masih terdapat kekurangan guru produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

3. Masih tingginya Drop Out (DO) siswa Sekolah Menengah.

- Solusi  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:
  1. Secara bertahap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
  2. Bea siswa bagi lulusan Sekolah Menengah untuk mengikuti pendidikan guru produktif dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru normatif dan adaptif menjadi guru produktif.
  2. Meningkatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bea Siswa Miskin (BSM) untuk siswa Sekolah Menengah.

**1.6. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

- 1.6.1. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,149,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1,149,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.2. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,157,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2,157,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.3. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 897,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 897,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.4. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 659,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 659,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.5. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 537,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 482,720,000 atau 89,79%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.6. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,486,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,479,240,000 atau 99,49%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.7. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 932,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 917,560,000 atau 98,41%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.8. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 359,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 359,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.9. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 424,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 424,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.10. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 410,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 410,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.11. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 551,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 551,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.12. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,099,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,046,248,000 atau 95,20%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.13. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,223,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1,223,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.14. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 999,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 999,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.15. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungaiselan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 278,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 278,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.16. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 931,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 931,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.17. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 730,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 730,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.18. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Parit tiga (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 854,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 854,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.19. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 386,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 380,800,000 atau 98,55%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.20. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 368,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 368,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.21. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 971,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 971,040,000 atau 99,94%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.22. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Air gegas (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 516,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 506,240,000 atau 97,99%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.23. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 463,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 461,160,000 atau 99,52%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.24. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 81,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.25. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 140,280,000 atau 97,28%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.26. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,503,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,503,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.27. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,097,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,092,280,000 atau 99,52%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.28. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 700,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.29. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Badau (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 641,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 641,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.30. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran Rp 184,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp184,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.31. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 842,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 842,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.32. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Dendang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 242,200,000 atau 94,54%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.33. **Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 639,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp.639,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.



- 1.6.34. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 205,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.35. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,115,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,115,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.36. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,006,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,006,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.37. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,110,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,110,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.38. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 844,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 844,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.39. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,204,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,204,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.40. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pemali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,086,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,086,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.41. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 357,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.42. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 674,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.43. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 687,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 687,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.44. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 305,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 305,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.45. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Mendobarat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 684,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 684,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.46. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 79,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.47. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Mendobarat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 245,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 245,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.48. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Merawang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 562,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 562,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.49. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalanbaru (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 526,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 526,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.50. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Namang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 578,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 578,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.51. Kegiatan Pengelolaan BOS pada pada SMA Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 842,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 842,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.52. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungaiselan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 324,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 324,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.53. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Sungaiselan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 730,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 730,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.54. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 513,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.55. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 487,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 487,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.56. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 814,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 814,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.57. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Jebus (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 834,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 834,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.



- 1.6.58. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Parittiga (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 494,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 494,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.59. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 732,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 732,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.60. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 841,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 841,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.61. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 775,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 775,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.62. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 127,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 127,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.63. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lepar pongok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 302,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 302,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.64. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 648,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 648,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.65. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 511,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 511,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.66. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 635,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 635,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.67. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Lepar pongok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 243,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 243,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.68. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,148,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1,148,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.69. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 938,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 938,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.70. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 980,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 980,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.71. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Membalong (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 621,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 621,600,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.72. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sijuk (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 637,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 637,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.73. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 546,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 546,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.74. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 849,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 849,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.75. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Gantung (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 793,800,000 realisasi anggaran sebesar Rp 793,800,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.76. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Damar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 449,400,000 realisasi anggaran sebesar Rp 449,400,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.77. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 539,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 539,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.78. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 194,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 194,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.79. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 89,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.80. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 84,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.81. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 84,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.82. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp 84,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.83. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 118,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 118,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.84. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84,200,000 realisasi anggaran sebesar Rp 84,200,000 atau 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

## 2. URUSAN KESEHATAN

### 2.1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**2.1.1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.573.150 realisasi anggaran sebesar Rp. 131.995.000,- atau 93,90% dan Fisik 93,10%. Keluaran Kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan renstra PD 2017-2022, renja PD 2018 dan renja perubahan 2017.

	
<p>Gambar 2.1 Dokumen Renstra PD 2017-2022</p>	<p>Gambar 2.2 Dokumen renja PD 2018</p>
	
<p>Gambar 2.3 Dokumen Renja Perubahan 2017</p>	<p>Gambar 2.4 Pertemuan sinkronisasi rencana kerja Provinsi Kep. Babel dengan Kab/Kota</p>

**2.1.2. Kegiatan Penyusunan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggran sebesar Rp. 56.783.000,0 realisasi anggaran sebesar Rp. 45.125.000,- atau 79,46% dan realisasi fisik 80%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya laporan triwulan pengendalian dan evaluasi renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan semesteran keuangan PD.



- **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**

1. Belum sinkronnya dokumen perencanaan Kabupaten/Kota. Provinsi dan Pusat terhadap program ataupun indikator kinerja yang digunakan sebagai pelaksanaan program kesehatan di masing-masing wilayah kerja dan belum terintegrasinya program-program kesehatan secara internal maupun lintas sektor sehingga pencapaian kinerja kesehatan belum tercapai secara maksimal
2. Duplikasi penganggaran pada honorarium tim kegiatan. Laporan kinerja keuangan dan perjadiin luar daerah.
3. Hasil evaluasi kinerja program belum maksimal digunakan untuk dasar perencanaan di setiap program.

- **Solusi:**

1. Sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat provinsi dan Kabupaten kota khususnya program kesehatan sesuai dengan pembagian tugas, fungsi/peran dan kewenangan masing-masing serta pengintegrasian program kegiatan bidang kesehatan secara internal maupun lintas sektor.
2. Penguatan perencanaan melalui integrasi pelaksanaan kegiatan/penyusunan anggaran terpadu, sehingga anggaran dapat termamfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan dan tidak terjadi duplikasi pada perencanaan anggaran.

3. Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja program kegiatan secara berkala (pemanfaatan di perencanaan program).

## 2.2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

**2.2.1. Kegiatan Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 455.890.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 336.309.309,- atau 73,79% dan realisasi fisik 85,67%. Keluaran kegiatan :

1. Tersedianya dokumen rencana kebutuhan obat kesehatan dasar dan program
2. Tersedianya obat
3. Tersedianya sarana –prasarana instalasi farmasi.



Gambar 2.9  
Dokumen rencana kebutuhan obat  
kesehatan dasar dan program



Gambar 2.10  
Tersedianya obat



Gambar 2.11  
Tersedianya sarana prasarana instalasi  
farmasi

- **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**

1. Penyusunan rencana kebutuhan Obat belum sepenuhnya berdasarkan data-data yang valid antara lain data ketersediaan obat, data pemakaian.
2. Belum Optimalnya koordinasi antara pengelola program dengan pengelola farmasi dalam penyusunan rencana kebutuhan obat.



3. Penyedia obat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan.

➤ **Solusi:**

1. Adanya penyusunan secara berjenjang mulai tingkat puskesmas, tingkat kab/kota dan Provinsi, mengoptimalkan TPOT (tim perencanaan obat terpadu) yang terdiri dari pengelola obat dan pengelola obat program.
2. Pemberian Sanksi atau mem-blacklist penyedia obat yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan.
3. Proses pengadaan satu pintu dengan melakukan survey sebelumnya.

### 2.3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 2.3.1. **Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 127.950.000,- atau 85,30% dan realisasi fisik 83,33%. Keluaran kegiatan adalah tersediannya dokumen HKN.



- **Permasalahan dan Solusi**

➤ **Permasalahan:**

1. Pelaksanaan kegiatan HKN belum di manfaatkan secara optimal
2. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan kinerja program kegiatan.



➤ **Solusi:**

1. Pemanfaatan kegiatan HKN dalam rangka penguatan dan pengetahuan program-program kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
2. Dalam menyusun usulan perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang ada.

## 2.4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

**2.4.1. Kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.463.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 199.705.500,- atau 82,37% dan realisasi fisik 87,50%. Keluaran kegiatan adalah 1. Tersediannya informasi kesehatan melalui pameran, media cetak dan media elektronik dalam rangka promosi kesehatan 2. Tersosialisasinya program kesehatan di institusi pendidikan (sekolah).

	
<p>Gambar 2.16 Dokumen pameran Babel Fair</p>	<p>Gambar 2.17 Dokumen pameran Babel Fair</p>
	
<p>Gambar 2.18 Talkshow Promosi Kesehatan sekolah</p>	<p>Gambar 2.19 Talkshow promosi Kesehatan sekolah</p>

• **Permasalahan dan Solusi**

➤ **Permasalahan:**

1. Realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,36% disebabkan karena tidak dapat melakukan cetak baliho ukuran 4m x 8m x 10m karena di pangkalpinang tidak ada baliho dengan ukuran tersebut.
2. Honor tidak dicairkan karena bersamaan dengan pencairan honorarium tim kegiatan.

3. Perjalanan dinas dalam daerah untuk transport panitia kegiatan talkshow di kabupaten bangka tengah tidak di cairkan karena kegiatan diadakan kurang dari 5km dari kota pangkalpinang.
4. Dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hal ini terlihat masih banyak perilaku masyarakat membuang sampah dan BAB (Buang Air Besar) sembarangan.

➤ **Solusi:**

1. Pengangggaran cetak baliho disesuaikan dengan baliho/billboard yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Jadwal Pencairan antara Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Tim Kegiatan tidak bersamaan/waktu yang berbeda.
3. Diharapkan adanya revisi Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas yang mengatur tentang pemberian transport lokal tanpa melihat jarak tempuh ke lokasi kegiatan, sehingga transport lokal ini bisa di bayarkan.
4. Perlu ditingkatkan kegiatan promosi kesehatan yang merupakan ujung tombak dari kesehatan.

## 2.5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

**2.5.1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.245.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 199.023.700,- atau 93,77% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya seminar gizi masyarakat dan jumlah balita gizi buruk sitemukan/ditangani dan penyediaan bahan kontak kasus.





Gambar 2.22  
Bantuan pangan diterima oleh petugas  
Kab. Bangka selatan



Gambar 2.23  
Kegiatan distribusi bantuan pangan  
bagi anak gizi buruk

- **Permasalahan dan Solusi:**

- **Permasalahan:**

Belum tercapainya target program berdasarkan data sampai dengan November 2017, persentase balita yang ditimbang berat badannya 71,93%, persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan 71,35% persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan 92,15%, persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan 87,40% persentase remaja putri mendapat TTD 56,65%, persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A 72,01%, persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD 78,89%, persentase balita ditimbang yang naik berat badannya 87,40%.

- **Solusi**

- a. Intervensi Gizi spesifik

Pelayanan gizi bagi anak balita:

- Meningkatkan pelayanan bagi anak balita di Posyandu dengan melakukan pengukuran rutin status gizi anak balita (BB/TB/PB)
- Konseling gizi bagi anak balita
- Merujuk anak yang tidak naik dua kali berat badannya, menangani anak dengan gizi buruk yang dirujuk dan diberikan PMT

Pelayanan gizi bagi ibu hamil:

- Meningkatkan pelayanan gizi ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan antropometri ibu hamil
- Konseling ibu hamil
- Kelas edukasi bagi ibu hamil
- Penanganan Ibu hamil KEK dengan PMT

Pelayanan Gizi remaja putri:

- Meningkatkan pelayanan gizi remaja putri di sekolah, dengan pemberian tablet tambah darah 52 tablet
- Konseling gizi remaja dan PMT AS

b. Intervensi Gizi Sensitif

- Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan masalah gizi
- Meningkatkan peran serta masyarakat bersama kader dan keluarga
- Pendekatan dengan Tim RAD pangan Daerah
- Pendekatan melalui sekolah
- Pendekatan ke RS dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian ASI dan Susu Formula
- Pendekatan ke RS dalam menetapkan pelaksanaan IMD (Inisiasi Menyusu Dini)

## 2.6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

**2.6.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 568.942.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 403.663.358,- atau 70,95% dan realisasi fisik 91,42%. Keluaran kegiatan adalah tersediannya dokumen monev, dokumen pemantauan pasar sehat, dokumen lokakarya air dan dokumen hasil verifikasi kab/kota sehat.



Gambar 2.24  
Dokumen Monev



Gambar 2.25  
Dokumen monev



Gambar 2.26  
Dokumen lokakarya air



Gambar 2.27  
Pertemuan lokakarya Pengolahan Air  
bagi petugas kesling

Gambar 2.28 Kegiatan inspeksi pasar sehat	Gambar 2.29 Dokumen Pemantauan pasar sehat
Gambar 2.30 Dokumen hasil verifikasi kab/kota sehat	Gambar 2.31 Kegiatan Verifikasi Kab/Kota Sehat

## • Permasalahan dan Solusi

### ➤ Permasalahan:

1. Penyerapan anggaran yang hanya 70,94% disebabkan karena adanya rincian belanja yang tidak sesuai dengan usulan sehingga harus dilaksanakan perubahan anggaran pada bulan juli s.d 18 oktober 2017 serta adanya penyesuaian pada anggaran sewa kamar, makan minum rapat, penyesuaian rill cost anggaran perjalanan dinas dan harga barang yang di beli.
2. Hasil evaluasi pelaporan program bahwa dalam peningkatan kualitas lingkungan sehat masih menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan Kegiatan program.
3. Belum pernah adanya lokakarya pengelolaan air secara sederhana di tingkat provinsi.
4. Belum dilaksanakan penilaian kabupaten/Kota sehat secara rutin (2 tahun sekali) oleh kemendagri.
5. Sebagian besar petugas kesehatan kabupaten dan puskesmas se provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum tersosialisasi tentang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
6. Kegiatan uji petik pemeriksaan sampel limbah medis cair di Rumah Sakit belum menyeluruh.

### ➤ Solusi:

1. Perjalanan dinas sebaiknya dibuat dengan rincian 1 paket biaya perjalanan dinas tanpa adanya uraian dan sebelum DPA disahkan sebaiknya perencanaan mengecek uraian pada DPA apakah sesuai dengan usulan kegiatan terakhir atau tidak sehingga tidak



perlu dilaksanakan perubahan anggaran pada pertengahan tahun dan rencana penarikan sesuai dengan realisasi pencairan anggaran.

2. Dilakukan peningkatan pembinaan pengawasan dan monitoring evaluasi program kesehatan lingkungan.
3. Perlu di lakukannya Lokakarya pengelolaan air secara sederhana dengan teknologi tepat guna.
4. Dilaksanakan penilaian Kabupaten/Kota sehat bersama tim dari Bapedda provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten/kota.
5. Dilakukannya orientasi Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) bagi kepala seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga Kabupaten/Kota dan petugas Sanitarian Se provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dilakukan uji petik dengan melakukan One the job Training (OJT) pada petugas pengelola limbah dan melakukan pengambilan sampel limbah Medis di Rumah sakit Pemerintah Daerah atau Swasta.

## 2.7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- 2.7.1. Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 598.579.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 472.735.732,- atau 78,98% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya seminar kesehatan penyakit tidak menular (PTM), tersedianya bahan habis pakai PTM, tersedianya dokumen pemantauan PTM dan koordinasi ke kemenkes, tersedianya dokumen gerakan babel cerdas dan terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji serta rekrutmen calon TKHI.



Gambar 2.32  
Seminar kesehatan PTM



Gambar 2.33  
Dokumen Bahan Habis Pakai





**2.7.2. Kegiatan Peningkatan Teknis Laboratorium Klinis dan Kesmas** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.937.287,- realisasi anggaran sebesar Rp. 129.937.287,- atau 100% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah tersosialisasinya tenaga kesehatan tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan kesmas UPTD Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

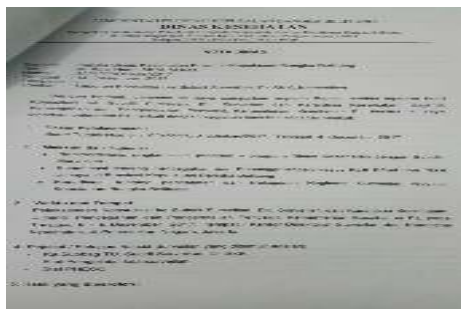





**2.7.3 Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.342.498.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.456.730.374 atau 62,19,-% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 1. terlaksananya koordinasi terpadu bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 2. Tersedianya dokumen rakor bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 3. Tersedianya laporan pengendalian vektor di breeding place pada daerah dengan kasus tinggi malaria 4. Terlaksananya laporan pemantauan hepatitis dan deteksi dini hepatitis B dan C pada bumil dan nakes 5. Terlaksananya evaluasi data TB MDR 6. Tersedianya laporan gerakan masyarakat PDN 3M plus 1 rumah 1 jumantik 7. Tersedianya sarana dan prasarana program imunisasi 8. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi 9. Tersedianya dokumen evaluasi surveilens PD3i 10. Tersedianya dokumen supervisi dan bimtek surveilen investigasi KLB, koordinasi SKDR dan Koordinasi Surveilens PD3i.



	
<p>Gambar 2.43</p> <p>Laporan pengendalian vektor dan breeding place kasus malaria</p>	<p>Gambar 2.44</p> <p>Laporan pemantauan hepatitis dan deteksi dini hepatitis B dan C pada bumil dan nakes</p>
	
<p>Gambar 2.45</p> <p>Evaluasi data TB MDR</p>	<p>Gambar 2.46</p> <p>Leaflet gerakan masyarakat PSN 3Mplus 1 rumah 1 jumantik</p>
	
<p>Gambar 2.47</p> <p>Dokumen laporan gerakan masyarakat PSN 3Mplus 1 rumah 1 jumantik</p>	<p>Gambar 2.48</p> <p>Sarana dan prasarana program imunisasi</p>

	
<p align="center">Gambar 2.49 Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi</p>	<p align="center">Gambar 2.50 Dokumen supervisi dan bimtek surveilans investigasi KLB koordinasi SKDR dan koordinasi surveilans PD3i</p>

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Realisasi keuangan yang hanya 78,98% dikarenakan rill cost penyesuaian dengan tempat pelaksanaan di fasilitas pemerintah, penyesuaian pemakaian anggaran perjalanan dinas, penyesuaian honor dengan jadwal kegiatan dan penyesuaian pembayaran uang saku dengan jumlah peserta.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi faktor resiko penyakit tidak menular.
3. Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum continue (terus menerus).
4. Adanya pemekaran wilayah desa dengan sasaran yang tidak diimunisasi cenderung mengelompok serta masih adanya penolakan dari masyarakat untuk diimunisasi.
5. Dibeberapa kabupaten terjadi pergantian petugas imunisasi serta feed back laporan di beberapa kabupaten/Kota ke Puskesmas tidak berjalan dengan baik.
6. PWS di puskesmas masih belum ditindaklanjuti secara maksimal serta tindaklanjut pembinaan yang dilakukan tim provinsi ke kab/kota dan salah satu puskesmas terpilih belum dilaksanakan secara maksimal oleh pengelola kabupaten/kota dalam pembinaan ke semua puskesmas.
7. Kurangnya dukungan kebijakan dan dana APBD kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan surveilans terutama dalam sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)
8. Masih adanya anggapan oleh pihak kebijakan di beberapa kabupaten/Kota bahwa pelaporan kejadian luar Biasa (KLB) sebagai hal yang jelek dan mempengaruhi kondisi politik daerah sehingga tidak dilaporkan segera.
9. Belum semua fasyankes menggunakan SIHA dalam pencatatan dan pelaporan HIV-AIDS dan IMS di Fasyankes sehingga ada beberapa layanan yang masih manual dalam pencatatan dan pelaporan HIV-AIDS dan IMS.
10. Kurangnya SDM di fasyankes yang sudah terlatih untuk pelayanan KTHIV dan IMS di fasyankes sehingga layanan KTHIV dan IMS belum bisa dilaksanakan di semua fasyankes.

11. Pelaporan secara esismal masih belum maksimal sehingga pelaporan masih diimbangi laporan secara manual, disebabkan karena kurangnya SDM dalam pengoperasian komputer dan jumlah alat pengolah data/computer di Puskesmas yang terbatas.
12. Munculnya kasus positif malaria di pesisir pantai maupun jauh dari pesisir pantai secara ilegal di wilayah kerja puskesmas dikarenakan daerah tersebut masih dikatakan daerah penularan atau bukan lagi daerah reseptif karena masih terjadi transmisi penularan ditandai dengan ditemukannya parasit malaria pada penambang ilegal, adanya lagun bekas kolong yang terdapat jentik nyamuk malaria (*anopheles*)/nyamuk *anopheles* di sekitar kamp penambang timah ilegal di dusun tersebut.
13. Kecepatan Pelaporan KDRS (Kewaspadaan Dini Rumah Sakit) DBD masih lambat di beberapa pelayanan sehingga penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kasus terlambat.
14. Kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dan Gerakan 3M plus belum berjalan maksimal di seluruh Kabupaten/Kota terkait minimnya penganggaran terutama advokasi dari Puskesmas kepada kepala Desa/Kelurahan dalam gerakan PSN dan 3M plus serta adanya faktor resiko yg tidak dapat/sulit dikendalikan seperti kepadatan penduduk/pemukiman, urbanisasi tidak terkendali, mobilisasi, kondisi lingkungan seperti tempat perindukan nyamuk *aedes aegypti* yang tidak terpantau oleh masyarakat serta faktor perilaku masyarakat.

➤ **Solusi:**

1. Peningkatan KIE kepada Masyarakat
2. Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggali kemitraan dengan pihak swasta.
3. Pelaksanaan *Sweeping* dan penentuan sasaran yang tepat. Pembagian sasaran disesuaikan dengan proporsi angka kelahiran, tidak di sama-ratakan serta pengintensifan sosialisasi program imunisasi ke masyarakat.
4. Kebijakan daerah agar tidak terlalu sering mengganti petugas yang sudah mendapatkan pelatihan tentang program terkait sertamelakukan *feed back* secara rutin berkala mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
5. Tindak lanjut PWS (*Pemantauan Wilayah Setempat*) dengan pembahasan di Lintas Program dan Lintas Sektor serta memberikan OJT kepada petugas pencatatan dan pelaporan untuk menggunakan SIHA dalam pencatatan dan pelaporan HIV-AIDS dan IMS.
6. Advokasi program dalam memaksimalkan dukungan dana kegiatan program penemuan dan pemantauan pengobatan malaria, survei-survei malaria, pengendalian vektor/pengendalian nyamuk malaria dari dukungan - dukungan *stakeholder* terkait baik dana APBD, APBN, BOK maupun dana hibah.
7. Advokasi kepada pengambil kebijakan untuk komitmen dalam penetapan dan penanggulangan KLB.



8. Melakukan advokasi ke pimpinan untuk mendapatkan dukungan anggaran untuk program HIV-AIDS dan IMS serta meningkatkan koordinasi antar program dalam pelaksanaan program HIV-AIDS dan IMS.
9. Advokasi terhadap penentu kebijakan di Puskesmas dan Kabupaten sampai tingkat Provinsi agar petugas yang sudah terlatih terkait program malaria ataupun MDG'S ditempatkan secara proporsional untuk kesimbangan program.
10. Advokasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan alat pengolah data di Puskesmas dan pelatihan petugas Puskesmas dalam pelaporan malaria secara esismal.
11. Penemuan kasus positif malaria melalui pemeriksaan laboratorium malaria dengan RDT atau Mikroskop tetap dilakukan secara pasif di Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah/swasta maupun di dokter/klinik swasta serta secara aktif melalui kegiatan *mass blood survey* atau *mass fever survey* terhadap pasien penambang timah.
12. Untuk mempercepat laporan KDRS (Kewaspadaan Dini Rumah Sakit) DBD yg masih lambat di beberapa pelayanan maka dibuat kesepakatan laporan tersebut terlebih dahulu disampaikan melalui WA group sehingga penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kasus tidak terlambat.
13. Advokasi dalam menggalakkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan 3M plus melalui program 1(satu) rumah 1(satu) jumantik mulai dari level Kabupaten – Kecamatan - Desa/Kelurahan dengan lintas sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD), Dinas Pendidikan/Kanwil Depag, dalam membantu penganggaran kegiatan pengendalian penyakit DBD untuk anggaran dana desa (ADD) atau anggaran di Kecamatan/Kelurahan, anggaran kegiatan yang dapat diusulkan sebagai berikut:
  - Gerakan 3 M plus (menguras benda - benda yang bisa menampung air, menutup benda - benda penampung air, plus memanfaatkan barang bekas, menyikat bak-bak mandi di rumah 1 minggu sekali, serta menabur bubuk abate (temephos 1%)
  - Gotong royong Jum'at bersih setiap minggu di semua lingkungan rumah dan tempat-tempat umum: sekolah - sekolah, kantor, tempat ibadah (gereja, masjid dll)
  - Kampanye DBD melalui : penyuluhan DBD, pemasangan baleho DBD, spanduk, dan penyebaran leaflet.
  - Program Bank sampah di daerah endemis DBD
  - Dan kegiatan lainnya yang dapat mencegah masyarakat tertular DBD

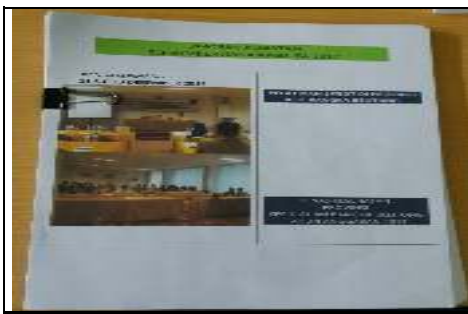


## 2.8. Program Standarisasi pelayanan Kesehatan

**2.8.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.029.661.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 625.157.141,- atau 60,71% dan realisasi fisik 70%. Keluaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya dokumen laporan SPM
2. Tersedianya dokumen komite medis
3. Tersedianya dokumen laporan SPGDT
4. Tersedianya dokumen rapat BPRS
5. Tersedianya dokumen laporan money akreditasi rumah sakit
6. Tersedianya dokumen laporan Money BPRS
7. Tersedianya dokumen penyusunan pedoman sistem rujukan
8. Tersedianya dokumen konsultasi BPRS .

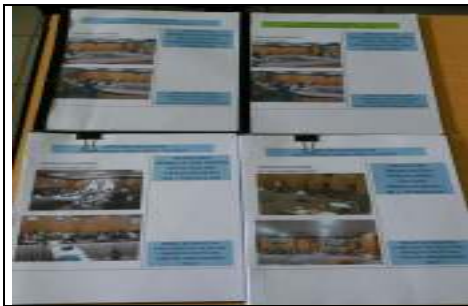
	
Gambar 2.51 Dokumen Laporan SPM	Gambar 2.52 Workshop dan Implementasi SPM di Rumah Sakit se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	
Gambar 2.53 Dokumen Komite Medis	Gambar 2.54 Peningkatan Kompetensi Komite Medis Rumah Sakit



Gambar 2.55  
Dokumen Laporan SPGDT



Gambar 2.56  
Pelatihan SPGDT di Kepulauan Bangka  
Belitung Provinsi



Gambar 2.57  
Dokumen rapat BPRS



Gambar 2.58  
Kegiatan penguatan peran BPRS dalam  
Pengawasan RS/Triwulan



Gambar 2.59  
Dokumen laporan monev akreditasi  
Rumah Sakit



Gambar 2.60  
Monev Akreditasi Rumah Sakit  
Kab/Kota



Gambar 2.61  
Dokumen Laporan monev BPRS



Gambar 2.62  
Kegiatan Monev BPRS



Gambar 2.63  
Dokumen penyusunan pedoman  
sistem rujukan

Gambar 2.64  
Kegiatan Rapat penyusunan Standar  
/Pedoman Sistem Rujukan

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Rumah sakit masih belum mengirimkan pelaporan SPM per triwulan secara rutin ke Dinas Kesehatan Provinsi walaupun sudah disepakati bersama agar Rumah Sakit mengirimkan laporan SPM per triwulan.
2. Dari 7 kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru 2 kabupaten yang sudah membentuk SPGDT yaitu kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan.
3. Masih ada Kepala daerah yang tidak berkomitmen untuk memenuhi UU No. 44/2019 tentang Rumah Sakit yang mensyaratkan bahwa Direktur Rumah Sakit adalah seorang tenaga medis, sehingga menghambat survey verifikasi hasil penilaian akreditasi Rumah sakit yang dilakukan oleh KARS (Komite akreditasi Rumah Sakit) pada tahap akreditasi Tingkat lanjut.

- **Solusi:**

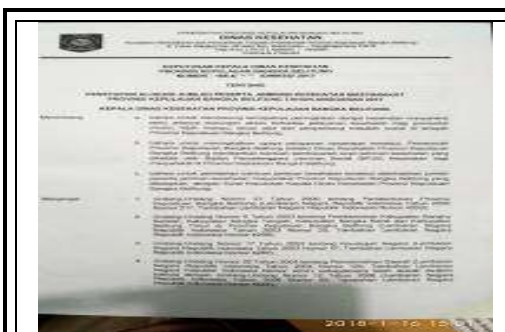
1. Masih di perlukan sosialisasi ke Rumah Sakit agar rumah Sakit mengirimkan Laporan SPM per triwulan ke Dinas Kesehatan Provinsi kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat Memberikan Feedback laporan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota dan RSUD terkait dengan laporan SPM
2. Masih diperlukan sosialisasi tentang SPGDT ke Kabupaten /Kota untuk mendorong Kab/Kota agar membentuk SPGDT
3. Masih diperlukan penambahan tenaga medis di beberapa rumah sakit di Provinsi Kepulauan bangka Belitung.

## **2.9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**

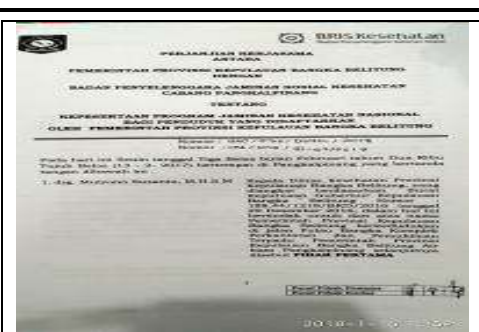
**2.9.1. Kegiatan Jaminan Kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.403.416.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. .835.729.300,- atau 97,22% dan realisasi fisik 75%. Keluaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya biaya jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu

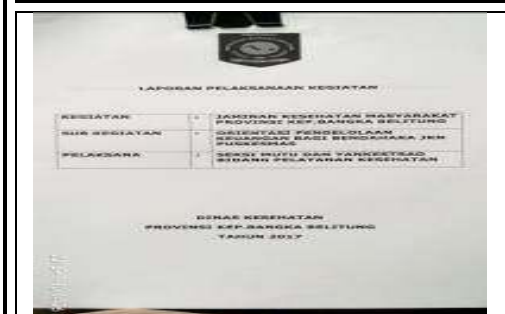
2. Tersedianya dokumen kesepakatan koordinasi jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
3. Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi jaminan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu ke kab/kota
4. Tersedianya laporan koordinasi tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.



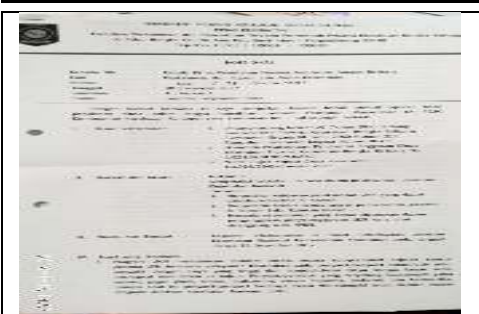
Gambar 2.65  
SK Kepala Dinas Penetapan quota PBI  
Provinsi Tahun 2017



Gambar 2.66  
Perjanjian Kerjasama Dinas  
Kesehatan dengan BPJS Kesehatan



Gambar 2.67  
Tersedianya dokumen pemantauan dan  
evaluasi JKM



Gambar 2.68  
Tersedianya laporan koordinasi tim  
pengelola JKM



Gambar 2.69  
Peserta Orientasi bendahara JKN  
Puskesmas Kab.Bangka Barat



Gambar 2.70  
Peserta Orientasi bendahara JKN  
Puskesmas Kab.Belitung Timur





Gambar 2.71  
Peserta Puskesmas Kab.Bangka  
Tengah

Gambar 2.72  
Narasumber BPJS Kab.Bangka

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Jasa Klim pelayanan kesehatan merupakan belanja pembayaran klaim peserta PBI Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp. 20.028.584.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.705.342.000,- masih bersisa sebesar Rp. 323.242.000,- karena pembayaran klaim peserta PBI provinsi dicairkan berdasarkan klaim iuran dari BPJS kesehatan per triwulan.
2. Pertemuan Koordinasi JKM dilaksanakan 2 kali, sudah dilaksanakan 1 kali pada bulan April tahun 2017, namun terjadi kekeliruan dalam perencanaan anggaran yang telah direvisi melalui APBD perubahan sehingga menyebabkan beberapa belanja anggaran yang dinihilkan sementara kegiatan tersebut telah terealisasi. Belanja yang dinihilkan yaitu pada belanja jasa narasumber Belanja Uang Saku Peserta yang menyebabkan pengembalian uang yang telah terealisasi tersebut ke keas daerah dan menyebabkan tidak terlaksananya pertemuan koordinasi JKM yang kedua karena tidak sinkronnya anggaran tersebut.
3. Orientasi pengelolaan JKN bagi petugas JKN Rumah Sakit tidak dilaksanakan karena kegiatan ini dilaksanakan di triwulan ke-4, sementara di dalam DPPA kegiatan APBD Rumah Sakit Daerah Kabupaten masing-masing sehingga kemungkinan kecil peserta untuk hadir pada kegiatan tersebut.
4. Masih rendahnya pemahaman pengelola JKN provinsi/Kab/Kota tentang pelaksanaan program JKN
5. Masih rendahnya peran lintas sektor dalam pelaksanaan program JKN

- **Solusi:**

1. Tagihan klim peserta PBI provinsi yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar dalam tagihan BPJS, namun pada pelaksanaannya terjadi pengurangan kepesertaan dikarenakan adanya peserta yang keluar dalam PBI provinsi yang dialihkan ke PBI Kabupaten dan pekerja penerima Upah. Agar dilakukan rekonsiliasi kesepakatan JKN/KIS setiap bulan dalam memenuhi quota PBI provinsi.

2. Melakukan perencanaan penganggaran yang lebih akurat, efektif dan efisien berdasarkan realisasi keuangan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Merencanakan jadwal pelaksanaan lebih akurat, efektif dan efisien dengan memperhatikan ketersediaan dana.
4. Perlu dilakukan capacity building atau orientasi dalam peningkatan kemampuan terhadap pemahaman pengelolaan JKN.
5. Perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi terhadap lintas sector mengenai pelaksanaan program JKN.

## 2.10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

**2.10.1. Kegiatan Pengembangan Kesehatan Anak** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.519.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 192.377.500,- atau 93,61% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah :

1. Terpilihnya pemenang lomba balita sehat dan sejahtera
2. Tersedianya buku KIA.

	
Gambar 2.73 Lomba Balita sehat & sejahtera	Gambar 2.74 Pemenang lomba balita sehat dan sejahtera
	
Gambar 2.75 Tersedianya Buku KIA	Gambar 2.76 Cetak Buku KIA

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Data sampai dengan November 2017 menggambarkan masih sekitar 11,6% anak balita belum mendapatkan pelayanan sesuai standar (belum tercapainya target SPM 100% cakupan pelayanan anak balita (88,84%)



2. Angka kematian balita 7,08/100KH

➤ **Solusi:**

1. Advokasi ke stakeholder terkait, peningkatan fungsi posyandu terintegrasi, koordinasi lintas program dan lintas sektor pembinaan kader, meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan penguatan kelembagaan dan operasional posyandu
2. Koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes.

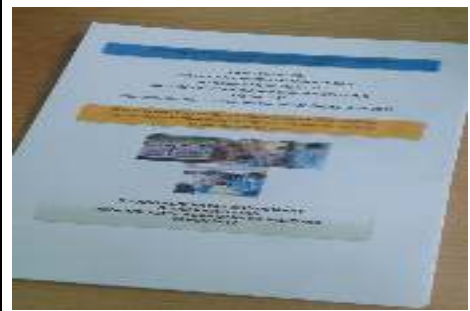
## 2.11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

**2.11.1. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Higiene Sanitasi Pengolahan Pangan Bagi Industri Makanan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 310.797.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 179.053.190,- atau 57,61% dan realisasi fisik 86,66%. Keluaran kegiatan adalah :

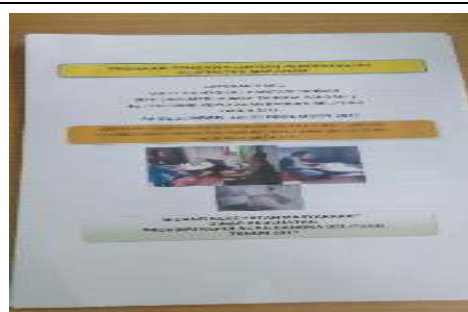
1. Tersedianya dokumen hasil uji petik hygiene pangan
2. Tersedianya dokumen laporan pengawasan hygiene sanitasi TPM



Gambar 2.77  
Dokumen hasil uji petik hygiene pangan jajanan



Gambar 2.78  
Dokumen hasil uji petik hygiene pangan kantin sekolah



Gambar 2.79  
Dokumen hasil uji petik hygiene industri Rumah Tangga Pangan



Gambar 2.80  
Dokumen laporan pengawasan hygiene sanitasi PTM



- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Realisasi penyerapan anggaran yang hanya 57,61% disebabkan karena penyesuaian rill cost anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah rangka konsultasi ke kementerian kesehatan RI penyesuaian rill cost anggaran dan untuk efektifitas perjadiin yang 1 orang di fasilitasi/ diberikan oleh pemilik/pengelola sarana TPM terhadap bahan sampel uji petik makanan jajanan, kantin sekolah dan industri pangan rumah tangga.
2. Masih rendahnya Pengawasan dan Pengendalian hygiene sanitasi pengolahan pangan bagi industri makanan (IRTP)
3. Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian hygiene sanitasi di sekolah.

- **Solusi:**

1. Belanja perjadiin sebaiknya dibuat dengan rincian 1 paket biaya perjalanan dinas adanya uraian dan sebelum DPA disahkan sebaiknya perencanaan mengecek uraian pada DPA apakah sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau tidak sehingga tidak perlu dilaksanakan perubahan anggaran pada pertengahan tahun dan rencana penarikan sesuai dengan realisasi pencairan anggaran.

2. Dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan serta pengambilan sampel pangan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
3. Dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan serta pengambilan sampel di Sekolah.

## 2.12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

**2.12.1. Kegiatan Penurunan AKI dan AKB** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 951.600,- atau 82,03% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah dokumen program kegiatan desa peduli kematian Ibu dan Anak.



Gambar 2.85  
Dokumen pertemuan desa peduli  
kematian ibu dan Anak



Gambar 2.86  
Dokumen pertemuan desa peduli  
kematian ibu dan Anak



Gambar 2.87  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan  
Anak, puskesmas Jebus  
Kab. Bangka Barat



Gambar 2.88  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan  
Anak, puskesmas Kelapa  
Kab. Bangka Barat



Gambar 2.89  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Desa Pelepak  
Kab. Belitung



Gambar 2.90  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Desa Air Selumar  
Kab. Belitung



Gambar 2.91  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Puskesmas Bakam  
Kab. Bangka



Gambar 2.92  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Puskesmas Puding  
Kab. Bangka



Gambar 2.93  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Puskesmas Air Barah  
Kab. Bangka



Gambar 2.94  
Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di desa Sengir Payung  
Kab. Bangka Selatan



	
<p>Gambar 2.95 Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang.</p>	<p>Gambar 2.96 Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang.</p>
	
<p>Gambar 2.97 Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di puskesmas Renggang Kab. Belitung.</p>	<p>Gambar 2.98 Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di puskesmas Manggar Kab. Belitung Timur.</p>
	
<p>Gambar 2.99 Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Desa Padang Baru Manggar Kab. Bangka Tengah.</p>	<p>Gambar 2.100 Kegiatan desa peduli kematian ibu dan Anak, di Puskesmas Koba Kab. Bangka Tengah.</p>

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Belum tercapainya target (100%) cakupan kunjungan ibu hamil K4 (82,61%).
2. belum tercapainya target (100%) cakupan persalinan yang ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan/fasyankes (71,18%).
3. Masih ditemukan kasus kematian ibu 21 kasus/23.294 KH walaupun terjadi penurunan tahun sebelumnya (24 kasus/26.021 KH).

4. Masih ditemukan kasus kematian neonatus sebesar 114 kasus walaupun terjadi penurunan tahun sebelumnya (143 kasus).
5. Umur kematian neonatus tersebar terdapat pada usia kurang dari 1 minggu (101 kasus/88,59%)
6. Kasus lahir mati yaitu 153 kasus.
7. Masih terdapat kasus BBLR sebesar 4,08% (951 kasus) dari kelahiran hidup.
8. Kasus kematian kongenital pada neonatus yaitu 10 kasus.

➤ **Solusi:**

1. Koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu dan P4K di setiap desa/kelurahan, penguatan manajemen pencatatan dan pelaporan di fasyankes swasta.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang persalinan di fasyankes perlu ditingkatkan termasuk mutu fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Advokasi ke stakeholder terkait koordinasi lintas program dan lintas sektor, meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes, audit maternal perinatal dan surveilans kematian ibu.
4. Advokasi ke stakeholder terkait koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes, audit maternal perinatal.
5. Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, meningkatkan kualitas kunjungan neonatus dengan penerapan manajemen terpadu bayi muda, mutu fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan kualitas antenatal terpadu, pengenalan tanda bahaya.
7. Peningkatan fungsi posyandu terintegrasi koordinasi lintas program dan lintas sektor, pembinaan kader, meningkatkan kapasitas teknis SDM gizi, penundaan usia pernikahan/kehamilan.
8. Meningkatkan akses capaian K1 yang berkualitas dengan pemberian asam folat, konseling kespro catin.

## **2.13. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan**

- 2.13.1. Kegiatan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.020.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 80.927.752,- atau 83,41% dan realisasi fisik 71,42%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya bank data.





• **Permasalahan dan Solusi**

➤ **Permasalahan:**

1. Masih terjadinya keterlambatan pengumpulan data dan perbedaan data.
2. Sikda generik belum bisa berjalan maksimal.
3. Implementasi SIK di Puskesmas di Bangka Belitung saat ini kemungkinan akan menerapkan SIKDA generik dan e-puskesmas.

➤ **Solusi :**

1. Akan dibuat aplikasi portal yang menampung semua data yang bersifat tetap dan diupdate secara berkala.
2. Sikda generik versi 1.4 dijalankan secara online sehingga mengalami permasalahan bagi puskesmas yang jaringan internetnya rendah.
3. Untuk Puskesmas yang sudah dipilih akan segera mengimplementasikan e-puskesmas, untuk puskesmas lainnya akan mengimplementasikan SIKDA generik.

**2.13.2. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.983.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.162.113.600,- atau 58,60% dan realisasi fisik 73,30%. Keluaran kegiatan adalah :

1. Terlatihnya tenaga kesehatan dalam jabatan fungsional perawat
2. Tersedianya dokumen tim akreditasi pelatihan
3. Tersedianya dokumen laporan tugas belajar

4. Tersedianya jasa penunjang pelayanan kesehatan (10 orang di klinik provinsi dan 7 orang bidan PTT Kab/Kota)
5. Tersedianya dokumen tim penilaian jabfung
6. Terpilihnya tenaga medis teladan.

	
<p>Gambar 2.105 Terlatihnya tenaga kesehatan dalam jabatan Fungsional perawat</p>	<p>Gambar 2.106 Dokumen tim akreditasi pelatihan</p>
	
<p>Gambar 2.107 Dokumen laporan tugas belajar</p>	<p>Gambar 2.108 Jasa penunjang pelayanan kesehatan</p>
	
<p>Gambar 2.109 Dokumen tim penilai jabfung</p>	<p>Gambar 2.10 Tenaga medis teladan</p>
	
<p>Gambar 2.11 Pelaksanaan Evaluasi ke Universitas Pelaksanaan program tugas Belajar</p>	<p>Gambar 2.12 Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan oleh Bidan PTT</p>

**2.13.3. Kegiatan Peningkatan mutu tenaga teknis dan administrasi Laboratorium** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 257.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 218.148.716,- atau 84,59% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya dokumen mutu laboratorium
2. Tsertifikasinya tenaga teknis laboratorium
3. Tersedianya dokumen jaminan mutu laboratorium dan fasyankes Kab/Kota.



Gambar 2.13  
Dokumen Mutu Laboratorium



Gambar 2.14  
Tsertifikasinya tenaga teknis  
laboratorium



Gambar 2.15  
Dokumen Jaminan mutu Laboratorium  
dan Fasyankes



Gambar 2.16  
Kunjungan Surveilans dari Komite  
Akreditasi Nasional



Gambar 2.17  
Kegiatan Konsultan ISO 17025



Gambar 2.18  
Kursus singkat/pelatihan (inhouse training)

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Belum tersertifikasi/tersedianya tenaga fasilitator dan pengajar di tingkat Provinsi.
2. Telah diajukan surat permohonan fasilitator ke pusdiklat Aparatur BPPSDMKES RI ke unit Bapelkes namun dikarenakan Pusat Pendidikan Pelatihan Kesehatan BPPSDMKES RI kegiatan pelatihan sangat banyak, sehingga di prioritaskan Pelatihan yang bersumber APBN didahulukan
3. Ada beberapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh Pusat tidak tersedia di dalam DPA yang ada

- **Solusi:**

1. Mengharuskan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengajuan pelatihan TOT Pelatih bagi fasilitator provinsi ke BPPSDMKes RI
2. Pengajuan Tenaga Pengajar/Fasilitator/Narasumber harus di sampaikan langsung melalui Balai Pelatihan Kesehatan Pusat seluruh Indonesia yang tersedia apabila tidak memungkinkan melalui Pusdiklat Kesehatan BPPSDMKes RI
3. Perlu penambahan biaya anggaran Perjalanan Dinas Fasilitator/Narasumber pusat dan Rapat Persiapan Pelatihan bagi Fasilitator/Narasumber pusat

## **2.14. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda**

**2.14.1. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana balai Laboratorium Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 874.944.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 770.533.666,- atau 88,07% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah

1. Tersedianya sarana prasarana laboratorium dengan kondisi baik sesuai dengan standar
2. Tersedianya dokumen hasil laporan koordinasi .





- **Permasalahan dan Solusi**
  - **Permasalahan:** -
  - **Solusi:** -

## 2.15. Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

**2.15.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar** oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 879.968.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 633.104.595,- atau 71,95 % dan realisasi fisik 92,69%. Keluaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya dokumen kesepakatan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota
2. Terlaksananya bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota
3. Tersedianya dokumen laporan FKTP berprestasi
4. Tersedianya dokumen pembinaan akreditasi FKTP
5. Tersedianya dokumen gerakan Fit For School
6. Tersedianya dokumen konsultasi program
7. Tersedianya dokumen peningkatan kapasitas tim pendamping akreditasi.



Gambar 2.22  
Dokumen Kesepakatan Teknis  
Pelayanan Kesehatan

Gambar 2.23  
Bimbingan Teknis Pelayanan  
Kesehatan

Gambar 2.24  
Dokumen Laporan FKTP

Gambar 2.25  
Dokumen Pembinaan Akreditasi FKTP

Gambar 2.26  
Dokumen Gerakan Fit For School

Gambar 2.27  
Dokumen Konsultasi Program

Gambar 2.29  
Dokumen Peningkatan Kapasitas Tim  
Pendamping Akreditasi



**2.15.2. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.304.100,- realisasi anggaran sebesar Rp. 37.885.214,- atau 35,98% dan realisasi fisik 31,25%. Keluaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya dokumen pelaporan pelayanan kesehatan
2. Tersedianya alat alat kedokteran penunjang klinik



- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

1. Kementerian kesehatan telah melakukan koordinasi agar menunjukan koordinator program PIS-PK di Provinsi/Kab/Kota pada seksi pelayanan Kesehatan Primer, Bidang pelayanan Kesehatan. Namun ada beberapa kabupaten yang koordinator PIS PK berada pada seksi promosi kesehatan bidang kesmas. Hal ini akan menghambat koordinasi antara provinsi dengan kabupaten. Meningat program PIS PK ini salah satunya adalah melakukan pendataan keluarga yang dilakukan oleh tim puskesmas, sedangkan yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan dengan puskesmas adalah seksi pelayanan kesehatan primer.
2. Berdasarkan prioritas pelaksanaan PIS PK kementerian Kesehatan RI bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus melakukan PIS PK pada tahun 2018. Namun sebagai inovasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan program PIS PK pada tahun 2017 sehingga tidak ada dukungan pendanaan pada tahun 2017 baik APBD maupun

APBN. Program PIS PK tetap dilakukan oleh TIM dengan berkoordinasi antar tim provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk program PIS PK selanjutnya akan dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2018 dengan dukungan dana APBD TA 2018.

3. Ruang klinik belum proporsional/belum sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Terdapat penganggaran yang salah penempatan kode rekening sehingga tidak dapat dibayarkan.
5. Tidak adanya penempatan tenaga administrasi di klinik.

➤ **Solusi:**

1. Koordinator PIS PK di provinsi dan Kab/Kota semestinya di seksi pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 39 tahun 2019 tentang program penyelenggaraan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Hal ini diharapkan adanya hubungan yang erat serta keberlanjutan koordinasi antar provinsi dan Kab/Kota khususnya yang intensif dengan puskesmas karena puskesmas adalah pelaksana teknis pendataan keluarga sehingga intervensi-intervensi permasalahan kesehatan dilaksanakan pada bidang pelayanan kesehatan yang secara tugas dan fungsi melakukan pembinaan langsung dengan puskesmas.
2. Untuk pelaksanaan PIS PK pada tahun 2018 telah didukung pendanaan dari APBD TA 2018.
3. Mengusulkan pembangunan gedung klinik pada tahun 2018 bertempat dilingkungan kantor pemprov.
4. Mengusulkan pengembalian anggaran perubahan tetapi tidak diakomodir.
5. Mengusulkan kepada kepala dinas untuk menempatkan tenaga administrasi di klinik.

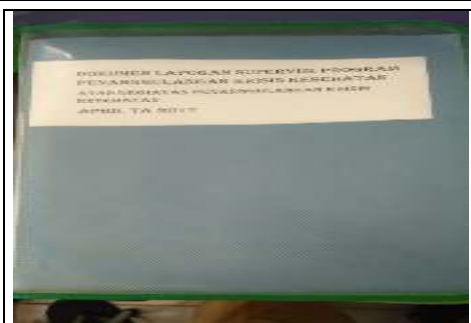
## **2.16. Program Bencana Bidang Kesehatan**

**2.16.1. Kegiatan Penanggulangan krisis Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 381.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 273.463.049,- atau 71,70% dan realisasi fisik 94,2%. Keluaran kegiatan adalah :

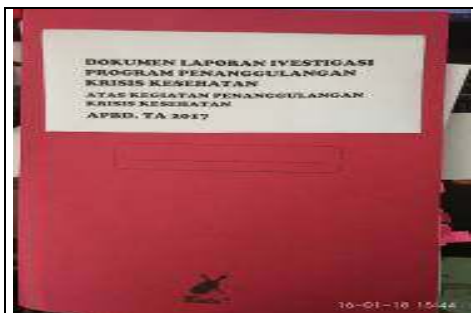
1. Terlaksananya penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan TRC
2. Terlaksananya supervisi, investigasi dan konsultasi penanggulangan krisis kesehatan
3. Terjalinnnya koordinasi diantara subklaster kesehatan
4. Terdistribusikannya logistik dan peralatan penanggulangan krisis kesehatan
5. Tersedianya peralatan dan pakaian kerja penanggulangan krisis kesehatan.



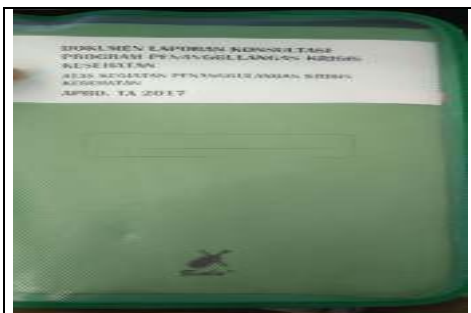
Gambar 2.33  
Penguatan Kapasitas Pengetahuan  
dan Keterampilan TRC



Gambar 2.34  
Dokumen Supervisi



Gambar 2.35  
Dokumen Investigasi



Gambar 2.36  
Dokumen Konsultasi Penanggulangan  
Krisis Kesehatan



Gambar 2.37  
Dokumen Koordinasi Antara Subklaster  
Kesehatan



Gambar 2.38  
Terdistribusinya Logistik dan Peralatan  
Penanggulangan Krisis Kesehatan



Gambar 2.39  
Peralatan dan Pakaian Kerja  
Penanggulanagn Krisis Kesehatan



Gambar 2.40  
Peralatan dan Pakaian Kerja  
Penanggulanagn Krisis Kesehatan



Gambar 2.41  
Peralatan dan Pakaian Kerja  
Penanggulanagn Krisis Kesehatan

### ➤ **Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan:**

1. Belum semua stakeholder memahami konsep kluster kesehatan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan krisis kesehatan maupun pelayanan kesehatan situasi krisis.
2. Bidang / seksi yang terkait sub kluster kesehatan di dinas kesehatan belum berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana (PRB) dan kesiapsiagaan maupun pencegahan penanggulangan krisis kesehatan maupun pelayanan kesehatan situasi krisis.
3. Dukungan sarana dan prasarana untuk penanggulangan krisis kesehatan sangat terbatas
4. Belum ada sistem informasi yang efektif untuk kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan krisis kesehatan dan mobilisasi kluster ketika terjadi krisis kesehatan.
5. Belum ada konsep yang jelas tentang anjuran / himbauan Pusat Krisis Kesehatan agar Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk UPT Pusat Krisis Kesehatan.
6. Pengajuan anggaran Tahun 2018 untuk sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan belum diakomodir oleh tim anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Belum adanya SDM Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlatih.

#### **Solusi:**

1. Advokasi dan audiensi ditingkat pimpinan pratama stake holder dan OPD tentang pentingnya kluster kesehatan dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan krisis kesehatan maupun pelayanan kesehatan situasi krisis.
2. Sosialisasi kluster kesehatan kepada pejabat pembina dan pengawas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengorganisir sub kluster kesehatan provinsi dan kabupaten kota agar berperan aktif dalam kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan krisis kesehatan maupun pelayanan kesehatan situasi krisis.
3. Advokasi pimpinan agar mendapat kebijakan dan dukungan untuk melengkapi sarana dan prasarana serta mengajukan CSR ke pihak swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut.

4. Segera mengaktifkan Sistem Informasi Siaga Tersehat dan melengkapi sarana komunikasi
5. Berkoordinasi dengan pusat krisis secara intensif dan mengadopsi UPT Krisis Kesehatan yang sudah terlebih dahulu terbentuk sebagai pembelajaran.
6. Advokasi kepada tim anggaran provinsi agar anggaran program krisis kesehatan dapat diakomodir di anggaran perubahan (ABT) maupun di tahun berikutnya.
7. Berkoordinasi dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI agar SDM Program Krisis Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan maupun peningkatan kapasitas.



## 2.18. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- 2.18.1. Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 1.797.999.900,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.745.229.000,- atau 97.07% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 66 Jenis.



- 2.18.2. Kegiatan Penyusunan Formularium Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.050.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 30.021.000,- atau 93.67% dan realisasi fisik sebesar 100 %. Keluaran Kegiatan ini adalah 1 Dokumen Formularium di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 Dokumen.



## 2.19. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 2.19.1. Kegiatan Jambore Nasional Kesehatan Jiwa** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 324.679.900,- realisasi anggaran Rp 315.815.470,- atau 97.27% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran adalah Jumlah Rehabilitasi dan pendamping yang diikutsertakan. Kegiatan Jambore



Nasional Kesehatan Jiwa yang adalah ikut serta pada Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental (Porkesremen) dan Jambore Keswa VI di Pekanbaru Riau Pelaksanaan Kegiatan tgl 18 s.d 21 Oktober 2017.



Gambar 2.44  
Kegiatan Jambore Nasional Kesehatan Jiwa

- 2.19.2. Kegiatan Penyediaan Kesehatan Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 242.130.000,- realisasi anggaran Rp 207.882.200,- atau 85.86% dan realisasi fisik sebesar 100 %. Keluaran Kegiatan adalah Jumlah Kunjungan Puskesmas dan Pasien Home Visit. Adapun jumlah kunjungan ke Puskesmas sebanyak 41 kunjungan dan Home Visit sebanyak 99 orang yaitu 74 orang laki-laki dan 25 orang perempuan.



Gambar 2.45  
Kunjungan Rumah dan Home Visit

- 2.19.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 3.011.200.000,- realisasi anggaran Rp 2.956.600.000,- atau 98.19% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran Kegiatan Jumlah tenaga penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan yang terdiri dari 1 orang Spesialis Jiwa, 67 orang tenaga akper/ S1 Keperawatan, 7 orang tenaga pramuhusada, 2 orang tenaga administrasi (keperawatan), 1 orang tenaga okupasi terapi, 3 orang tenaga konselor narkoba, 4 orang tenaga pramusaji, 5 orang tenaga pengolah makanan (juru masak), 1 orang pembantu terapi wicara, 1 orang tenaga terapi autis, 3 orang tenaga dokter umum, 2 orang tenaga asisten apoteker, 2 tenaga radiografer.

- 2.19.4. Kegiatan Penyediaan Rehabilitasi Mental Sosial** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 295.000.000,- realisasi anggaran Rp 283.971.350,- atau 96.26% dan realisasi fisik 100%. keluaran kegiatan adalah 7 jenis terapi rehabilitasi mental sosial terdiri dari Terapi Musik, terapi Gerak/Olahraga, Terapi Kerja, Terapi religi, Terapi Aktivitas Kelompok, Terapi Instruktur Remediasi Kognitif, Terapi Psiko Edukasi.



Gambar 2.46  
Penyediaan Rehabilitasi Mental Sosial

- 2.19.5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 1.183.050.000,- realisasi anggaran Rp 909.223.665,- atau 76.85% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan jumlah makanan dan minuman pasien, petugas khusus dan petugas bulan puasa.

## **2.20. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

- 2.20.1. Kegiatan Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit** yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 348.999.950,- realisasi anggaran Rp 321.851.723,- atau 92.22% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya survey simulasi akreditasi.



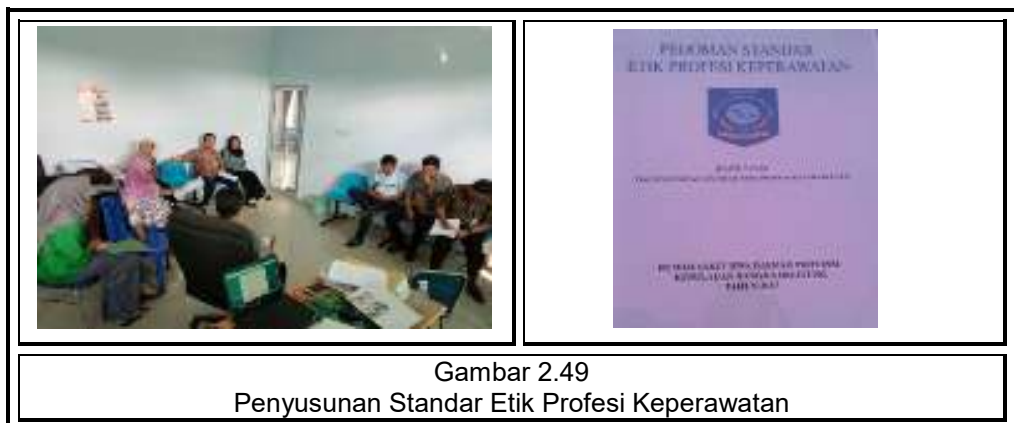
Gambar 2.47  
Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit

- 2.20.2. Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan Jiwa** yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 47.679.900,- realisasi anggaran sebesar Rp 37.335.000,- atau 78.30% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah audit asuhan keperawatan di rawat inap dan rawat jalan.



- 2.20.3. Kegiatan Penyusunan Standar Etik Profesi Keperawatan** yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.850.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 38.129.700,- atau 85.02% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya pelayanan rawat inap, rawat jalan yang bermutu dan akuntabilitas berdasarkan standar etik profesi keperawatan.



- 2.20.4. Kegiatan Penyusunan Standar Prosedur Operasional Keperawatan** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.949.750,- realisasi anggaran Rp 58.811.800,- atau 87.84% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan adalah buku standar prosedur operasional keperawatan sebanyak 4 buku standar prosedur operasional keperawatan.



## 2.21. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

**2.21.1. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit** yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,- realisasi anggaran Rp 807.540.819,- atau 89.73% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli yaitu 1 paket perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli (elektro convulsi therapy, centrifuge, tensimeter, stetoskop, troli).



**2.21.2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 335.193.800,- realisasi anggaran Rp 321.825.275,- atau 96.01% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Jumlah Perlengkapan rumah tangga yang dibeli yaitu 1 paket rumah tangga rumah sakit.





Gambar 2.52  
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit  
(Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

**2.21.3. Kegiatan Pengadaan SIM Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 95.259.900,- realisasi anggaran Rp 26.752.300,- atau 28.08% dan realisasi fisik 30%. Keluaran kegiatan adalah jumlah data dan sistem aplikasi manajemen rumah sakit yaitu 1 paket data base SIM Rumah Sakit.

**2.21.4. Kegiatan Pengadaan Pagar Rawat Inap** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 499.999.900,- realisasi anggaran Rp 466.390.000,- atau 93.28% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah pagar beton gedung pelayanan rehabilitasi NAPZA dan Pagar Beton ruang rawat inap yaitu 1 paket pagar beton gedung rehabilitasi NAPZA dan Pagar Beton ruang rawat inap.



Gambar 2.53  
Pengadaan Pagar Rawat Inap

**2.21.5. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 803.250.000,- realisasi anggaran Rp 796.710.950,77,- atau 99.19% dan realisasi fisik 100%. keluaran kegiatan adalah 1 paket alat-alat kesehatan yaitu Examination table flat (meja pemeriksaan pasien), tempat tidur pasien, Locker, Laundry Trolley, Bed side cabinet, kursi tunggu, food trolley, trolley obat. (DAK).



- 2.21.6. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 937.750.000,- realisasi anggaran Rp 825.230.412,- atau 88% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 2 unit alat kesehatan. (DAK)



- 2.21.7. Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 3.695.194.000,- realisasi anggaran Rp 3.679.040.200,- atau 99.56% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan adalah Pembangunan Gedung Rawat Jalan. (DAK).





**2.22. Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.**

- 2.22.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 658.239.750,- realisasi anggaran Rp 656.500.000,- atau 99.74% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan adalah Jumlah Gedung Rumah sakit yang terawat.



- 2.22.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249.556.500,- realisasi anggaran Rp 178.156.000,- atau 71.39% dan realisasi fisik 100 %. Keluaran Kegiatan adalah Jumlah gedung rawat inap yang terawat



- 2.22.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi Pengolahan limbah Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171.518.500,- realisasi anggaran Rp 151.920.000,- atau 88.57% dan realisasi fisik 100%. keluaran kegiatan adalah terpeliharanya Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.



- 2.22.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79.999.800,- realisasi anggaran Rp 78.080.000,- atau 97.60% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa daerah.



- 2.22.5. Kegiatan Pengujian dan Kalibrasi** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 91.919.800,- realisasi anggaran Rp 90.732.000,- atau 98.71% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilaksanakan.



## **2.23. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**

**2.23.1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000.000,- realisasi anggaran Rp 4.862.491.657,59 atau 64.83%. Keluaran Kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan**

Pendapatan lebih banyak diterima pada triwulan III dan triwulan IV, sehingga belanja untuk memenuhi kebutuhan operasional tidak dapat optimal.

- **Solusi**

Menyusun rencana anggaran berdasarkan estimasi pendapatan.

## 2.24. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

**2.24.1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.526.099.379,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.221.066.188,- atau 94,48%%. Keluaran kegiatan ini adalah obat-obatan generic, obat-obatan non generic, reagen dan perbekalan kesehatan.



Gambar 2.62  
Belanja Bahan Kimia



Gambar 2.63  
Bahan Perbekalan Kesehatan



Gambar 2.64  
Obat-obatan

- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

Belanja bahan habis pakai ruang kateterisasi jantung (cathlab) dikarenakan kekosongan stok di PBF (Pedagang Farmasi Besar) dan baru terproduksi melewati batas akhir tahun anggaran

- Solusi**

Dianggarkan kembali pada tahun 2018 belanja bahan habis pakai ruang kateterisasi jantung (cathlab)

## 2.25. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

**2.25.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 538.966.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 38.400.000,- atau 7,12%. Keluaran kegiatan ini adalah terbayarnya jasa tenaga medis, paramedis dan non medis.

- **Permasalahan dan Solusi**

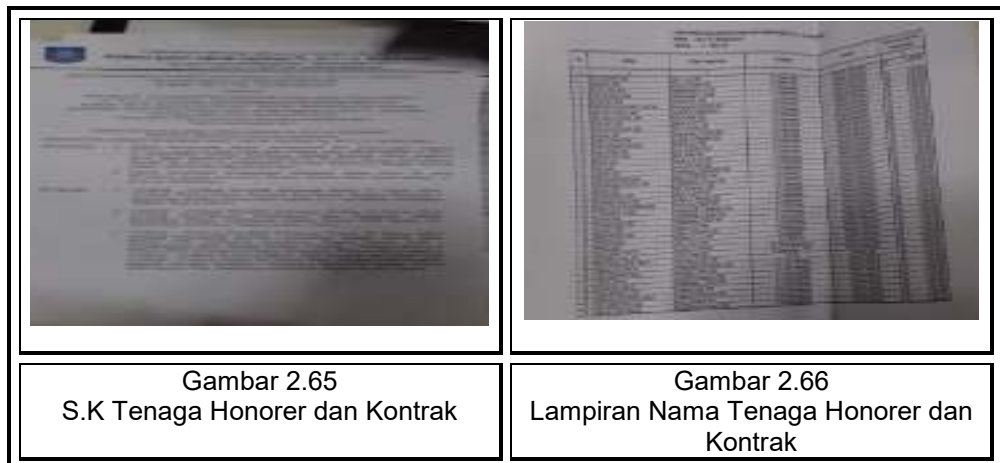
**Permasalahan**

Untuk Kegiatan ini, realisasi keuangan sebesar 7,12% terdiri dari pembayaran honorarium tim kegiatan. Untuk honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis (1 paket) serta belanja materai dan fotocopy sebesar Rp. 500.566.000,- tidak terbayarkan/ terealisasi karena adanya kebijakan terkait implementasi BLUD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk jasa pelayanan akan dibayarkan dengan dana BLUD dan pada waktu itu, sudah diusulkan ke Direktur dan bagian perencanaan untuk rasionalisasi di Anggaran Perubahan.

**Solusi**

Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan selanjutnya akan dibayarkan menggunakan dana BLUD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 2.25.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.669.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 8.006.153.846,- atau 92,35% Keluaran kegiatan ini adalah terbayarnya tenaga honorer dan kontrak.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

Pembayaran gaji honorer disesuaikan dengan jumlah honorer dikarenakan ada pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan kekosongan pegawai tersebut belum diisi karena proses perekrutan harus 1 pintu ke BKPSDM sehingga kekosongan pegawai belum diisi sampai bulan November sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal

**Solusi**

Setiap ada pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan kekosongan pegawai tersebut, segera ditindaklanjuti untuk dicari pengganti



## 2.26. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

**2.26.1 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.460.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 88.027.500,- atau 58,93% Keluaran kegiatan ini adalah penyebaran informasi melalui media promosi



### Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan

1. Belanja cetak baliho dicetak sesuai dengan kebutuhan harga pasar, yang tidak sesuai dengan perencanaan awal maka terjadi kelebihan anggaran pada cetak baleho
2. Untuk belanja tenaga ahli pada kegiatan papsmear dicairkan sesuai kebutuhan 1 orang, yaitu Dokter Patologi Anatomi dan 4 orang jasa tenaga ahli lainnya direncanakan untuk pelayanan operasi katarak termasuk dalam kegiatan rasionalisasi anggaran

#### Solusi

1. Penguatan dalam perencanaan awal belanja dan akan diakomodir dengan belanja sewa pemasangan baleho

## 2.27 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

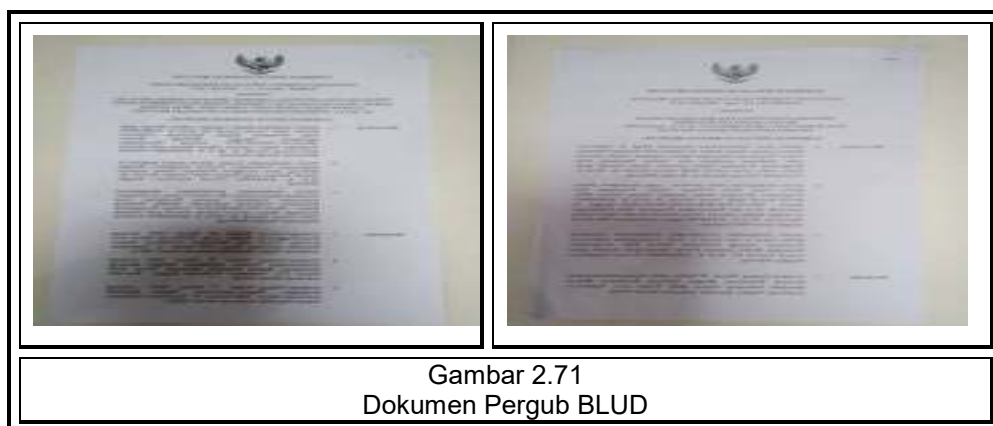
**2.27.1 Kegiatan Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 597.540.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 551.593.828,- atau 92,31% Keluaran kegiatan ini adalah Persiapan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dalam penetapan akreditasi versi 2012, 15 dokumen.



- 2.27.2 Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis dan Clinical Pathway** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.680.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 61.864.500,- atau 86,31% Keluaran kegiatan ini adalah Tersusunnya SOP medis dan clinical pathway



- 2.27.3 Kegiatan Persiapan Rumah Sakit menjadi BLUD** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.790.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 14.870.500,- atau 21,32% Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian BLUDI.



- **Permasalahan**

Realisasi dalam kegiatan ini kecil yaitu 21,32% karena tolak ukur kinerja pada indikator keluaran tertulis terlaksananya penilaian BLUD, sedangkan rumah sakit sudah ditetapkan sebagai PPK BLUD sehingga tidak dilakukan penilaian oleh Tim Penilai, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/ 1a /RSUDP/ 2017. Kegiatan – kegiatan dalam DPA ini ada yang tidak direalisasikan karena alasan tersebut di atas seperti Honor Tim Penilai yang tidak bisa direalisasikan sehingga realisasi keuangan menjadi kecil.

**2.27.4 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.158.282.948,- atau 57,91% Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan yang berkualitas.



#### **Permasalahan dan Solusi**

##### **Permasalahan**

1. Jasa Pelayanan dicairkan sesuai dengan pendapatan s.d bulan agustus sebesar 38% dari pendapatan 2 milyar dicairkan berdasarkan Pergub No.66 Tahun 2017 tentang jasa pelayanan kesehatan.
2. Belanja modal dan belanja gaji, tunjangan belum dibelanjakan sesuai perencanaan awal karena belum adanya pegawai yang direkrut dalam dana BLUD

##### **Solusi**

Penguatan perencanaan awal dan didukung dengan regulasi pengelolaan BLUD sesuai peraturan yang ada.

**2.27.5 Kegiatan Sister Hospital RSUDP dengan RSCM** oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.172.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 33.080.397,- atau 11,06 % Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya bimbingan oleh Tim RSCM sebagai Sister Hospital.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

Awalnya kegiatan sister hospital in direncanakan untuk beberapa rumah sakit yang ditandai dengan perjanjian kerjasama, namun dalam berjalannya ternyata satu rumah sakit yang bisa dilakukan kerjasama (MOU) yaitu RSCM, sehingga hanya satu kegiatan saja yang terlaksana yaitu bedah saraf, sedangkan jantung dan onkologi tidak terlaksana.

- **Solusi**

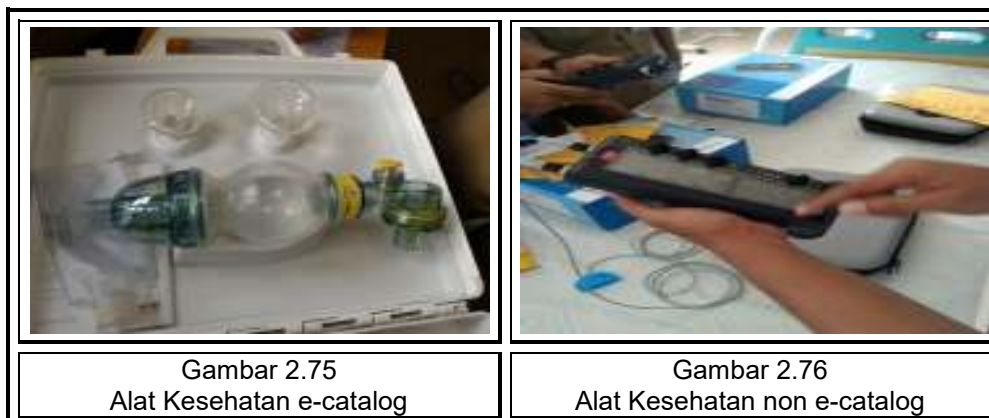
Melakukan penjajakan awal/penguatan MOU dengan beberapa rumah sakit yang akan dilakukan kerjasama (MOU)

- 2.27.6 Kegiatan Studi Evaluasi dan Optimalisasi Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 183.463.178,- atau 63,72 % Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya studi evaluasi dan optimalisasi RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.



## 2.28 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

**2.28.1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.997.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 203.994.912,- atau 85,71%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.



**2.28.2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.485.364.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.459.033.300,- atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah Pengadaan Lift Gedung RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno.



**Solusi :** menjaga kualitas 3 (Tiga) unit Lift/Elevator dengan melakukan pemeliharaan rutin/berkala.

**2.28.3 Kegiatan Pembangunan Pos Jaga dan Portal Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.170.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 238.743.634,- atau 97,77%. Keluaran kegiatan ini adalah pos jaga dan portal.





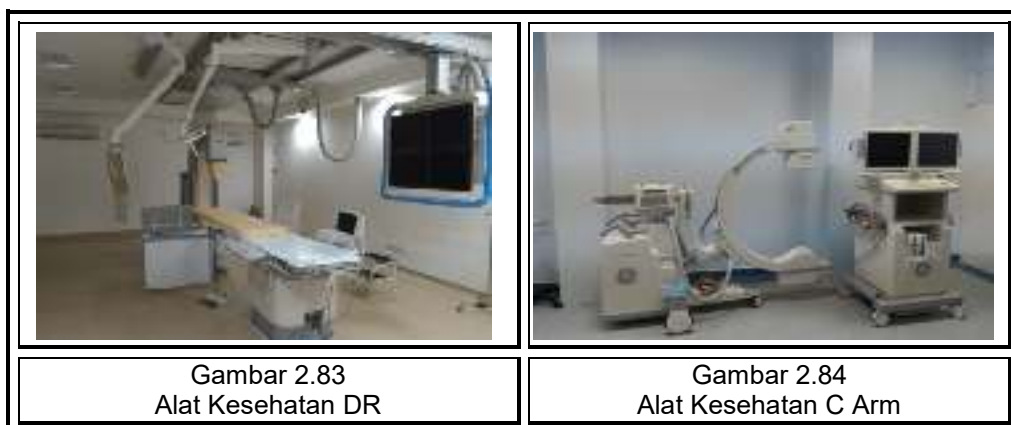
**2.28.4 Kegiatan Penyediaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.460.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 128.617.000,- atau 75,01%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik rumah sakit.



- **Permasalahan**  
**Permasalahan**

Walaupun realisasi keuangan tidak 100%, namun untuk realisasi fisik mencapai 100 %, pengembalian dana di sebabkan oleh penyediaan bahan logistik rumah sakit sesuai kebutuhan dilapangan, sehingga masih ada sisa dana yang tidak terealisasi

**2.28.5 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.750.080.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 69.588.302.106,43,- atau 91,87%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

- Hambatan yang ada seperti pengadaan ambulan, sampai 31 Agustus 2017 batas akhir klik barang e katalog belum diupdate harganya, sudah kita input pada system e purchasing ditolak sama penyedia karena ketidaktersediaan stok barang 2016 sudah habis, untuk barang 2017 belum diupdate harganya, dan sudah kita koordinasikan ke LKPP mengenai hal tersebut. Untuk tabung gas CO2 penyedia kurang kooperatif, untuk alat PCR pada Laboratorium belum masuk e katalog. Sedangkan untuk target keuangan barang-barang tersebut terdapat ongkos kirim, ongkos kirim yang dimasukkan pada perencanaan berdasarkan E catalog dan terjadi pengurangan ongkos kirim dengan adanya negosiasi dengan pihak penyedia dengan pejabat pengadaan melalui system e purchasing.

#### 2.28.6 Kegiatan Review DED Gedung B dan Bangunan Pendukung RSUDP

oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 705.685.000,- atau 88,21%. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen Review DED Gedung B dan Bangunan Pendukung RSUDP.



**2.28.7 Kegiatan Pengadaan Linen** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.853.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 69.018.250,- atau 98,80%. keluaran kegiatan ini adalah tersedianya linen rumah sakit.



## 2.29 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

**2.29.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit** oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.142.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.141.531.496, atau 99,96%. Keluaran kegiatan ini adalah Pemeliharaan gedung dan Jasa Pengendalian hama RSUD Dr.(H.C).Ir. Soekarno.



- **Permasalahan dan Solusi**

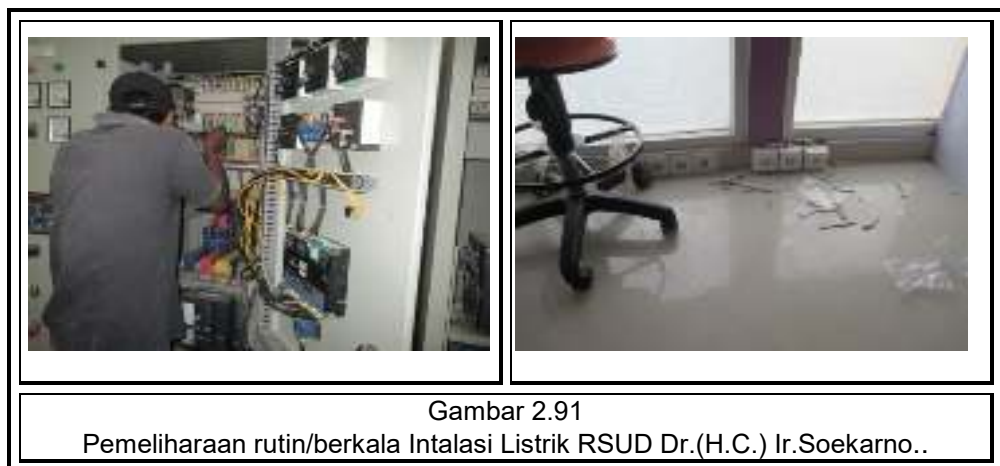
**Permasalahan**

Masih banyaknya kebutuhan pemeliharaan tidak bisa di akomodir dalam kegiatan ini dikarenakan keterbatasan dana

**Solusi :**

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Akan dianggarkan kembali di tahun 2018

- 2.29.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 99.825.000,- atau 99,83%. Keluaran kegiatan ini adalah Pemeliharaan rutin/berkala intalasi listrik RSUD Dr.(H.C.) Ir.Soekarno.



- 2.29.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit** oleh RSUD Dr.(H.C Ir.Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 149.510.050,- atau 99,67%. Keluaran kegiatan ini terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.





- 2.29.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.007.080.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 911.145.018,- atau 90,47%. Keluaran kegiatan ini adalah Pemeliharaan alat kesehatan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.



- 2.29.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah Rumah Sakit** oleh RSUD Dr.(H.C Ir.Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 149.698.000,- atau 90,26%. Keluaran kegiatan ini adalah Bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah.



- 2.29.6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Oksigen Sentral Rumah Sakit** oleh RSUD Dr.(H.C Ir.Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 199.970.000,- atau 99,99%. Keluaran kegiatan ini adalah pemeliharaan oksigen sentral





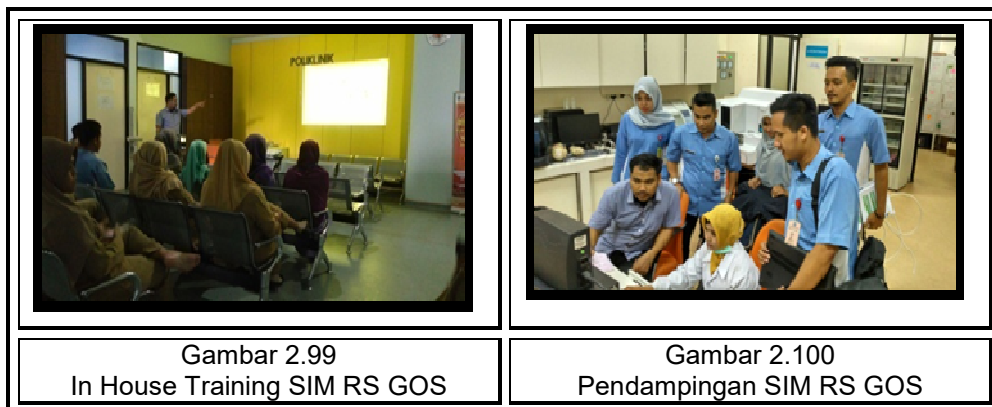
- 2.29.7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengolahan Air Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 68.450.000,- atau 68,45%. Keluaran kegiatan ini adalah pemeliharaan rutin/berkala pengolahan air rumah sakit.



- 2.29.8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 209.986.300,- atau 99,99%. Keluaran kegiatan ini adalah Terpeliharanya kebersihan linen rumah sakit.



**2.29.8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor** oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.138.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 102.606.000,- atau 91,50%. Keluaran kegiatan ini adalah pendampingan dan in house training.



- **Permasalahan**

1. Tidak adanya suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem jaringan yang kuat sehingga memperlambat aliran lalu lintas data untuk mempermudah pengambilan keputusan (*system hardware*);
2. Kurangnya sumber daya manusia dilingkungan rumah sakit yang mampu mengembangkan suatu sistem informasi manajemen secara efektif dan efisiensi (*system brainware*)

### 3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

#### 3.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

**3.1.1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.048.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 105.708.000, atau 98,75% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kelompok masyarakat yang dibina untuk mengelola sampah rumah tangga dengan target sebanyak 20 Kelompok.

Tabel Kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang terbentuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kelompok yang terbentuk	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten Bangka	1. Kelurahan Srimenanti	Belum Aktif
		2. Kelurahan Bukit Betung	Belum Aktif
		3. Kelurahan Parit Padang	Belum Aktif
		4. Kelurahan Kenanga	Belum Aktif
		5. Desa Karya Makmur	Belum Aktif
2	Kabupaten Bangka Selatan	1. Kelurahan Teladan	Aktif
		2. Kelurahan Toboali	Belum Aktif
		3. Kelurahan Ketapang	Aktif
		4. Kelurahan Tukak	Aktif
		5. Desa Gadung	Belum Aktif
3	Kabupaten Bangka Tengah	1. Kelurahan Koba	Aktif
		2. Kelurahan Berok	Aktif
		3. Kelurahan Simpang Perlang	Belum Aktif
		4. Kelurahan Padang Mulia	Belum Aktif
		5. Kelurahan Arung Dalam	Belum Aktif
4	Kabupaten Bangka Barat :	1. Kelurahan Sungai Baru	Aktif
		2. Kelurahan Sungai Daeng	Belum Aktif
		3. Kelurahan Tanjung	Belum Aktif
		4. Desa Belo Laut	Belum Aktif
		5. Desa Air Belo	Belum Aktif

Sumber : Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Berikut adalah gambar pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas masyarakat yang berlangsung.



#### Permasalahan dan Solusi :

##### a. Permasalahan :

- Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan komposter sehingga banyak komposter yang tidak digunakan secara aktif bahkan ada yang belum pernah menggunakannya. Hal ini diakibatkan juga oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan manfaat kompos.

##### b. Solusi

- Untuk tahun berikutnya, perlu lebih diperhatikan dan dipilih kelompok masyarakat yang akan diberi pelatihan dan bantuan komposter agar komposter dapat digunakan semaksimal mungkin dengan mendapatkan manfaat kompos yang dihasilkan dari komposter tersebut. Kelompok masyarakat bisa dipilih dari masyarakat kelompok tani atau masyarakat yang mempunyai kebun/tanaman disekitar rumah.

### 3.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

**3.2.1 Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 101.525.000.- Realisasi anggaran sebesar Rp 100.903.600,- atau 99,39% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pemantauan evaluasi dan penilaian program adipura dengan target sebanyak 300 titik pantau. Total titik pantau yang dievaluasi dan dinilai sebanyak 266 titik pantau. Jika dibandingkan dengan output ketercapaian target tidak mencapai 100%. Namun hasil dari evaluasi dan penilaian dari 266 titik pantau tersebut meningkat dari periode tahun 2016 - 2017 yang dapat dilihat pada tabel 1.2.1 berikut ini :

**Tabel Hasil Penilaian Adipura Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2017**

No.	Kota	Kabupaten/Kota	Pantau (2016-2017)	Penghargaan ADIPURA	Kategori Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Muntok	Kabupaten Bangka Barat	68,76	---	Kecil
2.	Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	72,44	Sertifikat	Sedang
3.	Toboali	Kabupaten. Bangka Selatan	75,83	Piala Adipura	Kecil
4.	Manggar	Kabupaten Belitung Timur	75,16	Sertifikat	Kecil
5.	Sungailiat	Kabupaten. Bangka	75,92	Piala Adipura	Kecil
6.	Koba	Kabupaten Bangka Tengah	75,65	Piala Adipura	Kecil
7.	Tanjung Pandan	Kabupaten. Belitung	69,57	---	Kecil

Sumber : Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Berikut ini adalah gambar proses pelaksanaan kegiatan penilaian Adipura



#### **Permasalahan dan Solusi :**

##### **a. Permasalahan :**

- Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan penilaian terhadap 300 titik pantau. Namun dalam pelaksanaannya jumlah titik pantau yang dievaluasi dan dinilai sebanyak 242 titik pantau. Hal ini disebabkan penentuan jumlah titik pantau ditentukan oleh tim penilai Pusat berdasarkan juknis yang telah mereka tentukan. Jika titik pantau yang terpilih telah mewakili prosedur penilaian maka terjadi pengurangan jumlah titik pantau dari target awal.
- Kurangnya Kesiapan Kabupaten/Kota dalam menghadapi evaluasi dan penialain Program Adipura.



b. Solusi

- Mengintensifkan pembinaan terhadap kabupaten/Kota untuk mempersiapkan penilaian program adipura secara lebih matang.

**3.2.2 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 275.02.0000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 265.703.784,- atau 96,61%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dengan target sebanyak 50 usaha/kegiatan. Dari 50 usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina terdapat 30 usaha/kegiatan dengan kategori taat dan 20 Usaha/Kegiatan dengan Kategori tidak taat. Berikut adalah rincian perusahaan yang diawasi dengan status ketaatannya :

Tabel Daftar Perusahaan Yang Diawasi dan Status Ketaatan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Sektor	Lokasi	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CV. Mutiara Alam Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Bangka Tengah	Taat	-
2	PT. Bumi Permai Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Bangka Barat	Taat	-
3	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten. Bangka	Taat	-
4	PT. Gunung Maras Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten	Taat	-
5	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten. Bangka Barat	Taat	-
6	PT. Palmindo Mitra Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten. Bangka	Taat	-
7	PT. Parit Sembada	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Belitung Timur	Taat	-
8	PT. Putra Bangka Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Bangka	Taat	-
9	PT. Rebinmas Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten. Belitung	Taat	-
10	PT. PLN (Persero) - Wilayah Bangka Belitung Sub Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Padang	Energi PLTD	Kabupaten. Belitung Timur	Taat	-

No	Nama Perusahaan	Sektor	Lokasi	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	PT. PLN (Persero)- PLTD Merawang	Energi PLTD	Kabupaten. Bangka	Taat	-
12	PT. PLN (Persero)- Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan Babel- PLTD Pilang	Energi PLTD	Kabupaten. Belitung	Taat	-
13	PT. PLN (Persero)- Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan Babel- PLTD Toboali	Energi PLTD	Kabupaten. Bangka Selatan	Taat	-
14	PT. Sawindo Kencana	Sawit	Kabupaten. Bangka Barat	Taat	-
15	PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Pangkalbalam	Migas Distribusi	Kota Pangkal Pinang	Taat	-
16	PT. Medco E&P Indonesia - Terminal Khusus FSO Bangka Marine Terminal	Migas Distribusi	Kab. Bangka Barat	Taat	-
17	PT. Pertamina (Persero) DPPU Depati Amir	Migas Distribusi	Kab. Bangka Tengah	Taat	-
18	PT. Refined Bangka Tin	Tambang Pengolahan	Kab. Bangka	Taat	-
19	PT. Timah (Persero) Tbk - Wilasi II Bangka Selatan	Tambang Mineral	Kab. Bangka Selatan	Taat	-
20	PT. Timah (Persero), Tbk - Unit Metalurgi Muntok	Tambang Pengolahan	Kab. Bangka Barat	Taat	-
21	PT. Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (Balaikarya)	Tambang Mineral	Kab. Bangka	Taat	-
22	PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Sungailiat	Tambang Mineral	Kab. Bangka	Taat	-
23	PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Wilayah Tambang Darat Jebus	Tambang Mineral	Kab. Bangka Barat	Taat	-
24	PT. Tinindo Internusa	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	Taat	-
25	PT. Dok Air Kantung	Galangan Kapal	Kab. Bangka	Taat	-
26	PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung Unit Galangan Selindung	Galangan Kapal	Kota Pangkal Pinang	Taat	-

No	Nama Perusahaan	Sektor	Lokasi	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	PT. Pahala Harapan Lestari	Galangan Kapal	Kota Pangkal Pinang	Taat	-
28	PT. Karini Utama	Karet	Kab. Bangka	Taat	-
29	PT. Foresta Lestari Dwikarya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Belitung	Taat	-
30	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Belitung Timur	Taat	-
31	PT. Astika Murni Utama	Migas Distribusi	Kab. Belitung	Tidak Taat	Sanksi Administratif
32	PT. Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (PLTD) Baturusa	Energi PLTD	Kab. Bangka	Tidak Taat/ Tutup	Sanksi Administratif
33	PT. Prima Timah Utama	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	Tidak Taat	Sanksi Administratif
34	Hotel Santika	Hotel	Kab. Bangka Tengah	Tidak Taat	Sanksi Administratif
35	Hotel Soll Marina	Hotel	Kab. Bangka Tengah	Tidak Taat	Sanksi Administratif
36	Hotel Grand Hatika	Hotel	Kab. Belitung	Tidak Taat	Sanksi Administratif
37	Hotel BW Suite	Hotel	Kab. Belitung	Tidak Taat	Sanksi Administratif
38	PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya	HTI	Kab. Belitung Timur	Tidak Taat	Sanksi Administratif
39	PT.Vitratama Properti	Tambang Mineral	Kab. Bangka Tengah	Tidak Taat	Sanksi Administratif
40	PT. Grand Cirindo	Hotel	Kab. Bangka Tengah	Tidak Taat	Sanksi Administratif
41	PT.Bumi Sawit Sukses Pratama	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Bangka Selatan	Tidak Taat	Sanksi Administratif
42	PT. Swarna Nusa Sentosa	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Bangka Tengah	Tidak Taat	Sanksi Administratif
43	PT. Bangka Plasma Besaoh	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Bangka Selatan	Tidak Taat	Sanksi Administratif
44	PT.Belitung Industri Sejahtera	Tambang Pengolahan	Kab. Belitung	Tidak Taat	Sanksi Administratif
45	PT.Stelindo Wahana Perkasa	Pelabuhan Khusus	Kab.Belitung Timur	Tidak Taat	Sanksi Administratif
46	Bandar Udara HAS.Hanandjoedin	Bandar Udara	Kab. Belitung	Tidak Taat	Sanksi Administratif
47	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera	HTI	Kab. Belitung	Tidak Taat	Sanksi Administratif

No	Nama Perusahaan	Sektor	Lokasi	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Timur		
48	PT.Sentra Tinindo	Tambang Mineral	Kab. Bangka Barat	Tidak Taat	Sanksi Administratif
49	PT. Panca Mega	Tambang Pengolahan	Kab. Bangka	Tidak Taat	Sanksi Administratif
50	PT. Mitra Stania Prima	Tambang Pengolahan	Kab. Bangka	Tidak Taat	Sanksi Administratif

Sumber : Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



Gambar 3.5  
Briefing Lapangan dan Instruksi Safety Induction.  
Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Biji Timah (Smelter) PT. Panca Mega Persada di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka



Gambar 3.6  
Opening Meeting di KIP. Rantau Indah Mandiri PT. Sentra Tinindo sebelum Inspeksi Lapangan dengan Kepala Teknik Tambang bersama Tim Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat

### Permasalahan dan Solusi :

#### a. Permasalahan :

- Anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh izin lingkungan yang dikeluarkan oleh provinsi sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Masih terbatasnya kemampuan SDM di bidang pengawasan lingkungan hidup dan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
- Belum maksimal dan meratanya kemampuan SDM perusahaan yang membidangi K3LH, dalam pemahaman penting pengelolaan lingkungan hidup sehingga pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan belum maksimal dan hasil ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lh belum optimal.
- Kurangnya pelatihan dan peningkatan SDM pengawasan sehingga informasi dan up grade pengetahuan terkait pengawasan sering terlambat.

b. Solusi

- Memaksimalkan pengawasan Self Assesment bagi usaha/kegiatan yang belum terjadwalkan dalam kegiatan pengawasan.
- Meningkatkan Kapasitas SDM Pengawas bidang lingkungan hidup
- Meningkatkan kapasitas SDM perusahaan yang membidangi K3LH
- Meningkatkan fungsi evaluasi terhadap pemenuhan sanksi administrasi yang telah diberikan untuk usaha/kegiatan dengan status ketaatan tidak taat.

**3.2.3 Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.598.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 36.479.670,- atau 97,03%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Profil tahunan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun sebanyak 1 Dokumen.



**Permasalahan dan Solusi :**

a. Permasalahan :

- Kurang lengkapnya data aktivitas sehingga berpengaruh terhadap hasil inventarisasi GRK. Data aktivitas yang saat ini belum diperoleh sebagai data yang dapat dimasukkan dalam perhitungan emisi GRK yaitu :
  - ✓ Sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya : data kebakaran lahan gambut
  - ✓ Sektor pengadaan dan penggunaan energi : data konsumsi BBM jenis pertamax, pertamax plus, bio-premium, bio pertamax, dan bio solar.
  - ✓ Sektor pengelolaan limbah : data real sampah yang masuk ke TPA, komposting sampah di TPA/TPS, pengelolaan limbah klinis, dan pengelolaan limbah industri
  - ✓ Sektor Proses Industri dan penggunaan produk : data penggunaan produk-produk non energi dari bahan bakar seperti pelumas, bahan perusak ozon seperti refrigerant Air conditioner, pelarut (solvent) aerosol dan pemadam api.



b. Solusi

- Agar sektor terkait dapat meningkatkan ketersediaan pemenuhan data yang diperlukan dalam inventarisasi GRK guna meningkatkan hasil estimasi emisi GRK yang lebih akurat.

**3.2.4 Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.925.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 45.575.000,- atau 97,12%. Terlaksananya pembinaan komisi penilai Amdal Kabupaten/Kota sebanyak 7 Komisi Penilai Amdal. Hasil yang didapatkan adalah dari 7 Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi 100% masih memenuhi persyaratan Lisensi Komisi Penilai Amdal.



Gambar 3.9

Tim Binwas sedang melakukan  
verifikasi berkas lisensi KPA  
Kabupaten Bangka Barat



Gambar 3.10

Tim Binwas sedang melakukan  
verifikasi berkas lisensi KPA  
Kabupaten Belitung Timur

**Permasalahan dan Solusi :**

a. Permasalahan :

- Proses pemenuhan persyaratan lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten/Kota yang memerlukan waktu sehingga ketika tim pembina dan pengawas Provinsi datang mengevaluasi berkas persyaratan tersebut belum lengkap.

b. Solusi

- Menghimbau agar Komisi Penilai Amdal kabupaten/Kota lebih aktif dalam mempersiapkan kelengkapan persyaratan lisensi sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi tersebut.

**3.2.5 Verifikasi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak pidana Lingkungan Hidup** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.680.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 64.002.100,- atau 89,29%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Kasus Pengaduan yang terverifikasi sebanyak 10 Kasus. Dalam Pelaksanaannya Jumlah Kasus yang terverifikasi sebanyak 12 kasus. Berikut adalah tabel kasus pengaduan yang telah terverifikasi.

**Tabel Kasus Pengaduan Yang Terverifikasi Selama Tahun 2017  
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

<b>No</b>	<b>Kasus/Pengaduan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Dugaan kegiatan tanpa izin lingkungan oleh PT.Pulomas Sentosa terhadap Kegiatan Pengerukan Alur Sungai dan Normalisasi Alur Pelabuhan Sungai Jelitik Sungailiat	Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka	Terverifikasi
2.	Dugaan pencemaran Air Sungai Tengkalat oleh kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT.Gunung Pelawan Lestari.	Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka	Terverifikasi
3.	Dugaan pencemaran Sungai Nyalau yang melintas Desa Neknang dan Desa Kapuk diduga dari kegiatan pengolahan kelapa sawit PT.Gemilang Cahaya Mentari.	Desa Neknang dan Desa Kapuk Kabupaten Bangka	Terverifikasi
4.	Dugaan Pencemaran dan kerusakan kawasan hutan mangrove, adanya penambangan ilegal di Pantai Tanjung Bunga dan Pantai Sampur	Kota Pangkalpinang.	Terverifikasi
5.	Dugaan Pencemaran Lingkungan akibat Pembuangan limbah domestik kegiatan PT.Angkasa Pura II Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Terverifikasi
6.	Dugaan terjadinya pencemaran lingkungan akibat penambangan timah oleh PT. Saliby Panorama di desa Air Batu Buding yang limbahnya masuk ke Daerah Aliran Sungai Buding.	Kabupaten Belitung	Terverifikasi
7.	Tindaklanjut Kasus Dugaan Penambangan tanpa izin oleh PT.Stanindo Inti Perkasa untuk pengambilan titik koordinat dan sketsa TKP terkait dugaan kasus tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mendampingi Tim. Penyidik dari Dirjen PHP KLHK.	Kecamatan Tempilang kabupaten Bangka Barat	Terverifikasi
8.	Dugaan perusakan ekosistem terumbu karang di perairan laut Bangka Belitung akibat kandasnya kapal kargo MT.Alex di Perairan laut Kabupaten Belitung.	Kabupaten Belitung.	Terverifikasi

No	Kasus/Pengaduan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Verifikasi dan inventarisasi terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha (pertambangan dan HTI) sebagai indikasi penyebab banjir di Kabupaten Belitung Timur.	Kabupaten Belitung Timur.	Terverifikasi
10	Dugaan kegiatan tanpa izin lingkungan di hutan lindung terhadap kegiatan pembangunan villa milik Sdr.Pit Jun di Pesisir Pantai Pesaren Kecamatan Belinyu bersama Tim Balai Pengamanan & Gakkum Lingkungan Hidup & Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah III Sumatera.	Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka	Terverifikasi
11.	Dugaan pencemaran Air Sungai Telang di Desa Puding oleh Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT.Tata Hampan Eka Persada.	Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka	Terverifikasi
12.	Dugaan aktifitas kegiatan penambangan pasir kuarsa tanpa izin lingkungan oleh PT. Samiartha Sukses Abadi.	Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan	Terverifikasi

Sumber : Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

**Tabel Kasus Pengaduan Yang Belum Terverifikasi Selama Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Kasus/Pengaduan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dugaan Pencemaran Muara Sungai Bantel dan Terumbu Karang di Laut Tanjung Kubu Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan oleh aktivitas kegiatan penambangan ilegal menggunakan TI Rajuk	Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan	Belum Terverifikasi
2.	Dugaan Pencemaran Lingkungan dari Proses Penyemprotan atau Pengecatan Furniture di Kecamatan pangkalbalam Kota Pangkalpinang.	Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.	Belum Terverifikasi
3.	Dugaan pencemaran Air Sungai Buding oleh penambangan Timah oleh PT. Saliby Panorama di Kabupaten Belitung dan sinkronisasi lintas sektor dalam tindak lanjut penanganan pengaduan kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, (Verifikasi pelaksanaan sanksi administrasi Paksaan	Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur	Belum Terverifikasi

No	Kasus/Pengaduan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah)		
4.	Penolakan Masyarakat terhadap rencana / beroperasi Kapal Isap di perairan Desa Rambat dan Desa lainnya oleh PT. Jelajah Marindo Persada di Kecamatan Simpang Teritip kabupaten Bangka Barat.	Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat	Belum Terverifikasi

Sumber : Bidang Pengendalian dan Petaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Berikut adalah gambar pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak pidana Lingkungan Hidup

	
<p>Gambar 3.11</p> <p>Verifikasi Lapangan Terkait Dugaan Pencemaran Air Limbah Domestik Penyebab Kebauan Dari Kegiatan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang</p>	<p>Gambar 3.12</p> <p>Verifikasi Lapangan Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Air Sungai Telang oleh PT. Tata Hampan Eka Persada - Kondisi Ipal yang Sudah Dangkal yang Diduga Terjadi Remesan Pada Saat Hujan Tinggi dan Over Produksi</p>

#### Permasalahan dan Solusi :

##### a. Permasalahan :

- Anggaran yang belum mencukupi untuk pelaksanaan verifikasi kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup yang diterima oleh pos pengaduan, sengketa lingkungan hidup.
- Masih terbatasnya kemampuan SDM PPNS dan PPLH
- Belum maksimalnya pemberdayaan pos pengaduan lingkungan hidup yang ada di kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Lemahnya koordinasi antara instansi terkait pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang terjadi baik di tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota
- Masalah kewenangan dalam penanganan pengaduan kasus – kasus lingkungan hidup yang ada

##### b. Solusi

- Peningkatan Kapasitas SDM PPNS dan PPLH
- Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten kota dan instansi teknis terkait

**3.2.6 Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Sungai Terpadu** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 148.477.500,- Realisasi anggaran sebesar Rp 113.308.400,- atau 76,31%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen Daya Tampung Daya Dukung dan rencana Aksi Pengelolaan Sungai Terpadu sebanyak 2 Dokumen.



**Permasalahan dan Solusi :**

- a. Permasalahan :
  - Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya dalam penyusunan daya dukung, daya tampung dan penyusunan rencana aksi
  - Tenaga ahli yang digunakan bekerjasama dengan pihak Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (PPPE Sumatera) yang berkantor di Pekanbaru – Riau;
  - Jadwal pelaksanaan pada triwulan ke III, hal ini dikarenakan padatnya jadwal dari tim ahli PPPE Sumatera khususnya bagian daya dukung, daya tampung (DDDT) yang mencakup di beberapa Wilayah Regional Sumatera lainnya
- b. Solusi
  - Percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana awal

**3.3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.**

**3.3.1 Kegiatan Uji Profisiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 123.990.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 89.640.414,- atau 72,30%. Keluaran kegiatan adalah jumlah dokumen uji profisiensi, uji banding antar Laboratorium dan Control chart sebanyak 4 Dokumen Ada 4 Tahapan kegiatan dalam uji Profisiensi yaitu :

- a. Uji Profisiensi sebagai Peserta  
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Laboratorium Provider yang sudah terakreditasi, dalam hal ini diselenggarakan oleh research centre for



chemistry – LIPI (lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia). Lokasi Pengujian Sampel dilakukan di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pengolahan data dilaksanakan oleh LIPI. Untuk Hasil Uji Profisiensi dimana Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Profisiensi bertindak sebagai peserta masih menunggu hasil dari LIPI.

b. Uji Profisiensi sebagai Provider

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan peserta 7 laboratorium lingkungan kabupaten/Kota. Parameter yang dilakukan uji profisiensi adalah pH, DHL, COD, TSS dan Logam Fe. Berikut adalah hasil Uji Profisiensi terhadap 7 Kabupaten/Kota

Tabel Hasil Uji Profisiensi 5 Parameter Terhadap 7 Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota

No	Parameter	Jumlah Peserta	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pH	7 Laboratorium	100% Memuaskan
2	DHL	6 Laboratorium	100% Memuaskan
3	COD	5 Laboratorium	60% Memuaskan 40% Outlier
4	TSS	4 Laboratorium	25% Memuaskan 50% Meragukan 25% Outlier
5	Logam Fe	2 Laboratorium	100% Memuaskan

Sumber : Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Gambar Kegiatan Uji Profisiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart dengan tahapan Uji Profisiensi sebagai Provider.



c. Uji Banding

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan sampelnya untuk diuji serentak dengan Laboratorium lainnya di Indonesia yang telah terakreditasi yaitu Balai Besar Industri Agro, Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Laboratorium Lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan parameter yang diuji yaitu : nitrit, Logam Pb, Logam Cd, Logam Zn dan Logam Mn.

d. Pembuatan Control Chart (Bagan Kendali)

Parameter pengujian untuk matriks air limbah hotel yang dibuat dengan bagan kendalinya terdiri atas 7 parameter yaitu :

Tabel Hasil Pembuatan Control Chart dari Sampel Air Limbah Hotel Tanjung Pesona Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2017

No	Parameter							Ket
	pH	BOD	COD	TSS	Ammonia	Minyak dan Lemak	Total Coliform	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	6,40	208	452	34,50	0,43	1,00	2,00	Memenuhi secara statistik
2	7,1	372	3268	336	0,231	0,9	20	Memenuhi secara statistik
3	6,2	28,9	74,3	85	0,078	1	120	Memenuhi secara statistik
4	6,6	57,2	219	42	0,254	1	20	Memenuhi secara statistik
5	6,8	99,4	217	47	0,162	0,4	110	Memenuhi secara statistik
6	7,04	929	2042	1200	0,286	0,7	330	Memenuhi secara statistik
7	6,38	79,4	184	37	0,534	0,7	230	Memenuhi secara statistik

Sumber : Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Berikut adalah gambar salah satu kegiatan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart.



Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Bahan kimia yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan uji profisiensi mengalami inden
- Bahan uji banding yang dikirimkan ke laboratorium terakreditasi tidak diantarkan sendiri sehingga menyebabkan bahan uji rentan kerusakan dan kebocoran dalam pengiriman.
- Beragamnya matrik sampel yang harus dilakukan penjaminan mutu (control chart) sehingga belum dapat terakomodir di dalam kegiatan.

b. Solusi

- Menetapkan parameter uji yang seawal mungkin
- Penambahan matrik sampel yang dilakukan pengendalian mutu minimal 2 dalam kegiatan.

**3.3.2 Kegiatan Surveilans, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium dilaksanakan** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 62.670.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 62.240.000,- atau 99,31%. Keluaran kegiatan adalah jumlah parameter yang terakreditasi sebanyak 30 Parameter. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini sebanyak 31 parameter lingkungan yang terakreditasi oleh KAN.

Berikut ini adalah daftar parameter lingkungan yang terakreditasi :

Tabel Hasil Kegiatan Surveilans, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Berdasarkan Parameter Lingkungan Yang Terakreditasi Tahun 2017

No	Parameter	Air Limbah	Air Limbah Tambang Timah	Air Bersih	Air Permukaan	Udara Emisi Sumber Gas Tidak bergerak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Seng (Zn) Total	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	---

No	Parameter	Air Limbah	Air Limbah Tambang Timah	Air Bersih	Air Permukaan	Udara Emisi Sumber Gas Tidak bergerak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Besi (Fe) Terlarut	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
3	Mangan (Mn) Terlarut	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
4	Tembaga (Cu) Total	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	---
5	Nikel (Ni) Total	Akreditasi	---	Akreditasi	---	---
6	Sulfida (S <sub>2</sub> ) Total	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
7	Chemical Oxygen Demand (COD)	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
8	Klorida (Cl)	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
9	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
10	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
11	Daya Hantar Listrik (DHL)	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
12	Nitrit	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
13	Total Suspended Solid (TSS)	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
14	pH	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
15	Suhu	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
16	Amonia	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
17	MBAS	Akreditasi	---	---	Akreditasi	---
18	Salinitas	Akreditasi	---	---	Akreditasi	---
19	Padatan Terlarut Total (TDS)	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
20	Dissolved Oxygen (DO)	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
21	Total Posfat (PO <sub>4</sub> )	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
22	Total Nitrogen	Akreditasi	---	---	Akreditasi	---
23	Minyak dan Lemak	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
24	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	---	---	---	---	Akreditasi
25	Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> ) sebagai NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	Akreditasi
26	Total Coliform	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
27	Fecal Coli	Akreditasi	---	Akreditasi	Akreditasi	---
28	TSP	---	---	---	---	Akreditasi
29	CO	---	---	---	---	Akreditasi
30	NO	---	---	---	---	Akreditasi
31	Kebisingan Lingkungan	---	---	---	---	Akreditasi

Sumber : Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Berikut adalah gambaran pelaksanaan kegiatan Surveilans, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium.



**Permasalahan dan Solusi :**

a. Permasalahan :

- Waktu pelaksanaan surveilans ditentukan oleh Kantor Akreditasi Nasional (KAN) sehingga kita tidak mengetahui kapan waktu pelaksanaan hanya ditentukan 20 – 30 hari sejak sertifikat akreditasi diterima.
- Penentuan Asesor oleh Kantor Akreditasi Nasional (KAN) juga menjadi salah satu kendala kapan pelaksanaan surveilans

b. Solusi

- Meningkatkan koordinasi ke Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk penentuan waktu pelaksanaan dan proses pelaksanaan surveilans



**3.3.3 Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 287.280.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 274.466.400,- atau 95,54%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun sebanyak 1 Dokumen.



**Permasalahan dan Solusi :**

a. Permasalahan :

- Sebagian besar anggota Tim Kelompok Kerja belum terlalu memahami mekanisme dan seluk-beluk pelaksanaan KLHS, karena belum familiar dengan metode pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Untuk mengatasi hal ini, lebih baik jika digalakkan atau dianjurkan bagi beberapa pegawai dari instansi terkait untuk mengikuti Diklat KLHS.
- Kurang efektifnya *Focus Group Discussion* (FGD) dan Tim Kelompok Kerja yang dibentuk sehingga beberapa tahapan pelaksanaan harus diulang dan diperbaiki lagi.

b. Solusi

- Peningkatan kapasitas SDM bagi beberapa pegawai dari instansi terkait untuk mengikuti Diklat KLHS.
- Peningkatan peran aktif masing-masing anggota Tim Kelompok Kerja sangat berarti untuk menghasilkan rumusan isu, hasil kajian/analisis, ataupun rekomendasi yang benar-benar berkualitas sehingga KLHS yang dihasilkan benar-benar bisa memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan, rencana, dan/atau program yang sedang dikaji.

**3.3.4 Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RZWP3K** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 135.324.779,- atau 45,11%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya dokumen program kerja bidang lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen.



### Permasalahan dan Solusi :

#### a. Permasalahan :

- Sebagian besar anggota Tim Kelompok Kerja belum terlalu memahami mekanisme dan seluk-beluk pelaksanaan KLHS, karena belum familiar dengan metode pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- Kurang efektifnya *Focus Group Discussion* (FGD) dan Tim Kelompok Kerja yang dibentuk sehingga beberapa tahapan pelaksanaan harus diulang dan diperbaiki lagi.
- Penyusunan RZWP3K yang memiliki banyak kendala dengan berbagai macam konflik antar kepentingan menyebabkan tertundanya penyelesaian penyusunan rencana alokasi ruang yang merupakan komponen kebijakan, rencana, dan/atau program yang dikaji dalam KLHS RZWP3K. Penundaan dalam waktu yang relatif lama ini menyebabkan tahapan pelaksanaan KLHS juga terhenti cukup lama, karena bahan yang dikaji belum tuntas. Akibatnya, kajian terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RZWP3K tidak bisa dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

#### b. Solusi

- Untuk mengatasi hal ini, lebih baik jika digalakkan atau dianjurkan bagi beberapa pegawai dari instansi terkait untuk mengikuti Diklat KLHS.
- Dalam hal ini, peran aktif masing-masing anggota Tim Kelompok Kerja sangat berarti untuk menghasilkan rumusan isu, hasil kajian/analisis, ataupun rekomendasi yang benar-benar berkualitas sehingga KLHS yang dihasilkan benar-benar bisa memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan, rencana, dan/atau program yang sedang dikaji.

### 3.4 Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

**3.4.1 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien** oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 186.290.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 184.295.000,- atau 98,93%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien sebanyak 6 parameter. Hasil Pemantauan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel Hasil Kegiatan Surveilans, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Berdasarkan Parameter Lingkungan Yang Terakreditasi Tahun 2017

N O	Kabupa ten/Kota a	Lokasi Pema ntaua n	Alamat Titik Pantau	Waktu Pemantauan II						Status
				Parameter						
				TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	CO	O <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kota Pangkalpinang	Industri	Kawasan Industri Ketapang (SMKN 4 Perikanan ) Pangkalpinang	99.42	59.19	23.82	801.64	42.08	57.68	Dibawah BMUA
		Pemukiman	Perumnas Bukit Merapin (Masjid Al-Fitrah) Pangkalpinang	67.71	31.33	23.82	801.64	47.72	35.86	Dibawah BMUA
		Roadside	Jl. Soekarno-Hatta (Kantor Kadin/RSU D Depati Hamzah) Pangkalpinang	80.41	35.4	23.82	916.16	47.24	56.67	Dibawah BMUA
2	Kabupaten Bangka	Industri	Kawasan Industri Jelitik Sungailiat	92.87	44.08	23.82	229.04	58.51	49.83	Dibawah BMUA
		Pemukiman	Perumahan RSS Pemda Sungailiat	92.30	42	23.82	801.64	56.55	49.74	Dibawah BMUA
		Roadside	Jl. Jend. Sudirman (Tenda Merah) Sungailiat	117.64	54.78	23.82	343.56	50.92	69.46	Dibawah BMUA
3	Kabupaten Bangka	Industri	CV. MAL (Arung Dalam)	116.16	23.93	25.93	458.08	44	25.93	Dibawah BMUA

N O	Kabupa ten/Kot a	Lokasi Pema ntaua n	Alamat Titik Pantau	Waktu Pemantauan II						Status
				Parameter						
				TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	CO	O <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tengah	Pemu kiman	Pemukima n Penduduk Kp. Jawa Koba	65.20	19.77	23.82	343.56	32.68	34.29	Dibaw ah BMUA
		Roadsi de	Kantor Kecamata n Koba	51.60	24.01	23.82	801.64	55.69	49.20	Dibaw ah BMUA
4	Kabupa ten Bangka Barat	Indust ri	UNMET PT. Timah (Persero), Tbk Muntok	81.35	36.95	23.82	572.6	60.69	50.77	Dibaw ah BMUA
		Pemu kiman	Komplek Perumaha n PELTIM (Masjid Al-Huda) Muntok	83.49	36.24	23.82	687.12	46.99	36.51	Dibaw ah BMUA
		Roadsi de	Jl. Kejaksaan (Taman Lokomotif ) Muntok	99.39	49.19	26.05	687.12	52.49	51.07	Dibaw ah BMUA
5	Kabupa ten Bangka Selatan	Indust ri	Jl. Sadai Kec. Tukak Sadai Toboali	87.65	30.59	23.82	458.08	38.07	40.62	Dibaw ah BMUA
		Pemu kiman	Pemukima n Jl. Damai Toboali (Lapangan Bola)	89.03	32.71	23.82	343.56	47.15	48.33	Dibaw ah BMUA
		Roadsi de	Jl. Jend. Sudirman (Sekitar Tugu Nanas) Depan Hotel Grand Marina Toboali	82.21	35.53	23.82	801.64	46.64	58.51	Dibaw ah BMUA
6	Kabupa ten Belitung	Indust ri	Kawasan Industri Suge Tanjungpa ndan	75.26	19.77	23.82	458.08	34.77	38.43	Dibaw ah BMUA
		Pemu kiman	Pemukima n Penduduk Kelurahan Parit	54.34	19.71	23.82	985.3	46.99	53.59	Dibaw ah BMUA

N O	Kabupa ten/Kot a	Lokasi Pema ntaua n	Alamat Titik Pantau	Waktu Pemantauan II						Status
				Parameter						
				TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	CO	O <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tanjungpa ndan							
		Roadsi de	Bundaran Tugu Batu Satam Tanjungpa ndan	82.12	24.78	25.16	856.4	53.72	54.31	Dibaw ah BMUA
7	Kabupa ten Belitung Timur	Indust ri	Area Pabrik CPO PT. SWP	88.13	21.3	23.82	458.08	41.89	42.12	Dibaw ah BMUA
		Pemu kiman	Pemukima n Desa Baru Kecamata n Manggar	76.85	22.67	23.82	458.08	44.37	46.68	Dibaw ah BMUA
		Roadsi de	Jl. Jend. Sudirman (Depan Puncak) Manggar	62.12	20.59	23.82	687.12	58.04	23.82	Dibaw ah BMUA

Sumber : Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Berikut gambaran pelaksanaan pengambilan sampel udara dengan menggunakan metode passive sampler Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien







Gambar 3.27

Pengambilan Sampel Udara Ambien dan Pengukuran Arah & Kecepatan Angin di Lokasi SMKN Perikanan Pangkalpinang (Mewakili Area Industri)

### Permasalahan dan Solusi :

#### a. Permasalahan :

- Permasalahan yang sering terjadi pada saat dilakukan pemantauan kualitas udara ambien dilapangan lebih kepada aspek non teknis yaitu aspek metereologis mengingat pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien tersebut berada pada kecendrungan musim peralihan dari musim panas ke musim hujan sebab peralatan pengambilan sampel udara ambien harus selalu terpasang di Lokasi titik pantau selama 24 jam

#### b. Solusi

- Jika terjadi kondisi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat selama total maksimal 2 jam diantara jam 06.00 – 18.00 maka pemantauan harus dihentikan dan dilanjutkan kembali setelah hujan berhenti. Jika kondisi hujan lebih dari 2 jam maka pemantauan harus diulang pada hari kerja berikutnya
- Pada kondisi hujan dimana pemantauan harus dihentikan, hanya parameter yang membutuhkan waktu pantau 24 jam yang harus diulang
- Jika terjadi hujan gerimis yang tidak terus menerus, pemantauan dapat terus dijalankan

## 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 4.1 . Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

**4.1.1 Kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan** oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.741.980.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 55.684.832.900, realisasi anggaran sebesar Rp. 54.709.165.390,- atau 98,25%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya pembangunan jalan, meliputi:

- **Kabupaten Bangka :**  
Peningkatan jalan puding besar - saing - kota waringin efektif 2 Km.
- **Bangka Barat :**  
Peningkatan Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Sangku - Dam III – Saing efektif 1,5 Km.
- **Belitung :**  
Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 1) efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 2) efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Perawas - Km. 50 efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat efektif 1,5 Km.
- **Belitung Timur :**  
Peningkatan Jalan Badau - Gantung efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Km. 50 – Manggar efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Gantung - Simpang Padang efektif 0,1 Km, Peningkatan Jalan Badau - Gantung (Paket 2) efektif 0,02 Km.



**4.1.2 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.261.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 538.918.514,- atau 23,83%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan, yaitu: DED Jembatan Ruas Jalan Perawas - Km. 50 - Manggar Kabupaten Belitung/Belitung Timur 1 Dokumen, Pra Fs Jembatan Bangka Sumatera (gagal lelang).



• **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

Lelang pertama dinyatakan gagal karena daftar pendek jumlah penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan teknis kurang dari tiga, lelang ulang ke dua gagal karena berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan lelang ulang ketiga gagal karena tidak ada peserta (penyedia jasa) yang lulus evaluasi teknis.

**4.1.3 Kegiatan Pembangunan Jembatan** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.161.984.250,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 50.479.484.300,- realisasi anggaran sebesar Rp. 49.678.761.500,- atau 98,41%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan jembatan, meliputi:

- **Kabupaten Bangka Tengah :**  
Pembangunan Jembatan Keretak, Pembangunan Jembatan Trubus, Pembangunan Jembatan Sadap,
- **Kabupaten Bangka Selatan :**  
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lampur - Air Bara.
- **Kabupaten Bangka :**  
Pembangunan Jembatan Penagan, Pembangunan Jembatan Peludin



**4.1.4 Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK)** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.541.065.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 14.632.585.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 13.115.309.500,- atau 89,63%. Keluaran kegiatan adalah terbangunnya jembatan, yaitu :

**Kabupaten Bangka Tengah :**

Pembangunan Jembatan Nadi, Pembangunan Jembatan Lubuk Lingkup.



**4.1.5 Kegiatan Pembangunan Jalan untuk dihibahkan** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 3.318.174.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.086.778.500,- atau 93,03%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan jalan, meliputi:

- **Kabupaten Bangka Tengah :**  
Pembangunan Jalan Komplek Brimob, panjang efektif 0,7 Km.
- **Kota Pangkalpinang :**  
Pengaspalan Jalan Klenteng Sheng Mu Miao, panjang efektif 0,304 Km.



## 4.2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.2.1. **Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.310.140.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 87.121.381.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 85.755.562.746,- atau 98,43%. Keluaran kegiatan adalah Terpeliharanya jalan yang terdiri dari:

- **Kota Pangkalpinang :**  
Pemeliharaan Berkala Jalan Pulau Bangka efektif 2,55 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Batas Kota (Simpang Katis); A. Yani; Simpang Semabung - Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Ketapang - Pasir Padi; PPI; Simpang Pulau Bangka – Sampur Fungsional 28,64 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Alexander fungsional 20,13 Km.
- **Kabupaten Bangka :**  
Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Timur (Paket 1) efektif 5 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Timur (Paket 2) efektif 4 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu efektif 2 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur efektif 2 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar – Sungailiat dengan fungsional 29,6 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu dengan fungsional 25,75 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin dengan fungsional 21,8 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung dengan fungsional 34,4 Km.
- **Kabupaten Bangka Tengah :**  
Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; - Sungai Selan efektif 1,5 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Koba - Lubuk Besar efektif 2,5 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; Simpang Katis - Sungai Selan dengan fungsional 33,41 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Simpang Katis; Puput - Lampur (Simpang Gedong); Sungai Selan – Lampur dengan fungsional 32,55 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Penagan; Penagan - Tanjung Tedung dengan fungsional 16,8 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar dengan fungsional 35,9 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat dengan fungsional 32 Km.
- **Kabupaten Bangka Selatan :**  
Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai Selan - Lampur - Air Bara efektif 4 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung – Payung efektif 4 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lampur - Air Bara dengan fungsional 61,26 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas – Bedengung dengan fungsional 21,6 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Bedengung - Batu Betumpang; Bedengung – Payung dengan fungsional 33,7 Km.
- **Kabupaten Bangka Barat :**  
Pemeliharaan Rutin Jalan Ibul - Parit Tiga dengan fungsional 23,45 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru dengan fungsional 26,78 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang;



Sangku - Dam III - Saing; Simpang Tempilang – Sangku dengan fungsional 48,78 Km.

- **Kabupaten Belitung :**

Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandan; Tanjung Pandan - Simpang Empat dengan fungsional 32,09 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Junction - Membalong dengan fungsional 40,64 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - KM. 50 dengan fungsional 27,9 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat - Pesarikan – Buding dengan fungsional 16,40 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Badau - Gantung; Bantan – Pelulusan dengan fungsional 17 Km.

- **Kabupaten Belitung Timur :**

Pemeliharaan Rutin Jalan Badau – Gantung dengan fungsional 63,87 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Renggang - Gantung; Gantung - Simpang Padang dengan fungsional 33,6 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan KM. 50 – Manggar dengan fungsional 44,09 Km.



Gambar 4.10  
Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar  
Timur (Paket 2)  
Kab. Bangka



Gambar 4.11  
Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai  
Selan – Lampur – Air Bara

**4.2.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.290.935.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 15.363.285.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 13.994.420.000,- atau 91,09%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharannya jalan, yaitu

- **Kabupaten Bangka :**

Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar – Sungailiat efektif 2 Km

- **Kabupaten Bangka Barat :**

Pemeliharaan Berkala Jalan Ibul - Parit Tiga efektif 5 Km.



**4.2.3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.068.080.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 832.919.235,- atau 77,98%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, yaitu:

- Pemeliharaan Rutin Jembatan Rangka Baja Ruas Jalan Provinsi di Pulau Belitung.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Rangka Baja Ruas Jalan Provinsi di Pulau Bangka.



**4.2.4. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.998.020.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.412.862.982,- atau 70,71%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan operasional jembatan Baturusa II.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Penerangan Jembatan masih minim;
2. SOP buka tutup jembatan belum ada.

Solusi:

1. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk pemasangan rambu buka tutup berupa lampu lalu lintas di beberapa titik menuju jembatan Baturusa II;
2. Perlu koordinasi lanjutan dengan Dinas Perhubungan dan melibatkan KSOP Pangkalbalam, Distrik Navigasi kelas II Palembang, Pelindo II Pangkalbalam dan pihak lain terkait.

**4.2.5. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk dihibahkan** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.214.110.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.202.662.500,- atau 99,06%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jalan, yaitu Rehabilitasi Areal Perkantoran Mapolda Babel, panjang efektif 0,5 Km.



#### 4.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

**4.3.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 308.180.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 278.854.700,- atau 90,48%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya alat-alat berat untuk menunjang kegiatan kebinamargaan, terdiri dari:



**4.3.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 34.234.500,- atau 97,40%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium untuk menunjang kegiatan kebinamargaan, terdiri dari:



#### 4.4. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

**4.4.1. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 384.476.000,- atau 96,12%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, yaitu:

- Kabupaten Bangka Selatan : Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I R Serdang Pergam sepanjang 1000 Meter
- Kabupaten Bangka Barat : Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Buleng sepanjang 1000 Meter.



- 4.4.2. Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.472.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 6.573.253.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.718.163.000,- atau 86,99%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya peningkatan/pembangunan jaringan irigasi yang terdiri dari:
- Kabupaten Bangka Selatan: Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Jeriji 2,5 Ha, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam 50 Ha
  - Kabupaten Bangka Barat: Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Buleng 40 Ha



#### 4.5. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

- 4.5.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar



Rp. 1.060.860.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 21.530.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 21.530.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

Peningkatan Sumber Daya Air Baku Kec. Tukak Sadai tidak dapat terlaksana karena adanya pengurangan anggaran (Rasionalisasi Anggaran).

#### **4.6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**

**4.6.1. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.105.970.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.063.769.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 763.049.000,- atau 71,73%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya, yaitu Konservasi pengembangan dan pengelolaan SDA Desa Nyelanding 1000 M'.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

Konservasi Pengembangan dan Pengelolaan SDA Air Bara tidak terlaksana karena Rasionalisasi Anggaran

Solusi:

Ditinjau kembali untuk tahun berikutnya

#### **4.7. Program Pengendalian Banjir**

**4.7.1. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.323.150.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 13.616.877.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 13.187.769.850,- atau 96,85%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai/kali yang terdiri dari:



- Pangkalpinang: Normalisasi Saluran Banjir Pasir Garam Pangkalpinang 105 M', Normalisasi Saluran Banjir Air Kelubi Kelurahan Tua Tunu 150 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Parit Lalang I, 700 M', Normalisasi Saluran Banjir Kerabut - I Kel. Jeramba Gantung 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Jl. Air Mangkok Kel. Air Mawar 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Selindung Lama 300 M', Normalisasi Saluran Banjir Jln. Air Itam – I 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Tuatunu 800 M'.
- Kabupaten Bangka: Normalisasi Saluran Banjir Desa Dalil 980 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kapuk 100 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Duren Bangka 720 M', Normalisasi Saluran Banjir Kampung Nelayan – II 670 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Abik Belinyu 810 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Payabenua 780 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Bakam 652 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Tutut 705 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Ruay 567 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Riding Panjang Belinyu 753 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Zed Kec. Mendo Barat 640 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Gunung Muda Kec. Belinyu 680 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Sinar Jaya Jelutung kec. Sungailiat 585 M'.
- Kabupaten Bangka Tengah: Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Celuak 600 M', Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Malik 650 M', Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Pinang Sebatang 900 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Jelutung 413 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Cambai Selatan 850 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Pedindang 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Tanah Merah 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Namang 1000 M', Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Padang Baru 679 M, Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Lampur 785 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Baskara Bakti 600 M', Normalisasi dan Pengerukan Kolong Krasak 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kerantai 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Beruas 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Jelambar 725 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kerakas Kec. Sungaiselan 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Cambai Kec. Namang 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Padang Mulya Kec. Koba 350 M'.
- Kabupaten Bangka Barat : Normalisasi Saluran Banjir Desa Ranggi 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Petar 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Dendang 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Bulin I 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Jembatan Tambang 6 Desa Tugang 1200 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Pal – I 750 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Tanjung Ular 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Sungai Baru 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Teluk Rubia 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Kampung Tanjung 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Daya Baru 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Daeng 700 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Pait Jaya 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Perak 850 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Semulut 700 M', Normalisasi Saluran Banjir KSM Gelut Jalan Panglima Angin Kec. Tempilang 750 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Mancung Kelapa 450 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Tumbak Petar Kec. Jebus 500 M', Normalisasi

- Saluran Banjir Desa Tugang Dusun Pisang Kec.Kelapa 1200 M', Normalisasi Saluran Banjir Air Selawe Desa Ranggi Kec. Jebus 600 M'.
- Kabupaten Bangka Selatan : Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Gegas 450 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Malik Lama 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Ranggalas 750 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Bedengung 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Sengir 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Bencah 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Pangkal Buluh 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Payung 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Paku 550 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Sadai 500 M'.
  - Kabupaten Belitung : Normalisasi Saluran Banjir Desa Simpang Rusa Kec. Membalong 541 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan 105 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Sijuk 280 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Merbau 149 M', Normalisasi Saluran Banjir Jl. Air Baik RT 34/08 Kel. Paal Satu Kec. Tanjungpandan 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Air Raya Barat III Desa Air Raya Tanjungpandan 130 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Air Raya Timur II Desa Air Raya Tanjungpandan 111 M', Normalisasi Saluran Banjir Air Batu Buding 240 M'.
  - Kabupaten Belitung Timur : Normalisasi Saluran Banjir Desa Buding Kec. Kelapa Kampit 645 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Selingsing Kec. Gantung 475 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Padang Kec. Manggar 670 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Limbungan Kec. Gantung 270 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Lilangan Kec. Gantung 230 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Lenggang Kec. Gantung 168 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Sebrang Kec. Gantung 92 M', Normalisasi Saluran Banjir Jalan Beringin RT 04 Kec. Gantung 160 M', Normalisasi Saluran Banjir Jalan Dewi Sartika RT.07 Kec. Gantung 118 M', Normalisasi Saluran Banjir Jalan Kenanga RT.06 Kec. Gantung 132 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Padang Kec. Manggar 290 M', Normalisasi Saluran Banjir Areal Pengembangan Pemukiman Aik Pisang Kec. Gantung 220 M', Normalisasi Saluran Banjir Buding Kec. Kelapa Kampit 290 M', Normalisasi Saluran Banjir Kampung Baru 118 M'.
  - Pengerukan sungai/Kali (kabupaten Bangka Barat dan Bangka Barat) swakelola sepanjang 8300 M'.
  - Pengerukan sungai/Kali (Kota Pangkalpinang, kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan) swakelola sepanjang 4000 M'.
  - Pengerukan sungai/Kali (kabupaten Belitung dan Belitung Timur) swakelola epanjang 7100 M'.



**4.7.2. Kegiatan Perencanaan Pengendalian Banjir** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.486.440.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 60.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 58.070.000,- atau 96,78%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya perencanaan pengendalian Banjir, 1 dokumen. Yaitu DED Pembangunan Pintu Air Desa Mempayak.



#### **4.8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**

**4.8.1. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.302.330.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 93.558.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 93.558.500,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong.

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan :**

Pembangunan Talud Desa Air Batu Kec. Badau, Pembangunan Talud Pengaman Pantai Pering Kec. Kelapa Kampit, dan Pembangunan Talud Sungai Cuilong Kec. Muntok tidak dapat terlaksana karena pengurangan Anggaran.

**Solusi :**

Ditinjau kembali untuk anggaran tahun berikutnya.

- 4.8.2. Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 732.360.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 366.180.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 355.920.000,- atau 97,20%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya perencanaan turap/talud/bronjong, 1 Dokumen yaitu DED Pemecah Ombak Pantai Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat.



**4.9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

- 4.9.1. Kegiatan Pengadaan Lahan Jalan Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.045.241.450,- realisasi anggaran sebesar Rp. 212.338.390,- atau 1,51%. Keluaran kegiatan adalah Lahan keperluan prasarana pemerintah provinsi kepulauan bangka Belitung.

• **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Proses konsinyasi di PN Sungailiat tidak berjalan optimal, sehingga proses penitipan uang ganti rugi dalam pengadaan tanah Jl. Lintas Timur Kab. Bangka tidak bisa terserap.
2. Belum terlaksana proses pembuatan akta hibah sehingga pada tahapan tersebut belum dilakukan proses pemisahan sertifikat oleh pihak BPN Kota Pangkalpinang

**Solusi:**

Agar proses pembuatan akta hibah dalam segera dilakukan sehingga proses pemisahan sertifikat tanah bisa dapat dibuat

## 5. URUSAN PENATAAN RUANG

### 5.1. Program Perencanaan Tata Ruang

**5.1.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang** kawasan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 751.510.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 729.881.000,- atau 97,12%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

Belum mendapatkannya rekomendasi peta tematik dari Badan Informasi Geospasial

**Solusi:**

1. Perlu lebih intensif kembali dalam pendampingan Konsultan dalam rapat asisitensi dalam pemberian rekomendasi dari BIG di Cibinong
2. Perlu diaktifkan secara optimal fungsi PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) di Universitas Bangka Belitung, sehingga OPD Dinas PUPR lebih akselerasi dalam mendapatkan rekomendasi BIG.

**5.1.2. Kegiatan Pengadaan Alat Survey** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.701.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.655.338.300,- atau 97,29%. Keluaran kegiatan adalah Alat survey pelanggaran pemanfaatan ruang, yang terdiri dari: Drone 1 unit, Alat Survey dan Pemetaan Total Station 1 unit, GPS Geodetic 3 unit, dan GPS handle 3 unit.





Gambar 4.30  
GPS Geodetic

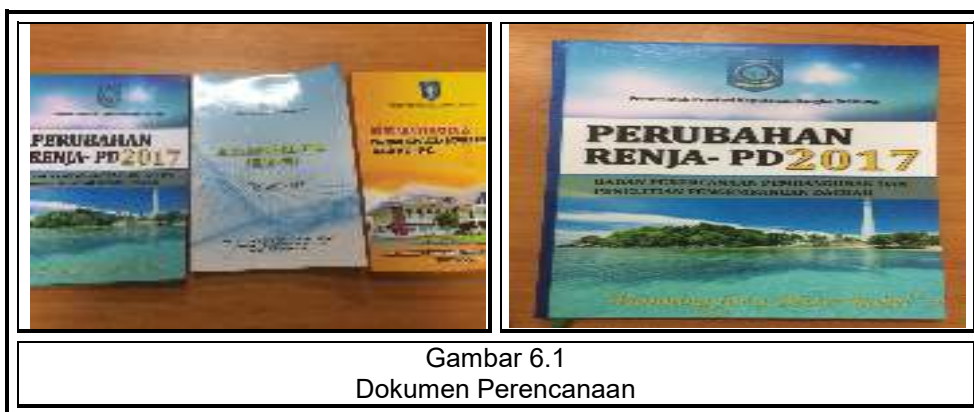


Gambar 4.31  
Drone

## 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### 6.1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 6.1.1. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.025.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 53.023.300,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunya 3 (tiga) dokumen perencanaan.



- 6.1.2. **Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 62.825.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 53.667.200,- atau 85.42%. Keluaran kegiatan ini adalah 4 (empat) jenis laporan kinerja dan keuangan.



### 6.2. Program Pengembangan data/informasi

- 6.2.1. **Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan** daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 474.890.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 372.104.301,- atau 78.36%. Keluaran kegiatan ini adalah 3 (tiga) aplikasi e-government bidang perencanaan.



Gambar 6.3  
Aplikasi e-Government Bidang Perencanaan

**6.2.2. Kegiatan Instalasi dan Implementasi Aplikasi Geoportal Pada Simpul Jaringan Nasional** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 380.148.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 342.761.437,- atau 90.17%. Keluaran kegiatan ini adalah 1 (satu) instrument/tools software geoportal.



Gambar 6.4  
Launching Geoportal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**6.2.3. Kegiatan Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249.855.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 205.671.226,- atau 82.32%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya buku data dan informasi pembangunan.



Gambar 6.5  
Buku Data dan Informasi Pembangunan

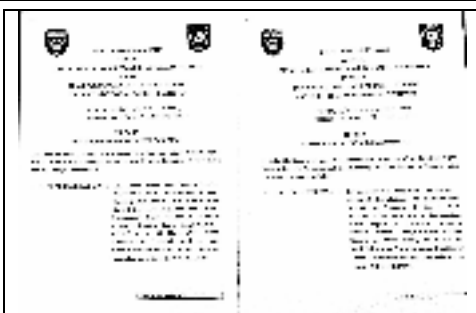
**6.2.4. Kegiatan Penyusunan Basis Data** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 154.220.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau 0%. Kegiatan ini tidak terlaksana karena terbatasnya waktu pelaksanaan karena ada beberapa elemen data yang harus diperoleh dengan menggunakan metode survey.

### 6.3. Program Kerjasama Pembangunan

**6.3.1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 246.515.000,- realisasi anggaran sebesar Rp232.807.910,- atau 94,44%. Keluaran kegiatan ini adalah 1 (satu) naskah kerjasama.



Gambar 6.6  
Rapat Kerja Kepala Bappeda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Muntok tanggal 27 Maret 2017



Gambar 6.7  
Naskah Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

### 6.4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

**6.4.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.740.000,- realisasi anggaran sebesar

Rp 74.236.000,- atau 67,04%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi program AMPL Nasional.



Gambar 6.8  
Rapat Koordinasi koordinasi program AMPL Nasional

## 6.5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

**6.5.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 379.760.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 302.031.511,- atau 79.53%. Keluaran kegiatan ini adalah 8 (delapan) jenis keikutsertaan dalam diklat teknis dan fungsional/bimtek/workshop yang diikuti.



Gambar 6.9  
Bimbingan Teknis Pengadaan  
Langsung Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah

Gambar 6.10  
Diklat Fungsional Penjenjangan  
Perencana Muda (FPP-Muda)  
Angkatan ke XVII

## 6.6. Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

**6.6.1. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 634.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 548.040.605,51,- atau 86.41%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Musrenbang RPJMD.





Gambar 6.11  
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

- 6.6.2. Kegiatan Penyusunan RKPD** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 472.720.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 440.563.167,- atau 93.20%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunya 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD 2018 dan Dokumen Perubahan RKPD 2017.



Gambar 6.12  
Dokumen RKPD 2018 dan Dokumen Perubahan RKPD 2017

- 6.6.3. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 665.752.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 621.145.218,5,- atau 93.30%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya 3 (tiga) forum yaitu forum perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan daerah daerah dan forum pasca musrenbang RKPD tahun 2017.



Gambar 6.13  
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- 6.6.4. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 394.165.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 390.320.452,- atau 99.02%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 2 (dua) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yaitu LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir jabatan kepala daerah.



Gambar 6.14  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Jabatan Kepala Daerah

- 6.6.5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 412.450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp373.428.736,- atau 90.54%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya 8 (delapan) laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu laporan pengendalian perencanaan, kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana tahunan perangkat daerah, provinsi dan kabupaten/kota.



Gambar 6.15  
Rapat Pengendalian Dan Evaluasi



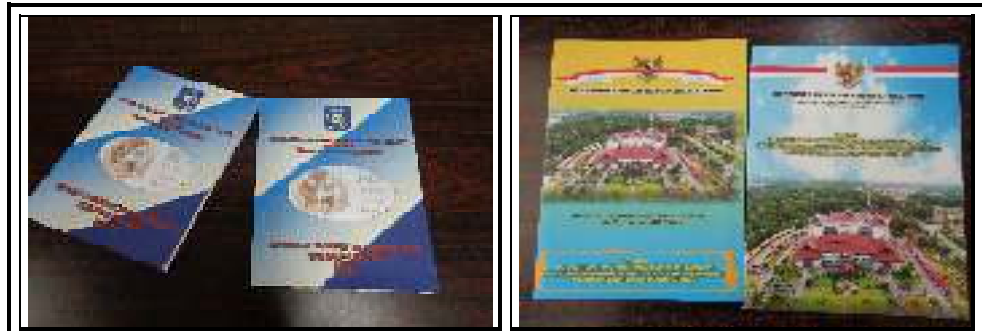
Gambar 6.16  
Rapat Persiapan Laporan  
Pengendalian Dan Evaluasi Hasil  
Rencana Kerja Tahun 2016

- 6.6.6. Kegiatan Penyusunan KUA, PPAS** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 391.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 375.348.500,- atau 95.96%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya KUA PPAS tahun anggaran 2018 dan perubahan KUA PPAS tahun 2017.



Gambar 6.17  
Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan KUA PPAS  
Tahun 2017

- 6.6.7. Kegiatan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 287.280.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 267.675.800,- atau 93.18%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman umum dan petunjuk teknis laporan monitoring dan evaluasi kebijakan Satam Emas.



Gambar 6.18  
Buku Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Laporan Monitoring dan Evaluasi  
Kebijakan Satam Emas

- 6.6.8. Kegiatan Penyusunan RPJMD 2017-2022** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 688.010.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 529.376.674,64,- atau 76.94%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022.



Gambar 6.19  
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022.

- 6.6.9. Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 425.190.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 279.472.348,- atau 65.73%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah.



Gambar 6.20  
Rapat Tim Advisori Kegiatan  
Penyusunan Rumusan Kebijakan  
Percepatan Pembangunan Daerah



Gambar 6.21  
Laporan Penyusunan Kebijakan  
Percepatan Pembangunan Daerah  
Rumusan

## 6.7. Program Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 6.7.1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 288.726.300,- realisasi anggaran sebesar Rp 247.234.313,- atau 85.63%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, energy dan sumber daya mineral.



Gambar 6.22  
Rapat Koordinasi Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

## 6.8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

- 6.8.1. Kegiatan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 232.813.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 208.436.820,- atau 89.53%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi 4 (empat) dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan





Gambar 6.23  
Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Dan Kebudayaan

## 6.9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

**6.9.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 245.690.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 179.314.734,- atau 72.98%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya 2 (dua) koordinasi perencanaan sarana prasarana dan lingkungan hidup.



Gambar 6.24  
Rapat Koordinasi Penyusunan PEP  
GRK Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung



Gambar 6.25  
Rapat Koordinasi Penyusunan  
Review RAD GRK Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

## 6.10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

**6.10.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 322.870.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 217.021.681,- atau 67.22%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 5 (lima) advice planning tata ruang.



Gambar 6.25  
Rapat Advice Planning Tata Ruang

## 6.11. Program perencanaan Pembangunan Pemerintahan

**6.11.1. Kegiatan Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 154.410.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.128.816.950,- atau 83.43%. Keluaran kegiatan ini adalah 1 (satu) kali deklarasi dan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas.



Gambar 6.26  
Penandatanganan Piagam  
Pencanangan Zona Integritas oleh  
Para Kepala Daerah

Gambar 6.27  
Piagam Pencanangan Pembangunan  
Zona Integritas Menuju WBK dan  
WBBM

**6.11.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.152.600,- realisasi anggaran sebesar Rp156.107.240,- atau 91.21%. Keluaran kegiatan ini adalah 4 (empat) laporan.



Gambar 6.28  
Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun  
2017

Gambar 6.29  
Laporan Koordinasi Perencanaan  
Bidang Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah

## 6.12. Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah

**6.12.1. Kegiatan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 306.068.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 267.723.200,- atau 87.47%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunya 2 (dua) kajian pembangunan daerah.



Gambar 6.30  
Dokumen Kajian Kesehatan  
Biopsikologisosial Remaja SMA, SMK  
dan MA di Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

Gambar 6.31  
Dokumen Kajian Resiliensi dan  
Pemberdayaan Masyarakat Pasca  
Tambang

**6.12.2. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah** oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 241.955.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 224.494820,- atau 92.78%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunya Kajian Value Chain Komoditas Lada Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 6.32  
Foto Kegiatan FGD/Rapat

Gambar 6.33  
Buku Laporan Kajian

## PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### Permasalahan

1. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan.
3. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang mampu melakukan deteksi dini, responsif serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.
4. Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan kinerja.
5. Belum optimalnya kualitas SDM Bappeda.
6. Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
7. Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif.
8. Belum optimalnya kualitas pelayanan Bappeda sebagai salah satu organisasi publik.
9. Kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan. Hal ini disebabkan dominasi pejabat struktural lebih besar daripada pejabat fungsional tertentu (Perencana, Peneliti, Statistisi) dalam proses perencanaan

### Solusi

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan. Antara lain melalui penguatan Forum Data Provinsi dan pengembangan aplikasi Babel Satu Data.
2. Mengembangkan aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan aplikasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan dengan melakukan pembinaan terhadap rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, rencana strategis SKPD, rapat koordinasi dan konsultasi, komparasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sosialisasi dokumen perencanaan
4. Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan.
5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, short course dan pendidikan penjenjangan
6. Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
7. Peningkatan kualitas forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Focus Group Discussion dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan
8. Meningkatkan penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui penataan sistem perencanaan dan peningkatan kinerja institusi dan SDM serta menerapkan prinsip-prinsip good governance dan diarahkan kepada penerapan ISO
9. Memberi peran dan akses yang lebih kepada para pejabat fungsional tertentu untuk terlibat dalam berbagai kesempatan yang akan memperkaya wawasan dan pengalaman yang diperlukan dalam perencanaan.



## 7. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### 7.1. Program Pengembangan Perumahan

- 7.1.1. Kegiatan Survei Identifikasi dan Pendataan Bidang Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.353.000.000,- yang dianggarkan pada saat Anggaran Perubahan (APBD-P) Tahun 2017. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 283.219.369,- atau 80,23%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Survey Pendataan Bidang Perumahan di 7 Kab/Kota dan tersedianya Data Bidang Perumahan.



- 7.1.2. Kegiatan Pembuatan Software Aplikasi Database Bidang Permukiman** dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- yang dianggarkan pada Anggaran Perubahan (APBD-P) Tahun 2017. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 48.500.000,- atau 97,00%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya pembuatan software Pengelolaan Database Bidang Permukiman, meliputi Data Perumahan 7 Kab/Kota. Tersedianya Software Pengelolaan Database Bidang Perumahan.



## 7.2. Program Perencanaan Tata Ruang.

**7.2.1 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan** dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.295.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 473.933.000,-. Terjadinya perubahan anggaran adalah pengembalian sisa lelang. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 388.893.000,- atau 82,06%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Penyusunan Program RTBL di Kabupaten Bangka Barat.



## 7.3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

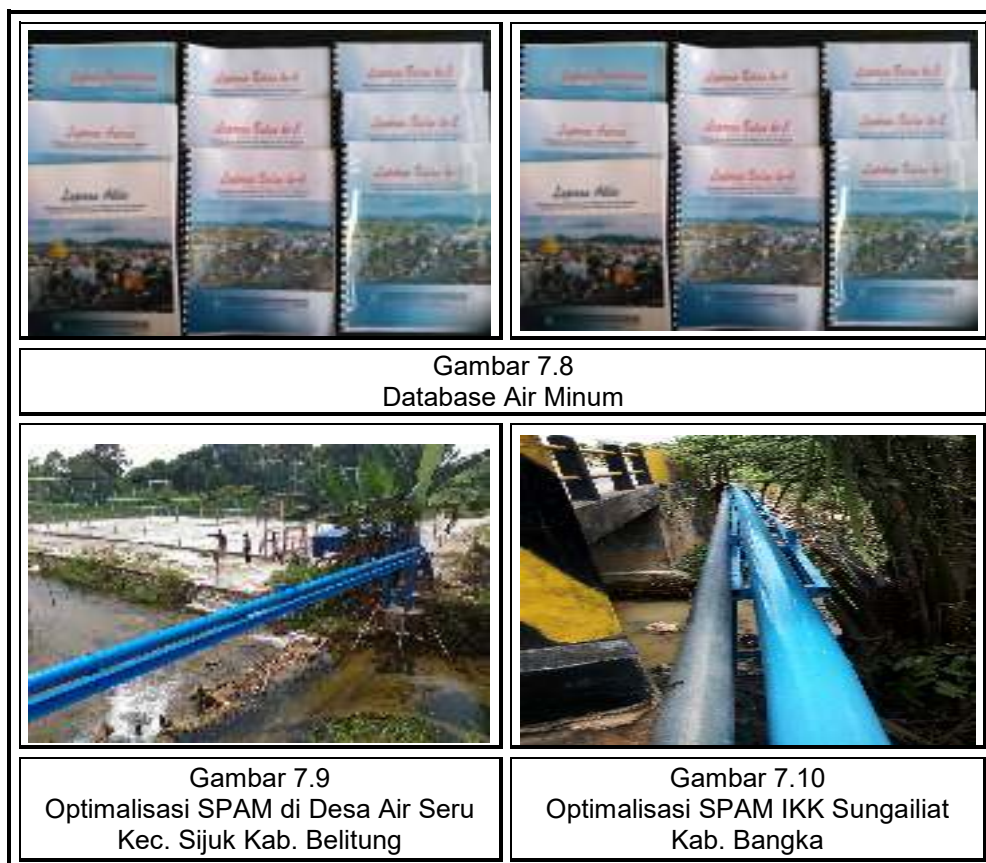
**7.3.1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong** dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.106.720.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.758.348.000,-. Terjadinya perubahan anggaran dikarenakan terdapat kelebihan sisa lelang. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.755.191.000,- atau 99,82%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yaitu meningkatnya pembangunan drainase yang memadai yang tersedianya saluran drainase dan gorong-gorong yang meliputi :

- Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Desa Balunujuk Kab. Bangka.
- Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Desa Air Anyir Kab. Bangka.
- Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Skala Kawasan Kec. Belinyu Kab. Bangka.
- Pembangunan/Peningkatan Saluran KSP Tanjung Berikat Kab. Bangka Tengah



#### 7.4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- 7.4.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum** oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan **Bangka** Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.979.890.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 2.436.729.000,-. Hal ini dilakukan perubahan anggaran dikarenakan terdapat kelebihan sisa lelang. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 2.430.073.949,50,- atau 99,73%. Sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengembangan Distribusi Air Minum Peningkatan Jaringan Air Bersih bagi Masyarakat karena terlayannya Prasarana Air Bersih untuk Kebutuhan Rumah Tangga meliputi :
- Optimalisasi SPAM di Desa Air Seru Kec. Sijuk Kab. Belitung
  - Optimalisasi SPAM IKK Sungailiat Kab. Bangka



## 7.5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- 7.5.1. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan** oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.814.410.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.896.469.000. Hal ini dilakukan karena terdapat kelebihan sisa lelang. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.879.503.500,- atau 99,11%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah terbangunnya jaringan jalan untuk meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kawasan yang tersedianya Jalan yang memadai.





Gambar 7.11  
Peningkatan/Pembangunan Jalan  
Lingkungan  
Dermaga Polair Kawasan Air Anyer

- 7.5.2.** Kegiatan Penyusunan Baseline Permukiman Kumuh dilaksanakan oleh **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran Rp. 66.820.000,- yang dianggarkan pada anggaran perubahan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.227.000,- atau 82,65%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Identifikasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi.



Gambar 7.12  
Baseline Permukiman Kumuh



## 8. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

### 8.1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

**8.1.1. Kegiatan Peran Serta Kepemudaan dilaksanakan** oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 413.560.100,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 388.925.412,- atau 94,04% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Pertukaran Pemuda Lintas Negara. Dengan hasil 4 (empat) orang peserta terpilih Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yaitu : 1 (satu) orang ke Canada an. M. Ammar Hidayatullah, 1 (satu) orang ke Jepang an. Lailatul Qodri, 1 (satu) orang ke India an. Dilla Augustine Kolina dan 1 (satu) orang ke Korea Selatan an. Annisa Rohmah dan dengan hasil 3 (tiga) orang peserta terpilih yaitu Idham Cholid Mesa, Andi Saputra dan Wanda Lestari dan 10 (sepuluh) peserta terpilih Pertukaran Pemuda Lintas Negara yaitu Merve Gulsum (Turki), D Patabendige Archanath Priyadharsana (Sri Lanka), Mohammad Pourvaez Esfahani (Iran), Mohamed Redha Berrim (Aljazair), Meriam Magdy Abdallah Sarkis (Mesir), Yinqi Jiang (Amerika), Xu Jiaxin (China), Arevik Abrahamyan (Armenia), Heewon Kwak (Korea Selatan) dan Yousra Ghanam (Maroko).



**8.1.2. Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.905.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 37.597.156,- atau 62,76% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksanakannya Seleksi Pemuda Pelopor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Tingkat Nasional dengan jumlah peserta 2 (dua) orang wirausaha muda yaitu Andi Saputra (utusan Kabupaten Bangka Barat) dan Saepurohman (utusan Kota Pangkalpinang) dan belum ada yang lolos di Tingkat Nasional.



**8.1.3. Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD)** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.522.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 386.906.650,- atau 87,03% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan terlaksanakannya Seleksi Jambore Pemuda Daerah (JPD) dengan jumlah peserta 64 (Enam Puluh Empat) orang dan terpilihnya mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 15 (limabelas) orang untuk pelaksanaan Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia di Provinsi Sumatera Barat.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Kurangnya sosialisasi ke Kabupaten/Kota dan kurangnya peminat peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.
2. Kualitas peserta yang dikirim ketingkat nasional belum memiliki keahlian/bakat

**Solusi:**

1. Sebelum pelaksanaan perlu adanya sosialisasi ke Kabupaten/Kota.
2. Dalam pelaksanaan pemilihan peserta harus melihat kemampuan dan keahliannya

## 8.2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

**8.2.1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.790.050,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 124.708.320,- atau 64,35% dan realisasi fisik 100%. Keluaran database jumlah, Jenis dan Profil Wirausaha Muda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Konsep Pembentukan LPKP dan Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi dengan jumlah 3 (tiga) orang peserta.



**8.2.2. Kegiatan Peningkatan Ekonomi Pemuda** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 347.575.050,- realisasi anggaran sebesar Rp. 270.061.000,- atau 77,70% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Pemuda yang memiliki motivasi dalam bidang wirausaha sebagai langkah awal terjun ke dunia usaha, peserta berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang dari perwakilan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Kurangnya sosialisasi ke Kabupaten/Kota dan kurangnya peminat peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.

2. Kualitas peserta yang dikirim ketingkat nasional belum memiliki keahlian/bakat yang di unggulkan
3. Masih minimnya pemuda yang berwirausaha

**Solusi:**

1. Sebelum pelaksanaan perlu adanya sosialisasi ke Kabupaten/Kota.
2. Dalam pelaksanaan pemilihan peserta harus lebih melihat kemampuan dan keahliannya
3. Pemerintah harus lebih membuat kebijakan yang bisa membantu pemuda untuk berwirausaha.

### 8.3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

**8.3.1. Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat melalui LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.525.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 311.246.800,- atau 92,76% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terjaringnya pemain sepakbola pelajar berprestasi tingkat SMP dan tingkat SMA Sederajat. Dengan hasil tingkat U-14 Juara I Kabupaten Bangka, Juara II Kabupaten Bangka Tengah dan Juara III Kabupaten Bangka Barat sedangkan Tingkat SMP Sederajat Juara I Kabupaten Belitung Timur, Juara II Kabupaten Belitung dan Juara III Kabupaten Bangka Selatan.



**8.3.2. Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi dan Tingkat Tradisional Tingkat Provinsi** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.099.250,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 124.778.400,- atau 89,70%. realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya lomba olahraga rekreasi dan tradisional terdiri dari Lomba Bakiak, Sumpitan, Egrang, Hadang yang diikuti 6 peserta dari kab/kota. Dengan hasil sebagai berikut :

- a) Olahraga Bakiak
  - Juara I : Belitung Timur
  - Juara II : Pangkalpinang
  - Juara III : Belitung
- b) Olahraga Sumpitan
  - Juara I : Belitung

- Juara II : Bangka Barat
- Juara III : Bangka Selatan
- c) Olahraga Egrang
  - Juara I : Belitung Timur
  - Juara II : Pangkalpinang
  - Juara III : Bangka Barat
- d) Olahraga Hadang
  - Juara I : Bangka Selatan
  - Juara II : Pangkalpinang
  - Juara III : Belitung Timur
  - Juara III : Bangka



**8.3.3. Kegiatan Kejurda Pelajar VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 717.078.616,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 717.075.222,- atau 99,99% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terseleksi Atlet Pelajar Berprestasi pada KEJURDA VIII. Ada 6 (enam) Cabang Olahraga yang dipertandingan : Cabang Olahraga Atletik, Renang, Senam, Voly Pasir, Karate dan Taekwondo.

Peringkat Perolehan Medali :

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Kabupaten Belitung       | : 24 Emas, 22 Perak, 23 Perunggu |
| - Kabupaten Belitung Timur | : 23 Emas, 15 Perak, 16 Perunggu |
| - Kota Pangkalpinang       | : 19 Emas, 25 Perak, 17 Perunggu |
| - Kabupaten Bangka Tengah  | : 12 Emas, 20 Perak, 24 Perunggu |
| - Kabupaten Bangka         | : 8 Emas, 5 Perak, 23 Perunggu   |
| - Kabupaten Bangka Barat   | : 5 Emas, 6 Perak, 9 Perunggu    |
| - Kabupaten Bangka Selatan | : 3 Emas, 1 Perak, 21 Perunggu   |





**8.3.4. Kegiatan Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV di Semarang** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.110.595.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.015.731.260,- atau 91,46% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Terpilihnya atlet yang berprestasi.



**8.3.5. Kegiatan TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.110.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 89.807.100,- atau 65,03% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Terselenggaranya TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional ke Provinsi Bengkulu, yang diikuti sebanyak 13 (tiga belas) Provinsi dengan rincian Cabang Olahraga Hadang mendapatkan peringkat ke 3, dan Cabang Olahraga Sumpitan kalah pada babak 16 besar.



- 8.3.6 Kegiatan TC Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 dan U-16 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.470.228,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 364.890.900,- atau 73,94% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah atlet yang berprestasi di Tingkat Nasional. Peserta Liga Pelajar U-14 dan U-16 Piala MENPORA 2017 adalah Sekolah Sepakbola, perkumpulan Sepakbola, Tim Binaan Asosiasi atau Club-Club yang dibentuk oleh sekolah formal/non-formal dan berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia. Prestasi Liga Pelajar U-14 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai pada Babak Penyisihan dan U-16 sampai pada Babak Penyisihan.



- 8.3.6. Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 990.905.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 895.507.617,- atau 90,37% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan cabang olahraga pada Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) & Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) sehingga terpilihnya atlet berprestasi dengan hasil : (1) Atletik memperoleh 6 medali (2 emas, 1 perak dan 2 perunggu), (2) Judo memperoleh 1 medali perunggu, (3) Tae Kwon Do memperoleh 1 medali emas, (4) Voli Pasir memperoleh 2

medali ( 1 medali perak dan 1 medali perunggu), (5) Pencak Silat memperoleh 1 medali perak, (6) Senam memperoleh 2 medali perunggu.



**8.3.7. Kegiatan Pengiriman Kontingen PEPARPENAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.370.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 110.091.100,- atau 68,22% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Atlet penyandang Disabilitas Berpretasi. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) dilaksanakan di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah di ikuti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Provinsi se-Indonesia yang mempertandingkan 6 (enam) cabang olahraga, diantara : Cabang Olahraga Atletik, Boccia, Bulutangkis, Catur, Renang dan Tenis Meja. Dan kontingen Bangka Belitung hanya mengikuti 4 cabang olahraga (atletik, renang, boccia dan catur), jumlah atlet sebanyak 10 atlet dengan hasil juara 1 (eksebisi) cabang olahraga catur atas nama Ardiana Suciati.



**8.3.8. Kegiatan Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 351.311.484,-.Realisasi anggaran sebesar Rp. 238.670.309,- atau 67,94% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Terpilihnya Atlet yang berprestasi.



- 8.3.9. Kegiatan Launching PORPROV Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 408.884.930,- atau 81,78% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Pengenalal Logo dan Maskot PORPROV Tahun 2018 dan 23 Cabang Olahraga.



- 8.3.10. Kegiatan Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Tinju Tahun 2017** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 158.324.500,- atau 79,16% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Cabang olahraga yang dilombakan/dipertandingkan dengan target 1 (satu) cabang terealisasi 1 (satu) cabang dengan dan terjaringnya Atlet Tinju berprestasi. Dibagi 2 kategori yaitu putra dan putri, dimana jumlah kelas putra sebanyak 10 kelas dengan jumlah peserta sebanyak 138 atlet dan kelas putri sebanyak 6 dengan jumlah peserta sebanyak 47 atlet dengan total keseluruhan sebanyak 185 atlet.





Gambar 8.31  
Pertandingan Tinju

Gambar 8.32  
Penyerahan Trophy

**8.3.11. Kegiatan Pemberian dan Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi Tahun 2017** dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 279.497.500,- atau 93,17% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pertandingan olahraga melalui kejuaraan Tenis Lapangan dan Menembak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terjaringnya Atlet berprestasi yang diikuti Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana Tenis Lapangan ada 4 kategori (Ganda perorangan putra, ganda perorangan putri, ganda perorangan putra kelompok umur 40 tahun dan ganda perorangan putra kelompok umur 40 tahun) dan cabang olahraga menembak dengan 6 nomor (Air rifle hunting 10 M pelajar, Air rifle hunting 10 M umum, Air rifle mtch 10 M umum, Metallic silhoutte 18-24 M Multi ring, 33 M 3 posisi Metallic silhoutte dan Centre Fire 25 M Pistol Api).



Gambar 8.33  
Spanduk Pelaksanaan

Gambar 8.34  
Penyerahan Medali Menembak

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Kurangnya waktu untuk melaksanakan *Training Camp (TC)* untuk cabang olahraga beregu
2. Tidak lengkap perlengkapan/peralatan latihan
3. Didalam hal teknis masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni
4. Sarana dan prasarananya masih belum memadai



**Solusi:**

1. Penambahan waktu *Training Camp (TC)*
2. Menambah kelengkapan peralatan latihan
3. Memperbanyak mengikuti pelatihan tenaga pelatih/instruktur-instruktur.
4. Menambah jumlah sarana dan prasarana
5. Memaksimalkan sentra-sentra pembinaan.

**8.4. Pembinaan Generasi Muda**

- 8.4.1. Kegiatan Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.245.546.039,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.235.637.975,- atau 99,20% dan realisasi fisik 100%. Peserta Paskibraka berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, berasal dari 6 Kabupaten dan 1 (satu) kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah terpilihnya Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih pada Peringatan Deti-Detik Kemerdekaan Indonesia yang ke-72 di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dengan pelatih dari Komando Resimen dan Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung.



- 8.4.2. Kegiatan Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017** yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 326.739.210,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 326.395.085,- atau 99,89% dan realisasi fisik 100%. Peserta Seleksi Paskibraka berjumlah 56 (lima puluh enam) orang terdiri dari siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) berusia 16 – 18 tahun, kelas X dengan kuota masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 8 (delapan) orang perwakilan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah Terpilihnya Paskibraka Tingkat Nasional sebanyak 2 (dua) orang dan Tingkat Provinsi Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Siswa/siswi yang di kirim ketingkat nasional masih belum mampu menembus posisi sebagai pengibar bendera di Istana Negara.

**Solusi:**

1. Siswa/siswi yang dikirim harus memiliki banyak keunggulan supaya bisa menembus posisi sebagai pengibar bendera
2. Perlunya persiapan yang lebih matang baik di tingkat kabupaten/kota bahkan provinsi.

## 9. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

### A. Alokasi dan Realisasi APBD 2017

Urusan wajib penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2017, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TeRp adu Satu Pintu Rp 11.881.464.959,- dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.638.130.959,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp . 6.243.334.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2017, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TeRp adu Satu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp 8.505.730.909,- (mengalami pengurangan sebesar Rp 3.375.374.050,-) dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp . 5.519.940.959,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp . 2.985.789.950,- Total realisasi penyerapan anggaran Tahun 2017 sebesar Rp . 8.308.997.743,- atau 97,69 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp . 196.733.166,- atau 2,31 % yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Rp . 5.468.459.363,- (99,07 %) dan Belanja Langsung Rp . 2.840.538.380,- atau (95,14 %).

### B. Realisasi Program dan Kegiatan APBD 2017

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, dengan realisasi sebagai berikut :

#### 9.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD sebesar Rp 1.365.768.000,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 anggaran menjadi Rp 1.352.068.000,- (mengalami penurunan sebesar Rp 13.700.000,-), dengan 13 (tiga belas) sub kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 1.277.072.765,- atau 94,5 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 74.995.235,- atau 5,5 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini terdiri dari :

- 9.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Output : Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman sebanyak 1 Paket.
- 9.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Output : Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi selama 12 bulan.
- 9.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  
Output : Terbayarnya honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan.
- 9.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  
Output : Terlaksananya operasional kebersihan kantor selama 12 bulan.
- 9.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja  
Output : TeRp eliharanya peralatan kerja selama 12 bulan.
- 9.1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Output : Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 1 paket.
- 9.1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket.
- 9.1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor  
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket.
- 9.1.9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Output : Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi sebanyak 1 paket.

**9.1.10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman**

Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat sebanyak 1 paket.

**9.1.11. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah**

Output : Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 1 paket.

**9.1.12. Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah**

Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 1 paket.

**9.1.13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Output: Lancarnya Kinerja aparatur pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran.

**9.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**9.2.1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**

Output : TeRp eliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit mobil dan 13 unit motor.

**9.2.2. Peningkatan Gedung Kantor**

Output : Terlaksananya DED pembangunan gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan TeRp adu Satu Pintu.

**9.2.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor**

Output : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.

**9.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

**9.3.1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah**

Output : Tersedianya dokumen Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018, Renja Perubahan PD tahun 2017.

**9.3.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah**

Output : Tersedianya data capaian kinerja dan keuangan daerah.

**9.4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi**

**9.4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TeRp adu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 356.280.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 353.255.460,- atau 99,15% dengan sisa anggaran sebesar Rp . 3.024.530,- atau 0,85 %. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pameran di dalam negeri 5 (lima) Penyelenggaraan Pameran Investasi, diantaranya yaitu:**

- a. Kegiatan Regional Investmen Forum (RIF) yang dilaksanakan di Bali selama 4 (empat) hari pada tanggal 22-25 Pebruari 2017;



Gambar 9.1  
Acara Pembukaan RIF di Bali

- b. Pameran 4<sup>th</sup> Balikpapan Tourism, Trade dan Invesment Expo 2017 yang dilaksanakan di Balikpapan selama 4 (empat) hari dari tanggal 19-22 April 2017.



Gambar 9. 2  
Stand Prov. Kep. Babel

- c. Pameran Invesda Expo 2017 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 17-20 Mei April 2017 di Hall A dan B Jogja Expo Center Jalan Raya Ranti-Yogyakarta.



Gambar 9.3  
Stand Prov. Kep. Babel



- d. Kegiatan Pameran Produk Unggulan dan Investasi Nusantara (Batam PPUN 2017) yang dilaksanakan Selama 4 hari dari tanggal 28-31 Juli 2017 bertempat di Nagoya Hill-Batam.



- e. Kegiatan RIF (Regional Investment Forum) 2017 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 15-18 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grand Inna Padang-Sumatera Barat.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

Perlu adanya materi pameran yang selalu menampilkan data yang up to date untuk media informasi dalam bentuk materi tayang yang menggunakan layar TV melalui flashdisk serta CD, dan materi bahan promosi display seperti: booklet dan leaflet maupun buku profile yang menampilkan informasi umum maupun peluang investasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Solusi**

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi ini merupakan kegiatan yang efektif untuk melakukan promosi karena dalam kegiatan tersebut peserta dari masing-masing instansi daerah dapat bertemu langsung dengan para calon investor dalam dan luar negeri sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dengan

tujuan tersampainya informasi promosi daerah dalam bentuk bahan promosi yang ditampilkan kepada seluruh pengunjung.

**9.4.2. Kegiatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun Anggaran 2017** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialokasikan dana sebesar Rp 70.598.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 68.481.900,- atau 97,00 %. Sisa anggaran sebesar Rp 2.116.100,- atau 3,00 %. Keluaran kegiatan adalah tersedianya buku Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebanyak 100 buku.



## 9.5 Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah

**9.5.1. Kegiatan Pemukhtahiran Data Investasi Daerah** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TeRp adu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 326.496.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp 296.716.848,- atau 90,88%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp 29.779.152,- atau 9,12 %. Keluaran kegiatan adalah tersedianya data potensi investasi dan kelayakan investasi yang akurat.



## 9.6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan TeRp adu Satu Pintu.

**9.6.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TeRp adu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 564.966.950,- realisasi anggaran sebesar Rp 564.034.920,- atau 99,84% sisa anggaran sebesar 932.030 atau 0,16 % Keluaran kegiatan adalah lancarnya pelayanan perizinan bagi masyarakat:





- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

Belum tersedianya kendaraan operasional PTSP, khususnya untuk pelaksanaan survey. PTSP merupakan koordinator dari Tim Teknis, diantaranya adalah pelaksanaan survey lapangan atas permohonan izin yang masuk. Selain itu sebagaimana kewenangan yang dilimpahkan ke DPMPTSP berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, maka sangat diperlukan kendaraan sebagai sarana pendukung untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

**Solusi**

Perlu dukungan anggaran untuk pengadaan kendaraan untuk operasional PTSP.

## 10. URUSAN WAJIB KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

### 10.1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

#### 1.1.1 Pembinaan Perizinan dan Akses Permodalan UMKM

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.644.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 215.451.800,- atau 81,72%. Keluaran kegiatan ini adalah teridentifikasinya kebutuhan perizinan dalam mengakses permodalan UKM di 7 Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan target fasilitasi penerbitan 3500 IUMK.



Gambar 10.1  
Pembinaan Perizinan dan Akses  
Permodalan di Kabupaten Bangka  
Barat



Gambar 10.2  
Pembinaan Perizinan dan Akses  
Permodalan di Kabupaten Bangka  
Tengah

### 10.2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

#### 10.2.1. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.950.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.669.900,- atau 99,77%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 4 (empat) orang penyuluh koperasi lapangan dengan alokasi 1 orang PPKL untuk Kabupaten Bangka, 2 orang PPKL untuk Kota Pangkalpinang dan 1 orang PPKL untuk Kabupaten Bangka Selatan dengan target 100 Koperasi lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





Gambar 10.3  
Koperasi yang menjadi binaan PPKL di wilayah Kabupaten Bangka Selatan

Gambar 10.4  
Pembinaan dan penyuluhan perkoperasian oleh PPKL Provinsi Kep. Bangka Belitung

### 10.3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

#### 10.3.1. Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.473.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.124.600,- atau 95,77%. Kegiatan dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total peserta sebanyak 120 UMKM dan 35 aparatur dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM masing-masing Kabupaten/Kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbiayainya sosialisasi kepada KUMKM dan instansi yang membina KUMKM tentang akses permodalan baik yang disediakan oleh perbankan maupun lembaga non perbankan.

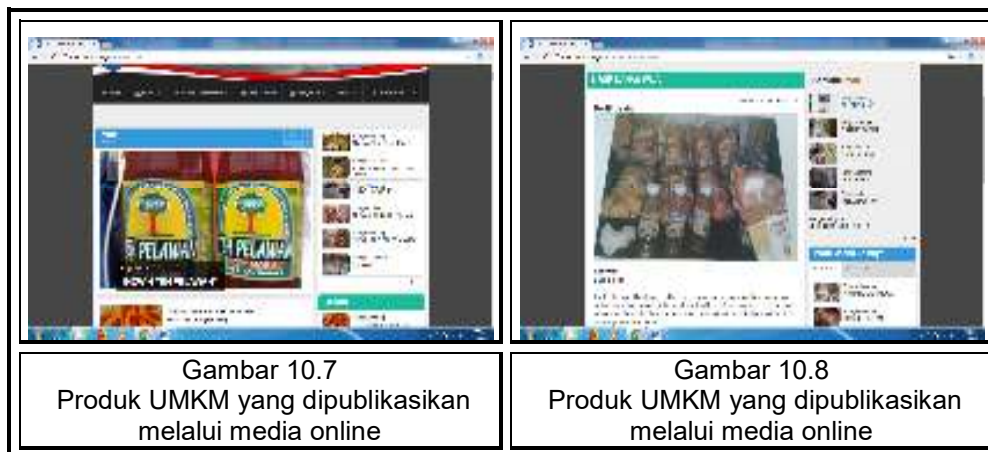


Gambar 10.5  
Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan di Kabupaten Belitung

Gambar 10.6  
Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan di Kabupaten Bangka

#### 10.3.2. Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.862.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.162.500,- atau 85,12%. Keluaran kegiatan ini adalah terpublikasinya produk UKM melalui media online sebanyak 30 produk.



Gambar 10.7  
Produk UMKM yang dipublikasikan  
melalui media online

Gambar 10.8  
Produk UMKM yang dipublikasikan  
melalui media online

### 10.3.3. Promosi Produk Unggulan Khas Daerah melalui Pameran Produk Kreatif dan Inovasi Unggulan Daerah (PPUD Expo)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 559.888.000,-. Kegiatan dilaksanakan selama lebih kurang 40 hari dengan peserta sebantak 20 UMKM sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 542.099.800,- atau 96,82%. UMKM-UMKM yang dipilih mengikuti event ini adalah UMKM yang diseleksi dari 7 Kabupaten/Kota. Keluaran kegiatan adalah dikenal dan terjualnya kerajinan khas daerah seperti makanan khas, cual, mote dan rajutan milik 20 UMKM pada Pekan Raya Jakarta.



Gambar 10.9  
Stand Dinas Koperasi dan UKM  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
pada Event PRJ

Gambar 10.10  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
mengunjungi Stand Dinas Koperasi  
dan UKM Prov.Kep. Bangka Belitung

### 10.3.4. Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 857.300.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 823.518.231,- atau 96,06%. Kegiatan dilaksanakan di 7 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan target sebanyak 150 Pelaku Usaha Kecil dan menerbitkan 150 lembar Sertifikat Halal bagi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya penerbitan pengakuan jaminan mutu/kualitas produk UMKM dengan sertifikat halal sebanyak 150 sertifikat.



Gambar 10.11  
Penyerahan Sertifikat Halal di  
Kabupaten Bangka Barat

Gambar 10.12  
Salah satu UMKM peserta pada  
Kegiatan Sertifikat Halal

### 10.3.5 Kegiatan Explore Bangka Belitung

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.130.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 299.821.500,- atau 97,94%. Kegiatan dilaksanakan di Yogyakarta dengan mengikutsertakan sebanyak 10 UMKM se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan keluaran kegiatan adalah terlaksananya promosi kuliner, makanan khas dan produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 10.13  
Gubernur Kep. Bangka Belitung  
mengunjungi stand pada Kegiatan  
BABEL Explore di Yogyakarta

Gambar 10.14  
UMKM peserta pada Kegiatan BABEL  
Explore di Yogyakarta

### 10.3.6 Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran Produk UMKM

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.050.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.775.000,- atau 90,38%. Kegiatan dilaksanakan di Kota Pangkalpinang dengan target sebanyak 100 UMKM. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform dan tersedianya Informasi Pemasaran Produk Usaha Kecil melalui media Aplikasi Mobile Platform (konten lalaper) pada aplikasi “bantuku” pada play store.



Gambar 10.15  
Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Mobile  
Platform Pemasaran Produk UMKM

Gambar 10.16  
Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Mobile  
Platform Pemasaran Produk UMKM

#### 10.4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

##### 10.4.1 Kegiatan Diklat PeRp. ajakan Koperasi (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 314.012.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.007.000,- atau 85,35%. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan peserta sebanyak 90 orang pengurus koperasi dari Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat. Pelatihan Perpajakan Koperasi angkatan I dan angkatan II (peserta berasal dari Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan) dilaksanakan di Gedung BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan untuk angkatan III (peserta berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat) dilaksanakan di Gedung UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 90 orang pengurus koperasi yang memahami tentang Perpajakan Koperasi yang dilaksanakan selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 (enam) bulan pasca pelatihan oleh tenaga pendamping.



Gambar 10.17  
Pembukaan Pelatihan Perpajakan  
Angkatan I

Gambar 10.18  
Narasumber pada Pelatihan  
Perpajakan Angkatan III

#### 10.4.2 Kegiatan Pelatihan Business Plan (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 269.968.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 261.622.450,- atau 96,91%. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta sebanyak 80 UMKM yang berasal dari Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat). Pelatihan ini dilaksanakan di Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 80 UMKM di bidang Business Plan.



Gambar 10.19  
Narasumber sedang Membimbing  
Peserta Menyusun Business Plan

Gambar 10.20  
Pembukaan sekaligus Pengarahan  
Kepala Dinas Koperasi

#### 10.4.3 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.614.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.614.000,- atau 97,57%. Pelatihan dilaksanakan 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pelaku usaha yang berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat bertempat di Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlatihnya 30 pelaku usaha dalam mendesain kemasan (packaging) produk yang mereka hasilkan.





Gambar 10.21  
Dialog Interaktif antara Narasumber  
dengan Peserta

Gambar 10.22  
Suasana Pelatihan Desain Produk  
(Packaging)

#### 10.4.4 Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 504.256.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 490.928.750,- atau 97,36%. Pelatihan Manajemen Keuangan dilaksanakan sebanyak 4 angkatan (120 UMKM) dengan peserta berasal dari Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pelatihan ini dilaksanakan Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluarannya adalah terlatihnya 120 UMKM di bidang Manajemen Keuangan.



Gambar 10.23  
Suasana Kelas Pelatihan Manajemen  
Keuangan

Gambar 10.24  
Interaksi antar peserta pada  
Pelatihan Manajemen Keuangan

#### 10.4.5 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.828.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 237.982.000,- atau 97,20%. Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran dilaksanakan sebanyak 2 angkatan (60 UMKM) dengan peserta berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan). Pelatihan ini dilaksanakan Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan

UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping . Keluarannya adalah terlatihnya 60 UMKM di Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran.



#### 10.4.6 Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK)

Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.742.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.311.600,- atau 98,02%. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan (30 Pengawas/Pengurus) koperasi yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka). Pelatihan ini dilaksanakan Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping . Keluarannya adalah terlatihnya 30 orang pengawas/pengurus koperasi di Bidang pengawasan koperasi.



#### 10.4.7 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.341.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.311.300,- atau 92,42%. Kegiatan ini peruntukkan bagi aparatur UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 orang. Melalui kegiatan ini aparatur UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibimbing untuk mampu menyusun dan menerapkan SOP serta mampu membentuk Tim Auditor Internal yang kesemuanya ini bertujuan untuk memudahkan integrasi dengan sistem manajemen lainnya, menyediakan pendekatan yang integrative terhadap konsep manajemen organisasi, menyediakan fondasi yang konsisten untuk masa yang akan datang, mencerminkan kompleksitas dari lingkungan dimana organisasi beroperasi saat ini, memastikan standar internasional ini memenuhi kebutuhan seluruh bidang organisasi yang hendak mengadopsinya serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam upaya memuaskan pelanggan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlatihnya 21 orang aparatur UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam persiapan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.



#### 10.4.8 Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pasca Pelatihan (DAK)

Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pasca Pelatihan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.612.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.655.700,- atau 98,06%. Kegiatan ini merupakan evaluasi atas kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping terhadap peserta pelatihan yang telah dilatih sebelumnya dalam menerapkan materi pelatihan. Keluaran dari kegiatan ini adalah dievaluasinya kinerja 30 pendamping pasca pelatihan dan adanya feed back kendala yang dihadapi dalam menerapkan hasil pelatihan.



#### 10.4.9 Pelatihan Achievement Motivation Training (DAK)

Kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 267.968.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.207.900,- atau 99,34%. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 angkatan (40 UMKM) yang berasal dari Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka). Pelatihan ini dilaksanakan Gedung BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluarannya adalah membentuk karakter berwirausaha terhadap 40 pelaku usaha dari wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.



### 10.5. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah.

#### 10.5.1 Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi)

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.160.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.920.400,- atau

93,82%. Kegiatan dilaksanakan selama masing-masing 1 hari di 7 Kabupaten/Kota dengan sasaran sebanyak 140 Koperasi.



Gambar 10.35  
Pelaksanaan Kegiatan RAT di Kab.  
Bangka Barat



Gambar 10.36  
Pelaksanaan Kegiatan RAT di Kab.  
Bangka Tengah

#### 10.5.2 Kegiatan Pembuatan Akta Notaris untuk Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.475.000,- atau 56,98%. Kegiatan dilaksanakan di 7 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan target sebanyak 35 Koperasi dan menerbitkan 35 lembar Akta Notaris untuk Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan keluaran kegiatan adalah terbentuknya Koperasi yang berbadan hukum.



Gambar 10.37  
Konsolidasi aparatur Dinas Koperasi  
dan UKM dengan Notaris



Gambar 10.38  
Salah satu Akta Notaris untuk  
Koperasi

#### ➤ Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

1. Pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 tidak optimal dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Hal tersebut menyebabkan output kegiatan juga harus disesuaikan kembali dengan ketersediaan anggaran.
2. Selain penyesuaian output kegiatan, beberapa kegiatan ada yang dihapus terkait rasionalisasi anggaran.

##### Solusi

1. Agar pada saat pengusulan anggaran dan kegiatan tahun berikutnya disesuaikan dengan ketersediaan dana dengan



memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat.

2. Dengan kondisi anggaran pemerintah yang terbatas, jika memungkinkan untuk dapat mengajukan kerjasama pendanaan dengan BUMN terkait pengembangan KUKM.

## 11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

### 11.1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 11.1.1. Kegiatan Pendayagunaan Data Kependudukan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.980.000 realisasi anggaran sebesar Rp 61.040.321 atau 84,80% dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah tersedianya database kependudukan untuk 7 (tujuh) Kab/Kota, 2 kali Rapat dan 1 kali sosialisasi yaitu Rapat Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan terkait penyandingan data kependudukan yang diikuti 25 orang peserta, Rapat Sinkronisasi Data terkait penyusunan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diikuti oleh 19 orang dan Sosialisasi pendayagunaan data kependudukan yang diikuti peserta 54 orang.



- 11.1.2. Kegiatan Rakor Administrasi Kependudukan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 72.235.000 realisasi anggaran sebesar Rp 60.971.030 atau 84,41% dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah 2 kali Rapat Koordinasi, Rakor Semester I di Selenggarakan di Kabupaten Belitung Timur dengan Jumlah peserta 28 orang dari Dinas Dukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rakor Semester II di selenggarakan di Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah peserta 28 orang dari Dinas Dukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 11.1.3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Administrasi Kependudukan (DAK)** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 378.850.000 realisasi anggaran sebesar Rp 291.773.339 atau 77,02% dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah 4 (empat) kali Bimbingan Teknis, yaitu Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil, Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dengan jumlah peserta tiap bimbingan teknis berjumlah 25 orang yang berasal dari 21 orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 4 orang peserta berasal dari Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 11.1.4. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 178.140.000 realisasi anggaran sebesar Rp 137.855.800 atau 77,39% dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah 7 (tujuh) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan penilaian dengan peringkat pertama Kabupaten Bangka, Peringkat kedua Kabupaten Belitung Timur dan ketiga Kabupaten Bangka Tengah.



Gambar 11.4

Sosialisasi Bidang Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 11.1.5. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 332.575.000 realisasi anggaran sebesar Rp 258.260.094 atau 77,65% dan realisasi fisik 90% keluaran kegiatan adalah 130 (seratus tiga puluh) buku dengan kendala fisik tidak tercapai 100% karena ada anggaran pembuatan aplikasi yang tidak dapat dianggarkan dalam DAK.



Gambar 11.5

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- 11.1.6. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota (DAK)** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 256.420.000 realisasi anggaran sebesar Rp 207.164.119 atau 80,79% dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah 2 (dua) kali Rapat Koordinasi yaitu Rapat Koordinasi Fasilitasi penerbitan KTP-elektronik di Kab/Kota tahun 2017 se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang dan Rapat Koordinasi Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilukada serentak tahun 2018 jumlah peserta sebanyak 27 orang dan Fasilitasi blanko KTP-elektronik berupa pengambilan blanko KTP-elektronik dan pendistribusian blanko KTP-elektronik.



**11.1.7. Kegiatan Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 314.915.000 realisasi anggaran sebesar Rp 257.633.080 atau 81,81% dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah 2 (dua) kali rapat koordinasi yaitu Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti 20 orang peserta dan Rapat Teknis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan peserta 75 orang dan Sosialisasi melalui media berupa 7 baliho, 75 Standing Banner dan 13.300 Brosur.



**11.1.8. Kegiatan Pengembangan Bank Data Kependudukan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.015.400 realisasi anggaran sebesar Rp 9.015.400 atau 100% dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah 1 (satu) database kendala anggaran dirasionalisasi yang mulanya sebesar Rp 141.100.000,-



- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

**PERMASALAHAN**

1. Adanya pergantian pimpinan
2. Kurang tepatnya perencanaan penganggaran terutama dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Administrasi Kependudukan Tahun 2017

**SOLUSI**

Perencanaan penganggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan

## 12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

### 12.1. Program pengembangan hubungan industrial dan jamsostek

- 12.1.1. Kegiatan Rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 342.775.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 335.786.001,- atau 97,96%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan dengan 7 Kabupaten/Kota atau pun dengan perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota.



Gambar 12.1  
Rapat LKS Tripartit Provinsi dengan LKS Tripartit Pangkalpinang

- 12.1.2. Kegiatan Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan Rapat Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP), survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sosialisasi Upah Minimum** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 390.110.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 387.844.348,- atau 99,42%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat konsultasi Dewan Pengupahan dan pembahasan Upah Minimum Provinsi / Upah Minimum Sektorial Provinsi / Upah Minimum Kabupaten/Kota / Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMP/UMSP/UMK/UMSK).



Gambar 12.2  
Rapatrutin Dewan Pengupahandi Aula kantorDinas Tenaga Kerja

## 12.2. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

12.2.1. **Kegiatan Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prov. Kep. Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.550.00,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 114.550.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya gema bulan bhakti K3 dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam optimalisasi budaya K3 (penerapan norma K3 di setiap usaha).



12.2.2. **Kegiatan Pemeriksaan Cholinestrase pada Tenaga Kerja Penyemprotan Pestisida (UPTD Hyperkes)** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.450.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 55.823.000,- atau 66,10%. Keluaran kegiatan adalah Terdeteksinya Cholinestrasi pada darah tenaga kerja penyemprotan.



12.2.3. **Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (UPTD Hyperkes)** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.291.000,- Realisasi

anggaran sebesar Rp. 68.291.000,- atau 66,10%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.



**12.2.4 Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesetaan BPJS** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.180.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 127.279.000,- atau 74,79%. Keluaran kegiatan adalah Pelaksanaan Pemeriksaan Kepesetaan BPJS di Perusahaan.



**12.2.5. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja serta Sektor UMKM (UPT Hyperkes)** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.794.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 43.794.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terciptanya tenaga kerja yang sehat dan produktif dan terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan kondusif di UMKM/Perusahaan sebanyak 35 orang tenaga kerja.



### 12.3. Program Peningkatan Kompetensi dan produktifitas Tenaga Kerja

**12.3.1. Kegiatan Pembinaan Desa Produktif dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.315.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 216.728.000,- atau 90,19%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat berjumlah 140 orang.



**12.3.2. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Kab/Kota** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.962.162.900,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.808.954.950,- atau 92,19%. Keluaran kegiatan adalah Kegiatan yang mampu dan handal di Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah peserta sebanyak 304 orang.





Gambar 12.9  
Peserta Bimtek

**12.3.3. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini pagu awalnya sebesar Rp. 342.850.000,- tetapi dilakukan rasionalisasi sehingga pagu akhir sebesar Rp. 319.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 296.770.100,- atau 92,78% karena terjadi rasionalisasi kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gambar 12.10  
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif

- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

1. Kurangnya kualitas Instruktur, personil dan pengelola LPK serta kesiapan dan informasi Lembaga Pelatihan Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengetahui sistem manajemen, tata kelola dan sumber daya pelatihan dan Banyaknya Lembaga Pelatihan Kerja yang kurang memiliki informasi mengenai sistem manajemen institusi dan metode pelatihan yang baik yang harus diterapkan pada Lembaga Pelatihan Kerja mereka
2. Masih kurangnya kualitas pelayanan dan kompetensi instruktur dalam mengelola LPK yang disebabkan kurang memiliki informasi mengenai sistem manajemen institusi dan metode pelatihan yang baik yang harus diterapkan pada Lembaga Pelatihan Kerja mereka;

3. Kurangnya kader wirausahawan yang memiliki potensial, mandiri, produktif, dan beretos kerja tinggi khususnya bagi angkatan kerja yang tersebar di Kabupaten / Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung

### **Solusi**

1. Solusi yang dilakukan dengan melakukan pendataan kepada Lembaga Pelatihan Kerja terkait manajemen dan jumlah instruktur yang ada dan membekali peserta mengenai sistem pengelolaan LPK dengan baik, melakukan pendataan mengenai LPK yang telah terakreditasi atau belum;
2. Solusi yang dilakukan dengan memberikan informasi mengenai wirausaha dan potensi usaha yang baik dikembangkan di daerah tiap Kabupaten/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung dan melakukan pembinaan di Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan
3. Solusi yang dilakukan dengan melakukan pendataan kepada Lembaga Pelatihan Kerja terkait manajemen dan jumlah instruktur yang ada dan membekali peserta mengenai sistem pengelolaan LPK dengan baik serta upgrading instruktur pelatihan serta melakukan pendataan mengenai LPK yang telah terakreditasi atau belum.

## **12.4. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

- 12.4.1. **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna** Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.590.900,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 77.590.900,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah 80 orang peserta wirausaha produktif.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

Kurangnya pengetahuan pihak – pihak terkait mengenai proses dan tata cara penempatan tenaga kerja, khususnya penempatan tenaga kerja di dalam negeri serta Sering terjadinya proses-proses penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta memberdayakan calon tenaga kerja mengenai informasi yang terkait proses tersebut.

**Solusi**

Solusi yang dilakukan dengan memberikan informasi – informasi terkait tatacara penempatan tenaga kerja dan pemagangan sesuai dengan prosedur yang ada.

## 13. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

### 13.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 13.1.1. **Kegiatan Jasa Surat Menyurat** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.999.000,00 atau 99,99%. Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya surat menyurat dinas.
- 13.1.2. **Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 66.001.318,00 atau 88,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 13.1.3. **Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 114.360.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 105.640.000,00 atau 92,37%. Keluaran kegiatan ini adalah lancarnya administrasi keuangan dinas.
- 13.1.4. **Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 19.669.000,00 atau 56,20%. Keluaran kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan kantor.
- 13.1.5. **Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 29.220.000,00 atau 73,05%. Keluaran kegiatan ini adalah terjaganya peralatan dan perlengkapan kerja.
- 13.1.6. **Kegiatan Alat Tulis Kantor** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.600.000,00 terdapat rasionalisasi menjadi Rp 56.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 55.990.500,00 atau 99,98%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.
- 13.1.7. **Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.999.850,00 dan terjadi rasionalisasi menjadi Rp 90.118.250,00 realisasi anggaran sebesar Rp 68.450.500,00 atau 75,96%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- 13.1.8. **Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.000.000,00 terjadi rasionalisasi menjadi Rp 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 6.293.000,00 atau 62,93%. Keluaran kegiatan ini adalah berfungsinya lampu penerangan bangunan kantor dan lingkungan/halaman perkantoran.
- 13.1.9. **Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 19.749.000,00 atau 98,75%. Keluaran Kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 13.1.10. **Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 24.747.000,00 atau

63,45%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman rapat.

- 13.1.11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 249.811.375,00 atau 99,92%. Keluaran kegiatan ini adalah lancarnya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 13.1.12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 257.490.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 257.400.000,00 atau 99,97%. Keluaran kegiatan ini adalah lancarnya pembayaran gaji.
- 13.1.13. Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 149.515.800,00 atau 99,68%. Keluaran kegiatan ini adalah lancarnya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah.

## **13.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 13.2.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 terjadi rasionalisasi menjadi Rp 27.571.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 26.100.000,00 atau 94,66%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
- 13.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 234.280.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 181.299.900,00 atau 77,39%. Keluaran kegiatan ini adalah terawatnya kendaraan dinas/operasional kantor.
- 13.2.3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 terjadi rasionalisasi menjadi Rp 0,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Keluaran kegiatan ini adalah tidak ada.
- 13.2.4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 212.430.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 194.910.000,00 atau 91,75%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap kinerja dinas.





Gambar 13.1  
Pengadaan Kendaraan Operasional.

### 13.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**13.3.1. Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Formal** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 91.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 63.132.701,00 atau 69,38%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkat dan terlatihnya aparatur dinas.

### 13.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**13.4.1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.665.000,00 terjadi rasionalisasi menjadi Rp 103.300.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 58.615.000,00 atau 56,74%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Renstra PD Tahun 2017 – 2022, Renja PD Tahun 2018 dan Perubahan Renja PD Tahun 2017.



Gambar 13.2  
Buku Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Buku Rencana Strategis Tahun 2017- 2022).

Gambar 13.3  
Buku Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, Buku Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan, Buku Dokumen Renja Perubahan Tahun 2017 dan Buku Renstra Dinas Pangan tahun 2017 - 2022

**13.4.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 45.600.000,00 terjadi rasionalisasi menjadi Rp 58.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 48.814.250,00 atau 84,16%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya data capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah.



### 13.5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

**13.5.1 Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 291.510.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 288.009.500,00 atau 98,80%. Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya masyarakat daerah rawan pangan.



**13.5.2 Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 206.272.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 204.418.400,00 atau 99,10%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya analisis data pola konsumsi pangan penduduk (PPH).



Gambar 13.8  
Buku Laporan Kegiatan Analisis dan  
Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai  
Pangan



Gambar 13.9  
Pertemuan Kegiatan Penyusunan Pola  
Konsumsi dan Suplai Pangan

**13.5.3 Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.385.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 50.066.000,00 atau 72,16%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya data dan analisis akses pangan masyarakat.



Gambar 13.10  
Buku Kegiatan Pemantauan dan  
Analisis Akses Pangan Masyarakat



Gambar 13.11  
Sosialisasi Akses Pangan Masyarakat

**13.5.4 Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.040.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 115.640.700,00 atau 98,80%. Keluaran kegiatan ini adalah diketahuinya data dan informasi harga pangan.



Gambar 13.12  
Buku Kegiatan Pemantauan dan Analisis  
Akses Harga Pangan Pokok



Gambar 13.13  
Pemantauan Harga Pangan di  
Hypermart

**13.5.5 Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 309.115.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 285.388.800,00 atau 92,32%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya cadangan pangan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**13.5.6 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 543.730.000,00 realisasi dan anggaran sebesar Rp 525.184.700,00 atau 96,60%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan penumbuhan desa mandiri pangan.

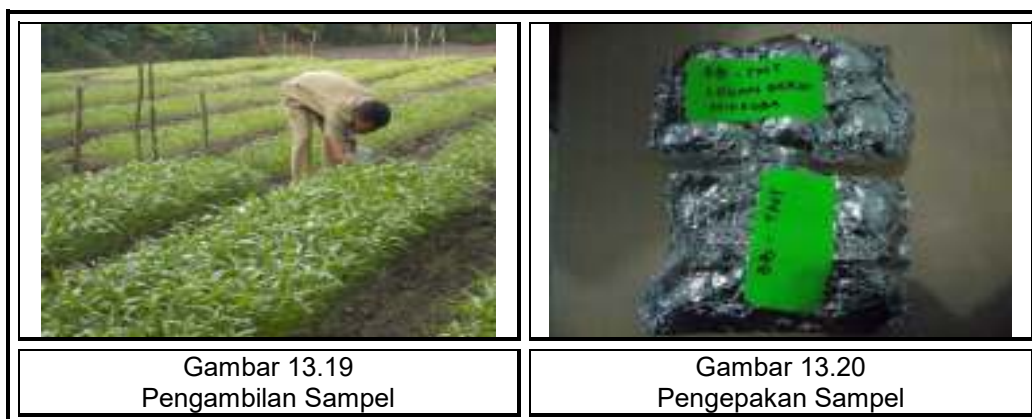


**13.5.7 Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.835.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 87.154.900,00 atau 99,23%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan pembinaan lumbung pangan.





**13.5.8 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 126.160.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 118.137.600,00 atau 93,64%. Keluaran kegiatan ini adalah terawasinya pangan segar melalui uji sampel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**13.5.9 Kegiatan Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 146.950.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 139.138.200,00 atau 94,68%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





**13.5.10 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 179.340.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 172.517.075,00 atau 96,20%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya 2 (dua) permohonan sertifikasi produk prima 3.



**13.5.11 Kegiatan Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.700.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 66.548.980,00 atau 92,82%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya data analisis ketersediaan pangan.



**13.5.12 Kegiatan Pengkajian Makanan Tradisional** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.223.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 45.788.100,00 atau 96,96%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian kandungan gizi tepung keladi, tepung sagu rarut, tepung rap dan pelatihan pengolahan pangan lokal pada kelompok wanita P2KP.



**13.5.13 Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 96.428.400,00 atau 96,43%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pangan lokal daerah.



**13.5.14 Kegiatan Promosi Pangan Lokal** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171.557.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 156.500.300,00 atau 91,22%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menurunkan konsumsi beras dan terpromosikannya pangan lokal daerah.



**13.5.15 Kegiatan Penyusunan Database Ketahanan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79.545.650,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 71.746.000,00 atau 90,20%. Keluaran kegiatan ini adalah adanya buku Database Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**13.5.16 Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 90.900.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 90.340.000,00 atau 99,38%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya sumber pangan hewani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**13.5.17 Kegiatan Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.825.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 88.250.000,00 atau 98,25%. Keluaran kegiatan ini adalah diketahuinya data pasokan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**13.5.18 Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.100.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 85.487.000,00 atau 99,29%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya promosi keamanan pangan ke masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**13.5.19 Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 450.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 424.969.900,00 atau 94,44%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan di Sektor Pangan.





- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
2. Bobot beban kerja yang besar, sementara sumber daya aparatur yang ada masih dirasakan kurang, baik kualitas maupun kuantitas;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung;
4. Adanya pemangkasan anggaran, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan tidak mendapatkan hasil yang optimal.

**Solusi**

1. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan *Time Schedule*, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas optimal;
2. Penambahan sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga mengurangi bobot beban kerja;
3. Sarana dan prasarana perlu ditambah;
4. Kegiatan yang dilaksanakan akan maksimal hasilnya apabila tidak terjadi pemangkasan anggaran.



## 14. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### 14.1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

**14.1.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.594.000,- realisasi anggaran sebesar 61.630.000,- atau 81,52% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang Gender Fokal Point dan Pokja Gender Fokal Point dengan jumlah peserta sebanyak 50.



Gambar 14.1  
Acara Pembukaan Kegiatan  
Partisipasi Politik Perempuan di Kab.  
Belitung



Gambar 14.2  
Narasumber dan peserta kegiatan

**14.1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 69.281.000,- realisasi anggaran sebesar 48.853.500,- atau 70,51% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah peserta memahami tentang peran dan kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan jumlah peserta 40 orang.



## 14.2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

**14.2.1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.455.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 190.261.800,- atau 93,52% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang.



**14.2.2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup Perempuan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.289.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 59.443.000,- atau 85,79% dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah tercapainya kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup Perempuan dengan peserta 25 orang dan Terbentuknya Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Provinsi Kep. Babel



Gambar 14.7  
Penyampaian materi oleh Narsum  
Pusat



Gambar 14.8  
Peserta menyimak materi dari Narsum  
Daerah

**14.2.3. Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.523.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 227.913.200,- atau 90,97% dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya seleksi nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia (7 kategori) yakni :

- Kategori Ibu Muda Berkarya
- Kategori Kab/Kota yang mengimplementasikan PUG
- Kategori OPD Provinsi yang mengimplementasikan PUG
- Kategori Desa/Kel peduli perempuan dan anak
- Kategori Perempuan/Ibu yang menginspirasi
- Kategori Organisasi masyarakat/lembaga peduli perempuan dan anak
- Kategori Media massa peduli perempuan dan anak



Gambar 14.9  
Pembukaan seleksi Ibu Muda Berkarya



Gambar 14.10  
Peserta dan undangan kegiatan PHI  
sedang mengikuti Apel (indoor)  
dalam rangkaian acara puncak PHI

**14.2.4. Peningkatan Pelayanan dan Fungsi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.984.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 226.871.000,- atau 49,20% dan realisasi fisik 52 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelayanan dan fungsi dharma

wanita persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. dengan kelompok kegiatan terdiri dari 5 sasaran yaitu Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Perempuan dan Instansi terkait.



Gambar 14.11  
Praktek membatik yang dilakukan oleh peserta pelatihan dipandu oleh instruktur



Gambar 14.12  
Penyerahan santunan pendidikan oleh Ibu Ketua DWP Prov. Kep. Bangka Belitung

**14.2.5. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.293.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 139.505.400,- atau 77,81 % dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah jumlah kabupaten/ kota yang mengikuti Pameran Hasil Karya Perempuan sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/ kota.



Gambar 14.13  
Peserta pameran dari kabupaten/ kota



Gambar 14.14  
Kunjungan pengunjung ke stand pameran

#### • PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN

- Secara umum tidak ada permasalahan yang dialami pada saat pelaksanaan program/kegiatan di bidang Peningkatan Nilai-Nilai Keuangan Perempuan Indonesia, hanya pada kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Fungsi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung terserap anggaran hanya separuh dari pagu. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi terhadap temuan BPK yang tidak diperbolehkan mengganggu kegiatan bagi lembaga yang tidak termasuk dalam nomenklatur struktur dinas, sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut dihentikan.

#### **SOLUSI**

- Tidak lagi mengganggu kegiatan bagi lembaga yang tidak termasuk dalam nomenklatur struktur dinas.

### **14.3. Program Perempuan dan Perlindungan Anak**

**14.3.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.240.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 245.218.400,- atau 96,5 % dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah Kelancaran Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dalam rangka penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di 7 (tujuh) Kabupaten/kota.



**14.3.2. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.421.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 116.536.820,- atau 94,42 % dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dan Undang-Undang perlindungan anak jumlah sebanyak 100 orang





Gambar 14.17  
Pelaksanaan Sosialisasi di Kabupaten  
Belitung



Gambar 14.18  
Pelaksanaan Sosialisasi di Kabupaten  
Bangka Barat

**14.3.3. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.303.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 92.093.400,- atau 96,63 % dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah tercapainya kegiatan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terpilihnya pemenang kelompok FPKDRT : Juara 1 (PKDRT TENTRAM Kabupaten bangka tengah) Juara II (PKDRT LESTARI Kabupaten Bangka Barat) dan Juara III (PKDRT MELATI Kabupaten Bangka Selatan).



Gambar 14.19  
Penilaian Kelompok PKDRT di  
Kabupaten Bangka Tengah



Gambar 14.20  
Penilaian Kelompok PKDRT di  
Kabupaten Bangka Selatan

**14.3.4. Kegiatan Peningkatan fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 376.020.000,- realisasi anggaran sebesar 326.480.900,- atau 86,83% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah kelancaran fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan komisi perlindungan anak daerah.



**14.3.5. Kegiatan Workshop Kebijakan Kab/Kota Layak Anak** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.844.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 63.438.858,- atau 84,78% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan adalah peserta workshop dan fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak jumlah peserta 40 Orang.



**14.3.6. Kegiatan Pembinaan Partisipasi Hak Anak** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan lalokasi anggaran sebesar Rp. 179.390.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 173.639.000,- atau 96,79 % dan realisasi fisik 100 % Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Partisipasi Hak Anak Peserta 70 orang dan terpilihnya 7 orang peserta sebagai duta anak untuk mengikuti forum anak nasional.



Gambar 14.25  
Pembukaan Forum Anak Provinsi Kep.  
Bangka Belitung oleh Kepala Dinas  
DP3ACSKB



Gambar 14.26  
Acara Forum Anak tingkat Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung di Hotel  
Grand Mutiara Jln Kampung Bintang  
Pangkalpinang

#### • PERMASALAHAN DAN SOLUSI

##### PERMASALAHAN

- Belum ada kebijakan yang menjadi landasan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan tingkat kabupaten/kota.
- Kurangnya kepedulian terhadap komitmen yang telah di sepakati.

##### SOLUSI

- Agar Kabupaten/Kota membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut untuk menjadi pedoman kegiatan.
- Agar Instansi terkait menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat.

## 15. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

### 15.1. Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

**15.1.1. Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (fasilitasi KB MUSPIDA)** dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 316.450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 315.269.000,- atau 99,63% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelayanan KB bagi masyarakat di 3 Kabupaten dengan jumlah 600 PUS yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menerima pelayanan KB.



**15.1.2. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dilaksanakan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.865.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 252.103.000,- atau 97.39% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terpilihnya pemenang lomba Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Provinsi terdiri dari Kategori

1. Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga Keluarga berencana- Kesehatan (PKK KB-KES)
2. Lingkungan Bersih Sehat
3. Pengelolah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)



Gambar 15.3  
Acara Puncak Harganas Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 15.4  
Pemberian Pemenang Lomba  
Kegiatan Pembinaan peningkatan  
peran perempuan dalam kehidupan  
keluarga

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Tidak ada permasalahan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan Pembinaan Pelayanan KB dan Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga.



## 16. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

### 16.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

**16.1.1 Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.400.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 10.600.000,- atau 85,5%.

Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ sebanyak 4 (empat) kali pertemuan yang dilaksanakan 3 (tiga) kali di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 1 (satu) kali di ruang Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan Instansi penyelenggara lalu lintas dan *stakeholder* di bidang lalu lintas yang menghasilkan rekomendasi akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 16.1  
Rapat Anggota Forum LLAJ di Dinas  
Perhubungan



Gambar 16.2  
Rapat Anggota Forum LLAJ di  
Sekretariat Daerah Provinsi Kep.  
Bangka Belitung

**16.1.2 Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.731.467,- atau 87,5%

Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan berupa buku yang telah dicetak sebanyak 30 buku (database pelayanan jasa angkutan/dishub dalam angka).



- 16.1.3 Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 724.250.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 673.327.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 671.248.600,- atau 99,7%  
Keluaran kegiatan adalah tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.



- 16.1.4 Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 283.050.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 267.420.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 261.316.200,- atau 97,7%  
Keluaran kegiatan adalah terlaksananya survey kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yaitu berupa dokumen data tentang kebutuhan perlengkapan jalan provinsi di Pulau Belitung.



**16.1.5 Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 322.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 249.487.200,- atau 77,3%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Dokumen Study Kelayakan untuk Pembangunan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung.



**16.1.6 Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 315.890.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 287.248.000,- atau 90,9%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 16.11  
Rapat Study Kelayakan Pelabuhan  
Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan



Gambar 16.12  
Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan  
Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan

- 16.1.7 Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.854.249,- atau 76,6%  
Keluaran kegiatan adalah tersedianya Dokumen Data Kebutuhan dan Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Sektor Perhubungan Laut.



Gambar 16.13  
Rapat Survey Kebutuhan dan  
Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut



Gambar 16.14  
Dokumen survey kebutuhan  
inventarisasi sektor perhubungan laut

## 16.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- 16.2.1 Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp.148.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 333.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.924.190,- atau 56,1%  
Keluaran kegiatan adalah tersedianya Alat Keselamatan Transportasi yang dapat berfungsi dengan baik.





➤ **Permasalahan dan Solusi**

• **Permasalahan**

- Kurangnya penyerapan anggaran pada Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi di karenakan kegiatan ini bersifat preventif jika ada fasilitas keselamatan yang memerlukan perbaikan.

• **Solusi**

- Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengevaluasi kebutuhan dan biaya yang harus dianggarkan tiap tahunnya untuk menghindari kurangnya penyerapan anggaran tersebut.

**16.2.2 Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 214.270.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.359.056,- atau 93,5%  
Keluaran kegiatan adalah tersedianya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di perairan Desa Kurau Kabupaten Bangka Tengah berupa suar apung yang dapat berfungsi dengan baik.





### 16.3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

**16.3.1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 99.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.898.800,- atau 99,2%  
Keluaran kegiatan adalah terwujudnya Peningkatan Disiplin Pengendara Angkutan Penumpang dan Barang dengan realisasi 536 *unit* kendaraan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan 162 *unit* kendaraan mendapat surat tilang.



Gambar 16.19  
Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan



Gambar 16.20  
Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan

**16.3.2 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.425.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.592.000,- atau 93,8%.  
Keluaran kegiatan adalah peningkatan kualitas Awak Kendaraan Umum sebanyak 14 (empat belas) orang sehingga didapatkan pemenang Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan di Tingkat Provinsi untuk dikirim ke Tingkat Nasional dan hasilnya perwakilan provinsi kepulauan bangka belitung mendapat juara harapan I di Tingkat Nasional.



Gambar 16.21  
Kegiatan Pembukaan Awak Kendaraan Umum Teladan



Gambar 16.22  
Pemberian penghargaan sopir/awak kendaraan umum teladan

**16.3.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.930.000,- atau 89,1%.

Keluaran kegiatan adalah meningkatkan Pengetahuan Pelajar terhadap Keselamatan dan Tata Tertib Berlalu Lintas dengan jumlah Peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan yang terpilih menjadi pemenang di Tingkat Provinsi akan diikuti ke Tingkat Nasional.



Gambar 16.23  
Foto Peserta Pemilihan Pelajar  
Teladan pada saat menerima materi



Gambar 16.24  
Foto Bersama Pemenang Peserta  
Pemilihan Pelajar Teladan

**16.3.4 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari Besar Keagamaan** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 73.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.835.600,- atau 83 %.

Keluaran kegiatan adalah terciptanya kelancaran lalu lintas dan angkutan pada saat peringatan hari-hari besar keagamaan.



Gambar 16.25  
Pemantauan Arus Mudik Lebaran di  
Tanjung Kalian



Gambar 16.26  
Pemantauan Arus Mudik Lebaran di  
Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok

**16.3.5 Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhanan** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 55.070.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.422.000,- atau 89,7%

Keluaran kegiatan adalah terwujudnya koordinasi dan kesamaan pemahaman *stakeholder* tentang peraturan kementerian perhubungan

dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan oleh stakeholder terhadap regulasi jasa kepelabuhanan di bidang perhubungan laut.



Gambar 16.27  
Penyampaian materi kepada  
stakeholder pengguna jasa  
kepelabuhanan



Gambar 16.28  
Foto bersama stakeholder pengguna  
jasa kepelabuhanan

#### 16.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

**16.4.1 Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 14.782.850.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 12.804.138.064,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.289.783.478,- atau 96 %  
Keluaran kegiatan adalah tersedianya 1 (satu) unit Gedung VIP di Terminal baru Bandara Depati Amir.



Gambar 16.29  
Foto Pembangunan Gedung VIP



Gambar 16.30  
Foto pembangunan Gedung VIP

**16.4.2 Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanadjoeddin** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 5.809.450.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 4.968.633.349,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.954.280.200,- atau 99,7%  
Keluaran kegiatan adalah terpenuhinya fasilitas bandara untuk meningkatkan kualitas jasa transportasi dengan volume timbunan 37.742,07 M<sup>3</sup>.



**16.4.3 Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 2.525.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 10.566.950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.566.950,- atau 100,00%  
Keluaran kegiatan adalah terlaksananya koordinasi Kementerian Perhubungan mengenai permasalahan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan**

Kurangnya penyerapan anggaran pada kegiatan Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

- **Solusi**

Agar kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## 17. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 17.1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

**17.1.1. Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 215.710.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 194.817.335,- atau 90,31%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya operasional 12 titik hotspot di 6 (enam) kabupaten. 4 titik di Kab. Belitung (Pantai Wisata Tanjung Pendam, Tempat Wisata Kolong Keramik, Dinas Pariwisata, Terminas Bus Tanjung Pendam), 4 titik di Kab. Belitung Timur (Perpustakaan Beltim, Pasar Festival Gantung, Galery UMKM, Terminal Manggar), 1 (satu) titik di kab. Bangka (RSUD), 1 (satu) titik di Kab. Bangka Barat (Museum Timah), 1 (satu) titik di Kab. Bangka Tengah (RSUD Koba) dan 1 (satu) titik di Kab. Bangka Selatan (Radio RJB). Dengan pembayaran sewa internet untuk 12 (dua belas) bulan.



**17.1.2. Kegiatan Pengelolaan dan Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.088.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 111.399.202,- atau 76,78%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP) sebanyak 4 kali di tiap kabupaten di Pulau Bangka 4 kali di Kab. Bangka, 4 kali di Kab. Bangka Tengah, 4 kali di Kab. Bangka Barat, 4 kali di Kab. Bangka Selatan), 2 kali di Kab. Belitung dan 2 kali di Kab. Belitung Timur.





**17.1.3. Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.220.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 126.915.864,- atau 75.00%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada publik selama satu tahun melalui Pengelolaan dan Operasional Media Center meliputi pemutaran film yang terlaksana di pemutaran film 5 kali yaitu di 1 kali di Kab. Belitung (Selat Nasik), 2 kali di Kab. Bangka Selatan (Pulau Lepar dan Kampung Gudang), 1 kali di Kab. Bangka Tengah (Perpustakaan), dan 1 kali di Kab. Bangka (Lubuk Bunter). Konferensi pers 4 kali (MTGT di Media Center dan Novotel, LKPP di Kab. Belitung, PBSI di Novotel).



**17.1.4. Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.945.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 471.809.027,- atau 94,94 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyebaran informasi program pembangunan daerah melalui info radio, terlaksananya Penyebarluasan informasi pembangunan di 7 kab/kota, info radio, life report terkait agenda keg.provinsi, siaran langsung "cerudik on road".



**17.1.5. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.050.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.154.740,- atau 89,48%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi kerawanan keamanan informasi dan komunikasi Raker Teknis dan Monev Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan pihak/dinas terkait berupa Monitoring dan inventarisasi peralatan sandi, personil sandi tentang SOTK baru, pelaksanaan Sosialisasi.



**17.1.6. Kegiatan Penguatan Jaringan Komunikasi Data** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.870.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 304.275.728,- atau 87,72%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya media akses komunikasi data di internal tiap PD dengan Perawatan jaringan dan instalasi sebanyak 45 Paket, Pengadaan *access point* 10 unit.



Gambar 17.6  
Kegiatan Penguatan Jaringan Komunikasi Data

**17.1.7. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kep. Babel melalui TVRI** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.058.800,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 490.270.552,- atau 98,44%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya informasi pembangunan daerah Prov. Kep. Bangka Belitung di program TV. (Warta TV, Dialog 21, Kuliner, Yo Ngopi Luk, dan Potret).



Gambar 17.7  
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah  
Provinsi Kep. Babel melalui TVRI

**17.1.8. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** alokasi anggaran sebesar Rp. 580.730.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 556.551.273,- atau 95,84%. Keluaran kegiatan adalah 41 sengketa informasi, 2 kali sosialisasi, edukasi, advokasi di Kab. Belitung dan Belitung Timur artikel yang diterjemahkan.



**17.1.9. Kegiatan Seleksi Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.600.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 84.279.962,- atau 99,62%. Keluaran kegiatan adalah Penetapan SK Gubernur tentang Tim Seleksi KID, terpilihnya 5 anggota KID.



**17.1.10. Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 504.720.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 477.068.595,- atau 94,52%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya perangkat lunak dasar umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung berupa 5 aplikasi dan 2 lisensi. Aplikasi kuliner (lalaper), pendidikan (lapinter), UMKM (labener), pariwisata (lamuter), kesehatan (laseger). Lisensi aplikasi Cpanel, manajemen data (Navicat).





Gambar 17.10  
Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah

**17.1.11. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Portal Prov. Kep. Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.500.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 70.211.000,- atau 86,15%. Keluaran kegiatan Tersedianya media informasi berbasis website sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan 30 portal di PD Pemprov. Kep. Bangka Belitung.

Website Gugus Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
NO	NAMA OPSI	ALAMAT WEBSITE
1.	Website Dinas Kesehatan	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
2.	Website Dinas Pendidikan	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
3.	Website Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
4.	Website Dinas Perhubungan	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
5.	Website Dinas Sosial	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
6.	Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
7.	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Kependudukan	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
8.	Website Dinas Perikanan	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
9.	Website Dinas Kelautan dan Perikanan	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
10.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
11.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
12.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
13.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
14.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
15.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
16.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
17.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
18.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
19.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>
20.	Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<a href="http://www.satelpro.go.id">http://www.satelpro.go.id</a>

Gambar 17.11  
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Portal Prov. Kep. Bangka Belitung

**17.1.12. Kegiatan Pengelolaan *Disaster Recovery Center (DRC)*** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.930.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 197.110.960,- atau 91,71%. Keluaran kegiatan tersedianya pengelolaan dan operasional jaringan DRC berupa *upgrade* HDD 15 unit, *upgrade* RAM 10 unit, bayar *maintenance* 12 bulan.





- 17.1.13. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Prov. Kep. Bangka Belitung.** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 718.750.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 704.341.427,- atau 98,00%. Keluaran kegiatan kegiatan yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Informasi Daerah Prov.Kep.Babel dan Sekretariat KPID berupa pembinaan isi siaran di radio swasta, fasilitasi gaji anggota KPID selama 7 bulan, pengawasan isi siaran pada 5 TV lokal/TV kabel, rapat bulanan dengan media elektronik 6 kali.



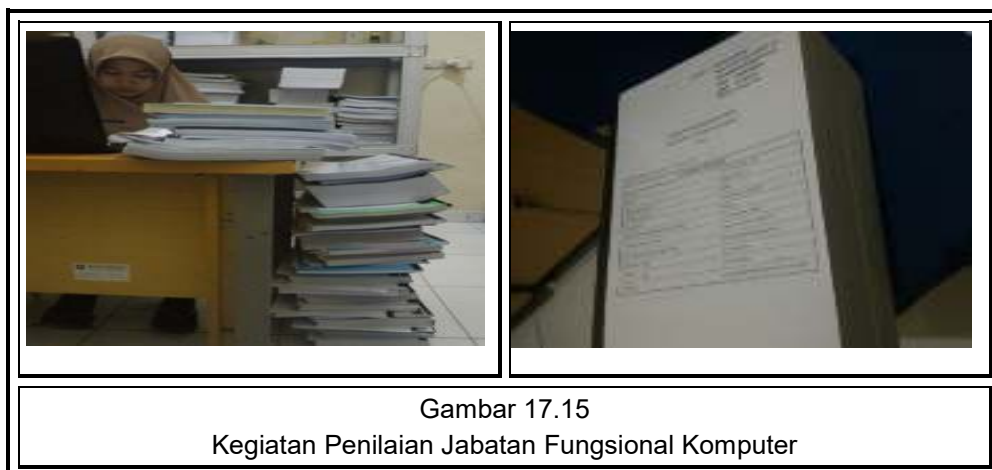
- 17.1.14. Kegiatan Implementasi Aplikasi Smart Citizen.** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 402.185.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak cukup dan sudah ada aplikasi sejenis yaitu Babel Gun yang dirilis Polda Bangka Belitung.

## 17.2 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- 17.2.1. Kegiatan Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.225.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 49.123.540,- atau 95,90%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola pengembangan/pengelolaan websiter dan pengembangan aplikasi berupa pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK dengan 50 peserta.



- 17.2.2. Kegiatan Penilaian Jabatan Fungsional Komputer** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.570.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 30.298.504,- atau 50,86%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional pranata komputer yaitu 2 kali masa penilaian pada bulan Januari dan Juli (53 orang/AK), 24 orang dupak pertama.



- 17.2.3. Kegiatan Jabatan penilaian Jabatan Pranata Humas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.664.845,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.664.845,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah koordinasi untuk persiapan penilaian jabatan Pranata Humas tetapi tidak ada penilaian jabatan pranata humas karena rasionalisasi anggaran.

### 17.3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- 17.3.1. **Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah** melalui Media Cetak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.050.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 181.885.757,- atau 99,36%. Keluaran kegiatan adalah 12 kali terbit di Media cetak.



Gambar 17.17

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak

- 17.3.1. **Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah** melalui Media Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 697.215.155,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 646.575.295,- atau 92,74%. Keluaran kegiatan adalah terjalinnnya kerjasama penyebarluasan informasi dengan 2 radio swasta, 1 media online (antara dan rakyat merdeka) 400 kali penyebarluasan informasi melalui web (babelprov.go.id).



Gambar 17.18

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik

#### ➤ Permasalahan dan Solusi

##### 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Permasalahan :

Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kurang optimal.

Solusi :

Diharapkan rasionalisasi anggaran tidak berpengaruh besar pada pelaksanaan kegiatan.

**2. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

Permasalahan :

Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kurang optimal.

Solusi :

Diharapkan rasionalisasi anggaran tidak berpengaruh besar pada pelaksanaan kegiatan.

**3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa:**

Permasalahan :

Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kurang optimal.

Solusi :

Diharapkan rasionalisasi anggaran tidak berpengaruh besar pada pelaksanaan kegiatan.

## 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

### 19.1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

- 19.1.1. Kegiatan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.605.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 73.795.400,- atau 76,39 %. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya wawasan aparatur dalam menganalisa suatu bentuk potensi ancaman.



Gambar 19.1

Kegiatan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah

- 19.1.2. Kegiatan Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Prov. Babel** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.955.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 60.803.200,- atau 78%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya data orang asing, lembaga asing dan tenaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 19.2

Kegiatan Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Prov. Babel



## **19.2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.**

- 19.2.1. Kegiatan Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol** dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 253.649.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 218.600.100,- atau 86,18%. Keluaran terlaksananya fungsi intelijen.



- 19.2.2. Kegiatan Penguatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik** dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.260.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 292.317.309,- atau 98,01 %. Keluaran kegiatan terlaksananya penanganan gangguan keamanan dalam negeri.



## **19.3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.**

- 19.3.1. Kegiatan Workshop Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.660.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 191.348.300,- atau 89,14%. Keluaran kegiatan adalah jumlah masyarakat dan pemuda yang mengikuti Workshop peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila.



Gambar 19.5  
Kegiatan Workshop peningkatan pemahaman dan pengamalan pancasila

- 19.3.2. Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Prov.Kep Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.325.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 238.067.450,- atau 98,65%. Keluaran kegiatan adalah terbentuknya kepengurusan PPWK se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 19.6  
Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan  
Prov.Kep Bangka Belitung

- 19.3.3. Kegiatan Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 259.230.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 258.744.050,- atau 98,65%. Keluaran kegiatan adalah Perseorangan, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa/Kel.



#### 19.4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

- 19.4.1. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kebangsaan (FPK) Se-Prov. Kep. Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.118.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 150.109.900,- atau 97,40%. Keluaran kegiatan terlaksananya rapat kepengurusan Forum Pebauran Kebangsaan (FPK).



#### 19.5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

- 19.5.1. Kegiatan Simulasi Penanganan Konflik** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.030.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 127.307.500,- atau 97,16%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya aparaturnya yang siap menghadapi konflik.



Gambar 19.9  
Kegiatan Simulasi Penanganan Konflik

## 19.6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

- 19.6.1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.364.950,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 142.075.100,- atau 84,34%. Keluaran kegiatan adalah jumlah masyarakat, ormas dan aparaturnya yang memahami tentang penyalahgunaan narkoba.



Gambar 19.10  
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

## 19.7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 19.7.1. Kegiatan Verifikasi Penyaluran Bantuan Partai Politik** dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 38.212.200,- atau 97,98%. Keluaran kegiatan adalah tersalurnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 19.7.2. Kegiatan Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Di Daerah** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.735.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 116.251.600,- atau 95,50%. Keluaran kegiatan adalah terpantaunya perkembangan situasi politik dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan dan terselesaikannya masalah politik dan pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 19.7.3. Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Bagi Pelajar SLTA** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.996.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 184.676.100,- atau 95,69%. Keluaran kegiatan adalah jumlah pelajar yang telah mengikuti bimtek tentang pendidikan budaya politik.





Gambar 19.13  
Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Bagi Pelajar SLTA

## 19.8. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Budaya.

**19.8.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.180.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 81.279.038,- atau 92,17 %. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya kegiatan FKUB.



Gambar 19.14  
Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

**19.8.2. Kegiatan Forum Koordinasi Peran Pemda dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Sembako Di Daerah** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.002.000,-.realisasi anggaran sebesar Rp. 50.899.200,- atau 87,75%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Forum Koordinasi antar Pemda dan Ormas.



## 19.9. Program Kemitraan Kamtibnas.

**19.9.1. Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Konflik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.810.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 118.778.000,- atau 90,80 %. Keluaran kegiatan adalah Peta Rawan Konflik.



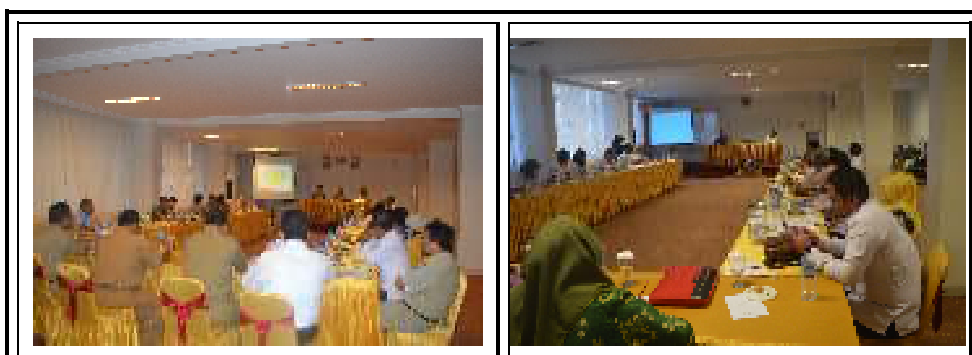
**19.9.2. Kegiatan sebelumnya Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)** menjadi Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.320.000,-.realisasi anggaran sebesar Rp. 30.525.150,- atau 99,35%. Keluaran kegiatan adalah terwujudnya konsolidasi antar unsur pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan Pemerintah.



Gambar 19.17  
Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menjadi  
Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

#### 19.10. Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi.

**19.10.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia** dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145400000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 138540100,- atau 95,28 %. Keluaran kegiatan adalah Tim Kelompok Kerja IDI.



Gambar 19.18  
Kegiatan Peningkatan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks  
Demokrasi Indonesia

## 19.11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 19.11.1. Kegiatan Bimtek Penyuluhan Bagi Satpol PP se-Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.952.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 61.841.800,- atau 84,77%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya bimtek penyuluhan sebanyak 1 kali dan jumlah peserta bimtek diikuti 40 orang.



Gambar 19.19  
Kegiatan Bimtek Penyuluhan Bagi Satpol PP se-Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 08 – 10 Agustus 2017 di ruang pertemuan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 19.11.2. Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan PPNS Peningkatan Kompetensi Aparatur** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 238.410.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 216.462.398,- atau 90,79%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya pengiriman peserta diklat sebanyak 29 orang ke luar daerah.



Gambar 19.20  
Salah satu kegiatan Pengiriman Peserta Diklat PPNS di Jakarta pada tanggal 21 -24 November 2017

- 19.11.3. Kegiatan Instruktur Upacara dan Kesemaptaan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.100.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 111.800.000,- atau 97,13%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya instruktur upacara

bagi aparaturnya dan terlaksananya kesempataannya sebanyak 40 kali selama 11 bulan.



**19.11.4. Kegiatan Bimtek PPNS Penegak Perda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.802.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.298.500,- atau 84,95%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya bimtek PPNS sebanyak 1 kali dan jumlah peserta bimtek sebanyak 40 orang.



**19.11.5. Kegiatan LATSAR POL PP dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 439.392.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 432.470.000,- atau 98,42%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Latsar Pol PP (diklat dasar) sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta diklat dasar sebanyak 52 orang.





Gambar 19.23  
Kegiatan LATSAR POL PP, pada tanggal 27 April – 16 Mei 2017 di ruang pertemuan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 19.11.6. Kegiatan Pelatihan Rutin Kemampuan Bela Diri Anggota Satpol PP** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.939.900,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 157.278.500,- atau 94,21%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan rutin kemampuan beladiri dan senam anggota Satpol PP selama 11 bulan.



Gambar 19.24  
Kegiatan Pelatihan Kemampuan Bela Diri dan Senam Satpol PP di Halaman dan Gedung Serba Guna Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

- 19.11.7. Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP Provinsi, Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.401.900,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 176.008.800,- atau 88,71%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta uji kompetensi sebanyak 99 orang.



## 19.12. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

**19.12.1. Kegiatan Tim Pemantauan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.140.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.340.000,- atau 98,06%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemantauan pilgub 2017 sebanyak 7 kali di 7 kabupaten/kota.



**19.12.2. Kegiatan Pengamanan/ Pengawalan Pimpinan Daerah serta Orang-orang Penting** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 265.540.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.397.179,- atau 76,22%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengawalan pimpinan daerah beserta rombongan sebanyak 53 kali.



**19.12.3. Kegiatan Penertiban Terhadap Pelanggaran Perda yang Berdampak Terhadap Peningkatan PAD** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.150.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.116.091.100,- atau 96,62%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penertiban terhadap pelanggaran perda sebanyak 12 kali dalam 12 bulan.



**19.12.4. Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.182.600,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 138.908.724,- atau 73,04%. Keluaran kegiatan adalah penyelidikan pelanggaran perda/pergub sebanyak 12 penyelidikan dan terlaksananya penyidikan sebanyak 1 kali.



**19.12.5. Kegiatan Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.914.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.250.000,- atau 77,96%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan administrasi PPNS antar SKPD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 8 kali kegiatan/rapat.



**19.12.6. Kegiatan Patroli** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.150.000,- atau 93,58%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya patroli di wilayah Pemprov Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.



**19.12.7. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.584.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.271.250,- atau 71,95%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengamanan unjuk rasa sebanyak 21 kali.



**19.12.8. Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.631.911.950,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.442.036.750,- atau 88,36%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengamanan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan piket selama 12 bulan (khusus Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Kantor DPRD, Rumah Dinas Ketua DPRD, Rumah Dinas Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, dan Kantor Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).





**19.12.9. Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan, Penertiban Satpol PP ke-Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.699.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.440.000,- atau 88,70%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban sebanyak 12 kali dalam 12 bulan.



**19.12.10. Kegiatan Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.160.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 171.482.000,- atau 99,03%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya gelar pasukan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 750 orang.



Gambar 19.35  
Kegiatan Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di halaman kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 06 April 2017

### 19.13. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

**19.13.1. Kegiatan Bimtek Pemberdayaan Satuan Linmas Dalam Menunjang Terwujudnya Trantib Swakarsa** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.970.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 145.532.250,- atau 99,02%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan satlinmas sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.



Gambar 19.36  
Kegiatan Bimtek Pemberdayaan Satlinmas dalam Menunjang Trantib Swakarsa, pada Tanggal 23-24 Mei 2017, di Hotel Aksi Natural Resort Pangkalpinang Bangka Belitung

**19.13.2. Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Banjir bagi Satlinmas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.651.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.453.621,- atau 99,81%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan penanggulangan banjir bagi satlinmas sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang.



**19.13.3. Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran bagi Satlinmas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.041.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.483.000,- atau 99,44%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan kebakaran bagi satlinmas sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.



#### **19.14. Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**19.14.1. Kegiatan Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja** dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.460.028.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.447.617.000,- atau 99,15%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya makanan tambahan bagi seluruh aparaturnya Satpol PP selama 12 bulan berupa gula pasir, kopi, susu kental manis, mie instan, telur ayam, kacang hijau, dan teh celup.



- **Kendala dan Solusi**

**Kendala**

1. Masih kurang maksimalnya fungsi koordinasi dengan instansi terkait (kabupaten dan kota) dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan Diklat serta kurangnya pemahaman tentang Jabatan Fungsional Satpol PP, baik Satpol PP Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Kurangnya respon SKPD penginisiasi Perda dalam koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kurangnya minat Satlinmas (dari kabupaten/kota) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas Satlinmas yang diadakan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan minimnya uang saku dan tidak adanya uang transportasi.
5. Kurangnya pemahaman tentang keberadaan dan fungsi Satlinmas oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
6. Kurangnya kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas dalam membantu menyelenggarakan tibumtranmas dan penanganan bencana dan kebakaran.
7. Kurangnya sosialisasi/pelatihan penanggulangan bencana dan kebakaran untuk masyarakat.
8. Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki tempat atau gudang yang baik sebagai sarana prasarana penyimpan barang yang diserahkan penyedia barang dalam hal ini makanan tambahan.

**Solusi**

1. Mengupayakan fungsi koordinasi dengan Satpol PP kabupaten dan kota, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi agar pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dapat berjalan dengan baik.
2. Mengupayakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Pol PP, serta mensosialisasikan dan mengupayakan anggota Pol PP menjadi fungsional Pol PP.
3. Selalu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait dan mengupayakan peran dan kewenangan pejabat lebih

tinggi dalam mengkomunikasikan/mengkoordinasikan penegakan perda.

4. Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaksimalkan upaya penegakan perda melalui penindakan non yustisi yang bersifat preventif dan persuasif.
5. Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan pembina Satlinmas di Kabupaten/Kota agar menyiapkan dukungan anggaran perjalanan dinas Satlinmas supaya mereka dapat mengikuti kegiatan Satlinmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu Satpol PP Provinsi mengupayakan penambahan uang saku kegiatan dan uang transport bagi anggota Satlinmas.
6. Memberikan sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi Satlinmas sesuai Permendagri No. 84 tahun 2014.
7. Satpol PP Provinsi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Satlinmas untuk menunjang kemampuan anggota Satlinmas.
8. Satpol PP Provinsi memperbanyak kegiatan Sosialisasi tentang penanggulangan bencana dan kebakaran untuk masyarakat.
9. Penyerahan makanan tambahan anggota Satpol PP diusahakan di gudang penyedia. Jika anggota belum mengambil, maka barang disimpan di gudang sementara Satpol PP.



## 20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

### 20.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**20.1.1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.842.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.022.000,- atau 97.98%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor.



**20.1.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.597.950,- atau 99.77%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.



**20.1.3. Kegiatan Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 516.450.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 478.446.800,- atau 92.64%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir.



## 20.2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

**20.2.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.323.584.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.203.811.214,- atau 94,85%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeriksaan Secara Berkala.



**20.2.2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.040.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.500.000,- atau 65.47%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.



Gambar 20.5  
Laporan Hasil Pemeriksaan  
Kasus Pengaduan

**20.2.3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.118.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp114.010.200,- atau 88.22%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.



Gambar 20.6  
Tindak Lanjut Hasil Temuan  
Pengawasan



Gambar 20.7  
Tindak Lanjut Hasil Temuan  
Pengawasan

**20.2.4. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.604.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 95.163.775,- atau 72.31%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas).



Gambar 20.8  
Rakorwas



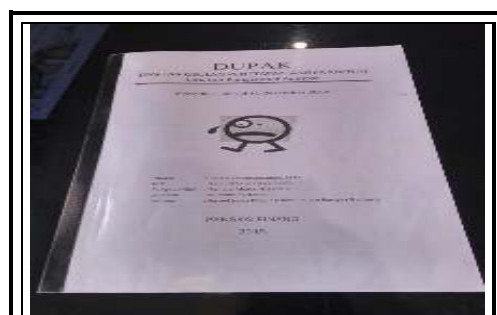
Gambar 20.9  
Rakorwas

**20.2.5. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 557.808.100,- atau 97,86%. Keluaran kegiatan ini adalah percepatan tindak lanjut secara berkala di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Gambar 20.10  
Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

**20.2.6. Kegiatan Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penghitungan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat.



Gambar 20.11  
Pengajuan Angka Kredit JFT

**20.2.7. Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.672.750,- realisasi anggaran sebesar Rp. 522.066.240,- atau 98,38%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penagihan piutang daerah akibat Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).



- 20.2.8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 252.773.740,- atau 72.22%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



### **20.3. Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

- 20.3.1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan** dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp491.805.250,- realisasi anggaran sebesar Rp484.288.430,- atau 98.46%. Keluaran kegiatan ini adalah 14 orang tenaga pemeriksa dan aparatur yang mengikuti diklat.





**20.3.2. Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)** oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.724.850,- realisasi anggaran sebesar Rp. 62.718.649,- atau 77.69%. Keluaran kegiatan ini adalah Peningkatan Kapabilitas dan Kemampuan Auditor/P2UPD.



**20.4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi**

**20.4.1. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara Online** oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp92.598.470,- atau 71.45%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Secara Online.



Gambar 20.16  
Rapat Pokja PMPRB

**20.4.2. Kegiatan Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (*Upgrading*)** oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.820.000,- realisasi anggaran sebesar Rp139.157.157,- atau 92.88%. Keluaran kegiatan ini adalah Penyempurnaan dan Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.



Gambar 20.17  
Antarmuka Sistem Aplikasi

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Pengambilan keputusan/penetapan pagu rasionalisasi yang terlalu lama menyebabkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tertunda contoh kegiatan Saber Pungli yang mengalami pergeseran anggaran harus menunggu 2 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
2. Kebijakan Rasionalisasi anggaran berdampak pada beberapa kegiatan pokok *corebusiness* Perangkat Daerah agak terkendala seperti kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

**Solusi**

1. Agar kiranya penetapan pagu rasionalisasi tidak berlarut-larut sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat diperkirakan jadwal pelaksanaannya.
2. Agar kiranya kegiatan prioritas yang menjadi *core* Perangkat Daerah tidak dilakukan Rasionalisasi secara signifikan.

## 20.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**20.5.1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 74.816.190,- atau 88,89%. Keluaran kegiatan ini adalah rekomendasi kenaikan pangkat, golongan, jabatan/Dupak bagi pegawai jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi persyaratan.



Gambar 20.18  
Konsultasi Dupak Bagi Jabatan  
Fungsional

**20.5.2. Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemrov. Kep. Babel** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.684.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 132.416.700,- atau 99,80%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pensiun Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemrov dan PNS Golongan IV. A ke atas di BKD Kab/Kota.



Gambar 20.19  
Berkas Kenaikan Pangkat PNS Pemrov. Kep. Babel Tahun 2017

**20.5.3. Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.106.700,- realisasi anggaran sebesar Rp. 45.120.800,- atau 83,39%.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengambilan Sumpah dan Pelantikan.



**20.5.4. Kegiatan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.961.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 114.955.300,- atau 93,49%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.5.5. Kegiatan Pembuatan Buku Profil Kepegawaian** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.954.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 120.825.000,- atau 96,70%. Keluaran kegiatan ini adalah buku Profil Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.23  
Buku Profil Kepegawaian Semester I

Gambar 20.24  
Buku Profil Kepegawaian Semester II

- 20.5.6. Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 89.435.800,- atau 89,44%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Regulasi Bidang Kepegawaian.



Gambar 20.25  
Rapat Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian

- 20.5.7. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 470.645.750,- realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- 20.5.8. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.780.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 212.984.632,- atau 98,70%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun 2017 yang transparan, obyektif tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.





Gambar 20.26  
Tes TKD dengan CAT disaksikan oleh  
Wagub didampingi Kepala BKPSDM  
Prop. Babel



Gambar 20.27  
Tes Kesehatan di RS DKT  
Pangkalpinang

**20.5.9. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Analisis Kepegawaian** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.599.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.798.900,- atau 92,45%. Keluaran kegiatan ini adalah Meningkatnya Kompetensi, wawasan serta Motivasi Analisis Kepegawaian.



Gambar 20.28  
Kegiatan Penilaian Angka Kredit Analisis Kepegawaian

**20.5.10. Kegiatan Penerbitan Buletin Kepegawaian** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.906.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 53.534.100,- atau 94,07%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Tabloid Kepegawaian.



Gambar 20.29  
Buletin Edisi Pertama Tahun 2017

Gambar 20.30  
Buletin Edisi Keempat Tahun 2017

**20.5.11. Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.027.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 123.551.887,- atau 86,99%. Keluaran kegiatan ini adalah formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara.



Gambar 20.31  
Pembukaan Pelatihan Penyusunan  
Formasi Pegawai Aparatur Sipil  
Negara

Gambar 20.32  
Kepala BKPSDMD Prov. Kep. Babel  
Sampaikan arahan pada Penyusunan  
Formasi Pegawai Aparatur Sipil  
Negara

**20.5.12. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 874.543.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 739.172.820,- atau 84,52%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Diklat PIM III selama 97 hari kerja, 254 JP atau 30 hari pembelajaran klasikal dan 603 JP atau 67 hari pembelajaran Non Klasikal



**20.5.13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 768.091.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 748.814.140,- atau 97,49%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Diklat PIM Tk.IV selama 103 Hari Kerja (893 JP).



**20.5.14. Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.618.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 12.517.000,- atau 67,23%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Gambar 20.37  
Pembagian Kartu Peserta Ujian  
Setifikasi Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah

Gambar 20.38  
Peserta Mulai Melaksanakan Ujian  
Setifikasi Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah

**20.5.15. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Management Of Training (MOT)** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 282.114.280,- realisasi anggaran sebesar Rp. 282.114.280,- atau 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya diklat MOT selama 10 Hari 90 JP.



Gambar 20.39  
Pembukaan Kegiatan Diklat MOT

Gambar 20.40  
Pelaksanaan Belajar Kegiatan MOT

**20.5.16. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC)** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.004.357,- realisasi anggaran sebesar Rp. 288.004.357,- atau 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Diklat TOC Selama 10 Hari 87 JP.





**20.5.17. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF)** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.394.100,- realisasi anggaran sebesar Rp. 114.982.060,- atau 99,64%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Diklat TOF Prajabatan Selama 10 Hari 90 JP.



**20.5.18. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.611.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 68.604.445,- atau 74,08%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Lakip.





**20.5.19. Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.327.350,- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.327.350,- atau 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dengan baik.



**20.5.20. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.208.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.208.900,- atau 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya diklat dasar manajemen bencana bagi aparatur.



Gambar 20.49  
Acara Pembukaan Kegiatan Pendidikan  
dan Pelatihan Dasar Manajemen  
Bencana bagi Aparatur

Gambar 20.50  
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  
Dasar Manajemen Bencana bagi  
Aparatur

**20.5.21. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.300.035,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.300.035,- atau 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya diklat penyusunan standar operasional prosedur (SOP).



Gambar 20.51  
Pembukaan Diklat SOP

Gambar 20.52  
Pembacaan Sambutan Acara  
Pembukaan Diklat SOP

**20.5.22. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.151.223,- realisasi anggaran sebesar Rp. 71.151.223,- atau 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya diklat tata naskah dinas.



**20.5.23. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 77.040.800,- atau 77,04%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Diklat Bendahara Pengeluaran.



## 5.6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

**50.6.1 Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.550.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 20.499.800,- atau 83,50%. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).



**50.6.2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 967.537.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 954.008.558,- atau 98,60%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis keterampilan dan atau keahlian.



**20.6.3. Kegiatan Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.186.560.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.179.622.018,- atau 99,68%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui peningkatan pendidikan formal.





- 20.6.4. Kegiatan Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan** oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.523.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 150.805.500,- atau 93,36%. Keluaran kegiatan ini adalah terinformasikan peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal S-1/D-IV mekanisme kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi.



- 20.6.5. Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan** oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.560.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 25.553.330,- atau 89,47%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat.





**20.6.6. Kegiatan Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.397.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 118.628.650,- atau 96,92%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.6.7. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP Korpri Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.960.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 71.436.000,- atau 68,06%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya persiapan pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan dewan pengurus Kab/Kota KORPRI.



Gambar 20.64  
Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP Korpri Kepulauan Bangka Belitung

**20.6.8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kotadilaksanakan** oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.120.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 37.475.714,- atau 66,78%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya monev kediklatan provinsi kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.65  
Monev Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

**20.6.9. Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajardilaksanakan** oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.408.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 68.398.062,- atau 91,92%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar.



Gambar 20.66  
Sekretaris BKPSDMD Prov. Babel Membuka Bank Soal Tes Seleksi Tubel

**20.6.10. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.950.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 138.227.860,- atau 71,64%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian akreditasi 3 (tiga) jenis diklat pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.6.11. Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.920.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 53.181.048,- atau 96,83%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional widyaiswara.



**20.6.13. Kegiatan Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.328.495,- realisasi anggaran sebesar Rp. 111.221.250,- atau 78,70%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan CPNS, PNS, PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.6.14. Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 694.078.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 544.720.534,- atau 78,48%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka oleh Tim Panitia Seleksi Provinsi Bangka Belitung.



**20.6.15. Kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 810.947.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 659.241.360,- atau 81,29%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Ke 14.





Gambar 20.74  
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Hadiri  
Pembukaan Pornas KORPRI ke-14 Tahun 2017



Gambar 20.75  
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Informasi, Dan Fasilitas Profesi ASN BKPSDMD Prov. Kep. Babel Menerima Bendera yang menandakan PORNAS KORPRI tahun 2019 akan diadakan di Prov. Babel

**20.6.16. Kegiatan Pertandingan Olahraga antar Unit KORPRI se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 264.457.750,- realisasi anggaran sebesar Rp. 264.457.750,- atau 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pertandingan olahraga antar unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.76  
Kepala BKPSDMD Bacakan Laporan Kegiatan Pertandingan Olahraga antar unit KORPRI



Gambar 20.77  
Sekda Prov. Kep. Babel Serahkan Trophy kepada Atlet Berprestasi di ajang Pertandingan Olahraga antar unit KORPRI

**20.6.17. Kegiatan Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 265.695.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 259.575.250,- atau 97,70%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Assesment Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.





## 20.7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

**20.7.1 Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 170.747.750,- atau 86,61%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian permasalahan kasus pelanggaran kode etik dan disiplin bagi CPNS, PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.7.2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan** pegawai dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.860.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 43.845.600,- atau 74,49%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan, Pelayanan, dan Pengelolaan Administrasi Bidang Kesejahteraan Pegawai.



Gambar 20.82  
Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai

- **Kendala dan Solusi**

**Kendala**

Adanya hasil telaahan BKD Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 800/745/BKD tanggal 29 september 2016, perihal penundaan pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara tahun 2016, sebagaimana yang tertuang pada Nota Dinas BKD Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 800/147/BKD tanggal 30 September 2016 tentang pengurangan pagu anggaran dan penundaan kegiatan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara tahun 2016

**Solusi**

Di anggarkan kembali tahun 2017 mengingat telah terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Sehingga dengan adanya Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai ASN akan dapat dijadikan acuan dalam menentukan dan menetapkan formasi ASN, melakukan rotasi, mutasi dan redistribusi pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan masing-masing unit organisasi

## **20.8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 20.8.1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.220.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 652.643.838,- atau 96,80%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya Raperda dan Rapergub tentang APBD T.A. 2018.



Gambar 20.83  
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD T.A. 2018

- 20.8.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 675.860.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 670.164.820,- atau 99,16%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya Raperda dan Rapergub tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.



Gambar 20.84  
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD

- 20.8.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 256.320.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp 244.674.716,- atau 95,46%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya laporan realisasi APBD TA. 2016.



Gambar 20.85  
Penyusunan Rancangan Perdatentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
APBD

**20.8.4. Intensifikasi Sumber-sumber pajak Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 645.570.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 523.205.200,- atau 81,05%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pajak daerah.



Gambar 20.86  
Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak  
Daerah

**20.8.5. Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 138.559.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 137.629.000,- atau 99,33%. Keluaran kegiatan adalah bimbingan teknis terhadap bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD dalam pencairan dan penggunaan dana SKPD.



Gambar 20.87  
Bimbingan Teknis terhadap Bendahara  
Pengeluaran dan PPK-SKPD

**20.8.6. Peningkatan Fungsi Jaringan Aplikasi SIMDA** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 596.712.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 512.757.428,- atau 85,93%. Keluaran kegiatan adalah terpasangnya jaringan aplikasi SIMDA.



Gambar 20.88  
Peningkatan Fungsi Aplikasi SIPKD

**20.8.7. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 123.970.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 114.329.530,- atau 99,22%. Keluaran kegiatan adalah Terselenggaranya sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018.



Gambar 20.89  
Sosialisasi Permendagri tentang  
Pedoman Penyusunan APBD



- 20.8.8. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.855.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 31.855.000,- atau 63,90%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2017.



Gambar 20.90  
Penyusunan dan Penataan Arsip  
SP2D

- 20.8.9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 228.908.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 179.121.682,- atau 78,25%. Keluaran kegiatan adalah jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat.



Gambar 20.91  
Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintahan  
Daerah

- 20.8.10. Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.853.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 26.978.300,- atau 62,96%. Keluaran kegiatan adalah proses/tahapan pengalihan asset milik kab/kota ke pemerintah provinsi atau sebaliknya dalam rangka implementasi UU. No. 23 Tahun 2014.



Gambar 20.92  
Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil  
Pajak dan Bukan Pajak

**20.8.11. Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 267.507.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 256.762.464,- atau 95,98%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya fungsi aplikasi SIMDA.



Gambar 20.93  
Peningkatan Fungsi Pelayanan  
Aplikasi SIMDA

## **20.9. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

**20.9.1. Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 257.435.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 230.222.000,- atau 89,43%. Keluaran kegiatan adalah evaluasi Raperda kab/kota tentang APBD TA. 2018 dan Raperkada tentang penjabaran APBD TA. 2018.



Gambar 20.94  
Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota  
tentang APBD TA. 2018

**20.9.2. Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota** tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.465.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 68.465.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah evaluasi Raperda kabupaten/kota dan Peraturan bupati/walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Gambar 20.95  
Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota  
tentang Perubahan APBD TA. 2017

**20.9.3. Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 127.447.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 121.540.200,- atau 95,36%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.96  
Rapat Koordinasi Pembinaan  
Keuangan Pemerintah  
Kabupaten/Kota

## 20.10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

**20.10.1. Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 207.351.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 202.405.900,- atau 97,62%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) tahun 2017.



Gambar 20.97  
Penyusunan Harga Satuan Barang  
dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

**20.10.2. Penghapusan Barang Milik Daerah dilaksanakan** oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 273.821.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 229.029.799,- atau 83,64%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya penghapusan barang-barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.98  
Rapat Penghapusan Barang Milik Daerah

- 20.10.3. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 217.615.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 154.643.200,- atau 71,06%. Keluaran kegiatan adalah kartu inventaris barang (KIB), buku inventaris (BI) dan daftar mutasi barang tahun 2016 serta laporan barang semester pertama tahun 2017.



Gambar 20.99  
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- 20.10.4. Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 112.731.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 83.417.010,- atau 74%. Keluaran kegiatan adalah pengamanan dan pengawasan terhadap barang milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.100  
Pengamanan Barang Milik Daerah



- 20.10.5. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Barang Milik Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 63.591.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 56.991.200,- atau 89,62%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Barang Milik Daerah.



Gambar 20.101  
Sosialisasi Permendagri tentang  
Pedoman Barang Milik Daerah

- 20.10.6. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.902.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 31.493.000,- atau 85,34%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.



Gambar 20.102  
Penyusunan Rencana Kebutuhan  
Barang Milik Daerah dan Rencana  
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik  
Daerah

**20.11. Program Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain**

- 20.11.1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.000.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp 73.628.336,- atau 95,62%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Samsat Corner.



Gambar 20.103  
Operasional Samsat Corner

- 20.11.2. Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 451.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 387.748.335,- atau 85,82%. Keluaran kegiatan adalah beroperasi dan terp eliharanya sisteminformasipajakdaerah.



Gambar 20.104  
Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah

- 20.11.3. Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 440.040.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 428.928.700,- atau 97,47%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya operasional Samsat keliling.



Gambar 20.105  
Operasional Samsat Keliling

- 20.11.4. Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi Terkait** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.940.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 47.383.400,- atau 76,50%%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait yang menghasilkan kesepakatan pemungutan PKB dan BBNKB.



Gambar 20.106  
Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB  
dengan Instansi Terkait

- 20.11.5. Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB** dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 79.393.540,- atau 90,02%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya peraturan gubernur tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.



Gambar 20.107  
Penyusunan Pergub tentang Dasar  
Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun  
2017

- 20.11.6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 288.170.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 260.967.558,- atau 90,56%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya intensifikasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.



Gambar 20.108  
Intensifikasi dan Ekstensifikasi  
Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

- 20.11.7. Rapat Kerja Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar 19.770.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.950.000,- atau 95,85%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya rakernis retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.



Gambar 20.109  
Rapat Kerja Retribusi Daerah dan  
Pendapatan Lain-lain

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Dalam kegiatan-kegiatan untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dengan beralihnya system aplikasi pengelolaan keuangandari SIPKD ke SIMDA, masih terdapat kendala-kendala dalam menjalankan aplikasi tersebut.
2. Dalam kegiatan-kegiatan untuk Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota ini koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Perda tentang pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten/Kota masih dirasakan perlunya ditingkatkan lagi.
3. Dalamkegiatan-kegiatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah ini yakni kurangnya SDM dan kerjasama antar OPD dalam mengelola barang/asset, terutama yang berkaitan dengan asset tetap.
4. Dalam kegiatan-kegiatan Program PenerimaanPajak Daerah ini untuk memaksimalkan penerimaan daerah ada kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan kurangnya gairah masyarakat dalam membayar pajak.

**Solusi**

1. Dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dikarenakan aplikasi pengelolaan keuangan baruberalih dari SIKPD ke SIMDA, maka diperlukan kerjasama dari semua stakeholder yang terlibat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Untuk berhasilnya program ini harus perlu koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga evaluasi APBD dan pemantauan bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik.
3. Adapun solusi yang harus diambil yaitu dengan menambah SDM serta perlunya koordinasi dan kerjasama antar SKPD.
4. Adapun solusi yang harus diambil yaitu perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aparaturnya pelaksana di masing-masing UPT DPPKAD dan diadakan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak.



## 20.12 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- 20.12.1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.256.525.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 11.694.975.560,- atau 67.77 %. Keluaran kegiatan ini adalah disahkannya 17 (Tujuh Belas ) Raperda menjadi Perda untuk tahun 2017.



Gambar 20.110  
Pembahasan Raperda Keolahragaan  
Tim Pansus DPRD Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung dengan KONI DKI  
Jakarta



Gambar 20.111  
Pembahasan Raperda Keolahragaan  
Tim Pansus DPRD Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung dengan Dinas  
Olahraga dan Pemerintah Daerah DKI  
Jakarta.

- 20.12.2. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 554.749.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 497.170.510,- atau 89.62%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Rapat-rapat Paripurna selama tahun 2017.



Gambar 20.112  
Rapat Paripurna Penyampaian RKUA-  
PPAS di Kantor DPRD Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 20.113  
Rapat Paripurna LKPJ bersama  
anggota DPRD Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung

- 20.12.3. Kegiatan Reses** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.424.100.000,-,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.352.764.800,- atau 18.22 %. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat dari setiap daerah pemilihan (dapil) sebanyak 1 kali masa reses di 6 (enam) Dapil.



**Kendala :**

Pelaksanaan kegiatan reses diagendakan satu kali permasa sidang dalam satu tahun terdapat tiga kali masa siding, jadi dalam satu tahun dianggarkan tiga kali reses, namun pelaksanaannya tergantung pada penjadwalan kegiatan DPRD oleh Banmus tahun 2017 terlaksana satu kali

**Solusi :**

Setiap satu kali masa siding secretariat DPRD merancang jadwal untuk diadakan reses namun keputusan tetap pada keputusan Banmus

- 20.12.4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.995.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.987.254.843,- atau 99,72%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis sebanyak 7 ( Tujuh ) dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD selama tahun 2017 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.



- 20.12.5. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.695.910.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 34.483.564.727,- atau 93.97%. Keluaran kegiatan ini adalah

terlaksananya kunjungan kerja oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi DPRD selama 12 bulan.



- 20.12.6. Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se-Indonesia** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 478.390.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 141.927.760,- atau 29,67%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi asosiasi Pimpinan DPRD se-Indonesia selama tahun 2017 yang dipimpin oleh DPRD Provinsi Banten.



Kendala :

Jadwal pelaksanaan sudah ditetapkan sekretariat ADPSI sehingga pelaksanaan sudah terjadwal

Solusi :

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa melaksanakan atau menghadiri kegiatan ADPSI berdasarkan undangan yang disampaikan sekretariat ADPSI.

- 20.12.7. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.729.390.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 547.310.900,- atau 75.03%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya tenaga ahli dan kegiatan akademik untuk 7 (tujuh) Fraksi, serta terhimpunnya laporan Tenaga Ahli Fraksi semester I dan II Tahun 2017 .



Gambar 20.122  
Rapat Intern Fraksi Dengan Staf Ahli di  
Salah Satu Fraksi di DPRD Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 20.123  
Kegiatan Staf Ahli di Salah Satu Fraksi  
di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

- 20.12.8. Kegiatan Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.223.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.085.222.812,- atau 93,97%. Keluaran kegiatan ini adalah terjalinnnya hubungan kelembagaan antara DPRD dengan masyarakat antara lain melalui tersebarnya informasi kegiatan DPRD, liputan siaran paripurna, pesan advertorial anggota DPRD di media masa, dan spanduk untuk mensosialisasikan kegiatan serta menyampaikan ucapan dari anggota DPRD.



Gambar 20.124  
Salah Satu Spanduk Ucapan Selamat  
HUT RI ke-71 dari DPRD Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 20.125  
Salah Satu Produk Berupa Majalah  
Informasi Kegiatan Anggota DPRD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **20.13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 20.13.1.** Kegiatan Pembahasan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 326.859.858,- atau 86.47%. Keluaran kegiatan ini adalah



dihasilkannya Perda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2017.



- **Kendala dan Solusi**

**Kendala**

Dalam tahun 2017 terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas di sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dari para anggota DPRD. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Tidak bisa diprediksi dengan tepat berapa kali paripurna dalam satu tahun, sehingga biaya yang dikeluarkan selama satu tahun paripurna terdapat sisa.
2. Mekanisme/tata cara tenaga ahli fraksi dan tim ahli pimpinan belum dibuat aturan pergubnya.
3. Pertanggungjawaban keuangan belanja reses menjadi kendala pada saat pelaksanaan jauh di desa/pulau sehingga sulit untuk mendapatkan belanja yang akan dipertanggungjawabkan.

**Solusi**

1. RKT yang disusun harus tepat dan tidak melenceng dari rencana kerja tahunan tersebut serta agar penyusunan jadwal DPRD per bulan dapat disesuaikan dengan RKT yang telah dibuat.
2. Perlu adanya peraturan yang mengatur tata cara/mechanisme pelaksanaan kegiatan.
3. Perlu adanya peraturan yang mengatur tata cara pertanggungjawaban belanja reses secara khusus.



## 20.14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

**20.14.1 Kegiatan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya** dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.049.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 30.875.000,- atau 70,09%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan Sanggar Tari Bangka Belitung di Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).



**20.14.2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan Dalam Anggaran Perubahan** dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.999.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 75.700.000,- atau 90,12%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Pakaian Adat dan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan untuk diletakkan pada Ruang Pameran pada Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di TMII.



- 20.14.3 Kegiatan Bulan Promosi 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung** dalam anggaran perubahan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.455.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 95.455.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Bulan Promosi 7 (tujuh) kabupaten/kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).



- 20.14.3. Kegiatan Parade Kesenian dan Kebudayaan Daerah** dalam anggaran perubahan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.009.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 188.909.800,- atau 99,95%. Keluaran kegiatan adalah keikutsertaan pada acara Gelar

Citra Budaya Tradisi, Acara Pawai Budaya, Parade Busana Daerah, Festival Kuliner, Ekspo Indonesia di TMII.



## 20.15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

**20.15.1. Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat** dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 723.873.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 617.008.500,00 atau 85,24%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat di Anjungan Terpadu Taman Mini Indonesia Indah (TMII).



- 20.15.2. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya** dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 286.920.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 272.402.750,00 atau 94,94%. Keluaran kegiatan adalah terciptanya pelayanan kedinasan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya pada seluruh wilayah Indonesia.



- 20.15.3. Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokoler di Jabodetabek dalam anggaran perubahan** dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.070.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 401.050.000,00 atau 80,20%. Keluaran kegiatan adalah terciptanya pelayanan kedinasan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya pada seluruh wilayah Indonesia.



#### **Kendala dan Solusi :**

##### **Kendala :**

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2017 relatif tidak ada kendala yang berarti.



## 20.15. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- 20.15.1 Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.909.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 184.833.988,- atau 98,89%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Proses Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di 5 Kabupaten/Kota.



- 20.15.2 Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kab/Kota** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.633.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 13.803.000,- atau 94,33%. Keluaran kegiatan ini adalah Terwujudnya Segmen Batas Daerah yaitu 1 (Satu) Segmen Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.



## 20.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 20.16.1. Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.461.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 189.575.110,- atau 99,53%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya Kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



sebanyak 2 Kesepakatan. Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sebanyak 2 kali. Rapat Koordinasi I dilaksanakan di Ruang Mahligai Rumah Dinas Gubernur yang dihadiri Menteri Dalam Negeri pada tanggal 03 Februari 2017. Rapat Koordinasi II dilaksanakan di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat pada tanggal 19–20 Oktober 2017 yang dihadiri Gubernur dan Bupati/ Walikota beserta perangkat-perangkatnya.



- 20.16.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.614.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 214.756.170,- atau 94,77%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebanyak 1 Dokumen dan Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan IKK LPPD sebanyak 50 orang peserta yang berasal dari SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 01 s.d 02 Februari 2017 di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang.



- 20.16.3. Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.545.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 160.113.700,- atau 99,73%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.139  
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota

## 20.17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**20.17.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.414.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 57.078.100,- atau 91,45%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 Kali. Rapat Koordinasi dihadiri Stakeholder terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2017 di Aula Graha Najar Praja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.140  
Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 20.18. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- 20.18.1. Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan Dalam Rakor/Rakernas APPSI** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 268.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 265.591.431,- atau 98,81%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Keikutsertaan Provinsi Dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indones (APPSI).



- 20.18.2. Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan Dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.980.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 218.130.694,- atau 99,16%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan.



- 20.18.3. Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.418.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 129.534.442,- atau 91,60%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Pertemuan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah dari Pihak Ketiga di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 (Satu) Kali yang dilaksanakan di Sun Hotel Pangkalpinang pada tanggal 16-17 Mei 2017 yang menghasilkan 8 Rekomendasi.



## 20.19. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

**20.19.1. Kegiatan Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.364.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 66.919.250,- atau 97,89%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Penataan Urusan Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 urusan.



## 20.20. Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada

**20.20.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pilgub 2017** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.680.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 94.757.561,- atau 97,01%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur di 7 (Tujuh) Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





Gambar 20.145  
Koordinasi Penyelenggaraan Pilgub 2017

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Belum adanya kesepakatan batas wilayah antara kabupaten/kota khususnya kabupaten/kota yang ada di Pulau Bangka.
2. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Rakor Gubernur dikarenakan rasionalisasi anggaran
3. Dokumen pendukung terkait capaian kinerja untuk masing-masing urusan dari beberapa SKPD dalam penyampaian LPPD kurang lengkap
4. Terdapat beberapa urusan pemerintahan yang belum disajikan capaian kinerjanya dalam LPPD, Simda Keuangan belum dapat menyajikan rincian anggaran dan realisasi SKPD per urusan.
5. Adanya perbedaan capaian kinerja antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi.
6. Belum diteruskannya aset Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) muara Sungai Baturusa oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi kewenangan provinsi sesuai amanat Undang-undang
7. Belum dilaksanakannya validasi dan audit terhadap aset, dokumen dan pendanaan (P3D) beberapa urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

**Solusi**

1. Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi kesepakatan batas wilayah antara kabupaten/kota khususnya kabupaten/kota yang ada di Pulau Bangka.
2. Agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan rasionalisasi anggaran kegiatan yang menjadi prioritas.
3. SKPD agar akomodatif dalam penyajian data/dokumen pendukung yang diperlukan penyusunan LPPD.
4. Diharapkan perbaikan terhadap Simda Keuangan agar berbasis akrual secara keseluruhan lebih lanjut, Laporan Keuangan pelaksanaan anggaran disampaikan tepat waktu, mengingat keterlambatan Laporan sangat mempengaruhi proses evaluasi diantaranya Opini BPK.
5. Agar SKPD dapat meminimalisir perbedaan capaian kinerja antara data yang disajikan dalam LPPD dan hasil evaluasi dengan cara menyajikan data yang lebih valid.



6. Mengirimkan surat kepada Walikota Pangkalpinang untuk segera menyerahkan asset Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) muara Sungai Baturusa ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke sesuai amanat Undang-undang.
7. Mengusulkan kegiatan validasi dan audit terhadap asset, dokumen dan pendanaan (P3D) urusan yang dialihkan dari Pemerintah Kabupataen/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018.

## 20.21. Peningkatan kehidupan Beragama Terhadap Kehidupan Beragama

- 20.20.1. Kegiatan Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 625.100.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 568.502.000,00 atau 90,95 %. Keluaran terselenggaranya safari ramadhan di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.21.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.848.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 765.299.400,00 atau 90,18 %.Keluaran Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji.



- 20.21.3. Kegiatan Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/ MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 813.319.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 523.994.320,00 atau 64,43%. Keluaran Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.21.4. Kegiatan Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.530.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 739.531.000,00 atau 99,87 %.Keluaran STQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.21.5. Kegiatan Pendampingan Jamaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 504.080.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 427.276.439,00 atau 93,69 %. Keluaran Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD.



- 20.21.6 Kegiatan Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.891.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.812.401.700,00 atau 97,26 %.Keluaran Bantuan biaya Transportasi Domestik Jamaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.21.7. Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pada Hari Jumat** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.030.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 207.339.000,00 atau 99,67 % . Keluaran Terselenggaranya Safari Jumat di 7 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.21.8. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 644.750.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 527.512.926,00 atau 81,82%. Keluaran Terlaksananya Ceramah Agama.





- 20.21.9 Kegiatan Sinkronisasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.005.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 15.355.000 atau 69,78%.Keluaran Tercapainya kesepakatan dalam pengimplementasian Kegiatan Provinsi dengan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## **20.22 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 20.22.1. Kegiatan Evaluasi dan Analisis Proposal Bantuan Sosial dan Hibah** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.330.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 127.241.690,00 atau 94,02% . Keluaran Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bantuan Sosial dan Hibah.





- 20.22.2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.050.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 136.019.675,00 atau 97,82%. Keluaran Monitoring dan Evaluasi Penerimaan bantuan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## **20.23. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

- 20.23.1. Kegiatan Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.240.180.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.199.068.000,00 atau 96,68%. Keluaran Rangkaian acara HUT RI .



- 20.23.2. Kegiatan Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.046.630.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 707.121.350,00 atau 67,56%.Keluaran Rangkaian Acara HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## **20.24. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- 20.24.1. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 334.090.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 247.007.000,00 atau 82,02 %. Keluaran TP UKS.



**Permasalahan dan Solusi :**

**Permasalahan :**

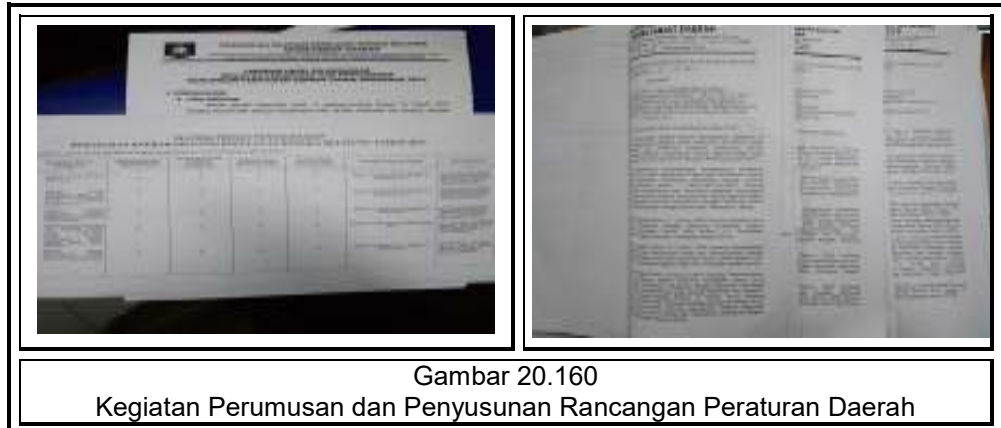
- Masih kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat
- Minimnya dana yang tersedia.

**Solusi :**

- Adanya upaya penambahan sumber daya manusia
- Adanya penambahan dana .

## 20.25. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

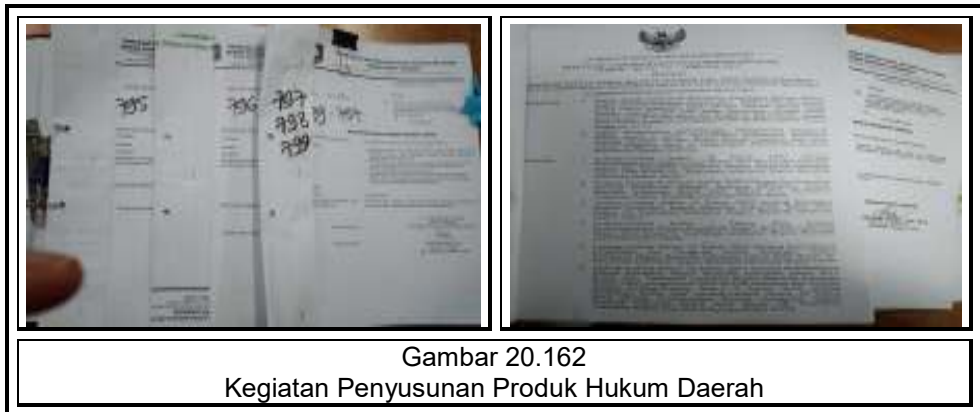
- 20.25.1. Kegiatan Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 305.450.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 227.414.500,- atau 74,45%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan daerah sebanyak 12 (dua belas) Peraturan Daerah.



- 20.25.2. Kegiatan Sosialisasi Perda** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 94.200.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 64.808.000,- atau 68,80%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Perda selama 2 (dua) hari dengan peserta dari aparatur pemerintah daerah dan masyarakat berjumlah 52 (lima puluh dua) orang.



- 20.25.3. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 233.706.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 227.480.836,- atau 97,34 %. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya produk hukum daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2012 Produk Hukum Daerah dari target

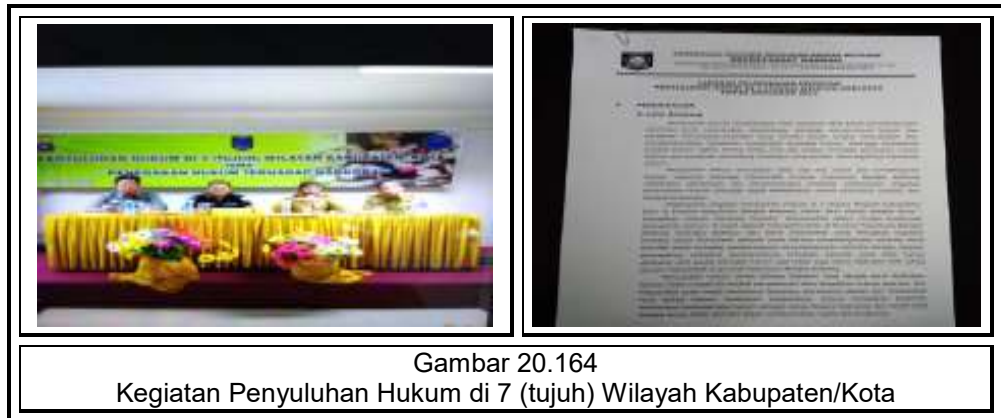


**20.25.4. Kegiatan Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 153.572.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 151.525.300,- atau 98,67 %. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi antara Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait lainnya sebanyak 1 (satu) kali selama 2 (dua) hari dengan jumlah peserta sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.

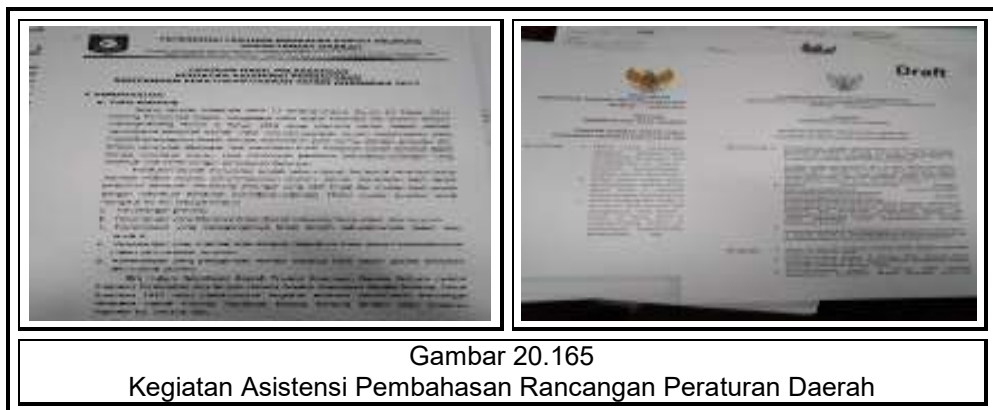


**20.25.5. Kegiatan Penyuluhan Hukum di 7 (tujuh) Wilayah Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 343.035.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 335.740.600,- atau 97,87 %. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya Penyuluhan Hukum di 7 (tujuh) Wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah peserta 315 (tiga ratus lima belas) orang.

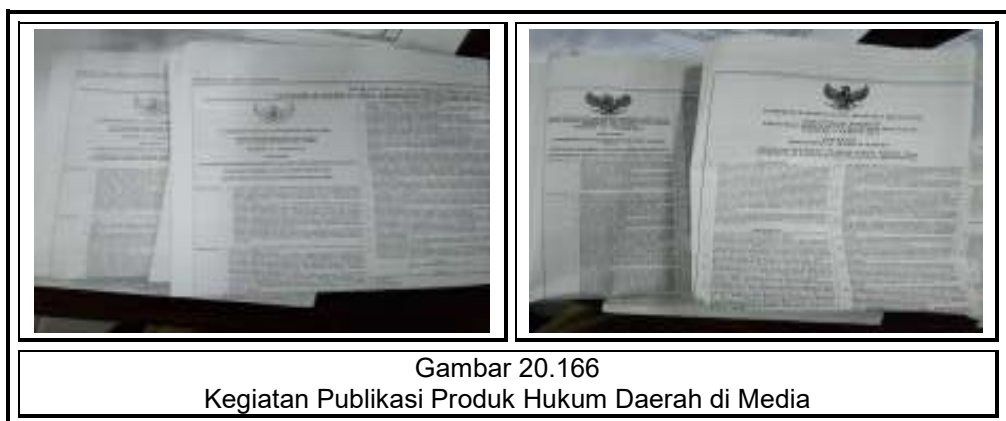




**20.25.6. Kegiatan Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 319.096.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 294.502.079,- atau 92,29 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) Raperda.

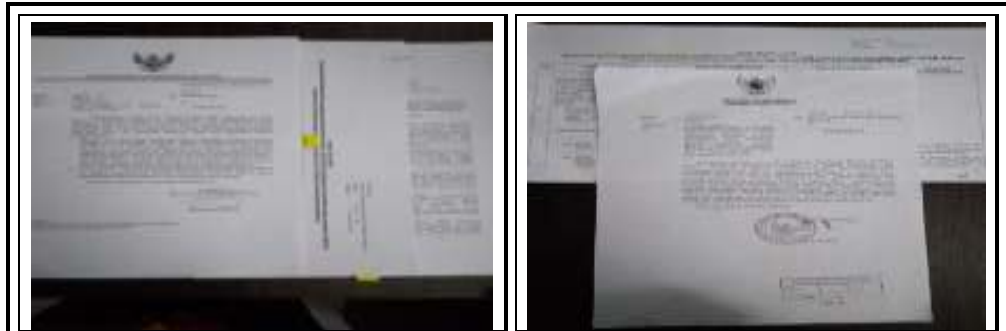


**20.25.7. Kegiatan Publikasi Produk Hukum Daerah di Media** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 210.170.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 209.870.000,- atau 99,86 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya publikasi produk hukum daerah di media sebanyak 11 (sebelas) produk hukum daerah.



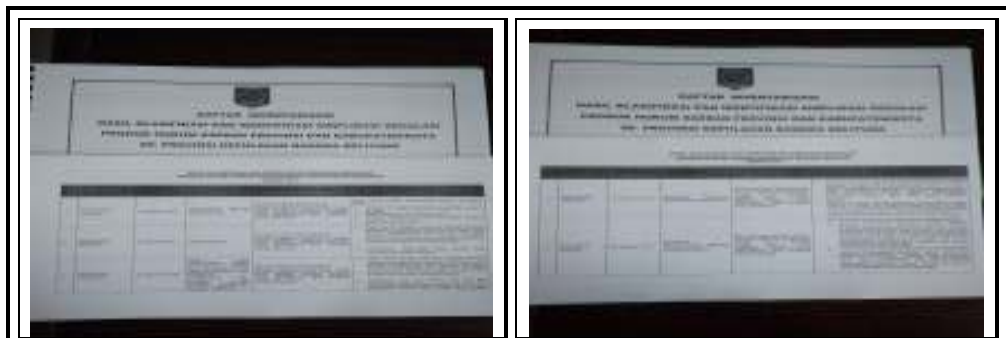
## **20.26. Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota**

**20.26.1. Kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 138.850.000-. Realisasi anggaran sebesar Rp 127.090.520,- atau 91,53 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota sebanyak 13 (tiga belas) Raperda.



Gambar 20.167  
Kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota

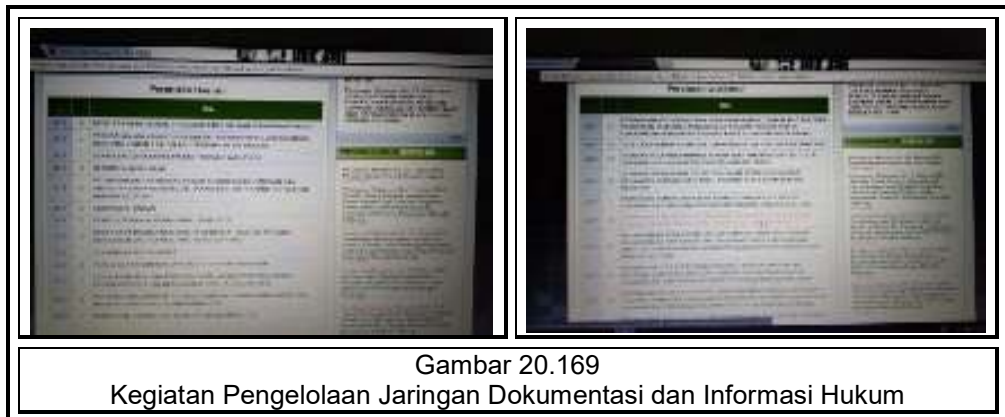
**20.26.2. Kegiatan Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.450.000-. Realisasi anggaran sebesar Rp 64.358.060,- atau 98,33%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 30 (tiga puluh) Produk Hukum Daerah.



Gambar 20.168  
Kegiatan Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

## 20.27. Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

**20.27.1. Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.860.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 42.738.400,- atau 99,72 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui pengisian konten pada website <http://www.jdih.babelprov.go.id> sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Produk Hukum Daerah.



**20.27.2. Kegiatan Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2016** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 54.280.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 52.463.440,- atau 96,65 %. Keluaran kegiatan adalah tersedianya buku Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2016 sebanyak 100 (seratus) buku.



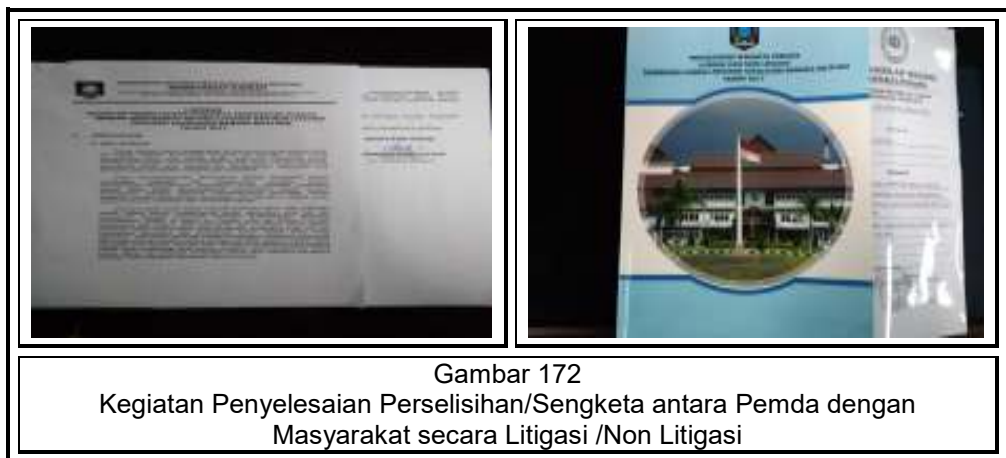
**20.27.3. Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2017** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.950.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 28.940.320,- atau 93,51 %. Keluaran kegiatan adalah tersedianya buku arsip Produk Hukum Daerah Tahun 2017 sebanyak 90 (Sembilan puluh) buku.



Gambar 171  
Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2017

## 20.28. Program Bantuan Hukum

**20.28.1. Kegiatan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa antara Pemda dengan Masyarakat secara Litigasi/Non Litigasi** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.000.000-. Realisasi anggaran sebesar Rp 43.865.888 atau 39,88%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyelesaian sengketa Perdata antara Pemda dengan masyarakat secara litigasi/non litigasi sebanyak 1 (satu) kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 1 (satu) kasus masih dalam proses banding.

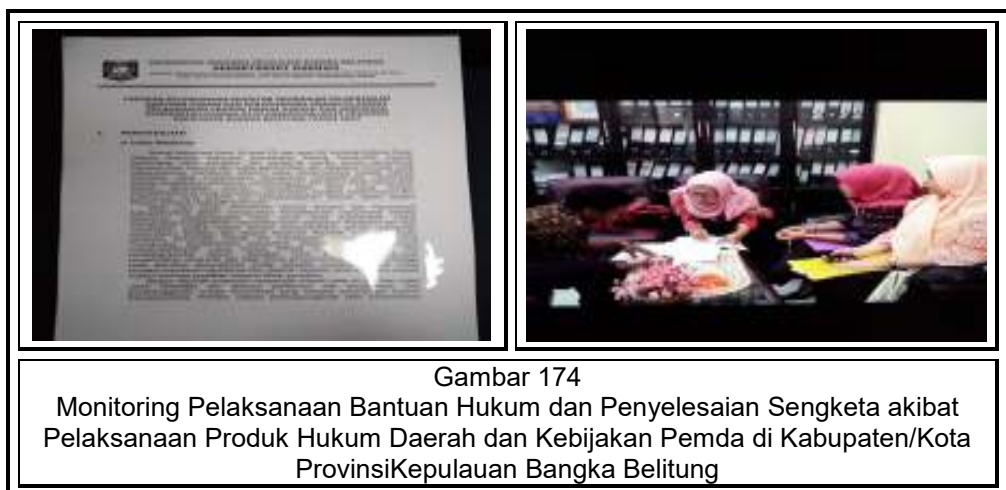


Gambar 172  
Kegiatan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa antara Pemda dengan Masyarakat secara Litigasi /Non Litigasi

**20.28.2. Kegiatan Penyelesaian Sengketa TUN Akibat Pelaksanaan Produk Hukum serta Kebijakan Pemda** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 139.750.000-.Realisasi anggaran sebesar Rp 100.442.745 ,-atau 71,87%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyelesaian sengketa TUN akibat pelaksanaan produk hukum serta kebijakan Pemda yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebanyak 1(satu) perkara.

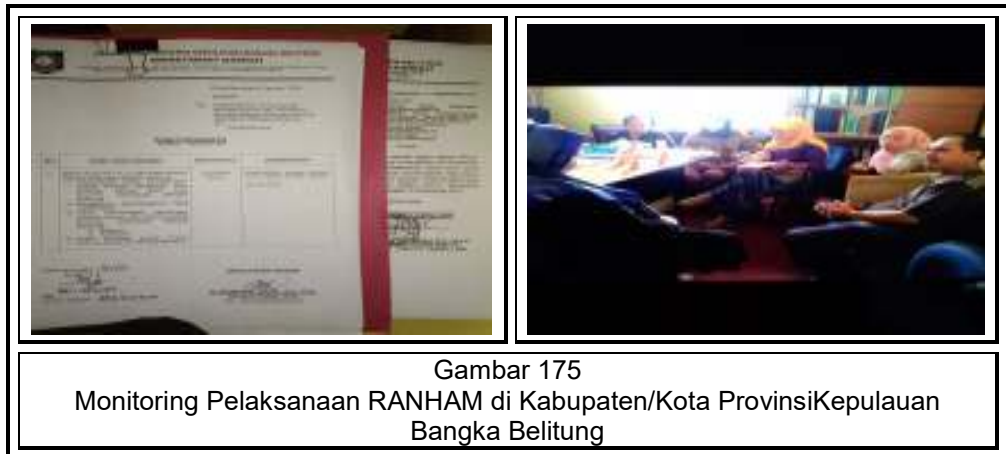


- 20.28.3. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.005.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.382.234,- atau 91,34%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembinaan pelaksanaan bantuan hukum dan sengketa hukum akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

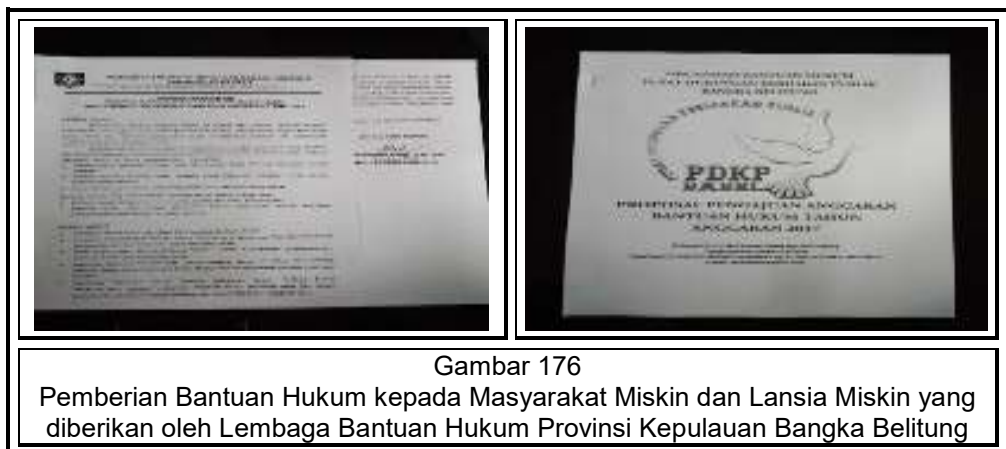


- 20.28.4. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.005.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 77.698.934,- atau 90,34%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya monitoring pelaksanaan RANHAM di 7 (tujuh) wilayah Kabupaten/Kota.





- 20.28.5. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Lansia Miskin yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.700.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.351.600,- atau 76,02%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan lansia miskin melalui Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- **Kendala dan solusi**  
**Kendala**

1. Lambannya hasil evaluasi Raperda tentang Pajak daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menghambat proses evaluasi Raperda Kabupaten /Kota.
2. Terhambatnya proses pengharmonisasian Produk Hukum Daerah dalam hal ini Perda dan Pergub dikarenakan Perangkat Daerah pemrakarsa tidak mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan proses penyusunan Raperda dan Rapergub sehingga rancangan produk hukum daerah yang masuk ke Biro Hukum masih perlu untuk dilakukan penyusunan ulang.

3. Kurangnya tenaga legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyusunan produk hukum daerah.
4. Kurangnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah akan proses legal drafting.
5. Masih kurangnya kuota Pejabat Fungsional tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti Diklat Legal Drafting di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
6. Kurangnya SDM yang berkopeten di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani atau menyelesaikan sengketa pemerintah daerah baik sengketa Tata Usaha Negara maupun sengketa perdata.
7. Lemahnya kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan hasil penyelesaian sengketa Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih dalam proses maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhambatnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyampaikan laporan dan koordinasi kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
8. Kurangnya koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasioal Hak Asasi Manusia antar perangkat daerah kabupaten/kota dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota sehingga dokumen Rencana Aksi Nasioal Hak Asasi Manusia kurang optimal / kurang lengkap.
9. Kurangnya tenaga pranata komputer / arsiparis, pustakawan dan jabatan fungsional umum dalam rangka melaksanakan tupoksi pada Biro Hukum.
10. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
11. Kurangnya kuota diklat jabatan untuk kompetensi tertentu dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas di Biro Hukum.

### **Solusi**

1. Biro Hukum selalu proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh hasil evaluasi Raperda sehingga tidak menghambat pelaksanaan Perda di Kabupaten/Kota
2. Biro Hukum terus berupaya melaksanakan peningkatan terhadap proses penyusunan produk hukum daerah kepada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat menambah tenaga legal drafter khususnya tenaga Penyusun Rancangan undang-undang dan Analisis Hukum.
4. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah agar berperan aktif dalam proses penyusunan produk hukum daerah
5. Biro hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penambahan jumlah kuota peserta Diklat Legal Drafting bagi Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai pemangku jabatan fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Biro Hukum terus berkoordinasi agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menambah SDM yang kompeten dalam menangani penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata.
7. Biro Hukum terus meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa dalam menyelesaikan sengketa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan / melalui Bagian Hukum sehingga Bagian Hukum Kabupaten/Kota memiliki dokumen penyelesaian sengketa.
8. Biro Hukum terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
9. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat menambah tenaga komputer / arsiparis, pustakawan dan jabatan fungsional umum untuk melaksanakan tupoksi pada Biro Hukum.
10. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Biro Umum, Biro Humas dan Protokol dan Dinas Kominfo untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta perpustakaan hukum.
11. Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar menyiapkan diklat kompetensi untuk jabatan tertentu dan biaya kontribusinya.

## 20.29. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

**20.29.1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 126.886.079,-, Pada APBD Perubahan Tahun 2017 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp 125.036.079,-, realisasi anggaran sebesar Rp 122.780.410,- atau 98,20%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyertaan modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.29.2. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 73.340.046,-, Realisasi anggaran sebesar Rp 71.250.390,- atau 97,15%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring BBM dan Gas di 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.29.3. Kegiatan Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 172.846.109,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 154.843.857,- atau 89,58%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.29.4. Kegiatan Koordinasi Program Corporate Social Responsibility** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 176.592.908,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp 169.172.908,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 156.351.820,- atau 92,42%, keluaran kegiatan ini Terkoordinasi Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.29.5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Bidang Produksi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 168.817.506,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp 154.167.506,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 144.206.147,- atau 93,54%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring, evaluasi, koordinasi serta rakor Bidang Produksi Daerah.





- 20.29.6. Kegiatan Forum Koordinasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 117.365.478,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp 582.365.478,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 436.954.840,- atau 75,03%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Proses pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung.



- 20.29.7. Kegiatan Forum Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 88.589.457,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp 61.889.457,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 60.547.220,- atau 97,83%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya fasilitasi pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.29.8. Kegiatan Monev Bagian Perekonomian dan Koperasi oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 66.036.041,-, Realisasi anggaran sebesar Rp 59.652.400,- atau 90,33%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Monev Bagian Perekonomian dan Koperasi.



- 20.29.9. Kegiatan Monev Potensi Investasi 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 85.198.055,-, Realisasi anggaran sebesar Rp 83.614.028,- atau 98,14%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Monev Bagian Perekonomian dan Koperasi.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai.
2. Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas.
3. Belum selarasnya pelaksanaan program dengan SKPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
4. Alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung program dan kegiatan pada Biro Perekonomian.
5. Pengendalian, pengawasan dan koordinasi Biro Perekonomian belum optimal.

**Solusi**

1. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana peralatan kerja pada tahun anggaran berikutnya.
2. Mengusulkan penambahan SDM
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/kota secara berkala dan proaktif.
4. Mengusulkan kembali alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung tupoksi Biro Perekonomian.
5. Meningkatkan pengawasan, koordinasi dan pengendalian pada Biro Perekonomian.

## **20.30. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 20.30.1. Pemberdaya Pengguna Jasa Konstruksi oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.390.821,- realisasi anggaran sebesar Rp. 54.390.821,- atau 100 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis bagi pengguna jasa konstruksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.



Gambar 20.186  
Pemberdaya Pengguna Jasa Konstruksi

- 20.30.2. Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi** oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.785.610,- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.785.610,- atau 100 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pertemuan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota sejumlah 25 (dua puluh lima) orang.



Gambar 20.187  
Pembinaan Jasa Konstruksi

## **20.31 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 20.31.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.290.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 79.554.890,- atau 61,06 %. Keluaran kegiatan adalah buku Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung tahun 2018, RKA dan DPA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.



Gambar 20.188  
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah  
Prov. Kep. Bangka Belitung

- 20.31.2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah** oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.850.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.400.000 atau 68,45 %. Keluaran kegiatan adalah buku Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD dan LKPJ Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.189  
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah  
Prov. Kep. Bangka Belitung

- 20.32. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**

- 20.32.1 Sinkronisasi Percepatan Pembangunan** oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.913.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 88.462.940 atau 98,39 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pertemuan sinkronisasi percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





- 20.32.2 Koordinasi Sistem e-Monev** oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 605.178.193,- realisasi anggaran sebesar Rp. 542.743.915,- atau 89,68 %. Keluaran kegiatan adalah laporan pemantauan realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



#### • **Permasalahan dan Solusi**

##### **Permasalahan**

Salah satu alat/ sarana pengendalian pembangunan terhadap pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung melalui dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui melalui aplikasi Sistem e-Monev APBD dimana kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat di pantau / dimonitoring setiap waktu, namun dari aplikasi tersebut terdapat beberapa kendala yakni :

1. Keterlambatan penginputan oleh Perangkat Daerah melalui petugas Admin e-Monev APBD yang melebihi tanggal 15 bulan berikutnya;
2. Data realisasi fisik dan keuangan kegiatan Belanja Langsung yang diinput masih berdasarkan data pada bulan sebelumnya belum bersifat data *real time*.

##### **Solusi**

1. Dilaksanakan Rapat Pimpinan setiap bulan bersama Gubernur/ Sekretaris Daerah untuk memberikan teguran kepada Pejabat

- Eselon II Perangkat Daerah agar data e-Monev APBD masing – masing Perangkat Daerah diinput tepat waktu;
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal kerja sama mendapatkan *data base* dari aplikasi SIMDA untuk menarik data secara langsung dan *real time* ke dalam aplikasi e-Monev APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diterapkan pada tahun berikutnya.

## **20.33 Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.**

- 20.33.1 Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 145.556.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 105.214.920,- atau 72,28%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.



### ➤ **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung permasalahannya tim yang dibentuk belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya disebabkan kurangnya pemahaman akan tugas yang menjadi kewajibannya dengan solusi adalah di tahun yang akan datang, tim yang dibentuk terlebih dahulu akan dibekali pengetahuan tentang tugasnya serta dipertegas tentang kewajiban masing – masing anggota tim.

## **20.34. Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah**

- 20.34.1. Kegiatan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 82.828.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 77.333.500,- atau 93,36%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya bimtek perjanjian kinerja dan laporan kinerja pemerintah (LAPKIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 60 peserta.



- 20.34.2. Kegiatan Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 85.175.890,- atau 81,35%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya LAPKIN 2016 dan TAPKIN 2017 sebanyak 2 (dua) dokumen.



- 20.34.3. Kegiatan Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.638.250,- realisasi anggaran sebesar Rp 50.353.000,- atau 75.56%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Monev perjanjian Kinerja dan LAPKIN selama 12 (dua belas) bulan.



Gambar 20.195

Kegiatan Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Kegiatan Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa jenis belanja yang tidak dianggarkan sebelumnya, yang mana hal ini mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang mana diperlukan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), sehingga kegiatan ini baru dapat diselesaikan setelah adanya perubahan pada APBD-P. Untuk kegiatan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dan kegiatan Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada permasalahan.

**20.35. Program Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Publik dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi**

**20.35.1. Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.708.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 73.646.300,- atau 94,77%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya optimalisasi pencapaian dan pelaporan SPM di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.



Gambar 20.196

Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



- 20.35.2. Kegiatan Audit Pengawasan (Surveilance Audit) Sertifikasi ISO 9001:2008 Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.860.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 69.462.700,- atau 94,05%. Keluaran kegiatan adalah sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) BP2TPM dan unit layanan terpadu (UPT) DPPKAD wilayah Kabupaten Bangka (samsat Bangka) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.35.3. Kegiatan Pengadaan Software Aplikasi Laporan Kinerja** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 218.489.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 43.509.030,- atau 19,91%. Keluaran kegiatan adalah aplikasi e-Sakip sebanyak 1 (satu) paket.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Kegiatan Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi System Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada Unit Pelayanan Tepadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (samsat pangkalpinang) tidak dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran pada APBD sebesar Rp 331.760.000,-. Solusinya pada APBD-P diadakan perubahan menjadi Rp 00,00 dikarenakan kegiatan dimaksud pada waktu penyusunan anggaran tidak tercantum dalam PPAS 2017, Kegiatan Pengadaan Software Aplikasi Laporan Kinerja masih dalam tahap persiapan dan belum bisa di realisasikan di Tahun 2017, karena untuk penerapan aplikasi e-Sakip sendiri perlu pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kegiatan Audit Pengawasan (Surveilance Audit) Sertifikasi ISO 9001:2008 Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD tidak ada permasalahan.

## **20.36. Program Penguatan Tata Kelola SKPD dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi**

- 20.36.1. Verifikasi dan Validasi (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 82.587.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 63.820.100,- atau 77,28%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Verifikasi dan Validasi (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



➤ **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Kegiatan Verifikasi dan Validasi (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung permasalahannya masih kurangnya partisipasi aktif dari Perangkat Daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi SOP yang ada di Perangkat Daerah nya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku SOP harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Solusi di masa yang akan datang lebih ditekankan kepada Perangkat Daerah untuk lebih aktif memverifikasi dan memvalidasi SOP Perangkat daerahnya.

## **20.37. Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi**

- 20.37.1. Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 130.848.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 97.242.290,- atau 74,32%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyusunan draft rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



➤ **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Kegiatan Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

**20.38. Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam Rangka Penguatan reformasi Birokrasi**

**20.38.1. Semula “Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 “ menjadi “ Kegiatan Review Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pemprop Babel** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 64.480.670,- atau 64,48%. Keluaran kegiatan adalah pengumpulan data pelaksanaan peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.38.2. Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.619.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 47.242.900,- atau 91,52%. Keluaran kegiatan adalah buku profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.



- 20.38.3. Semula Validasi Analisa Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Penyusunan Analisa Beban kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 109.728.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 76.817.000,- atau 70,00%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyusunan analisa beban kerja PNS/ASN perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.



- 20.38.4. Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprop Kep Babel** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.198.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 57.080.180,- atau 53,24%. Keluaran kegiatan adalah terselenggarakannya pelaksanaan

bimbingan teknis standar kompetensi teknis PNS pada perangkat daerah Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.38.5. Semula Validasi dan Penetapan Hasil Analisis jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “ Menjadi Penyusunan Analisis Jabatan PNS pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.990.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 89.398.000,- atau 80,55%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyusunan analisa beban kerja PNS/ASN perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.



#### **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Kegiatan – kegiatan pada Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi tidak terdapat permasalahan. Hanya untuk Bimtek penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprop Kep Babel realisasi kegiatan sebesar 45.799.000 atau 42,73% dengan demikian terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp 61.399.000,- atau 57,27%. Solusi di masa yang akan datang, peanggaran kegiatan akan disusun secara lebih cermat



**20.39. Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi**

**20.39.1 Pembinaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 82.099.950,- realisasi anggaran sebesar Rp 58.553.400,- atau 71,32%. Keluaran kegiatan adalah terwujudnya pembinaan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.39.2. Rakornis Biro/Bagian Organisasi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43.743.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 40.023.990,- atau 91,50%. Keluaran kegiatan adalah pelaksanaan rakornis Biro/Bagian Organisasi se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.39.3. Forum Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 66.457.410,- atau 83,07%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya rapat komisariat wilayah forum sekretaris daerah wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

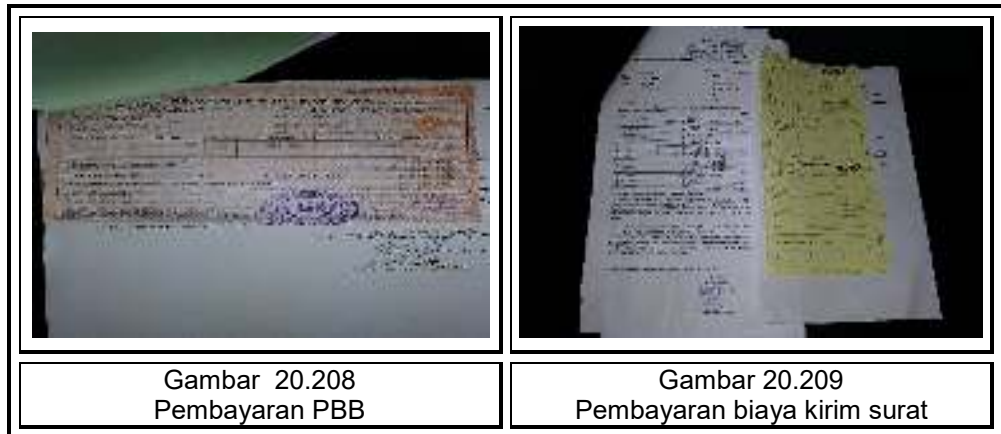


➤ **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Kegiatan – kegiatan pada Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi tidak terdapat permasalahan. Hanya untuk Bimbingan Teknis E-Sakip tidak dilaksanakan dikarenakan Pengadaan Software Aplikasi Laporan Kinerja tidak terlaksana sehingga untuk kegiatan Bimtek pun tidak dapat terlaksana

## 20.40. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**20.40.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** pada Biro Umum dan Perlengkapan di laksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.095.578.412,- realisasi anggaran sebesar Rp 962.761.754,- atau 87,88%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya prangko, materai, dan benda pos lainnya serta jasa pengiriman pos dalam/luar daerah dan pembayaran PBB.



**20.40.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.054.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 3.745.366.850,- atau 92,38% Keluaran kegiatan adalah pembayaran tagihan rekening-rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

**20.40.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.158.255.625,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.155.602.375,- atau 99,88%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya jasa sewa sarana mobilitas darat, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa sound system dan sewa panggung dan dekorasi.



- 20.40.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 501.636.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 494.751.250,- atau 98,63%. Keluaran kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan daerah.
- 20.40.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 690.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 687.867.285,- atau 99,69%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Gd kantor Gubernur, Gd PKK dan VIP bandara.
- 20.40.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 435.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 394.917.000,- atau 90,79%. Keluaran perbaikan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat studio dan alat komunikasi.
- 20.40.7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 699.494.925,- atau 99,93%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor kebutuhan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 20.40.8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 600.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 465.978.900,- atau 77,66%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**20.40.9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 175.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 174.831.350,- atau 99,90% Keluaran kegiatan adalah tersedianya lampu kantor dan lampu emergency, stabilizer, kabel box, stekker, baterai kering, stop kontak, saklar dll.

**20.40.10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 189.000.000,- atau 98,44% Keluaran kegiatan adalah tersedianya peralatan dan bahan pembersih, laundry rumah tangga KDH dan WKDH.

**20.40.11. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 108.345.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 55.160.000,- atau 50,91%. Keluaran kegiatan adalah pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas serta galon air minum untuk kantor dan rumah jabatan.

**20.40.12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.840.637.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 4.819.021.074,- atau 99,55%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan-kegiatan pelayanan tamu, rapat dan acara-acara atau pun event/agenda-agenda kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**20.40.13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.650.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 6.106.524.927,- atau 91,83%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi langsung ke luar daerah dan kunjungan kerja ke luar negeri.



- 20.40.14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.788.946.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 5.722.800.000,- atau 99,72%. Keluaran kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran honorarium pegawai Non PNS penunjang pengelolaan administrasi perkantoran.
- 20.40.15. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.075.802.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.653.445.793,- atau 79,65%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya fasilitas tamu-tamu pemerintah provinsi (transportasi dan akomodasi hotel, makanan/snack).
- 20.40.16. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,- namun pada Perubahan APBD TA.2017 kegiatan tersebut dihapus dikarenakan tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Daerah.
- 20.40.17. Kegiatan Rumah Dinas Gubernur** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.299.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 2.275.920.000,- atau 99,00%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (meja, kursi, sound system, panggung, dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang pelayanan kegiatan di rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda.
- 20.40.18. Kegiatan Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bogenvil)** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.394.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.168.578.955,00,- atau 83,80%. Keluaran kegiatan adalah penyediaan penunjang pengelolaan wisma Bougenvile untuk menjaga kebersihan, kenyamanan dan pelayanan bagi pengunjung wisma Bougenvile.



Gambar 20.215  
Pengadaan Mesin Cuci



Gambar 20.216  
Pengadaan Televisi

**20.40.19. Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah SKPD Sekretariat Daerah** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.600.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.334.352.938,- atau 80,40%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kunjungan ke Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**20.41. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**20.41.1. Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.135.560.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.034.840.000,- atau 95,26%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengadaan kendaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



**20.42.2. Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/operasional** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.800.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.728.882.500,- atau 97,46% Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengadaan kendaraan operasional tamu pada Sekretariat Daerah.



**20.42.3 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 581.740.000,- realisasi anggaran

sebesar Rp 569.455.000,- atau 97,89%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor.



**20.42.4 Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 528.840.000,00,- realisasi anggaran sebesar Rp 521.778.865,- atau 98,66%. Keluaran kegiatan adalah peralatan dapur, sofa, mesin kopi dan peralatan rumah tangga.



**20.42.5 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 918.426.972,- realisasi anggaran sebesar Rp 872.211.470,- atau 94,97% Keluaran kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor .



- 20.42.6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.159.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp834.781.500,- atau 71,99%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya jasa pemeliharaan taman dan tanaman serta gedung rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah.
- 20.42.7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.608.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.103.302.700,- atau 80,65%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya lift, ledeng, lampu jalan, halaman, listrik, telepon, tanaman, hewan, gedung kantor dan AC.
- 20.42.8 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.008.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 740.214.100 atau 73,38%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya jasa Service, Suku Cadang, BBM, STNK, Ban Mobil dan Accu.
- 20.42.9 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.970.520.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 3.659.612.200,- atau 92,17%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 6, roda 4 roda 3 dan roda 2.
- 20.42.10 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 494.840.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 381.641.500,- atau 77,12%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya secara rutin/berkala rumah dinas Esselon II dilingkungan Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 20.42.11 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 345.560.000,00 ,- realisasi anggaran sebesar Rp 194.574.200,- atau 56,31%. Keluaran



kegiatan adalah terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas KDH, WKDH, dan Sekda Prov. Kep. Babel.

**20.42.12 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 795.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 528.775.400,- atau 66,44%. Keluaran kegiatan adalah pemeliharaan genset kantor dan rumah jabatan/dinas.

**20.42.13 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.628.475.000,- realisasi anggaran sebesar Rp1.523.001.000,- atau 93,52%. Keluaran kegiatan adalah tertatanya ruang kerja Gubernur, Ruang Rapat, ruang tunggu dan taman dilingkungan Kantor Gubernur.



**20.42.14 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.187.012.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.104.867.375,- atau 93,08%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya penghias ruangan rumah tangga, peralatan dapur, AC, Almari, TV, meja makan, tempat tidur, sofa, gorden, kompor gas, dispenser, kulkas, mesin cuci dll.





**20.42.15 Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 841.740.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 832.080.000,- atau 98,85%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

**20.42.16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemprov. Kep.Babel** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 965.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 937.306.000,- atau 97,04%. Keluaran kegiatan adalah Terpeliharanya kebersihan sepanjang jalan dan taman di lingkungan perkantoran milik pemerintah provinsi.

**20.43 Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

**20.43.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 205.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 196.520.000,- atau 95,75%. Keluaran kegiatan adalah pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH.



**20.43.2 Kegiatan Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 251.570.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 246.570.000,- atau 98,01%. Keluaran kegiatan senam kesegaran jasmani pegawai yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**20.44 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**

**20.44.1 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.988.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.936.903.130,- atau 97,42%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/Lembaga/

Lembaga Pemerintah Non Departemen/luar negeri ke Negeri Serumpun Sebalai.



Gambar 20.227  
Kunjungan Tamu Pejabat Negara ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**20.44.2 Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 313.081.792,- atau 44,73%. Keluaran kegiatan adalah kunjungan kerja KDH/WKDH dalam daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 20.228  
Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah ke Kab/Kota

**20.44.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 856.060.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 841.060.000,- atau 98,25%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya kebijakan-kebijakan Provinsi yang akuntabel

- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal dan sulit untuk diprediksi.
2. Belum maksimalnya koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lapangan.
3. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan aparatur dan masyarakat.

**Solusi**

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/pihak penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan anggaran agar dapat mengakomodir keperluan bersifat penting dan mendesak.
3. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang sesuai dengan kondisi lapangan.
4. Melaksanakan pembinaan Internal secara berkala oleh masing-masing atasan langsung.

## 20.45. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**20.45.1. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.348.720.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.303.298.000,- atau 96,63%, sedangkan untuk realisasi kegiatan sebesar 97,83%. Keluaran kegiatan tersebut adalah tersedianya piala, cinderamata, plakat, cetak dokumentasi, cetak undangan, kalender, cetak spanduk dan baleho, cetak cover sambutan gubernur/wakil gubernur.



**20.45.2. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 396.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 362.220.000,- atau 91,44% sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan koran, majalah, buletin dan lain-lain.



#### **20.46 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

- 20.46.1** Sebelumnya Dukungan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah Menjadi Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 567.848.642,- realisasi anggaran sebesar Rp 562.990.548,- atau 99,14%. Keluaran kegiatan adalah dukungan dan fasilitasi publikasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.



#### **20.47. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 20.47.1. Sosialisasi dan Pengelolaan PPID**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.241.300,- realisasi anggaran sebesar Rp 48.234.300,- atau 97,95% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya sosialisasi dan pengelolaan PPID serta terbentuknya PPID Pembantu di tiap – tiap SKPD.



#### **20.48. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

- 20.48.1 Kegiatan Publikasi dan Siaran** dilaksanakan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 977.100.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 949.464.558,- atau 97,17% dengan realisasi fisik 97,50%. Keluaran kegiatan adalah



terlaksananya publikasi dan siaran baik melalui media cetak, elektronik dan IT dan penerbitan majalah provinsi.



**20.48.2 Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)** dilaksanakan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 64.435.680,- realisasi anggaran sebesar Rp 60.435.680,- atau 93,79%. Keluaran kegiatan adalah Pencetakan booklet dan leaflet dan Honorarium Tim Pengelola PPID.



• **Permasalahan dan Solusi**

**Kendala :**

1. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan publikasi dan siaran, sehingga kurang maksimalnya kegiatan publikasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Terbatasnya anggaran untuk Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID), menyebabkan belum maksimalnya fungsi PPID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Solusi :**

1. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat melalui media massa/cetak elektronik dan IT maka perlu meningkatkan anggaran kegiatan publikasi dan siaran.

2. PPID memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi mengenai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk itu perlu diperkuat selain SDMnya, perlu adanya peningkatan untuk anggaran kegiatannya.

## 20.49. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH

**20.49.1 Kegiatan Penerapan Pelelangan Secara Elektronik** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.102.100.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.054.752.404,- atau 95,70 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengadaan barang/Jasa secara elektronik melalui LPSE sebanyak 112 paket kegiatan yang dilelangkan terdiri dari 103 paket kegiatan APBD dan 9 paket APBN.



Gambar 20.235  
Sosialisasi Penyusunan Rencana  
Umum Pengadaan kepada Pengguna  
Anggaran OPD



Gambar 20.236  
Pelatihan dan Pengenalan Aplikasi  
SPSE kepada Pengguna dan  
Penyedia

### ➤ Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Pengelola LPSE.

**20.49.2. Kegiatan Rakernas LPSE** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 379.810.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 351.001.004,- atau 92,41%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Rakernas LPSE Provinsi yang diikuti oleh 170 orang peserta.



Gambar 20.236  
Kepala LKPP dan Wakil Gubernur  
Kepulauan Bangka Belitung pada  
Acara Rakernas LPSE Provinsi 2017



Gambar 20.237  
Peserta Rakernas LPSE Provinsi  
Tahun 2017 pada Acara "Deklarasi  
Laskar Pelangi"

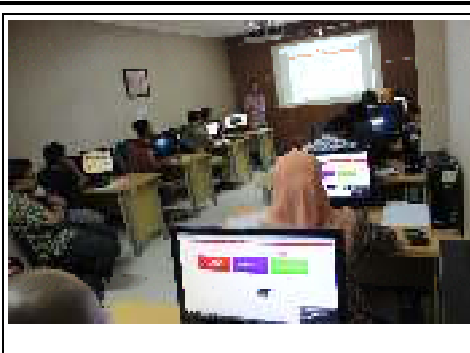
➤ **Permasalahan dan Solusi**

Kegiatan Rakernas LPSE dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

**20.49.2 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.806.675.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.616.750.249,- atau 89,49 %. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya proses pengadaan barang/jasa selama 12 bulan.



Gambar 20.238  
Sosialisasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan kepada Pengguna Anggaran OPD



Gambar 20.239  
Pelatihan dan Pengenalan Aplikasi SPSE kepada Pengguna dan Penyedia

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) oleh PPK di OPD agar lebih memperhatikan kebutuhan teknis dan kemampuan penyedia.

## 22. URUSAN WAJIB SOSIAL

### 22.1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

**22.1.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.392.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 164.320.950,- atau 95,87% realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) yang Dibina dan Dikembangkan;
- Jumlah SDM (Relawan Bencana) yang mendapat Pelatihan dan pembekalan dalam melakukan Pendampingan Sosial;
- Jumlah Bantuan Darurat yang Diberikan bagi Korban Bencana Alam.



**22.1.2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.852.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.169.300,- atau 69,04 %. Dan realisasi fisik 70 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah Bantuan Darurat Bencana yang diberikan bagi Korban Bencana Sosial;
- Jumlah Bantuan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Bagi Korban Bencana Sosial;
- Jumlah wilayah yang memiliki potensi kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasial sosial;
- Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan.



	
Gambar 22.3 Opsik Gudang	Gambar 22.4 Pemulangan Korban Terlantar (Orang Terlantar)
	
Gambar 22.5 Pertemuan Pelopor Perdamaian	Gambar 22.6 Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)

**22.1.3 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.046.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 179.802.000,- atau 99,86 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah Korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial;
- Jumlah Korban tindak kekerasan yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif;
- Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis.



- 22.1.4 Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 356.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 343.316.900,- atau 96,23%. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :
- Jumlah peserta penerima jaminan Kesejahteraan Sosial;
  - Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola/pelaksana program askessos;
  - Bantuan iuran peserta askessos



- 22.1.5 Kegiatan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.918.840,- realisasi anggaran sebesar Rp. 300.094.700,- atau 92,65%. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya peran dan fungsi Tim PKH baik provinsi dan Kabupaten/kota dalam memfasilitasi program PKH.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Pemberian bantuan tanggap darurat bencana pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial bersifat *on call*, yang berakibat pada banyaknya pagu kegiatan yang tidak terealisasi;
2. Karena tidak adanya permintaan pemulangan orang terlantar (pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial);
3. Adanya Penundaan (Penghapusan Kegiatan) Rasionalisasi Anggaran;
4. Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

**Solusi**

1. Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

## 22.2. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

**22.2.1. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.342.280,- realisasi anggaran sebesar Rp. 239.993.000,- atau 97,82 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelatihan/pembekalan dan bimbingan teknis usaha.



Gambar 22.15  
Bantuan LK3



Gambar 22.16  
Seleksi Calon Penerima UEP

**22.2.2. Kegiatan Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP)** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 530.886.606,- atau 95,85 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah TMP yang dapat terpelihara dengan baik;
- Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya;
- Tersantuninya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan.



Gambar 22.17  
Taman Makam Pahlawan Pawitralaya  
(tampak depan)



Gambar 22.18  
Taman Makam Pahlawan Pawitralaya  
(tampak dalam)

**22.2.3. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 341.380.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 287.125.520,- atau 84,11%. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah Orsos yang dapat dibina dan diberdayakan;
- Jumlah pekerja sosial masyarakat yang diberdayakan;
- Jumlah Karang taruna yang diberdayakan;
- Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui CSR;



e. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Aktif.

	
<p>Gambar 22.19 Seleksi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi</p>	<p>Gambar 22.20 LKS terbaik peringkat 6 nasional 2017, Pilar-Pilar Sosial Berprestasi</p>
	
<p>Gambar 22.21 Bimbingan Teknis Potensi Dunia Usaha</p>	<p>Gambar 22.22 TKSK terbaik peringkat 10 nasional 2017, Pilar-Pilar Sosial Berprestasi</p>

**22.2.4. Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 482.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 465.379.492,- atau 96,42 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kepesertaan yang terlibat dalam peringatan hari pahlawan dan hari HKSAN.

	
<p>Gambar 22.23 Peringatan Hari Pahlawan</p>	<p>Gambar 22.24 Penyerahan Bantuan Kepada Veteran/Janda Veteran</p>



- 22.2.5. Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.672.261.575,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.631.347.550,- atau 97,55 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :
- Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif;
  - Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh pelatihan dan keterampilan berusaha,
  - Jumlah pendamping sosial yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis.



Gambar 22.25  
Sosialisasi Penerima Bantuan Program  
Penanganan Fakir Miskin



Gambar 22.26  
Seleksi Calon Pendamping Sosial  
KUBE



Gambar 22.27  
Bimtek Pendamping Sosial KUBE



Gambar 22.28  
Seleksi Penerima Manfaat



Gambar 22.29  
Bimtek Penerima Manfaat



Gambar 22.30  
Penyerahan Bantuan UEP

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Adanya Penundaan (Penghapusan Kegiatan) Rasionalisasi Anggaran;
2. Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

**Solusi**

1. Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

### 22.3. Program Rehabilitasi Sosial

**22.3.1. Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 362.777.950,- realisasi anggaran sebesar Rp. 324.373.819,- atau 89,41%. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan bantuan stimulan/santunan sosial;
- b. Jumlah lembaga pelayanan lanjut usia yang dapat dibina dan dikembangkan.



Gambar 22.31  
Bimbingan Sosial Bagi Lanjut Usia  
Penerima Manfaat



Gambar 22.32  
Pertemuan Bimbingan Sosial Asistensi



Gambar 22.33  
Pemantapan Petugas Koordinator Dan  
Pendamping Asistensi Sosial Lanjut  
Usia Terlantar (ASLUT)



Gambar 22.34  
Kampanye Sosial Hari Lanjut Usia

	
<p>Gambar 22.35 Pemberian bantuan bahan makanan tambahan bagi lanjut usia terlarat / non potensial</p>	<p>Gambar 22.36 Pemberian bantuan aksesibilitas alat bantu bagi lanjut usia dan rumah ibadah</p>
	
<p>Gambar 22.37 Penyaluran Bantuan Sarana Ibadah bagi Lanjut Usia</p>	<p>Gambar 22.38 Verifikasi/ seleksi dan Monitoring Bedah Rumah Lansia, Bantuan UEP, Penerima Dana ASLUT, Kader RBM, Bimsosmen, Kegiatan Homecare dan Penyaluran Bantuan</p>

- 22.3.2. Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 275.266.680,- realisasi anggaran sebesar Rp. 204.689.580,- atau 74,36%. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :
- Jumlah Pelayanan dan Bantuan Sosial yang diberikan kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang diberdayakan.





Gambar 22.39  
Temu penguatan rehabilitasi dan  
perlindungan sosial anak



Gambar 22.40  
Tim Reaksi Cepat Untuk Membantu  
Pemberian Tanggap darurat Anak  
Korban Bencana



Gambar 22.41  
Pemberian Paket Alat Sekolah Bagi  
Anak Terlantar



Gambar 22.42  
Pemberian Kebutuhan Dasar Anak  
Berupa Nutrisi Bagi Anak Terlantar



Gambar 22.43  
Pembentukan Tim Pertimbangan  
Perizinan Pengangkatan anak (PIPA)



Gambar 22.44  
Pendampingan/Advokasi Anak  
Berhadapan Dengan Hukum

**22.3.3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.343.020,- realisasi anggaran sebesar Rp. 192.418.010,- atau 97,01 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi;

- b. Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang memperoleh pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis usaha.



**22.3.4. Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 510.452.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 485.419.000,- atau 95,10 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Warga Binaan Sosial yang dilayani dan dibina.





**22.3.5. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 100.251.942,- atau 75,83%. Dan realisasi fisik 80,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan.



**22.3.6. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 341.314.692,- realisasi anggaran sebesar Rp. 288.965.197,- atau 84,66%. Dan realisasi fisik 100,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah Orang dengan kecacatan yang memperoleh pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosia;
- Jumlah tenaga pendampingan sosial yang memperoleh pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis.





Gambar 22.55  
Penyaluran Bahan Makanan  
Tambahan Bagi Penyandang  
Disabilitas



Gambar 22.56  
Bantuan Popok/Diapers Bagi  
Penyandang Disabilitas



Gambar 22.57  
Bantuan Sarana Ibadah bagi  
penyandang disabilitas



Gambar 22.58  
Hari Disabilitas Internasional (HDI)

**22.3.7. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.985.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 76.285.000,- atau 99,09 %. Dan realisasi fisik 100,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa bantuan usaha dan bimbingan teknis usaha.



Gambar 22.59  
Pembinaan dan Penertiban Tuna  
Sosial



Gambar 22.60  
Pemulangan / Menghantarkan Korban  
Perdagangan Orang (KPO) ke daerah  
asal

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Pemberian bantuan tanggap darurat anak korban banjir pada Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak bersifat *on call*, yang berakibat pada banyaknya pagu kegiatan yang tidak terealisasi;
2. Pemberian paket alat sekolah dan kebutuhan dasar anak berupa nutrisi tidak terealisasi seluruh anggarannya dikarenakan Kabupaten/Kota yang mengusulkan data anak terlantar hanya 4 Kabupaten/Kota dari 7 Kabupaten/Kota;
3. Adanya Penundaan (Penghapusan Kegiatan) Rasionalisasi Anggaran;
4. Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

**Solusi**

Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

#### 22.4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

##### 22.4.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina

Serumpun oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 103.100.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 95.436.100,- atau 92,57 %. Dan realisasi fisik 90,91 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina.



##### 22.4.2. Kegiatan Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam

**Panti** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 593.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 560.681.700,- atau 94,49 %. Dan realisasi fisik 100,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti.



**22.4.3. Kegiatan Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 424.640.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 335.454.768,- atau 79,00 %. Dan realisasi fisik 100,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kebutuhan sarana penunjang yang dapat disediakan.



**22.4.4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.310.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 34.412.500,- atau 64,55 %. Dan realisasi fisik 100,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pengelola Panti yang memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan teknis pengelolaan panti.





**22.4.5. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.100.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 13.768.800,- atau 28,04 %. Dan realisasi fisik 40,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah Klien dapat beradaptasi dan hidup layak.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

1. Karena tidak adanya permintaan pendampingan dan pembinaan lanjutan klien/warga binaan (pada Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien)
2. Adanya Penundaan (Penghapusan Kegiatan) Rasionalisasi Anggaran;
3. Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

**Solusi**

Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.



## 22.5. Program Pembinaan dan Pendampingan

**22.5.1. Kegiatan Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 15.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.363.740,- atau 62,42 %. Dan realisasi fisik 62,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah klien yang dapat dipulangkan.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

1. Karena tidak adanya permintaan pemulangan Klien/Warga Binaan (pada Kegiatan Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial)
2. Adanya Penundaan (Penghapusan Kegiatan) Rasionalisasi Anggaran;
3. Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

**Solusi**

1. Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

## 22.6 Proram Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

- 12.6.1 Kegiatan Pengembangan Jembatan Portable (Bailey)** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 799.909.800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 790.033.398,00 atau 98,77%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya 1 unit Truck Crane



- 12.6.2 Kegiatan Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 104.339.525,00 atau 69,56%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terbiayanya Dana Perjalanan Dinas Pegawai Untuk Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ke Kabupaten/Kota.



## Permasalahan dan Solusi.

### Permasalahan

Masih banyaknya kegiatan program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam prioritas rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terakomodir dan juga akibat Rasionalisasi Defisit anggaran .

### Solusi

Masalah akibat setelah terjadinya bencana perlu di pikirkan bersama bagaimana caranya kegiatan dapat terakomodir untuk dilaksanakan dan dianggarkan untuk itu Perlunya sama-sama antara Tim Anggaran dan SKPD untuk memikirkan Suatu rencana anggaran yang cukup proporsional terhadap belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal agar suatu kegiatan yang prioritas tidak lagi terakomodir oleh akibat belanja pemerintah daerah menjadi defisit.

## 12.6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

- 12.6.1. Kegiatan Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.462.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 322.833.990,00 atau 81,84%. Dan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 50 orang.



Gambar 22.73  
Pelaksanaan Kegiatan Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa Di Kab.Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 22.74  
Pelaksanaan Kegiatan Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa Di Kab.Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 12.6.2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Data base Peta Potensi Bencana Di Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.390.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 194.510.100,00 atau

80,25%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terciptanya Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Data Base Peta sebanyak 1 Dokumen.



## Permasalahan dan Solusi.

### Permasalahan

Minimnya Anggaran yang tersedia mengakibatkan kegiatan yang sudah direncanakan tidak terakomodir dan juga akibat Rasionalisasi Defisit anggaran kegiatan menjadi tidak dilaksanakan.

### Solusi

Perlunya sama-sama antara Tim Anggaran dan SKPD untuk memikirkan Suatu rencana anggaran yang cukup proporsional terhadap belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal agar suatu kegiatan yang prioritas tidak lagi terakomodir oleh akibat belanja pemerintah daerah menjadi defisit.

## 12.7. Program Penyediaan Logistik / Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

- 12.7.1. Kegiatan Penyiapan Pengadaan/Logistik di Kawasan Rawan Bencana**  
Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 242.968.700,00 atau 97,19%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya Penyediaan Logistik Untuk Penanggulangan Bencana.





- 12.7.2. Kegiatan Penyiapan /Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana**  
Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.050.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 682.192.455,00 atau 93,44%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan Peralatan Tali Evakuasi, Sepatu Karet, Mobil Pick Up, Mesin Perahu, Perahu Karet, Perahu Alumunium.



- 12.7.3. Kegiatan Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana**  
Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 117.460.320,00 atau 55,67%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pemeliharaan /Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana.





Gambar 22.81  
Sewa Tower Untuk penempatan  
Repeater PB

- 12.7.4.** Kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.073.440.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.693.543.400,00 atau 81,68%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional Kegiatan POSKO TRC BPBD.



Gambar 22.82  
Pengisian Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Bermotor

- 12.7.5. Kegiatan Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.852.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 152.088.000,00 atau 96,96%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat BPBD sebanyak 2 Kegiatan.



- 12.7.6. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.362.002,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 182.851.500,00 atau 97,07%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan perlengkapan tanggap darurat Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 50 orang.



- 12.7.7. Kegiatan Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.750.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 87.198.412,00 atau 88,30%. Dan Realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terdistribusikannya Bantuan Logistik/Peralatan PB Dari BNPB/Pusat Ke BPBD Prov.Kep.Babel.



**12.7.8. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat BPBD** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 201.715.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 187.666.000,00 atau 93,04%. Dan Realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD.



**12.7.9. Kegiatan Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap Darurat** Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.174.998,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 218.855.000,00 atau 93,46%. Dan Realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengerahan Dan Mobilisasi TRC dalam masa Tanggap Darurat Bencana selama 12 Bulan.



### **Permasalahan dan Solusi.**

#### **Permasalahan**

Banyaknya kegiatan yang sudah direncanakan tidak terakomodir oleh anggaran yang tersedia dan juga akibat Rasionalisasi Defisit anggaran kegiatan menjadi tidak dilaksanakan.

#### **Solusi**

Perlunya sama-sama antara Tim Anggaran dan SKPD untuk memikirkan Suatu rencana anggaran yang cukup proporsional terhadap belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal agar suatu kegiatan yang prioritas tidak lagi terakomodir oleh akibat belanja pemerintah daerah menjadi defisit.

## 23. URUSAN KEBUDAYAAN

### 23.1. Program Pengembangan Nilai Budaya

#### 23.1.1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi pada APBD sebesar Rp. 437.040.000,- dan perubahan pada APBD-P Tahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp. 1.437.040.000,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 771.095.962,- atau 53,66%. Keluaran atau output kegiatan adalah tersedianya dukungan event budaya daerah yang memfasilitasi 7 kabupaten/ kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada beberapa festival budaya berikut:

1. Sedekah Kampung Kundi Bersatu (Bangka Barat)
2. Haul Kute 1000 (Bangka Barat)
3. Festival 1 Muharam Kimak (Bangka)
4. Sedekah Kampung Terentang (Bangka Barat)
5. Pesta Adat Buang Jong (Bangka Selatan)
6. Pesta Adat Mandi Belimau (Bangka)
7. Festival Kota Kapur (Bangka)
8. Ruwah Kubur Keretak (Bangka Tengah)
9. Pesta Adat Nuju Jerami (Bangka)
10. Murok Jerami (Bangka Tengah)
11. Pesta Adat Maras Taon (Beltim)
12. Pagelaran Lintas Budaya (Bangka Barat)
13. 1 Muharam Kenanga (Bangka)
14. Pesta Adat Rebo Kasan (Bangka)
15. Festival Ngedik (Belitung)
16. Persemaian Nilai Budaya (Bangka)
17. Ritual Adat Kawin Massal (Basel)
18. Pesta Adat Sedekah Kampung 3 (Bangka Barat)
19. Pagelaran Seni Ngamper (Pangkalpinang)
20. Maulid Air Itam (Pangkalpinang)
21. Festival Batin Tikal II (Basel)
22. Apresiasi Satra Dialog Budaya (Pangkalpinang)
23. Festival Reog dan Kuda Lumping (Basel)
24. Maulid Sri Menanti (Sungailiat)
25. Festival Seni Budaya Islam Kemuja

#### **Kendala :**

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena mengingat waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan dan proposal dari Kabupaten / Kota atau masyarakat banyak yang belum diterima sehingga menjadi kendala untuk merealisasikannya.

#### **Solusi :**

Agar proposal dapat disampaikan pada awal tahun anggaran dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan kegiatan dukungan.





### 23.1.2. Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di bidang Kebudayaan

Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp.143.898.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.118.610,- atau 3,56%. Keluaran atau output kegiatan adalah terselenggaranya pemberian penghargaan kepada pelaku seni dan budaya sebanyak 35 orang.

#### **Kendala :**

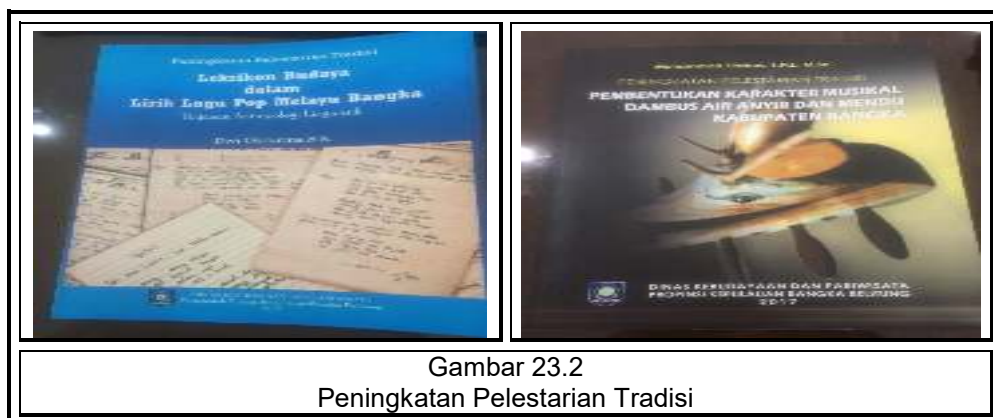
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan dan para narasumber / tenaga ahli penilai pemberian penghargaan mengkonfirmasi bahwa tidak dapat hadir untuk mengisi dan menilai pemberian anugerah penghargaan bagi pelaku seni dan budaya.

#### **Solusi :**

Agar tahun – tahun selanjutnya dapat menyusun jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana awal pelaksanaan.

### 23.1.3. Peningkatan Pelestarian Tradisi

Kegiatan Peningkatan pelestarian tradisi dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp.353.011.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.269.098.284,- atau 76.23%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya kajian seni tradisi Bangka Belitung (1 Dokumen = 5 judul buku).



Gambar 23.2  
Peningkatan Pelestarian Tradisi

#### 23.1.4 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian)

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.053.546.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.160.620,- atau 43,68%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya keikutsertaan pada event daerah dan nasional yang terfasilitasi dengan target capaian sebanyak 24 event/pentas. Adapun event atau pentas yang diikuti adalah sebagai berikut:

- Parade Tari Nusantara ke 36 di TMII Jakarta
- Parade Lagu Nusantara di TMII Jakarta
- Pagelaran dan Pameran Seni Sesumatera di Medan Sumatera Utara
- Post Festival Daily Aesthetic di Taman Ismail Marzuki Jakarta



Gambar 23.3  
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

#### Kendala :

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi anggaran dalam APBD-P Tahun 2017 tetapi pada saat pengesahan anggaran APBD Perubahan Tahun 2017 alokasi anggaran dikembalikan sesuai dengan pagu anggaran APBD 2017.

#### Solusi :

Agar tidak ada lagi rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### 23.1.5 Pembinaan Kesenian dan Perfilman

Kegiatan Pembinaan kesenian dan perfilman dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pada Tahun 2017 alokasi anggaran sebesar Rp. 1.046.005.000,- dan dalam APBD-P mengalami pengurangan menjadi Rp. 640.911.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 607.433.498,- atau 94,78%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya festival budaya daerah bertaraf regional dan nasional

- Festival Serumpun Sebalai : Juara Sanggar Astari Pangkalpinang, sedangkan Penyaji Unggulan adalah Sanggar Rebang Emas Bangka, Sanggar Lawang Budaya Bangka, Sanggar Darma Habangka Bangka Selatan, Sanggar Gong Production dan Sanggar Astari Pangkalpinang



#### 23.1.6 Pendukung Pengembangan Keragaman Budaya

Kegiatan Sebelumnya Pendukung Pengembangan Keragaman Budaya menjadi dilaksanakan Pengembangan Keragaman Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki alokasi anggaran pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 982.272.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 779.875.000,00 atau 95,15%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan pendalaman dan pagelaran seni budaya daerah (Tari sambut sanggar seni budaya khas Bangka Belitung dan kesenian multi etnis 122 kali penampilan)



## 23.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

### 23.2.1 Pengelolaan Peninggalan Purbakala

Kegiatan Pengelolaan Peninggalan Purbakala dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2017 alokasi anggaran sebesar Rp. 127.443.000,- dan dalam APBD-P Tahun 2017 mengalami pengurangan menjadi Rp. 77.443.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.696.000,- atau 96,45%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan 1 cagar budaya yaitu Pesangrahan Muntok atau Wisma Rangam.



### 23.2.2 Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai)

Kegiatan Pengembangan kerjasama budaya (drumband serumpun sebalai) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 160.600.000,00 atau 80,70%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya sumber daya manusia difasilitasi.



### 23.2.3 Penyusunan Sastra Lisan Melayu Bangka Belitung

Kegiatan Penyusunan Sastra Lisan Melayu Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 77.345.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.370.000,- atau



84,52%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah tersedianya buku kajian sastra lisan melayu Bangka Belitung sebanyak 320 eksemplar buku.



### 23.3. Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya

#### 23.3.1. Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Kegiatan Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 480.326.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 385.538.930,00 atau 80,27%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya peserta internalisasi nilai budaya dan sosialisasi karakter dan pekerti bangsa jati diri bangsa (Gita Bahana Nusantara 4 Peserta terbaik yaitu Suara Sopran, Suara Alto, Suara Tenor dan Suara Bas dan Aubade diikuti oleh 156 siswa)





## 25. URUSAN KEARSIPAN

### 1.1 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah

**1.1.1 Kegiatan Penelusuran dan Pendataan Arsip Statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 243.581.700,00 realisasi anggaran sebesar Rp 131.697.800,00 atau 54,07%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen/arsip statis dengan Target sebanyak 16 Dokumen.



**1.1.2 Kegiatan Penelusuran dan Pendataan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79.168.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 69.927.200,00 atau 88,33%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen/arsip dinamis dengan target sebanyak 16 Dokumen.



## 1.2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan

**1.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.680.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 38.150.000,00 atau 98,63%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan arsip daerah, dengan target sebanyak 200 Arsip.



## 1.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

**1.3.1 Kegiatan Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.900.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 49.158.500,00 atau 66,52%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya layanan sadar arsip bagi masyarakat, dengan target sebanyak 5 Kabupaten/Kota.





Gambar 25.6  
Foto Kegiatan Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip (Kab. Bangka Barat)



Gambar 25.7  
Foto Kegiatan Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip (Kab. Bangka Tengah)

**1.3.2 Kegiatan Pembinaan, Pendampingan Dan Lomba Kearsipan Di SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 127.310.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 106.204.100,00 atau 83,42%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di SKPD, dengan target sebanyak 43 SKPD.



Gambar 25.8  
Foto Kegiatan Pembinaan, Pendampingan Dan Lomba Kearsipan Di SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

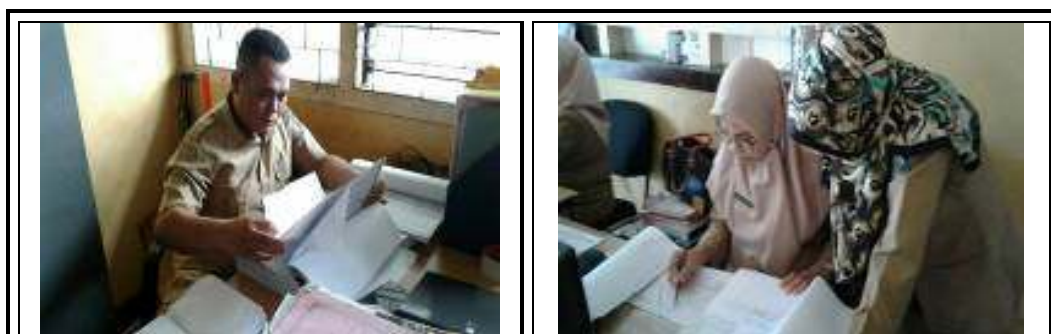




Gambar 25.9  
Foto Kegiatan Pembinaan, Pendampingan Dan Lomba Kearsipan Di SKPD  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 1.4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan

**1.4.1 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 8.900.000,00 atau 35,60%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian angka kredit arsiparis, dengan target sebanyak 30 Orang Arsiparis.



Gambar 25.10  
Foto Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis



Gambar 25.11  
Foto Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis

**1.4.2 Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kabupaten/Kota** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 123.350.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 51.069.907,00 atau 41,40%. Keluaran kegiatan ini adalah terpilihnya Arsiparis teladan tingkat Provinsi, dengan target sebanyak terpilihnya Arsiparis teladan tingkat Provinsi, dengan target sebanyak 30 Orang Arsiparis.



Gambar 25.12

Foto Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kabupaten/Kota



Gambar 25.13

Foto Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kabupaten/Kota



Gambar 25.14

Foto Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kabupaten/Kota





**1.4.3 Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD.LKD Kab/Kota tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 123.350.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 103.427.000,00 atau 83,85%. Keluaran kegiatan ini adalah pemenang lomba desa/kelurahan, SKPD, LKD Kabupaten/Kota, dengan target sebanyak 9 Juara.





Gambar 25.18  
Foto Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD.LKD Kab/Kota tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LKD)



Gambar 25.19  
Foto Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD.LKD Kab/Kota tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Desa Keretak)



Gambar 25.20  
Foto Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD.LKD Kab/Kota tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (SKPD)

**1.4.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.090.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 74.497.866,00 atau 83,62%. Keluaran kegiatan ini adalah terciptanya pengelola arsip yang memahami pemberkasan dan penyusutan arsip, dengan target sebanyak 50 Orang.



Gambar 25.21  
Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan



Gambar 25.22  
Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan

**1.4.5 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kearsipan** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 91.955.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 86.157.230,00 atau 93,69%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi tentang peraturan kearsipan.



Gambar 25.23  
Foto Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kearsipan



## **Permasalahan dan Solusi**

### **1. Permasalahan**

- a. Belum adanya Gedung Depo Arsip yang memadai.
- b. Kurangnya Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan document/arsip daerah.
- c. Kurangnya pemahaman dari bidang-bidang dalam pelaksanaan capaian sasaran dan indikator kinerja program.
- d. Kurangnya SDM untuk pengelola arsip.

### **2. Solusi**

- a. Mengusulkan pembangunan gedung Depo Arsip.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyelamatan dokumen/arsip daerah.
- c. Melakukan koordinasi untuk evaluasi untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja.
- d. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk penambahan pegawai Dinas Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## 26. URUSAN PERPUSTAKAAN

### 26.1. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

**26.1.1. Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.454.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 242.667.250,00 atau 96,89%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya fasilitas layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat, dengan target sebanyak 4 Kabupaten.







Gambar 26.3  
Pelayanan Perpustakaan Keliling (Festival Batin Tikal II Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan)



Gambar 26.4  
Pelayanan Perpustakaan Keliling (Festival Batin Tikal II Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan)



Gambar 26.5  
Pelayanan Perpustakaan Keliling

**26.1.2. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 566.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 297.688.290,00 atau 52,52%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya minat baca masyarakat, dengan target sebanyak 600 Orang.



Gambar 26.6  
Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca



Gambar 26.7  
Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca

**26.1.3. Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 282.790.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 253.824.290,00 atau 89,76%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya lomba menulis dan membaca tingkat SD, SMP, SMA dan Masyarakat, dengan target sebanyak 200 Orang dan 20 Kelompok.



Gambar 26.8  
Pengembangan Minat Dan Budaya Baca (Lomba Bercerita Bahasa Daerah)



Gambar 26.9  
Pengembangan Minat Dan Budaya Baca (Lomba Menulis Puisi)



Gambar 26.10  
Pengembangan Minat Dan Budaya Baca  
(Lomba Menulis SMP SMA)



Gambar 26.11  
Pengembangan Minat Dan Budaya Baca (Lomba Penulisan Cerita Rakyat)

**26.1.4. Kegiatan Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.670.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 42.873.180,00 atau 64,31%. Keluaran kegiatan adalah jumlah perpustakaan yang memiliki NPP, dengan target sebanyak 42 Perpustakaan.





Gambar 26.12  
Pendataan NPP (Kab. Bangka)



Gambar 26.13  
Pendataan NPP (Kab. Bangka Tengah)



Gambar 26.14  
Pendataan NPP (Kab. Bangka Barat)



Gambar 26.15  
Pendataan NPP (Kab. Bangka Selatan)



Gambar 26.16  
Pendataan NPP (Kab. Belitung)



Gambar 26.17  
Pendataan NPP (Kab. Belitung Timur)

**26.1.5. Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 148.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 99.331.000,00 atau 67,12%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya lomba pengelolaan perpustakaan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan target sebanyak 1 Kali.



Gambar 26.18  
Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





Gambar 26.19  
Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**26.1.6. Kegiatan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.133.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 46.048.779,00 atau 69,63%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemilihan pustakawan terbaik, dengan target sebanyak 1 Kali.



Gambar 26.20  
Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi



Gambar 26.21  
Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi

**26.1.7. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pustakawan** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 18.681.368,00 atau 74,73%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penilaian angka kredit pustakawan, dengan target sebanyak 15 DUPAK.



Gambar 26.22  
Penilaian Angka Kredit Pustakawan



Gambar 26.23  
Penilaian Angka Kredit Pustakawan



Gambar 26.24  
Penilaian Angka Kredit Pustakawan



Gambar 26.25  
Penilaian Angka Kredit Pustakawan



**26.1.8. Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.739.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 29.825.000,00 atau 69,78%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perawatan dan pemeliharaan bahan pustaka, dengan target sebanyak 12 Bulan.



**26.1.9. Kegiatan Penyusunan Bibliografi Induk Daerah Dan Katalog Induk Daerah** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.550.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 21.040.620,00 atau 85,71%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya data koleksi antar perpustakaan dalam bentuk katalog induk, dengan target sebanyak 40 Buku.



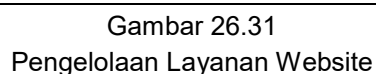


- 26.1.10. Kegiatan Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.186.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 32.587.500,00 atau 81,09%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya hasil terbitan daerah, dengan target sebanyak 55 KCKR.

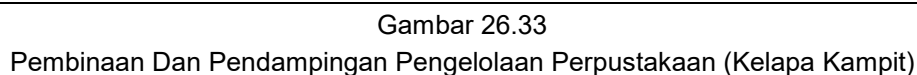
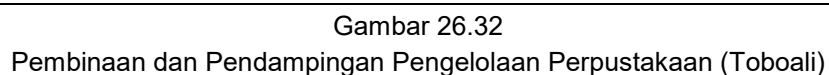


- 26.1.11. Kegiatan Pengelolaan Layanan Website** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.550.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 32.148.000,00 atau 62,36%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya layanan teknologi informasi website, dengan target sebanyak 250 Informasi.





Regulasi Pembinaan Dan Penguatan Penguasaan Perpustakaan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.220.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 40.768.000,00 atau 61,56%. Keluaran kegiatan ini adalah terbinanya pengelolaan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan target sebanyak 28 Perpustakaan.







Gambar 26.34



Gambar 26.35



Gambar 26.36



Gambar 26.37



**26.1.13. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 208.399.950,00 realisasi anggaran sebesar Rp 165.321.109,00 atau 79,33%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya bimtek perpustakaan, dengan target sebanyak 3 Bimtek.



## Permasalahan dan Solusi

### 1. Permasalahan Dalam Urusan Perpustakaan

- a. Belum adanya Gedung Perpustakaan yang memadai.
- b. Kurangnya pemahaman dari bidang-bidang dalam pelaksanaan capaian sasaran dan indikator kinerja program.
- c. Kurangnya SDM untuk pengelola perpustakaan.
- d. Kurangnya minat masyarakat untuk membaca dan menuntut ilmu di perpustakaan.

### 2. Solusi

- a. Mengusulkan pembangunan gedung Perpustakaan.
- b. Melakukan koordinasi untuk evaluasi untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja.
- c. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk penambahan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Mengadakan lomba-lomba untuk meningkatkan minat baca, bedah buku, pameran buku, dll.

## B. URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### 1.1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

**1.1.1. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK).** Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 654.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp 14.040.000,- atau 2,15%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa jasa konsultasi pengawas, pengadaan konstruksi jaringan air dan alat-alat perikanan budidaya seperti paket instalasi aerasi, resirkulasi air, peralatan panen, pemeliharaan larva dan paket perkolaman untuk BBIL Tanjung Rusa. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah honor panitia pelaksana kegiatan.

**1.1.2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali (DAK).** Alokasi anggaran pada APBD Induk Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp 400.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp 107.015.000 atau 26,75%, dengan keluaran kegiatan tersedianya sarana dan prasarana pokok UPTD BBIS Pemali berupa jasa konsultasi pengawas, pengadaan alat pompa air dan mesin rumput, konstruksi jaringan air bersih, instalasi air limbah, pengadaan konstruksi kolam (rehab kolam), peralatan panen dan pembangunan rumah pompa. Namun yang dapat direalisasikan yaitu instalasi konstruksi jaringan air, instalasi pengolahan air limbah, pengadaan alat pompa, mesin rumput dan pembangunan rumah pompa.



Gambar 1.3  
Instalasi konstruksi jaringan air di BBIS



Gambar 1.4  
Rumah Pompa di BBIS Pemali

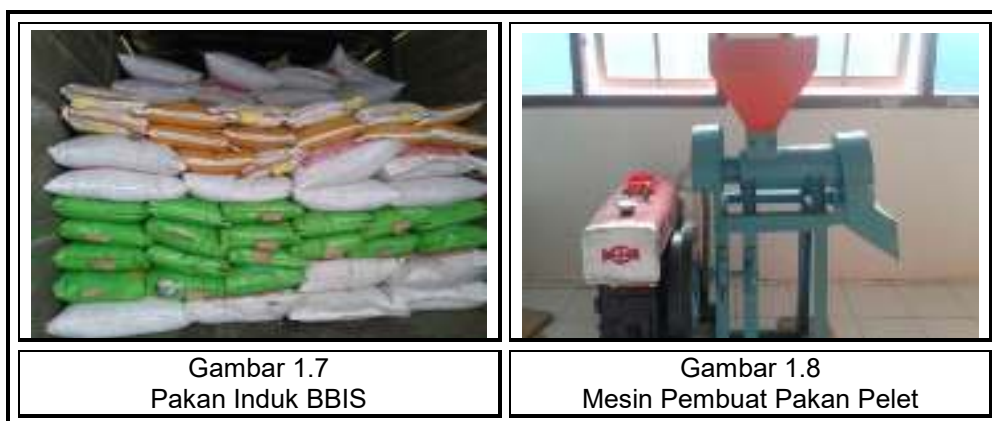
**1.1.3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasana UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK)** dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.500.253.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 588.384.000,- atau 39,22%, adapun keluaran kegiatan ini diharapkan berupa jasa konsultasi pengawas, pengadaan alat-alat laboratorium, jaringan konstruksi air, bersih, pengadaan konstruksi kolam, instalasi pengolahan air limbah, bangunan bangsal pakan alami, bangunan hatchery dan rehab indoor larva serta pengadaan alat-alat perikanan budidaya (peralatan pemijahan buatan, peralatan panen dan peralatan penetasan). Dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan berupa peralatan alat-alat laboratorium, jaringan instalasi air, instalasi pengolahan air limbah dan peralatan perikanan



budidaya (peralatan pemijahan buatan, peralatan panen dan peralatan penetasan).



- 1.1.4. Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali** dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 268.370.000,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp 254.466.000,- atau 94,82%, dengan keluaran berupa pakan induk, pengadaan alat pakan ikan untuk menunjang kegiatan produksi di BBIS Pemali.



- 1.1.5. Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak.** Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 320.840.000,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp 315.188.560,- atau 98,24%, dengan keluaran berupa pembelian induk, pakan larva, pakan induk, pengadaan konstruksi tambak , peralatan kerja pembenihan dan budidaya ikan/udang.



- 1.1.6.** Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa. oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 393.100.000,-. Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 381.184.000,- atau 96,97%, dengan keluaran berupa pakan pendederan, pakan larva, pakan induk, pengadaan alat pakan ikan untuk menunjang produksi di BBIL Tanjung Rusa.



- Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Perikanan Budidaya**
  1. Penyerapan kegiatan DAK UPTD Tiga Balai Benih yang tidak terserap maksimal, hal tersebut dikarenakan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pejabat Dinas, bukan pejabat di Balai masing-masing, sehingga terkendala dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan, baik itu penyiapan dokumen lelang maupun teknis pelaksanaan lainnya.
  2. Selain itu pelaksanaan kegiatan juga terkendala adanya peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa pelaksanaan kegiatan DAK 2017 harus sudah memiliki Kontrak paling lambat 31 Agustus 2017 dan setelah tanggal tersebut menjadi tanggungjawab APBD untuk membayarnya.



### Solusi

1. Meningkatkan konsolidasi internal terhadap hasil pencapaian target Program Pembangunan sebagaimana yang telah dicapai di Tahun 2017;
2. Menempatkan orang yang tepat pada kegiatan yang tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik

## 1.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

**1.2.1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan** dengan pagu anggaran dalam APBD Induk sebesar Rp 3.000.000.000,-. Pada APBD Perubahan kegiatan ini mengalami efisiensi sehingga menjadi Rp 745.155.600. Realisasi anggaran sebesar Rp 409.545.200 atau 54,96%, dengan keluaran kegiatan berupa pendataan kartu nelayan dan pendataan asuransi nelayan.



**1.2.2. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).** Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai konsekuensi diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, dimana kewenangan PPI yang ada di Kabupaten/Kota beralih ke Provinsi. Adapun anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 329.908.000 dengan realisasi Rp .57.993.664,- atau 17,58%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa terselenggaranya fungsi pelayanan serta kinerja Pangkalan Pendaratan Ikan yang beralih kewenangannya ke Provinsi yaitu PPI Muara Sungai Batu Rusa, PPI Kurau, PPI Sungai Selan, PPI Sadai, PPI Manggar dan PPI Selat Nasik. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah berupa operasional kelistrikan saja, sedangkan untuk pembayaran gaji tenaga honorer belum dapat direalisasikan karena SK dari BKPSDM selaku koordinator tenaga kontrak belum keluar sampai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.



**1.2.3. Kegiatan Pilot Project Penggunaan Mesin Tempel Alternatif Non BBM dan Gas Ukuran Mesin 5 PK untuk Kapal Nelayan.** Kegiatan ini muncul pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 214.520.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp 9.132.000,- atau sebesar 4,26%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa percontohan penggunaan mesin tempel alternative. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah perjalanan dinas luar daerah dan honor panitia pelaksanaan.

**1.2.4. Kegiatan Kajian Prototype Jenis Kapal Fiber Representatif untuk nelayan 3 GT.** Kegiatan ini diakomodir pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp .306.960.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp .298.444.200,- atau sebesar 97,23%, dengan keluaran kegiatan berupa satu buah *prototype* Kapal 3 GT.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Perikanan Tangkap**
  1. Terdapat dua kegiatan prioritas pada APBD Perubahan yang tidak dilaksanakan, yaitu Pilot Project penggunaan mesin tempel alternatif non bbm dan gas ukuran mesin 5 PK untuk kapal

nelayan dan Pilot Project Penggunaan Energi Bayu untuk Kapal Nelayan. Dua kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil survey di lapangan tidak ada satu pun distributor, supplier, toko atau agen yang menyediakan atau ada persediaannya. Untuk pengadaan barang tersebut harus memesan terlebih dahulu.

2. Disamping itu PPTK sudah mencari supplier barang tersebut dan supplier yang ada tidak mencantumkan secara jelas dan rinci spesifikasi barang sehingga PPTK kegiatan tidak dapat menentukan HPS.

#### **Solusi**

1. Untuk pengadaan pilot project yang tidak umum (barang – barang) yang sulit dicari di pasaran akan dianggarkan kembali pada APBD Induk agar cukup waktu untuk melaksanakannya.

### **1.3. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan**

- 1.3.1. Kegiatan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan dilaksanakan** oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp 269.305.000,- pada APBD Perubahan mengalami penghematan sehingga anggaran menjadi Rp 181.660.000,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp 49.935.500,- atau sebesar 27,49%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa partisipasi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempromosikan potensi perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tiga kali pameran. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan hanya satu kali pameran yaitu pada pameran Festival Perikanan Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 November 2017 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.



- 1.3.2. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Promosi Serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan** oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp 538.974.500,-. Pada APBD Perubahan kegiatan ini

mengalami penghematan sehingga anggaran menjadi Rp 465.119.500,- Adapun realisasi sebesar Rp 402.128.300,- atau 86.46%. Keluaran kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan Safari Gemarikan, Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi pada tanggal 7 November 2017, di D' Garden Sungailiat, serta partisipasi pemenang Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi ke Lomba Masak Ikan Nasional di Jakarta pada tanggal 20 November 2017.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan**

Tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan

#### **1.4. Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan**

- 1.4.1. Kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.902.450.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.651.797.710,- atau 56,91%. Keluaran kegiatan ini diharapkan berupa Draft Dokumen RZWP3K yang sudah melewati tahap konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melewati tahapan konsultasi publik lengkap dengan alokasi ruangannya. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah Draft Dokumen RZWP3K yang belum terkonsultasikan lengkap dengan alokasi ruangannya.



**1.4.2. Kegiatan Peningkatan Fungsi BOOST Center** dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp 146.880.000,-. Adapun realisasi untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 113.344.350,- atau 77,17%. Keluaran kegiatan berupa tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Babel Ocean Observation Science & Technology Center.



**1.4.3. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp 844.120.000,-.

Realisasi kegiatan ini sebesar Rp 403.491.849 atau 47.80%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan dan perlengkapan operasional kapal pengawas.





Gambar 1.23  
Kegiatan Pengawasan Indikasi Illegal  
BMKT di atas Kapal



Gambar 1.24  
Kegiatan Patroli Kapal Pengawas di  
Perairan Bangka Tengah

- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan Pelaksanaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan**

Pembayaran Kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termin ke III yang tidak dapat dibayar penuh kepada pihak ketiga, hal ini disebabkan pekerjaan melewati tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 18 Desember 2017. Sedangkan pada syarat khusus kontrak, pembayaran termin ketiga berupa laporan akhir yang sudah dikonsultasi tekniskan di KKP pada tanggal 21 Desember 2017. Disamping itu pada draft laporan akhir belum ada kesepakatan terhadap alokasi ruang karena konsultasi public baru dilaksanakan tanggal 29 Desember 2017.

**Solusi**

Berkoordinasi dengan BPKP untuk pembayaran Termin ketiga kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diajukan kembali pembayarannya melalui APBD Perubahan 2018.

## 2. URUSAN PERTANIAN

### 2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pagu program Rp. 1.312.638.950,-. Realisasi program Rp. 1.244.774.283,- atau 94,83%.

#### 2.1.1. Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.217.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 393.030.600,- atau 99,95%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku petani dalam menerapkan Pengendalian Hama Terpadu.



#### 2.1.2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.736.450,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 93.956.450,- atau 66,76%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penilaian lomba penyuluh terbaik tingkat kabupaten/kota yang pemenangnya PNS Penyuluh bernama Ari Kurniawan dari kabupaten Bangka Tengah dan THLTBP bernama Natalia Utami dari kabupaten Bangka. Realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan jumlah kriteria yang dilombakan tidak sejumlah RKA karena ada beberapa peserta yang tidak masuk/ikut dalam lomba tersebut. Bangka Belitung tidak masuk dalam pemenang Nasional sehingga perjalanan luar daerah untuk peserta tidak bisa direalisasikan.



**2.1.3. Kegiatan Keikutsertaan pada Even Penyelenggaraan PENAS dilaksanakan di Provinsi Aceh** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 637.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 625.042.433,- atau 98,12%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan PENAS ke XV di Aceh dengan jumlah peserta kontingen dari Babel sebanyak 210 orang.



**2.1.4. Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.685.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 132.744.800,- atau 93,69%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyusunan program penyuluhan pertanian berupa dokumen program penyuluhan tahun 2018.



## 2.2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pagu program sebesar Rp. 1.064.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.047.281.900,- atau 98,37%.

**2.2.1. Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah** dilaksanakan di Batam. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 337.350.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 336.271.300,- atau 99,68% dengan fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terpromosikannya produk-produk dari hasil produk sektor pertanian di Batam, Palembang, Aceh dan Babel Expo di Pangkalpinang.



**2.2.2. Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi, dilaksanakan** oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.255.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 215.861.800,- atau 94,99%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan terfasilitasinya kegiatan tim pemantauan, pengawasan dan penetapan harga TBS setiap bulan.





- 2.2.3. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan**, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 495.148.800,- atau 99,03%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan terlaksananya kunjungan kerja tentang pengolahan dan pasca panen Lada putih ke Vietnam.



- 2.3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan**  
Pagu Program Rp. 810.990.000,-. Realisasi Program Rp. 796.821.600,- atau 98,25%.

- 2.3.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pasca Panen Lada** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 292.490.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 291.065.000,- atau 99,51%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya sarana prasarana pasca panen Lada di kelompok tani di 3 kabupaten yaitu Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.





**2.3.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 518.5000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 505.756.600,- atau 97,54%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya 3 paket peralatan pengolah limbah ternak (biogas, biourine dan sarana pengolahan pupuk organik), di 3 lokasi yaitu Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur.



## **2.4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan**

Pagu Program Rp. 6.094.205.000,-. Realisasi Program Rp. 5.463.905.460,- atau 89,66%.

**2.4.1. Kegiatan Sertifikasi Bibit Pertanian/ Perkebunan** dilaksanakan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147.235.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 145.681.200,- atau 98,94%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran Terlaksananya kegiatan sertifikasi bibit unggul 3 komoditi (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan).



**2.4.2. Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih** dilaksanakan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.220.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 210.473.180,- atau 99,65%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengawasan benih kepada 36 penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan, 5 penangkar benih hortikultura serta 73 kios maupun toko pertanian dan tersedianya benih bina yang bersertifikat di provinsi kepulauan Bangka Belitung.



**2.4.3. Kegiatan Penilaian Kultivar/ Varietas Unggul Daerah**, dilaksanakan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 229.580.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 210.473.180,- atau 99,65%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya varietas yang siap dilepas menjadi varietas unggul lokal. Kendalanya adalah pada jadwal pengujian buah durian tidak dapat dilaksanakan karena pada saat pengujian belum musim durian. Solusinya adalah pengujian dilanjutkan pelaksanaannya sampai musim durian tiba. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan pada kegiatan eksplorasi varietas baru durian kegiatan perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan dikarenakan buah durian yang akan diuji baru "jatuh" pada akhir desember sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan SPJ dan pengujiannya tetap dilakukan dengan meminta pihak Kabupaten Bangka Barat untuk mengirimkan

sampel buah durian, pada kegiatan pengujian kualitas mutu lada juga tidak dapat di SPJ kan dikarenakan sudah akhir tahun namun kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan dibiayai oleh bagian pemuliaan



**2.4.4. Kegiatan Intensifikasi Tanaman Lada**, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.188.295.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.176.909.400,- atau 99,48%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya intensifikasi tanaman Lada berupa pengadaan sarana produksi intensifikasi Lada seluas 700 hektar di 6 kabupaten.



**2.4.5. Kegiatan Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian** dilaksanakan di Balai Benih Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.814.480.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.644.458.880,- atau 90,63%, capaian fisik 91,67%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya perbanyak benih/ bibit sumber pertanian. Berupa bibit Karet sebanyak 1.000 biji, tersedianya bibit tanaman Hortikultura sebanyak 100 batang, tersedianya pupuk organik dan anorganik sebanyak 22,1 ton, tersedianya polybag 800 Kg, peralatan pertanian dan tersedianya calon bibit kebun induk Lada sebanyak 1.000 batang.





Gambar 2.16  
Perbanyakan benih sumber pertanian

**2.4.6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dilaksanakan** oleh Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.253.945.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.229.119.200,- atau 90,22%. Keluaran kegiatan adalah Pembinaan Pupuk dan Pestisida yaitu Rapat Koordinasi KP3 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, Pengujian Sampel pupuk dan pestisida, Pembinaan dan Pengelolaan Alsintan, rapat koordinasi pengelolaan data alsintan dan pengembangan kelembagaan UPJA.



Gambar 2.17  
Pertemuan UPJA

Gambar 2.18  
Rapat Koordinasi KP3

**2.4.7. Kegiatan Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Padi** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.249.450.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 875.513.200,- atau 70,07%, capaian fisik 75%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya GP-PTT Tanaman Padi yaitu bantuan benih padi Inbrida, Pupuk NPK dan Pupuk Urea di 2 kabupaten yaitu Bangka Selatan dan Belitung. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan ada optimalisasi anggaran.



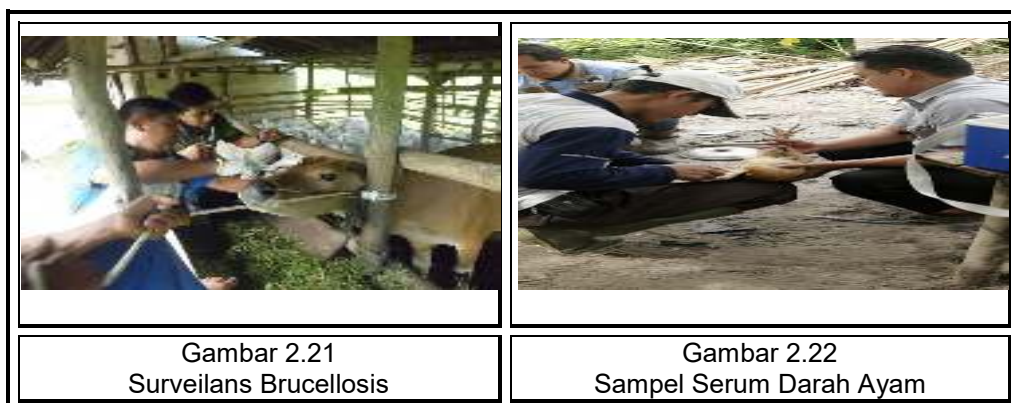
## 2.5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pagu Program Rp. 140.050.000,-. Realisasi Program Rp. 115.576.080,- atau 82,52%.

**2.5.1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dan Zoonosis**, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.050.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 115.576.080,- atau 82,52%, dengan fisik 83,33%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Bahan Obat-obatan (obat parasit, antibiotik dan daya tahan tubuh), Bahan Kimia (Desinfektan) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (PKP2MT) dan Monitoring dan Surveilans Rabies, Kegiatan Monitoring Surveilans Avian Influenza (AI), dan Pengawasan Peredaran Produk Hewan Dalam Rangka Mewujudkan Produk Asal Hewan Aman Sehat Utuh dan Halal.







## 2.6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

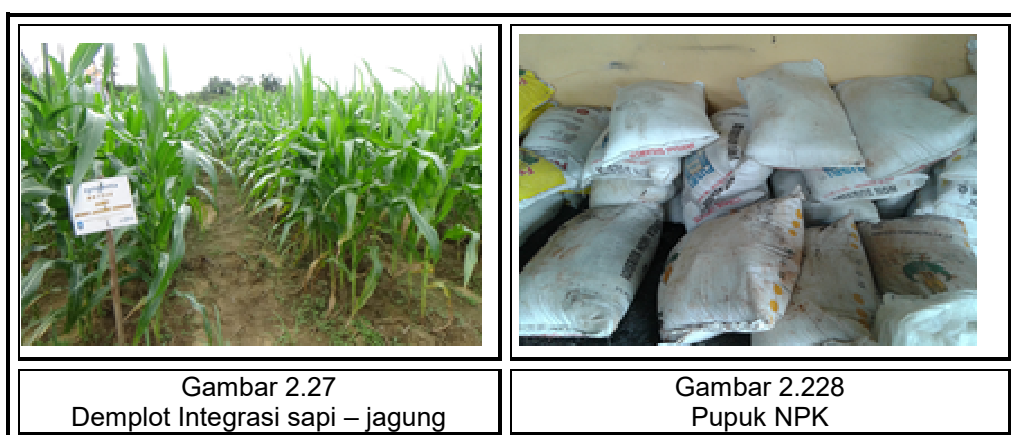
Pagu Program Rp.1.173.740.800,-. Realisasi Program Rp.896.848.901,- atau 76,40%.

**2.6.1. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 943.740.800,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 720.664.120,- atau 76,36%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Penguatan sapi betina bunting dengan pemberian insentif berupa pakan ternak sebanyak 600 ekor, Penyaluran Insentif Betina Bunting ini di 3 kabupaten (Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur), Jumlah ternak yang diberi insentif penguatan/insentif sebanyak 200 ekor/kabupaten. jenis pakan yang diberikan yaitu konsentrat dengan nilai Rp 150.000,-/ekor; Lomba kelompok ternak tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bimtek dan Mutu Bibit Ternak yang dilaksanakan di empat lokasi yaitu kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur dengan dihadiri sebanyak 20 (dua puluh) orang dari kelompok tani dan Penyediaan Peralatan Pengolah Pakan Ternak. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan honorarium pelaksana kegiatan dan honorarium tim kegiatan hanya terealisasi sebesar 30,69%, untuk honor pemeriksa kebuntingan sebesar Rp 21.000.000,00 tidak diambil dikarenakan honor ini sudah dicover di anggaran APBN pada operasional UPSUS SIWAB. Kegiatan belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan hanya terealisasi sebesar 18% dikarenakan pada kegiatan tersebut jumlah peserta yang menginap hanya sedikit dari Kab. Belitung dan Belitung Timur saja.





**2.6.2. Kegiatan Demplot Integrasi Sapi - Jagung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.176.184.781,- atau 76,60%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Demplot Integrasi sapi – jagung dengan metode tanam : “Jajar Legowo” ukuran 100 cm x 40cm x 20 cm (40 cm adalah jarak antar baris, 20 cm adalah jarak antar tanaman jagung). Adapun jenis bibit yang digunakan adalah jenis bibit jagung hibrida multi varietas dengan luas lahan yang di tanam kurang lebih 3 hektar di lokasi Air Pelempang. Kendalanya: disebabkan oleh lokasi lahan yang tersedia dan siap untuk penanaman adalah seluas 3 Ha. Sedangkan untuk penambahan luas tanam hingga mencapai 5 Ha tidak dapat terealisasi karena kondisi lapangan (lahan baru) yang sulit untuk dibuka, yaitu masih banyak pohon-pohon besar yang harus dibuka, serta lokasi yang berbukit yang memerlukan waktu yang lama. Kondisi ini dikhawatirkan akan berakibat pada waktu tanam yang tertunda sehingga berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Solusinya: Telah dilakukan pengelolaan lahan seluas 3 hektar yang tersedia, sehingga dikurangnya sarana produksi dan dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran dan pendukungnya.



**Permasalahan :**

- Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peternak dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak adalah pengetahuan tentang aplikasi penggunaan fasilitas

pengolahan limbah ternak yang dimiliki oleh peternak yang masih kurang.

- Masih rendahnya sumber pakan ternak sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi.
- Masih terbatasnya petugas medis veteriner dan paramedis veteriner di tingkat kabupaten/kota.
- Kurangnya gudang penampungan alat dan mesin pertanian di setiap kabupaten sehingga banyak alat dan mesin pertanian di letakkan di sawah atau di kebun.
- Musim hujan yang tinggi yang menyebabkan banyak sawah yang terendam dan hama tikus sehingga akan mempengaruhi tingkat produksi.
- Masih banyak petani merendam hasil Ladanya disembarang air sehingga mempengaruhi mutu Lada.

**Solusi :**

- Diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan peternak agar fasilitas yang sudah ada dapat dipergunakan dengan baik.
- Memformulasikan pakan yang berkualitas gizi yang tinggi dan pencarian pakan alternatif yang ada dilokasi setempat guna menekan biaya produksi.
- Perlu adanya penambahan petugas medis veteriner dan paramedis veteriner di tingkat kabupaten/kota.
- Penyediaan gudang alat dan mesin perlu dibangun untuk penyimpanan alat pertanian.
- Perlu dilakukan perbaikan irigasi untuk mengendalikan air yang tinggi di sawah dan perlu dilakukan pengendalian hama oleh petugas.
- Penyediaan bak perendam yang layak bagi petani.

### 3. URUSAN KEHUTANAN

#### 3.1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

**3.1.1. Kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 384.750.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 367.879.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 367.879.000,- atau 100,00% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terpublikasinya promosi produk hasil hutan kayu dan bukan kayu. Promosi berupa produk kayu yang tumbuh di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Nyatoh, Meranti. Sedangkan produk hasil bukan kayu yang dipromosikan adalah madu, rotan, dan produk olahan seperti kopiah resam. Pada promosi tahun 2017, Dinas Kehutanan memperoleh Juara 1 tahun 2017 dan merupakan beban untuk menjaga di tahun 2018.



Gambar 3.1  
Juara 1 Indogreen Environment &  
Forestry Expo (IEFE) ke-9



Gambar 3.2  
Kunjungan Menteri LHK ke Stand  
Dishut Prov. Kep. Babel

**3.1.2. Kegiatan Pengembangan Gaharu** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 464.589.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 181.460.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 130.613.520,- atau 71,98% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam pelaksanaannya, hasil kegiatan berupa bantuan pengadaan sarana pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa alat pengering daun Gaharu untuk dikelola menjadi teh Gaharu. Diharapkan, dengan adanya alat pengering daun Gaharu ini, petani dapat menghasilkan teh dari daun Gaharu sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pengadaan alat hanya dapat terealisasi 1 unit yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Belitung.



- 3.1.3. Kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 114.455.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 82.845.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 79.587.500,- atau 96,04% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan hutan sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan berupa pendampingan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan hutan yang dilaksanakan di 8 pemegang konsesi IUPHHK-HTI. Dengan adanya pemahaman di masyarakat, maka masyarakat dapat menerima HTI dan menjadi mitra HTI dalam membangun kehutanan di daerah.



- 3.1.4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 318.206.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 203.825.890,- atau 81,53% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan pengembangan HTR di 5 kabupaten.





Gambar 3.6  
Penguatan dan Pengembangan HTR

**3.1.5. Kegiatan Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 80.120.000,- setelah rasionalisasi menjadi sebesar Rp. 68.102.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 63.680.353,- atau 93,51% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah teridentifikasinya kendala dan masalah pembangunan HTI di 8 pemegang IUPHHK-HTI, yaitu PT. Inhutani V Unit Bangka, PT. Bangka Nesia, PT. Istana Kawi Kencana (PT. IKK), PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS), PT. Indo Sukses Lestari Makmur (PT. ISLM), PT. Bangun Rimba Sejahtera (PT. BRS), PT. Agrindo Persada Lestari (PT. APL), dan PT. Andalan Karya Pertiwi (PT. AKP).



Gambar 3.7  
Bedah Kinerja IUPHHK

**3.1.6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 103.905.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 98.905.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 98.904.200,- atau 100,00% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring Penatausahaan Hasil Hutan berupa meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemegang izin industri primer hasil hutan kayu.



### 3.2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

**3.2.1. Kegiatan Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 43.524.940,- atau 20,73%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 11 Kelompok dan Hutan Desa (HD) sebanyak 1 Lembaga Desa.



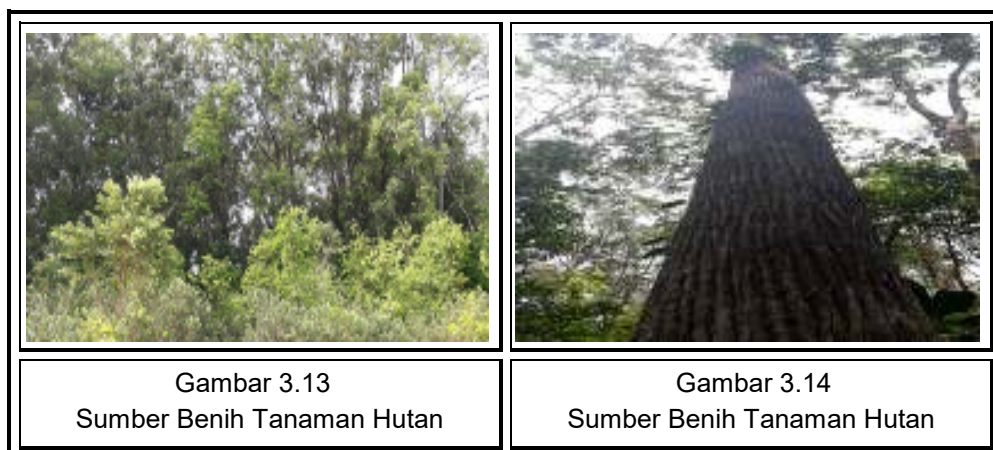
**3.2.2. Kegiatan Penanaman dalam Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 507.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 494.431.100,- atau 97,46%. Keluaran kegiatan ini adalah terehabilitasi DAS seluas 70 Ha di Kabupaten Bangka.



- 3.2.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.550.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 102.474.180,- atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap 3 pemegang IPPKH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kewajiban.



- 3.2.4. Kegiatan Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 107.959.450,- atau 71,97%. Keluaran kegiatan ini adalah terpeliharanya sumber benih tanaman hutan dan terawasinya pengada/pengedar benih/bibit tanaman utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara optimal sebanyak 3 lokasi.



- 3.2.5. Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.005.698.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 954.429.300,- atau 94,90%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan dan luar kawasan hutan seluas 60 Ha.



- 3.2.6. Kegiatan Puncak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.540.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 235.895.100,- atau 98,07%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kampanye penghijauan/penanaman di Provinsi.





### 3.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

**3.3.1. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Tepadu** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.120.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 136.490.950,- atau 99,12%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perlindungan hutan dan pengamanan hutan terpadu. Terdapat 2 kasus yang telah vonis di pengadilan yaitu *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Bukit Mangkol, Kabupaten Bangka Tengah dan Penanaman/kebun Kelapa Sawit di Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Barat.



**3.3.2. Kegiatan Peningkatan Fungsi dan Pengamanan Hutan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. . 454.320.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. . 454.239.400,- atau 99,98%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terdatanya kerusakan hutan baik itu yang disebabkan oleh *Illegal Logging* maupun *Illegal Mining* dan terakomodirnya fasilitas Tenaga Pengamanan Hutan (15 orang) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





- 3.3.3. Kegiatan Penilaian Lomba PKA Wana Lestari** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.330.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 119.476.000,- atau 99,29%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terpilihnya nominator dan juara masing-masing nominasi sebanyak 6 orang Yaitu : Penyuluh Kehutanan (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani Hutan, Kelompok Hutan Kemasyarakatan, Kader Konservasi Alamdan Kelompok Pencinta Alam.



- 3.3.4. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.843.670,- realisasi anggaran sebesar Rp. 109.658.670,- atau 71,75%, realisasi fisik sebesar 50%. Keluaran kegiatan ini adalah terkendali kebakaran hutan dan terselenggaranya sosialisasi peraturan dibidang perlindungan hutan di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan dengan peserta masing-masing 30 orang.



- 3.3.5. Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.920.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 128.298.990,- atau 99,5%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terkoordinasinya Polisi Hutan, Tenaga Pengamanan Hutan dan Tenaga Pengamanan Hutan Swakarsa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terselenggaranya pengawasan hutan.



- 3.3.6. Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.029.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 118.975.000,- atau 99,95%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen rencana pengelolaan hutan lindung yaitu di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung.



- 3.3.7. Kegiatan Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.416.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.141.000,- atau 98,56%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah data potensi dan sebaran Mangrove di Kabupaten Bangka.



- 3.3.8. Kegiatan Inventarisasi Ekosistem Esensial** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.575.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.575.000,- atau 100%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terinventarisasinya ekosistem esensial di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat.





### 3.4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

**3.4.1. Kegiatan Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 180.780.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 155.780.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 149.916.314,- atau 96,24% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi pembangunan kehutanan.



**3.4.2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 133.025.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 127.025.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 122.762.000,- atau 96,64% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya data monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebanyak 3 pemegang izin dan terkendalinya penggunaan kawasan hutan oleh pemegang IPPKH.



- 3.4.3. Kegiatan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 105.600.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 100.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 91.342.400,- atau 90,80% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dan sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) berupa tersedianya data informasi sumberdaya hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil penyusunan, diketahui Estimasi Nilai Potensi kehutanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 16.511.019.000.000,00 (enam belas triliun lima ratus sebelas miliar sembilan belas juta rupiah), terdiri dari estimasi nilai potensi kayu berdiameter di atas 50cm sebesar Rp. 9.841.000.000.000,00 (sembilan triliun enam delapan ratus empat puluh satu miliar rupiah) dengan estimasi potensi kayu sebesar 30.754.000.000 kubik, estimasi nilai potensi kayu berdiameter di atas 20 cm sebesar Rp. 6.663.000.000.000,00 (enam triliun enam ratus enam puluh tiga miliar rupiah) dengan estimasi potensi kayu sebesar 20.824.000.000 kubik, dan estimasi nilai potensi Rotan sebesar Rp. 7.019.000.000,00 (tujuh miliar sembilan belas juta rupiah) dengan estimasi potensi 11.054.000 SU. Nilai ini belum dihitung dari potensi hewan dan tumbuhan lainnya seperti obat-obatan dan serta potensi pariwisata. Dan yang paling penting, dihitung saat bencana, apabila lingkungan tidak dijaga dan pengelolaan kawasan hutan hanya mementingkan ekonomi.





- 3.4.4. Kegiatan Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 59.520.000,- setelah rasionalisasi menjadi sebesar Rp. 57.520.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 54.370.000,- atau 94,52% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah tersebarnya informasi batas kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya, hasil kegiatan berupa meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kawasan hutan, sehingga masyarakat mengerti akan keberadaan dan fungsi kawasan hutan. Seperti diketahui, masyarakat dahulu telah memahami mereka “meminjam” kawasan hutan untuk dikelola sebagai penopang hidup, sebelum ada program kehutanan. Kepemilikan lahan oleh masyarakat sangat tinggi, termasuk kepemilikan di kawasan hutan.



Gambar 3.37  
Pengecekan pal batas kawasan HL  
Sebagin di Kecamatan Simpang Rimba  
Kab. Bangka Selatan



Gambar 3.38  
Pengecekan pal batas kawasan HP  
Serudu di Kecamatan Air Gegas Kab.  
Bangka Selatan

- 3.4.5. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan Melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 139.150.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 133.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 124.530.870,- atau 93,53% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaatan SIG kehutanan selama 12 bulan berupa tersedianya data peta kawasan hutan dan informasi kawasan hutan lainnya.



Gambar 3.39  
Penyediaan Data Melalui Pemanfaatan  
SIG Kehutanan



Gambar 3.40  
Informasi Kawasan Hutan Melalui  
Pemanfaatan SIG Kehutanan

- 3.4.6. Kegiatan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 75.930.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 70.852.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.762.940,- atau 99,87% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Perpetaan Kehutanan sebanyak 30 orang, berupa pemahaman aparatur tentang perpetaan kehutanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peserta yang hadir berasal dari Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta UPTD Dinas Kehutanan.



- 3.4.7. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang IPPKH** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 53.605.000,- setelah rasionalisasi menjadi sebesar Rp. 51.605.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 46.280.600,- atau 89,68% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pemegang IPPKH terhadap pemenuhan kewajiban IPPKH, antara lain PT. Tambang Timah Tbk, Direktur PT. Kobatin, Direktur PT. Mundu Cirebon Mining, Direktur PT. Aditya Buana Inter, Direktur PT. Mitrayasa Sarana Informasi, Direktur PT. Multidinamik Bina Sejahtera, Direktur PT. Putra Kusuma Abadi, Direktur PT. Kurnia Mandiri Adiperkasa, Direktur PT. Selat Nasik Indokwarsa, Direktur PT. Mitra Stania Prima, Direktur PT. Steelindo Wahana Perkasa, Direktur PT. Fortuna Tunas Mulya, Direktur PT. Karya Emas Multisani, Direktur PT. Simpang Pesak Indokwarsa, Direktur CV. Guardian Sejahtera, Direktur CV. Pancur Ferumhil, Direktur CV. Sandika, Direktur PD. Mustika, Ketua Yayasan Bangka Agro Lestari, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung (Pemegang IPPKH Pembangunan Jalan Tanjung Nyatoh Belitung), dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka (Pemegang IPPKH TPA dan IPLT Bangka)



- 3.4.8. Kegiatan Musyawarah Nasional Forum Gaharu Indonesia** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 524.030.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 467.550.000,- atau 89,22% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Musyawarah Nasional Forum Gaharu Indonesia sebanyak 320 orang. Hasil kegiatan berupa terbentuknya Forum Petani Gaharu Indonesia, untuk mengelola budidaya Gaharu agar dapat meningkatkan taraf hidup petani Gaharu.



- 3.4.9. Kegiatan Penyelesaian Penyediaan Sumber Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA)** oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 125.635.200,- atau 83,76% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah tersosialisasinya Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) ke 6 kabupaten. Hasil kegiatan berupa masyarakat mengetahui kegiatan TORA dan termasuk proses pengajuan dan lokasi indikatif yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. TORA dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta permasalahan yang ada di daerah.



Gambar 3.47  
Sosialisasi Tanah Objek Reformasi  
Agraria (TORA) Kab. Bangka



Gambar 3.48  
Sosialisasi Tanah Objek Reformasi  
Agraria (TORA) Kab. Belitung

#### **Kendala Pelaksanaan Kegiatan:**

1. Adanya efisiensi anggaran disemua kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu DPPA disahkan.
2. Masih terdapat penolakan masyarakat terhadap pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), ada sebagian Pemerintah Daerah yang membuat surat pencabutan rekomendasi izin HTI yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan karena minimnya anggaran dan SDM (Polhut dan PPNS).

#### **Solusi:**

1. DPA Perubahan disahkan lebih awal sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan sosialisasi pembangunan HTI kepada masyarakat dan stakeholders termasuk mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak.
3. Penambahan anggaran untuk pengamanan dan perlindungan hutan termasuk penambahan personel Polhut dan PPNS.



## 4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### 4.1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

**4.1.1. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 2.565.810.000,-. Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 2.378.810.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.373.123.386,- atau 99.76% Keluaran Kegiatan ini adalah Pembangunan Penerangan Jalan umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang 100 (seratus) unit terdiri dari 50 (lima puluh) unit di Kabupaten Belitung dan 50 (lima puluh) unit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**4.1.2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 191.925.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 190.488.181,- atau 99.25%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyelenggaraan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan. Pembangkit listrik dalam Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan 48 (empat puluh delapan) Perusahaan atau 184 (seratus delapan empat) Pembangkit pada tahun 2017 sedangkan Inspektur Ketenagalistrikan ada 18 (delapan belas) Orang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





Gambar 4.3  
Pembinaan dan Pengawasan Inspektur  
Ketenagalistrikan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di Hotel BW.Sweet  
Kabupaten Belitung

Gambar 4.4  
Pembinaan dan Pengawasan Inspektur  
Ketenagalistrikan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di PT. Gemilang Cahaya Mentari  
Desa Nek nang Kabupaten Bangka

**4.1.3. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 260.410.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 245.236.342,- atau 49.17% Keluaran Kegiatan ini adalah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang berkelanjutan. Berdasarkan Surat Nomor 810/386/ESDM tanggal 15 Maret 2017 tentang Relokasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dusun Pulau Nangka Desa Tanjung Pura Kecamatan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di Setujui oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Disposisi Internal tanggal 21 April 2017 dengan Nomor agenda 817/int tanggal 15 Maret 2017 sehingga 10 (sepuluh) Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Modul Surya 100 wp, pemasangan tiang 10 (sepuluh) unit, 10 (sepuluh) unit pemasangan Lampu Peneranga Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) terintegritas dan modul Surya 100 wp, 10 (sepuluh) Set Pengepakan, pengiriman dan bongkar muat.



Gambar 4.5  
Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)  
Di Dusun Pulau Nangka Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan  
Kabupaten Bangka Tengah

- 4.1.4. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar (DAK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 849.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 575.135.000,- atau 67.74% Keluaran Kegiatan ini adalah Pengadaan dan Pemasangan PLTS SHS di Daerah terpencil. Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepasang 30 (tiga puluh) unit/rumah di Dusun Pengkalen Batu Desa Ranggung Kecamatan Payung Provinsi Bangka Belitung.



- 4.1.5. Kegiatan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 0,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 235.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 13.045.930,- atau 5.55% Keluaran Kegiatan ini adalah Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik



- 4.1.6. Kegiatan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 0,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 235.000.000,- realisasi anggaran sebesar

Rp 12.735.600,- atau 5.42% Keluaran Kegiatan ini adalah Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi.



➤ **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

1. Kurang Pengawasan Objek invekxi yang akan diawasi berbagai sektor dan banyak perusahaan yang memiliki pembangkit sendiri.
2. Sulit Koordinasi dengan pihak yang mempunyai pembangkit .
3. Kegiatan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik dan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi merupakan temuan baru yang belum pernah dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
4. Kegiatan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik dan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi belum pernah dilakukan penelitian dan uji coba di Badan penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan belum bisa di rekomendasikan sebagai Energi Baru dan Terbarukan.
5. Perusahaan yang menawarkan lelang dalam pengadaan Penerangan Jalan umum Tenaga Surya (PJUTS) tidak ada yang lolos verifikasi oleh Tim Pokja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Tidak adanya TIM Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang Ketenagalistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Solusi**

1. Penambahan Anggaran dalam Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenaga Listrikan agar pembangkit yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat mematuhi Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 .
2. Melaksanakan Kegiatan sosialisasi terhadap perusahaan yang memiliki pembangkit
3. Alat Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik dan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi dilakukan pengujian di Badan Penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya

Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

4. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik dan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi tidak dapat dihitung, dikarenakan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat 7 yang meliputi :
  - a. Penyusunan Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di dasarkan pada data harga pasar setempat, yang di peroleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
    - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
    - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
    - Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan/distributor tunggal.
    - Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya.
    - Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan Kurs tengah Bank Indonesia.
    - Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
    - Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan perencanaan (engineer's estimate), Norma indeks .
5. Perusahaan yang mengikuti penawaran lelang semua harus melengkapi dokumen-dokumen dalam lelang.
6. Harus adanya Kegiatan Peningkatan pelayanan Perizinan/ Rekomendasi di Bidang usaha Ketenagalistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar adanya TIM.

## **4.2. Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi**

- 4.2.1. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 191.100.000, . realisasi anggaran sebesar Rp 191.052.000,- atau 99.97% Keluaran Kegiatan ini adalah Pembahasan Lifting dan DBH Migas, Partisipasi dalam Kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)/FKDPM dan Koordinasi Sektor Hilir dan Hulu Migas 4 (empat) kali Pertemuan Lifting DBH Migas di Surabaya, Palembang, Semarang, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan ADPM 2 (dua) kali pertemuan di Bali dan Malang. Dari hasil Pertemuan tersebut Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 memperoleh 1.400.000 (seribu empat ratus ribu) Barel atau setara dengan Rp 2.298.165.882.





➤ **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Harga Minyak Dunia turun mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun atau tidak mencapai target yang di inginkan.
2. Belum ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sehingga menyebabkan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di tunda tahun 2017 yang akan di rencanakan tahun 2018.

**Solusi**

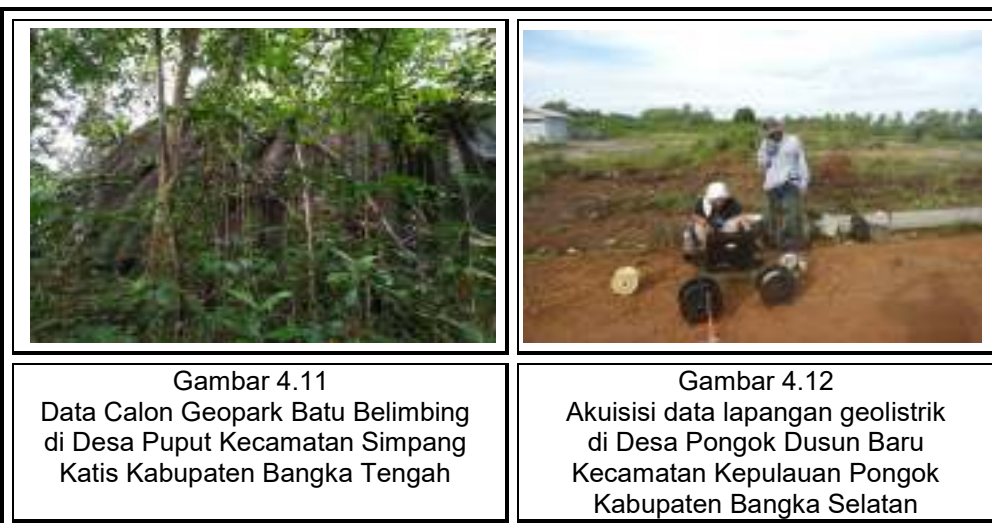
Di Pulau Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempunyai Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) jika harus Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg.

#### **4.3. Program Penelitian/Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Air Tanah**

**4.3.1. Kegiatan Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 144.170.000,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 123.170.000,- realisasi anggaran sebesar Rp107.207.509,- atau 87.04% Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya data hasil penyelidikan kebumihan. Data Calon Geopark Pulau Belitung yaitu 17 (tujuh belas) Kawasan Keragaman Geologi (Geodiversity) dan 34 (empat puluh empat) geosite (situs geologi) yang akan diajukan untuk Kawasan Cagar Alam Geologi ada 17 (tujuh belas) Kawasan Geologi (geodiversity) dan 27 (dua puluh tujuh) geosite (situs geologi), Jika di verifikasi berdasarkan batas administrasi maka ada 19 (sembilan belas) geosite di Kabupaten Belitung dan 8 (delapan) geosite di Kabupaten Belitung Timur sedangkan data Calon Geopark Pulau Bangka terdiri dari Kabupaten Bangka Selatan 15 (lima belas) Geosite, Kabupaten Bangka Tengah 3 (tiga) Geosite, Kabupaten Bangka Barat 1 (satu) Geosite, Kabupaten Bangka 2 (dua) Geosite. Indetifikasi Lapisan



Akuifer 20 (dua puluh) titik pengukuran Geolistrik di Kabupaten Bangka Selatan di Kecamatan Lepar Pongok 4 (empat) titik pengukuran yaitu 3 (tiga) titik pengukuran di Desa Tanjung Sangkar, 1 (satu) titik pengukuran di Desa Kumbung dan 16 (enam belas) titik pengukuran di Kecamatan Kepulauan Pongok terdiri dari 4 (empat) titik pengukuran di Desa Celagen, 5 (lima) titik pengukuran di Dusun Air Krais Desa Pongok, 3 (tiga) titik pengukuran di Dusun Padang Keladi Desa Pongok, 4 (empat) titik pengukuran di Dusun Baru Desa Pongok. Peristiwa Kebumihan lainnya adalah survey awal potensi batu besi di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan 1 (satu) titik, Penyelidikan Geologi dampak pasca banjir di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur 5 (lima) titik, Monitoring dengan kegiatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (KESDM RI) yang diadakan di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah 2 (dua) titik dan Penyelidikan Awal Rencana Pembangunan TPA sampah di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kapaten Bangka Tengah.



- 4.3.2. Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 88.078.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 86.462.643,- atau 98.17%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah yang baik. Dari hasil Survey Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 adalah 64 (enam puluh empat) Perusahaan pengelolaan Air Tanah dan 94 (sembilan puluh empat) titik sumur, yang belum mengajukan permohonan izin sebanyak 44 (empat puluh empat) perusahaan (52 titik sumur), yang telah mengajukan (belum direkomendasi) 1 (satu) Perusahaan (4 titik sumur) di karenakan masih dalam proses Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah mempunyai izin (Rekomendasi) sebanyak 19 (sembilan belas) Perusahaan (39 titik sumur). Jadi dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) titik sumur, yang telah mempunyai Perizinan Air Tanah yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 108 (seratus delapan) titik sumur sedangkan Perizinan

Air Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota dari proses P3D  $\pm 480$  (empat ratus delapan puluh) izin.



**4.3.3. Kegiatan Penyajian Data dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 152.684.000, Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 128.389.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 124.206.017,- atau 96.74% Keluaran Kegiatan ini adalah Penyediaan informasi data sumber daya mineral. Dari hasil penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral terdiri dari 6 (enam) Peta yaitu:

1. Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan Pulau Bangka
3. Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan Pulau Belitung
4. Peta Sebaran Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Peta Sebaran Potensi Mineral Pulau Bangka
6. Peta Sebaran Potensi Mineral Pulau Belitung



➤ **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Belanja pada Pihak Ketiga (Konsultan) dalam Kegiatan Penyelidikan Kebumihan terutama pada penyelidikan Geolistrik ada beberapa tahapan pelaksanaan yang perlu dilaksanakan, meliputi penentuan titik ukur, lokasi persiapan peralatan dan kegiatan lapangan (pengembalian data dan pengolahan data yang akuntabel) dan keadaan cuaca dan iklim mendukung untuk terhindar dari gangguan dan aman petir, hujan, dan tanah labil.
2. Spesifikasi pekerjaan survei geolistrik yang pekerjaannya dilaksanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2017, bersifat sangat teknis waktu yang singkat, sedangkan penyelidikan ini butuh waktu lebih dari 2 (dua) bulan untuk mengolah data tersebut dan terukur dalam perencanaan pekerjaan.
3. Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apa lagi kegiatan tahun 2018 tidak ada kegiatan dalam Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Tidak adanya TIM Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Solusi**

1. Cuaca harus mendukung dalam Survei Geolistrik dan Waktu yang diperlukan tidak secepat yang kita bayangkan atau waktu yang singkat.
2. Harus ada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggaran dalam pengawasan dan pembinaan harus mendukung titik sumur/perusahaan.
3. Harus adanya Kegiatan Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang usaha Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar adanya TIM.

**4.4. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah**

- 4.4.1. Kegiatan Optimisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 144.170.000,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 123.170.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 107.207.509,- atau 87.04% Keluaran Kegiatan ini adalah Tidak adanya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebelumnya dan menurunnya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara tahun berjalan serta tersedianya data produksi dan penjualan. 1 (satu) Kali Rapat Rekonsiliasi dalam daerah, 4 (empat) Kali Rapat Rekonsiliasi luar daerah, 1 (satu) kali Rapat Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 1 (satu) kali Rapat Perencanaan Daerah Penghasil, 1 (satu) kali Rapat Prognosa. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya

Alam Mineral dan Batubara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah sejumlah Rp635.847.623.154,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).



Gambar 4.17  
Rekonsiliasi Dalam Daerah di Hotel  
Bangka City Kota Pangkalpinang  
Tanggal 29 November 2017



Gambar 4.18  
Rekonsiliasi Luar Daerah Triwulan I di  
Hotel Caviton Yogyakarta  
Tanggal 20 s.d 21 April 2017

**4.4.2. Kegiatan Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 50.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 42.012.200,- atau 84.02% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penilaian pengelolaan keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6 (enam) Perusahaan di Bidang Pertambangan yang dapat dinilai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4.19  
Penilaian Prestasi Pengelolaan  
Keselamatan Pertambangan Tingkat  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di PT. Sukses Inti Makmur  
Dusun Petikan Kelurahan Sungai  
Samak  
Kecamatan Badau Kabupaten Belitung



Gambar 4.20  
Penilaian Prestasi Pengelolaan  
Keselamatan Pertambangan Tingkat  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di PT. Belitung Industri Sejahtera  
Desa Tanjung Batu Kecamatan  
Membalong Kabupaten Belitung



- 4.4.3. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 447.275.000,-. Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 442.275.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 420.765.000,- atau 99.64% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pengusahaan kegiatan usaha pertambangan oleh aparaturnya dinas dan Inspektur tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2017 sebanyak 1200 (seribu dua ratus) yang di bina pada tahun 2017 sebanyak 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) Izin usaha pertambangan.



Gambar 4.21  
Pembinaan Pertambangan  
di PT. Artha Cipta Langgeng Afiliasi  
Desa Baturusa Kecamatan Merawang  
Kabupaten Bangka



Gambar 4.22  
Pembinaan Pertambangan  
di PT. Timah (Persero) Tbk  
Bukit Baji Desa Paku  
Kabupaten Bangka Selatan

- 4.4.4. Kegiatan Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL)** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 103.945.000,-.realisasi anggaran sebesar Rp 103.544.000,- atau 99.61% Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang. Luas lahan Reklamasi 3.9 Ha, Luas lahan yang sudah terganggu 424.86 Ha, Rencana luas area Darat terganggu 279.25 Ha.





**4.4.5. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah** oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp 0,-. Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp 277.945.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 265.889.410,- atau 95.71% Keluaran Kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademis sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah. Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah dilakukan 9 (sembilan) kali pertemuan/rapat.



➤ **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

1. Dana yang terbatas belum bisa mengakomodir semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada

2. Tidak ada peralatan DRONE untuk memantau tingkat keberhasilan penilaian kegiatan Reklamasi
3. Adanya benturan kewenangan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP).
4. Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi.
6. Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang – undangan sektor pertambangan dengan sektor lain
7. Tidak adanya TIM Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang usaha Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **Solusi**

1. Penambahan Anggaran pada kegiatan agar bisa mengakomodir semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada
2. Pengadaan peralatan Drone untuk memantau tingkat keberhasilan penilaian kegiatan Reklamasi
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan mengenai kawasan hutan lindung dan produksi dengan wilayah pertambangan.
4. Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kab/Kota.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.
7. Harus adanya Kegiatan Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang usaha Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar adanya TIM Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang usaha Pertambangan.

## 5. URUSAN PARIWISATA

### 5.1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

#### 5.1.1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata dalam APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.177.785.000,- dan pada APBD-P Tahun 2017 mengalami penurunan anggaran menjadi sebesar Rp. 142.465.000,- sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 87.627.850,- atau 61,51%. Keluaran atau output kegiatan adalah ketersediaan website untuk informasi kebudayaan dan pariwisata daerah.



#### 5.1.2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri dalam APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 623.680.000,- mengalami perubahan anggaran dalam APBD-P Tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 600.092.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.489.526.854,- atau 81,58%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah terlaksananya event promosi pariwisata didalam dan luar daerah (Event dalam daerah yaitu Bangka Expo, Belitung Fair dan Babel Fair sedangkan Event Luar Daerah yaitu Bali Invesment Tourism & Trade Expo di Lippo Mall Bali, Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara di JCC Jakarta dan Sumatera Selatan Expo 2017 di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang).



#### 5.1.3. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC) dalam APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.455.546.000,- dalam dalam APBD-P Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 370.446.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.357.034.726,- atau 96,38%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya operasionalisasi *TIC (Tourist Information Center)* di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang dan Bandara Hanandjoedin, Tanjung Pandan yang meliputi 4 orang petugas jaga, penataan serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan materi *TIC (Tourist Information Center)*.



#### 5.1.4. Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)

Kegiatan Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.638.325.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 581.255.050,- atau 91,06%. Keluaran atau output kegiatan adalah tersedianya publikasi dan pencitraan (Kepariwisataa) Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini meliputi 5 (lima) macam penyediaan/pengadaan bahan promosi, publikasi

dan souvenir yaitu Video Pariwisata 7.000 keping, Cetak Leaflet 7.000 pcs, Peta Pariwisata 9.283 pcs, Buku Kerja 3.000 pcs, dan *Goodie Bag* 5.000 pcs.

	
Gambar 5.7 Video Pariwisata	Gambar 5.8 Cetak Leaflet
	
Gambar 5.9 Cetak Peta	Gambar 5.10 Souvenir ( Buku Kerja )
	
Gambar 5.11 Bahan Promosi 2017	

#### 5.1.5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Dukungan Event Promosi)

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Dukungan Event Promosi) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.777.570.000,- dalam APBD-P Tahun 2017 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 1.388.305.000,- sedangkan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 774.081.441,- atau 55,76%. Keluaran



atau output kegiatan ini adalah mendukung terlaksananya penyelenggaraan event event promosi pariwisata yang ada di 7 Kabupaten / Kota, adapun kegiatan yang didukung adalah sebagai berikut :

1. Jazz in the City (Pangkalpinang)
2. UKM UBB (Bangka)
3. Sungailiia Triathlon 200017 (Bangka)
4. Pangkalpinang Travel Mart (Pangkalpinang)
5. Pelangi Travel Mart (Bangka Selatan)
6. Toboali City on Fire (Bangka Selatan)
7. Babel Vlog Festival
8. Wonderfull Sail 2 Indonesia (Bangka)
9. Liga Dangdut Indonesia (Pangkalpinang)
10. Civil Engineering One Week Festival (Bangka)
11. Festival Rakyat 2017
12. Jambore Nasional TKCI ke XIII
13. Roadshow Asian Games 2017 (Palembang dan Jakarta)
14. Bangka Belitung Food Festival 2017
15. Bangka Belitung 10K
16. Mutik Siput Gonggong
17. Jazz on the Bridge 2017



#### 5.1.6. Pengembangan Pasar Pariwisata (Farm Trip)

Kegiatan Pengembangan Pasar Pariwisata (Farm Trip) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.306.925.000,- dan dalam APBD-P Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 277.257.200,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.855.140,- atau 96,97%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah jumlah peserta farmtrip (widyawisata pengenalan) sehingga dikenalnya destinasi wisata Bangka Belitung oleh penyelenggara tour, media massa dan wisatawan.



#### 5.1.7. Sosialisasi Aplikasi Promosi Pariwisata

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Promosi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran pada APBD-P Tahun 2107 sebesar Rp.300.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.284.267.300,- atau 94,76%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah tersedianya informasi promosi pariwisata.



#### 5.1.8. Pengadaan TIC Mobile di Pulau Bangka dan Belitung (2 unit)

Kegiatan Pengadaan TIC Mobile di Pulau Bangka dan Belitung (2 unit) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran pada APBD-P Tahun 2107 sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.371.894.250,- atau 92,97%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan operasional Tourist Information Center (TIC) di Pulau Bangka dan Belitung.



## 5.2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

### 5.2.1. Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung)

Kegiatan Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.104.735.000,- dan pada APBD-P Tahun 2017 mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 81.081.170,- sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.70.478.780,- atau 86,92%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan usaha sebanyak 86 pelaku usaha.



### 5.2.2. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.219.119.000,- dan pada APBD-P Tahun 2017 mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 1.098.068.055,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 979.150.004,- atau 89,17%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat desa wisata dan seleksi pemilihan putra – putri di bidang pariwisata.



### 5.2.3. Perlombaan Usaha Wisata Kuliner

Kegiatan Perlombaan Usaha Wisata Kuliner dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 142.718.000,- dan pada APBD-P Tahun 2017 mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 135.288.400,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.130.096.310,- atau 96,16%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya perlombaan kuliner khas Bangka Belitung bagi 50 pelaku usaha kuliner.





#### 5.2.4. Penyusunan Paket Wisata Destinasi Perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan Penyusunan Paket Wisata Destinasi Perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD-P Tahun 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.266.891.057,- atau 76,25%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan paket wisata perjalanan bagi 162 pelaku pariwisata dan tersusunnya dokumen kesepakatan.



#### 5.2.5. Pengadaan Pemasangan Lampu Taman 50 Titik di Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan Pengadaan Pemasangan Lampu Taman 50 Titik di Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan fisik 0 %.

##### Kendala :

1. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala status penyerahan barang yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan



Sosail yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Penjelasan pasal 8 point (1) bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan.
3. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur tersebut, maka sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal sesudahnya tidak ada atau belum ada proposal yang disampaikan kepada Gubernur berkaitan pengadaan lampu taman di Daya Tarik Wisata yang masuk dan di disposisi untuk dievaluasi dan pengusulan hibah pada tahun berjalan sehingga tidak dapat dilanjutkan dengan penetapan daftar penerima hibah oleh Gubernur.

**Solusi :**

Agar proposal dapat disampaikan pada awal tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan dengan mengacu kepada pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosail yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**5.2.6. Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya**

Kegiatan Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD-P Tahun 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.185.995.250,- atau 93,00%. Keluaran atau output kegiatan adalah tersedianya buku kalender event pariwisata dan budaya.



### 5.2.7. Kajian dan Survei Geopark Pulau Bangka dan Study Observasi Marine Park

Kegiatan Kajian dan Survei Geopark Pulau Bangka dan Study Observasi Marine Park dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD-P Tahun 2017 sebesar Rp. 700.000.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.411.016.092,- atau 58,72%.

Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya kajian, survey pengembangan kawasan Geopark dan studi observasi Marine Park.



### 5.3. Program Pengembangan Kemitraan

#### 5.3.1. Pendukung Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisata (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia)

Kegiatan Pendukung Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisata (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dalam dalam APBD-P mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 434.799.275,- sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.400.115.462,- atau 92,83%. Keluaran atau output kegiatan adalah Sertifikasi bagi para pelaku kepariwisataan.



## 6. URUSAN INDUSTRI

### 6.1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

**6.1.1. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan IKM** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.810.000 ,- realisasi anggaran sebesar Rp. 112.096.400,- atau 99,37%. Keluaran kegiatan adalah terbinanya 210 IKM/Masyarakat di 7 kabupaten/kota dalam menghadapi masalah industri.



Gambar 6.1  
Penyuluhan dan Pendampingan IKM di  
Kab. Bangka Tengah



Gambar 6.2  
Penyuluhan dan Pendampingan IKM di  
Kab. Bangka

**6.1.2. Kegiatan Sertifikasi Halal, Haki dan Uji Nutrisi dan Penyuluhan Keamanan PIRT** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 590.447.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 545.588.851,- atau 92,40 %. Keluaran kegiatan adalah terbinanya 380 IKM Pangan di 7 kabupaten/kota sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikasi PIRT, HKI, Halal dan Uji Nutrisi.



Gambar 6.3  
Audit Sertifikasi Halal  
di Pangkalpinang



Gambar 6.4  
Peyuluhan Keamanan Pangan  
di Kab. Belitung

- 6.1.3. Kegiatan Pemberdayaan Klinik Kemasan kepada Asosiasi IKM** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 187.235.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 181.514.758,- atau 96,94%. Keluaran kegiatan terfasilitasinya 120 Design Produk IKM dalam rangka pemanfaatan Klinik Kemasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 6.1.4. Kegiatan Promosi Produk IKM di Event Nasional** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.548.464.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 547.954.759,- atau 99,91%. Keluaran kegiatan adalah Terfasilitasinya 28 Perajin dalam memasarkan produk baik secara Nasional maupun Internasional di Jakarta, Bali, Palembang, Batam.



- 6.1.5. Kegiatan Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah di Kabupaten Bangka** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.255.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 67.946.110,- atau 98,11%. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 25 Peserta Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Buah.





**6.1.6. Kegiatan Pengembangan Furniture Batang Kelapa di Kabupaten Bangka Tengah** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.930.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 90.162.750,- atau 93,02%. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 20 IKM/Perajin Peserta Pelatihan Pengembangan Produk Furniture Berbahan Baku Batang Kelapa.



**6.1.7. Kegiatan Pengadaan Bantuan Alat Pengolahan Terasi** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.070.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.490.000,- atau 4,01%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya 1 Paket Bantuan Alat Pengolahan Terasi di Kabupaten Bangka Barat.





**6.1.8. Kegiatan Sosialisasi e-Commerce bagi Pelaku Industri di 5 Kabupaten/ Kota** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 176.840.200 ,- atau 98,24%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya 150 Pelaku Industri yang mendapatkan Fasilitas dan Akses Pasar melalui e-Commerce.



## 6.2. Program Penataan Struktur Industri

**6.2.1. Kegiatan Pembinaan Produk OVOP di Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.105.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 103.705.400,- atau 95.93%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Produk OVOP untuk 7 IKM di Kabupaten/Kota.



**6.2.2. Kegiatan Forum Koordinasi OVOP oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.965.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.894.420,- atau 73,80%. Keluaran kegiatan adalah Terasilitasinya Forum Koordinasi OVOP di 7 Kabupaten/Kota.



**6.2.3. Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Povinsi di 7 Kabupaten/Kota** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.500.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 293.597.644,- atau 98,36%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunya 1 Dokumen RIPIP.



### 6.3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

**6.3.1. Kegiatan Pendataan Industri Besar/IAMT di 7 Kabupaten/Kota** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.985.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.390.000,- atau 46,99%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya 1 paket Data Industri yang Valid dan terbaru.



### 6.4. Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)

**6.4.1. Kegiatan Pengembangan Industri Berbasis Gaharu (Minyak Atsiri)** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.972.300,- realisasi anggaran sebesar Rp. 57.872.300,- atau 99,83%. Keluaran kegiatan adalah Terlatihnya Peserta Pembinaan Keterampilan dalam Pengembangan Industri Berbasis Gaharu (Minyak Atsiri) di Kabupaten Bangka Tengah



Gambar 6.25  
Pengembangan Industri Berbasis  
Gaharu (Minyak Atsiri)  
di Kab. Bangka Tengah

Gambar 6.26  
Pengembangan Industri Berbasis  
Gaharu (Minyak Atsiri)  
di Kab. Bangka Tengah

**6.4.2. Kegiatan Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.771.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 59.269.200,- atau 95,95%. Keluaran kegiatan adalah Terlatihnya 30 Peserta Pembinaan Keterampilan dalam Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kabupaten Bangka



Gambar 6.27  
Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kab. Bangka

## **6.5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan**

**6.5.1. Kegiatan Sekretariat Dekranasda** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 501.502.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 487.507.840,- atau 97,21%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya operasional Sekretariat Dekranasda.





Gambar 6.28  
Rapat Kerja Nasional Dewan Kerajinan Nasional Seluruh Indonesia di Jakarta



Gambar 6.29  
Musda Dekranasda Prov. Kep. Babel dan Pengukuhan Pengurus Dekranasda Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang

**6.5.2. Kegiatan Gelar Produk Kerajinan di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.512.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 211.061.400,- atau 91,17 %. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya 28 perajin dalam memasarkan Produk Kerajinan Unggulan di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .



Gambar 6.30  
Babel Fair di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang



Gambar 6.31  
Galeri Produk Unggulan di Bandara Depati Amir Pangkalpinang

**6.5.3. Kegiatan Pelatihan Kerajinan di Desa Wisata** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 148.020.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 130.805.000,- atau 88,37%. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 60 Peserta Pelatihan Kerajinan Wisata di Desa Wisata.





**6.5.4. Kegiatan Rumah Rajutan** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 84.146.500,- atau 98,82%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya 75 Perajin yang memiliki keterampilan kerajinan rajutan di Rumah Rajutan.



- **Permasalahan dan Solusi**  
**Permasalahan**

Adanya Kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dikarenakan ketidaksesuaian dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Solusi**

Untuk selalu mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 dalam melakukan Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran yang bersifat pemberian bantuan barang produksi kepada masyarakat dan pelaku industri.

## 7. URUSAN PERDAGANGAN

### 7.1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

**7.1.1. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 196.330.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 175.105.520,- atau 89,19%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa selama 1 Tahun.



Gambar 7.1  
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa  
di Kab. Bangka Barat



Gambar 7.2  
Pengawasan Barang Beredar dan  
Jasa di Kab. Bangka

**7.1.2. Kegiatan Pos Layanan Pengaduan Konsumen** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.780.000,-,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.740.000,- atau 72,49%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya Pos Layanan Pengaduan Konsumen yaitu sebanyak 8 lokasi di Kabupaten Bangka.



Gambar 7.3  
Pos Layanan Pengaduan Konsumen  
Di Kab. Bangka



Gambar 7.4  
Pos Layanan Pengaduan Konsumen  
Di Kab. Bangka

**7.1.3. Kegiatan Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 126.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 108.432.255,- atau 86,06%. Keluaran kegiatan adalah Terlatihnya Personil Teknis Laboratorium UPTD BSPM.



- 7.1.3. Kegiatan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi UPTD BSPM** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.302.556,- realisasi anggaran sebesar Rp. 15.302.556,- atau 100 %. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya akreditasi laboratorium UPTD BSPM.



## 7.2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- 7.2.1. Kegiatan Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.138.480.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.030.966.956,- atau 94,97 %. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Ekspor dan Impor.



**7.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.120.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 41.331.646,- atau 85,89%. Keluaran kegiatan adalah Terpeliharanya Status Akreditasi di UPTD BSPM Disperindag Prov.Kep. Bangka Belitung.



**7.2.3. Kegiatan Verifikasi Data Ekspor dan Impor** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.020.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 36.292.267,- atau 72,56%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya verifikasi data ekspor impor di 7 Kab/Kota.





**7.2.4. Kegiatan Verifikasi Ekspor Timah** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 204.362.490,- atau 92,93%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Verifikasi Ekspor Timah oleh Tim Verifikasi di 7 Kab/Kota.



**7.2.5. Kegiatan Pelatihan Prosedur Ekspor** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.277.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 57.462.650,- atau 86,70%. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 15 Pelaku Usaha Peserta Pelatihan Prosedur Ekspor.





Gambar 7.15  
Pelatihan Prosedur Ekspor  
di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Grogol  
Jakarta.

**7.2.6. Kegiatan Monitoring Mutu Lada Putih, CPO dan Karet** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 145.990.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 141.100.108,- atau 96,65%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya Monitoring kualitas Mutu Lada, CPO dan Karet.



Gambar 7.16  
Monitoring Mutu Lada Putih, Gaharu,  
CPO di Kabupaten Belitung Timur



Gambar 7.17  
Pengujian dari Hasil Monitoring  
Direktorat Standarisasi dan  
Pengendalian Mutu di Ciracas

### 7.3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

**7.3.1. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.037.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 350.114.693,- atau 76,77%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan Pasar Murah dan Sosialisasi Resi Gudang di 7 Kab/Kota.



Gambar 7.18  
Fasilitasi Pasar Murah  
di Kab. Belitung Timur



Gambar 7.19  
Sosialisasi Sistem Resi Gudang  
di Kab. Belitung

## 8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

### 8.1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- 8.1.1. **Kegiatan Pokja pembangunan KTM Tk. Provinsi** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.020.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.75.429.950,- atau 95,46%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat Pokja Tk. Provinsi Tahun 2017.



- **Permasalahan dan Solusi**
  - **Permasalahan**  
Didalam rapat KTM anggota tim pokja sering tidak hadir dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga rapat diwakili oleh staf dari SKPD tim pokja, sehingga tidak dapat mengambil keputusan.
  - **Solusi**  
Mengharapkan peran aktif dari anggota tim pokja KTM untuk bisa hadir dalam setiap rapat tim pokja KTM sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat.

### 8.2. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

- 8.2.1. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.88.829.000,- atau 88,83%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Bimtek/Pelatihan Ternak Kecil, Pelatihan Pengembangan Pupuk Organik, Pelatihan Adaptasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan ternak unggas itik/ayam sebanyak 30 orang peserta, dan terlaksananya Pelatihan Ternak Ayam sebanyak 30 orang peserta.



- 8.2.2. Kegiatan Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.233.500/144.183.500,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 144.183.500,- atau 99,97%. Keluaran kegiatan adalah penyerasian lingkungan transmigrasi.



## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dasar hukum penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah N0 58 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### **A. Dana Dekonsentrasi**

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah).

##### **1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana**

Alokasi dana Dekonsentrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2016, yaitu berasal dari 16 kementerian dengan 19 SKPD Pelaksana. Total Dana Dekonsentrasi yang diterima yaitu sebesar Rp. 83,327,366,000 dengan realisasi sebesar Rp. 76,237,859,722 atau sebesar 91.49%. Rincian Instansi pemberi, SKPD pelaksana, pagu dana dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.1.



**Tabel 5.1.**  
**INSTANSI PEMBERI DAN SKPD PELAKSANA DEKONSENTRASI LINGKUP PROVINSI TAHUN 2017**

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PAGU DANA KEGIATAN (RP)	REALISASI S/D DESEMBER 2017	
				(Rp)	(%)
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	6,655,509,000	6,608,143,841	99.29
2	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	11,742,800,000	11,038,600,478	94.00
3	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	10,839,765,000	10,316,949,430	95.18
4	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	3,422,229,000	3,328,744,000	97.27
5	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	274,818,000	273,196,200	99.41
6	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2,033,937,000	2,009,539,387	98.80
7	Kementerian Pertanian	Dinas Pangan	2,037,700,000	1,995,690,000	97.94
8	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Catatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	1,280,000,000	1,251,528,513	97.78
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,930,345,000	1,655,812,120	85.78
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	550,000,000	531,975,900	96.72
11	Kementerian Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,739,200,000	1,669,859,450	96.01
12	Arsip Nasional Republik Indonesia/ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,107,123,000	1,047,122,052	94.58
13	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	475,000,000	450,302,000	94.80
14	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	19,167,295,000	16,791,614,818	87.61
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	777,880,000	733,203,885	94.26
16	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM	2,368,854,000	2,231,359,600	94.20
17	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,565,367,000	2,758,189,319	77.36
18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12,713,567,000	11,039,725,257	86.83
19	Kementerian Dalam Negeri	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	645,977,000	506,304,313	78.38
<b>TOTAL</b>			<b>83,327,366,000</b>	<b>76,237,859,722</b>	<b>91.49</b>

Sumber : Laporan Triwulan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Tahun 2017

**Tabel 5.2**  
**SATUAN KERJA PELAKSANA, PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANA DEKONSENTRASI**  
**LINGKUP PROVINSITAHUN 2017**

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM (Rp)	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN (Rp)	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
1.	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	3.871.849.000	-	3.871.849.000	3.841.906.065	99,23	-
				Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	873.977.000	863.708.200	98,83	
				Pembinaan Sekolah Menengah Atas	949,348,000	948,943,700	99.96	
				Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	2,048,524,000	2,029,254,165	99.06	
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	335.375.000		335.575.000	333.868.300	99.49	
				Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan kerjasama Luar Negeri	335.575.000	333.868.300	99.49	
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	975.875.000		975.985.000	960.269.476	98.39	
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	975.985.000	960.269.476	98.39	
		Program Pelestarian	1.472.100.000		1.472.100.000	1.472.100.000	100,00	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
		Budaya						
				Pembinaan Kesenian	1.472.100.000	1.472.100.000	100,00	
2.	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	652.191.000	-	652.191.000	622.141.401	95,39	-
-	-	-	-	a. Produksi Benih Bawang Merah (Kg)	144.000.000	131.376.000	91,23	-
-	-	-	-	b. Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Unit)	160.000.000	148.490.000	92,81	-
-	-	-	-	c. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura (Kali)	112.500.000	106.727.200	94,87	-
				d. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	68.891.000	68.748.201	99,79	
				e. Layanan Perkantoran (Bulan)	166.800.000	166.800.000	100,00	
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	3.053.109.000		3.053.109.000	2.406.085.856	78,81	
				a. Dokumen Pengelolaan Produksi Tanaman Serealialia (Dokumen)	38.186.000	38.186.000	100,00	
				b. Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan (Hektar)	255.580.000	68.072.700	26,63	
				c. Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (Hektar)	557.750.000	544.849.500	97,69	
				d. Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	82.210.000	65.671.000	79,88	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				(Hektar)				
				e. Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI (Ha)	631.997.000	537.711.200	85,08	
				f. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	1.487.386.000	1.151.595.456	77,42	
		<b>Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan</b>	<b>284.110.000</b>		<b>284.110.000</b>	<b>269.731.372</b>	<b>94,94</b>	
				a. Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan (Bulan)	18.440.000	18.440.000	100,00	
				b. Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya (Dokumen)	235.670.000	221.291.372	93,90	
				c. Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan (Kegiatan)	30.000.000	30.000.000	100,00	
		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	<b>4.987.010.000</b>		<b>4.987.010.000</b>	<b>4.834.569.078</b>	<b>96,94</b>	
				a. Layanan dan pembinaan kegiatan lingkup kegiatan irigasi pertanian (layanan)	88.380.000	87.501.000	99,01	
				b. Design Cetak Sawah (Dokumen)	2.550.000.000	2.535.104.529	99,42	
				c. Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian (Layanan)	607.900.000	588.622.649	96,83	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				d. Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Alsintan (Layanan)	27.900.000	26.540.000	95,13	
				e. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.621.880.000	1.525.672.900	94,07	
				f. Data Layanan Operasional Pengawasan Pupuk Subsidi	33.000.000	22.500.000	68,18	
				g. Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Pupuk Pestisida	19.300.000	11.707.000	60,66	
				h. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	38.650.000	36.921.000	95,53	
		<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</b>	<b>2.766.380.000</b>		<b>2.766.380.000</b>	<b>2.555.039.671</b>	<b>92,36</b>	
				a. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian	2.648.880.000	2.437.810.242	92,03	
				b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	117.500.000	117.229.429	99,77	
<b>3</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial</b>	<b>215.937.000</b>		<b>215.937.000</b>	<b>210.338.760</b>	<b>97,41</b>	
				Perencanaan dan Penganggaran	215.937.000	210.338.760	97,41	
		<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1.655.425.000</b>		<b>1.655.425.000</b>	<b>1.560.115.290</b>	<b>94,24</b>	
				a. Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Sosial	304.831.000	303.439.200	99,54	
				b. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan	1.150.594.000	1.058.900.790	92,03	



NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				Kelembagaan Masyarakat				
				c. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	200.000.000	197.775.300	98,89	
		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.782.166.000</b>		<b>1.782.166.000</b>	<b>1.550.864.170</b>	<b>87,02</b>	
				a. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	339.416.000	255.252.650	75.20	
				b. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	318.980.000	264.045.600	82.78	
				c. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	190.000.000	135.034.120	71.07	
				d. Rehabilitasi Sosial Anak	736.190.000	707.148.800	96.06	
				e. Pelayanan Sosial Lanjut Usia	197.580.000	189.383.000	95.85	
		<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>3.497.787.000</b>		<b>3.497.787.000</b>	<b>3.319.269.500</b>	<b>94.90</b>	
				a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2.456.004.000	2.381.487.000	96.97	
				b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	355.023.000	332.398.000	93.63	
				c. Jaminan Sosial Keluarga	686.760.000	605.384.500	88.15	
		<b>Program Penanganan Fakir Miskin</b>	<b>3.688.450.000</b>		<b>3.688.450.000</b>	<b>3.680.483.909</b>	<b>99,78</b>	
				Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	2.180.460.000	2.179.489.200	99.96	
				Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	1.507.990.000	1.500.994.709	99.54	
<b>4</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ketenaga kerjaan</b>	<b>302.458.000</b>		<b>302.458.000</b>	<b>298.604.700</b>	<b>98,73</b>	
				a. Dukungan Manajemen dan	163.135.000	160.087.700	98,13	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi				
				b. Pengembangan Usaha Transmigrasi	85.875.000	85.500.000	99,56	
				c. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	53.448.000	53.017.000	99,19	
		<b>Program Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja</b>	<b>875.603.000</b>		<b>875.603.000</b>	<b>860.530.150</b>	<b>98,28</b>	
				a. Peningkatan Penerapan Pengupahan	213.930.000	209.796.150	98,07	
				b. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	70.000.000	70.000.000	100	
				c. Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	200.573.000	194.522.600	96,98	
				d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	177.400.000	173.759.800	97,95	
				e. Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	213.700.000	212.452.300	99,42	
		<b>Program Peningkatan</b>	<b>1.248.991.000</b>		<b>1.248.991.000</b>	<b>1.245.715.200</b>	<b>99,74</b>	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
		<b>Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas</b>						
				a. Pengembangan dan peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	101.106.000	100.922.000	99,82	
				b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	90.040.000	89.607.400	99,52	
				c. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas	672.960.000	670.728.000	99,67	
				d. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	384.885.000	384.457.000	99,89	
		<b>Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>1.286.098.000</b>		<b>1.286.098.000</b>	<b>1.221.899.269</b>	<b>95,01</b>	
				a. Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	474.430.000	405.863.800	85,55	
				b. Peningkatan Pelindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	35.700.000	35.700.000	100	
				c. Peningkatan Penerapan	329.000.000	323.414.200	98,30	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
				d. Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	208.000.000	208.000.000	100	
				e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan	250.505.000	249.520.953	99,61	
5	Sekretariat Daerah	Program Bina Administrasi Kewilayahan	274.818.000		274,818,000	273,196,200	99.41	
				Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	274,818,000	273,196,200	99.41	
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	2.033.937.000		2.033.937.000	2.009.539.398	98.80	
				a. Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	228.680.000	225.967.774	98.81	
				b. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	200.000.000	198.086.456	99.04	
				c. Peningkatan Wawasan Pemuda	146.918.000	144.342.399	98.25	
				d. Pengembangan Sentra Keolahragaan	1.458.339.000	1.441.142.769	98.82	
7	Dinas Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	2.037.700.000		2.037.700.000	1.995.689.750	97.94	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
		Masyarakat						
				a. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	855.500.000	851.773.950	99.56	
				b. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	50.000.000	49.550.000	99.10	
				c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	777.200.000	753.983.100	97.01	
				d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	355.000.000	340.382.700	95.88	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kesetaraan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan	1.280.000.000		1.280.000.000	1.267.428.513	99,02	
				Peningkatan Kesetaraan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan	1.280.000.000	1.267.428.513	99,02	
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	622.875.000,-		622.875.000,-	607.225.177,-	97,49	
				a. Pengelolaan Keuangan KKP	73.909.000,-	66.309.700.000,-	89.72	



NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				b. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran Kinerja dan Pelaporan KKP	504.266.000,-	498.272.377,-	98.81	
				c. Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	44.700.000,-	42.643.100,-	95.40	
10	Dinas Lingkungan Hidup	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	550.000.000		550.000.000	531.975.900	96.72	
				Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	550.000.000	531.975.900	96.72	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	564.106.000		564.106.000,-	372.665.420	66.06	
				a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan sertifikasi Awak Kapal Perikanan	67.950.000,-	55.565.000,-	81.77	
				b. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	144.053.000,-	108.318.000	75.19	
				c. Pengendalian Penangkapan Ikan	172.936.000,-	118.502.100	68.52	
				d. Pengelolaan Kenelayanan	263.698.000,-	136.408.500	51.73	
				e. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	23.154.000,-	8.049.456	34.76	
				f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	65.251.000	64.324.464,-	98.58	
		Program Pengelolaan	353.130.000,-		353.130.000,-	335.039.400	94.88	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
		Sumber Daya Perikanan Budidaya						
				a. Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	600.000,-	600.000,-	100	
				b. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	30.140.000,-	28.744.000,-	95.37	
				c. Pengelolaan Sistem Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	32.940.000,-	31.403.700,-	95.34	
				d. Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	127.550.000,-	118.072.400	92.57	
				e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	135.920.000,-	130.716.400,-	96.17	
				f. Pengelolaan Pakan Ikan	25.980.000,-	25.502.900,-	98.16	
		Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	233.150.000,-		233.150.000,-	195.752.400,-	83.96	
				a. Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	90.700.000	75.000.000,-	82.69	
				b. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	75.050.000,-	54.238.000	72.27	
				c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	67.400.000,-	66.514.400,-	98.69	
		Program Pengelolaan Ruang Laut	157.084.000,-		157.084.000,-	145.129.900,-	92.39	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				a. Perencanaan Ruang Laut	49.584.000,-	45.646.200	92.06	
				b. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	107.500.000,-	99.483.700,-	92.54	
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Kepariwisata	1,739,200,000		1,739,200,000	1,669,859,450	96.01	
				a. Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	519,200,000	509,791,800	98.19	
				b. Pengembangan Pasar Asia Tenggara	150,000,000	118,960,340	79.31	
				c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik	150,000,000	149,150,100	99.43	
				d. Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara	200,000,000	199,139,360	99.57	
				e. Pengembangan Segmen Pasar Personal	500,000,000	497,565,000	99.51	
				f. Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisata	220,000,000	195,252,850	88.75	
12	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Program Peyelenggaraan Kearsipan Nasional	229.004.000		229.004.000	214.234.600	93.55	
				Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	229.004.000	214.234.600	93.55	
		Program Pengembangan Perpustakaan	878.119.000		878.119.000	837.504.152	95.37	
				Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	878.119.000	837.504.152	95.37	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	475.000.000		475.000.000	450.601.957	94,86	
				Pengendalian pelaksanaan penanaman modal wilayah	475.000.000	450.601.957	94,86	
14	Dinas Kesehatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	1.082.448.000		1.082.448.000	840.165.052	77.62	
				a. Pembinaan Administrasi Kepegawaian	95,127,000	11,122,000	11.69	
				b. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	35,520,000	34,472,797	97.05	
				c. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	351,822,000	333,201,219	94.71	
				d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji	40,050,000	-	-	
				e. Pengelolaan Data dan Informasi	248,170,000	246,576,786	99.36	
				f. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	17,580,000	16,510,000	93.91	
				g. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN / KIS	294,179,000	198,282,250	67.40	
		Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	7,390,764,000		7,390,764,000	6,369,490,664	86.18	
				a. Pembinaan Gizi Masyarakat	2,339,076,000	2,046,269,900	87.48	
				b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan	510,226,000	484,635,900	94.98	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				Kesehatan Masyarakat				
				c. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	642,212,000	588,825,700	91.69	
				d. Pembinaan Kesehatan Keluarga	1,364,289,000	1,258,376,680	92.24	
				e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,939,749,000	1,547,522,084	79.78	
				f. Penyehatan Lingkungan	595,212,000	443,860,400	74.57	
		<b>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2,432,715,000</b>		<b>2,432,715,000</b>	<b>2,119,430,702</b>	<b>87.12</b>	
				a. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	216,652,000	197,732,900	91.27	
				b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	259,619,000	210,311,770	81.01	
				c. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	460,021,000	423,009,767	91.95	
				d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	548,537,000	500,280,259	91.20	
				e. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	313,960,000	283,336,600	90.25	
				f. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	633,926,000	504,759,406	80.00	
		<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	<b>4,104,043,000</b>		<b>4,104,043,000</b>	<b>3,872,748,148</b>	<b>94.36</b>	
				a. Surveilans dan Karantina Kesehatan	616,634,000	564,715,300	91.58	
				b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	960,775,000	948,865,008	98.76	
				c. Pencegahan dan	907,833,000	870,729,400	95.91	



NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				Pengendalian Penyakit Menular Langsung				
				d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1,029,400,000	922,100,426	89.58	
				e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	338,411,000	318,543,561	94.13	
				f. Pencegahan dan Pengendalian masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	250,990,000	247,794,453	98.73	
		<b>Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>	<b>1,318,700,000</b>		<b>1,318,700,000</b>	<b>1,230,512,252</b>	<b>93.31</b>	
				a. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	339,885,000	309,273,600	90.99	
				b. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	358,754,000	334,882,100	93.35	
				c. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	96,235,000	94,606,000	98.31	
				d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	364,789,000	337,537,396	92.53	
				e. Peningkatan Penilaian alat kesehatan (alkes) dan Perbekalain Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	91,144,000	87,853,500	96.39	
				f. Peningkatan Pengawasan alat Kesehatan (alkes) dan	67,893,000	66,359,656	97.74	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)				
		<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>2,838,625,000</b>		<b>2,838,625,000</b>	<b>2,359,327,700</b>	<b>83.12</b>	
				a. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	292,888,000	208,775,300	71.28	
				b. Pelatihan SDM Kesehatan	1,451,900,000	1,161,983,600	80.03	
				c. Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	533,713,000	500,066,250	93.70	
				d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	560,124,000	488,502,550	87.21	
<b>15</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>	<b>Program Planologi dan Tata Lingkungan</b>	<b>307,280,000</b>		<b>307,280,000</b>	<b>306,060,919</b>	<b>99.55</b>	
				a. Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	135,065,000	134,532,500	99.61	
				b. Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	47,930,000	47,893,690	99.92	
				c. Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) oleh Tim Provinsi	48,880,000	48,239,100	98.69	
				d. Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	75,405,000	75,395,629	99.99	
		<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan</b>	<b>227,880,000</b>		<b>227,880,000</b>	<b>205,155,600</b>	<b>89.98</b>	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
		Pengembangan Sumber Daya Manusia						
				Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	227,880,000	205,155,600	89.98	
		Administrasi Kegiatan	242,720,000		242,720,000	221,987,366	91.46	
				Administrasi Kegiatan	2 42,720,000	2 21,987,366	91.46	
16	Dinas Koperasi dan UKM	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	2,368,854,000		2,368,854,000	2,231,359,600	94.20	
				Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	987,464,000	916,235,600	92.79	
				Pemberdayaan Pendamping KUMKM di Daerah	700,390,000	643,284,000	91.85	
				Operasional PLUT di Daerah	414,400,000	408,240,000	98.51	
				Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah	266,600,000	263,600,000	98.87	
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.290.000.000		2.290.000.000	1.771.965.675	77,38	
				a. Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi	1.453.560.000	1.138.493.374	78,32	
				b. Wira Usaha Industri yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	836.440.000	633.472.501	75,73	
		Program Peningkatan Perdagangan Perdagangan Luar Negeri	504.024.000		504.024.000	441.938.973	87,68	
				a. Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	52.830.000	49.289.000	93,30	
				b. Dokumen/Surat terkait ekspor impor di daerah	74.060.000	62.548.502	84,46	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
				yang diterbitkan				
				c. Fasilitas Promosi Dan Diklat Kepada UKM	176.593.000	165.838.079	93,91	
				d. Layanan Perkantoran	200.541.000	164.263.392	81,91	
		<b>Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>771.343.000</b>		<b>771.343.000</b>	<b>537.358.801</b>	<b>69,67</b>	
				a. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	51.730.000	42.120.000	81,42	
				b. Pelaksanaan Pameran Pangan Nusa dan Produk Dalam Negeri	86.524.000	72.783.156	84,12	
				c. Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	246.180.000	135.321.880	54,97	
				d. Pemberdayaan Konsumen di Daerah	65.392.000	58.768.000	89,87	
				e. Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu Daerah	37.158.000	28.864.200	77,68	
				f. Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga	130.725.000	68.561.600	52,45	
				g. Administrasi Kegiatan	153.634.000	130.939.965	85,23	
<b>18</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>12,713,567,000</b>		<b>12,713,567,000</b>	<b>11,039,725,257</b>	<b>86,83</b>	
				Pemberdayaan Masyarakat Desa	12,713,567,000	11,039,725,257	86,83	
<b>19</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Nasional</b>	<b>645,977,000</b>		<b>645,977,000</b>	<b>506,304,313</b>	<b>78,38</b>	

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
	Pengembangan Daerah							
				a. Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019	-	-	0.00	
				b. Sosialisasi Peraturan Terkait Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2017	60,455,000	41,105,500	67.99	
				c. Bimbingan Teknis dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran dalam Upaya Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019	168,230,000	110,110,000	65.45	
				d. Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang	30,459,000	30,455,244	99.99	
				e. Koordinasi Pemberian Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara	60,251,000	60,250,100	99.99	
				f. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan	41,062,000	41,062,000	100.00	
				g. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	285,520,000	223,321,469	78.22	

Sumber : Laporan Triwulan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Tahun 2017



## **B. Tugas Pembantuan**

Menurut pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan yang diterima merupakan tugas pemerintahan yang didanai dengan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga kepada pemerintah daerah (provinsi).

### **1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana**

Untuk tahun 2017, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Tugas Pembantuan dari 4 Kementerian dengan 4 SKPD pelaksana. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp 110.093.214.000,- dengan realisasi sebesar Rp 104.728.734.156,- atau sebesar 95,13%. Rincian Instansi pemberi dan SKPD pelaksana, pagu dana dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan 5.4.

**Tabel 5.3**  
**INSTANSI PEMBERI DAN SKPD PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) LINGKUP PROVINSI TAHUN 2017**

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PAGU DANA KEGIATAN (Rp)	REALISASI S/D DESEMBER 2017	
				(Rp)	(%)
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Provinsi Kep. Babel	93,847,484,000.00	88,800,807,856.00	94,62
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel	450,000,000.00	437,493,600.00	97,22
3	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	15,493,272,000.00	15,191,478,000.00	98,05
4	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Babel	302.458.000	298.604.700	98,73
<b>TOTAL</b>			<b>110.093.214.000</b>	<b>104.728.734.156</b>	<b>95,13</b>

Sumber : Laporan Triwulan SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

**Tabel 5.4**  
**SATUAN KERJA PELAKSANA, PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)**  
**LINGKUP PROVINSI TAHUN 2017**

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM (Rp)	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN (Rp)	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
1.	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura	2.908.000.000	-	2.908.000.000	2.906.561.506	99,95	-
-	-	-	-	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Kawasan aneka cabai)	2.700.000.000	2.699.167.506	99,97	-
-	-	-	-	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	25.120.000	24.514.000	97,59	-
-	-	-	-	Layanan Perkantoran	182.880.000	182.880.000	100,00	-
-	-	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Perkebunan	5.711.005.000	-	5.711.005.000	5.164.961.400	90,44	-
-	-	-	-	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi (Hektar)	2.425.710.000	2.419.460.000	99,74	-
-	-	-	-	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung (Hektar)	1.138.950.000	706.946.000	62,07	-
-	-	-	-	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1.061.000.000	1.021.866.000	96,31	-
-	-	-	-	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	341.605.000	305.805.000	89,52	-
-	-	-	-	Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	743.740.000	710.884.400	95,58	-

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
-	-	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	18.036.042.000	-	18.036.042.000	16.088.196.208	89,20	-
-	-	-	-	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	3.473.500.000	3.429.146.000	98,72	-
-	-	-	-	Dukungan Perlindungan Perkebunan	33.000.000	33.000.000	100,00	-
-	-	-	-	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	258.950.000	256.896.688	99,21	-
-	-	-	-	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1.678.000.000	1.647.164.000	98,16	-
-	-	-	-	Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	7.816.000.000	6.037.925.000	77,25	-
-	-	-	-	Fasilitasi Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	2.098.375.000	2.081.233.000	99,18	-
				Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan (Kelompok Tani)	734.241.000	715.003.890	97,38	
				Pengembangan pengolahan hasil perkebunan	460.000.000	444.934.500	96,72	
				Pengembangan penerapan standarisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan	200.500.000	197.217.030	98,36	
				Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	910.586.000	890.758.500	97,82	
				Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	372.890.000	354.917.600	95,18	
-	-	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	3.023.292.000	-	3.023.292.000	2.891.800.831	95,65	-
-	-	-	-	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	180.000.000	179.793.800	99,89	-

NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
-	-	-	-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	31.060.000	23.975.100	77,19	-
				Pengembangan Populasi Sapi Potong	885.000.000	883.354.000	99,81	
				Optimalisasi Reproduksi	1.577.232.000	1.456.311.737	92,33	
				Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	100.000.000	99.884.100	99,88	
				Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	250.000.000	248.482.094	99,39	
-	-	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	<b>64.169.145.000</b>	-	<b>64.169.145.000</b>	<b>61.749.287.911</b>	<b>96,23</b>	-
-	-	-	-	Jaringan Irigasi Tertier (Ha)	720.000.000	712.800.000	99,00	-
-	-	-	-	Irigasi Air Permukaan (Unit)	160.000.000	160.000.000	100,00	-
				Irigasi Rawa (Ha)	7.500.000.000	7.323.000.000	97,64	
				Prasertifikasi Lahan Pertanian (Bidang)	320.000.000	300.645.000	93,95	
				Optimasi Lahan (Ha)	8.848.500.000	7.588.350.000	85,76	
				Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	3.636.625.000	3.389.214.240	93,20	
				Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.128.080.000	1.051.854.136	93,24	
				Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	692.600.000	655.112.885	94,59	
				Prasertifikasi Lahan Pertanian (Bidang)	320.000.000	300.645.000	93,95	
<b>2</b>	<b>Dinas Kelautan &amp; Perikanan</b>	<b>Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya</b>	<b>450.000.000</b>	-	<b>450.000.000</b>	<b>437.493.600</b>	<b>97,22</b>	-



NO	SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM ( Rp )	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN ( Rp )	R E A L I S A S I		REVISI-REVISI /KENDALA & PERMASALAHAN
						JUMLAH (Rp)	(%)	
-	-	-	-	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	324.000.000	316.525.000	97,69	-
-	-	-	-	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen Perikanan Budidaya	126.000.000	120.968.600	96,01	-
3	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	13.286.172.000	-	13.286.172.000	13.242.295.000	100,00	-
				Pemeliharaan Rutin Jalan	2.497.950.000	7.104.571.000	100,00	-
-				Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan	9.821.170.000	9.821.170.000	100,00	
				Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	160.268.000	160.108.000	100,00	
				Layanan Internal (Overhead)	806.784.000	806.640.000	100,00	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.207.100.000		2.207.100.000	1.949.183.000	100,00	
				Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang Dioperasikan dan dipelihara	1.787.126.000	1.543.112.000	100,00	
				Layanan Perkantoran (Overhead)	419.974.000	406.072.000	100,00	
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	302.458.000	-	302.458.000	298.604.700	98,73	
-	-	-	-	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	163.135.000	160.087.700	98,13	
				Pengembangan Usaha Transmigrasi	85.875.000	85.500.000	99,56	
				Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	53.448.000	53.017.000	99,19	
TOTAL			110.093.214.000		110.093.214.000	104.728.734.156	95,13	



## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kerja sama antar daerah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.. Adapun rincian kerja sama daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 6.1

#### **B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan pihak ketiga dan luar negeri. Beberapa kerja sama tersebut antara lain tertuang pada Tabel 6.2 dan 6.3

**Tabel 6.1**  
**Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Lain**

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman  Dirapatkan di TKKSD tanggal 3 April 2017	POL PP Prov. Kep. Babel	Pol PP Kabupaten/Kota	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1. Melakukan pembinaan pengawasan serta tindak kepatutan berdasarkan Perda Prov. Kep. Babel No. 17/2016. 2. Mengembangkan dan memperluas jaringan kerjasama antara Prov. Kep. Babel dan Kab/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	1 Tahun		
2.	Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat (ditandatangani Rabu tgl 12-6-2017 di ruang Tanjung Pendam) Dirapat di TKKSD tanggal 7 Juni 2017	POL PP Prov. Kep. Babel	Pol PP Kab/Kota	Perjanjian Kerja Sama antara Kasat POL PP Prov. Kep. Babel dengan Kasat POL PP Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel	Kesepakatan Bersama antara Kasat POL PP Prov. Kep. Babel dengan Kasat POL PP Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel	Untuk efektivitas dan optimalisasi tugas SatPOL PP guna terciptanya situasi tertib, aman dan tentram.	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemroses Akhir (TPA) Sampah Regional Dirapatkan di TKKSD	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep.Babel	Pemkab Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang		1. Meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan kesepakatan antar Pemda 2. Melaksanakan kesepakatan yg didasarkan atas azaz kepentingan bersama yg saling menguntungkan dlm hal penyediaan dan pengelolaan tempat pemroses akhir sampah regional.	1 Tahun		
4.	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemroses Akhir (TPA) Sampah Regional Dirapatkan di TKKSD	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep.Babel	Pemkab Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang		1. Meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan kesepakatan antar Pemda 2. Melaksanakan kesepakatan yg didasarkan atas azaz kepentingan bersama yg saling menguntungkan dlm hal penyediaan dan pengelolaan tempat pemroses akhir sampah regional.	1 Tahun		
5.	Kerja Sama	BAPPEDA	Pemerintah	Kesepakatan Bersama	Nomor :	1. Untuk meningkatkan	1 Tahun		



NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Daerah		Kota Pangkalpinang	antara Pem.Kep.Babel dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	415.4/022/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/BAPPEDA/2017	kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
6.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Bangka	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Bangka tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/023/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/BAPPEDA/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		
7.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA		Kesepakatan Bersama antara Pem. Kep.	Nomor : 415.4/025/BAPPEDA/2	1. Untuk meningkatkan kerja sama	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Babel dengan Pemkab tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	017 Nomor :	pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
8.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Bangka Barat	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Bangka Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/026/BAPPEDA/2017 Nomor :	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		
9.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab	Nomor : 415.4/027/BAPPEDA/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belitung tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor :	antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
10.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Belitung Timur	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Belitung Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/028/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/I/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Pengembangan Bidang Perdagangan	Disperindag	Dinas Perdagangan Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov.Kep.Babel	Nomor : 19/PKS-Perdagangan/I/2017 Nomor : 415.4/030.a/Disperindag/2017	1. Mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya sistem logistik nasional dan meningkatkan daya saing. 2. Meningkatkan perekonomian regional Kep.Babel da Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah melalui penguatan perdagangan dalam negeri.	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Pengembangan Bidang Perindustrian	Disperindag	Dinas Perindustrian Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov.Kep.Babel	Nomor : 20/PKS-Perindustrian/2017 Nomor : 415.4/030.b/Disperindag/2017	1. Mewujudkan pengembangan industri untuk mendukung penguatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan daya saing. 2. Meningkatkan perekonomian regional Kep. Babel dan Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah dengan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para pengusaha industri dan menengah kedua wilayah dan pengembangan kawasan strategis industri.	5 Tahun		



**Tabel 6.2**  
**Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Ketiga**

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Pemeliharaan Aset (Tidak melalui TKKSD, diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)	Biro Umum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung	P.T. CITAS OTIS ELEVATOR	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan P.T. CITAS OTIS ELEVATOR	Perjanjian kerja sama No:011/01.b/VIII /2017 dan No:C3NEL486-2017	Pemeliharaan Sarana Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.			
2.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Keuangan	BAKUDA Prov. Kep.Babel	Bank Sumsel Babel	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perjanjian kerja sama No:900/006/BAKUDA/2017 dan No:15.1/DIR/P/2017	Untuk mempermudah pelayanan perbankan dalam kas daerah Pemprov Kep. Bangka Belitung dan sebagai kesepakatan Para Pihak dalam meningkatkan dan memperbaharui pelayanan perbankan kas daerah Pemprov. Kep. Bangka Belitung.	1 Tahun		
3.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Kesehatan (Tidak melalui TKKSD)	Dinas Kesehatan	BPJS Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perjanjian Kerjasama No:440/536/Dinkes/2017 dan No:106/KTR/III-02/2017	Sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kep. Babel dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  (Tidak dirapat di TKKSD diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)	Dinas Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta	Peningkatan Kompetensi SDM Pemprov Kep. Babel Melalui Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Kesepakatan bersama No:421.4/004/ Disdik/2017 dan No.: 44/UN39/KS/ 2017	1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pd masyarakat dalam meningkatkan kemampuan professional pegawai pemerintah dilingkungan Pemprov.Kep.Babel 2. Meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM dilingkungan Pemprov.Kep.Babel khususnya tenaga pendidik/guru	5 Tahun		
5.	Perjanjian Kerja Sama di bidang Investasi Produk Unggulan	Dinas PMPTSP	UGM	Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah	Perjanjian Kerja Sama No.: 120.22/171/DPMPSTP/ 2017	Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.	Maret s/d September 2017		
6.	Nota Kesepahaman Bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	RSCM	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Dr. (Hc) Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung	Nota Kesepahaman No.:440/007.b/ RSUD/2017	1. Mesinergikan sumber daya Para Pihak untuk peningkatan dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan 2. Mendorong	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat			
7.	Nota Kesepakatan bidang Pendidikan. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Dinas Pendidikan, RSUD Dr. Ir Soekarno, Bappelit bangda	Universitas Indonesia	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepakatan Bersama No.: 415.4/030.d/ DISDIK/2017 dan No.: 88/NKB/R/UI/ 2017	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak sesuai kewenangan yang dimiliki	12 Bulan		
8.	Kesepakatan Bersama bidang Pendidikan, Pelatihan, Litbang Aparatur Pemerintah	Dinas Pendidikan, Bappelit bangda dan BKPSDM	Universitas Pertahanan	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel	Kesepakatan Bersama No.: 415.4/038.a/BKPSDM/ 2017 dan No.: 150/KB/XII/UNHAN/201 7	Peningkatan aspek pendidikan, pelatihan dan litbang Aparatur Pemerintah serta pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belituing	12 Bulan		
9.	Kesepakatan Bersama bidang Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Melalui Subsidi Margin/Baghas Pembiayaan Modal Kerja	Kesepakatan Bersama No.: 415.4/033.G/KUMKM/2 017 dan No.: 500/BSB/DIR/XII/ 2017	Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kep. Bangka Belitung	12 Bulan		
10.	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama bidang SDM Perhubungan Darat. (Tidak Melalui TKKSD)	Dinas Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia bi Bidang Perhubungan Darat	Perpanjangan PKS No.: 188.44/016.C/ DISHUB/2017	Mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang Perhubungan Darat yang berkompeten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Nota Kesepahaman bidang Ekonomi, Keuangan dan UMKM	Bakuda dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kantor Perwakilan BI Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Pemprov.Babel	Nota Kesepahaman No.: 19/4/NK/PkP/2017 dan No.:415.4/017// 2017	Mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Para Pihak dalam mendukung dan mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian Pembangunan	12 Bulan		
12.	Kesepakatan Bersama bidang Litbang dan Pengembangan SDM	BKPSDM dan Bappelit bangsa	Universitas Djuanda Bogor	Kerja Sama dib Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pembangunan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama No.415.42/019// 2017 dan No.: 556/01/NK-K/VIII/2017	Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melalui Kegiatan di Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagai kontribusi bagi Pembangunan di Bangka Belitung	12 Bulan		
13.	Perjanjian Kerja Sama bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun kusumo	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	PKS No.: HK.05.01/XI.3/2537/ 2017 dan No.: 120.23/009/RSUDP/ 2017	Mensinergikan Sumber Daya Para Pihak dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatandi RSUD Dr. Ir. Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung	2 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Nota Kesepahaman Bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun kusumo	Pengembangan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Ir. Soekarno	PKS No.: HK.05.01/XI.3/ 16744/ 2017 dan No.: 440/007.b/RSUD/ 2017	Peningkatan Akses dan Kesadaran Masyarakat Prov. Kep. Bangka Belitung untuk hidup sehat.	12 Bulan		
15.	Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Dinas Pendidikan, BKPSDM dan Bappelit bangsa	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA	Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pendampingan Pendirian Bank Umum Syariah	Kesepakatan Bersama No.: 420/013/I/2017 dan No.: 010/KB/STEI TAZKIA/VIII/2017	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat dan penelitian untuk kepentingan pembangunan di Prov. Kep. Bangka Belitung	12 Bulan		
16.	Nota Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan, Penelitian, Koperasi, UMKM dan Pemberdayaan BUMDes	Dinas Pendidikan, Bappelitbangda, Dinas KUKM dan Dinas PMD	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba	Pendidikan, Penelitian, Fasilitator UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan BUMDes	Nota Kesepakatan Bersama No.: 415.42/018/I/2017 dan No.: 340/II-4/IE/VIII/2017	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.	12 Bulan		
17.	Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Biro Pemerintahan	POLDA Babel	Perjanjian Kerja Sama Pem. prov. Kep. Babel dengan POLDA Kep. Babel	Nomor: 415.4/035/I/2017 Nomor : B/3955/XI/2017	1. Sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan pengelolaan Dana Desa di Wilayah Prov. Kep. Babel. 2. Untuk terwujudnya pengelolaan Dana			



NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Desa di Wilayah Prov. Kep. Babel yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pembangunan desa di Daerah Prov. Kep. Babel.			
18	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program	KUKM	Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI	Kesepakatan Bersama antara Kanwil Prov. Kep. Babel Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dengan Pemerintah Prov. Kep. Babel	Nota Kesepakatan bersama Nomor : 017/WPB/130.03/2017 120/002.a/KUKM/2017	1. Sebagai landasan kerja sama para pihak dalam menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk penatausahaan dan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Untuk kelancaran, optimalisasi dan implementasi SIKP dalam rangka mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dlm rangka monev, pembiayaan dan pemberdayaan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Program Penyiapan Potensi Produk Unggulan Tidak melalui rapat TKKSD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Nomor : 120.22/125/DPMPTS/2017	Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada	Perjanjian Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada tentang Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Tahun Anggaran 2017	Nota Kesepahaman Bersama No:180/09/BAPPEDA/2016 No:2573/P/Dir-KA/2016	Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Bulan		
20	Pengembangan Homestay Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tidak dirapatkan pada TKKSD)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Nomor : 556/007/DISBUDPAR/2017 Tanggal 18 Mei 2017		Mengembangkan sector kepariwisataan terutama dalam bidang homestay desa wisata yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional.			

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman	POL PP Prov. Kep. Babel	Kepolisian Daerah Prov. Kep. Babel	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		POL PP Prov. Kep. Babel			
22	Pengembangan Homestay Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tidak dirapatkan pada TKKSD)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Nomor : 556/007/DISBUDPAR/2017 Tanggal 18 Mei 2017		Mengembangkan sector kepariwisataan terutama dalam bidang homestay desa wisata yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional.			
23	Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan dan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BAPPEDA Prov. Kep. Babel	Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Pemkot Pk. Pinang	Nomor : 707/010/BAPPEDA/2017 Nomor : PKS.9/LITBANG/SET/KUM.3/7/2017	1. Untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara lestari melalui kerja sama penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan di lingkungan hidup dan kehutanan yang bermanfaat bagi para			

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pihak. 2. Untuk mendukung tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang lingkungan hidup da kehutanan yang mendukung pencapaian program rencana strategis Kementerian Ilngkungan Hiduo dan Kehutanan.			
24	Optimalisasi Pendampingan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BPMPD Prov.Kep. Babel	IPDN Jatinangor	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri		Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelapor an sampai pada tingkat pertanggungjawaban.	1 Tahun		
25	Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dirapatkan di TKKSD senin, 28-8-2017)	Badan Penelitian dan Pengem- bangan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepahaman	Nomor: / /PERTANIAN/IX/2017 Nomor:415.43/020/I/20 17	Saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Belitung							
26	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pemerinta Daerah Bidang Jasa Konstruksi di Prov.Kep.Babel	Dinas PU dan penataan Ruang Prov.Kep. Babel	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaa n Dirjen Bina Konstruksi kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Dirjen Bina Konstruksi kementerian PU dan Perumahan Rakyat dengan Kepala Dinas PU dan PR Prov.Kep.Babel		1. Terjalin kerja sama dan alih informasi antara PARA PIHAK dlm rangka pengembangan bidang jasa konstruksi di Prov.Kep.Babel 2. Meningkatkan peran serta pemerintah dalam pengembangan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia bidang konstruksi di Prov.Kep.Babel. 3. Menjamin terwujudnya mutu konstruksi yang berdaya saing di Prov.Kep.Babel		Dirapatkan di TKKSD tanggal	Belum ditindaklanjuti krn blm ada MoU
27	Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan dan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BAPPEDA Prov.Kep. Babel	Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Nomor : 707/010/BAPPEDA/2017 Nomor : PKS.9/LITBANG/SET/KUM.3/7/2017	1. Untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara lestari melalui kerja sama penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta			



NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>pengembangan di lingkungan hidup dan kehutanan yang bermanfaat bagi para pihak.</p> <p>2. Untuk mendukung tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian program rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>			
28.	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Pemerintah dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	BNN Prov. Kep. Babel	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	<p>Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung</p> <p>Nomor : 730/009/III/2017</p> <p>Nomor : KB/001/VII/BNNP/2017</p>		<p>Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalannya kerja sama dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang P4GN untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Optimalisasi Pendampingan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BPMPD Prov.Kep.Babel	IPDN Jatinangor	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri		Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tingkat pertanggungjawaban.	1 Tahun		
30	Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah	Inspektorat	BPKP	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)		Mengembangkan manajemen Pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1 Tahun		
31	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ombudsman Republik Indonesia	Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Tahun		
32	Penelurusan dan Pembinaan Talent Scouting Penerimaan Calon Anggota POLRI	PEMPROV	POLDA BABEL	Kesepakatan Bersama antara POLDA BABEL dengan Pemprov Kep. Babel	Nomor :B/MoU-25/IX/2017 Nomor : 415.4/016/PEMPROV/2	1. Untuk menetapkan langkah awal dalam menjalin kerjasama dalam rangka	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Tidak melalui TKKSD)				017	<p>penelurusan pembinaan dan pemanfaatan jalur Talent anggota Polri sehingga mampu mendapat calon anggota Polri yang unggul dan kompetitif serta dilaksanakan dengan prinsip clean dan clear serta humanis.</p> <p>2. Sebagai dasar dan pedoman bagi kegiatan penyelurusan, pembinaan dan pemanfaatan jalur talent scouting penerapan talent scouting dalam rekrutmen anggota Polri.</p> <p>3. Membuktikan adanya keinginan yang kuat dari Polda Kep. Babel untuk melaksanakan rekrutmen dengan prinsip clean and clear serta humanis.</p>			

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dirapatkan di TKKSD senin, 28-8-2017)	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepahaman	Nomor: / /PERTANIAN/IX/2017 Nomor:415.43/020/I/2017	Saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak	1 Tahun		
34	Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DP3ACSKB	Kanwil Kemenag	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep.Babel dengan Kanwil Kemenag Prov.Kep.Babel	Nomor : 463/499/DP3ACSKB/2017 Nomor : 599/2017	1. Untuk membangun komitmen seluruh Kab/Kota se Prov.Kep.Babel dalam menurunkan angka pernikahan usia anak (usia dini). 2. Untuk menurunkan angka kejadian pernikahan usia dinidi Prov. Kep. Babel.	1 Tahun		

**Tabel 6.3**  
**Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Luar Negeri**

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Momorandum Saling Pengertian Bidang Pertambangan (dibuat oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM)	Bappelit bangda dan Dinas ESDM	Institut Federal Geosain dan Sumber Daya Alam Republik Federal Jerman	Pertukaran Kerjasama Percontohan Menyangkut Kesenambungan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (MOU Antara Republik Indonesia dengan Negara Jerman)	MOU	Mendukung pengembangan pengetahuan dan jaringan untuk bisa menerapkan teknik terbaik di lokasi reklamasi tambang timah antara para pemangku kepentingan Indonesia yang cakap.	2 (dua) Tahun		
2.	MOU Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Dinas BKPSDM	HongFu International Technology, CO, Ltd, Taiwan	International Internship Partnerhsip And Starta-1 Education In Taiwan	MOU No.424/008/DISDIK/20 17	Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Srata-1	5 (lima) Tahun		
3.	LOI bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pariwisata, SDM dan Perhubungan	DPMPTSP	GlobalPorts Pte Ltd	Letter Of Intent For Cooperation	LOI	Melakukan Survei untuk mendukung pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pariwisata, SDM dan Perhubungan	-		
4.	LOI bidang Penelitian dan Penbengembangan Restorasi Ekologi dan Lingkungan	DPMPTSP	M Grass Internationak Pte Ltd	Letter Of Intent For Cooperation	LOI	Melakukan Survei untuk mendukung Penelitian dan Pengembangan dalam restorasi ekologi dan lingkungan	-		



NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	LOI bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM	Bappelit bangsa	Universitas Kebangsaan Malaysia	Letter Of Internt For Collaboration	LOI	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan SDM dan memperkuat hubungan internasional	-		

### **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal**

1. Koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat peran pemerintah provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di lantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sebagaimana amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah.
2. Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi khususnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain, koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kantor DJPb) dalam hal koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program/kegiatan bersumber dari dana APBN di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Forum Komunikasi dalam hal Pertukaran Data, Peraturan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Narasumber dan Informasi lainnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah serta Analisis/Kajian Ekonomi Regional Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama dengan Kantor DJPb juga dalam hal penyerahan DIPA untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Pembentukan Forum Koordinasi Instansi Vertikal.
3. Kerjasama dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terus dilaksanakan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban serta diadakannya Rapat Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan meningkatkan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah, kabupaten/kota, serta meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan dana-dana APBN yang ada di wilayah Provinsi, dengan koordinasi dengan pejabat pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di instansi vertikal se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dalam rangka percepatan pembangunan, Instansi Vertikal serta Forkopimda telah melakukan sinergitas melalui dana hibah bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017, dalam hal pembinaan batas wilayah berusaha semaksimal mungkin dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antara provinsi dengan provinsi dan antar kabupaten/kota dengan menggunakan berbagai alternatif cara-cara yang prosedural normatif, kondusif dan konstruktif. Hal-hal ini dilakukan agar batas wilayah yang diperselisihkan tidak menimbulkan gejolak dan konflik di masyarakat dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan berlandaskan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk menghindari konflik batas wilayah antar kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya penyelesaian batas wilayah antar kabupaten/kota secara intensif dan persuasif. Pembinaan batas wilayah dilaksanakan melalui program pendataan kembali terhadap batas wilayah administrasi antar kabupaten/kota yang mengalami konflik perbatasan. Penyelesaian konflik perbatasan antar kabupaten/kota dilakukan dengan melakukan pendataan ulang dan survei ke lapangan dan menggunakan data dan informasi dari instansi pemerintah

kabupaten/kota dengan melibatkan camat, lurah/kades serta tokoh masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional di berbagai aspek khususnya pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Pada Tahun 2017, dengan memperhatikan rencana strategis dan kebijakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan menganggarkan dua kegiatan yang berkenaan dengan program pengembangan wilayah perbatasan, dua kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota dan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota. Salah tujuan pelaksanaan kegiatan diatas adalah untuk menyamakan persepsi dan langkah bagi aparat pemerintah terkait dalam penentuan penetapan dan penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dan antar provinsi dan juga menetapkan batas pasti di lapangan melalui pilar batas yang akan dipasang.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah antar Kabupaten/Kota dengan hasil berupa rekomendasi dan kesepakatan .

Dalam hal pembinaan batas wilayah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antara provinsi dengan provinsi dan antar kabupaten/kota dengan mengedepankan cara-cara yang kondusif dan konstruktif, agar batas wilayah yang diperselisihkan tidak menimbulkan “friksi dan gejolak” di masyarakat dengan tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan mempedomani aturan yang berlaku. Kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan batas wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diupayakan untuk mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti di lapangan, baik dari aspek yuridis maupun fisik dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta mewujudkan wawasan nusantara.

Langkah awal pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dengan melaksanakan kegiatan rapat penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 6 Juni 2015 bertempat di Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara nomor 253.1/VI/I/2015 dan/atau 390/966.4/I/2015, kemudian dilanjutkan dengan turun ke lapangan. Pada tanggal 6 Januari 2016 di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diadakan Rapat Perubahan Peta Batas Daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagai bagian dari kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur tahun anggaran 2016. Hasil rapat tersebut adalah usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 136/47/I tanggal 19 Januari 2016. Adapun kegiatan telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 yang terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu : Penelitian Dokumen Batas; Pelacakan Batas; Pembuatan Pilar Batas Permanent; Pengukuran Koordinat Pilar dan Pembuatan Peta Batas Daerah. Pada kegiatan tersebut dipasang 7 (tujuh) Pilar Batas Antara (PBA) dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 136/47/I perihal usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 (batas daerah antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur).

Pada tahun anggaran 2016, dengan berpedoman pada Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan penetapan batas wilayah antara Provinsi Sumatera dengan Provinsi Selatan Kepulauan Bangka Belitung nomor 136/779/I tanggal 14 Agustus 2015, melalui kegiatan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Antar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pemasangan 8 (delapan) Pilar

Acuan Batas Utama (PABU) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Berita Acara Penyiapan Dokumen Batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan nomor 126/601.a/I/2013, nomor 136/133/I/2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Pengajuan Usulan Permendagri tentang Batas Wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan Kesepakatan nomor 136/041/I/2015, nomor 136/110.a/I/2015 dan Berita Acara Kesepakatan Dokumen Penegasan Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan nomor 020/BA/I/2015, nomor 136/13/I/2015 dimulai dari Tanjung Genting Kabupaten Bangka Barat, Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat, Pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah, Tanjung Badaun/Permis, Tanjung Panggung, Batu Badaun, Tanjung Labun dan Pulau Dapur Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penegasan Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah sudah dimulai sejak tahun 2015, pada prinsipnya kedua pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan sudah tidak ada permasalahan dan sudah diusulkan untuk diterbitkan segera Permendagri kepada Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016. Untuk batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka sudah dilaksanakan pertukaran dokumen, namun belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah antara kedua Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Pemerintah Kota Pangkalpinang berpedoman ke Peta Kesepakatan Tahun 1992, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangka berpedoman pada nilai sejarah atau historis wilayah yang berbatasan tersebut, sehingga belum dapat diusulkan atau direkomendasikan untuk diterbitkan Permendagri tentang batas wilayah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Proses penyelesaian sengketa batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Gugusan Pulau 7) dengan Provinsi Kepulauan Riau sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri, tinggal menunggu keputusan dari kementerian itu sendiri untuk ditetapkan. Sedangkan sengketa batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan sudah dianggap tidak bermasalah dan telah dilakukan pemasangan pilar batas antara 2 provinsi tersebut.

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 (empat) segmen yang sudah ditetapkan dengan Permendagri yaitu :

1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
3. Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Dengan telah ditetapkannya batas daerah di 4 (empat) segmen ini seyogyanya permasalahan batas daerah sudah selesai karena telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri akan tetapi sengketa masih saja terjadi dikarenakan ada kabupaten yang menganggap bahwa keberadaan garis imajiner yang menghubungkan antar PBU belum sesuai dengan fakta di lapangan yaitu 2 segmen batas yang belum ditetapkan permendagri antara lain segmen batas Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang dan segmen batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang serta 1 segmen batas yang sudah disepakati draft revisi permendagri yaitu segmen batas Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan batas wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar kabupaten/kota dan provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan kegiatan rapat koordinasi penyelesaian penegasan batara daerah antar Kabupaten/Kota antara lain:

1. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
2. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
3. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
4. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten/kota yang berselisih, dan untuk mengetahui potensi apa yang terkandung di dalamnya, yaitu pada batas antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah;
5. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan serta mengambil titik koordinat yang dikehendaki oleh kedua kabupaten/kota serta potensi apa yang ada di dalam lokasi tersebut, yaitu pada batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
6. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan serta mengambil titik koordinat yang dikehendaki oleh kedua kabupaten/kota serta potensi apa yang ada di dalam lokasi tersebut, yaitu pada batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
7. Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka meminta petunjuk dan saran dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Koordinasi ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil kegiatan pembinaan dan penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota ini adalah :

1. Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 23 Maret 2017 tentang penentuan lokasi pemasangan pilar batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang;
2. Telah dilaksanakan survey lapangan terkait kegiatan topografi yaitu pendampingan survey pendahuluan pada tanggal 13 April 2017 di Bangka Tengah, tanggal 18 s/d 19 April 2017 di Bangka Selatan serta tanggal 17 s/d 19 April 2017 di Belitung;
3. Telah dilaksanakan survey lapangan dalam rangka penentuan titik lokasi pemasangan pilar pada kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota ke Bangka Tengah pada tanggal 4 April 2017;
4. Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 17 April 2017 terkait koordinasi fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang;
5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2017



- guna merumuskan sejumlah opsi sebagai bahan kesepakatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang;
6. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 14 September 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
  7. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka percepatan penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah di PBU 21 (Gapura Jalan Selan) pada tanggal 25 September 2017;
  8. Telah dilaksanakan survey dilapangan pada titik lokasi batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 27 s/d 29 September 2017;
  9. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 September 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah;
  10. Telah dilaksanakan perjalanan dinas ke Belitung dalam rangka mengikuti rapat koordinasi sebagai tindak lanjut penyusunan Draft Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 4 s/d 6 Oktober 2017;
  11. Telah dilaksanakan survey di lapangan terkait pelacakan pilar batas serta pelurusan dan penarikan usulan garis imajiner batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang mulai dari PBU 23 sampai dengan PBU 30 pada tanggal 17 Oktober 2017;
  12. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka fasilitasi penarikan garis imajiner batas antar Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah mulai dari PBU 21 sampai dengan PBU 30 pada tanggal 23 Oktober 2017;
  13. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka ;
  14. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka pelacakan dan penelusuran usulan penarikan garis batas imajiner antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2017;
  15. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 31 Oktober 2017 tentang penarikan usulan garis imajiner dari PBU 21 sampai dengan PBU 30;
  16. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 7 November 2017 dalam rangka menindaklanjuti sejumlah fakta dan data yang ditemukan saat survey lapangan pada tanggal 26 dan 27 November 2017;
  17. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka penelusuran dan penarikan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah dari PBU 21 sampai dengan PBU 30 dan berakhir pada batas laut pada tanggal 8 November 2017;
  18. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka penelusuran dan penarikan usulan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dari PBU 20 sampai dengan PBU 21 pada tanggal 15 November 2017;
  19. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 20 November 2017 terkait percepatan pelaksanaan penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;

20. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah tahap akhir antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 November 2017 guna mempercepat tercapainya kesepakatan terkait batas antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut :

**a. Batas Wilayah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka**

Batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka belum ditetapkan dengan Permendagri. Oleh karena itu, Tim PBD Kabupaten Bangka dengan Tim PBD Kota Pangkalpinang sudah melaksanakan pelacakan dan penegasan Pilar Batas Utama (PBU) yang difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tercipta kesepakatan tentang garis-garis imajiner batas daerah antara kedua kabupaten/kota tersebut.

Sesuai dengan berita acara rapat nomor: 02/PPBD/IX/2017 pada Hari Kamis tanggal 14 September 2017, bertempat di Ruang Tanjung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu untuk penyelesaian batas administrasi antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan dokumen usulan dari kedua belah pihak dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mempercepat penegasan Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung paling lambat akhir tahun 2017.

**b. Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah**

Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah sudah dilaksanakan pelacakan dan penarikan garis imajiner serta rapat untuk menyepakati opsi-opsi penarikan garis batas imajiner. Akan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak belum juga tercapai. Akhirnya, berdasarkan berita acara rapat nomor: 07/PPBD/XII/2017 pada Hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Romodong Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu penarikan garis imajiner antar PBU yang menjadi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah akan dikaji Tim PBD Provinsi berdasarkan opsi-opsi yang telah disampaikan oleh masing-masing dengan mempedomani Peta Kesepakatan 1992, hasil keputusan Gubernur tersebut akan disampaikan ke Pimpinan Daerah masing-masing untuk ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan, tanggapan dari Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah akan dirumuskan serta dikaji ulang oleh Tim PBD Provinsi dan hasil rumusan garis imajiner tersebut bersifat mutlak menjadi Keputusan Gubernur dan Tim PBD Provinsi akan menjadwalkan Rapat Penandatanganan Kesepakatan antara Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah terkait penarikan garis imajiner definitif yang menjadi bahan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.

**c. Batas Daerah Antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur**

Pimpinan dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sepakat untuk merevisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di tahun 2016. Pada tahun 2017, dalam rangka finalisasi rancangan permendagri batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pihak Kementerian Dalam Negeri mengundang 2 kabupaten tersebut yang difasilitasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan rapat.

Pada saat rapat, terdapat temuan. Salah satunya yaitu nama Rupa Bumi sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, sehingga tercapai kesepakatan saat rapat untuk dilakukan survey ulang ke lapangan antara tim PBD Kabupaten Belitung dan tim PBD Kabupaten Belitung Timur yang difasilitasi Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 September 2017. Kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan pihak Kementerian Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Setelah peninjauan ke lapangan sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor 01/BAD I/X/2017 pada Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 disepakati bersama yaitu nama sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur adalah Sungai Aik Keladi bukan Sungai Aik Langau dan peserta rapat sepakat untuk menandatangani Rancangan Kesepakatan Permendagri dan Peta Kesepakatan Batas Daerah serta menindaklanjuti ke dalam proses penerbitan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Bantan 1 Hotel Grand Hatika Tanjung Pandan Belitung.

Kesimpulan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dan provinsi adalah

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyampaikan draft kesepakatan batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Menteri Dalam Negeri sebagai revisi terakhir Permendagri RI No.16 Tahun 2008 yang berupa Berita Acara Rapat Nomor: 01/BAD I/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan lampiran peta batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur. .
- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melaksanakan kegiatan Fasilitasi penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/ Kota, sehingga semua daerah tidak ada lagi permasalahan.

**E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

**1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. Berbagai Ancaman bencana alam yang sering terjadi seperti bencana Bencana Kebakaran, Bencana Banjir, Bencana Puting beliung, Bencana Kekeringan, Bencana Tanah Longsor, Bencana Konflik, Bencana Kegagalan Teknologi, Bencana Kebakaran, Bencana Pasang Air Laut, Bencana Epidemi/Kejadian Luar Biasa

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah bergerak mengikuti penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditingkat masyarakat juga sudah banyak terbentuk kelompok-kelompok siaga bencana, dari kondisi tersebut maka disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Tahun 2012 s.d. 2017, yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.

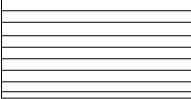
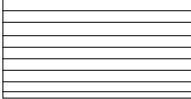

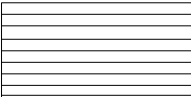
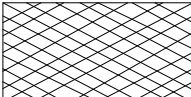
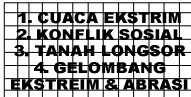

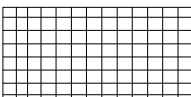

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia yang dipadukan dengan data dari catatan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data DIBI, BNPB tahun 2011, dan BPBD Bangka Belitung, 2011), terdapat 10 jenis bencana yang mengancam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ancaman bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, konflik sosial serta gagal teknologi. Penentuan tingkat ancaman bencana menggunakan matriks tingkat ancaman, dengan memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar adalah tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam tiga kategori yaitu : rendah (0,0 –0,3), sedang (> 0,3 –0,6), dan tinggi (> 0,6 –1,0).

Skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam tigakategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan masing-masing nilai indeks sebagai berikut :



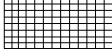
- a) Rendah : 0,0 - 0,3, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/ Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20 persen
- b) Sedang: >0,3 - 0,6, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500 – 1000 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk kelompok rentan 20 persen –40 persen
- c) Tinggi : >0,6 – 1,0, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/Km<sup>2</sup> , dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40 persen.

Tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada skala ancaman masing-masing jenis bencana dan skala penduduk terpapar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada Gambar 6.3.

**Gambar 6.3**  
**Matriks Penentuan Tingkat Ancaman Multi Bencana**  
**di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

TINGKAT ANCAMAN		INDEKS PENDUDUK TERPAPAR (JIWA/KM <sup>2</sup> )		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS ANCAMAN	RENDAH			 1. EPIDEMI dan WABAH PENYAKIT 2. GEMPA BUMI
	SEDANG			 1. CUACA EKSTREM 2. KONFLIK SOSIAL 3. TANAH LONGSOR 4. GELOMBANG EKSTREM & ABRASI
	TINGGI	 BANJIR		 1. KEBAKARAN HUTAN dan LAHAN 2. GAGAL TEKNOLOGI 3. KEKERINGAN

	Tingkat Ancaman Rendah
	Tingkat Ancaman Sedang
	Tingkat Ancaman Tinggi

Berdasarkan matriks di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar rendah adalah banjir.
- Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman rendah dan indeks penduduk terpapar tinggi adalah epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi.
- Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain : cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, konflik sosial dan tanah longsor.
- Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain: Kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi, dan kekeringan.

Indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Dapat dikatakan bahwa indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah. Beberapa jenis ancaman (peta ancaman) telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, Jenis ancaman yang telah memilikistandar SNI tersebut meliputi :Gempa bumi (tim sembilan revisi gempa), Longsor (ES DM), Gunung api (PVMBG), Banjir (PU).



Sedangkan ancaman non SNI merupakan ancaman yang belum diperoleh dari Kementerian/Lembaga terkait. Zonasi ancaman ini harus ditentukan menggunakan metodologi yang telah ditentukan. Jenis ancaman non SNI meliputi: Tsunami, Konflik Sosial, Kegagalan teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi. Dari kejadian bencana yang tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana antara lain:

- a. Dilakukan penyeleksi terhadap korban yang terkena bencana.
- b. Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada korban bencana yang telah diseleksi.
- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap bantuan yang diberikan.
- d. Menyusun peta rawan bencana untuk seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Turun langsung kelapangan memberi bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana saat tanggap darurat
- g. Melakukan rekonstruksi terhadap semua sektor pasca bencana

## 2. Status Bencana

Kejadian-kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dikategorikan dalam status bencana yang sifatnya regional ataupun lokal. Ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat ditentukan statusnya dalam kategori Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal (Kabupaten/Kota) tergantung dari besar skala kejadiannya, antara lain :

- a) Banjir  
Dari hasil kajian risiko maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman banjir tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar rendah. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir sedang.
- b) Cuaca Ekstrem  
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman cuaca ekstrem sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.
- c) Tanah Longsor  
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman tanah longsor sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.
- d) Gempa Bumi  
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gempa bumi rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gempa bumi sedang.
- e) Epidemik dan Wabah Penyakit  
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman epidemik dan wabah penyakit rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman epidemik dan wabah penyakit sedang.

- f) Kebakaran Lahan dan Hutan  
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi.
- g) Gelombang Ekstrem dan Abrasi  
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gelombang ekstrem dan abrasi sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gelombang ekstrem dan abrasi tinggi.
- h) Kekeringan  
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kekeringan tinggikan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kekeringan tinggi.
- i) Konflik Sosial  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman konflik sosial sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Maka tingkat ancaman konflik sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tinggi.
- j) Gagal Teknologi  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gagal teknologi tinggi.

Selama ini dalam praktek penanggulangan bencana masih ditekankan pada “saat” serta “setelah (pasca)” terjadinya bencana. Sementara itu pada tahap “sebelum (pra)” terjadinya bencana yang telah diakomodasikan masih terbatas pada tahapan pencegahan (prevention), yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang “rawan bencana” untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Setiap ancaman atau bahaya yang terdapat di suatu daerah memiliki risiko yang berbeda dari masing-masing jenis bencana. Tetapi pada umumnya ancaman ini merupakan sesuatu yang sulit untuk diubah dan diatasi, misalnya “daerah gunung api, daerah gempa, daerah longsor dan sebagainya. Sedangkan yang masih mungkin untuk dilakukan perubahan dan perbaikan adalah kerentanan. Untuk meningkatkan kapasitas, harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan/pengetahuan masyarakat di suatu daerah dengan misalnya tidak berdiam pada daerah-daerah yang rawan terhadap bencana tersebut.

### 3. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Urusan Wajib Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2017 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan Anggaran di APBD Induk sebesar Rp 15.822.560.173,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.585.514.373,-, sedangkan belanja langsung sebesar Rp 11.237.045.800,-.

Pada tahun 2017 urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui 6 (enam) program dan 32 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.599.073.161,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp11.245.523.682,- atau 90,01%, dengan sisa anggaran sebesar Rp813.424.681,- atau 9,90%, dengan komposisi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.879.543.614,- atau 92,29% dengan sisa anggaran Rp323.922.747,- atau 7,71% dan Belanja Langsung

sebesar Rp 7.365.980.068,- atau 87,74% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.029.626.732,- atau 12,26% dari total Pagu anggaran.

#### **4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Keterbatasan kewenangan provinsi sebagai koordinator, motivator dan katalisator percepatan upaya pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota membutuhkan kebijakan dan strategi khusus dalam menyusun rencana penanggulangan bencana. Peran teknis pemerintah provinsi terbatas hanya pada aset provinsi yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh provinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/kota tidak mampu menangani bencana yang timbul.

Berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah provinsi perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dalam mengantisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana. Penguatan kelembagaan dan partisipasi segala pihak dengan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya menjadi salah satu fokus pencapaian yang perlu diperhitungkan. Selain itu mekanisme dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penanganan darurat bencana pada status darurat bencana provinsi juga perlu diperkuat. Keseluruhan komponen ini perlu ditunjang dengan strategi signifikan untuk pengurangan risiko bencana dalam wilayah kewenangan provinsi. Oleh karenanya kegiatan bencana dan daerah yang berpotensi menjadi kewenangan provinsi perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Proses identifikasi ini telah melahirkan zona prioritas penanggulangan bencana provinsi. Secara umum Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana adalah :

- a. Mengsiagakan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
- b. Mengadakan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- c. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan Penanggulangan bencana
- d. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu
- e. Penelitian, pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana
- f. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- g. Perlindungan masyarakat dari bencana
- h. Sarana dan Prasarana antara lain Peralatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berupa peralatan penyelamatan (perahu dolpin, Kapal LCT, Alat komunikasi, tenda darurat, kendaraan untuk penanggulangan bencana.
- i. Bantuan untuk masyarakat terdiri dari :
  - Tanggap darurat bencana yang meliputi bahan pangan, bahan sandang, peralatan dapur keluarga, peralatan dapur umum.
  - Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban bencana.

#### **5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi**

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Terdapat potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya.

- a. Bencana Angin Puting beliung
- b. Bencana Banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut
- c. Bencana Kebakaran.
- d. Bencana Tanah Longsor (kecelakaan kerja penambang TI)
- e. Bencana Tersambar petir

## **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK terdiri dari satu atau beberapa zonasi, seperti zonasi pengolahan ekspor, logistik, industri, energi, pengembangan teknologi, pariwisata, atau zonasi kegiatan ekonomi lainnya, dan dapat pula dibangun fasilitas pendukung seperti perumahan bagi pekerja. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009, di dalam setiap KEK harus disediakan lokasi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kegiatan usaha di kawasan ini. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Ada empat kriteria pemilihan lokasi KEK. Pertama, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Kedua, didukung oleh pemerintah daerah bersangkutan. Ketiga, dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional di Indonesia, atau terletak di wilayah yang memiliki sumberdaya unggulan. Keempat, mempunyai batas yang jelas. Pembentukan KEK dapat diusulkan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun badan usaha. Usulan pemerintah provinsi langsung disampaikan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha disampaikan melalui pemerintah provinsi. Baik usulan provinsi maupun badan usaha, harus mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memfokuskan pada peningkatan ekspor dan investasi pada beberapa kawasan khusus yang memang mendapatkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Beberapa keunggulan yang dimiliki provinsi ini yang dapat menjadi peluang dalam menarik investasi, diantaranya letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat ideal bagi pengembangan pusat logistik dan distribusi karena dilewati oleh jalur maritim internasional dan posisi Indonesia terletak di tengah pasar yang sangat besar, yaitu pasar ASEAN.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, terdapat dua kawasan yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu Kawasan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung dan Kawasan Tanjung Berikat di Kabupaten Bangka Tengah. Kedua kawasan ekonomi khusus tersebut telah diusulkan kepada yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Pansus Kawasan Ekonomi Khusus oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Nomor 500/248/BPS&S/III/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Bangka Belitung.

### **• Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata**

Secara geografis, Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memiliki keunggulan yang dapat menarik investasi terutama di bidang pariwisata, oleh karena itu diusulkan oleh Inisiator Badan Usaha Pariwisata (konsorsium) bahwa Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsorsium selaku pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sampai sejauh ini sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011. Progres terakhir dari Konsorsium ini adalah telah menyelesaikan *Feasibility Study* guna melengkapi persyaratan untuk KEK

Pariwisata, dan hanya tinggal kajian Lingkungan Hidup yang harus dilakukan untuk KEK Pariwisata dapat ditetapkan.

Penggunaan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangan KEK perlu dilakukan mengingat dana untuk itu sangatlah besar karena Pemerintah Daerah banyak berperan dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hasil studi dari beberapa negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah (Ayu Prima Yesuari, 2011).

Didalam kerangka pengembangan KEK bidang industri di Kawasan Tanjung Berikat dan Kawasan Tanjung Batu sebagai salah satu tawaran utama (*prime offer*) pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan daya saing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan koridor ekonomi lainnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin ketatnya persaingan diantara berbagai wilayah dalam mengembangkan berbagai bentuk kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Koridor Ekonomi Sumatera maupun di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di kawasan masing-masing.

## **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Gangguan yang terjadi (Konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya)**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat selama tahun 2016 tidak terjadi konflik berbasis SARA dan kegiatan separatisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, telah terjadi bentrok atau perkelahian massal di beberapa tempat, yakni bentrok antar kelompok sebanyak 1 kali. Sedangkan bentrok antar warga desa/kelurahan, bentrok antar suku, perkelahian antar pelajar/mahasiswa dan bentrok warga dengan aparat keamanan, tidak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara keseluruhan jumlah perkelahian massal yang terjadi tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Perkelahian massal tahun 2015 terjadi sebanyak 6 kali, sedangkan pada tahun 2016 terjadi 3 kali.



Tabel 6.4  
Jumlah Perkelahian Massal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Menurut Jenis Perkelahian Massal Tahun 2017

No.	Jenis Perkelahian Massal	Jumlah	Keterangan
1	Antar Kelompok Warga	1	- Bentrok antara warga Desa Air Lintang Tempilang dengan kelompok Penambang Ilegal (warga Selapan) di Tempilang, pada tanggal 10 Desember 2017. Permasalahan : awalnya cekcok mulut, pengeroyokan yang mengakibatkan Saudara Peki tewas (warga Tempilang). Oleh karena itu warga Tempilang marah, mencari pelaku dan merusak fasilitas tambang. Sebagian warga mengungsi ke Polsek Tempilang.
2	Warga Antar Desa/Kelurahan	-	-
3	Antar Suku	-	-
4	Antar Pelajar/Mahasiswa	-	-
5	Warga dengan Aparat Keamanan	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD yang melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

Secara umum jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2017 sebanyak 83 orang, yang terdiri 76 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Jika dirinci berdasarkan pangkat dan golongan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, pangkat dan golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda (IVc), dan terendah adalah Pengatur Muda (IIa). Sementara itu pangkat dan golongan yang paling banyak adalah Pengatur (IIc) sebanyak 19 orang, kemudian diikuti Penata Muda (IIIa) sebanyak 15 orang dan Penata Muda Tk.I (IIIb) sebanyak 14 orang.

Berdasarkan eselonering, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, eselonering tertinggi adalah IIa yang diduduki oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian eselon IIIa yang merupakan jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang yang berjumlah 5 (lima) orang, eselon IVa yang merupakan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, sebanyak 11 (sebelas) orang, dan selebihnya non eselon.

Berdasarkan tingkat pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4, tingkat pendidikan tertinggi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pasca Sarjana/S-2 sebanyak 6 orang, sedangkan

terendah adalah tingkat pendidikan SLTA sebanyak 35 orang. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Sarjana S1 sebanyak 40 orang.

Tabel 6.5  
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Menurut Pangkat Golongan, serta Jenis Kelamin Per Desember 2017

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IVc	1	0	1
2	Pembina Tk. I/IVb	1	0	1
3	Pembina/IVa	3	1	4
4	Penata Tk. I/ IIIId	1	2	3
5	Penata/IIIc	8	2	10
6	Penata Muda Tk. I/IIIb	14	-	14
7	Penata Muda/ IIIa	15	-	15
8	Pengatur Tk. I/IIId	2	0	2
9	Pengatur/ IIc	18	1	19
10	Pengatur Muda Tk. I/IIb	1	-	1
11	Pengatur Muda/IIa	12	1	13
	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>83</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 6.6  
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin Per Desember 2017

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IIa	1	0	1
2	IIIa	3	2	5
3	IVa	10	1	11
4	JFU	48	2	50
5	JFT	14	2	16
	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>83</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 6.7  
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/S2	5	1	6
2	Sarjana/S-1	36	4	40
3	Diploma-III	1	1	2
4	SLTA	34	1	35
	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>83</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **4. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Pada tahun 2017, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibiayai melalui APBD. Total anggaran APBD sebesar Rp 21.560.297.604,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 9.545.424.054,- dan belanja langsung sebesar Rp.12.014.873.550,-.

#### **5. Penanggulangan Dan Kendalanya**

Salah satu tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan masing-masing. Secara umum kendala yang dihadapi adalah jumlah Linmas yang masih kurang dan alokasi anggaran pembinaan Linmas yang masih minim.

#### **H. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

Keikutsertaan aparat keamanan terutama Polri dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan sangat diperlukan, terutama terhadap kejadian-kejadian yang menjurus anarkis. Selain pada saat kejadian, Polri juga dapat meminimalkan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan juga melakukan patroli dan mengoptimalkan fungsi intelegennya serta penguasaan wilayah oleh anggota.

#### **F. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 15 Februari 2017 telah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk periode tahun 2017 s/d 2022 sebagai wujud kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Terdapat empat pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Gubernur tahun 2017, yaitu:

1. Yusron Ihza Mahendra yang berpasangan dengan Yusroni Yazid (mantan Bupati Bangka) yang didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat;
2. Hidayat Arsani (Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung) berpasangan dengan Sukirman (mantan Wakil Bupati Bangka Barat) yang didukung oleh Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanah Nasional, dan Partai Golkar;
3. Rustam Effendi (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung) berpasangan dengan Muhammad Irwansyah (Walikota Pangkalpinang) yang didukung oleh PDI Perjuangan;
4. Erzaldi Rosman Djohan (Bupati Bangka Tengah) berpasangan dengan Abdul Fatah yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Pelaksanaan tahapan Pemilihan mulai dari penganggaran, data pemilih, proses pendaftaran pasangan calon, kampanye, sampai dengan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara pasangan calon semua berjalan lancar, aman dan kondusif.

Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diketahui tingkat rata-rata partisipasi pemilih tertera dalam table berikut :

Tabel 6.8  
Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>TOTAL</b>
Pemilih	463.302	443.555	916.464
Pengguna Hak Pilih	275.919	285.260	567.344
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40,4% : Memilih</li> <li>▪ 59,6% : Tidak memilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 35,7% : Memilih</li> <li>▪ 64,3% : Tidak memilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 38,1% : Memilih</li> <li>▪ 61,9% : Tidak memilih</li> </ul>

Sumber KPU

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk priode Tahun 2017 s/d 2022 mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 terlaksana dengan sukses, lancar, aman, dan damai.

## **BAB VII PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2017 yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pengendalian dan pengawasan.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada hakikatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja eksekutif (Pemerintah Daerah), legislatif (DPRD), masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Selanjutnya perlu dilakukan peningkatan terhadap pencapaian target pembangunan agar target dan sasaran pembangunan dalam dua tahun berikutnya seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dapat tercapai.

Segala kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2017 akan menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah masyarakat bumi serumpun sebalai, dengan harapan semoga kinerja pembangunan akan semakin baik dan segala upaya yang kita lakukan demi kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa di ridhoi oleh Allah SWT.



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Total Belanja Dinas</b>		<b>450.418.981.718,95</b>	<b>477.363.389.104,63</b>	<b>98,68</b>	<b>423.561.349.126,00</b>	<b>88,73</b>	<b>53.802.039.978,63</b>	<b>11,27</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>254.713.895.218,95</b>	<b>237.826.631.204,63</b>	<b>100</b>	222.931.741.420,00	<b>93,74</b>	<b>14.894.889.784,63</b>	<b>6,26</b>
a	Gaji dan Tunjangan	179.740.175.218,95	166.351.781.910,23	100	160.559.786.151,00	96,52	5.791.995.759,23	3,48
b	Tambahan Penghasilan PNS	74.973.720.000,00	71.474.849.294,40	100	62.371.955.269,00	87,26	9.102.894.025,40	12,74
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>195.705.086.500,00</b>	<b>239.536.757.900,00</b>	<b>97,36</b>	<b>200.629.607.706,00</b>	<b>83,76</b>	<b>38.907.150.194,00</b>	<b>16,24</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>80.806.950.000,00</b>	<b>44.016.510.000,00</b>	<b>100</b>	<b>41.907.080.184,00</b>	<b>95,21</b>	<b>2.109.429.816,00</b>	<b>4,79</b>
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000	13.500.000	100	13.460.000	99,70	40.000,00	0,30
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	202.000.000	100	107.250.290	53,09	94.749.710,00	46,91
3	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	334.350.000	334.350.000	100	169.668.284,00	50,75	164.681.716,00	49,25
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000	36.000.000	100	27.020.800	75,06	8.979.200,00	24,94
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	132.800.000	132.800.000	100	128.824.700	97,01	3.975.300,00	2,99
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	31.000.000	100	19.830.000	63,97	11.170.000,00	36,03
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	100	12.000.000	100,00	0,00	0,00
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	70.000.000	70.000.000	100	57.615.000	82,31	12.385.000,00	17,69
9	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500.000.000	500.000.000	100	497.967.857	99,59	2.032.143,00	0,41
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	429.090.000	429.090.000	100	406.200.000	94,67	22.890.000,00	5,33
11	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah	250.000.000	250.000.000	100	211.862.500	84,75	38.137.500,00	15,26
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PLA	1.061.380.000	1.061.380.000	100	894.147.481	84,24	167.232.519,00	15,76
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota Pangkalpinang	7.373.150.000,00	3.809.390.000	100	3.689.670.000,00	96,86	119.720.000,00	3,14
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka	14.747.730.000,00	7.278.250.000	100	7.012.446.000	96,35	265.804.000,00	3,65
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka Barat	6.967.830.000,00	5.834.630.000	100	5.590.333.000	95,81	244.297.000,00	4,19
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka Tengah	6.834.530.000,00	5.616.030.000	100	5.444.337.000	96,94	171.693.000,00	3,06
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka Selatan	13.560.330.000,00	8.791.230.000	100	8.458.760.000	96,22	332.470.000,00	3,78
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Belitung	14.975.330.000,00	4.511.830.000	100	4.360.354.000	96,64	151.476.000,00	3,36
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Belitung Timur	13.315.930.000,00	5.103.030.000	100	4.805.333.272	94,17	297.696.728,00	5,83
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.723.160.000,00</b>	<b>1.350.160.000,00</b>	<b>80</b>	<b>991.939.863,00</b>	<b>73,47</b>	<b>358.220.137,00</b>	<b>26,53</b>
1	Penyusunan DED pembangunan gedung kantor	208.500.000	208.500.000	0	0	0,00	208.500.000,00	100,00
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.020.600.000,00	647.600.000	100	634.772.253	98,02	12.827.747,00	1,98
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	132.800.000	132.800.000	100	131.794.000	99,24	1.006.000,00	0,76
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	333.260.000	333.260.000	100	212.160.526,00	63,66	121.099.474,00	36,34

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	28.000.000	28.000.000	100	13.213.084	47,19	14.786.916,00	52,81
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	637.760.000,00	637.760.000,00	100	561.306.500,00	<b>88,01</b>	76.453.500,00	11,99
1	Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan di Bidang Pendidikan	430.430.000	430.430.000	100	403.770.000	<b>93,81</b>	26.660.000,00	6,19
2	Bimtek dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas	207.330.000	207.330.000	100	157.536.500	<b>75,98</b>	49.793.500,00	24,02
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	282.276.000,00	288.776.000,00	100	234.257.250,00	<b>81,12</b>	54.518.750,00	18,88
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	229.126.000,00	235.626.000	100	187.707.250	<b>79,66</b>	47.918.750,00	20,34
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	53.150.000	53.150.000	100	46.550.000	<b>87,58</b>	6.600.000,00	12,42
<b>E</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	11.930.807.000,00	12.237.277.000,00	96,64	10.351.794.457,00	<b>84,59</b>	1.885.482.543,00	15,41
1	Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal	426.283.000,00	726.283.000	100	421.106.221	<b>57,98</b>	305.176.779,00	42,02
2	Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI	2.334.184.000,00	2.421.169.000	75	1.880.372.100	<b>77,66</b>	540.796.900,00	22,34
3	Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs	3.519.491.000,00	3.425.206.000	100	2.950.347.500	<b>86,14</b>	474.858.500,00	13,86
4	Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	1.714.573.000,00	1.728.343.000	88	1.548.920.200	<b>89,62</b>	179.422.800,00	10,38
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	1.242.740.000	1.242.740.000	100	1.054.609.222	<b>84,86</b>	188.130.778,00	15,14
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	560.187.000	560.187.000	100	497.563.464	<b>88,82</b>	62.623.536,00	11,18
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	451.699.000	451.699.000	100	446.343.000	<b>98,81</b>	5.356.000,00	1,19
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba	296.980.000	296.980.000	100	281.886.500	<b>94,92</b>	15.093.500,00	5,08
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali	471.670.000	471.670.000	100	454.617.500	<b>96,38</b>	17.052.500,00	3,62
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan	477.470.000	477.470.000	100	392.941.500	<b>82,30</b>	84.528.500,00	17,70
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar	435.530.000	435.530.000	100	423.087.250	<b>97,14</b>	12.442.750,00	2,86
<b>F</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	1.811.304.000,00	1.601.341.400,00	100	1.368.853.300,00	<b>85,48</b>	232.488.100,00	14,52
1	Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan	416.754.000,00	309.944.400	100	259.013.400	<b>83,57</b>	50.931.000,00	16,43
2	Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan Mutu dan Penuntasan Buta Aksara	1.394.550.000,00	1.291.397.000	100	1.109.839.900	<b>85,94</b>	181.557.100,00	14,06
<b>G</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	1.234.324.000,00	750.338.000,00	100	492.478.723,00	<b>65,63</b>	257.859.277,00	34,37
1	Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan	1.234.324.000,00	750.338.000	100	492.478.723	<b>65,63</b>	257.859.277,00	34,37

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	<b>Program Pendidikan Menengah dan Tinggi</b>	97.278.505.500,00	124.799.595.500,00	99,61	91.038.929.429,00	<b>72,95</b>	33.760.666.071,00	27,05
1	Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA	8.649.095.000,00	9.490.814.000	84,6	7.263.123.968,00	<b>76,53</b>	2.227.690.032,00	23,47
2	Peningkatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK	11.291.695.500,00	11.281.906.500	91,6	8.284.974.711,00	<b>73,44</b>	2.996.931.789,00	26,56
3	Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi	7.194.295.000,00	10.179.455.000	91,7	7.912.626.437,00	<b>77,73</b>	2.266.828.563,00	22,27
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.603.900.000	1.603.900.000	100	1.072.205.213,00	<b>66,85</b>	531.694.787,00	33,15
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	3.000.000.000	3.000.000.000	100	1.537.357.025,00	<b>51,25</b>	1.462.642.975,00	48,75
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	1.300.000.000	1.300.000.000	100	1.031.059.012,00	<b>79,31</b>	268.940.988,00	20,69
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	1.000.000.000	1.000.000.000	100	925.129.378,00	<b>92,51</b>	74.870.622,00	7,49
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	720.000.000	720.000.000	100	327.747.260,00	<b>45,52</b>	392.252.740,00	54,48
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	2.240.000.000	2.240.000.000	100	1.486.421.283,00	<b>66,36</b>	753.578.717,00	33,64
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	1.320.000.000	1.320.000.000	100	761.848.753,00	<b>57,72</b>	558.151.247,00	42,28
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	600.000.000	600.000.000	100	576.300.000,00	<b>96,05</b>	23.700.000,00	3,95
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	518.550.000	518.550.000	100	447.515.000,00	<b>86,30</b>	71.035.000,00	13,70
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	500.000.000	500.000.000	100	487.461.500,00	<b>97,49</b>	12.538.500,00	2,51
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	2.200.000.000	2.200.000.000	100	1.215.218.423,00	<b>55,24</b>	984.781.577,00	44,76
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	1.600.000.000	1.600.000.000	100	661.004.926,00	<b>41,31</b>	938.995.074,00	58,69
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	900.000.000	900.000.000	100	543.989.383,00	<b>60,44</b>	356.010.617,00	39,56
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	1.000.000.000	1.000.000.000	100	728.092.540,00	<b>72,81</b>	271.907.460,00	27,19
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	264.000.000	264.000.000	100	179.256.764,00	<b>67,90</b>	84.743.236,00	32,10
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	1.300.000.000	1.300.000.000	100	758.975.760,00	<b>58,38</b>	541.024.240,00	41,62
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	1.050.000.000	1.050.000.000	100	989.157.210,00	<b>94,21</b>	60.842.790,00	5,79
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Paritiga, Bangka Barat	1.200.000.000	1.200.000.000	100	1.076.896.900,00	<b>89,74</b>	123.103.100,00	10,26
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	700.000.000	700.000.000	100	615.050.000,00	<b>87,86</b>	84.950.000,00	12,14
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	1.430.000.000	1.430.000.000	100	1.307.801.900,00	<b>91,45</b>	122.198.100,00	8,55
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	700.000.000	700.000.000	100	663.546.473,00	<b>94,79</b>	36.453.527,00	5,21
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	250.000.000	250.000.000	100	170.257.500,00	<b>68,10</b>	79.742.500,00	31,90
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	520.000.000	520.000.000	100	512.386.708,00	<b>98,54</b>	7.613.292,00	1,46
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	200.000.000	200.000.000	100	199.349.760,00	<b>99,67</b>	650.240,00	0,33
28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Air Gegas, Bangka Selatan	740.000.000	740.000.000	100	739.500.000,00	<b>99,93</b>	500.000,00	0,07
29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	900.000.000	900.000.000	100	823.530.000,00	<b>91,50</b>	76.470.000,00	8,50
30	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	1.400.000.000	1.400.000.000	100	498.457.230,00	<b>35,60</b>	901.542.770,00	64,40
31	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	804.862.000	804.862.000	100	730.666.907,00	<b>90,78</b>	74.195.093,00	9,22
32	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	1.750.000.000	1.750.000.000	100	1.100.962.661,00	<b>62,91</b>	649.037.339,00	37,09
33	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	300.000.000	300.000.000	100	276.506.500,00	<b>92,17</b>	23.493.500,00	7,83
34	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	1.240.000.000	1.240.000.000	100	1.081.701.700,00	<b>87,23</b>	158.298.300,00	12,77
35	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa kampit, Belitung Timur	900.000.000	900.000.000	100	722.794.610,00	<b>80,31</b>	177.205.390,00	19,69

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	920.000.000	920.000.000	100	704.656.869,00	<b>76,59</b>	215.343.131,00	23,41
37	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	350.000.000	350.000.000	100	293.415.920,00	<b>83,83</b>	56.584.080,00	16,17
38	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	1.312.200.000	1.312.200.000	100	1.067.468.391,00	<b>81,35</b>	244.731.609,00	18,65
39	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	1.202.400.000	1.202.400.000	100	1.010.536.200,00	<b>84,04</b>	191.863.800,00	15,96
40	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	1.312.200.000	1.312.200.000	100	1.251.504.906,00	<b>95,37</b>	60.695.094,00	4,63
41	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	910.800.000	910.800.000	100	812.315.844,00	<b>89,19</b>	98.484.156,00	10,81
42	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	374.400.000	374.400.000	100	347.725.000,00	<b>92,88</b>	26.675.000,00	7,12
43	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	851.400.000	851.400.000	100	625.925.150,00	<b>73,52</b>	225.474.850,00	26,48
44	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	844.200.000	844.200.000	100	671.620.500,00	<b>79,56</b>	172.579.500,00	20,44
45	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	216.000.000	216.000.000	100	179.799.600,00	<b>83,24</b>	36.200.400,00	16,76
46	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	669.600.000	669.600.000	100	584.262.200,00	<b>87,26</b>	85.337.800,00	12,74
47	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	1.330.400.000	1.330.400.000	100	834.490.980,00	<b>62,72</b>	495.909.020,00	37,28
48	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	1.404.000.000	1.404.000.000	100	785.103.820,00	<b>55,92</b>	618.896.180,00	44,08
49	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	387.000.000	387.000.000	100	357.517.790,00	<b>92,38</b>	29.482.210,00	7,62
50	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	1.440.000.000	1.440.000.000	100	922.800.500,00	<b>64,08</b>	517.199.500,00	35,92
51	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	1.078.200.000	1.078.200.000	100	976.830.350,00	<b>90,60</b>	101.369.650,00	9,40
52	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	1.156.448.000	1.156.448.000	100	1.009.234.000,00	<b>87,27</b>	147.214.000,00	12,73
53	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	925.200.000	925.200.000	100	644.956.000,00	<b>69,71</b>	280.244.000,00	30,29
54	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pantingga, Kabupaten Bangka Barat	430.200.000	430.200.000	100	405.084.400,00	<b>94,16</b>	25.115.600,00	5,84
55	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Tempur, Kabupaten Bangka Barat	880.200.000	880.200.000	100	489.899.250,00	<b>55,66</b>	390.300.750,00	44,34
56	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempiang, Kabupaten Bangka Barat	561.600.000	561.600.000	100	437.551.500,00	<b>77,91</b>	124.048.500,00	22,09
57	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	1.058.200.000	1.058.200.000	100	729.852.878,00	<b>68,97</b>	328.347.122,00	31,03
58	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	565.200.000	565.200.000	100	238.604.900,00	<b>42,22</b>	326.595.100,00	57,78
59	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	720.000.000	720.000.000	100	459.132.350,00	<b>63,77</b>	260.867.650,00	36,23
60	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkajenebaru, Kabupaten Bangka Tengah	498.600.000	498.600.000	100	459.184.600,00	<b>92,09</b>	39.415.400,00	7,91
61	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiseian, Kabupaten Bangka Tengah	522.000.000	522.000.000	100	276.505.392,00	<b>52,97</b>	245.494.608,00	47,03
62	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiseian, Kabupaten Bangka Tengah	907.200.000	907.200.000	100	649.989.696,00	<b>71,65</b>	257.210.304,00	28,35
63	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Tengah	759.600.000	759.600.000	100	754.965.908,00	<b>99,39</b>	4.634.092,00	0,61
64	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	329.400.000	329.400.000	100	322.140.000,00	<b>97,80</b>	7.260.000,00	2,20
65	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	279.000.000	279.000.000	100	231.942.000,00	<b>83,13</b>	47.058.000,00	16,87
66	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	1.124.100.000	1.124.100.000	100	1.067.123.250,00	<b>94,93</b>	56.976.750,00	5,07
67	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	50.400.000	50.400.000	100	18.700.000,00	<b>37,10</b>	31.700.000,00	62,90
68	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	622.800.000	622.800.000	100	560.709.610,00	<b>90,03</b>	62.090.390,00	9,97
69	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	1.281.000.000	1.281.000.000	100	943.258.300,00	<b>73,63</b>	337.741.700,00	26,37
70	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	867.600.000	867.600.000	100	837.200.000,00	<b>96,50</b>	30.400.000,00	3,50
71	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	820.800.000	820.800.000	100	629.497.867,00	<b>76,69</b>	191.302.133,00	23,31

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	903.600.000	903.600.000	100	509.157.000,00	<b>56,35</b>	394.443.000,00	43,65
73	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	1.218.600.000	1.218.600.000	100	635.083.424,00	<b>52,12</b>	583.516.576,00	47,88
74	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	1.177.200.000	1.177.200.000	100	721.782.040,00	<b>61,31</b>	455.417.960,00	38,69
75	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	352.800.000	352.800.000	100	241.522.250,00	<b>68,46</b>	111.277.750,00	31,54
76	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	910.400.000	910.400.000	100	636.584.900,00	<b>69,92</b>	273.815.100,00	30,08
77	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	696.000.000	696.000.000	100	502.057.539,00	<b>72,13</b>	193.942.461,00	27,87
78	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	1.035.000.000	1.035.000.000	100	1.005.846.129,00	<b>97,18</b>	29.153.871,00	2,82
79	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur	646.160.000	646.160.000	100	545.114.386,00	<b>84,36</b>	101.045.614,00	15,64
80	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	90.000.000	90.000.000	100	90.000.000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00
81	Kegiatan Pengelolaan DAK Fisik SMK	0	10.236.000.000	100	5.089.561.871,00	<b>49,72</b>	5.146.438.129,00	50,28
82	Kegiatan Pengelolaan DAK Fisik SMA/MA	0	13.468.000.000	100	10.761.840.574,00	<b>79,91</b>	2.706.159.426,00	20,09
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	-	53.855.000.000	100	53.682.968.000,00	99,68	172.032.000,00	0,319436
1	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		1.149.400.000	100	1.149.400.000,00	100,00	-	0,00
2	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		2.157.400.000	100	2.157.400.000,00	100,00	-	0,00
3	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		897.400.000	100	897.400.000,00	100,00	-	0,00
4	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		659.400.000	100	659.400.000,00	100,00	-	0,00
5	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		537.600.000	100	482.720.000,00	89,79	54.880.000,00	10,21
6	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)		1.486.800.000	100	1.479.240.000,00	99,49	7.560.000,00	0,51
7	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)		932.400.000	100	917.560.000,00	98,41	14.840.000,00	1,59
8	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)		359.800.000	100	359.800.000,00	100,00	-	0,00
9	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik)		424.200.000	100	424.200.000,00	100,00	-	0,00
10	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik)		410.200.000	100	410.200.000,00	100,00	-	0,00
11	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)		551.600.000	100	551.600.000,00	100,00	-	0,00
12	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Koba (DAK Non Fisik)		1.099.000.000	100	1.046.248.000,00	95,20	52.752.000,00	4,80
13	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)		1.223.600.000	100	1.223.600.000,00	100,00	-	0,00
14	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)		999.600.000	100	999.600.000,00	100,00	-	0,00
15	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)		278.600.000	100	278.600.000,00	100,00	-	0,00
16	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)		931.000.000	100	931.000.000,00	100,00	-	0,00
17	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik)		730.800.000	100	730.800.000,00	100,00	-	0,00
18	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)		854.000.000	100	854.000.000,00	100,00	-	0,00
19	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik)		386.400.000	100	380.800.000,00	98,55	5.600.000,00	1,45
20	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)		368.200.000	100	368.200.000,00	100,00	-	0,00
21	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)		971.600.000	100	971.040.000,00	99,94	560.000,00	0,06
22	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)		516.600.000	100	506.240.000,00	97,99	10.360.000,00	2,01
23	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik)		463.400.000	100	461.160.000,00	99,52	2.240.000,00	0,48



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)		81.200.000	100	81.200.000,00	100,00	-	0,00
25	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)		144.200.000	100	140.280.000,00	97,28	3.920.000,00	2,72
26	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)		1.503.600.000	100	1.503.600.000,00	100,00	-	0,00
27	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)		1.097.600.000	100	1.092.280.000,00	99,52	5.320.000,00	0,48
28	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)		700.000.000	100	700.000.000,00	100,00	-	0,00
29	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Badau (DAK Non Fisik)		641.200.000	100	641.200.000,00	100,00	-	0,00
30	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)		184.800.000	100	184.800.000,00	100,00	-	0,00
31	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)		842.800.000	100	842.800.000,00	100,00	-	0,00
32	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Dendang (DAK Non Fisik)		256.200.000	100	242.200.000,00	94,54	14.000.000,00	5,46
33	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)		639.800.000	100	639.800.000,00	100,00	-	0,00
34	Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)		205.800.000	100	205.800.000,00	100,00	-	0,00
35	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		1.115.800.000	100	1.115.800.000,00	100,00	-	0,00
36	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		1.006.600.000	100	1.006.600.000,00	100,00	-	0,00
37	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		1.110.200.000	100	1.110.200.000,00	100,00	-	0,00
38	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		844.200.000	100	844.200.000,00	100,00	-	0,00
39	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)		1.204.000.000	100	1.204.000.000,00	100,00	-	0,00
40	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pemali (DAK Non Fisik)		1.086.400.000	100	1.086.400.000,00	100,00	-	0,00
41	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)		357.000.000	100	357.000.000,00	100,00	-	0,00
42	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik)		674.800.000	100	674.800.000,00	100,00	-	0,00
43	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)		687.400.000	100	687.400.000,00	100,00	-	0,00
44	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik)		305.200.000	100	305.200.000,00	100,00	-	0,00
45	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Mendobarat (DAK Non Fisik)		684.600.000	100	684.600.000,00	100,00	-	0,00
46	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)		79.800.000	100	79.800.000,00	100,00	-	0,00
47	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Mendobarat (DAK Non Fisik)		245.000.000	100	245.000.000,00	100,00	-	0,00
48	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Merawang (DAK Non Fisik)		562.800.000	100	562.800.000,00	100,00	-	0,00
49	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalanbaru (DAK Non Fisik)		526.400.000	100	526.400.000,00	100,00	-	0,00
50	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Namang (DAK Non Fisik)		578.200.000	100	578.200.000,00	100,00	-	0,00
51	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)		842.800.000	100	842.800.000,00	100,00	-	0,00
52	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungaiselan (DAK Non Fisik)		324.800.000	100	324.800.000,00	100,00	-	0,00
53	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Sungaiselan (DAK Non Fisik)		730.800.000	100	730.800.000,00	100,00	-	0,00
54	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)		513.800.000	100	513.800.000,00	100,00	-	0,00
55	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik)		487.200.000	100	487.200.000,00	100,00	-	0,00
56	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)		814.800.000	100	814.800.000,00	100,00	-	0,00
57	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Jebus (DAK Non Fisik)		834.400.000	100	834.400.000,00	100,00	-	0,00
58	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Parittiga (DAK Non Fisik)		494.200.000	100	494.200.000,00	100,00	-	0,00
59	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)		732.200.000	100	732.200.000,00	100,00	-	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik)		841.400.000	100	841.400.000,00	100,00	-	0,00
61	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik)		775.600.000	100	775.600.000,00	100,00	-	0,00
62	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)		127.400.000	100	127.400.000,00	100,00	-	0,00
63	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lepar pongok (DAK Non Fisik)		302.400.000	100	302.400.000,00	100,00	-	0,00
64	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)		648.200.000	100	648.200.000,00	100,00	-	0,00
65	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)		511.000.000	100	511.000.000,00	100,00	-	0,00
66	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Toboali (DAK Non Fisik)		635.600.000	100	635.600.000,00	100,00	-	0,00
67	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Lepar pongok (DAK Non Fisik)		243.600.000	100	243.600.000,00	100,00	-	0,00
68	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)		1.148.000.000	100	1.148.000.000,00	100,00	-	0,00
69	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)		938.000.000	100	938.000.000,00	100,00	-	0,00
70	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)		980.000.000	100	980.000.000,00	100,00	-	0,00
71	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Membalong (DAK Non Fisik)		621.600.000	100	621.600.000,00	100,00	-	0,00
72	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sijuk (DAK Non Fisik)		637.000.000	100	637.000.000,00	100,00	-	0,00
73	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)		546.000.000	100	546.000.000,00	100,00	-	0,00
74	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)		849.800.000	100	849.800.000,00	100,00	-	0,00
75	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Gantung (DAK Non Fisik)		793.800.000	100	793.800.000,00	100,00	-	0,00
76	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Damar (DAK Non Fisik)		449.400.000	100	449.400.000,00	100,00	-	0,00
77	Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)		539.000.000	100	539.000.000,00	100,00	-	0,00
78	Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)		194.000.000	100	194.000.000,00	100,00	-	0,00
79	Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)		89.200.000	100	89.200.000,00	100,00	-	0,00
80	Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)		84.000.000	100	84.000.000,00	100,00	-	0,00
81	Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)		84.000.000	100	84.000.000,00	100,00	-	0,00
82	Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)		84.000.000	100	84.000.000,00	100,00	-	0,00
83	Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)		118.200.000	100	118.200.000,00	100,00	-	0,00
84	Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)		84.200.000	100	84.200.000,00	100,00	-	0,00

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

**SKPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>51.087.879.362,00</b>	<b>48.072.364.615,00</b>	<b>96,92</b>	<b>43.082.265.105,00</b>	<b>89,62</b>	<b>4.990.099.510,00</b>	<b>10,38</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>13.759.247.062,00</b>	<b>13.080.362.278,00</b>	<b>100</b>	<b>12.546.794.895,00</b>	<b>95,92</b>	<b>533.567.383,00</b>	<b>4,08</b>
a	Gaji dan Tunjangan	7.242.863.062,00	6.832.878.278,00	100	6.760.366.895,00	98,94	72.511.383,00	1,06
b	Tambahan Penghasilan PNS	6.516.384.000,00	6.247.484.000,00	100	5.786.428.000,00	92,62	461.056.000,00	7,38
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>37.328.632.300,00</b>	<b>34.992.002.337,00</b>	<b>93,83</b>	<b>30.535.470.210,00</b>	<b>87,26</b>	<b>4.456.532.127,00</b>	<b>12,74</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.241.967.000,00</b>	<b>3.156.549.000,00</b>	<b>99,50</b>	<b>2.692.424.227,00</b>	<b>85,30</b>	<b>464.124.773,00</b>	<b>14,70</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000,00	48.000.000,00	100	32.222.700,00	67,13	15.777.300,00	32,87
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.000.000,00	312.000.000,00	100	184.415.729,00	59,11	127.584.271,00	40,89
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	230.420.000,00	230.420.000,00	100	161.609.459,00	70,14	68.810.541,00	29,86
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	269.610.000,00	189.840.000,00	100	178.267.500,00	93,90	11.572.500,00	6,10
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.150.000,00	82.150.000,00	100	82.138.200,00	99,99	11.800,00	0,01
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.510.000,00	153.785.000,00	100	118.074.000,00	76,78	35.711.000,00	23,22
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100	34.813.500,00	87,03	5.186.500,00	12,97
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11.760.000,00	11.760.000,00	100	9.120.000,00	77,55	2.640.000,00	22,45
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.105.000,00	34.105.000,00	100	29.720.000,00	87,14	4.385.000,00	12,86
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100	285.925.151,00	95,31	14.074.849,00	4,69
11	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.115.490.000,00	1.115.490.000,00	100	1.111.000.000,00	99,60	4.490.000,00	0,40
12	Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	100	45.953.660,00	91,91	4.046.340,00	8,09
13	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100	82.736.119,00	55,16	67.263.881,00	44,84
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Labkes	424.922.000,00	438.999.000,00	93	336.428.209,00	76,64	102.570.791,00	23,36
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>254.200.000,00</b>	<b>337.961.000,00</b>	<b>83,18</b>	<b>273.425.400,00</b>	<b>80,90</b>	<b>64.535.600,00</b>	<b>19,10</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54.300.000,00	85.348.000,00	93	77.323.200,00	90,60	8.024.800,00	9,40
2	Pengadaan Meubelair	29.000.000,00	29.000.000,00	100	27.612.200,00	95,21	1.387.800,00	4,79
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	52.713.000,00	75	23.500.000,00	44,58	29.213.000,00	55,42
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	135.800.000,00	135.800.000,00	100	128.171.000,00	94,38	7.629.000,00	5,62
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.100.000,00	35.100.000,00	47,92	16.819.000,00	47,92	18.281.000,00	52,08
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	209.661.000,00	197.356.150,00	86,95	177.120.000,00	86,68	20.236.150,00	10,25
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	147.928.000,00	140.573.150,00	93,89	131.995.000,00	93,90	8.578.150,00	6,10
8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	61.733.000,00	56.783.000,00	80	45.125.000,00	79,47	11.658.000,00	20,53
<b>D</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>455.890.000,00</b>	<b>455.890.000,00</b>	<b>86,3</b>	<b>336.309.309,00</b>	<b>73,77</b>	<b>119.580.691,00</b>	<b>26,23</b>
1	Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	455.890.000,00	455.890.000,00	86,3	336.309.309,00	73,77	119.580.691,00	26,23
<b>E</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>127.950.000,00</b>	<b>85,30</b>	<b>22.050.000,00</b>	<b>14,70</b>
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	83,33	127.950.000,00	85,30	22.050.000,00	14,70

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>F</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>242.463.000,00</b>	<b>242.463.000,00</b>	<b>87,5</b>	<b>199.705.500,00</b>	<b>82,37</b>	<b>42.757.500,00</b>	<b>17,63</b>
1	Peningkatan Promosi Kesehatan	242.463.000,00	242.463.000,00	87,5	199.705.500,00	82,37	42.757.500,00	17,63
<b>G</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>389.557.900,00</b>	<b>212.245.900,00</b>	<b>100</b>	<b>199.023.700,00</b>	<b>93,77</b>	<b>13.222.200,00</b>	<b>6,23</b>
1	Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat	389.557.900,00	212.245.900,00	100	199.023.700,00	93,77	13.222.200,00	6,23
<b>H</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>1.072.276.000,00</b>	<b>568.942.000,00</b>	<b>91,42</b>	<b>403.663.358,00</b>	<b>70,95</b>	<b>165.278.642,00</b>	<b>29,05</b>
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat	1.072.276.000,00	568.942.000,00	91,42	403.663.358,00	70,95	165.278.642,00	29,05
<b>I</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>3.181.893.000,00</b>	<b>3.071.014.287,00</b>	<b>100</b>	<b>2.059.403.393,00</b>	<b>67,06</b>	<b>1.011.610.894,00</b>	<b>32,94</b>
1	Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	691.530.000,00	598.579.000,00	100	472.735.732,00	78,98	125.843.268,00	21,02
2	Peningkatan Teknis Laboratorium Klinis dan Kesmasayarakatan	147.865.000,00	129.937.287,00	100	129.937.287,00	100,00	-	-
3	Pengendalian penyakit Menular	2.342.498.000,00	2.342.498.000,00	100	1.456.730.374,00	62,19	885.767.626,00	37,81
<b>J</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>1.029.661.000,00</b>	<b>1.029.661.000,00</b>	<b>70</b>	<b>625.157.141,00</b>	<b>60,71</b>	<b>404.503.859,00</b>	<b>39,29</b>
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.029.661.000,00	1.029.661.000,00	70	625.157.141,00	60,71	404.503.859,00	39,29
<b>K</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>21.259.131.400,00</b>	<b>20.403.416.000,00</b>	<b>75</b>	<b>19.835.729.300,00</b>	<b>97,22</b>	<b>567.686.700,00</b>	<b>2,78</b>
1	Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21.259.131.400,00	20.403.416.000,00	75	19.835.729.300,00	97,22	567.686.700,00	2,78
<b>L</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	<b>205.519.800,00</b>	<b>205.519.800,00</b>	<b>100</b>	<b>192.377.500,00</b>	<b>93,61</b>	<b>13.142.300,00</b>	<b>6,39</b>
1	Pengembangan Kesehatan Anak	205.519.800,00	205.519.800,00	100	192.377.500,00	93,61	13.142.300,00	6,39
<b>M</b>	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>	<b>310.797.900,00</b>	<b>310.797.900,00</b>	<b>86,66</b>	<b>179.053.190,00</b>	<b>57,61</b>	<b>131.744.710,00</b>	<b>42,39</b>
1	Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan Bagi Industri Makanan	310.797.900,00	310.797.900,00	86,66	179.053.190,00	57,61	131.744.710,00	42,39
<b>N</b>	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>720.212.000,00</b>	<b>70.650.000,00</b>	<b>100</b>	<b>57.951.600,00</b>	<b>82,03</b>	<b>12.698.400,00</b>	<b>17,97</b>
1	Penurunan AKI dan AKB	720.212.000,00	70.650.000,00	100	57.951.600,00	82,03	12.698.400,00	17,97
<b>O</b>	<b>Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</b>	<b>122.886.000,00</b>	<b>97.020.000,00</b>	<b>100</b>	<b>80.927.752,00</b>	<b>83,41</b>	<b>16.092.248,00</b>	<b>16,59</b>
1	Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	122.886.000,00	97.020.000,00	100	80.927.752,00	83,41	16.092.248,00	16,59
<b>P</b>	<b>Program Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>2.240.900.000,00</b>	<b>2.240.900.000,00</b>	<b>86,65</b>	<b>1.380.262.316,00</b>	<b>61,59</b>	<b>860.637.684,00</b>	<b>38,41</b>
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.983.000.000,00	1.983.000.000,00	73,3	1.162.113.600,00	58,60	820.886.400,00	41,40
2	Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium	257.900.000,00	257.900.000,00	100	218.148.716,00	84,59	39.751.284,00	15,41
<b>Q</b>	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda</b>	<b>874.944.000,00</b>	<b>874.944.000,00</b>	<b>100</b>	<b>770.533.666,00</b>	<b>88,07</b>	<b>104.410.334,00</b>	<b>11,93</b>
1	Peningkatan Sarana Prasarana Balai Laboratorium Kesehatan	874.944.000,00	874.944.000,00	100	770.533.666,00	88,07	104.410.334,00	11,93
<b>R</b>	<b>Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya</b>	<b>985.272.300,00</b>	<b>985.272.300,00</b>	<b>61,97</b>	<b>670.989.809,00</b>	<b>68,10</b>	<b>314.282.491,00</b>	<b>31,90</b>
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	879.968.200,00	879.968.200,00	92,69	633.104.595,00	71,95	246.863.605,00	28,05

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan	105.304.100,00	105.304.100,00	31,25	37.885.214,00	35,98	67.418.886,00	64,02
<b>S</b>	<b>Program Bencana Bidang Kesehatan</b>	<b>381.400.000,00</b>	<b>381.400.000,00</b>	<b>84,35</b>	<b>273.463.049,00</b>	<b>71,70</b>	<b>107.936.951,00</b>	<b>28,30</b>
1	Penanggulangan Krisis Kesehatan	381.400.000,00	381.400.000,00	84,35	273.463.049,00	71,70	107.936.951,00	28,30



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>139.121.328.570,00</b>	<b>141.599.617.570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>130.634.064.803,43</b>	<b>92,26</b>	<b>10.965.552.766,57</b>	<b>7,74</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>28.299.527.620,00</b>	<b>29.436.148.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.427.123.209,00</b>	<b>96,57</b>	<b>1.009.025.101,00</b>	<b>3,43</b>
a	Gaji dan Tunjangan	12.631.031.620,00	11.791.804.310,00	100,00	11.717.583.209,00	99,37	74.221.101,00	0,63
b	Tambahan Penghasilan PNS	15.668.496.000,00	17.644.344.000,00	100,00	16.709.540.000,00	94,70	934.804.000,00	5,30
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>110.821.800.950,00</b>	<b>112.163.469.260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102.206.941.594,43</b>	<b>91,12</b>	<b>9.956.527.665,57</b>	<b>8,88</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>6.123.830.000,00</b>	<b>5.722.970.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.298.754.306,00</b>	<b>92,59</b>	<b>424.215.694,00</b>	<b>7,41</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.896.850,00	97,42	103.150,00	2,58
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	1.961.000.000,00	1.985.000.000,00	100,00	1.775.500.559,00	89,45	209.499.441,00	10,55
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	317.770.000,00	317.770.000,00	100,00	287.123.800,00	90,36	30.646.200,00	9,64
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	445.560.000,00	433.320.000,00	100,00	356.755.000,00	82,33	76.565.000,00	17,67
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00	641.124.000,00	98,63	8.876.000,00	1,37
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	424.000.000,00	324.000.000,00	100,00	292.827.000,00	90,38	31.173.000,00	9,62
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	249.900.000,00	299.900.000,00	100,00	299.889.000,00	100,00	11.000,00	0,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000,00	200.000.000,00	100,00	199.925.350,00	99,96	74.650,00	0,04
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	570.000.000,00	175.000.000,00	100,00	167.795.000,00	95,88	7.205.000,00	4,12
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	47.815.000,00	100,00	42.268.500,00	88,40	5.546.500,00	11,60
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	741.600.000,00	886.165.000,00	100,00	833.383.371,00	94,04	52.781.629,00	5,96
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	298.670.809,00	99,56	1.329.191,00	0,44
14	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	99.595.067,00	99,60	404.933,00	0,40
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>3.086.320.000,00</b>	<b>4.025.954.381,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.948.924.159,00</b>	<b>98,09</b>	<b>77.030.222,00</b>	<b>1,91</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.396.710.000,00	2.309.171.500,00	100,00	2.246.064.969,00	97,27	63.106.531,00	2,73
2	Pengadaan Meubelair	42.360.000,00	42.360.000,00	100,00	40.592.000,00	95,83	1.768.000,00	4,17
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.647.250.000,00	1.622.422.881,00	100,00	1.622.267.190,00	99,99	155.691,00	0,01

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengadaan TLD Rumah Sakit	105.460.000,00	52.000.000,00	100,00	40.000.000,00	76,92	12.000.000,00	23,08
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>105.460.000,00</b>	<b>105.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101.754.000,00</b>	<b>96,49</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3,51</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.024.759.000,00	105.460.000,00	100,00	101.754.000,00	96,49	3.706.000,00	3,51
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>1.024.759.000,00</b>	<b>1.024.759.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>967.789.915,00</b>	<b>94,44</b>	<b>56.969.085,00</b>	<b>5,56</b>
1	Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP	827.956.000,00	827.956.000,00	100,00	801.003.165,00	96,74	26.952.835,00	3,26
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Kesehatan RSUDP	196.803.000,00	196.803.000,00	100,00	166.786.750,00	84,75	30.016.250,00	15,25
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGN</b>	<b>372.464.950,00</b>	<b>134.906.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112.755.264,00</b>	<b>83,58</b>	<b>22.150.736,00</b>	<b>16,42</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	244.614.950,00	82.456.000,00	100,00	74.655.264,00	90,54	7.800.736,00	9,46
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	127.850.000,00	52.450.000,00	100,00	38.100.000,00	72,64	14.350.000,00	27,36
<b>F</b>	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>4.152.880.000,00</b>	<b>5.526.099.379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.221.066.188,00</b>	<b>94,48</b>	<b>305.033.191,00</b>	<b>5,52</b>
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.152.880.000,00	5.526.099.379,00	100,00	5.221.066.188,00	94,48	305.033.191,00	5,52
<b>G</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>11.998.006.000,00</b>	<b>9.208.466.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.044.553.846,00</b>	<b>87,36</b>	<b>1.163.912.154,00</b>	<b>12,64</b>
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	538.966.000,00	538.966.000,00	100,00	38.400.000,00	7,12	500.566.000,00	92,88
2	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	11.459.040.000,00	8.669.500.000,00	100,00	8.006.153.846,00	92,35	663.346.154,00	7,65
<b>H</b>	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>249.940.000,00</b>	<b>149.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.072.500,00</b>	<b>58,93</b>	<b>61.387.500,00</b>	<b>41,07</b>
1	Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Melalui Pameran dan Media Cetak	249.940.000,00	149.460.000,00	100,00	88.072.500,00	58,93	61.387.500,00	41,07
<b>I</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>738.980.000,00</b>	<b>3.326.052.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.003.155.351,00</b>	<b>60,23</b>	<b>1.322.896.649,00</b>	<b>39,77</b>
1	Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah sakit	597.540.000,00	597.540.000,00	100,00	551.593.828,00	92,31	45.946.172,00	7,69
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis dan Clinical Pathway	71.680.000,00	71.680.000,00	100,00	61.864.500,00	86,31	9.815.500,00	13,69
3	Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD	69.760.000,00	69.760.000,00	100,00	14.870.500,00	21,32	54.889.500,00	78,68
4	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	-	2.000.000.000,00	100,00	1.158.282.948,00	57,91	841.717.052,00	42,09
5	Sister Hospital RSUDP dengan RSCM	-	299.172.000,00	100,00	33.080.397,00	11,06	266.091.603,00	88,94
6	Studi Evaluasi dan Optimalisasi Rumah Sakit	-	287.900.000,00	100,00	183.463.178,00	63,72	104.436.822,00	36,28

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>J</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	<b>78.882.081.000,00</b>	<b>79.758.924.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.393.394.201,43</b>	<b>92,02</b>	<b>6.365.529.798,57</b>	<b>7,98</b>
1	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	237.997.000,00	237.997.000,00	100,00	203.994.912,00	85,71	34.002.088,00	14,29
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Rumah Sakit	2.485.364.000,00	2.485.364.000,00	100,00	2.459.033.300,00	98,94	26.330.700,00	1,06
3	Pembangunan Pos Jaga dan Portal Rumah Sakit	256.380.000,00	244.170.000,00	100,00	238.743.634,00	97,78	5.426.366,00	2,22
4	Penyediaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	152.260.000,00	171.460.000,00	100,00	128.617.000,00	75,01	42.843.000,00	24,99
5	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	75.750.080.000,00	75.750.080.000,00	100,00	69.588.302.105,43	91,87	6.161.777.894,57	8,13
6	Review DED Gedung B dan Bangunan Pendukung RSUDP	-	800.000.000,00	100,00	705.685.000,00	88,21	94.315.000,00	11,79
7	Pengadaan Linen Rumah Sakit	-	69.853.000,00	100,00	69.018.250,00	98,80	834.750,00	1,20
<b>K</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	<b>4.087.080.000,00</b>	<b>3.180.418.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.026.721.864,00</b>	<b>95,17</b>	<b>153.696.636,00</b>	<b>4,83</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	1.524.000.000,00	1.142.000.000,00	100,00	1.141.531.496,00	99,96	468.504,00	0,04
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	99.825.000,00	99,83	175.000,00	0,18
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.510.050,00	99,67	489.950,00	0,33
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1.707.080.000,00	1.007.080.000,00	100,00	911.145.018,00	90,47	95.934.982,00	9,53
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambulance/Jenazah	176.000.000,00	159.200.000,00	100,00	143.698.000,00	90,26	15.502.000,00	9,74
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Oksigen Sentral	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	199.970.000,00	99,99	30.000,00	0,02
7	Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Air Rumah Sakit	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	68.450.000,00	68,45	31.550.000,00	31,55
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	130.000.000,00	210.000.000,00	100,00	209.986.300,00	99,99	13.700,00	0,01
9	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	-	112.138.500,00	100,00	102.606.000,00	91,50	9.532.500,00	8,50

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD: RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>61.276.737.173,90</b>	<b>55.188.529.338,90</b>	<b>99,50</b>	<b>49.146.057.388,36</b>	<b>89,05</b>	<b>6.042.471.950,54</b>	<b>12,29</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>28.121.492.673,90</b>	<b>25.604.392.888,90</b>	<b>100,00</b>	<b>24.103.035.871,00</b>	<b>94,14</b>	<b>1.501.357.017,90</b>	<b>6,23</b>
	Gaji dan Tunjangan	13.656.711.896,61	12.437.836.888,90	100,00	11.465.260.996,00	92,18	972.575.892,90	8,48
	Tambahan Penghasilan PNS	14.464.780.777,29	13.166.556.000,00	100,00	12.637.774.875,00	95,98	528.781.125,00	4,18
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>33.155.244.500,00</b>	<b>29.584.136.450,00</b>	<b>99,00</b>	<b>25.043.021.517,36</b>	<b>84,65</b>	<b>4.541.114.932,64</b>	<b>18,13</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.120.321.450,00</b>	<b>3.140.321.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.824.179.266,00</b>	<b>89,93</b>	<b>316.142.184,00</b>	<b>11,19</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.387.500,00	7.387.500,00	100,00	7.380.010,00	99,90	7.490,00	0,10
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.625.000,00	317.625.000,00	100,00	314.248.342,00	98,94	3.376.658,00	1,07
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	220.410.000,00	220.410.000,00	100,00	214.320.000,00	97,24	6.090.000,00	2,84
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	218.925.000,00	218.925.000,00	100,00	218.261.050,00	99,70	663.950,00	0,30
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	145.200.000,00	145.200.000,00	100,00	93.177.300,00	64,17	52.022.700,00	55,83
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	231.000.000,00	231.000.000,00	100,00	230.080.850,00	99,60	919.150,00	0,40
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.700.000,00	272.700.000,00	100,00	241.059.555,00	88,40	31.640.445,00	13,13
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.610.000,00	76.610.000,00	100,00	76.587.850,00	99,97	22.150,00	0,03
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	24.187.500,00	80,63	5.812.500,00	24,03
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.234.000,00	141.234.000,00	100,00	78.535.250,00	55,61	62.698.750,00	79,84
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	69.990.000,00	69.990.000,00	100,00	12.444.000,00	17,78	57.546.000,00	462,44
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	238.760.704,00	79,59	61.239.296,00	25,65
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	915.290.000,00	915.290.000,00	100,00	891.000.000,00	97,35	24.290.000,00	2,73
14	Pengelolaan Website	43.949.950,00	43.949.950,00	100,00	39.969.855,00	90,94	3.980.095,00	9,96
15	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	144.167.000,00	96,11	5.833.000,00	4,05
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.615.016.000,00</b>	<b>1.520.942.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.111.986.780,00</b>	<b>73,11</b>	<b>408.955.220,00</b>	<b>26,89</b>
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	301.140.000,00	301.140.000,00	100,00	229.466.000,00	76,20	71.674.000,00	23,80
2	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	173.930.000,00	173.930.000,00	100,00	152.059.214,00	87,43	21.870.786,00	12,57
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	105.426.000,00	100,00	69.700.000,00	66,11	35.726.000,00	33,89
4	Pengadaan Meubelair	297.360.000,00	297.360.000,00	100,00	214.910.000,00	72,27	82.450.000,00	27,73
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	445.986.000,00	445.986.000,00	100,00	250.871.566,00	56,25	195.114.434,00	43,75
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	197.100.000,00	197.100.000,00	100,00	194.980.000,00	98,92	2.120.000,00	1,08
7	Pembangunan Gardu Listrik	199.500.000,00	-	-	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.175.960.000,00</b>	<b>1.175.960.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.019.298.999,00</b>	<b>86,68</b>	<b>156.661.001,00</b>	<b>13,32</b>
1	Pendidikan/Pelatihan Informal	495.000.000,00	495.000.000,00	100,00	478.773.425,00	96,72	16.226.575,00	3,28
2	Pelaksanaan Kegiatan Personal Development	680.960.000,00	680.960.000,00	100,00	540.525.574,00	79,38	140.434.426,00	20,62
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>189.314.000,00</b>	<b>189.314.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>157.289.560,00</b>	<b>83,08</b>	<b>32.024.440,00</b>	<b>20,36</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.864.000,00	108.864.000,00	100,00	90.309.560,00	82,96	18.554.440,00	20,55
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	80.450.000,00	80.450.000,00	100,00	66.980.000,00	83,26	13.470.000,00	20,11
<b>E</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1.830.049.900,00</b>	<b>1.830.049.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.775.250.000,00</b>	<b>97,01</b>	<b>54.799.900,00</b>	<b>2,99</b>
1	Pengadaan Obat-Obat dan Perbekalan Rumah Sakit	1.797.999.900,00	1.797.999.900,00	100,00	1.745.229.000,00	97,07	52.770.900,00	2,93
2	Penyusunan Formularium Rumah Sakit	32.050.000,00	32.050.000,00	100,00	30.021.000,00	93,67	2.029.000,00	6,33
<b>F</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>5.273.009.900,00</b>	<b>5.056.059.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.673.492.685,00</b>	<b>92,43</b>	<b>382.567.215,00</b>	<b>7,57</b>
1	Jambore Nasional Kesehatan Jiwa	324.679.900,00	324.679.900,00	100,00	315.815.470,00	97,27	8.864.430,00	2,81
2	Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visit	242.130.000,00	242.130.000,00	100,00	207.882.200,00	85,86	34.247.800,00	14,14
3	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	3.011.200.000,00	3.011.200.000,00	100,00	2.956.600.000,00	98,19	54.600.000,00	1,81
4	Penyediaan rehabilitasi mental sosial	295.000.000,00	295.000.000,00	100,00	283.971.350,00	96,26	11.028.650,00	3,74
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	1.400.000.000,00	1.183.050.000,00	100,00	909.223.665,00	76,85	273.826.335,00	23,15
<b>G</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>508.479.600,00</b>	<b>508.479.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>456.128.223,00</b>	<b>89,70</b>	<b>52.351.377,00</b>	<b>10,30</b>
1	Persiapan Penilaian akreditasi Rumah Sakit	348.999.950,00	348.999.950,00	100,00	321.851.723,00	92,22	27.148.227,00	7,78
2	Audit Asuhan Keperawatan	47.679.900,00	47.679.900,00	100,00	37.335.000,00	78,30	10.344.900,00	21,70
3	Penyusunan Standar Etik Profesi Keperawatan	44.850.000,00	44.850.000,00	100,00	38.129.700,00	85,02	6.720.300,00	14,98
4	Penyusunan Standar Prosedur Operasional Keperawatan	66.949.750,00	66.949.750,00	100,00	58.811.800,00	87,84	8.137.950,00	12,16
<b>H</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>7.691.647.500,00</b>	<b>7.266.647.500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>6.923.489.956,77</b>	<b>95,28</b>	<b>343.157.543,23</b>	<b>4,72</b>
1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	807.540.819,00	89,73	92.459.181,00	10,27
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	431.193.800,00	335.193.800,00	100,00	321.825.275,00	96,01	13.368.525,00	3,99
3	Pengadaan SIM RS	165.259.900,00	95.259.900,00	30,00	26.752.300,00	28,08	68.507.600,00	71,92
4	Pengadaan Pagar Rawat Inap	499.999.800,00	499.999.800,00	100,00	466.390.000,00	93,28	33.609.800,00	6,72
5	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	803.250.000,00	803.250.000,00	100,00	796.710.950,77	99,19	6.539.049,23	0,82
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK)	1.196.750.000,00	937.750.000,00	100,00	825.230.412,00	88,00	112.519.588,00	12,00
7	Pembangunan Gedung Rawat Jalan (DAK)	3.695.194.000,00	3.695.194.000,00	100,00	3.679.040.200,00	99,56	16.153.800,00	0,44
<b>I</b>	<b>Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>7.251.234.350,00</b>	<b>1.396.362.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.239.414.390,00</b>	<b>88,76</b>	<b>156.947.710,00</b>	<b>11,24</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	658.239.750,00	658.239.750,00	100,00	656.500.000,00	99,74	1.739.750,00	0,26



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)	249.556.500,00	249.556.500,00	100,00	178.156.000,00	71,39	71.400.500,00	28,61
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelohan Limbah Rumah Sakit	171.518.500,00	171.518.500,00	100,00	151.920.000,00	88,57	19.598.500,00	11,43
4	Pemeliharaan rutin/Berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	79.999.800,00	79.999.800,00	100,00	78.080.000,00	97,60	1.919.800,00	2,40
5	Pengujuan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	91.919.800,00	91.919.800,00	100,00	90.732.000,00	98,71	1.187.800,00	1,29
6	Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan Gedung Kantor Rumah Sakit	6.000.000.000,00	145.127.750,00	100,00	84.026.390,00	57,90	61.101.360,00	72,72
<b>J</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>4.500.211.800,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.862.491.657,59</b>	<b>64,83</b>	<b>2.637.508.342,41</b>	<b>35,17</b>
1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	4.500.211.800,00	7.500.000.000,00	100,00	4.862.491.657,59	64,83	2.637.508.342,41	35,17

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Total Belanja Dinas</b>	<b>12.939.902.294,00</b>	<b>12.906.912.062,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.687.787.790,00</b>	<b>90,55</b>	<b>1.219.124.272,00</b>	<b>9,45</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.628.699.044,00</b>	<b>7.431.859.812,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.801.415.495,00</b>	<b>91,52</b>	<b>630.444.317,00</b>	<b>8,48</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	3.881.211.044,00	3.756.371.812,00	100,00	3.543.768.995,00	94,34	212.602.817,00	5,66
	b. Tambahan Penghasilan PNS	3.747.488.000,00	3.675.488.000,00	100,00	3.257.646.500,00	88,63	417.841.500,00	11,37
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.311.203.250,00</b>	<b>5.475.052.250,00</b>	<b>99,65</b>	<b>4.886.372.295,00</b>	<b>89,25</b>	<b>588.679.955,00</b>	<b>10,40</b>
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran</b>	<b>1.801.683.050,00</b>	<b>1.800.485.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.734.157.141,00</b>	<b>96,32</b>	<b>66.327.909,00</b>	<b>3,68</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.500.000,00	41.500.000,00	100,00	37.567.200,00	90,52	3.932.800,00	9,48
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.480.000,00	246.480.000,00	100,00	196.973.703,00	79,91	49.506.297,00	20,09
3	Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan	128.928.000,00	99.780.000,00	100,00	99.780.000,00	100,00	-	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	35.998.800,00	100,00	1.200,00	0,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	104.000.000,00	100,00	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.100.050,00	98.100.050,00	100,00	90.878.350,00	92,64	7.221.700,00	7,36
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	12.645.000,00	100,00	12.645.000,00	100,00	-	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.280.000,00	17.280.000,00	100,00	17.250.000,00	99,83	30.000,00	0,17
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.097.000,00	13.900.000,00	100,00	11.289.000,00	81,22	2.611.000,00	18,78
10	Penyediaan Makanan dan minuman	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	104.998.000,00	100,00	2.000,00	0,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00	350.000.000,00	100,00	347.018.588,00	99,15	2.981.412,00	0,85
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	515.298.000,00	525.800.000,00	100,00	525.800.000,00	100,00	-	-
13	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.958.500,00	99,97	41.500,00	0,03
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>653.380.000,00</b>	<b>654.262.000,00</b>	<b>99,73</b>	<b>606.114.840,00</b>	<b>92,64</b>	<b>48.147.160,00</b>	<b>7,36</b>
1	Pengadaan Sumur Bor	63.370.000,00	63.370.000,00	100,00	61.131.000,00	96,47	2.239.000,00	3,53
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.850.000,00	267.732.000,00	98,40	259.818.000,00	97,04	7.914.000,00	2,96
3	Penambahan Daya Listrik dan Perbaikan Instalasi Listrik	42.950.000,00	27.950.000,00	100,00	26.772.500,00	95,79	1.177.500,00	4,21
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	68.811.728,00	87,10	10.188.272,00	12,90
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	208.960.000,00	176.960.000,00	100,00	150.331.612,00	84,95	26.628.388,00	15,05
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	49.250.000,00	39.250.000,00	100,00	39.250.000,00	100,00	-	-

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	44.400.000,00	100,00	-	-
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>166.779.950,00</b>	<b>166.779.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62.334.791,00</b>	<b>37,38</b>	<b>104.445.159,00</b>	<b>62,62</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	48.215.841,00	32,14	101.784.159,00	67,86
2	Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup	16.779.950,00	16.779.950,00	100,00	14.118.950,00	84,14	2.661.000,00	15,86
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.080.728.750,00</b>	<b>1.060.621.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>961.718.376,00</b>	<b>90,67</b>	<b>98.903.374,00</b>	<b>9,33</b>
1	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota	47.663.750,00	47.663.750,00	100,00	46.478.444,00	97,51	1.185.306,00	2,49
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.195.000,00	101.158.000,00	100,00	68.472.132,00	67,69	32.685.868,00	32,31
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	797.370.000,00	867.300.000,00	100,00	809.297.400,00	93,31	58.002.600,00	6,69
4	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44.500.000,00	44.500.000,00	100,00	37.470.400,00	84,20	7.029.600,00	15,80
<b>F</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>123.518.000,00</b>	<b>107.048.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105.708.000,00</b>	<b>98,75</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1,25</b>
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	123.518.000,00	107.048.000,00	100,00	105.708.000,00	98,75	1.340.000,00	1,25
<b>G</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>703.970.500,00</b>	<b>681.225.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>625.972.554,00</b>	<b>91,89</b>	<b>55.252.946,00</b>	<b>8,11</b>
1	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	275.020.000,00	275.020.000,00	100,00	265.703.784,00	96,61	9.316.216,00	3,39
2	Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)	112.570.000,00	101.525.000,00	100,00	100.903.600,00	99,39	621.400,00	0,61
3	Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	49.298.000,00	37.598.000,00	100,00	36.479.670,00	97,03	1.118.330,00	2,97
4	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota	46.925.000,00	46.925.000,00	100,00	45.575.000,00	97,12	1.350.000,00	2,88
5	Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	71.680.000,00	71.680.000,00	100,00	64.002.100,00	89,29	7.677.900,00	10,71
6	Rencana Aksi Pengelolaan Sungai Terpadu	148.477.500,00	148.477.500,00	100,00	113.308.400,00	76,31	35.169.100,00	23,69
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Kuantas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>550.453.000,00</b>	<b>773.940.000,00</b>	<b>97,14</b>	<b>561.671.593,00</b>	<b>72,57</b>	<b>212.268.407,00</b>	<b>24,56</b>
1	Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Contrl Chat	66.545.000,00	123.990.000,00	100,00	89.640.414,00	72,30	34.349.586,00	27,70
2	Surveilans, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium	105.150.000,00	62.670.000,00	100,00	62.240.000,00	99,31	430.000,00	0,69
3	Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022	378.758.000,00	287.280.000,00	100,00	274.466.400,00	95,54	12.813.600,00	4,46
4	Penyusunan Dokumen KLHS RZWP3K	-	300.000.000,00	88,55	135.324.779,00	45,11	164.675.221,00	43,44
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>186.290.000,00</b>	<b>186.290.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>184.295.000,00</b>	<b>98,93</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>1,07</b>
1	Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien	186.290.000,00	186.290.000,00	100,00	184.295.000,00	98,93	1.995.000,00	1,07

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>321.707.643.013,00</b>	<b>293.006.146.064,00</b>	<b>96,96</b>	<b>266.763.313.264,00</b>	<b>91,04</b>	<b>26.242.832.800,00</b>	<b>8,96</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>16.316.988.313,00</b>	<b>16.827.663.633,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.776.825.503,00</b>	<b>93,76</b>	<b>1.050.838.130,00</b>	<b>6,24</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>305.390.654.700,00</b>	<b>276.178.482.431,00</b>	<b>93,91</b>	<b>250.986.487.761,00</b>	<b>90,88</b>	<b>25.191.994.670,00</b>	<b>9,12</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.686.614.000,00</b>	<b>2.735.851.581,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.279.893.480,00</b>	<b>83,33</b>	<b>455.958.101,00</b>	<b>16,67</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	5.662.200,00	56,62	4.337.800,00	43,38
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	252.657.581,00	100,00	162.789.895,00	64,43	89.867.686,00	35,57
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	299.640.000,00	266.220.000,00	100,00	266.100.000,00	99,95	120.000,00	0,05
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	38.981.000,00	99,95	19.000,00	0,05
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00	100,00	-	-
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	49.994.700,00	76,91	15.005.300,00	23,09
7	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	23.978.150,00	95,91	1.021.850,00	4,09
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.624.000,00	24.624.000,00	100,00	24.120.000,00	97,95	504.000,00	2,05
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.200.000,00	20.200.000,00	100,00	15.589.000,00	77,17	4.611.000,00	22,83
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	58.736.000,00	78,31	16.264.000,00	21,69
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500.000.000,00	550.000.000,00	100,00	549.970.759,00	99,99	29.241,00	0,01
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.000.000,00	348.000.000,00	100,00	325.600.000,00	93,56	22.400.000,00	6,44
13	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) berubah menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)	858.150.000,00	858.150.000,00	100,00	556.611.514,00	64,86	301.538.486,00	35,14
14	Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	100.000.000,00	130.000.000,00	100,00	129.760.262,00	99,82	239.738,00	0,18
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>792.060.000,00</b>	<b>749.344.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>591.073.360,00</b>	<b>78,88</b>	<b>154.882.640,00</b>	<b>20,67</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	148.250.000,00	148.250.000,00	100,00	134.350.000,00	90,62	13.900.000,00	9,38
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	82.284.000,00	100,00	78.896.000,00	95,88	3.388.000,00	4,12
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	333.810.000,00	333.810.000,00	100,00	228.351.360,00	68,41	105.458.640,00	31,59
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	26.967.000,00	44,95	33.033.000,00	55,06
5	Rehabilitasi Gedung Kantor	250.000.000,00	125.000.000,00	100,00	122.509.000,00	98,01	2.491.000,00	1,99
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.334.614,00</b>	<b>82,55</b>	<b>29.665.386,00</b>	<b>17,45</b>

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	140.334.614,00	82,55		
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>344.985.000,00</b>	<b>344.985.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>154.641.600,00</b>	<b>44,83</b>	<b>190.343.400,00</b>	<b>55,17</b>
	Worksshop Sinkronisasi Program Infrastruktur	119.670.000,00	119.670.000,00	100,00	75.052.600,00	62,72	44.617.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.815.000,00	180.815.000,00	100,00	54.110.000,00	29,93	126.705.000,00	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44.500.000,00	44.500.000,00	100,00	25.479.000,00	57,26	19.021.000,00	
<b>E</b>	<b>Program Pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>131.706.629.250,00</b>	<b>126.376.676.400,00</b>	<b>90,00</b>	<b>121.128.933.404,00</b>	<b>95,85</b>	<b>5.247.742.996,00</b>	<b>4,15</b>
	Pembangunan Jalan	57.741.980.000,00	55.684.832.900,00	100,00	54.709.165.390,00	98,25	975.667.510,00	1,75
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	2.261.600.000,00	2.261.600.000,00	50,00	538.918.514,00	23,83	1.722.681.486,00	76,17
	Pembangunan Jembatan	57.161.984.250,00	50.479.484.300,00	100,00	49.678.761.500,00	98,41	800.722.800,00	1,59
	Pembangunan Jembatan (DAK)	14.541.065.000,00	14.632.585.000,00	100,00	13.115.309.500,00	89,63	1.517.275.500,00	10,37
	Pembangunan Jalan untuk Dihilangkan	-	3.318.174.200,00	100,00	3.086.778.500,00	93,03	231.395.700,00	6,97
<b>F</b>	<b>Program Pembangunan Turap/Talud Brojong</b>	<b>5.034.690.000,00</b>	<b>459.738.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>449.478.500,00</b>	<b>97,77</b>	<b>10.260.000,00</b>	<b>2,23</b>
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.302.330.000,00	93.558.500,00	-	93.558.500,00	100,00	-	-
	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	732.360.000,00	366.180.000,00	100,00	355.920.000,00	97,20	10.260.000,00	2,80
<b>G</b>	<b>Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>111.667.175.000,00</b>	<b>106.764.876.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103.198.427.463,00</b>	<b>96,66</b>	<b>3.566.449.037,00</b>	<b>3,34</b>
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	93.310.140.000,00	87.121.381.500,00	100,00	85.755.562.746,00	98,43	1.365.818.754,00	1,57
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	15.290.935.000,00	15.363.285.000,00	100,00	13.994.420.000,00	91,09	1.368.865.000,00	8,91
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	1.068.080.000,00	1.068.080.000,00	100,00	832.919.235,00	77,98	235.160.765,00	22,02
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	1.998.020.000,00	1.998.020.000,00	100,00	1.412.862.982,00	70,71	585.157.018,00	29,29
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk Dihilangkan	-	1.214.110.000,00	100,00	1.202.662.500,00	99,06	11.447.500,00	0,94
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan</b>	<b>343.330.000,00</b>	<b>343.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>313.089.200,00</b>	<b>91,19</b>	<b>30.240.800,00</b>	<b>8,81</b>
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	308.180.000,00	308.180.000,00	100,00	278.854.700,00	90,48	29.325.300,00	9,52
	Rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Kebinarmagaan	35.150.000,00	35.150.000,00	100,00	34.234.500,00	97,40	915.500,00	2,60
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>6.872.000.000,00</b>	<b>6.973.253.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.102.639.000,00</b>	<b>87,51</b>	<b>870.614.000,00</b>	<b>12,49</b>
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	384.476.000,00	96,12	15.524.000,00	3,88



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	6.472.000.000,00	6.573.253.000,00	100,00	5.718.163.000,00	86,99	855.090.000,00	13,01
<b>J</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku</b>	<b>1.060.860.000,00</b>	<b>21.530.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.530.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku	1.060.860.000,00	21.530.000,00	-	21.530.000,00	100,00	-	-
<b>K</b>	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>	<b>29.915.560.000,00</b>	<b>14.740.646.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.008.889.450,00</b>	<b>95,04</b>	<b>731.756.550,00</b>	<b>4,96</b>
	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya	2.105.970.000,00	1.063.769.000,00	100,00	763.049.000,00	71,73	300.720.000,00	28,27
	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	26.323.150.000,00	13.616.877.000,00	100,00	13.187.769.850,00	96,85	429.107.150,00	3,15
	Perencanaan Pengendalian Banjir	1.486.440.000,00	60.000.000,00	100,00	58.070.600,00	96,78	1.929.400,00	3,22
<b>M</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>751.510.000,00</b>	<b>2.453.010.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.385.219.300,00</b>	<b>97,24</b>	<b>67.790.700,00</b>	<b>2,76</b>
	Penyusunan Rencana Detail Tata ruang Kawasan	751.510.000,00	751.510.000,00	100,00	729.881.000,00	97,12	21.629.000,00	2,88
	Pengadaan Alat Survey	-	1.701.500.000,00	100,00	1.655.338.300,00	97,29	46.161.700,00	2,71
<b>N</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>14.045.241.450,00</b>	<b>14.045.241.450,00</b>	<b>70,00</b>	<b>212.338.390,00</b>	<b>1,51</b>	<b>13.832.903.060,00</b>	<b>98,49</b>
	Pengadaan Lahan JL. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander	14.045.241.450,00	14.045.241.450,00	70,00	212.338.390,00	1,51	13.832.903.060,00	98,49

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>24.604.822.410,00</b>	<b>22.211.747.172,08</b>	<b>99,11</b>	<b>19.230.671.938,65</b>	<b>86,58</b>	<b>2.981.075.233,43</b>	<b>12,53</b>
<b>I,</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>10.345.890.410,00</b>	<b>8.718.665.272,08</b>	<b>100,00</b>	<b>7.747.886.488,00</b>	<b>88,87</b>	<b>970.778.784,08</b>	<b>11,13</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.258.932.000,00</b>	<b>13.493.081.900,00</b>	<b>98,21</b>	<b>11.482.785.450,65</b>	<b>85,10</b>	<b>2.010.296.449,35</b>	<b>13,11</b>
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.833.940.000,00</b>	<b>3.255.580.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.971.248.588,00</b>	<b>91,27</b>	<b>284.331.412,00</b>	<b>8,73</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000,00	18.020.000,00	100,00	15.139.615,00	84,02	2.880.385,00	15,98
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	326.000.000,00	326.000.000,00	100,00	244.304.129,00	74,94	81.695.871,00	25,06
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	174.120.000,00	171.120.000,00	100,00	166.740.000,00	97,44	4.380.000,00	2,56
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.995.000,00	99,98	5.000,00	0,02
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	121.920.000,00	64,17	68.080.000,00	35,83
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	180.000.000,00	100,00	179.889.000,00	99,94	111.000,00	0,06
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	203.000.000,00	163.000.000,00	100,00	131.804.500,00	80,86	31.195.500,00	19,14
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	26.390.000,00	87,97	3.610.000,00	12,03
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	42.180.000,00	84,36	7.820.000,00	15,64
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.760.000,00	32.380.000,00	100,00	10.698.500,00	33,04	21.681.500,00	66,96
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	100.000.000,00	150.000.000,00	100,00	119.035.600,00	79,36	30.964.400,00	20,64
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	650.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	986.302.627,00	98,63	13.697.373,00	1,37
13	Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	715.060.000,00	715.060.000,00	100,00	701.860.000,00	98,15	13.200.000,00	1,85
14	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	194.989.617,00	97,49	5.010.383,00	2,51
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.320.330.000,00</b>	<b>1.790.872.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.420.712.718,00</b>	<b>79,33</b>	<b>370.159.282,00</b>	<b>20,67</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	810.000.000,00	680.000.000,00	100,00	519.363.000,00	76,38	160.637.000,00	23,62
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	511.250.000,00	500.792.000,00	100,00	398.787.918,00	79,63	102.004.082,00	20,37
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	100.000.000,00	100,00	99.700.000,00	99,70	300.000,00	0,30
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	431.130.000,00	403.130.000,00	100,00	315.241.800,00	78,20	87.888.200,00	21,80
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	45.000.000,00	85.000.000,00	100,00	77.620.000,00	91,32	7.380.000,00	8,68
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	492.950.000,00	21.950.000,00	100,00	10.000.000,00	45,56	11.950.000,00	54,44
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>126.350.000,00</b>	<b>115.850.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106.690.500,00</b>	<b>92,09</b>	<b>9.159.500,00</b>	<b>7,91</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.525.000,00	53.025.000,00	100,00	53.023.300,00	100,00	1.700,00	0,00
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	71.825.000,00	62.825.000,00	100,00	53.667.200,00	85,42	9.157.800,00	14,58
<b>D</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>1.194.898.000,00</b>	<b>1.259.113.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>920.536.964,00</b>	<b>73,11</b>	<b>338.576.036,00</b>	<b>1,89</b>
1	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	468.565.000,00	474.890.000,00	100,00	372.104.301,00	78,36	102.785.699,00	21,64
2	Instalasi dan Implementasi Aplikasi Geoportal Pada Simpul Jaringan Nasional	415.398.000,00	380.148.000,00	100,00	342.761.437,00	90,17	37.386.563,00	9,83
3	Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	310.935.000,00	249.855.000,00	100,00	205.671.226,00	82,32	44.183.774,00	17,68
4	Penyusunan Basis Data Provinsi Kep. Babel	0,00	154.220.000,00	0,00	0,00	0,00	154.220.000,00	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>E</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>298.135.000,00</b>	<b>246.515.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>232.807.910,00</b>	<b>94,44</b>	<b>13.707.090,00</b>	<b>5,56</b>
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	298.135.000,00	246.515.000,00	100,00	232.807.910,00	94,44	13.707.090,00	5,56
<b>F</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	<b>119.540.000,00</b>	<b>110.740.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74.236.000,00</b>	<b>67,04</b>	<b>36.504.000,00</b>	<b>32,96</b>
1	Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	119.540.000,00	110.740.000,00	100,00	74.236.000,00	67,04	36.504.000,00	32,96
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>346.760.000,00</b>	<b>379.760.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>302.031.511,00</b>	<b>79,53</b>	<b>77.728.489,00</b>	<b>20,47</b>
1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana	346.760.000,00	379.760.000,00	100,00	302.031.511,00	79,53	77.728.489,00	20,47
<b>H</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>4.530.817.000,00</b>	<b>4.370.967.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.825.371.501,65</b>	<b>87,52</b>	<b>545.595.498,35</b>	<b>12,48</b>
1	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	724.250.000,00	634.250.000,00	100,00	548.040.605,51	86,41	86.209.394,49	13,59
2	Penyusunan RKPD	493.220.000,00	472.720.000,00	100,00	440.563.167,00	93,20	32.156.833,00	6,80
3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	767.892.000,00	665.752.000,00	100,00	621.145.218,50	93,30	44.606.781,50	6,70
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	487.865.000,00	394.165.000,00	100,00	390.320.452,00	99,02	3.844.548,00	0,98
5	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	538.700.000,00	412.450.000,00	100,00	373.428.736,00	90,54	39.021.264,00	9,46
6	Penyusunan KUA, PPAS	432.900.000,00	391.150.000,00	100,00	375.348.500,00	95,96	15.801.500,00	4,04
7	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas	354.930.000,00	287.280.000,00	100,00	267.675.800,00	93,18	19.604.200,00	6,82
8	Penyusunan RPJMD 2017-2022	731.060.000,00	688.010.000,00	100,00	529.376.674,64	76,94	158.633.325,36	23,06
9	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	0,00	425.190.000,00	100,00	279.472.348,00	65,73	145.717.652,00	34,27
<b>I</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>635.504.000,00</b>	<b>288.726.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247.234.313,00</b>	<b>85,63</b>	<b>41.491.987,00</b>	<b>14,37</b>
1	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA	339.678.000,00	288.726.300,00	100,00	247.234.313,00	85,63	41.491.987,00	14,37
2	Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	295.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>	<b>254.362.000,00</b>	<b>232.813.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>208.436.820,00</b>	<b>89,53</b>	<b>24.376.180,00</b>	<b>10,47</b>
1	Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan	254.362.000,00	232.813.000,00	100,00	208.436.820,00	89,53	24.376.180,00	10,47
<b>K</b>	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>200.040.000,00</b>	<b>245.690.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>179.314.734,00</b>	<b>72,98</b>	<b>66.375.266,00</b>	<b>27,02</b>
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup	200.040.000,00	245.690.000,00	100,00	179.314.734,00	72,98	66.375.266,00	27,02
<b>L</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>373.570.000,00</b>	<b>322.870.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>217.021.681,00</b>	<b>67,22</b>	<b>105.848.319,00</b>	<b>32,78</b>
1	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	373.570.000,00	322.870.000,00	100,00	217.021.681,00	67,22	105.848.319,00	32,78
<b>M</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan</b>	<b>384.266.000,00</b>	<b>325.562.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>284.924.190,00</b>	<b>87,52</b>	<b>40.638.410,00</b>	<b>12,48</b>
1	Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	182.910.000,00	154.410.000,00	100,00	128.816.950,00	83,43	25.593.050,00	16,57
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan otonomi Daerah	201.356.000,00	171.152.600,00	100,00	156.107.240,00	91,21	15.045.360,00	8,79
<b>N</b>	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah</b>	<b>640.420.000,00</b>	<b>548.023.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>492.218.020,00</b>	<b>89,82</b>	<b>55.804.980,00</b>	<b>10,18</b>
1	Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah	360.080.000,00	306.068.000,00	100,00	267.723.200,00	87,47	38.344.800,00	12,53
2	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	280.340.000,00	241.955.000,00	100,00	224.494.820,00	92,78	17.460.180,00	7,22

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1		3	4	5	6	7	8	9
<b>Total Belanja Dinas</b>		<b>18.562.363.000,00</b>	<b>15.259.820.554,52</b>	<b>99,58</b>	<b>13.701.502.877,50</b>	<b>89,79</b>	<b>1.558.317.677,02</b>	<b>9,80</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.915.098.000,00</b>	<b>5.120.030.554,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3.987.338.099,00</b>	<b>77,88</b>	<b>1.132.692.455,52</b>	<b>22,12</b>
a.	Gaji dan Tunjangan	3.264.394.000,00	2.590.766.554,52	100,00	1.947.075.599,00	75,15	643.690.955,52	24,85
b.	Tambahan Penghasilan PNS	2.650.704.000,00	2.529.264.000,00	100,00	2.040.262.500,00	80,67	489.001.500,00	19,33
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.647.265.000,00</b>	<b>10.139.790.000,00</b>	<b>99,17</b>	<b>9.714.164.778,50</b>	<b>95,80</b>	<b>425.625.221,50</b>	<b>3,37</b>
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>898.730.000,00</b>	<b>1.067.480.000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>966.695.289,00</b>	<b>90,56</b>	<b>100.784.711,00</b>	<b>1,75</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.628.550,00	86,29	1.371.450,00	13,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	75.000.000,00	-	-	0,00	75.000.000,00	0,00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.840.000,00	186.840.000,00	100,00	164.440.000,00	88,01	22.400.000,00	11,99
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	-	0,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.994.000,00	99,99	6.000,00	0,01
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.572.500,00	97,86	427.500,00	2,14
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.250.000,00	100,00	7.250.000,00	100,00	-	0,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.994.500,00	99,95	5.500,00	0,06
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	6.500.000,00	100,00	5.449.000,00	83,83	1.051.000,00	16,17
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.599.500,00	98,67	400.500,00	1,33
11	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	200.000.000,00	300.000.000,00	100,00	299.967.239,00	99,99	32.761,00	0,01
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.890.000,00	228.890.000,00	100,00	228.800.000,00	99,96	90.000,00	0,04
13	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	75.000.000,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	-	0,00
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.803.711.000,00</b>	<b>99,38</b>	<b>1.691.494.200,00</b>	<b>93,78</b>	<b>112.216.800,00</b>	<b>5,60</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000.000,00	534.000.000,00	95,00	503.875.000,00	94,36	30.125.000,00	0,64
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	17.571.000,00	100,00	16.550.000,00	94,19	1.021.000,00	5,81
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	77.140.000,00	100,00	46.029.200,00	59,67	31.110.800,00	40,33
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/operasional	0,00	25.000.000,00	100,00	12.660.000,00	50,64	12.340.000,00	49,36
5	Rehabilitasi Gedung kantor	0,00	150.000.000,00	100,00	149.800.000,00	99,87	200.000,00	0,13
6	Pembangunan Saluran drainase	0,00	50.000.000,00	100,00	49.600.000,00	99,20	400.000,00	0,80
7	Pembangunan Landscape dan parkir Gedung Kantor	0,00	200.000.000,00	100,00	199.470.000,00	99,74	530.000,00	0,27
8	Pengadaan Kendaraan Operasional	0,00	750.000.000,00	100,00	713.510.000,00	95,13	36.490.000,00	4,87
<b>C.</b>	<b>Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	33.300.000,00	100,00	33.300.000,00	100,00	-	0,00
<b>D.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62.399.921,00</b>	<b>89,14</b>	<b>7.600.079,00</b>	<b>10,86</b>

No		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	62.399.921,00	89,14	7.600.079,00	10,86
<b>E.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>164.500.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119.667.550,00</b>	<b>92,05</b>	<b>10.332.450,00</b>	<b>7,95</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,00	100.000.000,00	100,00	95.336.550,00	95,34	4.663.450,00	4,66
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44.500.000,00	30.000.000,00	100,00	24.331.000,00	81,10	5.669.000,00	18,90
<b>F.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>2.670.240.000,00</b>	<b>403.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331.719.369,00</b>	<b>82,31</b>	<b>71.280.631,00</b>	<b>17,69</b>
1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.670.240.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00
2	Survei identifikasi dan pendataan bidang perumahan provinsi kep.babel	0,00	353.000.000,00	100,00	283.219.369,00	80,23	69.780.631,00	19,77
3	Pembuatan Software aplikasi database bidang permukiman	0,00	50.000.000,00	100,00	48.500.000,00	97,00	1.500.000,00	3,00
<b>G.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>477.295.000,00</b>	<b>473.933.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>388.893.000,00</b>	<b>82,06</b>	<b>85.040.000,00</b>	<b>17,94</b>
1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	477.295.000,00	473.933.000,00	100,00	388.893.000,00	82,06	85.040.000,00	17,94
<b>H.</b>	<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>2.106.720.000,00</b>	<b>1.758.348.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.755.191.000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>0,18</b>
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.106.720.000,00	1.758.348.000,00	100,00	1.755.191.000,00	99,82	3.157.000,00	0,18
<b>I.</b>	<b>Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>	<b>2.979.890.000,00</b>	<b>2.436.729.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.430.073.949,50</b>	<b>99,73</b>	<b>6.655.050,50</b>	<b>0,27</b>
1	Pengembangan sistem distribusi air minum	2.979.890.000,00	2.436.729.000,00	100,00	2.430.073.949,50	99,73	6.655.050,50	0,27
<b>J.</b>	<b>Program Pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	<b>2.979.890.000,00</b>	<b>1.963.289.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.934.730.500,00</b>	<b>98,55</b>	<b>28.558.500,00</b>	<b>1,45</b>
1	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	2.814.410.000,00	1.896.469.000,00	100,00	1.879.503.500,00	99,11	16.965.500,00	0,89
2	Penyusunan Baseline permukiman kumuh	0,00	66.820.000,00	100,00	55.227.000,00	82,65	11.593.000,00	17,35



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>18.776.696.153,00</b>	<b>17.813.686.859,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.435.447.147,00</b>	<b>92,26</b>	<b>1.378.239.712,00</b>	<b>7,74</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.455.362.003,00</b>	<b>6.048.870.832,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.854.700.467,00</b>	<b>96,79</b>	<b>194.170.365,00</b>	<b>3,21</b>
a	Gaji dan Tunjangan	3.498.946.003,00	3.153.680.832,00	100,00	3.042.176.467,00	96,46	111.504.365,00	3,54
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.956.416.000,00	2.895.190.000,00	100,00	2.812.524.000,00	97,14	82.666.000,00	2,86
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.321.334.150,00</b>	<b>11.764.816.027,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.580.746.680,00</b>	<b>89,94</b>	<b>1.184.069.347,00</b>	<b>10,06</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.831.910.000,00</b>	<b>2.829.864.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.740.696.144,00</b>	<b>96,85</b>	<b>89.167.856,00</b>	<b>3,15</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.600.000,00	13.212.000,00	100,00	8.400.000,00	63,58	4.812.000,00	36,42
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.400.000,00	240.600.000,00	100,00	203.463.771,00	84,57	37.136.229,00	15,43
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	158.610.000,00	158.610.000,00	100,00	158.520.000,00	99,94	90.000,00	0,06
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000,00	60.000.000,00	100,00	59.594.500,00	99,32	405.500,00	0,68
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	57.225.000,00	81,75	12.775.000,00	18,25
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00	87.793.500,00	99,77	206.500,00	0,23
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.550.000,00	63.550.000,00	100,00	49.339.750,00	77,64	14.210.250,00	22,36
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	21.000.000,00	100,00	20.901.000,00	99,53	99.000,00	0,47
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.000.000,00	199.142.000,00	100,00	194.650.000,00	97,74	4.492.000,00	2,26
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	39.960.000,00	99,90	40.000,00	0,10
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.140.000,00	14.140.000,00	100,00	10.040.000,00	71,00	4.100.000,00	29,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.720.000,00	38.720.000,00	100,00	30.314.700,00	78,29	8.405.300,00	21,71
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	299.927.223,00	99,98	72.777,00	0,02
14	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.372.890.000,00	1.372.890.000,00	100,00	1.370.600.000,00	99,83	2.290.000,00	0,17
15	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.966.700,00	99,98	33.300,00	0,02
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>209.610.000,00</b>	<b>209.610.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>164.855.300,00</b>	<b>78,65</b>	<b>44.754.700,00</b>	<b>21,35</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	209.610.000,00	209.610.000,00	100,00	164.855.300,00	78,65	44.754.700,00	21,35
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>88.700.000,00</b>	<b>62.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62.200.000,00</b>	<b>99,20</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,80</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	88.700.000,00	62.700.000,00	100,00	62.200.000,00	99,20	500.000,00	0,80
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>248.265.000,00</b>	<b>193.540.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128.258.000,00</b>	<b>66,27</b>	<b>65.282.000,00</b>	<b>33,73</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.815.000,00	132.090.000,00	100,00	77.345.000,00	58,55	54.745.000,00	41,45
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	61.450.000,00	100,00	50.913.000,00	82,85	10.537.000,00	17,15
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>	<b>860.817.100,00</b>	<b>917.987.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>813.429.218,00</b>	<b>88,61</b>	<b>104.557.882,00</b>	<b>11,39</b>

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Peran Serta Pemuda	356.390.100,00	413.560.100,00	100,00	388.925.412,00	94,04	24.634.688,00	5,96
2	Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor	59.905.000,00	59.905.000,00	100,00	37.597.156,00	62,76	22.307.844,00	37,24
3	Jambore Pemuda Daerah	444.522.000,00	444.522.000,00	100,00	386.906.650,00	87,04	57.615.350,00	12,96
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>	<b>607.865.100,00</b>	<b>541.365.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>394.769.320,00</b>	<b>72,92</b>	<b>146.595.780,00</b>	<b>27,08</b>
1	Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda	225.290.050,00	193.790.050,00	100,00	124.708.320,00	64,35	69.081.730,00	35,65
2	Peningkatan Ekonomi Pemuda	382.575.050,00	347.575.050,00	100,00	270.061.000,00	77,70	77.514.050,00	22,30
<b>G</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>5.814.976.700,00</b>	<b>5.437.464.578,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.714.505.638,00</b>	<b>86,70</b>	<b>722.958.940,00</b>	<b>13,30</b>
1	Pembinaan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat melalui LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	403.825.250,00	335.525.000,00	100,00	311.246.800,00	92,76	24.278.200,00	7,24
2	Pelaksanaan Penompaan Olahraga Rekreasi, dan Tradisional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	139.099.250,00	139.099.250,00	100,00	124.778.400,00	89,70	14.320.850,00	10,30
3	Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Pelajar VIII	806.000.100,00	717.078.616,00	100,00	717.075.222,00	100,00	3.394,00	0,00
4	Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV	1.203.959.900,00	1.110.595.000,00	100,00	1.015.731.260,00	91,46	94.863.740,00	8,54
5	TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional	173.900.000,00	138.110.000,00	100,00	89.807.100,00	65,03	48.302.900,00	34,97
6	Training Camp (TC) Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 dan U-16 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	642.505.000,00	493.470.228,00	100,00	364.890.900,00	73,94	128.579.328,00	26,06
7	Pembinaan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD	1.307.865.100,00	990.905.000,00	100,00	895.507.617,00	90,37	95.397.383,00	9,63
8	Pengiriman Kontingen Peparpenas/POCANAS	188.200.000,00	-	-	-	-	-	-
9	Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV	949.622.100,00	351.311.484,00	100,00	238.670.309,00	67,94	112.641.175,00	32,06
10	Pengiriman Kontingen PEPARPENAS	-	161.370.000,00	100,00	110.091.100,00	68,22	51.278.900,00	31,78
11	Launching Porprov Tahun 2018	-	500.000.000,00	100,00	408.884.930,00	81,78	91.115.070,00	18,22
12	Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Tinju	-	200.000.000,00	100,00	158.324.500,00	79,16	41.675.500,00	20,84
13	Pemberian dan Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	-	300.000.000,00	100,00	279.497.500,00	93,17	20.502.500,00	6,83
<b>H</b>	<b>Program Pembinaan Generasi Muda</b>	<b>1.659.190.250,00</b>	<b>1.572.285.249,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.562.033.060,00</b>	<b>99,35</b>	<b>10.252.189,00</b>	<b>0,65</b>
1	Seleksi Paskibraka TK. Nasional dan TK. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	339.960.500,00	326.739.210,00	100,00	326.395.085,00	99,89	344.125,00	0,11
2	Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.319.229.750,00	1.245.546.039,00	100,00	1.235.637.975,00	99,20	9.908.064,00	0,80

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>11.881.959.464,00</b>	<b>8.505.730.909,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.308.997.743,00</b>	<b>97,69</b>	<b>196.733.166,00</b>	<b>2,31</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.638.130.959,00</b>	<b>5.519.940.959,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.468.459.363,00</b>	<b>99,07</b>	<b>45.879.596,00</b>	<b>0,83</b>
a	Gaji dan Tunjangan	3.000.722.959,00	2.832.296.959,00	100,00	2.787.554.863,00	98,42	44.742.096,00	1,58
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.637.408.000,00	2.368.500.000,00	100,00	2.367.362.500,00	99,95	1.137.500,00	0,05
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.243.334.000,00</b>	<b>2.985.789.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.840.538.380,00</b>	<b>95,14</b>	<b>145.251.570,00</b>	<b>4,86</b>
<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.365.768.000,00</b>	<b>1.352.068.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.277.072.765,00</b>	<b>94,45</b>	<b>74.995.235,00</b>	<b>5,55</b>
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.300.000,00	11.100.000,00	100,00	9.531.000,00	85,86	1.569.000,00	14,14
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	120.000.000,00	101.640.000,00	100,00	92.298.597,00	90,81	9.341.403,00	9,19
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.240.000,00	107.240.000,00	100,00	101.640.000,00	94,78	5.600.000,00	5,22
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	23.884.900,00	99,52	115.100,00	0,48
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.750.000,00	13.250.000,00	100,00	6.494.000,00	49,01	6.756.000,00	50,99
6.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	29.120.977,00	58,24	20.879.023,00	41,76
7.	Kegiatan Penyediaan ATK	73.600.000,00	73.600.000,00	100,00	71.994.000,00	97,82	1.606.000,00	2,18
8.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	30.084.600,00	97,05	915.400,00	2,95
9.	Kegiatan Penyediaan bacaan dan Peraturan Perundangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.000.000,00	90,00	1.000.000,00	10,00
10.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	35.027.363,00	87,57	4.972.637,00	12,43
11.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	399.999.100,00	100,00	900,00	0,00
12.	Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	98.943.500,00	98,94	1.056.500,00	1,06
13.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	371.878.000,00	371.878.000,00	100,00	371.800.000,00	99,98	78.000,00	0,02
<b>B. Program Peningkatan sarana dn Prasarana Aparatur</b>		<b>3.152.410.000,00</b>	<b>212.381.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189.901.477,00</b>	<b>89,42</b>	<b>22.479.523,00</b>	<b>10,58</b>
1.	Kegiatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor		17.571.000,00	100,00	16.700.000,00	95,04	871.000,00	0,00
2.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.410.000,00	144.810.000,00	100,00	123.976.477,00	85,61	20.833.523,00	14,39
3.	Peningkatan Gedung Kantor	3.000.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.225.000,00	98,45	775.000,00	1,55
<b>C. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>242.115.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91.075.000,00</b>	<b>88,42</b>	<b>11.925.000,00</b>	<b>11,58</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	176.465.000,00	69.235.000,00	100,00	59.510.000,00	85,95	9.725.000,00	14,05
2.	Penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah	62.650.000,00	33.765.000,00	100,00	31.565.000,00	93,48		

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi</b>	<b>491.878.000,00</b>	<b>426.878.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>421.737.370,00</b>	<b>98,80</b>	<b>5.140.630,00</b>	<b>1,20</b>
	1. Kegiatan Penyusunan Data LKPM	95.598.000,00	70.598.000,00	100,00	68.481.900,00	97,00	2.116.100,00	3,00
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	396.280.000,00	356.280.000,00	100,00	353.255.470,00	99,15	3.024.530,00	0,85
	<b>E. Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah</b>	<b>326.496.000,00</b>	<b>326.496.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>296.716.848,00</b>	<b>90,88</b>	<b>29.779.152,00</b>	<b>9,12</b>
	Pemukhtahiran Data Investasi daerah	326.496.000,00	326.496.000,00	100,00	296.716.848,00	90,88	29.779.152,00	9,12
	<b>F. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>664.667.000,00</b>	<b>564.966.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>564.034.920,00</b>	<b>99,84</b>	<b>932.030,00</b>	<b>0,16</b>
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Prov. Kep. Babel	664.667.000,00	564.966.950,00	100,00	564.034.920,00	99,84	932.030,00	0,16

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>13.598.238.211,85</b>	<b>13.891.223.464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.199.835.292,00</b>	<b>95,02</b>	<b>691.388.172,00</b>	<b>4,98</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.837.517.611,85</b>	<b>5.748.138.864,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.611.855.786,00</b>	<b>97,63</b>	<b>136.283.078,00</b>	<b>2,37</b>
a	Gaji dan Tunjangan	2.962.509.611,85	2.874.210.864,00	100,00	2.842.721.286,00	98,90	31.489.578,00	1,10
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.875.008.000,00	2.873.928.000,00	100,00	2.769.134.500,00	96,35	104.793.500,00	3,65
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.760.720.600,00</b>	<b>8.143.084.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.587.979.506,00</b>	<b>93,18</b>	<b>555.105.094,00</b>	<b>6,82</b>
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran</b>	<b>2.531.528.000,00</b>	<b>2.528.168.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.378.973.475,00</b>	<b>94,10</b>	<b>149.194.525,00</b>	<b>5,90</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	18.765.000,00	83,40	3.735.000,00	16,60
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	122.061.300,00	81,37	27.938.700,00	18,63
3	Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan	128.250.000,00	145.890.000,00	100,00	145.800.000,00	99,94	90.000,00	0,06
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.993.000,00	99,98	7.000,00	0,02
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	63.983.000,00	99,97	17.000,00	0,03
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	62.618.250,00	69,58	27.381.750,00	30,42
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.627.000,00	98,76	373.000,00	1,24
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	-	0,00
9	Penyediaan Makanan dan minuman	33.300.000,00	33.300.000,00	100,00	33.261.000,00	99,88	39.000,00	0,12
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00	269.496.570,00	99,81	503.430,00	0,19
11	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1.258.478.000,00	1.258.478.000,00	100,00	1.238.600.000,00	98,42	19.878.000,00	1,58
12	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	139.970.005,00	99,98	29.995,00	0,02
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	300.000.000,00	279.000.000,00	100,00	209.798.350,00	75,20	69.201.650,00	24,80
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>566.260.000,00</b>	<b>601.333.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>513.515.800,00</b>	<b>85,40</b>	<b>87.817.200,00</b>	<b>14,60</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	346.700.000,00	381.773.000,00	100,00	361.050.000,00	94,57	20.723.000,00	5,43
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	199.560.000,00	199.560.000,00	98,40	132.472.800,00	66,38	67.087.200,00	33,62
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.993.000,00	99,97	7.000,00	0,04



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>86.220.000,00</b>	<b>86.220.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79.477.500,00</b>	<b>92,18</b>	<b>6.742.500,00</b>	<b>7,82</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	86.220.000,00	86.220.000,00	100,00	79.477.500,00	92,18	6.742.500,00	7,82
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>110.090.000,00</b>	<b>110.090.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87.028.500,00</b>	<b>79,05</b>	<b>23.061.500,00</b>	<b>20,95</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.865.000,00	83.865.000,00	100,00	68.146.250,00	81,26	15.718.750,00	18,74
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	26.225.000,00	26.225.000,00	100,00	18.882.250,00	72,00	7.342.750,00	28,00
<b>F</b>	<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>263.644.000,00</b>	<b>263.644.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>215.451.800,00</b>	<b>81,72</b>	<b>48.192.200,00</b>	<b>18,28</b>
1	Pembinaan Perizinan dan Akses Permodalan UMKM	263.644.000,00	263.644.000,00	100,00	215.451.800,00	81,72	48.192.200,00	18,28
<b>G</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi</b>	<b>666.539.000,00</b>	<b>108.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108.699.900,00</b>	<b>99,77</b>	<b>250.100,00</b>	<b>0,23</b>
1	Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM Berprestasi dan Tokoh Koperasi Tingkat Provinsi	557.589.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	108.950.000,00	108.950.000,00	100,00	108.699.900,00	99,77	250.100,00	0,23
<b>H</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</b>	<b>1.071.463.600,00</b>	<b>1.979.703.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.906.501.631,00</b>	<b>96,30</b>	<b>73.201.969,00</b>	<b>3,70</b>
1	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi (rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM)	43.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan	197.473.100,00	197.473.100,00	100,00	189.124.600,00	95,77	8.348.500,00	4,23
3	Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online	24.862.500,00	24.862.500,00	100,00	21.162.500,00	85,12	3.700.000,00	14,88
4	Promosi produk unggulan khas daerah melalui pameran produk kreatif dan inovasi unggulan daerah (PPUD Expo)	806.078.000,00	559.888.000,00	100,00	542.099.800,00	96,82	17.788.200,00	3,18
5	Desiminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal	-	857.300.000,00	100,00	823.518.231,00	96,06	33.781.769,00	3,94
6	Kegiatan Explore Bangka Belitung	-	306.130.000,00	100,00	299.821.500,00	97,94	6.308.500,00	2,06
7	Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran Produk UMKM	-	34.050.000,00	100,00	30.775.000,00	90,38	3.275.000,00	9,62
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM</b>	<b>2.211.341.000,00</b>	<b>2.211.341.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.110.640.700,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100.700.300,00</b>	<b>4,55</b>
1	Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK)	314.012.000,00	314.012.000,00	100,00	268.007.000,00	85,35	46.005.000,00	14,65
2	Pelatihan Business Plan (DAK)	269.968.000,00	269.968.000,00	100,00	261.622.450,00	96,91	8.345.550,00	3,09
3	Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK)	123.614.000,00	123.614.000,00	100,00	120.614.000,00	97,57	3.000.000,00	2,43
4	Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK)	504.256.000,00	504.256.000,00	100,00	490.928.750,00	97,36	13.327.250,00	2,64

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK)	244.828.000,00	244.828.000,00	100,00	237.982.000,00	97,20	6.846.000,00	2,80
6	Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK)	122.742.000,00	122.742.000,00	100,00	120.311.600,00	98,02	2.430.400,00	1,98
7	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	211.341.000,00	211.341.000,00	100,00	195.311.300,00	92,42	16.029.700,00	7,58
8	Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pasca Pelatihan (DAK)	152.612.000,00	152.612.000,00	100,00	149.655.700,00	98,06	2.956.300,00	1,94
9	Pelatihan Achievement Motivation Training (DAK)	267.968.000,00	267.968.000,00	100,00	266.207.900,00	99,34	1.760.100,00	0,66
<b>L</b>	<b>Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah</b>	<b>253.635.000,00</b>	<b>253.635.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>187.690.200,00</b>	<b>74,00</b>	<b>65.944.800,00</b>	<b>26,00</b>
1	Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi)	117.160.000,00	117.160.000,00	100,00	109.920.400,00	93,82	7.239.600,00	6,18
2	Pembuatan Akta Notaris untuk Koperasi	136.475.000,00	136.475.000,00	100,00	77.769.800,00	56,98	58.705.200,00	43,02

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITU

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>13.303.375.458,00</b>	<b>11.759.768.843,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.715.396.710,00</b>	<b>91,12</b>	<b>1.044.372.133,00</b>	<b>8,88</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.141.827.458,00</b>	<b>5.515.485.443,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.409.360.648,00</b>	<b>98,08</b>	<b>106.124.795,00</b>	<b>1,92</b>
a	Gaji dan Tunjangan	3.197.315.458,00	2.762.925.443,00	100,00	2.694.265.148,00	97,51	68.660.295,00	2,49
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.944.512.000,00	2.752.560.000,00	100,00	2.715.095.500,00	98,64	37.464.500,00	1,36
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.161.548.000,00</b>	<b>6.244.283.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.306.036.062,00</b>	<b>84,97</b>	<b>938.247.338,00</b>	<b>15,03</b>
	<b>A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.231.435.000,00</b>	<b>1.277.006.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.170.513.427,00</b>	<b>91,66</b>	<b>106.492.573,00</b>	<b>8,34</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	11.000.000,00	100,00	5.542.850,00	50,39	5.457.150,00	49,61
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	7.640.193,00	48,98	7.959.807,00	51,02
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	127.770.000,00	127.770.000,00	100,00	107.370.000,00	84,03	20.400.000,00	15,97
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00		0,00
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	27.025.000,00	27.025.000,00	100,00	23.920.000,00	88,51	3.105.000,00	11,49
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	60.200.000,00	100,00		0,00
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.980.000,00	32.980.000,00	100,00	21.927.400,00	66,49	11.052.600,00	33,51
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.050.000,00	110.621.000,00	-	86.850.000,00	78,51	23.771.000,00	21,49
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	14.520.000,00	14.520.000,00	100,00	14.090.750,00	97,04	429.250,00	2,96
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	36.075.500,00	60,13	23.924.500,00	39,87
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	298.670.172,00	99,56	1.329.828,00	0,44
	12. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	343.290.000,00	343.290.000,00	100,00	343.200.000,00	99,97	90.000,00	0,03
	13. Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	141.026.562,00	94,02	8.973.438,00	5,98
	<b>B. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>130.620.000,00</b>	<b>128.620.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104.278.650,00</b>	<b>81,07</b>	<b>24.341.350,00</b>	<b>18,93</b>
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	118.620.000,00	128.620.000,00	100,00	104.278.650,00	81,07	24.341.350,00	18,93
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	12.000.000,00	-					
	<b>C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.533.524,00</b>	<b>91,84</b>	<b>3.066.476,00</b>	<b>8,16</b>
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.000.000,00	37.600.000,00	100,00	34.533.524,00	91,84	3.066.476,00	8,16
	<b>D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>230.065.000,00</b>	<b>143.025.000,00</b>		<b>110.875.000,00</b>	<b>77,52</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>22,48</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	172.615.000,00	85.575.000,00		60.525.000,00	70,73	25.050.000,00	29,27
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan PD	57.450.000,00	57.450.000,00		50.350.000,00	87,64	7.100.000,00	12,36
	<b>E. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	<b>56.950.000,00</b>	<b>56.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52.865.000,00</b>	<b>92,83</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>7,17</b>

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Pengembangan Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56.950.000,00	56.950.000,00	100,00	52.865.000,00	92,83	4.085.000,00	7,17
	<b>F. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>	<b>1.635.313.000,00</b>	<b>1.298.419.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>954.477.900,00</b>	<b>73,51</b>	<b>343.941.100,00</b>	<b>26,49</b>
	1. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	75.594.000,00	75.594.000,00		61.630.000,00	81,53	13.964.000,00	18,47
	2. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	139.031.000,00	-		-			
	3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69.281.000,00	69.281.000,00		48.853.500,00	70,52	20.427.500,00	29,48
	4. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesenjangan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media Massa	73.790.000,00	-		-			
	5. Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA	47.878.000,00	-		-			
	6. Peningkatan Nilai-nilai Kejujuran Perempuan Indonesia	281.685.000,00	250.523.000,00		227.913.200,00	90,97	22.609.800,00	9,03
	7. Pameran Hasil Karya Perempuan	179.293.000,00	179.293.000,00	-	139.505.400,00	77,81	39.787.600,00	22,19
	8. Peningkatan Fungsi Pelayanan DWP Prov. Kep. Babel	450.984.000,00	450.984.000,00	100,00	226.871.000,00	50,31	224.113.000,00	49,69
	9. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	203.455.000,00	203.455.000,00	100,00	190.261.800,00	93,52	13.193.200,00	6,48
	10. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup Perempuan	114.322.000,00	69.289.000,00	100,00	59.443.000,00	85,79	9.846.000,00	14,21
	<b>G. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN</b>	<b>1.232.240.000,00</b>	<b>1.113.218.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.027.407.378,00</b>	<b>92,29</b>	<b>85.810.622,00</b>	<b>7,71</b>
	1. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap tindak Kekerasan	93.303.000,00	95.303.000,00	100,00	92.093.400,00	96,63	3.209.600,00	3,37
	2. Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak	59.800.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00		
	3. Pembinaan Partisipasi Hak Anak	214.540.000,00	179.390.000,00	100,00	173.639.000,00	96,79	5.751.000,00	3,21
	4. Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak	74.844.000,00	74.844.000,00	100,00	63.438.858,00	84,76	11.405.142,00	15,24
	5. Sosialisasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak	123.421.000,00	123.421.000,00	100,00	116.536.820,00	94,42	6.884.180,00	5,58
	6. Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	290.312.000,00	254.240.000,00	100,00	245.218.400,00	96,45	9.021.600,00	3,55
	7. Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)	376.020.000,00	376.020.000,00	100,00	326.480.900,00	86,83	49.539.100,00	13,17
	<b>H. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA</b>	<b>710.015.000,00</b>	<b>575.315.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>567.372.000,00</b>	<b>98,62</b>	<b>7.943.000,00</b>	<b>1,38</b>
	1. Pembinaan dan pelayanan keluarga berencana (Fasilitasi KB Muspida)	451.150.000,00	316.450.000,00	100,00	315.269.000,00	99,63	1.181.000,00	0,37
	2. Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga (HARGANAS)	258.865.000,00	258.865.000,00	100,00	252.103.000,00	97,39	6.762.000,00	2,61
	<b>J. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>1.858.910.000,00</b>	<b>1.614.130.400,00</b>		<b>1.283.713.183,00</b>	<b>79,53</b>	<b>330.417.217,00</b>	<b>20,47</b>
	1. Rakor Administrasi Kependudukan	85.830.000,00	72.235.000,00		60.971.030,00	84,41	11.263.970,00	15,59
	2. Pendayagunaan Data Kependudukan	171.080.000,00	71.980.000,00		61.040.321,00	84,80	10.939.679,00	15,20
	3. Pengembangan Bank Data Kependudukan	141.100.000,00	9.015.400,00		9.015.400,00	100,00		0,00
	4. Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Babel	178.140.000,00	178.140.000,00		137.855.800,00	77,39	40.284.200,00	22,61

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (DAK)	332.575.000,00	332.575.000,00		262.580.094,00	78,95	69.994.906,00	21,05
	6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Administrasi Kependudukan (DAK)	378.850.000,00	378.850.000,00		291.773.339,00	77,02	87.076.661,00	22,98
	7. Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-Elektronik di Kab/Kota (DAK)	256.420.000,00	256.420.000,00		202.844.119,00	79,11	53.575.881,00	20,89
	8. Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	314.915.000,00	314.915.000,00		257.633.080,00	81,81	57.281.920,00	18,19



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>26.544.323.100,00</b>	<b>23.631.562.387,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.367.096.298,00</b>	<b>94,65</b>	<b>1.264.466.089,00</b>	<b>5,35</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>15.762.254.200,00</b>	<b>13.788.514.087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.134.542.952,00</b>	<b>95,26</b>	<b>653.971.135,00</b>	<b>4,74</b>
a	Gaji dan Tunjangan	7.855.406.200,00	7.112.040.087,00	100,00	6.768.176.052,00	95,17	343.864.035,00	4,83
b	Tambahan Penghasilan PNS	7.906.848.000,00	6.676.474.000,00	100,00	6.366.366.900,00	95,36	310.107.100,00	4,64
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.782.068.900,00</b>	<b>9.843.048.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.232.553.346,00</b>	<b>93,80</b>	<b>610.494.954,00</b>	<b>6,20</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.247.924.000,00</b>	<b>4.097.674.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.907.818.522,00</b>	<b>95,37</b>	<b>189.855.478,00</b>	<b>4,63</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.500.000	15.500.000	100,00	9.187.050	59,27	6.312.950,00	40,73
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000	168.000.000	100,00	121.474.427	72,31	46.525.573,00	27,69
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	173.070.000	125.820.000	100,00	121.350.000	96,45	4.470.000,00	3,55
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.791.000	44.791.000	100,00	44.759.500	99,93	31.500,00	0,07
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	67.382.000	67.382.000	100,00	67.332.000	99,93	50.000,00	0,07
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	174.400.000	174.400.000	100,00	174.248.500	99,91	151.500,00	0,09
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.250.000	38.250.000	100,00	38.250.000	100,00	-	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	41.941.000	41.941.000	100,00	41.863.000	99,81	78.000,00	0,19
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan	18.000.000	18.000.000	100,00	17.996.500	99,98	3.500,00	0,02
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.740.000	19.740.000	100,00	19.245.000	97,49	495.000,00	2,51
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	500.000.000	500.000.000	100,00	499.999.163	100,00	837,00	0,00
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.775.490.000	1.830.490.000	100,00	1.830.400.000	100,00	90.000,00	0,00
13	Koordinasi, Konsultasi ke dalam Daerah	240.000.000	240.000.000	100,00	239.982.800	99,99	17.200,00	0,01
14	Operasional Perkantoran ( UPTD BLKI )	492.730.000	492.730.000	100,00	384.298.769	77,99	108.431.231,00	22,01
15	Operasional Perkantoran ( UPTD Balai Hyperkes )	163.810.000	163.810.000	100,00	146.786.763	89,61	17.023.237,00	10,39
16	Operasional Perkantoran ( UPTD BPPD )	79.570.000	79.570.000	100,00	79.570.000	100,00	-	-
17	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat	30.000.000	30.000.000	100,00	29.801.550	99,34	198.450,00	0,66
18	Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi	42.125.000	47.250.000	100,00	41.273.500	87,35	5.976.500,00	12,65
19	Pamerah Ketenagakerjaan Dan Ketramigrasian	163.125.000	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.153.366.500,00</b>	<b>1.222.496.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.191.122.775,00</b>	<b>97,43</b>	<b>31.373.725,00</b>	<b>2,57</b>
1	Rehab Gedung Kantor UPTD Hyperkes	343.485.500	343.485.500	100,00	335.075.000	97,55	8.410.500,00	2,45
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	200.000.000	100,00	198.955.775	99,48	1.044.225,00	0,52

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	363.985.000	433.115.000	100,00	428.760.000	98,99	4.355.000,00	1,01
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	245.896.000	245.896.000	100,00	228.332.000	92,86	17.564.000,00	7,14
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>225.315.000,00</b>	<b>218.515.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126.150.000,00</b>	<b>57,73</b>	<b>92.365.000,00</b>	<b>42,27</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.815.000	180.815.000	100,00	89.440.000	49,46	91.375.000,00	50,54
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44.500.000	37.700.000	100,00	36.710.000	97,37	990.000,00	2,63
<b>D</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>179.190.000,00</b>	<b>167.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165.607.400,00</b>	<b>99,14</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>0,86</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	97.390.000	97.390.000	100,00	97.152.600	99,76	237.400,00	0,24
2	Sosialisasi Database Ketenagakerjaan	12.150.000	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	69.650.000	69.650.000	100,00	68.454.800	98,28	1.195.200,00	1,72
<b>E</b>	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek</b>	<b>732.885.500,00</b>	<b>732.885.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>723.630.349,00</b>	<b>98,74</b>	<b>9.255.151,00</b>	<b>1,26</b>
1	Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan	342.775.500	342.775.500	100,00	335.786.001	97,96	6.989.499,00	2,04
2	Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan rapat Pembahasan UMP, Survey KHL dan Sosialisasi Upah Minimum	390.110.000	390.110.000	100,00	387.844.348	99,42	2.265.652,00	0,58
<b>F</b>	<b>Program Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>721.630.000,00</b>	<b>481.265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>409.737.600,00</b>	<b>85,14</b>	<b>71.527.400,00</b>	<b>14,86</b>
1	Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	149.200.000	114.550.000	100,00	114.550.000	100,00	-	-
2	Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan	154.030.000	-	-	-	-	-	-
3	Pemeriksaan Cholinestrase pada Tenaga Kerja Penyemprot Pestisida (UPTD Hyperkes)	84.450.000	84.450.000	100,00	55.823.000	66,10	28.627.000,00	33,90
4	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (UPTD Hyperkes)	83.750.000	68.291.000	100,00	68.291.000	100,00	-	-
5	Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS	170.180.000	170.180.000	100,00	127.279.600	74,79	42.900.400,00	25,21
6	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja Sektor UMKM (UPTD Hyperkes)	80.020.000	43.794.000	100,00	43.794.000	100,00	-	-
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>2.967.912.900,00</b>	<b>2.522.327.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.322.453.350,00</b>	<b>92,08</b>	<b>199.874.550,00</b>	<b>7,92</b>
1	Sertifikasi Tenaga kerja	278.435.000	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Desa Produktif	264.465.000	240.315.000	100,00	216.728.300	90,19	23.586.700,00	9,81
3	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Kab/Kota	2.082.162.900	1.962.162.900	100,00	1.808.954.950	92,19	153.207.950,00	7,81
4	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	342.850.000	319.850.000	100,00	296.770.100	92,78	23.079.900,00	7,22
<b>H</b>	<b>Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>83.357.500,00</b>	<b>77.590.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77.590.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna	83.357.500	77.590.900	100,00	77.590.900	100,00	-	-
I	<b>Program Pembangunan Kawasan transmigrasi</b>	<b>79.020.000</b>	<b>79.020.000</b>	<b>100,00</b>	<b>75.429.950</b>	<b>95,46</b>	<b>3.590.050</b>	<b>4,54</b>
1	Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi	79.020.000	79.020.000	100,00	75.429.950	95,46	3.590.050,00	4,54
J	<b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>391.467.500</b>	<b>244.233.500</b>	<b>100,00</b>	<b>233.012.500</b>	<b>95,41</b>	<b>11.221.000</b>	<b>4,59</b>
1	Peningkatan Kapasitas SDM Kawasan Tranmigrasi	156.245.000	100.000.000	100,00	88.829.000	88,83	11.171.000,00	11,17
2	Gema Hari Bhakti Transmigrasi	89.552.500	0	100,00	-	-	-	-
3	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi	145.670.000	144.233.500	100,00	144.183.500,00	99,97	50.000,00	0,03

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>9.542.289.312,14</b>	<b>9.622.983.712,14</b>	<b>100,00</b>	<b>9.164.107.512,00</b>	<b>95,23</b>	<b>458.876.200,14</b>	<b>4,77</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.480.245.312,14</b>	<b>4.480.245.312,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4.412.034.613,00</b>	<b>98,48</b>	<b>68.210.699,14</b>	<b>1,52</b>
a	Gaji dan Tunjangan	2.281.913.312,14	2.281.913.312,14	100,00	2.242.780.113,00	98,29	39.133.199,14	1,71
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.198.332.000,00	2.198.332.000,00	100,00	2.169.254.500,00	98,68	29.077.500,00	1,32
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.062.044.000,00</b>	<b>5.142.738.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.752.072.899,00</b>	<b>92,40</b>	<b>390.665.501,00</b>	<b>7,60</b>
	<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.209.449.850,00</b>	<b>1.151.968.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.067.486.493,00</b>	<b>92,67</b>	<b>84.481.757,00</b>	<b>7,33</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	14.999.000,00	99,99	1.000,00	0,01
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	66.001.318,00	88,00	8.998.682,00	12,00
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	114.360.000,00	114.360.000,00	100,00	105.640.000,00	92,37	8.720.000,00	7,63
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	19.669.000,00	56,20	15.331.000,00	43,80
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	29.220.000,00	73,05	10.780.000,00	26,95
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	68.600.000,00	56.000.000,00	100,00	55.990.500,00	99,98	9.500,00	0,02
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.999.850,00	90.118.250,00	100,00	68.450.500,00	75,96	21.667.750,00	24,04
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000,00	10.000.000,00	100,00	6.293.000,00	62,93	3.707.000,00	37,07
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.749.000,00	98,75	251.000,00	1,26
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	24.747.000,00	63,45	14.253.000,00	36,55
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	249.811.375,00	99,92	188.625,00	0,08
	12. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	257.490.000,00	257.490.000,00	100,00	257.400.000,00	99,97	90.000,00	0,03
	13. Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.515.800,00	99,68	484.200,00	0,32
	<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>344.280.000,00</b>	<b>474.281.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>402.309.900,00</b>	<b>84,83</b>	<b>71.971.100,00</b>	<b>15,17</b>
	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	27.571.000,00	100,00	26.100.000,00	94,66	1.471.000,00	5,34
	2. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	234.280.000,00	234.280.000,00	100,00	181.299.900,00	77,39	52.980.100,00	22,61
	3. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Pengadaan Kendaraan Operasional	0,00	212.430.000,00	100,00	194.910.000,00	91,75	17.520.000,00	8,25
	<b>C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63.132.701,00</b>	<b>69,38</b>	<b>27.867.299,00</b>	<b>30,62</b>
	1. Peningkatan dan Pelatihan Formal	91.000.000,00	91.000.000,00	100,00	63.132.701,00	69,38	27.867.299,00	30,62
	<b>D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>188.265.000,00</b>	<b>161.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107.429.250,00</b>	<b>66,60</b>	<b>53.870.750,00</b>	<b>33,40</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.665.000,00	103.300.000,00	100,00	58.615.000,00	56,74	44.685.000,00	43,26
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	45.600.000,00	58.000.000,00	100,00	48.814.250,00	84,16	9.185.750,00	15,84
	<b>E. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	<b>3.229.049.150,00</b>	<b>3.264.189.150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.111.714.555,00</b>	<b>95,33</b>	<b>152.474.595,00</b>	<b>4,67</b>
	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	241.510.000,00	291.510.000,00	100,00	288.009.500,00	98,80	3.500.500,00	1,20
	2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	206.272.500,00	206.272.500,00	100,00	204.418.400,00	99,10	1.854.100,00	0,90
	3. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	69.385.000,00	69.385.000,00	100,00	50.066.000,00	72,16	19.319.000,00	27,84
	4. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	128.160.000,00	117.040.000,00	100,00	115.640.700,00	98,80	1.399.300,00	1,20
	5. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	365.615.000,00	309.115.000,00	100,00	285.388.800,00	92,32	23.726.200,00	7,68

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	595.150.000,00	543.730.000,00	100,00	525.184.700,00	96,59	18.545.300,00	3,41
	7. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	119.315.000,00	87.835.000,00	100,00	87.154.900,00	99,23	680.100,00	0,77
	8. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	126.160.000,00	126.160.000,00	100,00	118.137.600,00	93,64	8.022.400,00	6,36
	9. Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	111.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman	146.950.000,00	146.950.000,00	100,00	139.138.200,00	94,68	7.811.800,00	5,32
	11. Peningkatan Fungsi Pelayanan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)	179.340.000,00	179.340.000,00	100,00	172.517.075,00	96,20	6.822.925,00	3,80
	12. Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan	74.100.000,00	71.700.000,00	100,00	66.548.980,00	92,82	5.151.020,00	7,18
	13. Pengkajian Makanan Tradisional	50.148.500,00	47.223.500,00	100,00	45.788.100,00	96,96	1.435.400,00	3,04
	14. Pengembangan Pangan Lokal	289.000.000,00	100.000.000,00	100,00	96.428.400,00	96,43	3.571.600,00	3,57
	15. Promosi Pangan Lokal	171.557.500,00	171.557.500,00	100,00	156.500.300,00	91,22	15.057.200,00	8,78
	16. Penyusunan Database Ketahanan Pangan	79.545.650,00	79.545.650,00	100,00	71.746.000,00	90,19	7.799.650,00	9,81
	17. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani	90.900.000,00	90.900.000,00	100,00	90.340.000,00	99,38	560.000,00	0,62
	18. Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan	98.625.000,00	89.825.000,00	100,00	88.250.000,00	98,25	1.575.000,00	1,75
	19. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	86.100.000,00	86.100.000,00	100,00	85.487.000,00	99,29	613.000,00	0,71
	20. Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,00	450.000.000,00	100,00	424.969.900,00	94,44	25.030.100,00	5,56



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>36.953.849.754,00</b>	<b>31.200.055.852,26</b>	<b>100,00</b>	<b>29.042.908.348,77</b>	<b>93,09</b>	<b>2.157.147.503,49</b>	<b>6,91</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.533.360.754,00</b>	<b>6.213.740.489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.860.604.878,00</b>	<b>94,32</b>	<b>353.135.611,00</b>	<b>5,68</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>30.420.489.000,00</b>	<b>24.986.315.363,26</b>	<b>100,00</b>	<b>23.182.303.470,77</b>	<b>92,78</b>	<b>1.804.011.892,49</b>	<b>7,22</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.133.380.000,00</b>	<b>2.286.380.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.861.505.414,00</b>	<b>81,42</b>	<b>424.874.586,00</b>	<b>18,58</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	6.487.150,00	98,29	112.850,00	1,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	624.000.000,00	624.000.000,00	100,00	328.499.053,00	52,64	295.500.947,00	47,36
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	179.490.000,00	179.490.000,00	100,00	174.690.000,00	97,33	4.800.000,00	2,67
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	17.156.500,00	95,31	843.500,00	4,69
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	63.000.000,00	66.000.000,00	100,00	63.769.000,00	96,62	2.231.000,00	3,38
6	Penyediaan Alat Tulis kantor	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00	58.033.500,00	63,63	33.166.500,00	36,37
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.790.000,00	62.790.000,00	100,00	50.620.500,00	80,62	12.169.500,00	19,38
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	65.150.000,00	65.150.000,00	100,00	35.161.000,00	53,97	29.989.000,00	46,03
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	8.400.000,00	56,00	6.600.000,00	44,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.660.000,00	12.660.000,00	100,00	10.402.000,00	82,16	2.258.000,00	17,84
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	59.562.550,00	62,70	35.437.450,00	37,30
12	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	350.000.000,00	450.000.000,00	100,00	448.399.013,00	99,64	1.600.987,00	0,36
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi	400.490.000,00	400.490.000,00	100,00	400.400.000,00	99,98	90.000,00	0,02
14	Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	200.000.000,00	100,00	199.925.148,00	99,96	74.852,00	0,04
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>261.020.000,00</b>	<b>578.091.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>499.209.800,00</b>	<b>86,35</b>	<b>78.881.200,00</b>	<b>13,65</b>
1	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	-	27.071.000,00	100,00	20.131.500,00	74,37	6.939.500,00	25,63
2	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	261.020.000,00	261.020.000,00	100,00	189.658.300,00	72,66	71.361.700,00	27,34
3	Pengadaan Partisi Gedung Kantor	-	190.000.000,00	100,00	189.620.000,00	99,80	380.000,00	0,20
4	Pemeliharaan Gedung Kantor	-	100.000.000,00	100,00	99.800.000,00	99,80	200.000,00	0,20
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>34.100.000,00</b>	<b>34.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.019.000,00</b>	<b>99,76</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,24</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	34.100.000,00	34.100.000,00	100,00	34.019.000,00	99,76	81.000,00	0,24
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.308.709.000,00</b>	<b>1.308.709.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>920.460.227,00</b>	<b>70,33</b>	<b>388.248.773,00</b>	<b>29,67</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	46.526.233,00	84,59	8.473.767,00	15,41
2	Pengembangan Sumber Daya manusia Pemubungaran melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	1.253.709.000,00	1.253.709.000,00	100,00	873.933.994,00	69,71	379.775.006,00	30,29

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>258.665.000,00</b>	<b>258.665.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>187.381.040,00</b>	<b>72,44</b>	<b>71.283.960,00</b>	<b>27,56</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	191.215.000,00	191.215.000,00	100,00	134.353.890,00	70,26	56.861.110,00	29,74
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	67.450.000,00	100,00	53.027.150,00	78,62	14.422.850,00	21,38
<b>F</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>2.526.900.000,00</b>	<b>1.821.767.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.661.485.716,00</b>	<b>91,20</b>	<b>160.281.284,00</b>	<b>8,80</b>
1	Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	10.600.000,00	85,48	1.800.000,00	14,52
2	Pengumpulan dan Analis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	43.731.467,00	87,46	6.268.533,00	12,54
3	Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	724.250.000,00	673.327.000,00	100,00	671.248.600,00	99,69	2.078.400,00	0,31
4	Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi	283.050.000,00	267.420.000,00	100,00	261.316.200,00	97,72	6.103.800,00	2,28
5	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung	322.690.000,00	322.690.000,00	100,00	249.487.200,00	77,31	73.202.800,00	22,69
6	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung Timur	322.690.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar di Kabupaten Bangka Selatan	315.890.000,00	-	-	-	-	-	-
8	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan	315.890.000,00	315.890.000,00	100,00	287.248.000,00	90,93	28.642.000,00	9,07
9	Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	180.040.000,00	180.040.000,00	100,00	137.854.249,00	76,57	42.185.751,00	23,43
<b>G</b>	<b>Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>362.270.000,00</b>	<b>547.270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>387.283.246,00</b>	<b>70,77</b>	<b>159.986.754,00</b>	<b>29,23</b>
1	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transporatasi	148.000.000,00	333.000.000,00	100,00	186.924.190,00	56,13	146.075.810,00	43,87
2	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	214.270.000,00	214.270.000,00	100,00	200.359.056,00	93,51	13.910.944,00	6,49
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>418.145.000,00</b>	<b>367.995.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>336.678.400,00</b>	<b>91,49</b>	<b>31.316.600,00</b>	<b>8,51</b>
1	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	99.700.000,00	99.700.000,00	100,00	98.898.800,00	99,20	801.200,00	0,80
2	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudir Awak Kendaraan Angkutan Umum	61.425.000,00	61.425.000,00	100,00	57.592.000,00	93,76	3.833.000,00	6,24
3	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	78.500.000,00	78.500.000,00	100,00	69.930.000,00	89,08	8.570.000,00	10,92
4	Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	50.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan	73.300.000,00	73.300.000,00	100,00	60.835.600,00	83,00	12.464.400,00	17,00
6	Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhan	55.070.000,00	55.070.000,00	100,00	49.422.000,00	89,74	5.648.000,00	10,26
<b>I</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>23.117.300.000,00</b>	<b>17.783.338.363,26</b>	<b>100,00</b>	<b>17.294.280.627,77</b>	<b>97,25</b>	<b>489.057.735,49</b>	<b>2,75</b>
1	Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir	14.782.850.000,00	12.804.138.064,00	100,00	12.329.433.477,77	96,29	474.704.586,23	3,71
2	Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.A.S. Hanandjoeddin	5.809.450.000,00	4.968.633.349,26	100,00	4.954.280.200,00	99,71	14.353.149,26	0,29
3	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough	2.525.000.000,00	10.566.950,00	100,00	10.566.950,00	100,00	-	0,00

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>16.108.519.057,00</b>	<b>16.347.867.857,00</b>	<b>98,65</b>	<b>14.516.115.275,00</b>	<b>88,80</b>	<b>1.831.752.582,00</b>	<b>11,20</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.579.362.257,00</b>	<b>6.637.155.057,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.669.387.974,00</b>	<b>85,42</b>	<b>967.767.083,00</b>	<b>14,58</b>
a	Gaji dan Tunjangan	3.056.658.257,00	3.224.875.057,00	100,00	2.944.284.974,00	91,30	280.590.083,00	8,70
b	Tambahan Penghasilan PNS	3.522.704.000,00	3.412.280.000,00	100,00	2.725.103.000,00	79,86	687.177.000,00	20,14
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.529.156.800,00</b>	<b>9.710.712.800,00</b>	<b>97,31</b>	<b>8.846.727.301,00</b>	<b>91,10</b>	<b>863.985.499,00</b>	<b>8,90</b>
<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>3.797.685.000,00</b>	<b>3.909.031.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.772.094.695,00</b>	<b>96,50</b>	<b>136.936.305,00</b>	<b>3,50</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.775.000,00	9.775.000,00	100,00	8.477.200,00	86,72	1.297.800,00	13,28
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.875.998.550,00	99,26	14.001.450,00	0,74
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	373.350.000,00	373.350.000,00	100,00	311.879.438,00	83,54	61.470.562,00	16,46
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	131.340.000,00	131.340.000,00	100,00	126.450.000,00	96,28	4.890.000,00	3,72
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	17.894.500,00	99,41	105.500,00	0,59
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.100.000,00	67,33	4.900.000,00	32,67
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.800.000,00	93.800.000,00	100,00	93.735.000,00	99,93	65.000,00	0,07
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	26.780.000,00	89,27	3.220.000,00	10,73
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	394.530.000,00	505.876.000,00	100,00	461.675.885,00	91,26	44.200.115,00	8,74
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	39.960.000,00	99,90	40.000,00	0,10
12.	Penyediaan Bahan logistik Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	10.777.000,00	97,97	223.000,00	2,03
13.	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	44.000.000,00	100,00	0,00	0,00
14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	199.912.709,00	99,96	87.291,00	0,04
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	371.890.000,00	371.890.000,00	100,00	371.890.000,00	100,00	0,00	0,00
16.	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	147.564.413,00	98,38	2.435.587,00	1,62
<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>237.000.000,00</b>	<b>237.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>233.854.000,00</b>	<b>98,67</b>	<b>3.146.000,00</b>	<b>1,33</b>
17.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	187.000.000,00	187.000.000,00	100,00	183.900.000,00	98,34	3.100.000,00	1,66
18.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.954.000,00	99,91	46.000,00	0,09
<b>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	11.600.000,00	100,00	0,00	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa</b>	<b>4.576.271.800,00</b>	<b>4.553.356.800,00</b>	<b>90,36</b>	<b>3.873.205.665,00</b>	<b>85,06</b>	<b>680.151.135,00</b>	<b>14,94</b>
	20. Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot	335.710.000,00	215.710.000,00	100,00	194.817.335,00	90,31	20.892.665,00	9,69
	21. Pengelolaan dan Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP)	145.088.000,00	145.088.000,00	100,00	111.399.202,00	76,78	33.688.798,00	23,22
	22. Pengelolaan dan Operasional Media Center Provinsi Kep.Bangka Belitung	179.220.000,00	169.220.000,00	95,00	126.915.864,00	75,00	42.304.136,00	25,00
	23. Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio	496.945.000,00	496.945.000,00	95,00	471.809.027,00	94,94	25.135.973,00	5,06
	24. Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Prov.Kep.Babel	94.050.000,00	94.050.000,00	90,00	84.154.740,00	89,48	9.895.260,00	10,52
	25. Penguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD	387.070.000,00	346.870.000,00	100,00	304.275.728,00	87,72	42.594.272,00	12,28
	26. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kep. Babel melalui TVRI	498.058.800,00	498.058.800,00	100,00	490.270.552,00	98,44	7.788.248,00	1,56
	27. Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	580.730.000,00	580.730.000,00	90,00	556.551.273,00	95,84	24.178.727,00	4,16
	28. Seleksi Anggota Komisi Inormasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	93.600.000,00	84.600.000,00	100,00	84.279.962,00	99,62	320.038,00	0,38
	29. Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	185.720.000,00	504.720.000,00	100,00	477.068.595,00	94,52	27.651.405,00	5,48
	30. Pembangunan dan Pengembangan Portal Prov. Kep. Bangka Belitung	81.500.000,00	81.500.000,00	100,00	70.211.000,00	86,15	11.289.000,00	13,85
	31. Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)	444.830.000,00	214.930.000,00	100,00	197.110.960,00	91,71	17.819.040,00	8,29
	32. Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Prov. Kep. Bangka Belitung	1.053.750.000,00	718.750.000,00	95,00	704.341.427,00	98,00	14.408.573,00	2,00
	33. Implementasi Aplikasi Smart Citizen	0,00	402.185.000,00	0,00	0,00	0,00	402.185.000,00	100,00
	<b>E. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>484.870.000,00</b>	<b>119.459.845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.086.889,00</b>	<b>73,74</b>	<b>31.372.956,00</b>	<b>26,26</b>
	34. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan	49.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35. Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK	91.225.000,00	51.225.000,00	100,00	49.123.540,00	95,90	2.101.460,00	4,10
	36. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	183.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37. Penilaian Jabatan Fungsional Komputer	113.920.000,00	59.570.000,00	100,00	30.298.504,00	50,86	29.271.496,00	49,14
	38. Jabatan penilaian Jabatan Pranata Humas	47.200.000,00	8.664.845,00	100,00	8.664.845,00	100,00	0,00	0,00
	<b>F. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>421.730.000,00</b>	<b>880.265.155,00</b>	<b>93,50</b>	<b>867.886.052,00</b>	<b>98,59</b>	<b>12.379.103,00</b>	<b>1,41</b>
	39. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	218.050.000,00	183.050.000,00	95,00	181.885.757,00	99,36	1.164.243,00	0,64
	40. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik	203.680.000,00	697.215.155,00	92,00	686.000.295,00	98,39	11.214.860,00	1,61

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>10.833.245.039,97</b>	<b>9.607.086.027,11</b>	<b>99,53</b>	<b>8.875.643.329,00</b>	<b>92,39</b>	<b>731.442.698,11</b>	<b>7,61</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.475.416.309,97</b>	<b>5.036.794.397,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4.676.962.116,00</b>	<b>92,86</b>	<b>359.832.281,11</b>	<b>4,28</b>
a	Gaji dan Tunjangan	3.098.168.309,97	2.594.446.397,11	100,00	2.339.189.116,00	90,16	255.257.281,11	9,84
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.377.248.000,00	2.442.348.000,00	100,00	2.337.773.000,00	95,72	104.575.000,00	4,28
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.357.828.730,00</b>	<b>4.570.291.630,00</b>	<b>99,06</b>	<b>4.198.681.213,00</b>	<b>91,87</b>	<b>371.610.417,00</b>	<b>8,85</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.362.980.080,00</b>	<b>1.393.640.080,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.299.681.510,00</b>	<b>93,26</b>	<b>93.958.570,00</b>	<b>6,74</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	8.153.940,00	65,23	4.346.060,00	34,77
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	145.000.080,00	151.600.080,00	100,00	148.128.194,00	97,71	3.471.886,00	2,29
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	82.610.000,00	124.470.000,00	100,00	110.260.000,00	88,58	14.210.000,00	11,42
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	37.195.000,00	82,66	7.805.000,00	17,34
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	37.400.000,00	26.400.000,00	100,00	18.690.000,00	70,80	7.710.000,00	29,20
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.800.000,00	65.800.000,00	100,00	63.048.500,00	95,82	2.751.500,00	4,18
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	47.721.100,00	95,44	2.278.900,00	4,56
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	18.200.000,00	100,00	7.375.000,00	40,52	10.825.000,00	59,48
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	43.480.000,00	43.480.000,00	100,00	29.304.000,00	67,40	14.176.000,00	32,60
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.417.000,00	97,09	583.000,00	2,92
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	42.900.000,00	42.900.000,00	100,00	33.875.000,00	78,96	9.025.000,00	21,04
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	284.069.376,00	94,69	15.930.624,00	5,31
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	343.290.000,00	343.290.000,00	100,00	343.290.000,00	100,00	-	-
14	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.154.400,00	99,44	845.600,00	0,56
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>333.080.000,00</b>	<b>201.391.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>148.439.006,00</b>	<b>73,71</b>	<b>52.951.994,00</b>	<b>26,29</b>
1	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	17571000,00	100,00	16.100.000	91,63	1.471.000	8,37
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	145.080.000,00	125.820.000,00	100,00	88.209.006,00	70,11	37.610.994,00	29,89
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	34.000.000,00	29.000.000,00	100,00	18.965.000,00	65,40	10.035.000,00	34,60
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	34.000.000,00	29.000.000,00	100,00	25.165.000,00	86,78	3.835.000,00	13,22
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>78.600.000,00</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47.270.700,00</b>	<b>88,19</b>	<b>6.329.300,00</b>	<b>11,81</b>
1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol	78.600.000,00	53.600.000,00	100,00	47.270.700,00	88,19	6.329.300,00	11,81



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>177.220.100,00</b>	<b>204.020.100,00</b>	<b>97,67</b>	<b>190.960.300,00</b>	<b>93,60</b>	<b>13.059.800,00</b>	<b>6,84</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	26.800.000,00	100,00	26.156.200,00	97,60	643.800,00	2,40
2	Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Se Provinsi	80.318.000,00	80.318.000,00	93,00	71.544.700,00	89,08	8.773.300,00	10,92
3	Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kepulauan Bangka Belitung	96.902.100,00	96.902.100,00	100,00	93.259.400,00	96,24	3.642.700,00	3,76
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>182.060.000,00</b>	<b>174.560.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>134.598.600,00</b>	<b>77,19</b>	<b>39.961.400,00</b>	<b>29,69</b>
1	Pemantauan Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah	96.605.000,00	96.605.000,00	100,00	73.795.400,00	76,39	22.809.600,00	23,61
2	Pengumpulan Data Dan Verifikasi Orang Asing Dan Lembaga Asing Di Prov. Kep. Babel	85.455.000,00	77.955.000,00	100,00	60.803.200,00	78,00	17.151.800,00	22,00
<b>F</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>561.909.500,00</b>	<b>551.909.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>510.917.409,00</b>	<b>92,09</b>	<b>40.992.091,00</b>	<b>7,43</b>
1	Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol	263.649.500,00	253.649.500,00	100,00	218.600.100,00	86,18	35.049.400,00	13,82
2	Penguatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	298.260.000,00	298.260.000,00	100,00	292.317.309,00	98,01	5.942.691,00	1,99
<b>G</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>961.085.450,00</b>	<b>715.215.000,00</b>	<b>98,33</b>	<b>688.159.800,00</b>	<b>95,87</b>	<b>27.055.200,00</b>	<b>3,78</b>
1	Workshop Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	256.395.000,00	214.660.000,00	95,00	191.348.300,00	89,14	23.311.700,00	10,86
2	Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasna Kebangsaan Prov.Kep Bangka Belitung	258.225.000,00	241.325.000,00	100,00	238.067.450,00	98,65	3.257.550,00	1,35
3	Sosialisasi Peningkatan Peningkatan Bela Negara	38.300.450,00	-	-	-	-	-	-
4	Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan	274.230.000,00	259.230.000,00	100,00	258.744.050,00	99,81	485.950,00	0,19
5	Pelatihan Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan	133.935.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>180.818.000,00</b>	<b>154.118.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150.109.900,00</b>	<b>97,40</b>	<b>4.008.100,00</b>	<b>2,60</b>
1	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (Fpk) Se-Prov.Kep.Bangka Belitung	180.818.000,00	154.118.000,00	100,00	150.109.900,00	97,40	4.008.100,00	2,60
<b>I</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</b>	<b>365.352.500,00</b>	<b>131.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>127.307.500,00</b>	<b>97,16</b>	<b>3.722.500,00</b>	<b>2,84</b>
1	Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Dan Ancaman	66.912.500,00	-	-	-	-	-	-
2	Simulasi Penanganan Konflik	146.030.000,00	131.030.000,00	100,00	127.307.500,00	97,16	3.722.500,00	2,84
3	Sosialisasi Radikalisme Terorisme Di 7 ( Tujuh) Kabupaten/Kota	152.410.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>J</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>175.864.950,00</b>	<b>168.364.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.075.100,00</b>	<b>84,39</b>	<b>26.289.850,00</b>	<b>15,61</b>
1	Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	175.864.950,00	168.364.950,00	100,00	142.075.100,00	84,39	26.289.850,00	15,61
<b>K</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>384.820.000,00</b>	<b>353.731.000,00</b>	<b>99,33</b>	<b>339.139.900,00</b>	<b>95,88</b>	<b>14.591.100,00</b>	<b>4,12</b>
1	Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	38.212.200,00	97,98	787.800,00	2,02
2	Monitoring Dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Di Daerah	121.735.000,00	121.735.000,00	100,00	116.251.600,00	95,50	5.483.400,00	4,50
3	Workshop Pendidikan Etika Dan Budaya Politik Bagi Pelajar Slta	224.085.000,00	192.996.000,00	98,00	184.676.100,00	95,69	8.319.900,00	4,31

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>L</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan Dan Sosial Budaya</b>	<b>174.182.000,00</b>	<b>146.182.000,00</b>	<b>91,50</b>	<b>132.178.238,00</b>	<b>90,42</b>	<b>14.003.762,00</b>	<b>9,58</b>
1	Peningkatan Fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	108.180.000,00	88.180.000,00	100,00	81.279.038,00	92,17	6.900.962,00	7,83
2	Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas Dan Ketersediaan Sembako Didaerah	66.002.000,00	58.002.000,00	83,00	50.899.200,00	87,75	7.102.800,00	12,25
<b>M</b>	<b>Program Kemitraan Kamtibnas</b>	<b>252.106.150,00</b>	<b>177.130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>149.303.150,00</b>	<b>84,29</b>	<b>27.826.850,00</b>	<b>15,71</b>
1	Pemetaan Daerah Rawan Konflik	160.810.000,00	130.810.000,00	100,00	118.778.000,00	90,80	12.032.000,00	9,20
2	Sebelumnya Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Menjadi Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm)	91.296.150,00	46.320.000,00	100,00	30.525.150,00	65,90	15.794.850,00	34,10
<b>N</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi</b>	<b>167.750.000,00</b>	<b>145.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138.540.100,00</b>	<b>95,28</b>	<b>6.859.900,00</b>	<b>4,72</b>
	Peningkatan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia	167.750.000,00	145.400.000	100,00	138.540.100,00	95,28	6.859.900,00	4,72

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>23.305.896.014,00</b>	<b>21.560.297.604,00</b>		<b>20.317.929.959,00</b>	<b>94,24</b>	<b>1.242.367.645,00</b>	<b>5,76</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>10.010.062.054,00</b>	<b>9.545.424.054,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.081.598.378,00</b>	<b>95,14</b>	<b>463.825.676,00</b>	<b>4,86</b>
a	Gaji dan Tunjangan	4.645.390.054,00	4.404.852.054	100,00	4.279.721.878,00	97,16	125.130.176,00	2,84
b	Tambahan Penghasilan PNS	5.364.672.000,00	5.140.572.000	100,00	4.801.876.500,00	93,41	338.695.500,00	6,59
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>13.295.833.960,00</b>	<b>12.014.873.550,00</b>		<b>11.236.331.581,00</b>	<b>93,52</b>	<b>778.541.969,00</b>	<b>6,48</b>
	<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5.755.540.650,00</b>	<b>4.646.133.650,00</b>	<b>90,91</b>	<b>4.542.335.509,00</b>	<b>97,77</b>	<b>103.798.141,00</b>	<b>2,23</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.850.000,00	5.850.000,00	83,33	3.913.500,00	66,90	1.936.500,00	33,10
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	10.374.833,00	82,34	2.225.167,00	17,66
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	152.730.000,00	152.730.000,00	100,00	152.730.000,00	100,00	0,00	-
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.710.200,00	11.710.200,00	100,00	11.702.000,00	99,93	8.200,00	0,07
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	104.428.500,00	104.428.500,00	100,00	98.525.400,00	94,35	5.903.100,00	5,65
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.999.950,00	27.999.950,00	100,00	20.035.000,00	71,55	7.964.950,00	28,45
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	58,33	6.318.000,00	63,18	3.682.000,00	36,82
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.892.000,00	219.605.000,00	97,92	207.623.602,00	94,54	11.981.398,00	5,46
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.960.000,00	26.960.000,00	87,47	22.764.500,00	84,44	4.195.500,00	15,56
	10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.280.000,00	20.160.000,00	66,67	18.225.000,00	90,40	1.935.000,00	9,60
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	48.000.000,00	38.000.000,00	70,00	11.899.000,00	31,31	26.101.000,00	68,69
	12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	230.609.237,00	92,24	19.390.763,00	7,76
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.584.090.000,00	3.432.090.000,00	100,00	3.427.690.000,00	99,87	4.400.000,00	0,13
	14. Koordinasi Bidang Tibumtranmas, dan Penegakkan Perda	184.000.000,00	184.000.000,00	100,00	177.276.200,00	96,35	6.723.800,00	3,65
	15. Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	142.649.237,00	95,10	7.350.763,00	4,90
	<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>567.760.000,00</b>	<b>1.016.182.750</b>	<b>98,12</b>	<b>922.680.050,00</b>	<b>90,80</b>	<b>93.502.700,00</b>	<b>9,20</b>
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	425.780.000,00	100,00	409.090.000,00	96,08	16.690.000,00	3,92
	2. Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	148.642.750,00	100,00	147.342.750,00	99,13	1.300.000	0,87
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	21.838.000,00	69,33	9.662.000	30,67
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	366.260.000,00	390.260.000,00	90,60	324.532.800,00	83,16	65.727.200	16,84

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.876.500,00	99,38	123.500	0,62
	<b>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>242.374.950,00</b>	<b>241.852.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>224.772.000,00</b>	<b>92,94</b>	<b>17.080.950,00</b>	<b>7,06</b>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.700.000,00	50.178.000,00	100,00	50.178.000,00	100,00	0,00	-
	2. Razia Kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung	169.379.950,00	169.379.950,00	100,00	155.509.000,00	91,81	13.870.950,00	8,19
	3. Pemberdayaan Peran dan Tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Kep. Babel	22.295.000,00	22.295.000,00	100,00	19.085.000,00	85,60	3.210.000	14,40
	<b>D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.527.196.800,00</b>	<b>1.300.997.800,00</b>	<b>99,80</b>	<b>1.215.159.998,00</b>	<b>93,40</b>	<b>85.837.802,00</b>	<b>6,60</b>
	1. Bimtek Penyuluhan Bagi Satpol PP se Kabupaten/Kota se Provinsi Kep. Bangka Belitung	72.952.000,00	72.952.000,00	100,00	61.841.800,00	84,77	11.110.200	15,23
	2. Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan PPNS Peningkatan Kompetensi Aparatur	238.410.000,00	238.410.000,00	116,00	216.462.398,00	90,79	21.947.602	9,21
	3. Instruktur Upacara dan Kesemestaan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	115.100.000,00	115.100.000,00	90,91	111.800.000,00	97,13	3.300.000	2,87
	4. Bimtek PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep. Babel	69.802.000,00	69.802.000,00	100,00	59.298.500,00	84,95	10.503.500	15,05
	5. LATSAR Pol PP	507.206.000,00	439.392.000,00	100,00	432.470.000,00	98,42	6.922.000	1,58
	6. Pelatihan Rutin Kemampuan Bela Diri dan Senam Anggota Satpol PP	166.939.900,00	166.939.900,00	91,67	157.278.500,00	94,21	9.661.400	5,79
	7. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP Provinsi, Kabupaten/Kota	356.786.900,00	198.401.900,00	100,00	176.008.800,00	88,71	22.393.100	11,29
	<b>E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>326.371.000,00</b>	<b>290.733.600</b>	<b>100,00</b>	<b>195.931.150,00</b>	<b>67,39</b>	<b>94.802.450,00</b>	<b>32,61</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.615.000,00	145.265.000	100,00	91.965.750,00	63,31	53.299.250	36,69
	2. Rapat Koordinasi Satpol PP se-Provinsi Kep. Babel dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	91.306.000,00	78.018.600	100,00	73.488.400,00	94,19	4.530.200	5,81
	3. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	67.450.000	100,00	30.477.000,00	45,18	36.973.000	54,82
	<b>F. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>2.757.180.800,00</b>	<b>2.709.282.800</b>	<b>94,34</b>	<b>2.340.367.003,00</b>	<b>86,38</b>	<b>368.915.797</b>	<b>13,62</b>
	1. Tim Pemantauan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017	46.350.000,00	41.140.000,00	100,00	40.340.000,00	98,06	800.000	1,94
	2. Pengamanan/Pengawasan Pimpinan Daerah Serta Orang-orang Penting	265.540.000,00	265.540.000,00	80,30	202.397.179,00	76,22	63.142.821	23,78
	3. Penertiban Terhadap Pelanggaran Perda yang Berdampak Terhadap Peningkatan PAD	120.150.000,00	120.150.000,00	100,00	116.091.100,00	96,62	4.058.900	3,38
	4. Penyelidikan , Penyidikan dan Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda di Prov. Kep. Babel	190.182.600,00	190.182.600,00	86,67	138.908.724,00	73,04	51.273.876	26,96
	5. Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kep. Babel	59.664.000,00	52.914.000,00	88,89	41.250.000,00	77,96	11.664.000	22,04
	6. Patroli	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	56.150.000,00	93,58	3.850.000	6,42
	7. Pengamanan Unjuk Rasa	136.584.750,00	136.584.750,00	87,50	98.271.250,00	71,95	38.313.500	28,05
	8. Pengamanan Aset Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	1.662.799.950,00	1.631.911.950,00	100,00	1.442.036.750,00	88,36	189.875.200	11,64
	9. Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan, Penertiban Satpol PP ke Kab/Kota	37.699.500,00	37.699.500,00	100,00	33.440.000,00	88,70	4.259.500	11,30
	10. Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	178.210.000,00	173.160.000,00	100,00	171.482.000,00	99,03	1.678.000	0,97

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>G. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>372.672.000,00</b>	<b>349.662.000</b>	<b>100,00</b>	<b>347.468.871,00</b>	<b>99,37</b>	<b>2.193.129</b>	<b>0,63</b>
	1. Bimtek Pemberdayaan Satuan Linmas dalam Menunjang Terwujudnya Trantib Swakarsa	158.130.000,00	146.970.000,00	100,00	145.532.250,00	99,02	1.437.750	0,98
	2. Pelatihan Penanggulangan Banjir bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Bangka Belitung	107.451.000,00	103.651.000,00	100,00	103.453.621,00	99,81	197.379	0,19
	3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Bagi Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	107.091.000,00	99.041.000,00	100,00	98.483.000,00	99,44	558.000	0,56
	<b>H. Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	<b>1.746.737.760,00</b>	<b>1.460.028.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.447.617.000,00</b>	<b>99,15</b>	<b>12.411.000</b>	<b>0,85</b>
	1. Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	1.746.737.760,00	1.460.028.000,00	100,00	1.447.617.000,00	99,15	12.411.000	0,85



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>27.539.122.889,55</b>	<b>26.311.793.418,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.808.334.607,00</b>	<b>98,09</b>	<b>503.458.811,00</b>	<b>1,91</b>
<b>I BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		6.869.770.039,55	5.440.309.318,00	100,00	5.401.989.970,00	99,30	38.319.348,00	0,70
a	Gaji dan Tunjangan	3.746.986.039,55	2.832.707.818,00	100,00	2.813.855.970,00	99,33	18.851.848,00	0,67
b	Tambahan Penghasilan PNS	3.122.784.000,00	2.607.601.500,00	100,00	2.588.134.000,00	99,25	19.467.500,00	0,75
<b>II BELANJA LANGSUNG</b>		<b>20.669.352.850,00</b>	<b>20.871.484.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.406.344.637,00</b>	<b>97,77</b>	<b>465.139.463,00</b>	<b>2,23</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.902.492.000,00</b>	<b>1.857.492.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.812.963.147,00</b>	<b>97,60</b>	<b>44.528.853,00</b>	<b>2,40</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	26.529.615,00	88,43	3.470.385,00	11,57
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.400.000,00	95.400.000,00	100,00	73.616.522,00	77,17	21.783.478,00	22,83
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	129.510.000,00	114.510.000,00	100,00	114.510.000,00	100,00	-	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43.992.000,00	43.992.000,00	100,00	43.992.000,00	100,00	-	-
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.850.000,00	99,25	150.000,00	0,75
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.500.000,00	75.500.000,00	100,00	75.465.000,00	99,95	35.000,00	0,05
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	15.813.000,00	63,25	9.187.000,00	36,75
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	33.215.000,00	92,26	2.785.000,00	7,74
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	59.000.000,00	29.000.000,00	100,00	22.413.000,00	77,29	6.587.000,00	22,71
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	299.916.610,00	99,97	83.390,00	0,03
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	858.090.000,00	858.090.000,00	100,00	858.000.000,00	99,99	90.000,00	0,01
13	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.642.400,00	99,76	357.600,00	0,24
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>264.390.000,00</b>	<b>263.961.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>231.423.200,00</b>	<b>87,67</b>	<b>32.537.800,00</b>	<b>12,33</b>
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	46.000.000,00	45.571.000,00	100,00	42.375.000,00	92,99	3.196.000,00	7,01
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	62.471.000,00	94,65	3.529.000,00	5,35
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	152.390.000,00	152.390.000,00	100,00	126.577.200,00	83,06	25.812.800,00	16,94
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>244.765.000,00</b>	<b>176.324.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>173.433.500,00</b>	<b>98,36</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>1,64</b>
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	177.315.000,00	108.874.500,00	100,00	108.474.500,00	99,63	400.000,00	0,37

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
18	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	67.450.000,00	100,00	64.959.000,00	96,31	2.491.000,00	3,69
<b>D</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>318.223.000,00</b>	<b>266.223.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>253.878.286,00</b>	<b>95,36</b>	<b>12.344.714,00</b>	<b>4,64</b>
19	Survey dan Pengumpulan Data	69.190.000,00	69.190.000,00	100,00	65.183.000,00	94,21	4.007.000,00	5,79
20	Penyelenggaraan Kehumasan pada DPMD	169.033.000,00	157.033.000,00	100,00	150.891.100,00	96,09	6.141.900,00	3,91
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	80.000.000,00	40.000.000,00	100,00	37.804.186,00	94,51	2.195.814,00	5,49
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa</b>	<b>970.517.300,00</b>	<b>739.917.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>723.993.700,00</b>	<b>97,85</b>	<b>15.923.600,00</b>	<b>2,15</b>
22	Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan	124.095.800,00	124.095.800,00	100,00	121.717.200,00	98,08	2.378.600,00	1,92
23	Pembinaan, Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kel	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	99.544.400,00	99,54	455.600,00	0,46
24	Rakor Tupoksi Kerja tentang Pemerintahan Desa 309 Kades dan DPMD 6 Kabupaten Se- Prov.Kep.Babel	617.738.000,00	400.138.000,00	100,00	393.864.600,00	98,43	6.273.400,00	1,57
25	Bimtek Bendahara dan Pengelolaan Aset Desa dalam Pelaksanaan Pemahaman terhadap LKPP Desa	128.683.500,00	115.683.500,00	100,00	108.867.500,00	94,11	6.816.000,00	5,89
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>696.565.000,00</b>	<b>1.191.961.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.017.479.880,00</b>	<b>85,36</b>	<b>174.481.120,00</b>	<b>14,64</b>
26	Pembinaan dan Dukungan Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	167.130.000,00	167.130.000,00	100,00	166.595.700,00	99,68	534.300,00	0,32
27	Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	133.685.050,00	133.685.050,00	100,00	127.178.130,00	95,13	6.506.920,00	4,87
28	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	395.749.950,00	395.749.950,00	100,00	377.266.650,00	95,33	18.483.300,00	4,67
29	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat	-	495.396.000,00	100,00	346.439.400,00	69,93	148.956.600,00	30,07
<b>G</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa</b>	<b>3.072.898.100,00</b>	<b>2.984.338.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.851.410.164,00</b>	<b>95,55</b>	<b>132.928.436,00</b>	<b>4,45</b>
30	Bantuan dan Monitoring serta Evaluasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Kep. Bangka Belitung	877.635.750,00	877.635.750,00	100,00	871.455.100,00	99,30	6.180.650,00	0,70
31	Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa	88.559.500,00	60.000.000,00	100,00	55.851.800,00	93,09	4.148.200,00	6,91
32	Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUMDesa Prov. Kep. Babel	196.920.000,00	196.920.000,00	100,00	186.651.300,00	94,79	10.268.700,00	5,21
33	Fasilitasi Pendampingan dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa(CPPD)	67.129.500,00	37.129.500,00	100,00	37.026.600,00	99,72	102.900,00	0,28
34	Rakor Sekretariat dan Fasilitasi Pokjanal Posyandu PAUD	113.766.750,00	83.766.750,00	100,00	79.943.052,00	95,44	3.823.698,00	4,56
35	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	225.229.800,00	225.229.800,00	100,00	223.476.550,00	99,22	1.753.250,00	0,78
36	Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.503.656.800,00	1.503.656.800,00	100,00	1.397.005.762,00	92,91	106.651.038,00	7,09
<b>H</b>	<b>Program Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG</b>	<b>564.682.500,00</b>	<b>448.862.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>432.731.660,00</b>	<b>96,41</b>	<b>16.131.090,00</b>	<b>3,59</b>

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
37	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	91.010.800,00	71.010.800,00	100,00	68.370.000,00	96,28	2.640.800,00	3,72
38	Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Pesisir	85.819.750,00	-	-	-	-	-	-
39	Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi	325.647.000,00	325.647.000,00	100,00	320.760.500,00	98,50	4.886.500,00	1,50
40	Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyentek	62.204.950,00	52.204.950,00	100,00	43.601.160,00	83,52	8.603.790,00	16,48
<b>I</b>	<b>Program Raskintis</b>	<b>12.634.819.950,00</b>	<b>12.942.403.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.909.031.100,00</b>	<b>99,74</b>	<b>33.372.850,00</b>	<b>0,26</b>
41	Rapat Koordinasi evaluasi dan Monev Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin	144.429.950,00	144.429.950,00	100,00	144.201.600,00	99,84	228.350,00	0,16
42	Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara Gratis	12.490.390.000,00	12.797.974.000,00	100,00	12.764.829.500,00	99,74	33.144.500,00	0,26

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>24.309.921.010,00</b>	<b>21.676.654.711,92</b>	<b>96,20</b>	<b>20.397.452.312,00</b>	<b>94,10</b>	<b>1.279.202.399,92</b>	<b>5,90</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>10.061.116.560,00</b>	<b>9.399.170.974,92</b>	<b>100,00</b>	<b>9.176.260.713,00</b>	<b>97,63</b>	<b>222.910.261,92</b>	<b>2,37</b>
a.	Gaji dan Tunjangan	5.408.284.560,00	4.821.470.974,92	100,00	4.683.498.713,00	97,14	137.972.261,92	2,86
b.	Tambahan Penghasilan PNS	4.652.832.000,00	4.577.700.000,00	100,00	4.492.762.000,00	98,14	84.938.000,00	1,86
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.248.804.450,00</b>	<b>12.277.483.737,00</b>	<b>92,41</b>	<b>11.221.191.599,00</b>	<b>91,40</b>	<b>1.056.292.138,00</b>	<b>8,60</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.726.379.750,00</b>	<b>2.640.379.750,00</b>	<b>92,86</b>	<b>2.443.254.353,00</b>	<b>92,53</b>	<b>197.125.397,00</b>	<b>7,47</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	25.000.000,00	70,00	16.700.000,00	66,80	8.300.000,00	33,20
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.960.000,00	147.960.000,00	80,00	108.245.048,00	73,16	39.714.952,00	26,84
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	671.440.000,00	610.440.000,00	100,00	526.968.900,00	86,33	83.471.100,00	13,67
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	197.790.000,00	197.790.000,00	100,00	171.050.000,00	86,48	26.740.000,00	13,52
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.840.000,00	44.840.000,00	100,00	44.838.000,00	100,00	2.000,00	0,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	139.922.500,00	99,94	77.500,00	0,06
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.499.750,00	30.499.750,00	80,00	22.005.000,00	72,15	8.494.750,00	27,85
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	26.938.700,00	99,77	61.300,00	0,23
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	-	-
10	Penyediaan bahan logistik kantor	10.180.000,00	10.180.000,00	100,00	9.939.000,00	97,63	241.000,00	2,37
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	80,00	23.849.000,00	79,50	6.151.000,00	20,50
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000,00	295.000.000,00	100,00	288.274.588,00	97,72	6.725.412,00	2,28
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	886.690.000,00	886.690.000,00	100,00	886.600.000,00	99,99	90.000,00	0,01
14	Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	199.980.000,00	174.980.000,00	90,00	157.923.617,00	90,25	17.056.383,00	9,75
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.011.500.000,00</b>	<b>1.056.784.000,00</b>	<b>96,88</b>	<b>986.754.700,00</b>	<b>93,37</b>	<b>70.029.300,00</b>	<b>6,63</b>
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	119.200.000,00	189.484.000,00	75,00	141.556.000,00	74,71	47.928.000,00	25,29
2	Pengadaan Meubelair	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	63.236.000,00	94,38	3.764.000,00	5,62
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	79.920.000,00	99,90	80.000,00	0,10
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.300.000,00	30.300.000,00	100,00	26.452.500,00	87,30	3.847.500,00	12,70
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	28.630.200,00	95,43	1.369.800,00	4,57
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	39.860.000,00	99,65	140.000,00	0,35
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan	495.000.000,00	470.000.000,00	100,00	457.600.000,00	97,36	12.400.000,00	2,64
8	Pengadaan Tempat Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.500.000,00	99,67	500.000,00	0,33

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69.374.112,00</b>	<b>92,50</b>	<b>5.625.888,00</b>	<b>7,50</b>
1	Penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan dinkessos	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	69.374.112,00	92,50	5.625.888,00	7,50
<b>D</b>	<b>Program dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>210.312.950,00</b>	<b>205.662.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>154.271.800,00</b>	<b>75,01</b>	<b>51.391.150,00</b>	<b>24,99</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.145.000,00	154.495.000,00	100,00	110.160.300,00	71,30	44.334.700,00	28,70
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	51.167.950,00	51.167.950,00	100,00	44.111.500,00	86,21	7.056.450,00	13,79
<b>E</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>659.445.000,00</b>	<b>614.275.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>550.580.460,00</b>	<b>89,63</b>	<b>63.694.540,00</b>	<b>10,37</b>
1	Penyuluhan Sosial	149.800.000,00	127.330.000,00	80,00	98.514.000,00	77,37	28.816.000,00	22,63
2	Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	139.645.000,00	136.945.000,00	100,00	124.486.960,00	90,90	12.458.040,00	9,10
3	Pemetaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Adopsi Desa Sosial/ADES)	270.000.000,00	265.000.000,00	100,00	246.385.500,00	92,98	18.614.500,00	7,02
4	Penguampingan dan Penyeragaman Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KLUPEM)	100.000.000,00	85.000.000,00	100,00	81.194.000,00	95,52	3.806.000,00	4,48
<b>F</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1.523.202.800,00</b>	<b>1.253.958.840,00</b>	<b>94,00</b>	<b>1.140.703.850,00</b>	<b>90,97</b>	<b>113.254.990,00</b>	<b>9,03</b>
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	286.392.000,00	171.392.000,00	100,00	164.320.950,00	95,87	7.071.050,00	4,13
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	233.852.000,00	221.852.000,00	70,00	153.169.300,00	69,04	68.682.700,00	30,96
3	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	199.999.800,00	180.046.000,00	100,00	179.802.000,00	99,86	244.000,00	0,14
4	Jaminan Kesejahteraan Sosial	376.750.000,00	356.750.000,00	100,00	343.316.900,00	96,23	13.433.100,00	3,77
5	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	426.209.000,00	323.918.840,00	100,00	300.094.700,00	92,65	23.824.140,00	7,35
<b>G</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>4.363.138.000,00</b>	<b>3.295.533.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.154.732.168,00</b>	<b>95,73</b>	<b>140.801.687,00</b>	<b>4,27</b>
1	Pemberdayaan Keluarga	287.623.000,00	245.342.280,00	100,00	239.993.000,00	97,82	5.349.280,00	2,18
2	Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP)	638.900.000,00	553.900.000,00	100,00	530.886.606,00	95,85	23.013.394,00	4,15
3	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	484.380.000,00	341.380.000,00	100,00	287.125.520,00	84,11	54.254.480,00	15,89
4	Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN)	482.650.000,00	482.650.000,00	100,00	465.379.492,00	96,42	17.270.508,00	3,58
5	Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	2.469.585.000,00	1.672.261.575,00	100,00	1.631.347.550,00	97,55	40.914.025,00	2,45
<b>H</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>2.442.475.950,00</b>	<b>1.897.339.342,00</b>	<b>97,14</b>	<b>1.672.402.548,00</b>	<b>88,14</b>	<b>224.936.794,00</b>	<b>11,86</b>
1	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	472.777.950,00	362.777.950,00	100,00	324.373.819,00	89,41	38.404.131,00	10,59
2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	362.193.000,00	275.266.680,00	100,00	204.689.580,00	74,36	70.577.100,00	25,64
3	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	250.000.000,00	198.343.020,00	100,00	192.418.010,00	97,01	5.925.010,00	2,99
4	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	550.000.000,00	510.452.000,00	100,00	485.419.000,00	95,10	25.033.000,00	4,90
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	224.365.000,00	132.200.000,00	80,00	100.251.942,00	75,83	31.948.058,00	24,17
6	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	455.765.000,00	341.314.692,00	100,00	288.965.197,00	84,66	52.349.495,00	15,34
7	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	98.800.000,00	76.985.000,00	100,00	76.285.000,00	99,09	700.000,00	0,91
8	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS	28.575.000,00	-	-	-	-	-	-



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti</b>	<b>1.207.350.000,00</b>	<b>1.223.550.000,00</b>	<b>86,18</b>	<b>1.039.753.868,00</b>	<b>84,98</b>	<b>183.796.132,00</b>	<b>15,02</b>
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun	113.100.000,00	103.100.000,00	90,91	95.436.100,00	92,57	7.663.900,00	7,43
2	Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	560.400.000,00	593.400.000,00	100,00	560.681.700,00	94,49	32.718.300,00	5,51
3	Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	431.440.000,00	424.640.000,00	100,00	335.454.768,00	79,00	89.185.232,00	21,00
4	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	53.310.000,00	53.310.000,00	100,00	34.412.500,00	64,55	18.897.500,00	35,45
5	Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien	49.100.000,00	49.100.000,00	40,00	13.768.800,00	28,04	35.331.200,00	71,96
<b>J</b>	<b>Program Pembinaan dan Pendampingan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>62,00</b>	<b>9.363.740,00</b>	<b>62,42</b>	<b>90,91</b>	<b>37,58</b>
1	Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	30.000.000,00	15.000.000,00	62,00	9.363.740,00	62,42	5.636.260,00	37,58

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>15.822.560.173,00</b>	<b>12.599.073.161,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.245.523.682,00</b>	<b>89,26</b>	<b>1.353.549.479,00</b>	<b>10,74</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.585.514.373,00</b>	<b>4.203.466.361,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.879.543.614,00</b>	<b>92,29</b>	<b>323.922.747,00</b>	<b>7,71</b>
a	Gaji dan Tunjangan	2.405.154.373,00	2.213.866.361,00	100,00	2.005.296.114,00	90,58	208.570.247,00	9,42
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.180.360.000,00	1.989.600.000,00	100,00	1.874.247.500,00	94,20	115.352.500,00	5,80
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.237.045.800,00</b>	<b>8.395.606.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.365.980.068,00</b>	<b>87,74</b>	<b>1.029.626.732,00</b>	<b>12,26</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.603.780.000,00</b>	<b>1.618.176.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.849.131,00</b>	<b>96,89</b>	<b>50.326.869,00</b>	<b>3,11</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.992.492,00	99,92	7.508,00	0,08
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	92.880.000,00	80.880.000,00	100,00	72.774.966,00	89,98	8.105.034,00	10,02
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	136.680.000,00	136.680.000,00	100,00	110.280.000,00	80,68	26.400.000,00	19,32
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	22.504.900,00	97,85	495.100,00	2,15
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	55.936.000,00	99,89	64.000,00	0,11
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	22.000.000,00	100,00	18.375.000,00	83,52	3.625.000,00	16,48
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	5.796.000,00	96,60	204.000,00	3,40
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	16.468.100,00	91,49	1.531.900,00	8,51
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	15.678.000,00	92,22	1.322.000,00	7,78
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	39.220.000,00	23.616.000,00	100,00	19.566.000,00	82,85	4.050.000,00	17,15
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000,00	360.000.000,00	100,00	357.985.163,00	99,44	2.014.837,00	0,56
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	715.000.000,00	715.000.000,00	100,00	712.800.000,00	99,69	2.200.000,00	0,31
13	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.692.510,00	99,80	307.490,00	0,20
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>799.605.000,00</b>	<b>812.360.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>666.831.137,00</b>	<b>82,09</b>	<b>145.528.863,00</b>	<b>17,91</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	46.000.000,00	98.731.000,00	100,00	85.304.000,00	86,40	13.427.000,00	13,60
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	555.905.000,00	515.929.000,00	100,00	392.293.387,00	76,04	123.635.613,00	23,96
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	46.067.750,00	85,31	7.932.250,00	14,69
4	Rehabilitasi, Sedang /Berat Gedung Kantor	143.700.000,00	143.700.000,00	100,00	143.166.000,00	99,63	534.000,00	0,37
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>244.765.000,00</b>	<b>233.965.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>154.759.000,00</b>	<b>66,15</b>	<b>79.206.000,00</b>	<b>33,85</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	177.315.000,00	166.515.000,00	100,00	101.386.000,00	60,89	65.129.000,00	39,11
2	Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	67.450.000,00	100,00	53.373.000,00	79,13	14.077.000,00	20,87
<b>D</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</b>	<b>3.557.699.800,00</b>	<b>949.909.800,00</b>	<b>100</b>	<b>894.372.923,00</b>	<b>94,15</b>	<b>55.536.877,00</b>	<b>5,85</b>

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Jembatan Portable (Bailey)	3.557.699.800,00	799.909.800,00	100,00	790.033.398,00	98,77	9.876.402,00	1,23
2	Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	150.000.000,00	100,00	104.339.525,00	69,56	45.660.475,00	30,44
E	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	<b>636.852.000,00</b>	<b>636.852.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>517.344.090,00</b>	<b>81,23</b>	<b>119.507.910,00</b>	<b>18,77</b>
1	Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa	394.462.000,00	394.462.000,00	100,00	322.833.990,00	81,84	71.628.010,00	18,16
2	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Database Peta Potensi Bencana Di Kab/Kota Prov Kep Bangka Belitung	242.390.000,00	242.390.000,00	100,00	194.510.100,00	80,25	47.879.900,00	19,75
F	<b>Program Penyediaan Logistik / Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.394.344.000,00</b>	<b>4.144.344.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.564.823.787,00</b>	<b>86,02</b>	<b>579.520.213,00</b>	<b>13,98</b>
1	Penyiapan /Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	242.968.700,00	97,19	7.031.300,00	2,81
2	Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	980.050.000,00	730.050.000,00	100,00	682.192.455,00	93,44	47.857.545,00	6,56
3	Pemeliharaan /Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	211.000.000,00	211.000.000,00	100,00	117.460.320,00	55,67	93.539.680,00	44,33
4	Kegiatan Pos Komando (posko) Tim Reaksi Cepat BPBD	2.146.880.000,00	2.073.440.000,00	100,00	1.693.543.400,00	81,68	379.896.600,00	18,32
5	Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD	156.852.000,00	156.852.000,00	100,00	152.088.000,00	96,96	4.764.000,00	3,04
6	Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat	193.097.000,00	188.362.002,00	100,00	182.851.500,00	97,07	5.510.502,00	2,93
7	Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	98.750.000,00	98.750.000,00	100,00	87.198.412,00	88,30	11.551.588,00	11,70
8	Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD	201.715.000,00	201.715.000,00	100,00	187.666.000,00	93,04	14.049.000,00	6,96
9	Pengerahan Dan Mobilisasi TRC Dalam Tanggap Darurat Bencana	156.000.000,00	234.174.998,00	100,00	218.855.000,00	93,46	15.319.998,00	6,54

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>19.201.378.000,00</b>	<b>22.127.965.959,00</b>	<b>150,00</b>	<b>17.893.775.710,00</b>	<b>80,86</b>	<b>4.234.190.249,00</b>	<b>19,14</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.907.592.000,00</b>	<b>6.444.143.859,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.199.487.528,00</b>	<b>96,20</b>	<b>244.656.331,00</b>	<b>3,80</b>
	Belanja Pegawai	6.907.592.000,00	6.444.143.859,00	100,00	6.199.487.528,00	96,20	244.656.331,00	3,80
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.293.786.000,00</b>	<b>15.683.822.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.694.288.182,00</b>	<b>74,56</b>	<b>3.989.533.918,00</b>	<b>25,44</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.966.177.500,00</b>	<b>2.175.758.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.809.120.734,00</b>	<b>83,15</b>	<b>366.637.766,00</b>	<b>16,85</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	15.720.510,00	63,90	8.879.490,00	36,10
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.000.000,00	205.989.963,00	100,00	177.510.900,00	86,17	28.479.063,00	13,83
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	236.480.000,00	236.480.000,00	100,00	95.573.940,00	40,42	140.906.060,00	59,58
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	114.300.000,00	124.930.000,00	100,00	116.575.000,00	93,31	8.355.000,00	6,69
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.984.500,00	99,95	15.500,00	0,05
6	Penyediaan alat tulis kantor	92.800.000,00	92.800.000,00	100,00	92.597.000,00	99,78	203.000,00	0,22
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.007.500,00	59.781.500,00	100,00	35.549.500,00	59,47	24.232.000,00	40,53
8	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	49.932.000,00	90,79	5.068.000,00	9,21
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	28.600.000,00	15.940.000,00	100,00	15.620.000,00	97,99	320.000,00	2,01
10	Penyediaan bahan logistik kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	3.269.500,00	57,36	2.430.500,00	42,64
11	Penyediaan makanan dan minuman	117.200.000,00	117.200.000,00	100,00	89.904.560,00	76,71	27.295.440,00	23,29
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00	419.766.037,00	100,00	411.511.205,00	98,03	8.254.832,00	1,97
13	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	400.490.000,00	400.490.000,00	100,00	400.400.000,00	99,98	90.000,00	0,02
14	Koordinasi, Konsultasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	250.000.000,00	100,00	202.660.863,00	81,06	47.339.137,00	18,94
15	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi khusus pariwisata pada sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung	-	137.081.000,00	100,00	72.311.256,00	52,75	64.769.744,00	47,25
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>456.070.000,00</b>	<b>398.641.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>333.428.000,00</b>	<b>83,64</b>	<b>65.213.000,00</b>	<b>16,36</b>
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.000.000,00	105.071.000,00	100,00	81.984.000,00	78,03	23.087.000,00	21,97
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	77.300.000,00	77.300.000,00	100,00	55.974.000,00	72,41	21.326.000,00	27,59
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	318.770.000,00	216.270.000,00	100,00	195.470.000,00	90,38	20.800.000,00	9,62

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100.888.000,00</b>	<b>100.888.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95.942.378,00</b>	<b>95,10</b>	<b>4.945.622,00</b>	<b>4,90</b>
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	100.888.000,00	100.888.000,00	100,00	95.942.378,00	95,10	4.945.622,00	4,90
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>240.615.000,00</b>	<b>240.615.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>212.595.000,00</b>	<b>88,35</b>	<b>28.020.000,00</b>	<b>11,65</b>
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	58.350.000,00	58.350.000,00	100,00	49.000.000,00	83,98	9.350.000,00	16,02
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.265.000,00	182.265.000,00	100,00	163.595.000,00	89,76	18.670.000,00	10,24
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.929.000,00</b>	<b>84,70</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>15,30</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	-	7.000.000,00	100,00	5.929.000,00	84,70	1.071.000,00	15,30
<b>F</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>3.515.772.500,00</b>	<b>4.610.678.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.892.782.574,00</b>	<b>62,74</b>	<b>1.717.895.926,00</b>	<b>37,26</b>
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	437.040.000,00	1.437.040.000,00	100,00	771.095.962,00	53,66	665.944.038,00	46,34
2	Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan	143.898.000,00	143.898.000,00	100,00	5.118.610,00	3,56	138.779.390,00	96,44
3	Peningkatan Pelestarian Tradisi	353.011.000,00	353.011.000,00	100,00	269.098.284,00	76,23	83.912.716,00	23,77
4	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian)	1.053.546.000,00	1.053.546.000,00	100,00	460.160.620,00	43,68	593.385.380,00	56,32
5	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	1.046.005.000,00	640.911.000,00	100,00	607.433.498,00	94,78	33.477.502,00	5,22
6	Sebelumnya Pendukung Pengembangan Keragaman Budaya Menjadi Pengembangan Keragaman Budaya	482.272.500,00	982.272.500,00	100,00	779.875.600,00	79,40	202.396.900,00	20,60
<b>G</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>487.534.000,00</b>	<b>353.788.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300.666.000,00</b>	<b>84,98</b>	<b>53.122.000,00</b>	<b>15,02</b>
1	Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah	83.746.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Peninggalan Purbakala	127.443.000,00	77.443.000,00	100,00	74.696.000,00	96,45	2.747.000,00	3,55
3	Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai)	199.000.000,00	199.000.000,00	100,00	160.600.000,00	80,70	38.400.000,00	19,30
4	Penyusunan Sastra Lisan Melayu Bangka Belitung	77.345.000,00	77.345.000,00	100,00	65.370.000,00	84,52	11.975.000,00	15,48
<b>H</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya</b>	<b>480.326.000,00</b>	<b>480.326.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>385.538.930,00</b>	<b>80,27</b>	<b>94.787.070,00</b>	<b>19,73</b>
1	Peningkatan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa	480.326.000,00	480.326.000,00	100,00	385.538.930,00	80,27	94.787.070,00	19,73
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>2.979.831.000,00</b>	<b>4.116.890.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.214.542.611,00</b>	<b>78,08</b>	<b>902.347.589,00</b>	<b>21,92</b>
1	Pengembangan Pasar Pariwisata (Farm Trip)	306.925.000,00	277.257.200,00	100,00	268.855.140,00	96,97	8.402.060,00	3,03
2	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)	455.546.000,00	370.446.000,00	100,00	357.034.726,00	96,38	13.411.274,00	3,62
3	Sosialisasi Aplikasi Promosi Pariwisata	-	300.000.000,00	100,00	284.267.300,00	94,76	15.732.700,00	5,24
4	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung ( bahan promosi)	638.325.000,00	638.325.000,00	100,00	581.255.050,00	91,06	57.069.950,00	8,94
5	Pengadaan TIC Mobile di Pulau Bangka dan Belitung ( 2 unit)	-	400.000.000,00	100,00	371.894.250,00	92,97	28.105.750,00	7,03
6	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Dukungan Event Promosi)	777.570.000,00	1.388.305.000,00	100,00	774.081.441,00	55,76	614.223.559,00	44,24
7	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	623.680.000,00	600.092.000,00	100,00	489.526.854,00	81,58	110.565.146,00	18,42



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pariwisata Bangka Belitung dan Sumatera	177.785.000,00	142.465.000,00	100,00	87.627.850,00	61,51	54.837.150,00	38,49
<b>J</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>1.566.572.000,00</b>	<b>2.764.437.625,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.043.627.493,00</b>	<b>73,93</b>	<b>720.810.132,00</b>	<b>26,07</b>
1	Pengadaan Sarana Pendukung Objek Wisata	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Kajian dan Survey Geopark Pulau Bangka dan Study observasi Marine Park	-	700.000.000,00	100,00	411.016.092,00	58,72	288.983.908,00	41,28
3	Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya	-	200.000.000,00	100,00	185.995.250,00	93,00	14.004.750,00	7,00
4	Pengadaan Pemasangan Lampu Taman 50 Titik di daya tarik wisata (DTW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	200.000.000,00	100,00	-	-	200.000.000,00	100,00
5	Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket wisata Bangka Belitung)	104.735.000,00	81.081.170,00	100,00	70.478.780,00	86,92	10.602.390,00	13,08
6	Perlombaan Usaha Wisata Kuliner	142.718.000,00	135.288.400,00	100,00	130.096.310,00	96,16	5.192.090,00	3,84
7	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	1.219.119.000,00	1.098.068.055,00	100,00	979.150.004,00	89,17	118.918.051,00	10,83
8	Penyusunan Paket Wisata Destinasi Perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	350.000.000,00	100,00	266.891.057,00	76,25	83.108.943,00	23,75
<b>K</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>434.799.275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400.115.462,00</b>	<b>92,02</b>	<b>34.683.813,00</b>	<b>7,98</b>
1	Pendukung Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisata (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia)	500.000.000,00	434.799.275,00	100,00	400.115.462,00	92,02	34.683.813,00	7,98

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>16.861.874.563,60</b>	<b>12.207.313.567,42</b>	<b>80,13%</b>	<b>10.677.990.658,00</b>	<b>87,47%</b>	<b>1.529.322.909,42</b>	<b>12,53%</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.407.482.913,60</b>	<b>6.511.585.917,42</b>	<b>100%</b>	<b>6.401.600.458,00</b>	<b>98,31</b>	<b>109.985.459,42</b>	<b>1,72%</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>6.407.482.913,60</b>	<b>6.511.585.917,42</b>	<b>100%</b>	<b>6.401.600.458,00</b>	<b>98,31</b>	<b>109.985.459,42</b>	<b>1,72%</b>
a	Gaji dan Tunjangan	3.419.762.913,60	3.342.865.917,42	100%	3.273.016.458,00	97,91	69.849.459,42	2,04%
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.987.720.000,00	3.168.720.000,00	100%	3.128.584.000,00	98,73	40.136.000,00	1,34%
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.454.391.650</b>	<b>5.695.727.650</b>	<b>60,26%</b>	<b>4.276.390.200</b>	<b>75,08%</b>	<b>1.419.337.450</b>	<b>24,92%</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.985.925.000</b>	<b>2.116.246.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.883.058.668</b>	<b>88,98</b>	<b>233.187.332</b>	<b>11,74%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.300.000	15.300.000	100%	12.659.350	82,74	2.640.650	17,26%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	108.000.000	100%	60.087.703	55,64	47.912.297	44,36%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	120.570.000	114.570.000	100%	104.880.000	91,54	9.690.000	8,04%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.010.000	32.010.000	100%	30.913.300	96,57	1.096.700	3,43%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60.000.000	60.000.000	100%	53.300.000	88,83	6.700.000	11,17%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	60.000.000	100%	57.863.000	96,44	2.137.000	5,34%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.225.000	64.975.000	100%	54.662.850	84,13	10.312.150	22,31%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.775.000	16.775.000	100%	16.684.000	99,46	91.000	0,54%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	245.000.000	262.571.000	100%	212.384.000	80,89	50.187.000	20,48%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	34.080.000	34.080.000	100%	31.296.000	91,83	2.784.000	8,17%
11	Penyediaan bahan logistik kantor	10.080.000	10.080.000	100%	9.440.000	93,65	640.000	6,35%
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.595.000	35.595.000	100%	21.284.000	59,79	14.311.000	40,21%
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000	350.000.000	100%	326.479.165	93,28	23.520.835	7,84%
14	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	772.290.000	772.290.000	100%	770.000.000	99,70	2.290.000	0,30%
15	Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	150.000.000	180.000.000	100%	121.125.300	67,29	58.874.700	39,25%
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>5.728.125.000</b>	<b>339.140.000</b>	<b>50%</b>	<b>200.359.043</b>	<b>59,08</b>	<b>138.780.957</b>	<b>2,42%</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105.000.000	205.000.000	100%	116.503.043	56,83	88.496.957	84,28%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	134.140.000	134.140.000	100%	83.856.000	62,51	50.284.000	37,49%
3	Sewa Gedung Kantor	150.000.000	0	0%	0	0,00	0	0,00%
4	Pembangunan Gedung Depo Arsip Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.338.985.000	0	0%	0	0,00	0	0,00%
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>97.550.000</b>	<b>97.550.000</b>	<b>100%</b>	<b>29.784.000</b>	<b>30,53%</b>	<b>67.766.000</b>	<b>69,47%</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	97.550.000	97.550.000	100%	29.784.000	30,53%	67.766.000	69,47%

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Caaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>256.265.000</b>	<b>256.265.000</b>	<b>100%</b>	<b>121.194.500</b>	<b>47,29%</b>	<b>135.070.500</b>	<b>52,71%</b>
1	Penyusunan Dokument Perencanaan Perangkat Daerah	188.815.000	188.815.000	100%	78.585.500	41,62%	110.229.500	58,38%
2	Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000	67.450.000	100%	42.609.000	63,17%	24.841.000	36,83%
<b>E</b>	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah</b>	<b>322.749.700</b>	<b>322.749.700</b>	<b>100%</b>	<b>201.625.000</b>	<b>62,47%</b>	<b>121.124.700</b>	<b>37,53%</b>
1	Penelusuran Dan Pendataan Arsip Statis Pemerintah Prov. Kep. Babel Dan Kabupaten/Kota	243.581.700	243.581.700	100%	131.697.800	54,07%	111.883.900	45,93%
2	Penelusuran Dan Pendataan Arsip Dinamis Pemerintah Prov. Kep. Babel Dan Kabupaten/Kota	79.168.000	79.168.000	100%	69.927.200	88,33%	9.240.800	11,67%
<b>F</b>	<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	<b>38.680.000</b>	<b>38.680.000</b>	<b>100%</b>	<b>38.150.000</b>	<b>98,63%</b>	<b>530.000</b>	<b>1,37%</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	38.680.000	38.680.000	100%	38.150.000	98,63%	530.000	1,37%
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>232.860.000</b>	<b>232.860.000</b>	<b>66,67%</b>	<b>155.362.600</b>	<b>66,72%</b>	<b>77.497.400</b>	<b>33,28%</b>
1	Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip	73.900.000	73.900.000	100%	49.158.500	66,52%	24.741.500	33,48%
2	Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31.650.000	31.650.000	0%	0	0,00%	31.650.000	100,00%
3	Pembinaan, Pendampingan Dan Lomba Kearsipan Di SKPD Pemerintah Prov. Kep. Babel	127.310.000	127.310.000	100%	106.204.100	83,42%	21.105.900	16,58%
<b>H</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan</b>	<b>452.745.000</b>	<b>452.745.000</b>	<b>66,67%</b>	<b>324.052.003</b>	<b>71,57%</b>	<b>128.692.997</b>	<b>28,43%</b>
1	Penilaian Angka Kredit Arsiparis	25.000.000	25.000.000	100%	8.900.000	35,60%	16.100.000	64,40%
2	Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota	123.350.000	123.350.000	100%	51.069.907	41,40%	72.280.093	58,60%
3	Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Prov. Kep. Babel	123.350.000	123.350.000	100%	103.427.000	83,85%	19.923.000	16,15%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan	89.090.000	89.090.000		74.497.866	83,62%	14.592.134	16,38%
5	Pelaksanaan Penerapan e-Arsip	91.955.000	0	0%	0	0,00%	0	0,00%
6	Sosialisasi Peraturan Kearsipan	0	91.955.000	100%	86.157.230	93,69%	5.797.770	6,31%
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>1.339.491.950</b>	<b>1.839.491.950</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.322.804.386</b>	<b>71,91%</b>	<b>516.687.564</b>	<b>28,09%</b>
1	Pelayanan Perpustakaan Keliling	250.454.000	250.454.000	100%	242.667.250	96,89%	7.786.750	3,11%
2	Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	66.800.000	566.800.000	100%	297.688.290	52,52%	269.111.710	47,48%
3	Pengembangan Minat Dan Budaya Baca	282.790.000	282.790.000	100%	253.824.290	89,76%	28.965.710	10,24%
4	Pendataan NPP	66.670.000	66.670.000	100%	42.873.180	64,31%	23.796.820	35,69%
5	Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Prov. Kep Babel	148.000.000	148.000.000	100%	99.331.000	67,12%	48.669.000	32,88%
6	Pemilihan Pustakawan Berprestasi terbaik Tingkat Provinsi	66.133.000	66.133.000	100%	46.048.779	69,63%	20.084.221	30,37%
7	Penilaian Angka Kredit Pustakawan	25.000.000	25.000.000	100%	18.681.368	74,73%	6.318.632	25,27%
8	Pelestarian Dan Pengelolaan Bahan Pustaka	42.739.000	42.739.000	100%	29.825.000	69,78%	12.914.000	30,22%
9	Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	24.550.000	24.550.000	100%	21.040.620	85,71%	3.509.380	14,29%
10	Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	40.186.000	40.186.000	100%	32.587.500	81,09%	7.598.500	18,91%
11	Pengelolaan Layanan Website	51.550.000	51.550.000	100%	32.148.000	62,36%	19.402.000	37,64%
12	Pembinaan Dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan	66.220.000	66.220.000	100%	40.768.000	61,56%	25.452.000	38,44%
13	Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan	208.399.950	208.399.950	100%	165.321.109	79,33%	43.078.841	20,67%

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>1.250.778.653,00</b>	<b>1.250.778.653,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.215.730.722,00</b>	<b>97,75</b>	<b>35.047.931,00</b>	<b>2,80</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.250.778.653,00</b>	<b>1.250.778.653,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.215.730.722,00</b>	<b>97,20</b>	<b>35.047.931,00</b>	<b>2,80</b>
1	Gaji Dan Tunjangan	232.408.920,00	232.408.920,00	100,00	220.288.578,00	94,78	12.120.342,00	5,22
2	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota	1.018.369.733,00	1.018.369.733,00	100,00	995.442.144,00	97,75	22.927.589,00	2,25

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEMERINTAHAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>1.838.020.000,00</b>	<b>1.637.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.595.093.446,00</b>	<b>96,57</b>	<b>42.724.554,00</b>	<b>2,61</b>
	<b>I BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>							
	<b>II BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.838.020.000,00</b>	<b>1.637.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.595.093.446,00</b>	<b>96,57</b>	<b>42.724.554,00</b>	<b>2,61</b>
	<b>A Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>200.712.000,00</b>	<b>201.542.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>198.636.988,00</b>	<b>98,56</b>	<b>2.905.012,00</b>	<b>1,44</b>
1	Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota	86.850.000,00	186.909.000,00	100,00	184.833.988,00	98,89	2.075.012,00	1,11
2	Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kab/Kota	113.862.000,00	14.633.000,00	100,00	13.803.000,00	94,33	830.000,00	5,67
	<b>B Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>738.120.000,00</b>	<b>577.620.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>564.444.980,00</b>	<b>98,01</b>	<b>13.175.020,00</b>	<b>2,28</b>
1	Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	350.961.000,00	190.461.000,00	100,00	189.575.110,00	99,53	885.890,00	0,47
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	226.614.000,00	226.614.000,00	100,00	214.756.170,00	94,77	11.857.830,00	5,23
3	Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	160.545.000,00	160.545.000,00	100,00	160.113.700,00	99,73	431.300,00	0,27
	<b>C Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>92.347.000,00</b>	<b>62.414.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.078.100,00</b>	<b>91,45</b>	<b>5.335.900,00</b>	<b>8,55</b>
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.414.000,00	62.414.000,00	100,00	57.078.100,00	91,45	5.335.900,00	8,55
2	Verifikas dan Validasi Dana Hibah kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMN	29.933.000,00	-	-	-	-	-	-
	<b>D Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>555.198.000,00</b>	<b>630.198.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>613.256.567,00</b>	<b>96,52</b>	<b>16.941.433,00</b>	<b>2,69</b>
1	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan Dalam Rakor/Rakernas APPSI	193.800.000,00	268.800.000,00	100,00	265.591.431,00	98,81	3.208.569,00	1,19
2	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan Dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	219.980.000,00	219.980.000,00	100,00	218.130.694,00	99,16	1.849.306,00	0,84
3	Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah	141.418.000,00	141.418.000,00	100,00	129.534.442,00	91,60	11.883.558,00	8,40
	<b>E Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>68.364.000,00</b>	<b>68.364.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66.919.250,00</b>	<b>97,89</b>	<b>1.444.750,00</b>	<b>2,11</b>
1	Kegiatan Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68.364.000,00	68.364.000,00	100,00	66.919.250,00	97,89	1.444.750,00	2,11
	<b>F Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>85.599.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan	85.599.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>G</b>	<b>Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada</b>	<b>97.680.000,00</b>	<b>97.680.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94.757.561,00</b>	<b>97,01</b>	<b>2.922.439,00</b>	<b>2,99</b>
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pilgub 2017	97.680.000,00	97.680.000,00	100,00	94.757.561,00	97,01	2.922.439,00	2,99

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO HUKUM

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>2.553.672.000</b>	<b>2.521.079.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2209673456,00</b>	<b>87,73</b>	<b>311.405.544</b>	<b>12,27</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.553.672.000</b>	<b>2.521.079.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.209.673.456</b>	<b>87,73</b>	<b>311.405.544</b>	<b>12,27</b>
<b>A</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>1.661.897.000</b>	<b>1.659.229.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.511.341.315</b>	<b>91,09</b>	<b>147.887.685</b>	<b>8,91</b>
1	Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	305.450.000	305.450.000	100	227.414.500	74,45	78.035.500	25,55
2	Sosialisasi Perda	94.200.000	94.200.000	100	64.808.000	68,80	29.392.000	31,20
3	Penyusunan Produk Hukum Daerah	278.506.000	233.706.000	100	227.480.836	97,34	6.225.164	2,66
4	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	159.500.000	153.572.000	100	151.525.300	98,67	2.046.700	1,33
5	Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten /Kota	293.035.000	343.035.000	100	335.740.600	97,87	7.294.400	2,13
6	Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	319.096.000	319.096.000	100	294.502.079	92,29	24.593.921	7,71
7	Publikasi Produk Hukum Daerah di Media	212.110.000	210.170.000	100	209.870.000	99,86	300.000	0,14
<b>B</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota</b>	<b>138.025.000</b>	<b>204.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>191.448.580</b>	<b>93,71</b>	<b>12.851.420</b>	<b>6,29</b>
1	Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota	74.175.000	138.850.000	100	127.090.520	91,53	11.759.480	8,47
2	Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	63.850.000	65.450.000	100	64.358.060	98,33	1.091.940	1,67
<b>C</b>	<b>Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	<b>128.090.000</b>	<b>128.090.000</b>	<b>100,00</b>	<b>124.142.160</b>	<b>96,92</b>	<b>3.947.840</b>	<b>3,08</b>
1	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	42.860.000	42.860.000	100	42.738.400	99,72	121.600	0,28
2	Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2016	54.280.000	54.280.000	100	52.463.440	96,65	1.816.560	3,35
3	Pengumpulan dan penyusunan Arsip PHD Tahun 2017	30.950.000	30.950.000	100	28.940.320	93,51	2.009.680	6,49
<b>D</b>	<b>Program Bantuan Hukum</b>	<b>625.660.000</b>	<b>529.460.000</b>	<b>100,00</b>	<b>382.741.401</b>	<b>72,29</b>	<b>146.718.599</b>	<b>27,71</b>
1	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa Perdata antara Pemda dengan Masyarakat secara Litigasi/Non Litigasi	139.400.000	110.000.000	100	43.865.888	39,88	66.134.112	60,12
2	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	139.750.000	139.750.000	100	100.442.745	71,87	39.307.255	28,13
3	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88.005.000	88.005.000	100	80.382.234	91,34	7.622.766	8,66
4	Monitoring pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86.005.000	86.005.000	100	77.698.934	90,34	8.306.066	9,66
5	Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Lansia Miskin yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	172.500.000	105.700.000	100	80.351.600	76,02	25.348.400	23,98



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO UMUM

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>97.155.974.133,00</b>	<b>107.406.076.042,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.339.628.546,00</b>	<b>93,42</b>	<b>7.066.447.496,00</b>	<b>6,58</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>48.644.591.133,00</b>	<b>46.074.931.033,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.081.784.438,00</b>	<b>95,67</b>	<b>1.993.146.595,00</b>	<b>4,33</b>
	a. Belanja Tidak Langsung KDH/WKDH	1.250.778.653,00	1.250.778.653,00	100,00	1.215.730.722,00	97,20	35.047.931,00	2,80
	b. Belanja Pegawai / PNS Setda (gaji, tunjangan, TPP)	47.393.812.480,00	44.824.152.380,00	100,00	42.866.053.716,00	95,63	1.958.098.664,00	4,37
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>48.511.383.000,00</b>	<b>61.331.145.009,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56.257.844.108,00</b>	<b>91,73</b>	<b>5.073.300.901,00</b>	<b>8,27</b>
	<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>28.641.773.000,00</b>	<b>35.359.200.537,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.156.375.376,00</b>	<b>93,77</b>	<b>2.202.825.161,00</b>	<b>6,23</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	259.926.000,00	1.095.578.412,00	100,00	962.761.754,00	87,88	132.816.658,00	12,12
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.054.500.000,00	4.054.500.000,00	100,00	3.745.366.850,00	92,38	309.133.150,00	7,62
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	870.000.000,00	2.158.255.625,00	100,00	2.155.602.375,00	99,88	2.653.250,00	0,12
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	569.556.000,00	501.636.000,00	100,00	494.751.250,00	98,63	6.884.750,00	1,37
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	690.000.000,00	690.000.000,00	100,00	687.867.285,00	99,69	2.132.715,00	0,31
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	335.000.000,00	435.000.000,00	100,00	394.917.000,00	90,79	40.083.000,00	9,21
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	699.494.925,00	99,93	505.075,00	0,07
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000.000,00	600.000.000,00	100,00	465.978.900,00	77,66	134.021.100,00	22,34
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	174.831.350,00	99,90	168.650,00	0,10
	10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	189.000.000,00	98,44	3.000.000,00	1,56
	11. Penyediaan bahan logistik kantor	108.345.000,00	108.345.000,00	100,00	55.160.000,00	50,91	53.185.000,00	49,09
	12. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.000.000.000,00	4.840.637.500,00	100,00	4.819.021.074,00	99,55	21.616.426,00	0,45
	13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5.500.000.000,00	6.650.000.000,00	100,00	6.106.524.927,00	91,83	543.475.073,00	8,17
	14. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.788.946.000,00	5.788.946.000,00	100,00	5.772.800.000,00	99,72	16.146.000,00	0,28
	15. Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah	1.000.000.000,00	2.075.802.000,00	100,00	1.653.445.793,00	79,65	422.356.207,00	20,35
	16. Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	17. Kegiatan rumah dinas Gubernur	2.014.000.000,00	2.299.000.000,00	100,00	2.275.920.000,00	99,00	23.080.000,00	1,00
	18. Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenvil)	1.394.500.000,00	1.394.500.000,00	100,00	1.168.578.955,00	83,80	225.921.045,00	16,20
	19. Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	1.450.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	1.334.352.938,00	83,40	265.647.062,00	16,60
	<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>16.363.240.000,00</b>	<b>21.970.814.472,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.567.323.810,00</b>	<b>89,06</b>	<b>2.403.490.662,00</b>	<b>10,94</b>
	1. Pengadaan Mobil Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur	2.135.560.000,00	2.135.560.000,00	100,00	2.034.840.000,00	95,28	100.720.000,00	4,72
	2. Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	-	2.800.000.000,00	100,00	2.728.882.500,00	97,46	71.117.500,00	2,54
	3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	581.740.000,00	581.740.000,00	100,00	569.455.000,00	97,89	12.285.000,00	2,11
	4. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	298.440.000,00	528.840.000,00	100,00	521.778.865,00	98,66	7.061.135,00	1,34
	5. Pengadaan peralatan gedung kantor	363.570.000,00	918.426.972,00	100,00	872.211.470,00	94,97	46.215.502,00	5,03
	6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	750.000.000,00	1.159.600.000,00	100,00	834.781.500,00	71,99	324.818.500,00	28,01

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.615.000.000,00	2.608.000.000,00	100,00	2.103.302.700,00	80,65	504.697.300,00	19,35
	8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1.258.700.000,00	1.008.700.000,00	100,00	740.214.100,00	73,38	268.485.900,00	26,62
	9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.495.520.000,00	3.970.520.000,00	100,00	3.659.612.200,00	92,17	310.907.800,00	7,83
	10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	494.840.000,00	494.840.000,00	100,00	381.641.500,00	77,12	113.198.500,00	22,88
	11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	345.560.000,00	345.560.000,00	100,00	194.574.200,00	56,31	150.985.800,00	43,69
	12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik	1.045.900.000,00	795.900.000,00	100,00	528.775.400,00	66,44	267.124.600,00	33,56
	13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	1.628.475.000,00	100,00	1.523.001.000,00	93,52	105.474.000,00	6,48
	14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	870.770.000,00	1.187.012.500,00	100,00	1.104.867.375,00	93,08	82.145.125,00	6,92
	15. Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	841.740.000,00	841.740.000,00	100,00	832.080.000,00	98,85	9.660.000,00	1,15
	16. Pemeliharaan Rutin Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemprov.Kep.Babel	1.265.900.000,00	965.900.000,00	100,00	937.306.000,00	97,04	28.594.000,00	2,96
	<b>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>456.820.000,00</b>	<b>456.820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>443.090.000,00</b>	<b>96,99</b>	<b>13.730.000,00</b>	<b>3,01</b>
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	205.250.000,00	205.250.000,00	100,00	196.520.000,00	95,75	8.730.000,00	4,25
	2. Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov.	251.570.000,00	251.570.000,00	100,00	246.570.000,00	98,01	5.000.000,00	1,99
	<b>F. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>3.049.550.000,00</b>	<b>3.544.310.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.091.054.922,00</b>	<b>87,21</b>	<b>453.255.078,00</b>	<b>12,79</b>
	1. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	1.588.250.000,00	1.988.250.000,00	100,00	1.936.903.130,00	97,42	51.346.870,00	2,58
	2. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	313.091.792,00	44,73	386.908.208,00	55,27
	3. Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel	761.300.000,00	856.060.000,00	100,00	841.060.000,00	98,25	15.000.000,00	1,75



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>2.745.368.642</b>	<b>3.403.345.622</b>	<b>98,31</b>	<b>3.286.643.086</b>	<b>96,57</b>	<b>116.702.536</b>	<b>3,43</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.745.368.642</b>	<b>3.403.345.622</b>	<b>98,31</b>	<b>3.286.643.086</b>	<b>96,57</b>	<b>116.702.536</b>	<b>3,43</b>
	<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.498.720.000</b>	<b>1.744.720.000</b>	<b>98,92</b>	<b>1.665.518.000</b>	<b>95,46</b>	<b>79.202.000</b>	<b>4,54</b>
	1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	498.720.000	396.000.000	100,00	362.220.000	91,47	33.780.000	8,53
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000.000	1.348.720.000	97,83	1.303.298.000	96,63	45.422.000	3,37
	<b>B. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>746.000.000</b>	<b>1.041.535.680</b>	<b>97,95</b>	<b>1.009.900.238</b>	<b>97,65</b>	<b>31.635.442</b>	<b>2,35</b>
	1. Kegiatan Publikasi dan Siaran	677.100.000	977.100.000	97,50	949.464.558	97,17	27.635.442	2,83
	2. Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah	68.900.000	64.435.680	100,00	60.435.680	93,79	4.000.000	6,21
	<b>C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>110.000.000</b>	<b>49.241.300</b>	<b>100,00</b>	<b>48.234.300</b>	<b>97,95</b>	<b>1.007.000</b>	<b>2,05</b>
	1. Sosialisasi dan Pengelolaan PPID	110.000.000	49.241.300	100,00	48.234.300	97,95	1.007.000	2,05
	<b>F. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>390.648.642</b>	<b>567.848.642</b>	<b>99,32</b>	<b>562.990.548</b>	<b>99,14</b>	<b>4.858.094</b>	<b>0,86</b>
	1. Dukungan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah	390.648.642	567.848.642	99,32	562.990.548	99,14	4.858.094	0,86

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO ORGANISASI

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>1.745.895.450,00</b>	<b>1.818.592.700,00</b>	<b>80,11</b>	<b>1.165.811.280,00</b>	<b>64,11</b>	<b>652.781.420,00</b>	<b>35,89</b>
<b>II BELANJA LANGSUNG</b>								
<b>A. Program Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>		<b>176.556.000,00</b>	<b>145.556.000,00</b>	<b>94,47</b>	<b>105.214.920,00</b>	<b>72,28</b>	<b>40.341.080,00</b>	<b>27,72</b>
	1. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	176.556.000,00	145.556.000,00	94,47	105.214.920,00	72,28	40.341.080,00	27,72
<b>B. Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah</b>		<b>254.278.000,00</b>	<b>254.166.250,00</b>	<b>98,92</b>	<b>212.862.390,00</b>	<b>83,75</b>	<b>41.303.860,00</b>	<b>16,25</b>
	1. Kegiatan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	82.828.000,00	82.828.000,00	97,65	77.333.500,00	93,37	5.494.500,00	6,63
	2. Kegiatan Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	104.700.000,00	104.700.000,00	100,00	85.175.890,00	81,35	19.524.110,00	18,65
	3. Kegiatan Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66.750.000,00	66.638.250,00	98,80	49.569.600,00	74,39	17.068.650,00	25,61
<b>C. Program Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Publik dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi</b>		<b>496.248.000,00</b>	<b>370.057.000,00</b>	<b>57,71</b>	<b>186.618.030,00</b>	<b>50,43</b>	<b>183.438.970,00</b>	<b>49,57</b>
	1. Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77.708.000,00	77.708.000,00	100,00	73.646.300,00	94,77	4.061.700,00	5,23
	2. Audit Pengawasan (Surveilance Audit) Sertifikasi ISO 9001:2008 Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD	86.780.000,00	73.860.000,00	100,00	69.462.700,00	94,05	4.397.300,00	5,95
	3. Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi System Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada Unit Pelayanan Terpadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (samsat Pangkalpinang)	331.760.000,00	-	-	-	-	-	-
	4. Pengadaan Software Aplikasi Laporan Kinerja	0	218.489.000,00	40,00	43.509.030,00	19,91	174.979.970,00	80,09
<b>D. Penguatan Tata Kelola SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi</b>		<b>82.587.500,00</b>	<b>82.587.500,00</b>	<b>98,43</b>	<b>63.820.100,00</b>	<b>77,28</b>	<b>18.767.400,00</b>	<b>22,72</b>
	1. Verifikasi dan validasi (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	82.587.500,00	82.587.500,00	98,43	63.820.100,00	77,28	18.767.400,00	22,72
<b>E. Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi</b>		<b>111.570.000,00</b>	<b>130.848.000,00</b>	<b>95,68</b>	<b>97.242.290,00</b>	<b>74,32</b>	<b>33.605.710,00</b>	<b>25,68</b>
	1. Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	111.570.000,00	130.848.000,00	95,68	97.242.290,00	74,32	33.605.710,00	25,68

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>F. Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>474.003.000,00</b>	<b>479.535.000,00</b>	<b>94,47</b>	<b>335.018.750,00</b>	<b>69,86</b>	<b>144.516.250,00</b>	<b>30,14</b>
	1. Semula "Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017" menjadi " Kegiatan review Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Pemprop Babel"	51.619.000,00	100.000.000,00	100,00	64.480.670,00	64,48	35.519.330,00	35,52
	2. Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	51.619.000,00	51.619.000,00	100,00	47.242.900,00	91,52	4.376.100,00	8,48
	3. Semula Validasi Analisa Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menjadi Penyusunan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79.728.000,00	109.728.000,00	81,29	76.817.000,00	70,01	32.911.000,00	29,99
	4. Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	120.169.000,00	-	-	-	-	-	-
	5. Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kep. Babel	82.548.000,00	107.198.000,00	98,57	57.080.180,00	53,25	50.117.820,00	46,75
	6. Pembinaan Bidang Analisa Jabatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27.800.000,00	-	-	-	-	-	-
	7. Semula "Validasi dan Penetapan Hasil Analisis Jabatan PNS diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" menjadi Penyusunan Analisis Jabatan PNS pada Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung	60.520.000,00	110.990.000,00	95,97	89.398.000,00	80,55	21.592.000,00	19,45
	<b>G. Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD PProvinsi dan Kabupaten/Kota Dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>150.652.950,00</b>	<b>355.842.950,00</b>	<b>56,50</b>	<b>165.034.800,00</b>	<b>46,38</b>	<b>190.808.150,00</b>	<b>53,62</b>
	1. Pembinaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah kab/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	82.099.950,00	82.099.950,00	99,51	58.553.400,00	71,32	23.546.550,00	28,68
	2. Rakornis Biro/Bagian Organisasi se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68.553.000,00	43.743.000,00	98,86	40.023.990,00	91,50	3.719.010,00	8,50
	3. Forum Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	80.000.000,00	95,14	66.457.410,00	83,07	13.542.590,00	16,93
	4. Bimbingan Teknis Aplikasi E-Sakip	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEMBANGUNAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>1.304.343.193,00</b>	<b>1.033.408.224,00</b>	<b>100,00</b>	<b>886.338.176,00</b>	<b>85,04</b>	<b>147.070.048,00</b>	<b>14,23</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>							
	<b>A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>296.625.000,00</b>	<b>105.176.431,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105.176.431,00</b>	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>
	1. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	160.700.000,00	-	0,00	-	0	-	0,00
	2. Pemberdaya Pengguna Jasa Konstruksi	67.750.000,00	54.390.821,00	100,00	54.390.821,00	100,00	-	0,00
	3. Pemberdayaan Pembinaan Jasa konstruksi	68.175.000,00	50.785.610,00	100,00	50.785.610,00	100,00	-	0,00
	<b>B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>233.140.000,00</b>	<b>233.140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>149.954.890,00</b>	<b>64,32</b>	<b>83.185.110,00</b>	<b>35,68</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.290.000,00	130.290.000,00	100,00	79.554.890,00	61,06	50.735.110,00	38,94
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	102.850.000,00	102.850.000,00	100,00	70.400.000,00	68,45	32.450.000,00	31,55
	<b>C. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan</b>	<b>774.578.193,00</b>	<b>695.091.793,00</b>	<b>100,00</b>	<b>631.206.855,00</b>	<b>90,81</b>	<b>63.884.938,00</b>	<b>9,19</b>
	1. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan	99.100.000,00	89.913.600,00	100,00	88.462.940,00	98,39	1.450.660,00	1,61
	2. Koordinasi Sistem e-Monev	552.328.193,00	605.178.193,00	100,00	542.743.915,00	89,68	62.434.278,00	10,32
	3. Koordinasi Penyusunan Renstra/Revisi Renstra	123.150.000,00	-		-		-	0,00

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>9.479.844.000,00</b>	<b>10.193.294.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.075.669.500,00</b>	<b>352,20</b>	<b>1.117.624.500,00</b>	<b>47,80</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>							
	<b>A. Program Peningkatan Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama</b>	<b>7.161.264.000,00</b>	<b>7.298.014.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.632.211.785,00</b>	<b>90,88</b>	<b>665.802.215,00</b>	<b>9,12</b>
	1. Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan	625.100.000,00	625.100.000,00	100,00	568.502.000,00	90,95	56.598.000,00	9,05
	2. Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Provinsi Kep Bangka Belitung	813.319.000,00	813.319.000,00	100,00	523.994.320,00	64,43	289.324.680,00	35,57
	3. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	848.600.000,00	848.600.000,00	100,00	765.299.400,00	90,18	83.300.600,00	9,82
	4. Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kep Bangka Belitung	868.530.000,00	740.530.000,00	100,00	739.531.000,00	99,87	999.000,00	0,13
	5. Pendampingan Jemaah Haji Provinsi Kep.Bangka Belitung	504.080.000,00	504.080.000,00	100,00	472.276.439,00	93,69	31.803.561,00	6,31
	6. Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	3.104.600.000,00	2.891.600.000,00	100,00	2.812.401.700,00	97,26	79.198.300,00	2,74
	7. Sinkronisasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Provinsi Kep.Bangka Belitung	22.005.000,00	22.005.000,00	100,00	15.355.000,00	69,78	6.650.000,00	30,22
	8. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan pada Hari Jumat	208.030.000,00	208.030.000,00	100,00	207.339.000,00	99,67	691.000,00	0,33
	9. Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat	167.000.000,00	644.750.000,00	100,00	527.512.926,00	81,82	117.237.074,00	18,18
	<b>B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>274.380.000,00</b>	<b>274.380.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>263.261.365,00</b>	<b>95,95</b>	<b>11.118.635,00</b>	<b>4,05</b>
	1. Evaluasi dan Analisis Proposal Bantuan Sosial dan Hibah	135.330.000,00	135.330.000,00	100,00	127.241.690,00	94,02	8.088.310,00	5,98
	2. Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah	139.050.000,00	139.050.000,00	100,00	136.019.675,00	97,82	3.030.325,00	2,18
	<b>C. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>1.710.110.000,00</b>	<b>2.286.810.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.906.189.350,00</b>	<b>83,36</b>	<b>380.620.650,00</b>	<b>16,64</b>
	1. Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kep.Bangka Belitung	948.480.000,00	1.240.180.000,00	100,00	1.199.068.000,00	96,68	41.112.000,00	3,32
	2. Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	761.630.000,00	1.046.630.000,00	100,00	707.121.350,00	67,56	339.508.650,00	32,44
	<b>D. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>334.090.000,00</b>	<b>334.090.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>274.007.000,00</b>	<b>82,02</b>	<b>60.083.000,00</b>	<b>17,98</b>
	3. Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	334.090.000,00	334.090.000,00	100,00	274.007.000,00	82,02	60.083.000,00	17,98



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEREKONOMIAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>1.198.641.756</b>	<b>2.980.103.358</b>	<b>100,00</b>	<b>2.580.402.224</b>	<b>86,59</b>	<b>399.701.134</b>	<b>13,41</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.198.641.756</b>	<b>1.490.051.679</b>	<b>100,00</b>	<b>1.290.201.112</b>	<b>86,59</b>	<b>199.850.567</b>	<b>13,41</b>
	<b>A. Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>							
	1. Monitoring dan evaluasi penyertaan modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	126.886.079	125.036.079	100,00	122.780.410	98,20	2.255.669	1,80
	2. Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73.340.046	73.340.046	100,00	71.250.390	97,15	2.089.656	2,85
	3. Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	172.846.109	172.846.109	100,00	154.843.857	89,58	18.002.252	10,42
	4. Koordinasi Program CSR	176.592.908	169.172.908	100,00	156.351.820	92,42	12.821.088	7,58
	5. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Potensi Investasi 7 (tujuh) kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	85.198.055	85.198.055	100,00	83.614.028	98,14	1.584.027	1,86
	6. Forum Koordinasi Pembentukan Bank Umum syariah Bangka Belitung	117.365.478	582.365.478	100,00	436.954.840	75,03	145.410.638	24,97
	7. Forum Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perekebunan di Prov. Kep. Babel	88.589.457	61.889.457	100,00	60.547.220	97,83	1.342.237	2,17
	8. Pengaturan Tata kelolaTimah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	122.970.077	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	9. Koordinasi Monev Bagian Perekonomian dan Koperasi	66.036.041	66.036.041	100,00	59.652.400	90,33	6.383.641	9,67
	10. Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Bidang Produksi Daerah	168.817.506	154.167.506	100,00	144.206.147	93,54	9.961.359	6,46

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO LAYANAN PENGADAAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>3.358.585.000,00</b>	<b>3.288.585.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.022.503.657,00</b>	<b>91,91</b>	<b>266.081.343,00</b>	<b>8,09</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>							
	<b>A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>3.358.585.000,00</b>	<b>3.288.585.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.022.503.657,00</b>	<b>91,91</b>	<b>266.081.343,00</b>	<b>8,09</b>
	1. Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik	1.102.100.000,00	1.102.100.000,00	100,00	1.054.752.404,00	95,70	47.347.596,00	4,30
	2. Rakernas LPSE	449.810.000,00	379.810.000,00	100,00	351.001.004,00	92,41	28.808.996,00	7,59
	3. Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	1.806.675.000,00	1.806.675.000,00	100,00	1.616.750.249,00	89,49	189.924.751,00	10,51

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>38.902.174.302,00</b>	<b>30.186.144.993,00</b>	<b>99,31</b>	<b>28.145.166.123,00</b>	<b>91,89</b>	<b>2.176.388.461,00</b>	<b>8,11</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>19.416.589.902,00</b>	<b>12.173.463.253,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.846.114.951,00</b>	<b>97,31</b>	<b>462.757.893,00</b>	<b>2,69</b>
	a. Belanja Pegawai	19.416.589.902,00	12.173.463.253,00	100,00	11.846.114.951,00	97,31	327.348.302,00	2,69
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>19.485.584.400,00</b>	<b>18.012.681.740,00</b>	<b>98,62</b>	<b>16.299.051.172,00</b>	<b>86,47</b>	<b>1.713.630.568,00</b>	<b>13,53</b>
	<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.083.649.000,00</b>	<b>4.714.204.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.554.305.544,00</b>	<b>94,46</b>	<b>159.898.856,00</b>	<b>5,54</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	14.779.200,00	72,45	5.620.800,00	27,55
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	556.400.000,00	598.400.000,00	100,00	504.392.751,00	84,29	94.007.249,00	15,71
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175.530.000,00	164.130.000,00	100,00	153.480.000,00	93,51	10.650.000,00	6,49
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	116.598.500,00	99,66	401.500,00	0,34
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	53.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.200.000,00	101.200.000,00	100,00	101.197.300,00	100,00	2.700,00	0,00
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	152.400.000,00	100,00	149.775.000,00	98,28	2.625.000,00	1,72
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	219.000.000,00	247.600.000,00	100,00	237.311.500,00	95,84	10.288.500,00	4,16
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	149.500.000,00	199.085.000,00	100,00	198.835.000,00	99,87	250.000,00	0,13
	10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.060.000,00	31.726.000,00	100,00	31.327.100,00	98,74	398.900,00	1,26
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	39.750.000,00	100,00	39.583.500,00	99,58	166.500,00	0,42
	12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	193.031.000,00	417.277.400,00	100,00	414.771.393,00	99,40	2.506.007,00	0,60
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.316.780.000,00	2.316.780.000,00	100,00	2.307.800.000,00	99,61	8.980.000,00	0,39
	14. Pengelolaan Website	95.000.000,00	92.720.000,00	100,00	80.243.400,00	86,54	12.476.600,00	13,46
	15. Koordinasi dan Konsolidasi Ke dalam Daerah	100.000.000,00	215.736.000,00	100,00	204.210.900,00	94,66	11.525.100,00	5,34
	<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.924.536.000,00</b>	<b>2.363.181.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.138.591.975,00</b>	<b>91,12</b>	<b>224.589.025,00</b>	<b>8,88</b>
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	181.200.000,00	209.320.000,00	100,00	208.847.775,00	99,77	472.225,00	0,23
	2. Pengadaan Meubelair	205.671.000,00	205.671.000,00	100,00	200.970.000,00	97,71	4.701.000,00	2,29
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	742.360.000,00	832.360.000,00	100,00	814.277.000,00	97,83	18.083.000,00	2,17
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	609.305.000,00	413.830.000,00	100,00	344.207.100,00	83,18	69.622.900,00	16,82
	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	186.000.000,00	206.000.000,00	100,00	187.690.500,00	91,11	18.309.500,00	8,89
	6. Pengadaan mesin/kartu absensi	0,00	496.000.000,00	100,00	382.599.600,00	77,14	113.400.400,00	22,86
	<b>C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>207.265.000,00</b>	<b>221.265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>163.830.900,00</b>	<b>77,17</b>	<b>57.434.100,00</b>	<b>22,83</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.815.000,00	159.815.000,00	100,00	112.096.400,00	70,14	47.718.600,00	29,86
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	61.450.000,00	61.450.000,00	100,00	51.734.500,00	84,19	9.715.500,00	15,81

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>6.593.300.500,00</b>	<b>4.307.028.695,00</b>	<b>92,78</b>	<b>3.570.676.719,00</b>	<b>88,47</b>	<b>736.351.976,00</b>	<b>11,53</b>
	1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional	100.000.000,00	75.000.000,00	88,89	74.816.190,00	99,75	183.810,00	0,25
	2. Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	132.684.900,00	132.684.900,00	100,00	132.416.700,00	99,80	268.200,00	0,20
	3. Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural	54.106.700,00	54.106.700,00	100,00	45.120.800,00	83,39	8.985.900,00	16,61
	4. Kegiatan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	122.961.600,00	122.961.600,00	100,00	114.955.300,00	93,49	8.006.300,00	6,51
	5. Kegiatan Pembuatan Buku Profil Kepegawaian	106.600.000,00	124.954.000,00	100,00	120.825.000,00	96,70	4.129.000,00	3,30
	6. Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	89.435.800,00	89,44	10.564.200,00	10,56
	7. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS	584.635.750,00	470.645.750,00	0,00	0,00	0,00	470.645.750,00	100,00
	8. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	221.965.000,00	215.780.000,00	100,00	212.984.632,00	98,70	2.795.368,00	1,30
	9. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Analisis Kepegawaian	10.599.500,00	10.599.500,00	100,00	9.798.900,00	92,45	800.600,00	7,55
	10. Kegiatan Penerbitan Buletin Kepegawaian	72.980.000,00	56.906.000,00	100,00	53.534.100,00	94,07	3.371.900,00	5,93
	11. Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara	164.807.000,00	142.027.000,00	100,00	123.551.887,00	86,99	18.475.113,00	13,01
	12. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	874.543.000,00	874.543.000,00	100,00	739.172.820,00	84,52	135.370.180,00	15,48
	13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	888.091.000,00	768.091.000,00	100,00	748.814.140,00	97,49	19.276.860,00	2,51
	14. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III	399.330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II & I	875.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	82.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah	18.618.000,00	18.618.000,00	70,00	12.517.000,00	67,23	6.101.000,00	32,77
	18. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Management Of Training (MOT)	406.802.000,00	282.114.280,00	100,00	282.114.280,00	100,00	0,00	0,00
	19. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC)	407.945.000,00	288.004.357,00	100,00	288.004.357,00	100,00	0,00	0,00
	20. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF)	293.568.000,00	115.394.100,00	75,00	114.982.060,00	99,64	412.040,00	0,36
	21. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP	92.611.000,00	92.611.000,00	100,00	68.604.445,00	74,08	24.006.555,00	25,92
	22. Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73.900.000,00	50.327.350,00	100,00	50.327.350,00	100,00	0,00	0,00
	23. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur	103.319.000,00	70.208.900,00	100,00	70.208.900,00	100,00	0,00	0,00
	24. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	92.611.000,00	70.300.035,00	100,00	70.300.035,00	100,00	0,00	0,00
	25. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas	92.611.000,00	71.151.223,00	100,00	71.151.223,00	100,00	0,00	0,00
	26. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan	113.643.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	0,00	100.000.000,00	100,00	77.040.800,00	77,04	22.959.200,00	22,96
	28. Pembuatan Buku Profil Kepegawaian	106.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>E. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>6.381.973.900,00</b>	<b>6.150.992.645,00</b>	<b>98,96</b>	<b>5.657.052.684,00</b>	<b>87,06</b>	<b>493.939.961,00</b>	<b>12,94</b>
	1. Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat	24.550.000,00	24.550.000,00	100,00	20.499.800,00	83,50	4.050.200,00	16,50
	2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis	750.000.000,00	967.537.500,00	100,00	954.008.558,00	98,60	13.528.942,00	1,40
	3. Kegiatan Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	2.401.210.000,00	2.186.560.000,00	100,00	2.179.622.018,00	99,68	6.937.982,00	0,32
	Belitung	205.746.000,00	161.523.000,00	100,00	150.805.500,00	93,36	10.717.500,00	6,64

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.560.000,00	28.560.000,00	100,00	25.553.330,00	89,47	3.006.670,00	10,53
	6. Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat	247.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Kegiatan Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	122.397.900,00	122.397.900,00	100,00	118.628.650,00	96,92	3.769.250,00	3,08
	8. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP Korpri Kepulauan Bangka Belitung	104.960.000,00	104.960.000,00	100,00	71.436.000,00	68,06	33.524.000,00	31,94
	9. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota	56.120.000,00	56.120.000,00	100,00	37.475.714,00	66,78	18.644.286,00	33,22
	10. Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar	74.408.000,00	74.408.000,00	100,00	68.398.062,00	91,92	6.009.938,00	8,08
	11. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan	240.900.000,00	192.950.000,00	100,00	138.227.860,00	71,64	54.722.140,00	28,36
	12. Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaswara	24.920.000,00	54.920.000,00	100,00	53.181.048,00	96,83	1.738.952,00	3,17
	13. Kegiatan Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.700.000,00	141.328.495,00	83,33	111.221.250,00	78,70	30.107.245,00	21,30
	14. Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	734.078.000,00	694.078.000,00	100,00	544.720.534,00	78,48	149.357.466,00	21,52
	15. Kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017	730.000.000,00	810.947.000,00	100,00	659.241.360,00	81,29	151.705.640,00	18,71
	16. Kegiatan Pertandingan Olahraga antar Unit KORPRI se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	278.106.000,00	264.457.750,00	100,00	264.457.750,00	100,00	0,00	0,00
	17. Kegiatan Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	265.695.000,00	265.695.000,00	100,00	259.575.250,00	97,70	6.119.750,00	2,30
	<b>F. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>294.860.000,00</b>	<b>256.010.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>214.593.350,00</b>	<b>80,55</b>	<b>41.416.650,00</b>	<b>19,45</b>
	1. Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	118.000.000,00	197.150.000,00	100,00	170.747.750,00	86,61	26.402.250,00	13,39
	2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58.860.000,00	58.860.000,00	100,00	43.845.600,00	74,49	15.014.400,00	25,51
	3. Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemprov. Babel	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>86.153.364.335,00</b>	<b>96.271.708.887,00</b>	<b>97,59</b>	<b>77.732.343.133,00</b>	<b>80,74</b>	<b>18.539.365.754,00</b>	<b>19,26</b>
	<b>I BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.762.621.635,00</b>	<b>7.879.580.517,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.526.676.342,00</b>	<b>95,52</b>	<b>352.904.175,00</b>	<b>4,48</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	5.126.285.635,00	4.393.244.517,00	100,00	4.241.475.342,00	96,55	151.769.175,00	3,45
	b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	3.097.200.000,00	2.947.200.000,00	100,00	2.876.925.000,00	97,62	70.275.000,00	2,38
	c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	539.136.000,00	539.136.000,00	100,00	408.276.000,00	75,73	130.860.000,00	24,27
	<b>II BELANJA LANGSUNG</b>	<b>77.390.742.700,00</b>	<b>88.392.128.370,00</b>	<b>95,18</b>	<b>70.205.666.791,00</b>	<b>79,43</b>	<b>18.186.461.579,00</b>	<b>20,57</b>
	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>9.755.899.700,00</b>	<b>9.373.199.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.184.920.935,00</b>	<b>87,32</b>	<b>1.188.278.765,00</b>	<b>12,68</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.800.000,00	17.500.000,00	100,00	17.378.550,00	99,31	121.450,00	0,69
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	988.000.000,00	922.000.000,00	100,00	747.835.311,00	81,11	174.164.689,00	18,89
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.834.530.000,00	1.496.130.000,00	100,00	1.398.696.600,00	93,49	97.433.400,00	6,51
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	209.730.000,00	209.730.000,00	100,00	178.080.000,00	84,91	31.650.000,00	15,09
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	83.937.000,00	99,93	63.000,00	0,08
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	250.000.000,00	205.000.000,00	100,00	164.182.182,00	80,09	40.817.818,00	19,91
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	246.230.000,00	246.230.000,00	100,00	242.144.750,00	98,34	4.085.250,00	1,66
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	247.599.700,00	247.599.700,00	100,00	215.342.350,00	86,97	32.257.350,00	13,03
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.000.000,00	66.000.000,00	100,00	56.093.000,00	84,99	9.907.000,00	15,01
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	259.920.000,00	259.920.000,00	100,00	255.837.500,00	98,43	4.082.500,00	1,57
	11. Penyediaan Bahan logistik Kantor	148.000.000,00	148.000.000,00	100,00	116.194.000,00	78,51	31.806.000,00	21,49
	12. Penyediaan Makanan dan Minuman	1.189.000.000,00	939.000.000,00	100,00	840.388.850,00	89,50	98.611.150,00	10,50
	13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	284.187.050,00	94,73	15.812.950,00	5,27
	14. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.168.090.000,00	3.432.090.000,00	100,00	3.418.800.000,00	99,61	13.290.000,00	0,39
	15. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	460.000.000,00	280.000.000,00	100,00	55.691.860,00	19,89	224.308.140,00	80,11
	16. Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	99.739.000,00	66,49	50.261.000,00	33,51
	17. Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan	120.000.000,00	370.000.000,00	100,00	10.392.932,00	2,81	359.607.068,00	97,19
	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.551.270.000,00</b>	<b>4.611.641.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.408.904.857,00</b>	<b>95,60</b>	<b>202.736.143,00</b>	<b>4,40</b>
	18. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.612.000.000,00	1.788.371.000,00	100,00	1.639.553.632,00	91,68	148.817.368,00	8,32
	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	302.400.000,00	302.400.000,00	100,00	287.504.500,00	95,07	14.895.500,00	4,93
	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	869.400.000,00	1.128.400.000,00	100,00	1.118.209.325,00	99,10	10.190.675,00	0,90
	21. Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor DPRD	379.670.000,00	1.004.670.000,00	100,00	976.187.400,00	97,16	28.482.600,00	2,84
	22. Revitalisasi Saluran air dan drainase pagar depan DPRD .	387.800.000,00	387.800.000,00	100,00	387.450.000,00	99,91	350.000,00	
	<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>282.990.000,00</b>	<b>282.990.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>276.740.000,00</b>	<b>97,79</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>2,21</b>
	23. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	282.990.000,00	282.990.000,00	100,00	276.740.000,00	97,79	6.250.000,00	2,21

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>286.000.000,00</b>	<b>286.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247.903.919,00</b>	<b>86,68</b>	<b>38.096.081,00</b>	<b>13,32</b>
	24. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	286.000.000,00	286.000.000,00	100,00	247.903.919,00	86,68	38.096.081,00	13,32
	<b>V. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53.687.400,00</b>	<b>53,69</b>	<b>46.312.600,00</b>	<b>46,31</b>
	25. Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID) dan Komisi Informasi Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	53.687.400,00	53,69	46.312.600,00	46,31
	<b>VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>63.036.583.000,00</b>	<b>72.917.353.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56.623.952.422,00</b>	<b>77,65</b>	<b>5.561.549.440,00</b>	<b>22,35</b>
	26. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17.736.525.000,00	17.256.525.000,00	100,00	11.694.975.560,00	67,77	5.561.549.440,00	32,23
	27. Rapat-rapat Paripurna	554.749.000,00	554.749.000,00	100,00	497.170.510,00	89,62	57.578.490,00	10,38
	28. Kegiatan Reses	5.669.100.000,00	7.424.100.000,00	100,00	1.352.764.800,00	18,22	6.071.335.200,00	81,78
	29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.683.050.000,00	1.683.050.000,00	100,00	400.531.456,00	23,80	1.282.518.544,00	76,20
	30. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia	536.250.000,00	478.390.000,00	100,00	141.927.760,00	29,67	336.462.240,00	70,33
	31. Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	729.390.000,00	729.390.000,00	100,00	547.310.900,00	75,04	182.079.100,00	24,96
	32. Koordinasi dan Konsultasi masalah hukum dan administrasi keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	51.400.000,00	25,70	148.600.000,00	74,30
	33. Publikasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	1.963.900.000,00	2.223.800.000,00	100,00	2.085.222.812,00	93,77	138.577.188,00	6,23
	34. Kunjungan Kerja Komisi	27.852.180.000,00	36.695.910.000,00	100,00	34.483.564.727,00	93,97	2.212.345.273,00	6,03
	35. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	1.321.220.000,00	1.321.220.000,00	100,00	1.287.586.744,00	97,45	33.633.256,00	2,55
	36. Kunjungan Kerja Badan Anggaran	2.119.800.000,00	1.819.800.000,00	100,00	1.781.070.117,00	97,87	38.729.883,00	2,13
	37. Kunjungan Kerja Badan Legislasi	992.800.000,00	992.800.000,00	100,00	901.380.436,00	90,79	91.419.564,00	9,21
	38. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	845.600.000,00	705.600.000,00	100,00	705.600.000,00	100,00	0,00	0,00
	39. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Inisiatif DPRD	832.019.000,00	832.019.000,00	100,00	693.446.600,00	83,35	138.572.400,00	16,65
	<b>VII. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>820.944.670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>409.557.258,00</b>	<b>49,89</b>	<b>411.387.412,00</b>	<b>50,11</b>
	40. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov.Kep.Babel	378.000.000,00	378.000.000,00	100,00	326.859.858,00	86,47	51.140.142,00	13,53
	41. Penilaian Harga tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD Prov.Kep.Babel sisa r	0,00	442.944.670,00	100,00	82.697.400,00	18,67	360.247.270,00	81,33
	<b>Jumlah</b>	<b>86.153.364.335,00</b>	<b>96.271.708.887,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77.732.343.133,00</b>	<b>80,74</b>	<b>18.539.365.754,00</b>	<b>19,26</b>

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>72.302.485.045,45</b>	<b>70.623.844.349,45</b>	<b>100,00</b>	<b>63.381.252.604,64</b>	<b>90,13</b>	<b>7.242.591.744,81</b>	<b>10,26</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>47.626.786.784,45</b>	<b>47.620.772.349,45</b>	<b>100,00</b>	<b>42.395.267.942,64</b>	<b>89,03</b>	<b>5.225.504.406,81</b>	<b>10,97</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	15.239.550.125,00	15.898.658.375,00	100,00	14.827.852.178,00	93,26	1.070.806.197,00	6,74
	b. Tambahan Penghasilan PNS	14.724.960.000,00	14.544.960.000,00	100,00	13.542.028.000,00	93,10	1.002.932.000,00	6,90
	c. Biaya Pemungutan Pajak	1.200.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	16.001.080.509,00	16.715.957.824,00	100,00	14.025.387.764,64	83,90	2.690.570.059,36	16,10
	e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	461.196.150,45	461.196.150,45	100,00	0,00	0,00	461.196.150,45	100,00
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>24.675.698.261,00</b>	<b>23.003.072.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.985.984.662,00</b>	<b>91,23</b>	<b>2.017.087.338,00</b>	<b>8,77</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>13.785.756.323,00</b>	<b>12.781.117.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.894.437.381,00</b>	<b>93,06</b>	<b>886.679.619,00</b>	<b>6,94</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	119.000.000,00	105.910.000,00	100,00	102.470.130,00	96,75	3.439.870,00	3,25
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	925.976.123,00	948.600.000,00	100,00	932.728.319,00	98,33	15.871.681,00	1,67
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	565.500.000,00	548.580.000,00	100,00	538.777.500,00	98,21	9.802.500,00	1,79
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66.000.000,00	58.740.000,00	100,00	58.722.000,00	99,97	18.000,00	0,03
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	612.335.000,00	512.335.000,00	100,00	178.973.800,00	34,93	333.361.200,00	65,07
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	439.150.800,00	390.845.000,00	100,00	390.078.500,00	99,80	766.500,00	0,20
7	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	1.228.800.000,00	1.093.632.000,00	100,00	1.069.877.500,00	97,83	23.754.500,00	2,17
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	42.000.000,00	30.000.000,00	100,00	7.364.000,00	24,55	22.636.000,00	75,45
9	Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-Undangan	32.000.000,00	28.480.000,00	100,00	27.370.000,00	96,10	1.110.000,00	3,90
10	Penyediaan Bahan Logistik kantor	156.442.000,00	115.000.000,00	100,00	105.958.300,00	92,14	9.041.700,00	7,86
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	79.032.000,00	70.338.000,00	100,00	49.128.100,00	69,85	21.209.900,00	30,15
12	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	799.930.725,00	99,99	69.275,00	0,01
13	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.147.090.000,00	3.975.490.000,00	100,00	3.949.000.000,00	99,33	26.490.000,00	0,67
14	Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Babel	120.245.000,00	107.018.000,00	100,00	94.967.000,00	88,74	12.051.000,00	11,26
15	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah	300.000.000,00	267.000.000,00	100,00	264.208.423,00	98,95	2.791.577,00	1,05
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT WIIAYAH Kab BANGKA	648.700.000,00	577.343.000,00	100,00	509.101.230,00	88,18	68.241.770,00	11,82
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT WIIAYAH Kab BANGKA TENGAH	521.352.800,00	469.217.000,00	100,00	389.758.500,00	83,07	79.458.500,00	16,93
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT WIIAYAH Kab BANGKA BARAT	521.981.100,00	469.783.000,00	100,00	319.848.337,00	68,08	149.934.663,00	31,92
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT WIIAYAH Kab BANGKA SELATAN	512.811.000,00	461.530.000,00	100,00	436.220.638,00	94,52	25.309.362,00	5,48
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT WIIAYAH Kab BELITUNG	618.420.000,00	556.578.000,00	100,00	538.362.450,00	96,73	18.215.550,00	3,27
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT WIIAYAH Kab BELITUNG TIMUR	559.060.500,00	503.155.000,00	100,00	471.877.297,00	93,78	31.277.703,00	6,22
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT WIIAYAH KOTA PANGKALPINANG	636.920.000,00	573.228.000,00	100,00	548.781.100,00	95,74	24.446.900,00	4,26
23	Pengelolaan Kehumasan	132.940.000,00	118.315.000,00	100,00	110.933.532,00	93,76	7.381.468,00	6,24
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.503.538.938,00</b>	<b>3.729.340.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.266.218.125,00</b>	<b>87,58</b>	<b>463.121.875,00</b>	<b>12,42</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.387.110.000,00	972.867.000,00	100,00	900.731.600,00	92,59	72.135.400,00	7,41
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.387.200.000,00	1.333.600.000,00	100,00	1.255.334.725,00	94,13	78.265.275,00	5,87
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	917.678.938,00	792.000.000,00	100,00	644.470.000,00	81,37	147.530.000,00	18,63
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	504.870.000,00	522.380.000,00	100,00	367.853.800,00	70,42	154.526.200,00	29,58
5	Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman, tempat Parkir dan Halaman Kantor	306.680.000,00	108.493.000,00	100,00	97.828.000,00	90,17	10.665.000,00	9,83

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.591.399.500,00</b>	<b>3.700.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.350.121.978,00</b>	<b>90,54</b>	<b>350.213.022,00</b>	<b>9,46</b>
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD	757.570.000,00	674.220.000,00	100,00	652.643.838,00	96,80	21.576.162,00	3,20
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD	675.860.000,00	675.860.000,00	100,00	670.164.820,00	99,16	5.695.180,00	0,84
3	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	288.000.000,00	256.320.000,00	100,00	244.674.716,00	95,46	11.645.284,00	4,54
4	Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak	725.370.000,00	645.570.000,00	100,00	523.205.200,00	81,05	122.364.800,00	18,95
5	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD	168.950.000,00	138.559.000,00	100,00	137.629.000,00	99,33	930.000,00	0,67
6	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	139.370.000,00	123.970.000,00	100,00	114.329.530,00	92,22	9.640.470,00	7,78
7	Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIPKD menjadi Peningkatan Fungsi Jaringan Aplikasi	480.210.000,00	596.712.500,00	100,00	512.757.428,00	85,93	83.955.072,00	14,07
8	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	56.016.500,00	49.855.000,00	100,00	31.855.000,00	63,90	18.000.000,00	36,10
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	257.200.000,00	228.908.000,00	100,00	179.121.682,00	78,25	49.786.318,00	21,75
10	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	42.853.000,00	42.853.000,00	100,00	26.978.300,00	62,96	15.874.700,00	37,04
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA	0,00	267.507.500,00	100,00	256.762.464,00	95,98	10.745.036,00	4,02
<b>D</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota</b>	<b>509.521.000,00</b>	<b>453.347.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>420.227.200,00</b>	<b>92,69</b>	<b>33.120.600,00</b>	<b>7,31</b>
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD	289.390.000,00	257.435.000,00	0,00	230.222.000,00	89,43	27.213.000,00	10,57
2	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	76.931.000,00	68.465.000,00	100,00	68.465.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Rapat Koordinasi pembinaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	143.200.000,00	127.447.800,00	100,00	121.540.200,00	95,36	5.907.600,00	4,64
<b>E</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah</b>	<b>676.702.500,00</b>	<b>912.012.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>757.980.109,00</b>	<b>83,11</b>	<b>154.032.091,00</b>	<b>16,89</b>
1	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	214.869.000,00	207.351.000,00	100,00	202.405.900,00	97,62	4.945.100,00	2,38
2	Penghapusan Barang Milik Daerah	131.163.000,00	273.821.500,00	100,00	229.029.799,00	83,64	44.791.701,00	16,36
3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.245.000,00	217.615.000,00	100,00	154.643.200,00	71,06	62.971.800,00	28,94
4	Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	169.685.000,00	112.731.000,00	100,00	83.417.010,00	74,00	29.313.990,00	26,00
5	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Barang milik Daerah	72.223.000,00	63.591.200,00	100,00	56.991.200,00	89,62	6.600.000,00	10,38
6	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan	41.517.500,00	36.902.500,00	100,00	31.493.000,00	85,34	5.409.500,00	14,66
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Serta Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.608.780.000,00</b>	<b>1.426.920.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.296.999.869,00</b>	<b>90,90</b>	<b>129.920.131,00</b>	<b>9,10</b>
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00	73.628.336,00	95,62	3.371.664,00	4,38
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	507.560.000,00	451.800.000,00	100,00	387.748.335,00	85,82	64.051.665,00	14,18
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	495.110.000,00	440.040.000,00	100,00	428.928.700,00	97,47	11.111.300,00	2,53
4	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi terkait	89.570.000,00	61.940.000,00	100,00	47.383.400,00	76,50	14.556.600,00	23,50
5	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	88.200.000,00	88.200.000,00	100,00	79.393.540,00	90,02	8.806.460,00	9,98
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	305.570.000,00	288.170.000,00	100,00	260.967.558,00	90,56	27.202.442,00	9,44
7	Rapat Kerja retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	45.770.000,00	19.770.000,00	100,00	18.950.000,00	95,85	820.000,00	4,15

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>	<b>20.799.325.885,00</b>	<b>19.073.289.944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.859.849.658,00</b>	<b>93,64</b>	<b>1.213.440.286,00</b>	<b>6,36</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>12.145.426.685,00</b>	<b>11.276.935.494,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.641.372.148,00</b>	<b>94,36</b>	<b>635.563.346,00</b>	<b>5,64</b>
	a. Gaji, Tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan	5.614.654.685,00	4.890.799.494,00	100,00	4.695.339.348,00	95,93	195.460.146,00	4,00
	b. Tambahan Penghasilan PNS	6.530.772.000,00	6.386.136.000,00	100,00	5.946.032.800,00	92,14	440.103.200,00	6,89
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.653.899.200,00</b>	<b>7.796.354.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.218.477.510,00</b>	<b>92,59</b>	<b>577.876.940,00</b>	<b>7,41</b>
	<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.890.490.000,00</b>	<b>1.766.618.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.668.457.585,00</b>	<b>94,44</b>	<b>98.160.415,00</b>	<b>5,56</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	30.701.375,00	85,28	5.298.625,00	14,72
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	167.000.000,00	100,00	152.271.826,00	91,18	14.728.174,00	8,82
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	280.000.000,00	228.128.000,00	100,00	198.441.100,00	86,99	29.686.900,00	13,01
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	114.870.000,00	83,24	23.130.000,00	16,76
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	11.135.000,00	55,68	8.865.000,00	44,33
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000,00	20.000.000,00	100,00	12.663.000,00	63,32	7.337.000,00	36,69
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	136.000.000,00	136.000.000,00	100,00	135.608.050,00	99,71	391.950,00	0,29
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	13.574.750,00	90,50	1.425.250,00	9,50
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	17.000.000,00	100,00	16.346.000,00	96,15	654.000,00	3,85
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	12.690.000,00	93,31	910.000,00	6,69
	11. Penyediaan bahan logistik kantor	21.800.000,00	29.800.000,00	100,00	29.372.500,00	98,57	427.500,00	1,43
	12. Penyediaan Makanan dan minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	34.846.310,00	96,80	1.153.690,00	3,20
	13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	346.541.074,00	99,01	3.458.926,00	0,99
	14. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	460.090.000,00	460.090.000,00	100,00	460.000.000,00	99,98	90.000,00	0,02
	15. Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	150.000.000,00	100.000.000,00	100,00	99.396.600,00	99,40	603.400,00	0,60
	<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>784.750.000,00</b>	<b>884.892.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>843.378.950,00</b>	<b>95,31</b>	<b>41.513.050,00</b>	<b>4,69</b>
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	88.700.000,00	133.842.000,00	100,00	131.022.000,00	97,89	2.820.000,00	2,11
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63.000.000,00	178.000.000,00	100,00	177.597.950,00	99,77	402.050,00	0,23
	3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	36.600.000,00	36.600.000,00	100,00	36.413.300,00	99,49	186.700,00	0,51



No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.898.900,00	99,49	101.100,00	0,51
	5. Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	556.450.000,00	516.450.000,00	100,00	478.446.800,00	92,64	38.003.200,00	7,36
	<b>C. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>97.875.000,00</b>	<b>66.475.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.405.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>13,64</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.050.000,00	23.650.000,00	100,00	20.255.000,00	85,64	3.395.000,00	14,36
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	42.825.000,00	42.825.000,00	100,00	37.150.000,00	86,75	5.675.000,00	13,25
	<b>D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	<b>4.807.639.350,00</b>	<b>4.226.419.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.870.533.269,00</b>	<b>91,58</b>	<b>355.886.081,00</b>	<b>8,42</b>
	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	2.523.584.600,00	2.323.584.600,00	100,00	2.203.811.214,00	94,85	119.773.386,00	5,15
	2. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	285.040.000,00	155.040.000,00	100,00	101.500.000,00	65,47	53.540.000,00	34,53
	3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	142.118.000,00	142.118.000,00	100,00	114.010.200,00	80,22	28.107.800,00	19,78
	4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	299.224.000,00	131.604.000,00	100,00	95.163.775,00	72,31	36.440.225,00	27,69
	5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	550.000.000,00	570.000.000,00	100,00	557.808.100,00	97,86	12.191.900,00	2,14
	6. Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	25.000.000,00	23.400.000,00	100,00	23.400.000,00	100,00	0,00	0,00
	7. Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR	632.672.750,00	530.672.750,00	100,00	522.066.240,00	98,38	8.606.510,00	1,62
	8. Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	252.773.740,00	72,22	97.226.260,00	27,78
	<b>E. Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>593.724.850,00</b>	<b>572.530.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>546.947.079,00</b>	<b>95,53</b>	<b>25.583.021,00</b>	<b>4,47</b>
	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	500.000.000,00	491.805.250,00	100,00	484.228.430,00	98,46	7.576.820,00	1,54
	2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	93.724.850,00	80.724.850,00	100,00	62.718.649,00	77,69	18.006.201,00	22,31
	<b>F. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>479.420.000,00</b>	<b>279.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>231.755.627,00</b>	<b>82,94</b>	<b>47.664.373,00</b>	<b>17,06</b>
	1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online	329.600.000,00	129.600.000,00	100,00	92.598.470,00	71,45	37.001.530,00	28,55
	2. Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	149.820.000,00	149.820.000,00	100,00	139.157.157,00	92,88	10.662.843,00	7,12





# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

## SKPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>14.016.403.455,15</b>	<b>12.668.156.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.715.663.039,50</b>	<b>95,23</b>	<b>952.492.960,50</b>	<b>4,77</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.215.050.455,15</b>	<b>3.363.699.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.087.286.451,00</b>	<b>91,78</b>	<b>276.413.249,00</b>	<b>8,22</b>
1	Gaji Dan Tunjangan	2.295.338.455,15	1.752.487.700,00	100,00	1.650.331.451,00	94,17	102.156.249,00	5,83
2	Tambahan Penghasilan Pns	1.919.712.000,00	1.611.212.000,00	100,00	1.436.955.000,00	89,18	174.257.000,00	10,82
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.801.353.000,00</b>	<b>9.304.456.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.628.376.588,50</b>	<b>92,73</b>	<b>676.079.711,50</b>	<b>7,27</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.309.428.000,00</b>	<b>4.699.256.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.474.934.438,50</b>	<b>95,23</b>	<b>224.322.161,50</b>	<b>4,77</b>
1	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.750.000,00	63.750.000,00	100,00	38.787.313,00	60,84	24.962.687,00	39,16
2	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	224.400.000,00	224.400.000,00	100,00	165.117.571,00	73,58	59.282.429,00	26,42
3	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan /Operasional	1.707.240.000,00	1.546.440.000,00	100,00	1.430.112.029,50	92,48	116.327.970,50	7,52
4	Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	108.840.000,00	108.840.000,00	100,00	108.840.000,00	100,00	-	-
5	Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00	42.816.245,00	93,90	2.783.755,00	6,10
6	Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	69.953.500,00	99,93	46.500,00	0,07
7	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	74.923.500,00	99,90	76.500,00	0,10
8	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.520.000,00	78.520.000,00	100,00	76.570.000,00	97,52	1.950.000,00	2,48
9	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.993.200,00	99,98	6.800,00	0,02
10	Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.800.000,00	28.799.600,00	100,00	28.299.600,00	98,26	500.000,00	1,74
11	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	10.334.000,00	50,66	10.066.000,00	49,34
12	Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.650.000,00	48.650.000,00	100,00	46.483.000,00	95,55	2.167.000,00	4,45
13	Keg. Penyediaan Makanan Minuman	300.000.000,00	550.629.000,00	100,00	546.800.293,00	99,30	3.828.707,00	0,70
14	Keg. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	380.000.000,00	680.000.000,00	100,00	679.966.187,00	100,00	33.813,00	0,00
15	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	943.890.000,00	943.890.000,00	100,00	941.690.000,00	99,77	2.200.000,00	0,23
16	Keg. Pengelolaan Website	33.690.000,00	33.690.000,00	100,00	33.600.000,00	99,73	90.000,00	0,27
17	Keg. Koordinasi, Konsolidasi Kedalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	-	-
18	Keg. Pengadaan Makanan Tambahan	75.648.000,00	75.648.000,00	100,00	75.648.000,00	100,00	-	-
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.357.659.200,00</b>	<b>2.557.613.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.365.781.200,00</b>	<b>92,50</b>	<b>191.832.000,00</b>	<b>7,50</b>
1	Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.441.825.000,00	1.990.285.000,00	100,00	1.980.538.000,00	99,51	9.747.000,00	0,49
2	Keg. Perlengkapan Gedung Kantor	358.340.000,00	107.574.700,00	100,00	86.803.700,00	80,69	20.771.000,00	19,31
3	Keg. Peralatan Gedung Kantor	179.955.000,00	146.078.500,00	100,00	145.598.500,00	99,67	480.000,00	0,33
4	Keg. Pengadaan Meubelair	-	150.000.000,00	100,00	-	-	150.000.000,00	100,00
5	Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	163.675.000,00	163.675.000,00	100,00	152.841.000,00	93,38	10.834.000,00	6,62
6	Keg. Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	213.864.200,00	-	100,00	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>31.370.000,00</b>	<b>28.065.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.065.900,00</b>	<b>100,00</b>	-	-
1	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	31.370.000,00	28.065.900,00	100,00	28.065.900,00	100,00	-	-
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>143.653.000,00</b>	<b>96.143.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78.194.000,00</b>	<b>81,33</b>	<b>17.949.000,00</b>	<b>18,67</b>
1	Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.153.000,00	51.524.000,00	100,00	43.135.500,00	83,72	8.388.500,00	16,28
2	Keg. Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan Daerah	58.500.000,00	44.619.000,00	100,00	35.058.500,00	78,57	9.560.500,00	21,43
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.310.863.000,00</b>	<b>1.510.863.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.290.461.250,00</b>	<b>85,41</b>	<b>220.401.750,00</b>	<b>14,59</b>
1	Keg. Dialog Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat	723.873.000,00	723.873.000,00	100,00	617.008.500,00	85,24	106.864.500,00	14,76
2	Keg. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	286.920.000,00	286.920.000,00	100,00	272.402.750,00	94,94	14.517.250,00	5,06
3	Keg. Penyelenggaraan Keprotokoler Di Jabotabek	300.070.000,00	500.070.000,00	100,00	401.050.000,00	80,20	99.020.000,00	19,80
<b>F</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>648.379.800,00</b>	<b>412.514.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>390.939.800,00</b>	<b>94,77</b>	<b>21.574.800,00</b>	<b>5,23</b>
1	Keg. Pelatihan Sanggar Tari Seni Dan Budaya Di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung	44.049.900,00	44.049.900,00	100,00	30.875.000,00	70,09	13.174.900,00	29,91
2	Keg. Pengadaan Pakaian Adat Dan Barang-Barang Kebudayaan	117.199.900,00	83.999.900,00	100,00	75.700.000,00	90,12	8.299.900,00	9,88
3	Keg. Bulan Promosi 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	295.615.000,00	95.455.000,00	100,00	95.455.000,00	100,00	-	-
4	Parade Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	191.515.000,00	189.009.800,00	100,00	188.909.800,00	99,95	100.000,00	0,05



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>31.312.979.687</b>	<b>28.925.435.251</b>	<b>86,30%</b>	<b>22.520.492.392</b>	<b>77,86%</b>	<b>6.404.942.859</b>	<b>22,14%</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>14.534.150.687</b>	<b>13.381.866.651</b>	<b>100,00</b>	<b>12.638.522.562</b>	<b>94,45%</b>	<b>743.344.089</b>	<b>5,55%</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	7.467.782.687	6.945.042.651	100,00	6.659.348.062	95,89%	285.694.589	4,11%
	b. Tambahan Penghasilan PNS	7.066.368.000	6.436.824.000	100,00	5.979.174.500	92,89%	457.649.500	7,11%
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>16.778.829.000</b>	<b>15.543.568.600</b>	<b>74,51%</b>	<b>9.881.969.830</b>	<b>63,58%</b>	<b>5.661.598.770</b>	<b>36,42%</b>
	<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.101.461.000</b>	<b>4.151.461.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.735.012.017</b>	<b>89,97%</b>	<b>416.448.983</b>	<b>10,03%</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.390.000	15.390.000	100,00	10.132.250	65,84%	5.257.750	34,16%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	244.800.000	214.800.000	100,00	158.608.113	73,84%	56.191.887	26,16%
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	262.800.000	191.640.000	100,00	163.680.000	85,41%	27.960.000	14,59%
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.056.000	32.056.000	100,00	23.090.850	72,03%	8.965.150	27,97%
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	90.000.000	80.000.000	100,00	41.502.000	51,88%	38.498.000	48,12%
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	123.000.000	163.000.000	100,00	163.000.000	100,00%	0	0,00%
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	65.000.000	100,00	64.958.900	99,94%	41.100	0,06%
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	12.428.980	82,86%	2.571.020	17,14%
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	7.920.000	100,00	7.043.000	88,93%	877.000	11,07%
	10. Penyediaan bahan logistik kantor	10.250.000	10.250.000	100,00	6.756.000	65,91%	3.494.000	34,09%
	11. Penyediaan makan dan minuman	53.000.000	53.000.000	100,00	11.400.000	21,51%	41.600.000	78,49%
	12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000	350.000.000	100,00	347.752.460	99,36%	2.247.540	0,64%
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	745.760.000	745.760.000	100,00	713.240.000	95,64%	32.520.000	4,36%
	14. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali	560.660.000	560.660.000	100,00	504.997.718	90,07%	55.662.282	9,93%
	15. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	443.800.000	443.800.000	100,00	421.916.251	95,07%	21.883.749	4,93%
	16. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	549.570.000	549.570.000	100,00	530.923.249	96,61%	18.646.751	3,39%
	17. Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)	432.455.000	482.455.000	100,00	387.882.546	80,40%	94.572.454	19,60%
	18. Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000	171.160.000	100,00	165.699.700	96,81%	5.460.300	3,19%
	<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>875.390.000</b>	<b>980.816.000</b>	<b>100,00</b>	<b>653.207.370</b>	<b>66,60%</b>	<b>327.608.630</b>	<b>33,40%</b>
	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.440.000	221.866.000	100,00	199.800.000	90,05%	22.066.000	9,95%
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab gedung kantor	100.000.000	100.000.000	100,00	96.367.000	96,37%	3.633.000	3,63%
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTDBBIAP Tanjung Krasak	83.600.000	83.600.000	100,00	78.100.000	93,42%	5.500.000	6,58%
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	575.350.000	575.350.000	100,00	278.940.370	48,48%	296.409.630	51,52%

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>158.470.000</b>	<b>158.470.000</b>	<b>100,00</b>	<b>105.187.400</b>	<b>66,38%</b>	<b>53.282.600</b>	<b>33,62%</b>
	1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur	140.000.000	140.000.000	100,00	94.369.550	67,41%	45.630.450	32,59%
	2. Penilaian Angka Kredit	18.470.000	18.470.000	100,00	10.817.850	58,57%	7.652.150	41,43%
	<b>D. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>357.965.000</b>	<b>357.965.000</b>	<b>100,00</b>	<b>332.472.710</b>	<b>92,88%</b>	<b>25.492.290</b>	<b>7,12%</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	249.315.000	249.315.000	100,00	241.847.810	97,00%	7.467.190	3,00%
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	108.650.000	108.650.000	100,00	90.624.900	83,41%	18.025.100	16,59%
	<b>E. Program Pengembangan Budaya Perikanan</b>	<b>3.536.563.000</b>	<b>3.536.563.000</b>	<b>48,31</b>	<b>1.660.277.560</b>	<b>46,95%</b>	<b>1.876.285.440</b>	<b>53,05%</b>
	1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK)	654.000.000	654.000.000	2,39	14.040.000	2,15%	639.960.000	97,85%
	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali (DAK)	400.000.000	400.000.000	27,74	107.015.000	26,75%	292.985.000	73,25%
	3. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK)	1.500.253.000	1.500.253.000	39,97	588.384.000	39,22%	911.869.000	60,78%
	4. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali	268.370.000	268.370.000	100,00	254.466.000	94,82%	13.904.000	5,18%
	5. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	320.840.000	320.840.000	100,00	315.188.560	98,24%	5.651.440	1,76%
	6. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	393.100.000	393.100.000	100,00	381.184.000	96,97%	11.916.000	3,03%
	<b>F. Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>3.047.250.000</b>	<b>1.818.063.600</b>	<b>52,95</b>	<b>775.115.064</b>	<b>42,63%</b>	<b>1.042.948.536</b>	<b>57,37%</b>
	1. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	3.000.000.000	745.155.600	60,00	409.545.200	54,96%	335.610.400	45,04%
	2. Pengolahan data statistik perikanan tangkap	47.250.000	0	0,00	0	0,00%	0	
	3. Peningkatan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	0	329.908.000	60,00	57.993.664	17,58%	271.914.336	82,42%
	4. Pilot Project Penggunaan Mesin Tempel Alternatif Non BBM dan Gas Ukuran Mesin 5 PK untuk Kapal Nelayan	0	214.520.000	5,00	9.132.000	4,26%	205.388.000	95,74%
	5. Kajian prototype Jenis Kapal Fiber Representatif untuk Nelayan 3 GT	0	306.960.000	100,00	298.444.200	97,23%	8.515.800	2,77%
	6. Pilot project penggunaan energi Bayu untuk Kapal Nelayan	0	221.520.000	0,00	0	0,00%	221.520.000	100,00%
	<b>G. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan</b>	<b>808.279.500</b>	<b>646.779.500</b>	<b>81,74</b>	<b>452.063.800</b>	<b>69,89%</b>	<b>194.715.700</b>	<b>30,11%</b>
	1. Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	269.305.000	181.660.000	35,00	49.935.500	27,49%	131.724.500	72,51%
	2. Pengembangan dan pembinaan promosi serta kerjasama pemasaran hasil perikanan	538.974.500	465.119.500	100,00	402.128.300	86,46%	62.991.200	13,54%
	<b>H. Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan</b>	<b>3.893.450.500</b>	<b>3.893.450.500</b>	<b>70,18</b>	<b>2.168.633.909</b>	<b>55,70%</b>	<b>1.724.816.591</b>	<b>44,30%</b>
	1. Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.902.450.000	2.902.450.000	70,60	1.651.797.710	56,91%	1.250.652.290	43,09%
	2. Peningkatan Fungsi BOOST Center	146.880.000	146.880.000	100,00	113.344.350	77,17%	33.535.650	22,83%
	3. Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	844.120.500	844.120.500	100,00	403.491.849	47,80%	440.628.651	52,20%

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>43.852.786.916,28</b>	<b>38.112.887.148,50</b>	<b>100,00</b>	<b>32.348.305.154,00</b>	<b>84,87</b>	<b>5.764.581.994,50</b>	<b>15,13</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>19.960.618.966,28</b>	<b>15.651.816.398,50</b>	<b>100,00</b>	<b>14.538.053.247,00</b>	<b>92,88</b>	<b>1.113.763.151,50</b>	<b>7,12</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	7.659.435.045,08	5.956.279.178,50	100,00	5.791.844.760,00	97,24	164.434.418,50	2,76
	b. Tambahan Penghasilan PNS	12.301.183.921,20	9.695.537.220,00	100,00	8.746.208.487,00	90,21	949.328.733,00	9,79
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>23.892.167.950,00</b>	<b>22.461.070.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.810.251.907,00</b>	<b>79,29</b>	<b>17.810.251.907,00</b>	<b>79,29</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6.433.120.000,00</b>	<b>6.454.120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.288.968.066,00</b>	<b>97,44</b>	<b>165.151.934,00</b>	<b>2,56</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.047.000,00	9.047.000,00	100,00	6.876.700,00	76,01	2.170.300,00	23,99
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.800.000,00	194.800.000,00	100,00	172.184.572,00	88,39	22.615.428,00	11,61
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	230.960.000,00	230.960.000,00	100,00	223.160.000,00	96,62	7.800.000,00	3,38
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00	100,00	0,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	48.235.000,00	96,47	1.765.000,00	3,53
6	Penyediaan alat tulis kantor	92.800.000,00	92.800.000,00	100,00	92.800.000,00	100,00	0,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	38.501.353,00	96,25	1.498.647,00	3,75
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	56.899.000,00	94,83	3.101.000,00	5,17
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	0,00	-
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.980.000,00	14.980.000,00	100,00	14.530.000,00	97,00	450.000,00	3,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	34.970.000,00	99,91	30.000,00	0,09
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	319.670.464,00	91,33	30.329.536,00	8,67
13	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	3.857.428.000,00	3.857.428.000,00	100,00	3.854.550.000,00	99,93	2.878.000,00	0,07
14	Peningkatan fungsi pelayanan Balai Benih Pertanian	619.470.000,00	586.470.000,00	100,00	512.164.641,00	87,33	74.305.359,00	12,67
15	Peningkatan fungsi pelayanan Balai Proteksi Tanaman	330.975.000,00	320.975.000,00	100,00	320.104.383,00	99,73	870.617,00	0,27
16	Peningkatan fungsi pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Setifikasi Benih	199.660.000,00	199.660.000,00	100,00	197.256.904,00	98,80	2.403.096,00	1,20
17	Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	186.817.200,00	93,41	13.182.800,00	6,59
18	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	148.247.849,00	98,83	1.752.151,00	1,17
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.669.020.000,00</b>	<b>4.547.206.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.241.538.540,00</b>	<b>27,30</b>	<b>3.305.667.460,00</b>	<b>72,70</b>
1	Pembangunan /renovasi UPTD Balai Diklat Pertanian serta penyediaan sarana (DAK)	3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	100,00	395.871.540,00	11,32	3.102.128.460,00	88,68
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	105.426.000,00	100,00	83.500.000,00	79,20	21.926.000,00	20,80
3	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	196.133.000,00	98,07	3.867.000,00	1,93
4	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas	971.020.000,00	743.780.000,00	100,00	566.034.000,00	76,10	177.746.000,00	23,90

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>228.600.000,00</b>	<b>228.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>137.720.600,00</b>	<b>60,25</b>	<b>90.879.400,00</b>	<b>39,75</b>
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	203.600.000,00	203.600.000,00	100,00	120.405.600,00	59,14	83.194.400,00	40,86
2	Penilaian Angka Kredit	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	17.315.000,00	69,26	7.685.000,00	30,74
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>609.915.000,00</b>	<b>634.915.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>576.816.477,00</b>	<b>90,85</b>	<b>58.098.523,00</b>	<b>9,15</b>
1	Data dan Statistik Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	228.703.770,00	91,48	21.296.230,00	8,52
2	Penyusunan Dokum perencanaan Perangkat Daerah	239.665.000,00	239.665.000,00	100,00	208.815.607,00	87,13	30.849.393,00	12,87
3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	120.250.000,00	145.250.000,00	100,00	139.297.100,00	95,90	5.952.900,00	4,10
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>1.993.098.950,00</b>	<b>1.312.638.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.244.774.283,00</b>	<b>94,83</b>	<b>67.864.667,00</b>	<b>5,17</b>
1	Peningkatan Kemampuan lembaga Petani	140.736.450,00	140.736.450,00	100,00	93.956.450,00	66,76	46.780.000,00	33,24
2	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada	393.217.500,00	393.217.500,00	100,00	393.030.600,00	99,95	186.900,00	0,05
3	Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama	494.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Keikutsertaan pada even penyelenggaraan Penas	823.000.000,00	637.000.000,00		625.042.433,00	98,12	11.957.567,00	1,88
5	Penyusunan program Penyuluhan provinsi kep.babel	141.685.000,00	141.685.000,00	100,00	132.744.800,00	93,69	8.940.200,00	6,31
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>564.605.000,00</b>	<b>1.064.605.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.047.281.900,00</b>	<b>98,37</b>	<b>17.323.100,00</b>	<b>1,63</b>
1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	337.350.000,00	337.350.000,00	100,00	336.271.300,00	99,68	1.078.700,00	0,32
2	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	227.255.000,00	227.255.000,00	100,00	215.861.800,00	94,99	11.393.200,00	5,01
3	Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan	0,00	500.000.000,00	100,00	495.148.800,00	99,03	4.851.200,00	0,97
<b>G</b>	<b>Program peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>810.990.000,00</b>	<b>810.990.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>796.821.600,00</b>	<b>98,25</b>	<b>14.168.400,00</b>	<b>1,75</b>
1	Pengadaan peralatan pasca panen lada	292.490.000,00	292.490.000,00		291.065.000,00	99,51	1.425.000,00	0,49
2	Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak	518.500.000,00	518.500.000,00	100,00	505.756.600,00	97,54	12.743.400,00	2,46
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>7.445.505.000,00</b>	<b>6.094.205.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.463.905.460,00</b>	<b>89,66</b>	<b>630.299.540,00</b>	<b>10,34</b>
1	Sertifikasi Bibit Pertanian/ Perkebunan	159.735.000,00	147.235.000,00	100,00	145.681.200,00	98,94	1.553.800,00	1,06
2	Pengawasan Peredaran Benih	236.020.000,00	211.220.000,00	100,00	210.473.180,00	99,65	746.820,00	0,35
3	Penilaian Kultivar/ Varietas Unggul Lokal Daerah	274.580.000,00	229.580.000,00	100,00	181.750.400,00	79,17	47.829.600,00	20,83
4	Intensifikasi Tanaman Lada	2.188.295.000,00	2.188.295.000,00	100,00	2.176.909.400,00	99,48	11.385.600,00	0,52
5	Pengembangan Produksi Benih Sumber Petanian	1.381.480.000,00	1.814.480.000,00	100,00	1.644.458.880,00	90,63	170.021.120,00	9,37
6	Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	253.945.000,00	253.945.000,00	100,00	229.119.200,00	90,22	24.825.800,00	9,78
7	Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Padi	1.951.450.000,00	1.249.450.000,00	100,00	875.513.200,00	70,07	373.936.800,00	29,93
8	Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura	1.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>I</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>140.050.000,00</b>	<b>140.050.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115.576.080,00</b>	<b>82,52</b>	<b>24.473.920,00</b>	<b>17,48</b>
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	140.050.000,00	140.050.000,00	100,00	115.576.080,00	82,52	24.473.920,00	17,48

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	997.264.000,00	1.173.740.800,00	100,00	896.848.901,00	76,41	276.891.899,00	23,59
1	Peningkatan Produksi Peternakan	997.264.000,00	943.740.800,00	100,00	720.664.120,00	76,36	223.076.680,00	23,64
2	Demplot Integrasi Sapi Jagung		230.000.000,00	100,00	176.184.781,00	76,60	53.815.219,00	23,40



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>28.602.684.640,00</b>	<b>27.047.738.721,00</b>	<b>91,32</b>	<b>23.871.131.145,00</b>	<b>88,26</b>	<b>3.176.607.576,00</b>	<b>11,74</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>18.411.704.640,00</b>	<b>17.655.472.721,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.358.547.500,00</b>	<b>86,99</b>	<b>2.296.925.221,00</b>	<b>13,01</b>
a	Gaji dan Tunjangan	9.229.160.640,00	8.600.208.721,00	100,00	8.354.353.500,00	97,14	245.855.221,00	2,86
b	Tambahan Penghasilan PNS	9.182.544.000,00	9.055.264.000,00	100,00	7.004.194.000,00	77,35	2.051.070.000,00	22,65
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.190.980.000,00</b>	<b>9.392.266.000,00</b>	<b>82,63</b>	<b>8.512.583.645,00</b>	<b>90,63</b>	<b>879.682.355,00</b>	<b>9,37</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.979.980.000,00</b>	<b>2.560.636.330,00</b>	<b>89,53</b>	<b>2.285.192.568,00</b>	<b>89,24</b>	<b>275.443.762,00</b>	<b>10,76</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	25.500.000,00	37,88	9.660.000,00	37,88	15.840.000,00	62,12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000,00	109.500.000,00	90,00	89.609.884,00	81,84	19.890.116,00	18,16
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149.430.000,00	149.430.000,00	95,00	132.120.000,00	88,42	17.310.000,00	11,58
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40.000.000,00	36.000.000,00	100,00	34.205.000,00	95,01	1.795.000,00	4,99
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	47.800.000,00	40.000.000,00	75,00	24.500.500,00	61,25	15.499.500,00	38,75
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	106.400.000,00	88.400.000,00	100,00	81.512.500,00	92,21	6.887.500,00	7,79
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	54.000.000,00	100,00	46.300.000,00	85,74	7.700.000,00	14,26
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	25.000.000,00	75,00	6.820.000,00	27,28	18.180.000,00	72,72
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00	100,00	-	-
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.780.000,00	10.780.000,00	75,00	7.906.000,00	73,34	2.874.000,00	26,66
11	Penyediaan makanan dan Minuman	34.700.000,00	30.000.000,00	100,00	28.539.000,00	95,13	1.461.000,00	4,87
12	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	339.339.674,00	96,95	10.660.326,00	3,05
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	286.090.000,00	286.090.000,00	100,00	286.000.000,00	99,97	90.000,00	0,03
14	Koordinasi, Konsolidasi dalam daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.503.093,00	99,67	496.907,00	0,33
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPT KPH	1.561.580.000,00	1.198.736.330,00	95,00	1.041.976.917,00	86,92	156.759.413,00	13,08
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>557.620.000,00</b>	<b>553.620.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>517.027.500,00</b>	<b>93,39</b>	<b>36.592.500,00</b>	<b>6,61</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	49.000.000,00	45.000.000,00	100,00	42.050.000,00	93,44	2.950.000,00	6,56
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	173.000.000,00	173.000.000,00	100,00	172.670.000,00	99,81	330.000,00	0,19
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	335.620.000,00	335.620.000,00	100,00	302.307.500,00	90,07	33.312.500,00	9,93

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152.383.810,00</b>	<b>84,66</b>	<b>7.616.190,00</b>	<b>4,76</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	180.000.000,00	160.000.000,00	100,00	152.383.810,00	95,24	7.616.190,00	4,76
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>246.115.000,00</b>	<b>208.615.000,00</b>	<b>92,50</b>	<b>183.476.900,00</b>	<b>74,55</b>	<b>25.138.100,00</b>	<b>12,05</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.265.000,00	151.265.000,00	95,00	136.936.900,00	90,53	14.328.100,00	9,47
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	59.850.000,00	57.350.000,00	90,00	46.540.000,00	81,15	10.810.000,00	18,85
<b>E</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>1.466.025.000,00</b>	<b>1.049.191.000,00</b>	<b>88,33</b>	<b>944.470.463,00</b>	<b>64,42</b>	<b>104.720.537,00</b>	<b>9,98</b>
1	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	384.750.000,00	367.879.000,00	100,00	367.879.000,00	100,00	-	-
2	Pengembangan Gaharu	464.589.000,00	181.460.000,00	50,00	130.613.520,00	71,98	50.846.480,00	28,02
3	Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri	114.455.000,00	82.845.000,00	100,00	79.567.500,00	96,04	3.277.500,00	3,96
4	Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	318.206.000,00	250.000.000,00	85,00	203.825.890,00	81,53	46.174.110,00	18,47
5	Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	80.120.000,00	68.102.000,00	95,00	63.680.353,00	93,51	4.421.647,00	6,49
6	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan	103.905.000,00	98.905.000,00	100,00	98.904.200,00	100,00	800,00	0,00
<b>F</b>	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>2.537.180.000,00</b>	<b>2.217.088.000,00</b>	<b>77,50</b>	<b>1.952.484.070,00</b>	<b>76,95</b>	<b>264.603.930,00</b>	<b>11,93</b>
1	Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD)	250.460.000,00	210.000.000,00	25,00	44.224.940,00	21,06	165.775.060,00	78,94
2	Penanaman dan Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	535.000.000,00	507.300.000,00	100,00	499.510.100,00	98,46	7.789.900,00	1,54
3	Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	108.550.000,00	103.550.000,00	100,00	102.534.180,00	99,02	1.015.820,00	0,98
4	Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	211.000.000,00	150.000.000,00	85,00	107.959.450,00	71,97	42.040.550,00	28,03
5	Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	1.151.630.000,00	1.005.698.000,00	80,00	962.385.300,00	95,69	43.312.700,00	4,31
6	Pucak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	280.540.000,00	240.540.000,00	75,00	235.870.100,00	98,06	4.669.900,00	1,94
<b>G</b>	<b>Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>	<b>1.476.450.000,00</b>	<b>1.272.553.670,00</b>	<b>97,50</b>	<b>1.224.398.010,00</b>	<b>82,93</b>	<b>48.155.660,00</b>	<b>3,78</b>
1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	188.720.000,00	138.120.000,00	100,00	136.491.350,00	98,82	1.628.650,00	1,18
2	Peningkatan Fungsi Polisi Hutan	464.320.000,00	454.320.000,00	100,00	454.239.400,00	99,98	80.600,00	0,02
3	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	145.330.000,00	120.330.000,00	100,00	119.476.000,00	99,29	854.000,00	0,71
4	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan	180.800.000,00	152.843.670,00	80,00	109.658.670,00	71,75	43.185.000,00	28,25
5	Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	190.420.000,00	128.920.000,00	100,00	128.278.990,00	99,50	641.010,00	0,50
6	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	135.225.000,00	119.029.000,00	100,00	118.537.600,00	99,59	491.400,00	0,41

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95.485.000,00	88.416.000,00	100,00	87.141.000,00	98,56	1.275.000,00	1,44
8	Inventarisasi Ekosistem Esensial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76.150.000,00	70.575.000,00	100,00	70.575.000,00	100,00	-	-
<b>H</b>	<b>Program : Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>	<b>747.610.000,00</b>	<b>1.370.562.000,00</b>	<b>98,33</b>	<b>1.253.150.324,00</b>	<b>167,62</b>	<b>117.411.676,00</b>	<b>8,57</b>
1	Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	180.780.000,00	155.780.000,00	100,00	149.916.314,00	96,24	5.863.686,00	3,76
2	Monitoring dan Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	133.025.000,00	127.025.000,00	100,00	122.762.000,00	96,64	4.263.000,00	3,36
3	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	105.600.000,00	100.600.000,00	95,00	91.342.400,00	90,80	9.257.600,00	9,20
4	Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan	59.520.000,00	57.520.000,00	100,00	54.370.000,00	94,52	3.150.000,00	5,48
5	Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan Melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan	139.150.000,00	133.150.000,00	100,00	124.530.870,00	93,53	8.619.130,00	6,47
6	Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan	75.930.000,00	70.852.000,00	100,00	70.762.940,00	99,87	89.060,00	0,13
7	Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang IPPKH	53.605.000,00	51.605.000,00	90,00	46.280.600,00	89,68	5.324.400,00	10,32
8	Musyawarah Nasional Forum Gaharu Indonesia	-	524.030.000,00	100,00	467.550.000,00	89,22	56.480.000,00	10,78
9	Penyelesaian Penyediaan Sumber Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA)	-	150.000.000	100,00	125.635.200	83,76	24.364.800	16,24

# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>23.610.380.769,00</b>	<b>21.381.828.983,00</b>	<b>95,26%</b>	<b>19.243.684.769,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>2.138.144.214,00</b>	<b>10,00</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>13.399.319.769,00</b>	<b>12.200.137.983,00</b>	<b>99,00%</b>	<b>11.315.547.312,00</b>	<b>92,75%</b>	<b>884.590.671,00</b>	<b>7,25</b>
a	Gaji dan Tunjangan	7.041.239.769,00	6.515.353.983,00	100,00%	6.027.434.312,00	92,51%	487.919.671,00	7,49
b	Tambahan Penghasilan PNS	6.358.080.000,00	5.684.784.000,00	98,00%	5.288.113.000,00	93,02%	396.671.000,00	6,98
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.211.061.000,00</b>	<b>9.181.691.000,00</b>	<b>91,52%</b>	<b>7.928.137.457,00</b>	<b>86,35%</b>	<b>1.253.553.543,00</b>	<b>13,65</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>3.651.880.000,00</b>	<b>2.085.320.000,00</b>	<b>92,15%</b>	<b>1.956.914.187,00</b>	<b>93,84%</b>	<b>128.405.813,00</b>	<b>6,16</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00%	15.507.000,00	99,40%	93.000,00	0,60
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	264.000.000,00	100,00%	185.304.562,00	70,19%	78.695.438,00	29,81
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	228.690.000,00	176.130.000,00	98,00%	171.240.000,00	97,22%	4.890.000,00	2,78
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00%	17.925.000,00	99,58%	75.000,00	0,42
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	141.000.000,00	141.000.000,00	100,00%	140.085.400,00	99,35%	914.600,00	0,65
6	Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00%	58.012.864,00	89,25%	6.987.136,00	10,75
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%	4.125.000,00	63,46%	2.375.000,00	36,54
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	38.570.000,00	96,43%	1.430.000,00	3,58
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00%	22.637.500,00	58,04%	16.362.500,00	41,96
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	420.000.000,00	470.000.000,00	100,00%	465.674.518,00	99,08%	4.325.482,00	0,92
11	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	543.490.000,00	550.090.000,00	100,00%	539.000.000,00	97,98%	11.090.000,00	2,02
12	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah	150.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	298.832.343,00	99,61%	1.167.657,00	0,39
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPTD	1.634.600.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>932.390.000,00</b>	<b>961.030.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>804.082.203,00</b>	<b>83,67%</b>	<b>156.947.797,00</b>	<b>0,16</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	178.500.000,00	227.140.000,00	100,00%	220.177.750,00	96,93%	6.962.250,00	0,03
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Penyediaan Pencetakan Peta	444.410.000,00	424.410.000,00	100,00%	394.107.626,00	92,86%	30.302.374,00	0,07
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	269.880.000,00	269.880.000,00	100,00%	168.456.827,00	62,42%	101.423.173,00	0,38
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00%	21.340.000,00	53,89%	18.260.000,00	0,46
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.605.946,00</b>	<b>72,61%</b>	<b>27.394.054,00</b>	<b>0,27</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	72.605.946,00	72,61%	27.394.054,00	0,27

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>258.665.000,00</b>	<b>136.865.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.028.250,00</b>	<b>81,12%</b>	<b>25.836.750,00</b>	<b>0,19</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.215.000,00	69.415.000,00	100,00%	57.120.250,00	82,29%	12.294.750,00	0,18
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	67.450.000,00	100,00%	53.908.000,00	79,92%	13.542.000,00	0,20
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>3.867.145.000,00</b>	<b>4.150.145.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>3.409.764.439,00</b>	<b>82,16%</b>	<b>740.380.561,00</b>	<b>0,18</b>
1	Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.565.810.000,00	2.378.810.000,00	100,00%	2.373.123.386,00	99,76%	5.686.614,00	0,00
2	Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	191.925.000,00	191.925.000,00	100,00%	190.488.181,00	99,25%	1.436.819,00	0,01
3	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	260.410.000,00	260.410.000,00	100,00%	245.236.342,00	94,17%	15.173.658,00	0,06
4	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DAK)	849.000.000,00	849.000.000,00	100,00%	575.135.000,00	67,74%	273.865.000,00	0,32
5	Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik	-	235.000.000,00	5,00%	13.045.930,00	5,55%	221.954.070,00	0,94
6	Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi	-	235.000.000,00	5,00%	12.735.600,00	5,42%	222.264.400,00	0,95
<b>F</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI</b>	<b>191.100.000,00</b>	<b>191.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.052.000,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koordinasi Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM	191.100.000,00	191.100.000,00	100,00%	191.052.000,00	99,97%	48.000,00	0,00
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN ESDM DAN AIR TANAH</b>	<b>464.491.000,00</b>	<b>580.041.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>443.271.026,00</b>	<b>76,42%</b>	<b>136.769.974,00</b>	<b>0,24</b>
1	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	223.729.000,00	363.574.000,00	80,00%	232.602.366,00	63,98%	130.971.634,00	0,36
2	Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88.078.000,00	88.078.000,00	100,00%	86.462.643,00	98,17%	1.615.357,00	0,02
3	Penyajian Data dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral	152.684.000,00	128.389.000,00	100,00%	124.206.017,00	96,74%	4.182.983,00	0,03
<b>H</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH</b>	<b>745.390.000,00</b>	<b>977.190.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>939.419.406,00</b>	<b>96,13%</b>	<b>37.770.594,00</b>	<b>0,04</b>
1	Optimilisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum	144.170.000,00	123.170.000,00	100,00%	107.207.509,00	87,04%	15.962.491,00	0,13
2	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	42.012.200,00	84,02%	7.987.800,00	0,16
3	Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan	447.275.000,00	422.275.000,00	100,00%	420.765.716,00	99,64%	1.509.284,00	0,00
4	Verifikasi, Evaluasi Terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL)	103.945.000,00	103.945.000,00	100,00%	103.544.571,00	99,61%	400.429,00	0,00
5	Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah	-	277.800.000,00	100,00%	265.889.410,00	95,71%	11.910.590,00	0,04



# LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA DINAS</b>		<b>23.464.869.693,41</b>	<b>20.828.379.320,00</b>	<b>97,02</b>	<b>19.653.708.827,00</b>	<b>94,36</b>	<b>1.174.670.493,00</b>	<b>5,64</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>12.177.485.993,41</b>	<b>10.640.113.464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.213.941.320,00</b>	<b>95,99</b>	<b>426.172.144,00</b>	<b>4,17</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	6.692.861.993,41	5.552.017.464,00	100,00	5.432.783.320,00	97,85	119.234.144,00	2,15
	b. Tambahan Penghasilan PNS	5.484.624.000,00	5.088.096.000,00	100,00	4.781.158.000,00	93,97	306.938.000,00	6,03
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.287.383.700,00</b>	<b>10.188.265.856,00</b>	<b>94,04</b>	<b>9.439.767.507,00</b>	<b>92,65</b>	<b>748.498.349,00</b>	<b>7,35</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.138.560.000,00</b>	<b>2.078.560.000,00</b>	<b>99,36</b>	<b>2.030.225.647,00</b>	<b>97,67</b>	<b>48.334.353,00</b>	<b>2,33</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	12.022.150,00	70,72	4.977.850,00	29,28
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.000.000,00	141.000.000,00	100,00	131.635.844,00	93,36	9.364.156,00	6,64
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	141.570.000,00	141.570.000,00	100,00	130.770.000,00	92,37	10.800.000,00	7,63
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	15.600.000,00	100,00	-	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	115.500.000,00	115.500.000,00	100,00	114.921.400,00	99,50	578.600,00	0,50
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	39.990.150,00	99,98	9.850,00	0,02
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	11.765.000,00	84,04	2.235.000,00	15,96
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.000.000,00	26.000.000,00	92,31	21.420.000,00	82,38	4.580.000,00	17,62
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	26.435.000,00	74,68	8.965.000,00	25,32
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	410.000.000,00	410.000.000,00	100,00	409.908.703,00	99,98	91.297,00	0,02
11	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	972.490.000,00	972.490.000,00	99,99	965.800.000,00	99,31	6.690.000,00	0,69
12	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.957.400,00	99,97	42.600,00	0,03
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>450.870.000,00</b>	<b>820.283.000,00</b>	<b>93,51</b>	<b>693.975.840,00</b>	<b>84,60</b>	<b>126.307.160,00</b>	<b>15,40</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	195.430.000,00	180.430.000,00	98,27	165.859.600,00	91,92	14.570.400,00	8,08
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.000.000,00	313.413.000,00	75,75	203.063.240,00	64,79	110.349.760,00	35,21
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	118.440.000,00	298.440.000,00	100,00	298.391.000,00	99,98	49.000,00	0,02
4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	26.662.000,00	95,22	1.338.000,00	4,78
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>141.528.000,00</b>	<b>130.528.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128.342.047,00</b>	<b>98,33</b>	<b>2.185.953,00</b>	<b>1,70</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	119.003.458,00	99,17	996.542,00	0,83
2	Penilaian Angka Kredit	21.528.000,00	10.528.000,00	100,00	9.338.589,00	88,70	1.189.411,00	11,30
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>284.465.000,00</b>	<b>238.965.000,00</b>	<b>99,22</b>	<b>210.169.300,00</b>	<b>87,95</b>	<b>28.795.700,00</b>	<b>13,70</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	217.015.000,00	179.165.000,00	98,74	153.820.100,00	85,85	25.344.900,00	14,15

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	59.800.000,00	99,69	56.349.200,00	94,23	3.450.800,00	5,77
<b>E</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>1.887.690.000,00</b>	<b>1.872.211.000,00</b>	<b>78,52</b>	<b>1.725.593.828,00</b>	<b>92,17</b>	<b>146.617.172,00</b>	<b>8,50</b>
1	Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP	202.415.000,00	112.810.000,00	100,00	112.096.400,00	99,37	713.600,00	0,63
2	Sertifikasi Halal, Haki dan Uji Nutrisi dan Penyuluhan Keamanan untuk PIRT	292.385.000,00	590.447.000,00	100,00	545.588.851,00	92,40	44.858.149,00	7,60
3	Pemberdayaan Klinik Kemasan	232.235.000,00	187.235.000,00	100,00	181.514.758,00	96,94	5.720.242,00	3,06
4	Promosi Produk IKM di Event Nasional	886.000.000,00	548.464.000,00	100,00	547.954.759,00	99,91	509.241,00	0,09
5	Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah	74.055.000,00	69.255.000,00	100,00	67.946.110,00	98,11	1.308.890,00	1,89
6	Pengembangan Furniture Batang Kelapa	132.980.000,00	96.930.000,00	100,00	90.162.750,00	93,02	6.767.250,00	6,98
7	Pojok OVOP di Pasar Modern	67.620.000,00	-	-	-	-	-	-
8	Pengadaan Bantuan Alat Pengolahan Terasi	-	87.070.000,00	6,71	3.490.000,00	4,01	83.580.000,00	95,99
9	Sosialisasi e-Commerce bagi Pelaku Industri	-	180.000.000,00	100,00	176.840.200,00	98,24	3.159.800,00	1,76
<b>F</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>436.570.700,00</b>	<b>475.570.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>448.197.464,00</b>	<b>94,24</b>	<b>27.372.536,00</b>	<b>6,11</b>
1	Pembinaan Produk OVOP	140.455.000,00	108.105.000,00	100,00	103.705.400,00	95,93	4.399.600,00	4,07
2	Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka Belitung	98.965.000,00	68.965.000,00	100,00	50.894.420,00	73,80	18.070.580,00	26,20
3	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi	197.150.700,00	298.500.000,00	100,00	293.597.644,00	98,36	4.902.356,00	1,64
<b>G</b>	<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b>	<b>40.015.000,00</b>	<b>19.985.000,00</b>	<b>62,06</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>46,99</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>112,83</b>
1	Pendataan Industri Besar/IAMT	40.015.000,00	19.985.000,00	62,06	9.390.000,00	46,99	10.595.000,00	53,01
<b>H</b>	<b>Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)</b>	<b>215.291.000,00</b>	<b>119.743.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117.141.500,00</b>	<b>97,83</b>	<b>2.601.800,00</b>	<b>2,22</b>
1	Pengembangan Industri Berbasis Gaharu (Minyak Atsiri) di Kabupaten Bangka Tengah	140.070.000,00	57.972.300,00	100,00	57.872.300,00	99,83	100.000,00	0,17
2	Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kabupaten Bangka	75.221.000,00	61.771.000,00	100,00	59.269.200,00	95,95	2.501.800,00	4,05
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan</b>	<b>1.025.152.000,00</b>	<b>966.184.000,00</b>	<b>99,98</b>	<b>913.520.740,00</b>	<b>94,55</b>	<b>52.663.260,00</b>	<b>5,76</b>
1	Sekretariat Dekranasda	503.202.000,00	501.502.000,00	100,00	487.507.840,00	97,21	13.994.160,00	2,79
2	Gelar Produk Kerajinan	260.525.000,00	231.512.000,00	100,00	211.061.400,00	91,17	20.450.600,00	8,83
3	Pelatihan Kerajinan di Desa Wisata	176.275.000,00	148.020.000,00	100,00	130.805.000,00	88,37	17.215.000,00	11,63
4	Rumah Rajutan	85.150.000,00	85.150.000,00	99,91	84.146.500,00	98,82	1.003.500,00	1,18
<b>J</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>518.550.000,00</b>	<b>341.412.556,00</b>	<b>100,00</b>	<b>301.580.331,00</b>	<b>88,33</b>	<b>39.832.225,00</b>	<b>13,21</b>
1	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	236.330.000,00	196.330.000,00	100,00	175.105.520,00	89,19	21.224.480,00	10,81
2	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	33.780.000,00	3.780.000,00	100,00	2.740.000,00	72,49	1.040.000,00	27,51
3	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	53.990.000,00	126.000.000,00	100,00	108.432.255,00	86,06	17.567.745,00	13,94
4	Akreditasi Laboratorium Kalibrasi UPTD BSPM	142.950.000,00	15.302.556,00	100,00	15.302.556,00	100,00	-	-
5	Pelayanan Online UPTD BSPM	51.500.000,00	-	-	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>K</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>993.300.000,00</b>	<b>2.668.787.000,00</b>	<b>97,29</b>	<b>2.511.516.117,00</b>	<b>94,11</b>	<b>157.270.883,00</b>	<b>6,26</b>
1	Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	325.520.000,00	2.138.480.000,00	100,00	2.030.966.956,00	94,97	107.513.044,00	5,03
2	Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM	48.120.000,00	48.120.000,00	89,09	41.331.646,00	85,89	6.788.354,00	14,11
3	Verifikasi Data Ekspor dan Impor	50.020.000,00	50.020.000,00	98,20	36.292.267,00	72,56	13.727.733,00	27,44
4	Verifikasi Ekspor Timah	319.900.000,00	219.900.000,00	100,00	204.362.490,00	92,93	15.537.510,00	7,07
5	Pelatihan Prosedur Ekspor	103.750.000,00	66.277.000,00	96,42	57.462.650,00	86,70	8.814.350,00	13,30
6	Monitoring Mutu Lada Putih, CPO dan Karet	145.990.000,00	145.990.000,00	100,00	141.100.108,00	96,65	4.889.892,00	3,35
<b>L</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>3.155.392.000,00</b>	<b>456.037.000,00</b>	<b>98,57</b>	<b>350.114.693,00</b>	<b>76,77</b>	<b>105.922.307,00</b>	<b>30,25</b>
1	Koordinasi Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	199.807.000,00	456.037.000,00	98,57	350.114.693,00	76,77	105.922.307,00	23,23
2	Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	2.955.585.000,00	-	-	-	-	-	-